M ALFAN ALFIAN

RASHOMON DALAM LABIRIN POLITIK INDONESIA

ESAI-ESAI
SOSIAL POLITIK
DAN KEBUDAYAAN

Ditulis apik dengan kacamata Ilmuwan politik yang futuristik
- **DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK**

Menggambarkan dinamika dan episode politik Indonesia yang belum bergeser dari episode *Rashomon* - **UBEDILAH BADRUN**

Akbar Tandjung
Institute

RASHOMON DALAM LABIRIN POLITIK INDONESIA

Kutipan Pasal 72
UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

RASHOMON DALAM LABIRIN POLITIK INDONESIA

ESAI-ESAI SOSIAL POLITIK
DAN KEBUDAYAAN

M ALFAN ALFIAN

PENERBIT PENJURU ILMU

RASHOMON DALAM LABIRIN POLITIK INDONESIA:
ESAI-ESAI SOSIAL POLITIK DAN KEBUDAYAAN
Oleh: **M Alfan Alfian**

Kaver dan Isi: Tim design PENJURU ILMU

Cetakan 1, 2018
Diterbitkan oleh PENERBIT PENJURU ILMU
Jl Matahari 76, Jatibening Permai,
Pondok Gede, Bekasi 17412
Email: penjuruilmu@yahoo.com
Twitter: @penjuruilmu

Distributor :
PT. Serambi Distribusi
Jl. Jeruk Purut No.51, RT 05/03 Jakarta Selatan
Tlp. 021-7883 3908 dan 021-781 5631

ISBN : **978-602-0967-04-2**

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

Kumpulan Komentar

MENULIS di koran, apalagi koran *Kompas*, tidaklah mudah. Hanya tulisan dengan bobot dan kualifikasi tertentu yang bisa lolos dan dimuat di sana. Tulisan-tulisan Alfan Alfian bukan hanya satu-dua yang lolos di sana, melainkan ratusan! Dari sudut jumlah tulisan ini saja, orang sudah bisa menunjukkan di mana posisi kolumnis muda satu ini dalam jagad intelektualisme Indonesia saat ini

- **HAJRIYANTO Y THOHARI**, Tokoh Muhammadiyah, Politisi Partai Golkar, Mantan Ketua MPR-RI

MEMBACA Alfan Alfian adalah membaca sketsa politik Indonesia. Sebagai akademisi *cum* pengamat politik, ia menempuh jalan sunyi dengan terus menggoreskan pena dan menulis. Ketimbang menyampaikan gagasannya melalui televisi, Alfan nampaknya lebih memilih jalan menulis. Tulisannya tajam, termasuk sebagaimana yang terkumpul dalam buku *Rashomon dalam Labirin Politik Indonesia* ini. Dari kumpulan tulisan yang dibukukan ini, jelas sekali bagaimana Alfan konsen membaca dan menunjukkan apa yang disebut sebagai "centang-perenang, karut-marut, dan koyak-moyak" politik di Indonesia. Sebuah ikhtiar yang patut diacungi jempol sebagai salah satu wahana dan bekal membaca masa lalu guna menatap masa depan dengan penuh optimisme

- **H. A. HELMY FAISHAL ZAINI**, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar *Nahdlatul Ulama* (PB NU)

QUO vadis Indonesia? Agaknya itulah pertanyaan yang terus-menerus muncul dalam benak penulis buku ini melihat jalannya Indonesia yang bak *labirin*. Bukan hanya rumit, berliku, dan sarat jalan buntu, melainkan juga tak jelas alias kabur. Setelah tiga puluh dua tahun terpasung, jalannya demokrasi dan pembangunan Indonesia tak ubahnya seperti *air bah* yang

mengalir tak berarah. Lewat kumpulan tulisan-tulisan pendeknya yang dibukukan ini, M. Alfan Alfian mencoba meluruskan aliran-aliran yang tak tentu arahnya tersebut. Buku yang membahas beragam topik seperti sosial, politik, dan kebudayaan ini menarik untuk dibaca bukan saja karena bahasanya yang lugas, apik dan mudah dicerna, melainkan juga karena gagasan dan kritiknya yang segar dan inspiratif

- **R. SITI ZUHRO,** Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Presidium Majelis Nasional KAHMI

RASHOMON dalam Labirin Politik Indonesia merupakan sebuah "referensi pengingat" tentang "biografi" perpolitikan Indonesia. Potret dinamika politik Indonesia yang disajikan oleh seorang artikelis dengan unik, ekspresif, responsif, komunikatif dan kritis, sangat berguna bagi berbagai kalangan pembaca. Sebuah karya tambahan dalam koleksi pustaka politik Indonesia

– **TRULY WANGSALEGAWA,** Dekan FISIP Universitas Nasional, Jakarta

KUMPULAN artikel yang terangkum dalam buku *Rashomon Dalam Labirin Politik Indonesia* karya Dr. M. Alfan Alfian ini merupakan potret tentang dinamika perjalanan politik Indonesia pasca-Orde Baru yang masih carut-marut. Dengan membaca buku ini, kita akan mengetahui bagaimana lintasan peristiwa dan/atau isu-isu aktual sosial politik sepanjang 1999 sampai akhir 2017. Dengan bahasa yang ringan tapi bernas, Alfian mencoba merespons setiap peristiwa politik yang terjadi di Era Reformasi. Tampaknya, dengan kita membaca buku ini, menyiratkan bahwa perjalanan demokrasi kita masih penuh dengan absurditas akibat perilaku elite politik yang cenderung *haus kekuasaan*

– **LILI ROMLI**, Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

LAHIRNYA sejumlah lembaga survei sejak lima belas tahun lalu, selain telah menambah varian pendekatan dalam studi politik Indonesia, juga mempengaruhi wajah pengamat politik di tanah air. Sejak periode tersebut, hampir semua pengamat politik yang eksis di media umumnya berasal dari lembaga-lembaga survei. Sayangnya, meskipun di satu sisi analisis berbasis

survei bisa lebih faktual dalam menjelaskan perilaku politik, namun karena umumnya lembaga survei merangkap konsultan politik, ada problem serius dalam kehadiran pendekatan tersebut. Persis di situ, kita tetap membutuhkan pengamat dengan pendekatan "klasikal". Alfan Alfian salah satunya.

Sesudah generasi Deliar Noer, Alfian, Burhan Magenda, Fachry Ali, Riswandha Imawan, hingga Afan Gaffar, dalam sepuluh tahun terakhir, tak diragukan lagi tidak ada pengamat politik Indonesia yang lebih produktif dari Alfan Alfian. Berbeda dengan para pengamat lembaga survei, yang lebih banyak mengemukakan analisisnya melalui presentasi, Alfan Alfian konsisten menuliskan analisisnya. Selain menuliskannya dalam berbagai kolom media nasional, publikasi bukunya juga mengalir deras.

Pilihan judul *Rashomon*, yang dipinjam dari judul film legendaris Akira Kurosawa (1950), secara karikatural mewakili bagaimana karakter analisis politik terhadap realitas politik di era lembaga survei sekarang ini. Sebagaimana halnya *Rashomon*, satu peristiwa sangat bisa melahirkan sejumlah sudut pandang kesaksian, tergantung kepentingan para penyaksinya. Begitu halnya peristiwa politik. Untuk memahami realitas politik Indonesia dengan jernih, kita butuh mendengarkan banyak saksi. Salah satu yang sangat pantas didengarkan kesaksiannya adalah Dr. M. Alfan Alfian

— **TARLI NUGROHO,** Peneliti *Institute for Policy Studies* (IPS), Jakarta. Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam

BUKU ini penting untuk memahami bagaimana politik sebagai perjuangan kolektif berdasarkan pada keadaban publik berinteraksi dengan politik sebagai manifestasi pertarungan kuasa dan kepentingan, buku ini adalah sedikit dari rujukan yang ada untuk menjelaskannya

- **AIRLANGGA PRIBADI KUSMAN**, Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga; Tenaga Ahli Deputi Pengkajian dan Materi BPIP

SAYA kerapkali melihat kolom/esai yang ditulis akademisi sebagai cara melibatkan diri secara langsung dan konstan dengan pembaca umum (popular), tak ingin ada jarak atau distingsi alih-alih memosisikan dirinya di menara gading sebagai intelektual. Sebagai konsumsi publik yang luas, tulisan-tulisan tersebut dituntut harus dekat, akrab dan diterima khalayak, dan tentu saja perlu segar, jernih dan menyuntikkan nafas-nafas baru yang humanis.

Dr. Alfian sedikit dari kolumnis yang selalu coba bereksplorasi liar demi menyajikan tulisan-tulisan bertenaga dengan memakai disiplin sastra, misalnya seni memilih diksi dan cara menyisipkan narasi dengan menghadirkan *Rashomon* (tokoh ciptaan sastrawan Jepang, Akutagawa) ataupun cuplikan Sutan Takdir Alisjahbana. Akhirnya, isu-isu sosial-politik yang keras, tegang, sekaligus kering, di tangan doktor politik yang bacaannya hingga ke karya-karya sastra klasik ini menjadi bahasan asyik mengasyikkan. Membaca kolom-kolom ini mengingatkan saya kepada Gus Dur, Kuntowijoyo, Kang Sobary dan Mahbub Djunaidi, tetapi dengan pendalaman khusus di ranah kajian politik. Alfian sebagai dosen politik setia kepada ranah akademis yang telah mencetaknya menjadi analis seperti sekarang. *Rashomon dalam Labirin Politik Indonesia* adalah karya yang layak dibaca, sekaligus dipajang di rak-rak buku terdepan pembaca yang budiman

- **BERNANDO J. SUJIBTO**, sastrawan dan alumni master Sosiologi dari *Selcuk University*, Konya-Turki. Peneliti dan penulis kajian sosiologi sastra dan kebudayaan Turki

RUPA-RUPA tulisan Mas Alfan ini menyingkap absurditas dan kadang-kadang kekonyolan dunia politik kita. Pun demikian, tulisan ini menghadirkan harapan, bahwa panggung politik tanah air masih menyimpan keceriaan dan kegembiraan, yakni kuatnya demokrasi politik yang tengah dibangun dan dituju. Esai sosial politik dan kebudayaan ini merupakan refleksi kritis historis, sekaligus artefak biografis karir intelektual politik muda kita. Lain dengan esai ilmuwan politik lain, tulisan-tulisan Mas Alfan dibungkus perspektif kebudayaan yang sangat kuat, sehingga sajian analisisnya renyah, nyaman dicerna dan membuat kita tetap gembira dan optimis membaca realitas politik kita

– **ANDAR NUBOWO,** Intelektual Muda Muhammadiyah

SAYA menikmati kerenyahan dan kedalaman rasa dari esai-esai Mas Alfan Alfian ini dalam satu paket WANATUM yaitu peristiwa, fenomena, dan momentum, khususnya pada wilayah politik dan kebudayaan Indonesia. Setiap episode (1999-2017), saya nikmati dengan melemparkan diri ke masa lalu sejak awal Reformasi hingga saat ini. Maka, teramulah kata, kalimat, dan paragraf yang membuat pembaca menyunggingkan senyum simpul atau bahkan kecut terhadap lakon perpolitikan di Tanah Air. Namun, di satu sisi ada selipan optimistis untuk tetap percaya masa depan

Indonesia yang lebih baik. Di luar itu, produktivitas Mas Alfan Alfian sebagai penulis sangat mencengangkan. Tulisan-tulisannya, termasuk yang menghiasi bingkai buku ini, lugas, jelas, dan berpegas untuk melentingkan pikiran pembacanya. Ini teladan menulis yang genial (kecerdasan alur pikir luar biasa) untuk generasi milenial

- **BAMBANG TRIM**, Ketua Umum Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia (Penpro)

SEJAK awal 2000-an, saya senantiasa menyempatkan diri membaca artikel-artikel Alfan Alfian di kolom opini *Kompas*. Selain mengetahui sosoknya, saya merasakan kesenangan membaca tulisannya yang menjadi jendela melihat kehidupan politik kontemporer Indonesia. Saya selalu ingin tahu apa yang dipikirkan kalangan intelektual Indonesia tentang demokrasi, dan tulisannya secara konsisten memberikan gambaran itu. Kalau Alfian menggunakan *Rashomon* sebagai judul buku ini, saya membayangkan memang keadilan secara filosofis senantiasa tampil dalam serangkaian kontradiksinya dari sudut pandang berbeda. Kontradiksi ini pula yang membuat pembicaraan tentang demokrasi selalu menarik. Buku ini enak dibaca dari awal sampai akhir.

- **ANDI ACHDIAN,** Sejarawan. Editor Jurnal *Sejarah* Masyarakat Sejarawan Indonesia

BUKU ini secara menarik menceritakan episode sejarah dalam konstelasi sosial politik Indonesia pasca-Orde Baru hingga saat ini. Dengan menggunakan bahasa ringan namun elegan, buku ini berhasil menarik minat pembaca awam politik untuk melihat bagaimana dinamika elite maupun relasi negara dan masyarakat secara lebih jernih melalui serangkaian isu dan topik dalam tulisan ini. Buku ini direkomendasikan untuk dibaca bagi publik luas yang ingin melihat intrik, strategi, maupun juga relasi politik Indonesia

– **WASISTO RAHARJO JATI,** Staf Peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)

BUKU ini menarik bukan hanya karena gaya penulisanya yang enak dicerna, tetapi juga karena Alfan Alfian mampu menggambarkan dinamika dan episode politik Indonesia sejak 1999 yang belum sepenuhnya bergeser dari episode *Rashomon*. Judul *Rashomon*, yang dipinjam dari film karya

Akira Kurosawa (1950) menggambarkan betapa konstruksi narasi dan tindakan sulit dipahami sebagai realitas yang sebenarnya. Publik disuguhkan sejumlah dramaturgi politik di setiap episodenya, hingga kemudian setelah 20 tahun pasca-jatuhnya rezim Soeharto, realitas semu yang multi tafsir itu masih mewarnai politik Indonesia, sehingga upaya menghadirkan demokrasi berkualitas sering dirusak oleh kejutan kejutan drama politik.

Lebih dari sekedar dramaturgi politik, apa yang digambarkan Alfan Alfian telah menggambarkan kesempurnaan apa yang disebut *simulacra politik*. Politik yang diproduksi oleh sebuah industri komunikasi massa yang mengaburkan fakta melalui konstruksi realitas semu secara massif. Sebuah episode industri politik yang menghadirkan pemimpin melalui proses pencitraan yang massif.

Simulacra adalah terminologi Jean Baudrillard (1929-2007), Sosiolog politik Perancis ketika menggambarkan realitas semu. Bagi Baudrilllard dalam *Simulacraand Simulation* (1981), manusia abad kontemporer hidup dalam dunia *simulacra* (gambar atau citra). Manusia hidup dalam dunia yang penuh dengan simulasi, hampir tidak ada yang nyata di luar simulasi, tidak ada yang asli yang dapat ditiru.

Kebudayaan industri menyamarkan jarak antara fakta dan informasi, informasi dan *entertainment*, *entertainment* dan kepentingan politik. Masyarakat tidak sadar akan pengaruh citra (*signs*/*simulacra*). Hal ini membuat masyarakat kerapkali – mencoba hal baru yang ditawarkan oleh keadaan simulacra – untuk membeli, bekerja, dan lain-lain termasuk misalnya memilih presiden, gubernur, walikota maupun bupati.

Catatan *Rashomon* politiknya Alfian ini merupakan narasi yang menggambarkan bagaimana para aktor politik bebas mengoyak-oyak nalar publik, dicoba dikritik lalu ditarik olehnya untuk mendekat pada kepentingan nasional, Pancasila. Narasi yang apik dan detail dalam mengungkap *Rashomon* politik selama 20 tahun membuat buku ini layak untuk dibaca siapupun yang ingin memahami lebih dalam politik Indonesia.

- **UBEDILAH BADRUN**, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol Indonesia)

BUKU yang berisi kumpulan tulisan esai Alfian yang terpublikasi di *Kompas* merupakan potret perekaman jejak perpolitikan Indonesia yang kompre-

hensif, karena ia menguraikan peristiwa awal-awal reformasi dan perjalanannya hingga tahun 2017. Apalagi di dalam tulisan ini menyajikan beragam perspektif dan kerangka analisis yang tajam perihal wajah perpolitikan Indonesia di era milenium. Tidak terlalu berlebihan bila kumpulan tulisan Alfian disebut sebagai pondasi epistemologi demokrasi yang bisa mewarnai diskursus perpolitikan ke depan. Buku ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang memiliki *concern* terhadap kajian demokrasi dan politik. Dan, membaca buku ini kita bisa memperoleh inspirasi utk menyegarkan cara pandang dan cara berpikir kita tentang politik dan demokrasi.

- **FATHORRAHMAN GHUFRON,** Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Wakil Katib Syuriyah PWNU Yogyakarta

MEMBACA buku ini, kendatipun yang diulas ragam masalah politik, kita akan menemukan kekayaan khasanah penulisnya: politik yang diuraikan melalui perspektif kebudayaan yang lebih luas. Tak berlebihan, manakala ulasan-ulasan buku ini bagian dari potret perjalanan demokrasi kita sejak Era Reformasi. Penulisnya, tak diragukan lagi, seorang Doktor Ilmu Politik yang sangat produktif dalam berkarya

- **ARIF BUDIMANTA**, Politisi PDI-P, Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR-RI

TAK banyak orang di negeri ini yang mempunyai keseriusan menangkap fenomena sosial dan praktik politik yang terjadi di Republik ini, kemudian dirangkum dalam tulisan yang renyah dan mudah dipahami. *Rashomon*, judul buku ini, mengambil karya penulis Jepang. Melalui buku ini, Alfan Alfian rupanya tidak bermaksud mengulik tindakan kejahatan politik yang ada, melainkan membangun kesadaran, dengan metafora-metafora kejadian politik tanah air dalam cerita *Rashomon* yang disuguhkan dengan diksi sederhana, namun penuh makna.

Politik negeri ini memang tidak digambarkan sebagai praktik yang penuh kecurangan, kelicikan, transaksional dan *vulgar*, namun sebaliknya dengan bahasa yang santun dan tetap terang benderang penulis menggambarkan dinamika perpolitikan di Indonesia yang semakin jauh dari praktik keadaban politik yang menghargai esensi kemanusiaan

- **LUTHFI J KURNIAWAN**, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan *Malang Corruption Watch* (MCW) dan Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang

HAMPIR tiap kali menulis kolom di Harian *Kompas*, saya selalu membacanya. Analisis dalam tulisan-tulisan Mas Alfan Alfian tajam dan seringkali mengejutkan, meski kesimpulannya selalu berhasil membumikan masalah yang pelik sekalipun

- **AIMAN WITJAKSONO**, Presenter *KompasTV*

MEMBACA buku ini, saya yang awam politik mulai dapat belajar mengenal "logika" perpolitikan Indonesia. Sebagai *orang ekonomi* yang terbiasa berkalkulasi secara rasional, saya sering sulit menemukan jawaban atas ke-*absurd*-an berbagai *parcel-parcel* perpolitikan Indonesia. Namun analisis Dr. M. Alfan Alfian mampu mengulas berbagai dinamika dan problematika perpolitikan Indonesia sebagai rangkaian cerita yang *utuh*. Pengamatannya yang jernih, obyektif, tajam dan berbasis akademik membuat pembaca dapat menemukan benang merah dan kausalitas berbagai peristiwa politik di Indonesia. Buku yang merupakan kumpulan artikel ini menjadi gabungan atas keaktualan dan keontentikan peristiwa politik di eranya menjadi satu peta atau *map* perpolitikan Indonesia.

Artikel kolom merespons peristiwa aktual, sehingga analisisnya ekspresif, segar responsif, komunikatif dan kritis. Mas Alfian mampu merekontruksinya menjadi cerita yang mengalir lugas, sebagaimana cerita film yang direplika dalam judul buku ini. Dengan *gaya bahasa sastra* yang dibumbui perspektif sosial dan kebudayaan, peristiwa politik yang menegangkan disajikan secara segar, seolah menjadi membaca cerita roman mengasyikkan

- **ENI SRI HARTATI**, Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF)

KUMPULAN esai Mas Alfian ini, di tulis dengan apik dengan kaca mata Ilmuwan politik yang futuristik, cukuplah menjadi potret rumitnya perjalanan demokrasi Indonesia. Dan, buku ini memberikan cahaya terang pusat kanker politik Indonesia bukan di masyarakatnya, coba telusuri perlahan labirin esai-esai Mas Alfian, maka kita temukan pusat kanker demokrasi Indonesia adalah *nalar politik rente* para elitenya

- **DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK**, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah/Dosen Kebijakan Publik FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

BUKU ini adalah rekaman dinamika politik pasca-reformasi, tentunya hal ini akan sangat penting bagi siapapun yang ingin mengetahui dialektika konstitusi dalam kurun waktu hampir 20 tahun pasca-reformasi. Gaya penulis yang sangat renyah dalam menyampaikan pikirannya dalam perspektif politik pasti akan sangat lezat untuk dijadikan sarapan di pagi hari dan pasti akan sangat bermanfaat menambah pengetahuan kita

- **A. IRMANPUTRA SIDIN**, Advokat dan Ahli Hukum Tata Negara

DINAMIKA politik Indonesia terekam dengan sangat baik dalam buku karya Alfan Alfian. Intelektual muda yang juga aktivis ini dikenal sebagai pengamat politik yang jeli Melihat sisi-sisi peristiwa politik yang perlu dianalisis dan tentu mencerahkan publik. Buku ini sangat penting sebagai referensi untuk melihat perjalanan politik Indonesia hingga 2017 dan sekaligus bahan pembelajaran guna perbaikan perpolitikan kita

- **ARIF SATRIA**, Rektor Institut Pertanian Bogor

KETIKA sedikit demi sedikit membaca dan menikmati bentangan pemikiran di buku *Rashomon dalam Labirin Politik Indonesia*, saya teringat kata-kata sakti Walt Disney. Menurutnya, buku bagaikan "harta karun" yang nilainya melebihi apa yang dimiliki para perompak di Pulau Harta. Saya merasakan hal itu ketika menyusuri satu demi satu tulisan yang ada di buku ini. Mas Alfan Alfian penulis bertema politik yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya memiliki spektrum luas dan berhasil memasok perspektif yang sangat kaya. Membacanya bagaikan menikmati "harta karun" yang tak ternilai harganya

- **HERNOWO HASIM**, perumus konsep "mengikat makna" serta penulis buku-buku motivasi tentang membaca dan menulis

LABIRIN Politik Indonesia ini laksana Album Nararatif ilmiah peristiwa politik penting di Indonesia sejak masa Reformasi yang disajikan secara ringan, populer, dan menarik oleh Dr Alfan Alfian. Penting dan perlu dibaca oleh Mahasiswa, Pengamat dan Politisi

- **SRI YUNANTO**, Dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

KUMPULAN artikel dalam buku *Rashomon dalam Labirin Politik Indonesia* menunjukkan talenta M Alfan Alfian dalam menera masalah-masalah

kebangsaan dan kemasyarakatan di Indonesia. Bahasanya yang tidak meledak-ledak juga mewakili karakter sang penulis yang merintis sejarah dan kredibilitas hidup dari bawah. Ia tetap konsisten dan produktif di dunia literasi, tak mabuk oleh pujian dan tak layu oleh kritikan: semangat yang harus dimiliki oleh para penulis muda yang kadang suka habis bensin dan lemah lunglai ketika tulisannya tidak diterbitkan

- **TEUKU KEMAL FASYA,** Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh dan Dewan Pakar *Nahdlatul Ulama* (NU) Aceh

BUKU *Rashomon dalam Labirin Politik Indonesia* merupaka kumpulan tulisan Dr M. Alfan Alfian yang rasanya cukup komplit memotret realita politik dari 1999 hingga 2017/8. Penulis adalah seorang akademisi, kolumnis yang sangat produktif menyampaikan gagasan aktual di media tentang peristiwa politik. Membaca buku ini, pembaca seolah tengah berselancar ke berbagai ragam isu politik *aktual*, peristiwa demi peristiwa, tahun demi tahun. Tulisan disajikan dengan bahasa yang mengalir, menggunakan berbagai metafora yang *imajinatif*, namun mudah menangkap substansi pesan-pesan keutamaan pada setiap peristiwa. Sehingga, pembaca yang melacak *jejak digital* mendalami konteks peristiwa yang ditulis, misalnya akan lebih mudah memahami pesan politik di balik peristiwa tersebut.

Satu lagi catatan yang perlu diapresiasi dari buku ini, sehingga buku ini tak lekang oleh waktu, pembaca nampaknya akan menapaki lorong "labirin" politik Indonesia. Sebuat refleksi perjalan politik masa lalu di Indonesia, namun tidak seperti labirin yang mengelabui, "labirin" Dr Alfan memberikan pesan keutamaan : keyakinan sampai ujung yang kita citakan. Tak berlebihan bila tidak hanya peminat masalah sosial politik, para peminat dunia bisnis pun perlu untuk memiliki buku ini sebagai cara untuk menjaga aura optimisme dalam "labirin"dunia bisnis yang *volatile*, *uncertain*, *complex*, *ambiguous*

- **AGUSTIAN B PRASETYA,** Direktur *Akbar Tandjung Institute*, Dosen di Universitas Bina Nusantara (Binus), Jakarta

BUKU ini saksi perjalanan sejarah politik Indonesia. Mundurnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto dari tampuk kekuasaan, digantikan Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie 21 Mei 1998, memiliki konsekuensi sistemik dalam struktur kekuasaan di Indonesia. Di satu sisi ia penanda berakhirnya kekuasaan otokratik, despotik, dan birokratik negara Orde

Baru (Winters, 2011), di sisi lain struktur kekuasaan di Indonesia memasuki bentuk-bentuk desentralistik, demokratik, dan pluralistik (Nordlholt & Klinken, 2007) dalam suatu konstelasi politik Orde Reformasi.

Gerakan reformasi mengubah seluruh fundamen format kenegaraan, baik secara institusi politik, sosial dan ekonomi, maupun perubahan mendasar hubungan rakyat dan negara (*the basis for relations between people and the state*). Perubahan yang terjadi, merupakan titik balik dari seluruh agenda reformasi, yang dihasilkan secara terbuka, inklusif, dan proses-proses dialogis dan partisipatif (*Such changes can only come about through the development of a comprehensive reform agenda, the product of an open, inclusive and participatory dialogue process* [Söderbergh, 2000]).

Buku ini berhasil merekam dengan baik peristiwa-peristiwa sebelum, selama, dan sesudah demokratisasi yang tengah terjadi dalam konstelasi politik Indonesia, suatu rangkaian drama mengenai hubungan antara warga negara dan negara, dan antarlembaga negara dalam mencari bentuk-bentuk "terbaik" dari yang paling mungkin terjadi — yang diistilahkan Alfian terekam secara *day-to-day politics* dan *timless*. Terbaik dalam pengertian ini, adalah negosiasi-negosiasi sosial dari lapangan politik yang terjadi di awal-awal usainya gerakan reformasi, serta terinstitusionalisasi dalam "sistem politik" yang kini diterapkan. Lebih tepat, Sdr. Alfan berhasil memotret pasang dan surut usaha mencari keseimbangan-keseimbangan politik hingga akhirnya jadi *platform* konstelasi politik Indonesia mutakhir

- **NUR HIDAYAT SARDINI**, Sekretaris program Doktor Ilmu Sosial Undip, Semarang. Ketua Bawaslu RI 2008-2011, dan Anggota DKPP RI 2012-2017.

PANTULAN sejarah kebangsaan dan politik Indonesia dalam membangun demokrasi masa lalu, selalu berulang untuk saat ini dan ke depan. Pantulan itu mencakup sutradara, aktor dan historianya yang meliputi panggung politik Islam, militer, partai politik, media massa, dan kelompok penekan lainnya. Buku Saudara Alfan Alfian mencerminkan itu semua, yang ditulis secara runut dan apik. Para praktisi politik, pengambil keputusan, mahasiswa dan siapapun peminat politik perlu membaca dan mencernanya untuk merekayasa politik masa depan Indonesia

– **ALI MASYKUR MUSA**, Ketua Umum Ikatan Sarjana *Nahdlatul Ulama* (ISNU)

SAYA mengenal Alfan, itu panggilan saya kepada Alfan Alfian, hanya beberapa tahun sebelum saya pensiun tahun 2003. Saya habiskan sebagian besar 28 tahun di *Kompas*, di bidang olahraga. Dalam tahun-tahun terakhir barulah saya pindah ke bidang lain yang waktu kerjanya siang, *desk* opini. Dan, ketika *desk* itu mengadakan diskusi kelompok *Indonesia Muda*, Alfan salah satu pesertanya. Saya sebagai panitia, dia peserta. Itulah awal jumpa muka dengan Alfan.

Saya yang sudah masuk *desk opini*, tentu dengan demikian sering 'bertemu' Alfan dalam tulisan-tulisan yang dia kirim. Tentu ada yang dikembalikan, ada yang diterima. Meskipun ikut menilai kelayakan sebuah tulisan, saya tidak terlalu memperhatikan perkembangan bidang lain, kecuali olahraga yang memang saya tekuni sejak saya menjadi wartawan. Apalagi juga jika diingat, tiap hari sekitar 70 tulisan masuk untuk diloloskan ke halaman opini.

Kini, membaca kembali tulisan-tulisan Alfan, termasuk yang tidak saya periksa, saya merasa kenyang: kenyang data, kenyang catatan sejarah, kenyang ilmu. Silih berganti peristiwa muncul, silih berganti kejadian terkuak, dan silih berganti opini Alfan tetulis dalam buku. Buku ini memang, sebagaimana ditulis komentator lain, menyerupai biografi politik Indonesia. Dari mulai pemilihan umum, tentara dan perannya, tokoh, termasuk yang Islam, dan riwayatnya, DPR yang terus berdinamika, partai politik yang selalu bergelora, Keindonesiaan yang selalu hidup, serta lainnya.

Alfan pantas diacungi jempol untuk semua itu. Meski perlu juga dikritik seoal bahasanya, yang kadang-kadang tidak memakai yang baku atau salah ketik dalam penulisan kata atau penyusunan kalimat. Alangkah baiknya jika ada mata lain yang memeriksa (*editor*) dan memperhatikan soal itu. Juga alangkah baiknya jika Alfan lebih berpeluh untuk membuat sebuah buku yang bukan kumpulan tulisan, seperti yang dia kerjakan untuk *Militer dan Politik di Turki*. Saya menunggu.

– **TAHIR DJAWAHIR ASMADI**, Mantan Wartawan *Kompas*

Daftar Isi

KUTIAN KOMENTAR

SEKAPUR SIRIH:

Ikhtiar Menjelaskan Dinamika Politik Indonesia dan Lain-lain/9/

I/ SEMBILAN ANCAMAN PEMILU [1999]

Sembilan Ancaman Pemilu 1999 ..... /3

Dehegemonisasi Tentara ..... /6

Pencapresan Gus Dur,
Politik Politisi *versus* Politik Ulama ..... /10

Dilema Reformasi TNI ..... /13

Memahami Polarisasi Politik Ulama ..... /15

II/ DEFISIENSI DEMOKRASI [2000]

Islam Antikekerasan, Memahami Refleksi Gus Dur ..... /23

Kongres I PDIP: Kharismatik *versus* Rasional-Obyektif ..... /28

Spiritualitas Sosial, Pluralisme dan Demokrasi ..... /31

TNI dan Wacana Politik ..... /35

Pemulihan Krisis: Idealisme *versus* Pragmatisme ..... /39

Elite *vs* Non Elite: Resistensi Elite Masa Transisi ..... /43

Kabinet Abdurrahman Wahid versus Realitas Pragmatis:
Politik Pasca-*Rhesuffle* Kabinet ..... /47

Defisiensi Demokrasi ..... /49

III/ REGENERASI TENTARA [2001]

Demokrasi dan Demassifikasi Politik ..... /55

Politik Buruh dan Jebakan Aksi Anarki ..... /58
Duet Megawati-Hamzah, Rapuh atau Kuat? ..... /60
Profesionalisme Tentara Pasca-kemelut Politik ..... /65
NU, Muhammadiyah, dan *Civil Islam* ..... /69
Kasus madiun dan Akar Konflik TNI-Polri ..... /72
Demokrasi dan Desentralisasi Korupsi ..... /76
Regenarasi Tentara ..... /80
Otonomi, Resentralisasi, dan Hegemoni Pusat-Daerah ..... /83

IV/ MOMENTUM KEBANGKITAN ISLAM MODERAT [2002]

Jenderisasi Demokrasi ..... /89
Momentum Kebangkitan Islam Moderat ..... /92
Presiden dan Pengamat ..... /96
Arus Balik Neo-konservatif dalam Perubahan UUD 1945 ..... /100
TNI dan Amandemen UUD 1945 ..... /104
Panglima Kooplihkam Datang, Maluku Aman? ..... /108
Profesionalisme dan Transparansi Tentara ..... /112
Politik Tentara Belum Berakhir ..... /117
Budaya Konflik TNI-Polri ..... /121
Terorisme, Tantangan *Civil Society* ..... /125
Menemukan Kembali Kedamaian dalam Agama ..... /128

V/ NURCHOLISH MINUS KONVENSI [2003]

Demiliterisasi dan Damai Aceh ..... /135
Kontroversi Pasal 19 Draf RUU TNI ..... /138
Balada Politik Lokal ..... /141
Konsekuensi Kesediaan Cak Nur ..... /143
Nurcholish Minus Konvensi ..... /146
Teror atas Demokrasi ..... /150
Netralitas TNI dalam Pemilu 2004 ..... /154
Sikap TNI, Bila Pemilu Gagal ..... /157

VI/ PEMERINTAHAN YANG KUAT [2004]

Tentara dan Parlemen ..... /163
Pemerintahan yang Kuat ..... /167
Lumayan ada Debat Capres ..... /170
Fenomena Dua *King Maker* ..... /173
Menuju Praktik Demokrasi Oposisional ..... /176
Reformasi TNI, Tak Cukup Sampai di Sini ..... /180
Sumpah Pemuda, Menpora, dan *Civil Society* ..... /183
Desimplifikasi Partai Golkar ..... /187
Partai Golkar Pasca-Akbar ..... /191

VIII/ BILA PARTAI PECAH [2005]

Pergantian Panglima TNI ..... /197
PDIP Pasca-Kongres ..... /200
TNI Kita yang Lemah ..... /204
Bila Parpol Pecah ..... /208
Jebakan-jebakan Politik PKS ..... /212
Damai Aceh, Harapan dan Kehati-hatian ..... /214
Ujian Kepemimpinan SBY ..... /216
Masih Perlukah Pragmatisme? ..... /218
Bangsa-Bangsa Asia Butuh Mentalitas Baru ..... /221
Kocok Ulang dan *Rhesuffle* Kabinet ..... /225

IX/ TIBA-TIBA RINDU PEMBANGUNAN [2006]

Puncak Stabilitas Politik SBY? ..... /229
Bukan Negara Polisi (Rahasia) ..... /231
Nasionalisme Kita, Siapa Mau Terjun Ambalat? ..... /233
Tak Kunjung Mimpi Pancasila ..... /237
Setelah Thaksin Mundur ..... /239
Aksi Buruh dan Kambing Hitam ..... /241
Tiba-tiba Rindu Pembangunan ..... /243
Pemerintah yang Gagal Memerintah ..... /245
Bencana dan *Political Distrust* ..... /249

Mungkinkah Golkar Oposisi? ..... /251
Mengapa Militer Thailand Kudeta? /253
Ujian Politik Partai Golkar ..... /255

X/ BILA PARTAI TANPA POLITISI [2007]

Demitologi Bencana ..... /261
Mengapa Politik Perlu? ..... /263
Bola Liar Interpelasi ..... /266
Sensasi Perombakan ..... /269
Bila Partai Tanpa Politisi ..... /271
Plus Minus Calon Perseorangan ..... /273
Pemimpin ..... /276
Bila Golkar Minus Konvensi ..... /278

XI/ PEMIMPIN PILIHAN IKLAN [2008]

Menggali Sistem Baik Masa Lalu ..... /283
Reposisi Politik PKS ..... /285
Gonjang-ganjing Politik PKB ..... /287
Tiga Wajah Parpol Kita ..... /289
Golkar dan Masa Depan SBY-JK ..... /291
Pemimpin Pilihan Iklan ..... /293
Wacana Koalisi Golkar dan PDIP ..... /295
Rapim Golkar dan Isu capres ..... /298
Langkah Politik Raja Jawa ..... /300

XII/ PERTARUHAN INDONESIA [2009]

Demokrasi Pilihlah Aku ..... /305
Drama Politik PDIP ..... /307
Alternatif Politik Partai Golkar ..... /309
Setelah Manuver Megawati-JK ..... /312
Pertaruhan Indonesia ..... /314
Demokrasi Tujuh Puluh Persen ..... /316
Pengalaman Pemilu 2009 ..... /318

Politik Kebudayaan Kita ..... /320
Yudhoyono dan Labirinnya ..... /322
Pansus Century dan Kontrol Publik ..... /326

XIII/ ORANG BESAR, DARI MANA DATANGNYA? [2010]

Orang Besar, Dari Mana Datangnya? ..... /331
Testimoni Century dan Rashomon ..... /333
Merenungi Politik Kita ..... /335
Golkar, *Cancut Taliwondo*? ..... /340
Musim Kongres Partai-partai ..... /343
Mengelola Politik Karisma ..... /345
Regenerasi Kepemimpinan Parpol ..... /345
Daya Kritis dan Survivalitas PKS ..... /348
Muhammadiyah dan Arus Politik ..... /350
Bangsa Ulat, Bangsa Kepompong ..... /353
Warisan Kepemimpinan Maridjan ..... /356
Bangsa Main-main ..... /358
Bangsa yang (Perlu) Berlari ..... /361

XIV/ DEMOKRASI NOVELTIK [2011-2012]

Demokrasi Noveltik ..... /367
Militer dan Transisi Demokrasi Mesir ..... /370
Mengevaluasi Pemimpin ..... /372
Revolusi dari Toilet ..... /375
Di Mana Partai-partai? ..... /377
Eksperimen Politik Golkar ..... /379
Komik dan Wajah Kepolitikan Kita ..... /381
Semangat Mencari Pemimpin ..... /383
Momentum Demokrasi Ekonomi ..... /386

XV/ INTELEKTUALISASI POLITISI [2013-2014]

Hakikat Persaingan Partai ..... /391
Defisit Kemodernan Politik ..... /394

Intelektualisasi Politisi ..... /396
Calon Presiden Pilihan Survei ..... /399
Arus Balik Politik Kekerabatan ..... /401
Balada Senjakala Kekuasaan ..... /404
Masalah Abadi Demokrasi Kita ..... /406
Keterbatasan Politik Populis ..... /409
Normalisasi Politik Indonesia ..... /412
Ke Arah Politik Makna ..... /415

XVI/ MENANAK NASI INDONESIA [2015-2016]

Kemerosotan Politik ..... /421
Menanak Nasi Indonesia ..... /425
Dilema Perombakan Kabinet ..... /428
Mengapa Parpol Baru? ..... /432
Kembali ke Politik ..... /435
Kekuasaan dan Godaan ..... /438
Menolong Partai Politik ..... /441
Semangat Menolak Politik Uang ..... /444
Demokrasi sebagai Proses ..... /444
Parpol dan Kekuasaan ..... /447
Menggali Etos Bangsa ..... /452
Tentang Kudeta di Zaman Kita ..... /457
Mencari Gambaran Pemilu Serentak 2019 ..... /461
Demokrasi sebagai Proses ..... /465
Mencari Model Pemilu Serentak ..... /469

XVII/ PERSATUAN INDONESIA DALAM UJIAN [2017]

TNI, Perang Proksi, dan Demokrasi ..... /477
TNI dan Permasalahan Bangsa ..... /481
Babak Baru Politik Turki ..... /489
Persatuan Indonesia dalam Ujian ..... /492
Pancasila Milik Bersama ..... /496
Keterbatasan Regulasi Pemilu ..... /499

Merayakan Keindonesiaan ..... /502
Kegaduhan dan Tertib Politik ..... /505
Masalah Kepemimpinan Partai Politik ..... /509
Masalah Pengaderan Politik Bangsa ..... /512
Peluang Baru Partai Golkar ..... /515
Dinamika Kepartaian Kita ..... /518

INDEKS ..... /523
TENTANG PENULIS ..... /537

FILM *RASHOMON* BERCERITA KEJADIAN TINDAK KEJAHATAN (PEMBUNUHAN) YANG PROSES PENGADILANNYA MELIBATKAN EMPAT SAKSI MATA — BANDIT TAJOMARU (MIFUNE), SAMURAI TAKEHIRO (MASAYUKI MORI), ISTRINYA MASAKO (MACHIKO KYŌ), DAN PEMOTONG KAYU TANPA NAMA (TAKASHI SHIMURA) — DENGAN EMPAT SISI PANDANG YANG BERBEDA. MELALUI GAYA PENCERITAAN KILAS BALIK PENUTURAN MEREKA SATU PER SATU, PENONTON TIDAK DAPAT MENENTUKAN MANA KISAH YANG SEBENARNYA. BAHKAN PUN KETIKA HAKIM MENDENGARKAN KESAKSIAN ROH LELAKI YANG MATI ITU MELALUI MULUT BIKSUNI KUIL SHINTO.

SEKAPUR SIRIH

IKHTIAR MENJELASKAN ABSURDITAS POLITIK INDONESIA, DAN LAIN-LAIN

THEREDLIST.COM

TOSHIRO Mifune dalam film arahan sutradara Akira Kurosawa, *Rashomon* (1950). Film ini diangkat dari cerita pendek Ryunosuke Akutagawa.

POLITICAL SCIENCE WITHOUT BIOGRAPHY IS A FORM OF TAXIDERMY

- HAROLD D LASSWELL

APAKAH BERITAMU ITU BENAR, BERGUNA, ATAU LUCU? KALAU TIDAK MAKA KAMI TIDAK PERLU MENDENGARKAN

- ANTHONY DE MELLO

MANUSIA ITU JENIUS MANAKALA DIA PUNYA MIMPI

- AKIRA KUROSAWA

BARANGKALI YANG khas dari buku ini kerena nyaris semua tulisannya pernah dimuat Harian *Kompas*, suratkabar nasional dengan jumlah pembaca yang cukup besar. Saya memuatnya kembali dengan revisi teknis yang tak mengubah substansi tulisan aslinya, untuk disajikan kembali. Namun, dimasukkan juga beberapa tulisan yang berasal dari dokumentasi penulis yang dikirim ke redaksi opini, tetapi karena keterbatasan, tidak dapat dimuat. Ada juga sebuah tulisan yang termuat di harian lain, dimaksudkan untuk melengkapi konteks kehadiran buku ini.

Menulis artikel di media massa, sudah saya lakukan sejak mahasiswa. Kebanyakan temanya soal-soal sosial-politik dan kebudayaan. Tulisan saya pertama kali dimuat *Kompas* pada 1994, ketika saya masih duduk di bangku kuliah s-1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Berarti usia saya masih duapuluh satu tahun saat itu. Kelak, ketika saya hijrah ke Jakarta sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada menjelang akhir masa Orde Baru (1995/1996) hingga masa reformasi 1999, saya melanjutkan hobi saya menulis (politik) di berbagai suratkabar nasional. Karena aktivitas yang sedemikian

itulah maka, jauh sebelum saya meraih gelar doktor dalam bidang ilmu politik pada 2015 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana ilmu politik saya di Universitas Nasional pada 2005 (setelah sebelumnya gagal di Universitas Indonesia pada dua jurusan, yakni s-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dan S-2 Ilmu Politik), seorang atau beberapa teman menjuluki saya "pengamat politik lulusan koran", bahkan yang lain menjuluki saya sebagai "manusia koran".

Saya tak keberatan dengan julukan demikian, mengingat koranlah yang telah menempa saya untuk nekat menjadi "artikelis politik" yang hasilnya bisa kita baca bersama kembali di antaranya melalui buku ini. Menulis di koran itu tidak cukup mudah. Saya telah menguraikan pengalaman menulis saya di buku *Bagaimana Saya Menulis* (2016). Menulis di koran, ruangannya begitu terbatas. Tulisan kita harus singkat, ada "sesuatu yang baru" dari yang kita sampaikan alias ada dimensi aktualitasnya. Sehingga, ia memiliki daya gugah ke pembaca. Kita juga berurusan dengan sudut pandang dan meninggalkan sesuatu kepada pembaca untuk, setidaknya dipikirkan atau direnungkan. Begitulah hakikat penulisan esai populer.

Saya juga sering memberi ilustrasi ke para mahasiswa yang punya hasrat menjadi artikelis atau kolomnis di media massa, membuat tulisan di koran (pun kolom di media *online*) seperti menyajikan secangkir kopi ke penggemarnya. Kopi kita harus sedap dan bisa dinikmati. Karakter penulisan esai opini di media, kendatipun tergolong ranah ilmiah populer, ia berbeda dengan tulisan-tulisan di jurnal yang lebih spesifik dan detil rujukan. Ulasan-ulasan di media massa itu lebih dalam konteks ditujukan untuk pembaca umum, sementara jurnal ke pembaca khusus.

Dalam konteks ini, sebagai penulis artikel opini saya pernah disentil seorang teman, bahwa apa yang saya lakukan ini kelas atau *maqom*-nya lebih rendah. Ia ingin saya jadi analis, menulis di jurnal-jurnal, bukan artikelis di media massa. Tampaknya itu lain soal lagi, mengingat saya juga menulis di jurnal-jurnal tertentu. Tentu saya tidak mau untuk terjebak dengan penilaian bahwa menulis ar-

tikel di suratkabar atau majalah, kelasnya lebih rendah atau lebih tinggi, mengingat setiap jenis tulisan ada tujuannya (*writing with a purpose*).

Menulis artikel di suratkabar punya tujuan lain dibandingkan dengan di jurnal atau yang lain. Sekali lagi, karena suratkabar itu bacaan populer, bersifat massif dengan berbagai jenis dan latar belakang pembaca yang beragam, maka orang yang rajin mengutarakan pendapatnya, berpotensi menjadi intelektual publik. Atau, setidaknya dia pemicu berpikir, mengajak berkontemplasi, sehingga dia ialah "sang juru ingat". Hal-hal semacam inilah yang sering saya ungkapkan di dalam pengantar buku-buku kumpulan tulisan saya yang lain.

BAGI SAYA, menulis di media massa (konvensional cetak terutama) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial seorang akademisi, intelektual, cendekiawan, atau apa pun namanya. Kendatipun saya bukan intelektual, tetapi mungkin sekadar akademisi karena saya telah menempuh jenjang pendidikan hingga yang tertinggi, tetapi saya merasa sering terpanggil untuk bisa ikut unjuk pendapat atau gagasan, dan seorang penulis artikel opini pastilah sosok yang dipenuhi semangat untuk bisa berbagi pandangan, pendapat. Demikianlah.

Buku kumpulan artikel ini bukan karya saya yang pertama. Buku kumpulan artikel saya (dari berbagai media massa) pertama kali terbit pada 2002. Diterbitkan *Institute for Transformation Studies* (*Intrans*), buku itu saya beri judul *Mahalnya Harga Demokrasi*. Masih ada tiga buku sejenis, dua buku terbit pada 2010, dan yang terakhir 2016. Masing-masing, *Demokrasi Pilihlah Aku* (cetak ulang, 2012), *Kepemimpinan yang Pelayan*, dan *Bandit-Bandit Segala Bidang*. Dua buku pertama didiminasi tulisan-tulisan saya di Harian *Pelita* (saya punya kolom tetap bertajuk *Pelita Hati* sejak tahun 2000), sementara yang terakhir ialah yang pernah termuat di *Antaranews.com*.

MERUJUK LASSWELL dalam kutipan yang saya tampilkan di atas, apa yang dimaksud taksidermi? Tak lain, binatang yang diawetkan untuk dipajang. Bagi penggemarnya, terlepas dari dimensi etisnya, ia dipandang sebagai seni yang bernilai tinggi. Pernahkan Anda bertamu ke tokoh politik, seniman, mantan tentara atau yang lain, lantas di ruang tamunya ada macan besar dalam posisi santai, tapi seolah mau menerkam? Atau yang di dindingnya ada kepala menjangan atau rusa dengan tanduknya yang panjang melengkung? Atau burung-burung rajawali yang sayapnya terbuka melebar? Ular yang melilit sebatang kayu besar? Buaya yang tampak ganas dan lapar? Atau serigala, beruang, segala rupa. *Ya*, binatang-binatang itu hanya awetan, taksidermi.

"Di tangan ahli taksidermi, satwa yang punah sekalipun dapat terlihat hidup. Namun, pengawetan tidaklah sama dengan pelestarian," catat Bryan Christy dalam artikelnya di *National Geographic Indonesia* (Agustus 2015) berjudul "Hidup Setelah Mati". Lebih lanjut catatnya, "Sejak tahun 1800-an, ketika para pemburu membawa hasil buruannya ke tukang jok untuk diawetkan, taksidermi sudah memainkan peran penting dalam konservasi. Jika dilakukan dengan baik, kita berkesempatan melihat langsung makhluk yang mungkin tidak pernah kita jumpai di alam liar."

Direktur investigasi khusus *National Geographic* tersebut mencatat, bahwa pada akhir 1800-an margasatwa yang melimpah di Amerika berkurang dengan cepat. Pemburu komersial profesional membantai margasatwa secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan bulu, restoran, topi wanita, dan bidang lainnya. Tanpa khawatir punah, orang Amerika membunuh jutaan bison demi uang dan hiburan, sehingga pada akhir abad ke-19 hanya tersisa beberapa ratus ekor. Merpati *passenger* dulu merupakan burung yang terbanyak jumlahnya di Amerika. Pada 1878, pemburu yang memasok daging ke restoran menembaki kawanan besar burung itu di luar Petoskey, Michigan, dan membunuh sekitar satu miliar burung dalam beberapa minggu. Pada 1914, merpati *passenger* terakhir Amerika mati (dan diawetkan oleh ahli taksidermi *Smithsonian Institute*).

Banyak spesies yang diburu hingga terancam punah di Amerika saat itu, seperti halnya keadaan margasatwa di Asia dan Afrika saat ini.

Sedangkan biografi, sudah jelas adalah catatan kisah hidup atau kehidupan seseorang. Penulis esai sosial-politik dan kebudayaan seperti saya, merasa terbantu oleh pernyataan Laswell di atas, yakni *political science without biography is a form of taxidermy*, justru karena semakin ke sini, orang semakin melihat apa latar belakang akademis saya. Melalui keterangan penjelas siapa saya dalam banyak artikel atau kolom opini saya di berbagai suratkabar atau majalah, yang lazim muncul belakangan adalah Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta.[1]

Dalam posisi saya sekarang sebagai dosen Ilmu Politik, kalau saya menulis rupa-rupa yang sangat terkait dengan peristiwa-peristiwa kekinian (bahkan sangat jangka pendek durasi peristiwanya), itulah "biografi"-nya, konteksnya. Konteks itulah yang memberi hidup. Tanpa konteks, ilmu politik berhenti sebatas teks yang kemanfaatannya barangkali sekadar terbatas di ruangan kelas. Peristiwa-peristiwa politik adalah cantolan kasus, yang telaahannya memerlukan perspektif keilmuan, kendati kemasannya sekadar tulisan populer.

Maka, itulah jawaban atas sindiran yang sering saya terima: ilmuwan politik, *kok*, *nyoyo woro* ke sana kemari. Maka kini jawaban saya jelas: biografi itu luas, ilmu politik akan sekadar menjadi *taxidermy* yang kelihatannya *mentereng*, tetapi kurang bermanfaat, manakala ilmuwannya tidak proaktif ikut serta menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Bahkan,

1 Tulisan yang paling awal saya tuliskan predikat saya sebagai Redaktur Pelaksana Jurnal Madani, PB HMI; kemudian Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia; lantas juga pernah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional; Direktur Riset Akbar Tandjung Institute; Anggota Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah, dan yang lain (seperti Peneliti *ACG Advisory Group* dan Pegiat Gerakan Jalan Lurus). Pada 1994, predikat saya sebagai penulis di Harian *Kompas*, Mahasiswa FE Universitas Muhammadiyah Malang, Pemerhati Bahasa Indonesia. Semua predikat itu menunjukkan "biografi" saya sebagai artikelis atau penulis opini yang dinamis.

dalam madzab pos-behavioralis atau madzab kritis semacam dianjurkan bahwa ilmuwan politik harus aktual, ikut bergerak, bicara dan bertindak merepspons keadaan.

Lepas dari itu, tentu ilmu politik juga berkepentingan memberi pencerahan, membuka cakrawala imajinasi masyarakat, bergerak dinamis sedemikian rupa. Karenanya itulah, saya perlu membaca *Rashomon*, pun meminjam kisah legenda Yunani kuno tentang labirin. Tentu saya tak sedang mengada-ada. Biarlah saya dikata ember atau baskom, kalaulah itu bagian dari aktivitas angkat bicara, kendatipun sekadarnya saja, terbatas sudut pandang dan pilihan temanya.

SEORANG TEMAN lama, yang sudah menjadi wartawan sebuah stasiun televisi terkemuka konon mampir ke kantor saya. Tiba-tiba dia menanyakan tulisan saya terbaru di suratkabar. Ia rupanya sangat berkesan oleh tulisan saya soal *Rashomon* dan mencoba mengingatkan, "Mana *Rashomon*-nya?" Saya sudah hampir lupa dengan *Rashomon*, dan ketika tulisan-tulisan ini saya kumpulkan kembali, ketemulah saya dengan si *Rashomon* yang dimaksud, yang lantas menginspirasi judul buku ini. Mendadak *Rashomon* hidup lagi, lewat ember dalam gambar sampul buku ini.

Mengapa ember? Ia bisa jadi simbol penampung keluh kesah, tetapi juga sebaliknya, simbol terlalu banyak omong (*talking too much*). Tetapi, apakah *Rashomon* yang saya maksud? Ia terlanjur populer sebagai judul film Jepang yang disutradarai oleh Akira Kurosawa (1950). Film yang pada 1951 menerima Penghargaan Oscar untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik ini dibintangi oleh aktor kawakan Toshiro Mifune. Kurosawa bekerja sama dengan sinematografer hebat Kazuo Miyagawa. Kisahnya diangkat dari salah satu cerpen karya Akutagawa Ryunosuke yang terhimpun dalam *Rashomon*. Judulnya *In the Grove* alias *Dalam Semak Belukar*. Menurut Kurosawa,

> *Rashomon* menjadi ajang pengujian saya ... Untuk memberi latar

> belakang suasana simbolis, saya memutuskan untuk menggunakan cerita Akutagawa *In the Grove*, yang masuk ke kedalaman hati manusia seolah-olah dengan pisau bedah dokter, meletakkan telanjang kompleksitas gelap dan tikungan aneh.[2]

Saya melihat film *Rashomon* itu sekitar tahun 1993/1994 di Aula Kampus II Universitas Muhammadiyah Malang. Atas inisiatif terutama rekan saya Mukhammad Ilham, Himpunan Mahasiswa Pecinta Seni Fakultas Ekonomi berhasil menyuguhkan serentetan pemutaran film-film Jepang karya Akira Kurosawa. Acara itu bekerjasama dengan Konsulat Jepang di Surabaya. Film *Rashomon* bercerita tentang kejadian tindak kejahatan (pembunuhan) yang proses pengadilannya melibatkan empat saksi mata — bandit Tajomaru (Mifune), samurai Takehiro (Masayuki Mori), istrinya Masako (Machiko Kyō), dan pemotong kayu tanpa nama (Takashi Shimura) — dengan empat sisi pandang yang berbeda. Melalui gaya penceritaan kilas balik penuturan mereka satu per satu, penonton tidak dapat menentukan mana kisah yang sebenarnya. Bahkan pun ketika hakim mendengarkan kesaksian roh lelaki yang mati itu melalui mulut Biksuni Kuil Shinto.

Belakangan saya menemukan istilah *efek Rashomon* dari Sosiolog Ken Plummer. Dalam bukunya, *Sociology, The Basics* (New York, 2010, hal. 143-144), ia menjelaskan tentang efek ini. Plummer menjelaskan tentang statistik kejahatan yang sesungguhnya sekadar "satu perspektif atau sudut pandang untuk mendapatkan data mengenai tindak kejahatan: statistik kejahatan mengalami pergerakan dan sulit dihubungkan dengan peristiwa kejahatan yang nyata atau aktual di masyarakat". Jadi, ia sekadar mengilustrasikan interpretasi dari satu sudut pandang. Padahal, catatnya, "Kita tidak pernah tahu atau memahami dan menggambarkannya secara penuh. Setiap bagian data (dalam statistik itu) diceritakan dari sudut pandang, perspektif, pendirian — yang tidak ditemukan dalam so-

2 https://www.criterion.com/current/posts/196-akira-kurosawa-on-rashomon [diakses, 8 Maret 2017]

siologi. Inilah efek Rashomon — nama ini diperoleh setelah adanya film Jepang yang terkenal ketika sebuah cerita pembunuhan dan pemerkosaan diceritakan dari berbagai perspektif dan sifat alam yang benar terjadi di bawah mikroskop." Dari Plammer, dapat kita catat efek Rashomon, justru mengingatkan kita bahwa, dan menurutnya, "Selalu ada berbagai perspektif dalam kehidupan sosial".

Nah, dalam salah satu artikel yang dimuat kembali ke dalam buku ini, "Testimoni Century dan *Rashomon*" (*Kompas*, 28 Januari 2010), kisah film *Rashomon* itu saya refleksikan. Saat itu, kasus Bank Century sudah masuk ranah perdebatan, kalau bukan drama politik di DPR. Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century sudah terbentuk dan bekerja. Rapat-rapat mereka, rupanya tak kalah dengan acara sinetron, disiarkan langsung oleh berbagai stasiun televisi. Tampaknya itu siaran langsung peristiwa politik yang cukup memakan waktu, melebihi berita-berita kampanye pemilu yang rata-rata siaran ulangan saja.

Pansus Century dibentuk 1 Desember 2009 melalui Sidang Paripurna Pengesahan Hak Angket Bank Century. Ketuanya, Idrus Marham dari Partai Golkar. Pansus berawal usulan sembilan orang lintas fraksi (PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Hanura, PAN, PPP, dan Golkar) untuk mengetahui seluk-beluk keputusan pencairan dana talangan (*bailout*) Rp6,76 triliun dari Bank Indonesia untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggarannya? Adakah faktor kesengajaan pembobolan uang negara? Mengapa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp6,76 triliun, padahal Bank Century sekadar bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima *bailout*, bank ini dalam status pengawasan khusus? Seberapa besar kerugian negara?

Pansus Century terdiri dari tigapuluh anggota dari semua fraksi. Setelah berjalan sekian lama dan memperoleh liputan khusus media massa, termasuk siaran langsung berbagai stasiun televisi, kesimpulan dan rekomendasi Pansus Century dibawa ke Sidang Paripurna DPR. Opsi A intinya menyetujui *bailout,* Opsi C menyatakan *bailout* Bank Century menyimpang. Keputusan akhir diambil

3 Maret 2010 di Sidang Paripurna melalui voting terbuka. Hasilnya, Opsi A 212 suara, Opsi C 315 suara. Menangnya Opsi C menggegerkan pemerintahan SBY-Boediono, karena partai-partai pendukung pemerintah di DPR tak satu suara dengan pilihan Partai Demokrat yang memilih Opsi A. Namun demikian, hal tersebut tak merembet ke "penjatuhan kekuasaan". SBY bergerak cepat merekonsolidasi dukungan melalui pembentukan Setgab Koalisi.

Demikianlah kisahnya, dramanya, dari sisi penyelesaian politik. Dari sisi hukum, kasusnya tetap berjalan di pengadilan. Anda bisa cek kembali, bagaimana perkembangannya. Siapa saja yang menjadi tersangka dan tervonis di pengadilan? Apa saja yang masih tersisa dalam berbagai pembicaraan publik?

YANG TERSAJI di buku ini sekedar kumpulan tulisan, maka ia seladar "buku bukan buku" (*book non book*). Karenanya fungsi sekapur sirih dari penulis ini, ialah merangkaikan mozaiknya, benang merahnya: apa? Dan masihkah ulasan-ulasan, tepatnya artikel-artikel yang ada dalam buku ini, relevan dengan kekinian politik kita? Ya, memang semuanya adalah rupa-rupa artikel politik, kendatipun dibalut perspektif kebudayaan. Kasus-kasus yang saya ulas, kebanyakan ialah peristiwa-peristiwa politik. Saya, banyak bertindak sebagai sekadar komentator, pengajak merenung atau memikir dan mengajak pembaca melanjutkan perenungan dan pemikiran itu. Sebagaimana karakter tulisan di koran, ia sekadar pengantar, hidangan berpikir dan merenung dengan perspektif tertentu, kontekstual. Tetapi justru itulah kekuatannya. Karenanya, buku ini sekadar dokumen reflektif terhadap masalah-masalah bangsa secara umum, mengingat gagasan-gagasan yang saya tulis terkait dengan hal-hal seperti itu.

Namun, yang justru menarik, apakah benang merah semua itu? Apakah benang merah itu ada? Tulisan-tulisan dalam buku ini merentang dari era jatuhnya Pak Harto yang dilanjutkan oleh Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, hingga Pak Jokowi. Ikhwal yang terakhir ini, antara lain mengulas fenomena

Jokowi dari Solo ke Jakarta, dan lantas didukung Ibu Megawati sebagai capres PDIP. Terlepas dari kemudian dia menang dalam Pilpres yang sempat digugat oleh kubu Prabowo-Hatta, tetapi kemudian dalam sidang Mahkamah Konstitusi ditolak, dalam konteks politik Indonesia, beberapa tulisan di sini mengulas soal fenomena kejenuhan masyarakat atas gaya kepemimpinan Pak SBY, dan menemukan bandingannya ketika Mbah Maridjan, juru kunci Gunung Merapi diberitakan berbagai media massa: ia berada pada sisi ekstrem dalam hal gaya kepemimpinan. Sayang ia bukan pemimpin politik. *Nah*, orang seperti Jokowi, yang meniti karier politiknya sejak menjadi Walikota Solo, saya kira telah mengambil sisi ekstrem itu. Jokowilah yang, sengaja atau tidak, telah mampu memanfaatkan "Maridjanisme politik".

Secara umum, bisa saja kita mengatakan benang merah dari segala kejadian politik kita dewasa ini ialah berpola "*change and continuity*". Ada yang berubah, ada yang bertahan dan berkesinambungan. Aturan mainlah yang membuat politik kita berubah. Tetapi, kita juga mencatat bahwa perubahan aturan main itu (yang berpuncak pada amandemen UUD 1945), tak lepas dari perspektif perilaku politik elite dan massa yang bertemu dalam satu tujuan: reformasi. Mereka menghendaki perubahan mendasar dalam sistem politik, maka pasca-duapuluh satu Mei 1998, perubahan itu tak terelakkan.

Tetapi, kendatipun sistem politik sudah berubah, masih ada hal-hal yang esensinya sama dengan masa lalu. *Pertama-tama*, orang sering mengaitkan dengan konteks perilaku politiknya. Begitu kran politik dibuka, maka "kekuasaan" menyebar ke mana-mana dengan segala tabiatnya. Dalam salah satu artikel saya yang diabadikan dalam buku ini, misalnya menyorot fenomena "desentralisasi korupsi". Tampaknya tak ada hal yang tidak sekontroversial kata "korupsi" di zaman kita ini. Apalagi, lantas ketika lembaga *ad hoc* pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan. Kredibilitas lembaga ini benar-benar terus diuji oleh sejarah, seiring dengan berganti-gantinya komisioner yang

ada. Dalam banyak kasus, pemberantasan korupsi memang banyak yang lantas terbentur dan atau berurusan dengan politik. Apakah KPK bisa benar-benar objektif, itulah masalahnya.

Kedua, terkait dengan perilaku kekuasaan, dan di banyak hal sama saja. Di zaman kita ini, kita masih pula menyaksikan beragam bentuk pelanggaran HAM. Orang juga masih mempertanyakan posisi dan peran negara. Bahkan, ada yang mengkritik negara tidak sepenuhnya berdaya dalam menghadapi masalah-masalah pelik penyebab pelanggaran HAM terjadi. Bagaimana penggusuran-penggusuran itu terjadi? Bukankah esensinya sama dengan di masa lalu? Untuk kepentingan siapa? Kemanusiaan? Kapital? Maka, karangan Dr. Soedjatmoko di era 1980-an, masih relevan kiranya justru di masa kini, "Dimensi Manusia dalam Pembangunan", di manakah engkau?

Ketiga, masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Kita khawatir, apabila tidak ada kontrol yang efektif, maka pembangunan mengarah kepada, apa yang dirumuskan oleh Prof. Dr. Didik J. Rachbini di masa lampau (yang menjadi salah satu judul bukunya), *Pembangunan yang Dibimbing Utang* (1995). Pun ekses-ekses percepatan pembangunan (yang dalam Pemerintahan Jokowi belakangan ini ditandai oleh berbagai pembangunan insfrastruktur, kendatipun tidak dapat dikatakan sepenuhnya salah), semestinya harus diantisipasi. Ekses-ekses itu harus didaftar, diurai, diantisipasi, agar kelak tidak malah merugikan kita sebagai bangsa. Tentu kita tidak ingin, pembangunan *kok* malah merugi bukan? Dalam hal ini, tidak ada salahnya manakala kita berkaca pada pengalaman pembangunan Dunia Ketiga, termasuk Indonesia pada dekade 1970-an, 1980-an, dan 1990-an: mengapa ekonomi kita naik sedemikian rupa, dan terlanda krisis sedemikian rupa juga. Sejauhmana kebaikan pragmatisme pembangunan untuk zaman kita? Sejauhmana pula keterbatasan dan eksesnya?

SEORANG REDAKTUR opini sebuah suratkabar suatu saat menelpon saya. Setelah menyampaikan informasi dan membujuk supaya

saya untuk bersedia menghadiri undangan diskusi di kantornya, dia sempat mengatakan bahwa salah satu ciri tulisan (esai, artikel opini) saya adalah seringnya bernada *nyinyir*. Sungguh, saya tidak tahu persis apa *nyinyir* itu, walaupun kelak kata ini semakin akrab di era medsos. Kedengarannya mirip *anyir*, bau ikan laut yang amis dan khas. Kalau *nyinyir*? Terpaksalah perburuan saya lakukan untuk memahami kata *nyinyir* itu. Rasanya saya belum pernah bersinggungan dengan kata ini sejak dilahirkan, SD, tamat kuliah, hingga ketika Mas Redaktur *nelpon* saya. Lain dengan kata *seluk beluk*, kata dalam Bahasa Indonesia yang baru saya dengar pertama kali kelas 6 SD, ketika ada murid baru perempuan pindahan dari luar Jawa.

Untung ada KBBI yang sudah di-*online*-kan, maka ketika saya klik muncullah pengertian bahwa *nyinyir* itu "mengulang-ulang perintah atau permintaan; *nyenyeh*; *cerewet*" (http://kbbi.web.id/nyinyir). Mungkin yang paling pas di sini ialah *cerewet*. Tetapi, apakah saya cerewet? Saya malah merasa kurang cerewet. Tapi kalau *nyinyir* itu semacam *ngoyo woro*, cerewet tetapi kosong saja, alias "tong kosong nyaring bunyinya" (demikian pepatah), mungkin saja: demikianlah risiko tulisan reflektif, seringkali terasa *ngoyo woro* saja. Bebaslah penilaian orang akan esai-esai saya ini: *ngoyo woro*-kah atau tidak? Tetapi mungkin, maksudnya bukan demikian. *Nyinyir* yang dimaksud meninggalkan sesuatu "kedongkolan" bagi pembaca, karena ada sesuatu yang menohok. Belakangan ini kata *nyinyir* lebih ke dalam pengertian tersebut, sejenis sinisme tingkat tinggi. Nanti pembaca akan bisa menilai sendiri apakah tulisan-tulisan saya bernada *nyinyir*, atau masih kurang *nyinyir*.

Saya mengutip Anthony de Mello di awal tulisan ini. Ia, yang kutipannya saya temukan di majalah *Intisari* (Edisi Mei 2016), mengatakan: "Apakah beritamu itu benar, berguna, atau lucu? Kalau tidak, maka kami tak perlu mendengarkan". Bagaimana kalau kata "beritamu", kita ganti dengan "tulisanmu"? Maka, kalau engkau de Mello, saya berharap masih terselip sedikit kelucuan dalam "tulisan-tulisan nyinyir" saya. Setidaknya pilihan kata atau susun-

an kalimatnya memunculkan senyum. Dalam konteks inilah, maka *nyinyir* yang dimaksud bukan dalam konotasi negatif. Nyinyir saya, semoga tidak dalam konteks *waton ngomong*, tetapi *ngomong waton*. Bukan, berbicara tanpa argumentasi, tetapi berbicara dengan argumentasi yang bernalar.

Sebagian gaya tulisan saya, dan ini juga tampak dari kumpulan esai saya yang lain *Bandit-Bandit Segala Bidang* (2016), tak lepas dari pengaruh para kolomnis yang saya kagumi (kendatipun ini sekadar semacam klaim saya saja): Mahbub Djunaidi pun Emha Ainun Nadjib. Pun Goenawan Mohamad, Kuntowijoyo, Ahmad Tohari, Ayib Bakar, Sutjipto Wirosardjono, Abdurrahman Wahid, Onghokham, Ridwan Saidi, Fachry Ali, Moeslim Abdurrahman, Danarto, tak lupa Mohamad Sobary. Mereka para kolumnis pendekar pada 1990-an, 1980-an, pun 1970-an. Sebagian tulisan mereka saya baca di majalah *Tempo* dan *Panji Masyarakat*.

Pendekatan kualitatif dengan membuat suasana menjadi hidup itulah garis besar gaya mereka bertutur dalam kolom. Tentu saya menemui sejumlah kegagalan untuk meniru sepenuhnya gaya mereka, sehingga membentuk gaya tulisan saya sendiri yang sungguh-sungguh (barangkali terlalu) *nyinyir* ini. Esais "tidak boleh mati" di zaman serba ringkas ini. Tulisan-tulisan dituntut semakin serba pendek di zaman *mikrobloging* ini. Cepat-cepat, pendek-pendek (ratusan karakter saja menurut standar *twitter*). Tetapi internet juga telah memanjakan kita untuk menulis esai yang agak panjang. Situs-situs esai bermunculan dan Anda bisa memilihnya. Kelak orang akan bisa memeriksa berapa kali tulisan Anda itu diklik orang, dan berapa kemungkinan jumlah pembacanya.

Demikianlah, salah satu misi penerbitan artikel-artikel saya (tentu tidak ini saja) ialah agar budaya menulis esai tidak punah. Esai yang baik ialah yang enak dibaca, tanpa berpretensi mencerahkan (kendatipun setiap bacaan, bisa mencerahkan). Semua orang bisa menulis esai tentang tema apa saja, apalagi tema-tema sosial politik, yang bukan merupakan monopoli para doktor ilmu politik semata.

Ketika tulisan-tulisan ini dimuat suratkabar, status saya belumlah doktor ilmu politik (kecuali setelah akhir Januari 2015). Saya menulis, dan ini saya kisahkan dalam buku *Bagaimana Saya Menulis* (2016) esai atau artikel-artikel opini di beberapa surat-kabar tentang tema sosial dan politik, sejak saya mahasiswa, yang jelas-jelas bukan di jurusan ilmu politik, kecuali ilmu manejemen. Dalam suatu bedah buku saya *Wawasan Kepemimpinan Politik* (2016) di Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Pembantu Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengaku kaget terhadap pilihan saya yang membelok ke ilmu politik. Tetapi, kekegetan itu saya redakan dengan menjelaskan bahwa sesungguhnya ilmu manajemen dan ilmu politik itu dekat.

Saya banyak terbantu dengan ilmu manajemen, ketika menyusun buku *Wawasan Kepemimpinan Politik* itu, dan bagaimanapun politik ialah manajemen juga. Bagaimana kita bisa menjelaskan konflik internal partai, manakala tidak meminjam perspektif manajemen konflik yang lazim dipelajari dalam ilmu manajemen? Bagaimana kita bisa menjelaskan perbedaan pemimpin dan manajer? Manajemen ialah ilmu universal yang bisa diterapkan tidak semata-mata dalam perusahaan-perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, konteks ilmu manajemen memang manajemen perusahaan, tetapi dalam politik, manajemen terkait dengan pengelolaan organisasi politik, bahkan negara.

ADA DUA jenis dalam tulisan-tulisan yang semuanya pernah termuat di harian *Kompas* sejak 1999 ini: (1) jenis tulisan yang bersifat "sangat waktu itu", atau jenis tulisan analisis *day to day politics*. Kemudian, (2) jenis tulisan yang "lebih abadi", bernuansa *timeless*. Yang pertama, terkait perkembangan politik yang harus dipahami konteksnya. Pembaca bisa memahaminya dengan mengingat kembali peristiwa yang terjadi "saat itu". Tulisan-tulisan seperti itu bermanfaat untuk ditampilkan kembali, justru untuk memotret kembali perjalanan politik kita selama ini. Setidaknya untuk mengingat kembali dan merasakan betapa ada yang berubah, ada pula yang tidak. *Ancer-ancer* tulisan saya adalah 1999, saya mulai dari artikel

tentang Pemilu 1999. Lantas, kita berselancar ke era Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi.

Yang kedua, tampaknya tak perlu penjelasan lagi. Pembaca bisa membedakannya dengan tulisan-tulisan yang temanya terkait cantolan berita "jangka pendek". Namun demikian, ternyata ada jenis tulisan yang ketiga: yang merupakan gabungan dari kedua jenis tulisan yang ada. Peristiwanya "saat itu", tetapi pesannya "abadi". Misalnya, ketika saya mengaitkan sebuah peristiwa "saat itu", dengan sebuah kisah dalam cerpen *Rashomon*. Pesannya jelas: betapa beda kebenaran faktual (betapapun susahnya mencari jenis kebenaran ini, mengingat orang punya sudut pandang yang berbeda-beda) dengan kebenaran politik.

Demikianlah, ada tulisan yang kesannya datar-datar saja, ada pula yang tidak (reflektif): kendati semua itu mampu membentuk pesan dan gambaran masing-masing. Kalau dikalkulasi tulisan-tulisan ini membentang dari 1999 hingga 2016/2017. Dalam hal *Rashomon*, sebagaimana saya uraikan sebelumnya, kisah itu saya perlukan untuk menjelaskan fenomena politik di parlemen yang, dalam pembahasan kasus Bank Century di awal pemerintahan SBY-Boediono, betapa satu sama lain memiliki versi "kesaksian" yang berbeda-beda. Apakah untuk mendatangkan kebenaran dalam politik perlu dihadirkan cenayang, sebagaimana dalam satu kisah dalam kumpulan cerita *Rashomon*? Kita, setidaknya dalam tulisan saya, "Testimoni Century dan Rashomon" dihadapkan pada perbincangan soal, apa itu yang dimaksud *kebenaran politik*?

Sedangkan soal labirin, maka inspirasinya dari novel Gabriel José García Márquez, *The General in His Labyrinth* (1989). Novel yang mengisahkan hari-hari terakhir pemimpin pembebasan Kolombia, Simón Bolívar ini, setidaknya mengingatkan pembaca bahwa entah mengapa orang besar suka menciptakan labirinnya sendiri. Dalam hal ini saya perlu cantumkan tulisan saya di Harian *Koran Tempo,* 28 Oktober 2009, "Yudhoyono dan Labirinnya". Tulisan ini, sesungguhnya tak sekadar berlaku bagi Pak SBY yang ketika itu masih menjabat sebagai presiden, tetapi juga bagi semua

pemimpin. Menjelaskan fenomena politik Indonesia, tentu tak bisa mengabaikan hal-ikhwal kepemimpinan politik para elitenya.

Nah, hampir semua pemimpin politik membuat labirinnya sendiri-sendiri. Ada yang bisa keluar, ada pula yang terjebak di dalam: terkerangkeng dalam bangunan rumit yang diciptakannya sendiri. Politik Indonesia di era perubahan sistem, juga sering terkerangkeng oleh sistem yang dibuat oleh para politisinya. Sistem politik berubah mendasar pasca-Orde Baru, tetapi *toh* pada zaman Reformasi sistem (politik) muncul tenggelam alias berubah-ubah sedemikian rupa. Misalnya, yang paling dinamis ialah sistem pemilu dan perubahannya, dari proporsional tertutup hingga terbuka.

RUPA-RUPA TULISAN saya ini mengaitkan banyak hal dalam merekam dinamika perjalanan demokrasi kita pasca-Orde Baru dan absurditas reformasi: partai politik, militer, *civil society*, perilaku politisi, munculnya tradisi pragmatisme-transaksional, otonomi daerah, dan yang lain (jadi yang disorot dua hal sekaligus: perilaku dan sistem, timbal-baliknya). Tema penting esai-esai politik saya, kalau begitu memang tak jauh dari mencatat atau mengulas absurditas-absurditas dinamika demokrasi politik kita. Ketika saya menulis artikel berjudul "Bila Partai Tanpa Politisi" (*Kompas*, 12 Juni 2007) misalnya, tak lain itu dimaksudkan untuk menelusur absurditas politik kita yang, masih demikian diwarnai perilaku-perilaku yang kontradiktif bagi peningkatan kualitas demokrasi. Partai politik banyak yang masih lemah institusinya, justru karena yang mengisi bukan para politisi (saya mengibaratkan, kalau partai itu kolam ikan, isinya bukan ikan, tetapi rupa-rupa makhluk lain yang membuat kolam ikan kita menjadi bukan kolam ikan lagi, tetapi boleh jadi "kolam kecebong").

Partai politik dan pemilu merupakan salah satu tema penting dalam buku ini (Katakan ini tema *pertama*). Bahkan dalam buku ini, saya sempat menulis artikel tentang rasa penasaran orang tentang "Gambaran Pemilu Serentak 2019" di Harian *Kompas*, 12 Agustus 2016. Terkait masalah partai-partai, Anda bisa cek kembali

beberapa kasus yang muncul dalam artikel-artikel sebagaimana tersaji dalam buku ini, mulai dari Kongres I PDIP pada tahun 2000 hingga Munaslub Partai Golkar pada 2016. Selain dua partai itu, beberapa partai lain juga ikut menyembul di tulisan-tulisan saya: Partai Demokrat, PKB, PKS, dan yang lain.

Tema *kedua* yang ikut terhimpun di buku ini ialah seputar TNI/Polri dan Demokrasi. Artikel-artikel saya yang mengulas tentang "politik militer" cukup banyak di buku ini. Pun ikhtiar untuk menjelaskan mengapa fenomena, dalam beberapa kasus, bentrokan antara oknum polisi dan tentara sempat muncul pasca-Orde Baru. Tema militer dan politik ini, lantas mendorong saya untuk menulis tesis, ketika saya melanjutkan studi pada Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, dimana saya lulus pada 2005. Bahkan, ketika saya menempuh pendidikan doktoral (S-3) Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, saya memutuskan untuk meneliti tema militer dan politik, dengan mengambil contoh kasus Turki (2002-2013). Karena itulah, dalam buku ini juga dimuat isu-isu militer dan politik, misalnya tentang masalah kudeta di Thailand, juga di Turki. Itu semua melengkapi ulasan tentang militer dan politik.

Tema *ketiga*, terkait isu-isu yang berkenaan dengan tantangan masa transisi dan reformasi pasca-Orde Baru, pun isu-isu pembangunan nasional. Sub-subtema yang berkembang beragam dari soal dinamika politik lokal, terorisme, hak asasi manusia, korupsi, hingga keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks yang terakhir itu, misalnya di Harian *Kompas*, 26 Mei 2006, saya menulis artikel, "Tiba-tiba Rindu Pembangunan". Artikel itu menggambarkan betapa era transisi dan reformasi, menyita banyak energi bangsa sedemikian rupa, sehingga masalah-masalah percepatan pembangunan nasional "terabaikan". Tulisan lain, saya kaitkan isu pembangunan politik. Tulisan "Kemerosotan Politik" (*Kompas*, 11 Maret 2015), misalnya dari judulnya saja mengingatkan pada apa yang dulu pernah, bahkan sering diulas Samuel P. Huntington, yakni masalah *political order* versus *political decay*. Sehingga, memunculkan pertanyaan, apa relevansi *political order* untuk zaman kita?

Tema *keempat*, terkait kritik kekuasaan dan masalah kepemimpinan. Tema sedemikian, tentu lebih banyak bersifat reflektif dalam uraiannya. Intinya, saya sebagai penulis artikel mengingatkan ke mereka yang diberi amanah berkuasa, agar tidak terjerat pada labirin penyelewengan kekuasaan, sebagaimana sudah jauh di masa lalu dirumuskan Lord Acton, "*Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely*". Dari sinilah, dapat digarisbawahi bahwa penulis artikel di media massa, menurut saya, pada hakikatnya ialah para "juru ingat". Misalnya, di Harian *Kompas*, 30 November 2015, saya menulis artikel "Kekuasaan dan Godaan". Tulisan seperti ini tentu bergaya normatif. Dan, tampaknya memang nyaris seluruh tulisan saya bermadzab tradisionalis, karena tulisan reflektif tentu berlagak filosofis-normatif, meskipun tak lepas juga dari dimensi perilaku (elite dan massa).

Tema *kelima*, refleksi masalah-masalah bangsa atau nasionalisme. Tema ini saya turunkan ke dalam esai-esai yang lentur tentang, imajinasi bangsa ke depan, dengan berpijak pada masalah-masalah yang kita jumpai sekarang. Terkadang, ia bernuansa historis pula. Misalnya, di Harian *Kompas*, 16 April 2016, saya menulis artikel "Menanak Nasi Indonesia". Artikel ini merupakan refleksi kebangsaan, dengan berpiak pada pandangan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) di masa Polemik Kebudayaan pertengahan 1930-an. Juga, refleksi kebangsaan yang saya kaitkan dengan salah satu karya novelis Haruki Murakami tentang lari. Hidup sebuah bangsa, hakikatnya seperti orang yang berlari, dan ketika persaingan antarbangsa sangat dinamis, maka bangsa kita perlu lebih kencang lagi larinya. Terkait hal ini lihat artikel saya di Harian *Kompas*, 29 Desember 2010, "Bangsa yang (Perlu) Berlari". Selaras dengan itu, mental kita sebagai bangsa juga harus berubah secara frontal, dan karenanya, sebagaimana saya gambarkan dalam "Bangsa Kepompong, Bangsa Kupu-kupu" (*Kompas*, 21 Agustus 2010) kita harus berani bermetamorfosis, dan tidak berhenti pada fase ulat: pemakan apa saja secara tidak kenyang-kenyang, bahkan sampai bangsa ini remuk pun! Kita harus mengepompong segera, untuk keluar sebagai "manusia

baru": sebagai kupu-kupu yang indah. Ialah simbol bangsa yang kuat dan jaya.

Tema *keenam*, refleksi masalah-masalah kebudayaan dan lain-lain. Di sini muncul refleksi masalah agama (spiritualitas), gerakan perempuan (isu gender), masalah buruh, etos bangsa, pun dalam sudut pandang tertentu, demokrasi. Misalnya, ketika saya menulis di Harian *Kompas*, 3 Februari 2014, "Masalah Abadi Demokrasi Kita", maka itu merupakan esai kebudayaan, tak sekadar esai politik (tetapi masalah budaya politik). Mengapa demikian, karena, tulisan *nyinyir* saya itu berkisah tentang realitas kepolitikan nasional yang sering tersandeera oleh perilaku elite yang imajinasi demokrasinya terbatas. Di sisi lain, dalam artikel yang lebih lugas, saya menulis "Menemukan Kembali Kedamaian dalam Agama" (*Kompas*, 10 November 2002). Versi awal tulisan saya itu, makalah yang saya sampaikan dalam Latihan Kepemimpinan II HMI Cabang Depok di Gedung Graha Insan Cita, pada beberapa minggu sebelum tulisan itu dimuat *Kompas*. Pun ada tulisan yang versi awalnya merupakan tugas *critical review*, ketika saya masih menjadi mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (kendati, karena sebab ter-tentu saya tidak lulus dari sini), yakni yang dimuat Harian *Kompas*, 14 Januari 2002, "Jenderisasi Demokrasi"

Tema *ketujuh* terkait dengan tulisan-tulisan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan politik Indonesia, tetapi penting untuk cermati. Tulisan-tulisan itu tentu terkait dengan *concern* saya, terutama sebagai doktor ilmu politik yang kebetulan disertasinya tentang politik dan militer di Turki, sebagaimana penjelasan pada tema *kedua*, maka saya sisipkan juga tulisan-tulisan seputar dinamika politik Turki, dan perkembangan, walaupun sekadar ulasan terbatas, Timur Tengah pasca-*Arab Spring*. Disertakannya tulisan-tulisan semacam ini, sesungguhnya juga disertai harapan bahwa peristiwa-peristiwa di luar negeri pun bisa menjadi bahan refleksi bagi kita di Indonesia.

BUKU INI berakhir dengan ulasan mengenai dinamika kepartaian,

setelah tema pengaderan politik bangsa. Tapi, sebelum itu juga ada tulisan "Merayakan Keindonesiaan", artikel yang saya tulis menjelang Idul Fitri tahun 2017. Sebelumnya, suatu tulisan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, sebagaimana pernah diusulkan oleh Nurcholish Madjid. Memang, isu-isu lawas tentang hubungan negara dan agama, Pancasila dan kebhinekaan atau pluralisme sempat mengemuka kembali pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan peristiwa politik yang turut memicu munculnya isu-isu semacam itu. Beberapa tulisan di akhir buku ini mencoba meresponsnya. Masalah dinamika politik nasional yang melibatkan para aktor keagamaan dan politik, bagaimanapun tengah menjadi isu hangat. Populisme politik di Indonesia dan demokrasinya ke depan, tampaknya masih belum akan lepas dari isu-isu identitas dalam politik, terlepas apakah hal sedemikian vulgar atau lembut.

Politik Indonesia masih akan terus bergerak di tengah perubahan zaman dan kondisi masyarakat yang semakin terbuka, terutama oleh perkembangan teknlogi informasi dan riak dunia medsos. Kekuatan-kekuatan politik juga tetap dalam kondisi saling mempengaruhi membentuk suatu *resultante* kepolitikan Indonesia. Perubahan dan kesinambungan akan terjadi. Perubahan bisa berjalan cepat, bisa lambat. Dalam kontetasi politik, kita akan terus diuji, apakah bisa semakin lebih dewasa dalam berdemokrasi, atau sebaliknya. Stabilitas dan ancaman disintegrasi merupakan dua kutub yang lazim dalam suatu negara yang demikian luas, kompleks, dan majemuk. Karenanya faktor kepemimpinan dan interaksi antarelite strategis bangsa dalam menyikapi berbagai masalah kebangsaan, menjadi penting dan menentukan. Selain faktor elite, kita juga tak bisa mengabaikan konteks kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat, yang tidak selalu kekuatan-kekuatan tersebut terintegrasi dengan partai-partai politik. Ranah *civil society* dewasa ini juga sudah lain kondisinya dibanding tempo dulu, khususnya di akhir masa Orde Baru.

Konsolidasi demokrasi kita, seperti halnya dengan persatuan nasional, bagaimanapun selalu dalam ujian. Indonesia hari ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari masa lalunya, dan Indonesia masa depan ialah kelanjutan dari apa-apa yang terjadi pada hari-hari ini. Tulisan-tulisan saya di buku ini, tentu hanya noktah-noktah kecil dan terbatas saja, dari ikhtiar kita semua untuk memperbincangkan Indonesia dan Keindonesiaan kita, kini dan mendatang. Ia tidak menawarkan teori apapun, namun sekadar komentar, kalau bukan uraian sepintas lalu. Memang buku ini bukan buku akademis, di mana Anda pun bebas menilai, termasuk ketika Anda menyimpulkan dengan komentar, misalnya begini: hmmm, sudah *capek-capek mbaca*, ternyata kok tak ada apa-apanya!

SAYA MENGUCAPKAN terimakasih ke berbagai pihak yang telah turut mempengaruhi eksistensi dan survivalitas saya sebagai penulis (artikelis, *opinion writer*) hingga akademisi seperti sekarang ini. Kepada Pak Akbar Tandjung, yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk ikut bergabung dan berkiprah di lembaga yang didirikannya pada awal 2005, *Akbar Tandjung Institute* (dan juga kepada semua kolega di lembaga ini) saya ucapkan terimakasih.

Tentu tak lupa kepada para kolega mahasiswa saya sejak s-1 di UMM hingga s-3 di UGM, pun kolega saya di organisasi HMI. Demikianpun dengan kolega-kolega saya yang pernah berkiprah bersama-sama di DPP KNPI, KAHMI dan Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah. Juga kepada Pak Sulastomo dan para senior di Gerakan Jalan Lurus; Pak Salim Said dan para senior di *Institute Peradaban*. Pak Rully Chairul Azwar, para senior dan kolega di Lembaga Pengkajian MPR. Pun Pak Agung Nurfajar, yang pada suatu masa memberi kesempatan kepada saya bekerja dan memakai lembaganya untuk predikat menulis di suratkabar. Juga rekan-rekan di *Intrans* dan *Katalis*, yang pernah saya berkecimpung di dalamnya. Pak Muhadjir Effendy dan segenap pengurus HIPIIS. Pak Idrus Marham dan segenap kolega di Kemensos.

Terkhusus juga kepada para senior dan kolega di Universitas

Nasional juga diucapkan banyak terimakasih. Tak lupa tentunya terimakasih kepada para redaktur opini, terutama yang di Harian *Kompas*, ketika tulisan-tulisan saya dalam buku ini dimuat (dan ditolak). Pun para pemberi komentar (*endorsement*), sehingga menambah bobot apresiasi buku ini. Mereka para senior, kolega dan junior yang telah bersedia membuat komentar, sebagaimana ditayangkan sebelum *Sekapur Sirih* ini. Mohon maaf apabila gelar akademis mereka tak dicantumkan, dengan pertimbangan, pembaca dapat melacaknya sendiri secara mudah secara penelusuran cepat. Tetapi, barangkali juga karena karena nuansa buku ini opini suratkabar, saya memilih mengikuti pendekatan *Kompas*, ketika tulisan dimuat, seluruh gelar akademis, tanggal alias tak dilekatkan pada nama.

Yang tak kalah penting penting, dan biasanya diakhirkan, untuk keluarga, Bu Alfi, dan anak-anak, Alam dan Izzah. Mereka saksi sejarah paling otentik dalam perjalanan saya, pun para pelipur lara. Dulu, saya sering pulang larut malam, karena masih selesaikan ketikan, *ya* gara-gara menulis opini-opini di koran-koran. Saya belum punya komputer atau laptop sendiri. Maka, tulisan-tulisan ini konon bagian dari asap dapur keluarga kami. Dalam skup lebih luas, keluarga yang dimaksud terutama orangtua dan para kerabat, saudara dekat maupun jauh yang telah menjadi bagian integral dalam sejarah hidup saya.

Selamat membaca, semoga menemukan hikmah!

Jakarta, Desember 2015 - Juli 2017 - April 2018

I

SEMBILAN ANCAMAN PEMILU

[1999]

DEHEGEMONISASI TENTARA AKAN BERJALAN BILA TENTARA BETUL-BETUL MELEPAS PERAN SOSIAL-POLITIKNYA, SEBAGAIMANA YANG PERNAH DIALAMINYA SEMASA ORDE BARU. POLITIK TENTARA IALAH POLITIK KERAKYATAN. DALAM KONTEKS INDONESIA, MELARANG TENTARA BERPOLITIK IALAH MUSTAHIL ADANYA. SEBAB, SEBAGAIMANA DIUNGKAP SALIM SAID, HUBUNGAN TENTARA DAN POLITIK SAMA TUANYA DENGAN SEJARAH REPUBLIK. INILAH YANG MENDASARI KONSEP DWIFUNGSI ABRI. PERSOALANNYA KINI, TENTARA HARUS MAU MENURUTI ATURAN MAIN. DI DATARAN FILOSOFIS, POLITIK KERAKYATAN (YANG HENDAK DICAPAI POLITIK TENTARA) IALAH BERORIENTASI PADA BAGAIMANA MASA DEPAN DEMOKRATISASI DITEGAKKAN.

- DEHEGEMONI TENTARA

Sembilan Ancaman Pemilu 1999

KOMPAS, 13 MEI 1999

APABILA SUKSES, Pemilu 1999 merupakan pemilu demokratis terbesar di Indonesia pasca-1955. Ia menjadi tonggak penting masa depan reformasi dan demokrasi kita. Sebaliknya apabila gagal, pintu masuk demokrasi tertutup rapat. Momentum strategis pemulihan kepercayaan rakyat, pemantapan legitimasi politik dan peluang *recovery* krisis multidimensional menjauh.

Ancaman pemilu gagal bisa datang dari sembilan arah. *Pertama*, dari arah kelompok revolusioner yang menggelindingkan tema sentral "menolak pemilu". Mereka berdalih pemilu tak akan bisa berjalan jujur dan adil, bersih dan demokratis. Alasannya dikaitkan pengalaman pemilu-pemilu Orde Baru yang manipulatif. Kelompok ini menghendaki perubahan cepat ekstra konstitusional melalui pembentukan tim transisional yang direkrut dari tokoh-tokoh masyarakat ke wadah Komite Rakyat Indonesia. Ide ini sulit dipraktikkan, banyak yang menentang dan menilainya *absurd*. Kelompok ini terdiri dari beberapa elemen gerakan mahasiswa semacam Forkot, Famred, Kamtri dan sebagainya.

Kedua, dari fenomena konflik internal Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejak awal KPU terbentuk, potensi konfliknya tinggi dan bisa berdampak menunda pemilu. Walaupun para anggotanya bersemangat luar biasa agar pemilu tetap diberlangsungkan 7 Juni 1999, namun apabila konflik antara kubu reformis dan *status quo* ataupun kubu oportunis tak teratasi, gagalnya pemilu justru bisa datang dari KPU. Karenanya, konflik di internal KPU harus selalu dicermati. KPU diuji kemampuannya mengelola konflik.

Ketiga, dari arah kelompok "pesimis pemilu". Ia tidak sepenuhnya yakin pemilu terselenggara tepat waktu. Pesimisme ini terungkap misalnya, oleh pernyataan mantan Presiden Soeharto dalam wawancaranya dengan *Yomiuri Shimbun*, yang menyiratkan pemilu bakal ditunda. Dilihat dari aspek persiapan, memang sulit bagi KPU leluasa menentukan rencana, mengingat waktu dan dananya terbatas, belum lagi besarnya potensi konflik. Kelompok ini memiliki dua kecenderungan: yang aktif ataukah pasif menyebarkan pandangan pemilu akan gagal.

Keempat, dari kelompok apatis pemilu yang nyaris tidak memiliki kepedulian politik sama sekali terhadap pemilu. Walaupun gegap gempita, tatkala simbol partai-partai politik mudah ditemui di berbagai tempat, mereka tetap *cuek* atau apatis saja. Pemilu, bagi mereka bukanlah momentum istimewa perubah nasib bangsa. Walaupun iklan di televisi amat menggugah masyarakat daftar ramai-ramai ikut pemilu, kelompok ini tidak menggubris. Meskipun demikian, tak semua kelompok apatis memiliki penyebab sama. Mungkin mereka memang tak sempat mendaftarkan diri, sementara petugas pendaftar pun tak lagi keliling dari rumah ke rumah.

Kelima, kelompok *status quo*. yang secara sistematis tak sepakat dengan segala agenda reformasi. Mereka berupaya sekuat tenaga menggagalkan pemilu. Kelompok ini didominasi mereka yang dulu memiliki akses politik dan ekonomi yang kuat. Berbagai kasus pemboman, ancaman teror, kerusuhan di berbagai daerah, kemungkinan besar melibatkan mereka. Secara politik, mereka ingin aman. Secara ekonomi, agar akses yang pernah dimilikinya tak terpotong. Mereka punya dana besar, termasuk untuk menggagalkan pemilu.

Keenam, dari arah ancaman konflik terbuka – yang diwarnai kekerasan fisik – antarmassa politik lapis bawah (*grass root*). Menjelang Pemilu 1999 intensitas konflik lapis bawah cenderung semakin meninggi. Kerusuhan Purbalingga yang menyasar massa politik Golkar oleh massa yang beratribut PDIP belum lama ini, sekadar contoh konflik politik lapis bawah mudah terjadi. Intensitas konflik politik massa lapis bawah penyebabnya beraneka mulai dampak

psikologis sosial yang memicu resistensi terhadap negara, rendahnya pengalaman berdemokrasi, manipulasi elite hingga menonjolnya politik identitas.

Ketujuh, apabila militeri tak profesional dan independen dalam politik. Militer dalam masa transisi biasanya menunggu kesempatan *come back*, berupaya mengendalikan sistem kekuasaan dengan bedil. Kekhawatiran ini diperkuat oleh masih kelemahan kalangan sipil yang sulit membangun konsensus. Pemilu 1999 merupakan momentum eksperimentasi demokrasi. Apabila gagal, intervensi militer tak terelakkan. Tetapi, apabila menyimak dukungan TNI terhadap pemilu, kekhawatiran ini kecil saja.

Kedelapan, dari kalangan petualang atau broker politik yang memanfaatkan momentum jelang pemilu. Mereka termotivasi secara material dan kekuasaan untuk melakukan aksi-aksi, bahkan dengan cara-cara kotor sekalipun. Kehadirannya bak siluman, rapi menjalankan aksi politiknya. Sulitlah kiranya menuduh sebuah kelompok politik sebagai kumpulan petualang politik yang menerapkan politik materi. Namun, biasanya para petualang ini mudah diamati, lewat manuver-manuver politiknya.

Kesembilan, skenario asing. Inilah yang sering dipandang paling "berbahaya", namun sebenarnya fenomena biasa saja. Tak dapat dipungkiri pihak-pihak asing memiliki kepentingan. Jatuhnya Orde Lama dan Orde Baru, menurut sementara kalangan, tak lepas skenario pihak asing. Menjelang pemilu, mereka menerapkan skenario besarnya. Mereka memiliki catatan "hitam-putihnya" Indonesia. Kepentingan asing berbeda-beda, ada yang menghendaki pemilu sukses, namun ada yang menghendaki gagal.

ANCAMAN PEMILU di atas layak dipertimbangkan sebagai ranjau-ranjau reformasi. Tantangan utama kelompok reformis bagaimana mengelola potensi konflik. Perbedaan pandangan tak lantas memicu bermusuhan. Apabila kekerasan, dendam, dan politik Machiavelistik dikedepankan, demokrasi kita semakin menangis.●

Dehegemoni Tentara

KOMPAS, 4 MEI 1999

MENANGGAPI ARUS DERAS reformasi, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut hanyalah salah satu jalan yang ditempuh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto dalam upaya membangun citra ABRI lebih baik, selaras reformasi. Langkah lainnya, selaras Ketetapan MPR, melepas jajaran kepolisian, dan memberi pilihan yang tegas bagi anggota ABRI yang rangkap status: pilih anggota ABRI atau pensiun dini. Langkah terakhir ini, dikenal sebagai fenomena "sipilisasi militer".

Secara institusional, TNI kini terlihat aktif merespons isu-isu strategis. Dibandingkan dengan ABRI Orde Baru, TNI lebih realistis menampakkan dirinya belajar berdemokrasi. Paradigma Baru ABRI yang dikemukakan Jenderal Wiranto menunjukkan keinginan TNI tak akan mendominasi segala bidang. Tugas utamanya jelas, menjaga kedaulatan negara (fungsi pertahanan) dan ikut memperkuat aparat keamanan sesuai prosedurnya (fungsi keamanan).

Sejak Soeharto lengser, rakyat kian berani menggugat eksistensi ABRI sebagai *institusi gagal*. Banyak kritik pedas dilontarkan. Selain terlalu sibuk berpolitik dan berbisnis, kritik yang esensial mengarah dampak buruk pendekatan militeristik. Kini, manakala TNI menggunakan kekerasan segera berhadapan dengan masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hak asasi manusia (HAM). Apakah hegemoni tentara mulai rontok?

Studi M Nadjib Azca (1998) tentang persepsi dwifungsi ABRI

selama Orde Baru mencatat, fase kepolitikan Orde Baru (1966-1990-an) menggeser dwifungsi dari dominasi ke hegemoni. Fase sebelumnya, dwifungsi mengalami pergeseran: dari aksi ke akomodasi (1945-1959), dan dari akomodasi ke dominasi (1959-1966).

Kini arus reformasi terus melaju, tak ada satupun kekuatan sejarah dapat membendung. TNI memasuki fase titik balik: dari hegemoni ke dehegemoni. Orang membayangkan, militer segera kembali ke barak (*back to barrack*), melepas hegemoni politiknya lantas ikut aturan demokrasi. Namun, bayangan ideal itu terbentur realitas politik di mana TNI masih punya 38 kursi di legislatif.

MILITER TRANSISI

REFORMASI TNI dengan demikian tidak terjadi secara sukarela melepas hegemoninya dengan menyerahkan sepenuhnya persoalan sosial-politik ke sipil. TNI masih ingin berpolitik, dengan janji berangsur menguranginya hingga suatu saat melepas sama sekali kursi kekuasaanya di legislatif.

Di masa transisi, bisa mengemuka dua skenario alternatif, optimis dan pesimis. Yang optimis TNI konsisten melakukan dehegemoni, mendukung gerak reformasi dan demokratisasi. Tentara memberi keikhlasan kepada sipil melakukan eksperimen demokrasi. Militer berkonsentrasi di bidangnya dan tak lagi menggunakan cara Orde Baru, mengadu domba kekuatan politik sipil melalui ragam infiltrasi intelijen yang canggih. Tentara reformis mengerti tugas dan perannya menjaga rerformasi dan demokrasi.

Skenario pesimis, bermuara ingkarnya militer pada skenario optimis, tak peduli citranya buruk. Ia memainkan strategi rehegemoni, menghadirkan Orde Baru volume dua: (1) TNI semakin eksklusif, jauh dari keberpihakan nasib rakyat; (2) konflik terbuka di internal TNI cenderung meningkat intensitasnya; (3) tentara kembali menggunakan cara-cara militerisme; (4) tentara menggunakan kekuatan sipil sebagai kendaraan politiknya, memanfaatkan konflik sosial masyarakat untuk kepentingan karier militer dan penguatan hegemoninya.

Sejauhmanakah elite militer meneguhkan citra reformatoris kelembagaan TNI? Bila dilihat di dataran paradigma, skenario pertama dominan. Apabila faktor-faktor eksternal tidak mendesaknya ke paradigma lama, reformasi TNI berjalan efektif. Seberapa jauh faktor eksternal berpengaruh, membutuhkan pencermatan pola relasi petinggi TNI dengan para elite politik.

Tidaklah mengherankan apabila gerak langkah Wiranto, senantiasa diterjemahkan secara politik, sejauhmana pola Wiranto-Habibie, Wiranto-Soeharto, Wiranto-Gus Dur, Wiranto-Amien Rais, Wiranto-Prabowo dan sebagainya. Bagaimanapun, Wiranto representasi TNI institusional yang secara teoritis salah satu kekuatan politik penting. Mencermati gerak langkah Wiranto karenanya, lebih menarik ketimbang mengevaluasi kinerja tentara. Inilah sebabnya mutasi TNI pun tak lepas analisis politik.

Dari sudut pardigmatik, tentara memberi angin bagi berhembusnya iklim demokrasi, memberi kesempatan luas bagi medan politik sipil melakukan eksperimentasi demokrasi. Tentara mau tidak mau harus selaras alur reformasi. Namun apakah paradigma reformasi segera diikuti perubahan sikap mental dan budaya, jauh dari ideologi militerisme? Kasus Timor-Timur dan Aceh, bisa menjadi telaah penting menjawabnya.

Citra reformasi tentara bisa ternoda oleh, *pertama*, ekses pendekatan militer yakni tindakan kekerasan militer dalam masyarakat sipil. Terlepas dari pro-kontra tindakan militer dalam kasus-kasus perlawanan rakyat bersenjata, semisal di Aceh dan Timor-Timur, pendekatan militer justru sebenarnya merupakan bentuk kegagalan diplomasi persuasif penyelesaian konflik yang bukan melalui perang terbuka. *Kedua*, bila tentara tak mampu adil dalam pengamanan Pemilu 1999. Harus diakui brutalitas massa politik era reformasi di *grass root* belakangan ini pesat. Wibawa tentara turut teruji.

Dehegemoni berjalan bila tentara melepas peran sosial-politiknya. Sebagaimana diungkap Salim Said, hubungan tentara dan politik sama tuanya dengan sejarah republik. Bila ditengok di lembaran sejarah, konsep "jalan tengah" Jenderal Besar A.H. Nasution

sebagai cikal bakal dwifungsi ABRI, sesungguhnya menghendaki peran militer proporsional, tidak bersinggungan secara tajam ke wilayah sipil. Konsep tersebut, tak lepas dari terpinggirnya militer dari dominasi politik sipil 1950-an. Pada saat merasa terpinggir, militer menghendaki semacam konsesi politik. Namun, tatkala militer diberi kedudukan di legislatif dan eksekutif, yang berkembang justru peran dominan, bahkan lantas hegemonik dalam politik.

Kinilah saatnya peran hegemonik itu di-*lengser*-kan. Semoga upaya TNI, dalam melakukan rekonsolidasi internal, termasuk mengubah nama ABRI menjadi TNI, mampu merubah citranya yang militeristik ke wajah tentara yang *civilized* alias beradab.●

Pencapresan Gus Dur

Politik Politisi Versus Politik Ulama

KOMPAS, 16 SEPTEMBER 1999

KELOMPOK POLITIK POROS Tengah belakangan ini gencar meyakinkan Gus Dur dan pendukungnya, bahwa dukungan bagi pencalonan Gus Dur sebagai presiden betul-betul serius. Terakhir, misalnya Gus Dur didampingi Presiden Partai Keadilan Nur Mahmudi Ismail dan utusan Poros Tengah Fuad Bawazier bertemu dengan para kiai di Pondok Pesantren Langitan, Tuban untuk menjajakinya (*Kompas*, 1/9/1999).

Poros Tengah – kaukus partai-partai Islam plus PAN – agaknya harus bekerja keras meyakinkan maksud politiknya itu, mengingat manuver politik yang dilakukannya diragukan. Kalangan politisi PKB di bawah Matori Abdul Djalil, tetap merasa keberatan dengan pencalonan Gus Dur oleh Poros Tengah. Matori ingin mempertahankan keputusan rapat pimpinan (rapim) PKB yang sepakat "menjagokan" Megawati sebagai presiden.

Keraguan kubu PKB layak dipahami, sebab – menurut argu-

mentasi Matori – pencalonan Gus Dur oleh Poros Tengah terkesan dilakukan secara pribadi, bukan institusi. Secara institusi Poros Tengah memang belum memutuskan pencalonan tersebut, lewat forum rapim partai – sebagaimana dilakukan PKB. Sebagai politisi "berpengalaman" tentu Matori dan elite PKB mempunyai hitungan (kalkulasi) dan logika politik tersendiri.

Di sisi lain Gus Dur mengiyakan pencalonannya itu "atas pertimbangan agama". Gus Dur belakangan kerap memakai "pendekatan agama" untuk menyikapi persoalan politik – salah satunya menyangkut pertobatan Pak Harto. Gus Dur memakai legitimasi keulamaannya untuk menyikapi ragam persoalan politik. Orang acapkali lupa Gus Dur itu ulama, sosoknya multidimensi. Gus Dur merasa perlu mengingatkan kembali posisinya tersebut dengan mendekati para kiai guna memperoleh legitimasi pencalonannya.

BOLEHLAH dibilang, ketegangan Gus Dur di satu pihak – yang belakangan rajin mengkampanyekan dirinya – versus Matori Abdul Djalil yang berpegang pada keputusan rapim dan bersikukuh pada dukungannya ke Megawati, merupakan pertarungan antara politik politisi melawan – sebut saja – politik ulama.

Fenomena demikian merupakan konsekuensi logis dari beberapa hal. *Pertama*, di teropong dari akar sejarahnya PKB merupakan partai politik yang berdiri atas restu PB NU, untuk menyiasati bahwa NU tetap tidak akan menjadi partai politik. Terpisahnya NU dan PKB secara institusi, jelas menjadikan kekuatan politik NU terbelah menjadi dua "otoritas kekuasaan" yang bisa berbeda. Keinginan politis PBNU bisa saja tidak akan dipenuhi oleh PKB, karena pertimbangan politik.

Kedua, inilah risiko yang harus dihadapi "elite politik" PB NU – atau yang terpresentasikan dalam diri Gus Dur – tatkala menyerahkan PKB di bawah kendali politisi. Dulu Gus Dur ber-*hujjah* Matori orang yang pas memimpin PKB karena telah malang melintang di dunia politik, karenanya tak bisa diragukan lagi kemampuannya memimpin partai. Di tradisi NU, kharisma Gus Dur hebat, sehingga

ia yakin Matori mampu dikendalikan.

Kharisma Gus Dur di hadapan Matori semakin tebal, tatkala di depan publik PKB, Matori menangis di bahu Gus Dur karena terharu. Kini Gus Dur harus paham, bagaimanapun ia berbeda pandangan dengan Matori sebagai politisi. Apakah fenomena ini menandakan terjadinya pergeseran otoritas di kalangan NU – secara politik? Kini ada dua otoritas, di mana soal-soal keulamaan tetap dipegang oleh kiai-kiai – yang secara struktural di luar PKB – sementara di wilayah politik dipegang oleh politisi PKB. Sebenarnya tak tepat bila telah terjadi pergeseran otoritas politik, kecuali telah terjadi tarik-menarik – secara politis – "barisan ulama" versus "barisan politisi".

FENOMENA pertarungan kedua "barisan" di tubuh NU – tentu saja tak bisa dibaca secara lugas, setiap ulama non-struktural PKB pasti membela Gus Dur, sebaliknya setiap fungsionaris PKB membela Matori. Barangkali lebih tepat bila fenomena tersebut dibaca sebagai kecenderungan politik yang kini tengah menggejala dan berproses.

Tradisi politik NU tak lepas dari dominasi ulama – yang sikap politiknya fleksibel. Fleksibilitas politik NU tampak, misalnya dari sikap politik mereka di zaman Nasakom, fusi PPP, hingga penerimaan asas tunggal Pancasila. Fleksibilitas kini dimainkan Gus Dur, sekaligus PKB. Gus Dur agak menyalahi tradisi politik NU, karena bersedia menerima "lamaran" Poros Tengah (yang *notabene* "Islam modernis"). Namun PKB juga menyikapinya fleksibel untuk tak mematuhi secara otomatis fatwa politik Gus Dur.

Dari sekarang dapat diperkirakan adanya tiga skenario. *Pertama*, Gus Dur tetap melenggang, Matori tetap berupaya menggolkan Megawati. Artinya sampai Sidang Umum MPR, tak ada titik temu Gus Dur-Matori. Suara PKB tetap mendukung Megawati. *Kedua*, Matori akan mendukung Gus Dur, otomatis seluruh suara PKB mendukungnya. Bila terjadi, kharisma Gus Dur masih melampaui pertimbangan politis Matori dan elite PKB lainnya. Kalangan PKB tetap berada dalam rel tradisi politik – yang dikendalikan oleh para

kiai. *Ketiga*, terjadi perpecahan suara, satu kelompok memilih Gus Dur, kelompok lain membela Megawati. Maka, kekuatan pengaruh Gus Dur dan Matori akan diuji, manakah yang lebih kuat.

Fenomena Gus Dur-Matori merupakan dinamika klasik politik NU. Pergerakan politik NU memang sarat konflik sekaligus banyak memunculkan wacana menarik, justru karena kontroversinya. Ke mana arah pendulum politik NU bergerak? Ke arah resultan tarik-menarik Gus Dur-Matori.●

Dilema Reformasi TNI

KOMPAS, 30 DESEMBER 1999

ADA DUA IDE menarik yang dilemparkan Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah, Panglima Kodam VII/Wirabuana. *Pertama*, ia menyatakan prajurit TNI bukan prajurit hulubalang rezim dan bukan prajuritnya jenderal. *Kedua*, dalam konteks pemberlakuan otonomi daerah, ia tidak sepakat dengan gagasan pemekaran Kodam, justru sebaliknya ia melontarkan ide tentang penciutan fungsi teritorial TNI. Menurutnya, kalau TNI tak melakukan penyesuaian peran dalam pembinaan terotorial, itu bisa menghambat otonomi daerah. Karena, otonomi daerah merupakan suatu upaya pemberdayaan terutama di bidang politik dan ekonomi.

Dua lontaran Jenderal Agus tersebut berkaitan dengan konteks penguatan *civil society*, yang ditandai pula oleh pengurangan peran militer di dunia politik dan wilayah-wilayah sipil. Jenderal Agus seolah menekankan bahwa tidak ada yang perlu dikeramatkan (disakralkan) dalam melihat hubungan antara prajurit TNI dan komandannya, kecuali dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Pengalaman masa Orde Baru, jelas sekali memperlihatkan betapa telah terjadi kecenderungan antara "tugas TNI" dengan kepentingan rezim yang berkuasa (TNI adalah alat rezim). Inilah

yang tidak relevan di masa sekarang, apalagi di masa depan.

Sementara lontaran kedua, seolah menegaskan bahwa sebagai konsekuensi logis dari pandangan reformis, sesuai dengan paradigma *civil society*, pemekaran pembinaan teritorial TNI, merupakan langkah mundur semata. Dalam konteks ini, para petinggi TNI tidak sepakat dengan pendapat Jenderal Agus, walaupun tidak bisa menyalahkannya. Sementara itu, pemekaran Kodam pun tetap dilakukan, menjadi 17 buah di seluruh tanah air.

DILEMA

HINGGA kini TNI masih belum bisa keluar dari berbagai dilema yang bisa diringkas ke kalimat: TNI sepakat untuk mendukung *civil society*, namun di lain pihak kondisi sosial-politik pasca-Soeharto menggodanya memekarkan Komando Distrik Militer (Kodam). Pemekaran Kodam cenderung menegaskan pendekatan keamanan. Barangkali TNI merasa punya alasan tepat, misalnya terpaksa dilakukan karena potensi disintegrasi bangsa amat serius. Sehingga, pendekatan *a la* Orde Baru masih perlu. Masih terlihat kental, di benak para petinggi TNI (tentu minus tokoh seperti Jenderal Agus), pola pikir lama untuk dipakaikan menghadapi setiap persoalan.

Ini bisa dipahami, setidaknya oleh dua sebab. *Pertama*, pengaruh kuat budaya politik Orde Baru yang sentralistik, masih begitu kuat di dalam benak mereka. Yang berkembang saat itu, terutama mengemukanya satu pikiran yang berasal dari naluri militer bahwa cara-cara penyelesaian militeristik merupakan cara penyelesaian yang dipandang efektif. Ini *klop* dengan kependngan rezim yang berkepentingan melanggengkan kekuasaannya. Maka, ketemulah pandangan militeristik tersebut dengan kecenderungan toritarianisme negara.

Kedua, ada nuansa ketidaksabaran kolektif dalam memecahkan kompleksitas persoalan yang ada. Ketidaksabaran tersebut mudah menjangkiti mereka, apalagi kondisi sosial-politik di tanah air menunjukkan berbagai gejolak yang tak kunjung reda (Aceh, Ambon, Irian Jaya, dan sebagainya). Barangkali ada benarya, fak-

tor pengadilan atau penyelidikan terhadap para petinggi TNI yang diduga melanggar HAM, khususnya dalam kasus Timor Timur dan Aceh, bisa memicu para prajurit TNI, meminjam Pangkostrad Letjen Djaja Suparman, "sakit hati" dan "bersikap membabi buta".

Dalam relasinya dengan masyarakat, sesungguhnya TNI memiliki problem empati. Selama ini terkesan timbul kekecewaan "begitu parah" masyarakat terhadap TNI. Citra TNI begitu buram. Masyarakat mudah apriori dengan segala perilaku prajurit TNI. Tetapi di sisi lain, para prajurit TNI pun merasa sering dipojokkan tanpa alasan yang mereka pahami. Maka, sesungguhnya diperlukan kejujuran dan keterbukaan. TNI harus mampu melebur ke tengah masyarakat, sebagai tentara rakyat, bukan tentara rezim, "hulubalang penguasa". Masyarakat pun seyogyanya bisa melepas sikap apriorinya terhadap TNI dalam kerangka masa depan bangsa.

REFLEKSI

TNI DI MASA pemerintahan Gus Dur semakin sering dikritisi masyarakat, dipertanyakan komitmennya terhadap masa depan reformasi. Ia konsekuensi logis dari perkembangan situasi dan pola pikir masyarakat yang semakin sadar pentingnya makna *civil society*. Dari kalangan dalam TNI sendiri, mulai tumbuh budaya kritisisme, yang ditandai kemauan kuat alias tumbuhnya ide-ide segar untuk memperbaiki citra dirinya, yang selama ini terpuruk.

Namun, ide-ide segar itu agaknya masih perlu waktu untuk menemukan persemaiannya di dataran realitas. Untuk merubah budaya yang selama ini telah berkembang jauh dalam institusi militer ke dalam budaya *civil society* tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dalam konteks inilah kekritisan masyarakat dalam memantau komitmen reformasi TNI penting.

Masyarakat hanyalah elemen yang dapat menyuarakan kesetujuan dan ketidaksetujuannya terhadap segala kebijakan yang ditelorkan institusi TNI (tentu dengan segala macam argumentasinya). Apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu hendaknya dirasakan betul oleh TNI, sehingga kebijakan-kebijakan

yang dimunculkannya tidak bertentangan alias bertabrakan dengan kehendak masyarakat.

Di sisi lain, DPR, sebagai institusi wakil rakyat pun berperan penting. Ia menghimpun segala aspirasi masyarakat, lantas memperjuangkannya. Dalam konteks kebijakan TNI, DPR sudah sepatutnya kritis dan menjaga wibawanya. Ia harus mampu memberi masukan dan menyatakan kesetujuan dan ketidaksetujuannya terhadap kebijaksanaan TNI.

Masukan bagi TNI dimaksudkan agar ia tidak terjerembab ke ragam persoalan dilematis. Masyarakat seyogyanya menawarkan alternatif pemecahan masalah, untuk menghindari sikap apriori. Pen-ting bagi TNI menujukkan kesungguhannya di jalur demokrasi. Ragam kasus pelanggaran HAM perlu diselesaikan elegan dan berkeadilan. Hendaknya petinggi TNI meresponsnya *fair,* berani bertanggung jawab. Masyarakat juga harus bersikap obyektif. Keliru bila TNI terus-menerus dihujat tanpa diberi kesempatan memperbaiki citra dirinya.●

Memahami Polarisasi Politik Ulama

KOMPAS, 25 AGUSTUS 1999

BILA DILIHAT SAKSAMA, ulama di Indonesia memiliki peran signifikan dalam dinamika politik umatnya. Dalam hal ini, menyimak pengalaman Pemilu 1999, eksistensi ulama justru dipertanyakan. Beberapa kasus, semisal imbauan agar tidak memilih partai politik yang memperjuangkan caleg non-Muslim, merupakan potensi pemicu konflik yang cukup mencemaskan. Selain imbauan tersebut ternyata tidak efektif, berbagai kalangan memandang langkah tersebut tidak mendukung proses demokratisasi.

Pertemuan ulama-ulama NU yang berafiliasi politik ke PKB di Rembang, misalnya, mengkritik keras MUI serta menyarankan

agar tidak mengeluarkan fatwa, imbauan atau ajakan yang bersifat politis kepada umat Islam. Memang, belakangan kiai-kiai NU getol melakukan kajian fikih politik untuk melegitimasi persoalan politik tertentu, semisal persoalan presiden wanita. Namun, polarisasi pendapat ternyata dengan mudah terlihat, tak hanya di tubuh NU, juga nyaris di ormas-ormas Islam lain.

Politik memang mampu membikin para ulama terpolarisasi sedemikian rupa, – meminjam istilah Denny JA – terbelah menjadi dua kubu konservatif dan progresif. Kampanye Pemilu 1999 lalu, misalnya, diwarnai menghamburnya puluhan, bahkan ratusan kiai membela partai masing-masing. Fenomena ini konsekuensi logis dari tumbuhnya partai-partai Islam di era reformasi, serta kondisi demografi umat Islam sebagai yang terbesar.

Bila dicermati secara agak detail, nyaris tidak ada kiai (NU) yang independen, alias kiai yang tidak menerjunkan diri dalam kancah politik praktis – semacam KH Sahal Mahfudz atau KH Zainuddin MZ. Kiai-kiai NU, misalnya banyak terjun membela PKB – walaupun mereka tampak ada di mana-mana. Akibatnya, polarisasi terjadi, baik secara politik maupun juga secara pemikiran. Dan dalam situasi pasca-pemilu, polarisasi itu amat terasa.

PERGESERAN OTORITAS

BEBERAPA catatan berikut setidaknya menggarisbawahi relasi khas ulama dan politik. *Pertama*, terdapat semacam kewajiban bagi mereka untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam lewat pendekatan politik. Argumen mereka tak lepas dari tinjauan normatif. Menjatuhkan pilihan ke dunia politik praktis masih dirasa efektif untuk menyampaikan "skenario moral" yang sebelumnya dilakukan dengan pendekatan kultural. Pengalaman kesejarahan yang begitu panjang turut mempengaruhi "posisi psikologis" para kiai terjun ke politik. Pemilu 1955 dan masa demokrasi parlementer merupakan tinjauan menarik.

Kedua, pilihan pendekatan Islam politik menunjukkan bahwa belum ada kemapanan yang jelas bagi mereka keluar dari dunia poli-

tik. Dalam sejarah Indonesia merdeka, terutama masa demokrasi parlementer, kekuatan politik Islam nyaris tak selalu optimal. Hasil Pemilu 1955 menyebutkan suara partai-partai Islam bila digabungkan menjadi satu tidaklah mencapai 50 persen dari total suara.

Di masa Orde Baru, depolitisasi membuat "kekuasaan politik Islam" menyusut dan kalah dengan "kekuatan-kekuatan lain". Kasus penetapan P4 dan asas tunggal misalnya, acapkali dianggap sebagai simbol "kekalahan telak" mereka. Di sisi lain, pada kenyataannya umat Islam (secara ekonomi dan politik) selalu terpinggir.

Ketiga, menyangkut persoalan eksistensi komunitas yang dipimpinnya. Ulama memiliki otoritas yang besar di dalam komunitasnya. Oleh sebab itu, tidak salah bila ada yang menerima tawaran politik dari kekuatan politik tertentu untuk memberi sokongan "suara". Di masa Orde Baru "*money politics*" ke pesantren-pesantren amat biasa. Kiai-kiai yang mau mendukung Golkar, misalnya – bila dibandingkan kiai-kiai non-Golkar – pesat membangun infrastruktur Pondok Pesantren yang diasuhnya.

Ketiga catatan di atas menunjukkan, para kiai menggeser otoritas kulturalnya ke politik. Di masa Orde Baru pergeseran otoritas dari kiai kultural ke kiai politik sesungguhnya juga terasa, kendati samar. Tetapi fenomena tersebut semakin menemukan momentumnya di era reformasi. Pendekatan politik dirasa belum final, mereka harus berkiprah merebut kekuasaan.

RISIKO

PERGESERAN otoritas tersebut bukan tanpa risiko. Setidaknya terdapat lima risiko. *Pertama*, risiko perpecahan umat. Azyumardi Azra misalnya menyebut pertikaian terbuka antarmassa pendukung partai berbasis umat Islam belakangan ini, lebih bermotif politik murni. Dulu, pada Pemilu 1955 – tatkala pertikaian nyaris tak berbentuk kekerasan fisik – konflik lebih disebabkan masalah-masalah *furu'iyyah* – seperti soal *ijtihad*, *taklid*, *mazhab*, *qunut*, *talkin* dan persoalan fikih praktis lainnya. Jadi tampaknya, ketika itu konflik karena *furu'iyyah* nyaris berhenti di ranah verbal (*felt conflict*), tak

sampai ke konflik terbuka (*manifest conflict*) yang diwarnai unsur kekerasan.

Kedua, risiko menguatnya subyektivitas politik. *Setting* politik nasional membikin masyarakat terkotak-kotak dalam warna politik yang berlainan. Mengentalnya subyektivitas kiai dalam menyikapi persoalan-persoalan politik, boleh jadi lantas melupakan obyektivitas-obyektivitas sehari-hari. Akibatnya umat merasa bingung dan "kehilangan pegangan" yang pasti. Bahkan di sisi lain umat semakin fanatik membela kotak-kotak politik yang membingkainya, apalagi setelah memperoleh legitimasi dari para kiai. Kotak-kotak politik pun makin menajam, apalagi akan tambah seru dan mencemaskan bila egoisme politik dan gejala komunalisme muncul.

Ketiga, risiko terkurasnya energi umat ke persoalan-persoalan non-subtansial. Berpolitik memang merupakan kewajiban, atau ibadah yang perlu dipikirkan masak-masak, agar mampu melempangkan jalan menuju cita-cita ideal umat. Artinya, politik bukan persoalan sepele. Tetapi ia butuh energi yang luar biasa besar. Politik bagaimanapun sekadar jalan untuk mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. Tetapi, bagi kalangan awam tentu sulit membedakan mana yang substansif, mana yang artifisial. Salah paham politik, akibatnya, menjadi keniscayaan yang luar biasa.

Keempat, risiko kegagalan eksperimentasi politik. Pemilu 1999 merupakan eksperimentasi politik sipil yang terbesar di Indonesia setelah Pemilu 1955. Umat Islam merupakan mayoritas sipil yang memiliki potensi politik terbesar. Melihat peta politik umat Islam belakangan, untuk mencapai hal-hal yang strategis dan kompak di antar-kekuatan politik Islam amat tidak gampang. Dalam konteks ini, tampilnya para kiai di panggung politik memunculkan risiko yang fatal, apabila massa politik – biasanya mengerucut di level akar rumput tak mampu menterjemahkan secara rasional pesan-pesan politik para kiai, hingga yang muncul radikalisasi.

Kelima, merosotnya wibawa kultural kiai. Ini risiko yang harus siap diterima para kiai-politik. Mereka akan dinilai tidak mampu mengayomi semua kalangan, kecuali membela kekuatan politik

tertentu saja. Bagi kiai besar semacam Gus Dur, pilihannya untuk membela PKB dan meninggalkan posisinya sebagai pucuk pimpinan PBNU untuk sementara, tidak langsung disambut positif segenap warga NU – bahkan banyak yang menyayangkannya. Gus Dur menyempitkan posisinya di lingkup mikro, dibanding posisinya dulu sebagai tokoh Islam-kultural yang kritis terhadap kekuasaan.

MAKNA PENTING

NAMUN selain ada risiko, politisasi kiai memiliki makna tertentu dalam proses tranformasi politik di tingkat elite. Munculnya para kiai di panggung politik sebagai juru kampanye maupun sebagai calon legislatif, memiliki makna signifikan dalam konteks ini. Setidak-tidaknya terdapat pula lima catatan bagi masa depan politik kiai, bila eksperimentasi politik sipil kali ini berhasil dilangsungkan.

Pertama, dinamika politik akan diwarnai kalangan elite Islam yang setidaknya secara normatif memiliki wawasan keagamaan yang luas dan mengakar. Dari segi kualitatif, ia diharapkan mampu membawa perubahan yang bermakna bagi masa depan Islam-politik di Indonesia. Artinya, kualitas produk yang dihasilkan legislatif semakin meningkat seiring dengan pesatnya mobilitas vertikal dan horisontal umat Islam di Indonesia di era reformasi ini.

Kedua, proses politisasi yang menempatkan mereka mampu menjadi elite politik juga menghendaki kiai untuk mampu menjadi faktor peredam konflik. Ini konsekuensi dari teori politisasi, semakin jelas kelompok kepentingan mengorganisasikan diri secara politik, makin besar peluang nya menciptakan konsensus para pemimpinnya. Konflik tingkat bawah, akan efektif bila elite politik mampu menetralisir melalui kesepakatan-kesepakatan damai. Menggumpalnya kesatuan-kesatuan politik di tubuh umat Islam yang dipimpin kiai-kiai karismatik bisa membentuk pola-pola baru penyelesaian konflik internal umat Islam.

Ketiga, mereka berpeluang untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam secara transparan, kritis dan konkret. Ini tak lepas dari pengalaman sejarah. Para kiai-politik menggantungkan jawaban-

nya pada keprihatinannya yang mendalam atas peran dan proporsi politik mereka yang selama Orde Lama dan Orde Baru senantiasa berada dalam posisi marginal-"diperintah" bukan "memerintah". Dengan duduk di kursi legislatif secara proporsional, maka perjuangan aspirasi umat Islam akan lebih leluasa dilakukan, tidak sekadar di dataran wacana semata.

Keempat, para kiai-politik berkesempatan membangun citra positif sebagai pendorong proses demokrasi dan penguatan masyarakat madani. Umat Islam tidak antidemokrasi, namun, sebagaimana pernah dikatakan Cak Nur, justru paling siap berdemokrasi. *Nah* kiai-kiai itu, berpeluang mempertegasnya. Konsekuensi berdemokrasi harus dipahami secara otomatis, terutama menyangkut aspek konstitusional-prosedural yang harus ditaati bersama.

Kelima, kiai-kiai politik berkesempatan membangun kekuatan politik yang penting bagi keberlangsungan umat Islam Indonesia, sehingga mewarnai dinamika bangsa secara konstruktif. Perguliran wacana keislaman dan kebangsaan akan senantiasa mengalir secara alamiah, saling melengkapi, sehingga ketegangan politik antara umat Islam dan negara tidak terjadi lagi. Sehingga dengan demikian, kesan cairnya hubungan umat Islam dan negara, bukan lagi lebih dikarenakan oleh kebaikan hati rezim berkuasa, namun karena realitas politik dan dinamika umat semakin kokoh.

Terjunnya kiai ke politik memiliki risiko, kendati sekaligus manfaat. Mestinya masa depan umat diprioritaskan ketimbang karier politik masing-masing. Amanat yang mereka pikul tak ringan. Mereka harus mampu menempatkan diri, agar tak berimplikasi justru pada perpecahan umat. Transformasi politik di Indonesia tak sederhana, apalagi telah sekian lama masyarakat miskin pengalaman dalam berdemokrasi. Sikap toleransi terhadap perbedaan perlu dikedepankan bagi masa depan umat dan bangsa yang lebih baik.●

II

DEFISIENSI DEMOKRASI

[2000]

MENYIMAK PEMIKIRAN-PEMIKIRAN GUS DUR IKHWAL TOLERANSI DAN DEMOKRASI, AKAN MUDAH DITEMUKAN PANDANGAN-PANDANGANNYA YANG BEGITU MODERAT. BAHKAN SAKING MODERATNYA, KERAPKALI GUS DUR DIANGGAP MENGANAKEMASKAN AGAMA ATAU KELOMPOK LAIN DI LUAR ISLAM. NAMUN DEMIKIAN, SERING PULA DIJUMPAI PENJELASAN GUS DUR BAHWA PANDANGAN DAN SIKAPNYA YANG DEMIKIAN ITU DILAKUKAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN ALIAS KEHARMONISAN SEJATI ANTAR-UMAT BERAGAMA

- ISLAM ANTIKEKERASAN, MEMAHAMI REFLEKSI GUS DUR

Islam Antikekerasan

* Memahami Refleksi Gus Dur

KOMPAS, 14 JANUARI 2000

BARANGSIAPA MENYELAMATKAN SATU JIWA (NYAWA SATU ORANG), MAKA IA SEOLAH TELAH MENYELAMATKAN JIWA (NYAWA) SEMUA ORANG. (QS. 5:32)

MENGKAJI DIMENSI antikekerasan dalam Islam sangat penting kapan dan di mana pun. Apalagi, dalam konteks situasi bangsa Indonesia yang tengah terpuruk dalam krisis multidimensional yang belum kunjung pulih dewasa ini. Konflik SARA yang semakin memprihatinkan di Ambon (juga yang lain), jelas merupakan sesuatu yang perlu segera diakhiri secara arif bijaksana, dan lapang dada. Untuk itulah internalisasi dan aktualisasi ajaran agama (Islam) yang sangat menekankan dimensi antikekerasan dan menghadirkan rahmat dan kedamaian tersebut, sangat diperlukan.

Selain internalisasi, dalam kaitannya dengan proses "transformasi nasional", tesis Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berikut perlu disimak. "Pencapaian transformasi nasional harus diletakkan dalam sebuah konteks 'koalisi nasional' dengan kelompok-kelompok yang tidak bermotif religius, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum, kelompok-kelompok lingkungan dan perkumpulan-perkumpulan yang berupaya membantu teknologi tepat guna di daerah-daerah pedesaan. Pendekatan ini memerlukan sikap inklusif dari gerakan-gerakan Islam, dengan menekankan persamaan daripada perbedaan-perbedaan jika berhubungan dengan organisasi-organisasi yang berlatar belakang iman selain Islam. Inilah pendekatan sosiokultural pluralistik terhadap demokratisasi dalam konteks yang di-

sebut oleh para teolog Katolik sebagai strategi 'pembangunan manusia'." (Abdurrahman Wahid Dkk. *Islam Tanpa Kekerasan*, LkiS, 1998, hal. 75).

Kutipan kalimat Gus Dur di atas, pada intinya menekankan bahwa dalam perspektif penguatan transformasi nasional, sikap inklusif dan antikekerasan amat diperlukan, utamanya dalam membangun rasa kebersamaan dan saling percaya dalam membangun bangsa secara komprehensif di antara berbagai agama dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Inklusivisme ini berkait erat dengan persoalan internalisasi ajaran agama dalam kaitannya dengan makna toleransi antaragama.

Menyimak pemikiran Gus Dur ikhwal toleransi dan demokrasi, akan mudah ditemukan pandangannya yang begitu moderat. Bahkan saking moderatnya, kerapkali Gus Dur dianggap menganakemaskan agama atau kelompok lain di luar Islam. Namun, sering pula dijumpai penjelasan Gus Dur bahwa pandangan dan sikapnya yang demikian itu dilakukan dalam rangka kepentingan alias keharmonisan sejati antarumat beragama.

Bagi Gus Dur, masalah pokok antarumat beragama ialah pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan. "Kita hanya akan mampu menjadi bangsa yang kukuh, kalau umat agama-agama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama lain, bukan hanya sekadar saling menghormati. Yang diperlukan adalah rasa saling memiliki (*sense of belonging*), bukannya hanya saling bertenggang rasa satu terhadap yang lain" (Abdurrahman Wahid, "Islam dan Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia", *Kompas*, 14/12/1992).

Refleksi Gus Dur tersebut bila ditarik ke basis (dalam konteks ajaran Islam), ujung-ujungnya adalah bagaimana sesungguhnya dimensi antikekerasan dipahami dan diaktualisasikan. Penting kiranya wacana antikekerasan dikedepankan dalam setiap kesempatan, sebagai kampanye antikekerasan, demi kepentingan bersama yang lebih baik di masa depan.

KONSEPSI ANTIKEKERASAN ISLAM

PESAN Al Quran sebagaimana dikutip diawal tulisan ini (QS. 5:32) amat mendasar dalam menekankan sikap anti-kekerasan, sebab Islam begitu menghargai kehidupan. Chaiwat Satha-Anand (Qader Muheideen), ulama asal Thailand, memaknai ayat tersebut, bahwa kehidupan manusia itu suci (sakral). Manusia adalah satu keluarga, dan setiap manusia mempunyai nilai yang sama dengan jumlah total kehidupan seluruh manusia.

Islam tidak mengajarkan penyelesaian segala urusan dengan pendekatan kekerasan, kecuali bila mereka diperangi. "Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah melanggar batas, karena Allah tidak menyukai mereka yang melanggar batas." (QS. 2:190). Ayat tersebut jelas melarang umat Islam melakukan agresi, dan perang yang diizinkan itu pun mempunyai batas. Dalam ayat lain dijelaskan: "Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penindasan, dan yang ada hanya keadilan dan keimanan kepada Allah." (QS. 2:193). Dalam konteks ini "berperang di jalan Allah" bermakna berperang menegakkan keadilan (*justice*).

Konsep kesatuan manusia merupakan hal yang amat berkaitan dengan konsep antikekerasan. Islam secara tegas, dan berulangkali menyebutkan konsep kesatuan manusia ini. "Umat manusia tidak lain daripada satu umat. Kemudian mereka berselisih. Sekiranya tidak karena satu firman yang keluar dari Tuhanmu sudah mendahului, yang diperselisihkan niscaya sudah terselesaikan antarmereka." (QS. 10:19). Di dalam Al Quran juga disebutkan: "Pada dasarnya manusia itu satu umat, lalu Allah mengutus para nabi membawa berita gembira dan peringatan." (QS. 2:213). Bila dieksplorasi lebih lanjut, banyak dalil yang menegaskan antikekerasan dalam Islam.

Dalam konteks ini perlulah dieksplorasi pula pengalaman (tradisi) Islam yang mengedepankan antikekerasan itu. Bila Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan peradaban Islam tak sedikit wacana dan praktik antikekerasan dalam perjuangannya. Stanley Lane Poole, sebagaimana dikutip Abdurrahman Azzam (*The Eternal Message of Mohammad*, London, 1979, hal. 27) menyebut-

kan bahwa, “Hari kemenangan terbesar Muhammad atas musuh-musuhnya juga merupakan hari kemenangan terbesar melawan dirinya sendiri. Ia secara sukarela memaafkan Quraisy yang telah bertahun-tahun menelantarkannya bergelimang kesedihan dan penderitaan dengan menghinanya secara kasar, dan memberikan pengampunan kepada seluruh penduduk Mekkah. Empat bentuk kejahatan yang biasa dikutuk oleh pengadilan pun dibuat oleh Muhammad sebagai daftar larangan, ketika sebagai seorang penakluk ia masuk kota musuhnya yang jahat. Tentara mengikuti teladannya, dan masuk secara rapi dan damai, tidak ada rumah yang dirampok, tidak ada perempuan dilecehkan.”

Di dalam Islam terkandung nilai-nilai penting antikekerasan. Peradaban yang hendak dibangunnya menjamin seluruh umat manusia hidup damai berdampingan, tanpa kekerasan. Dalam konteks ini, ulama besar Maulana Wahiduddin Khan, ulama moderat dan terkenal antikekerasan yang begitu dikagumi Gus Dur, dalam bukunya *Islam and Peace* (New Delhi: Goodwoord Books, 1999) menegaskan: “Sebagai kitab suci, Al Qur-an adalah sebuah kitab ideologi yang menonjolkan perang untuk menaklukkan hati manusia dan bukan untuk memenggal kepala manusia.” (Samson Rahman, “Tawaran Antikekerasan”, *Panji Masyarakat*, 22/12/1999). Buku itu menyebut, terjadinya kekerasan (dalam diri umat Islam) timbul karena adanya kesalahan cara berpikir dan menyikapi semangat Islam. Maka dari itu Wahiduddin yakin, sesungguhnya semangat antikekerasan dalam Islam akan menjadikan agama ini lebih gampang diterima daripada semangat kekerasan yang ditonjolkan.

KONTEKS INDONESIA

PRESIDEN Gus Dur sendiri pernah mengakui bahwa keutuhan bangsa merupakan impiannya yang terbesar. Pada saat ini ancaman disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Berbagai konflik horisontal dalam masyarakat, menyusul jatuhnya rezim Orde Baru, bila dibiarkan tanpa penyelesaian yang mendasar, maka sesungguhnya ia merupakan api dalam

sekam, yang mampu menghancurkan keutuhan bangsa.

Bila ditilik berbagai kasus berbau disintegrasi dan SARA, semisal di Aceh dan Ambon, sedikit banyak wacana antikekerasan Islam perlu dikedepankan dan disosialisasikan terus-menerus, terutama terhadap umat Islam itu sendiri – juga perlu diketahui oleh kalangan (umat) lain. Kasus-kasus tersebut merupakan realitas pahit, yang mau tidak mau perlu diambil hikmahnya. Semua kelompok perlu melakukan kajian serius ikhwal dimensi antikekerasan yang diajarkan agamanya masing-masing dan memahami konsep antikekerasan agama lain secara obyektif dan lapang dada.

Belakangan ini, banyak skenario yang menghendaki perpecahan umat (Islam dan yang lain) dan bangsa. Politik adu domba, sebagaimana dilakukan kolonialis tempo dulu, dengan mudah dijumpai. Inilah ujian berat umat beragama di Indonesia, sebab di samping terus diwajibkan untuk melakukan internalisasi atas nilai-nilai agamanya (sebagai proses kontinu), juga secara inklusif dituntut mampu berinteraksi positif dengan berbagai kelompok di luar agama mereka. Integrasi sosial, tak bisa dilakukan tanpa pemahaman dan komunikasi positif dan efektif antarelemen masyarakat.

Sosialisasi mengenainya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak (ulama, pemerintah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat) untuk melakukan (internalisasi) nilai-nilai antikekerasan yang ditawarkan agama. Ujaran-ujaran Gus Dur tentang perlu saling mengerti dan memiliki (*sense of belonging*) dalam hubungan antarumat beragama, tidak gampang dilakukan. Bagaimanapun ia butuh waktu yang tidak singkat, alias senantiasa berproses.

Justru di tengah proses itulah, hal-hal tersebut hendaknya terus dikedepankan. Dialog, komunikasi yang sehat, saling menghargai dan memupuk kembali rasa saling percaya satu sama lain antarumat beragama merupakan aktivitas yang harus terus dilakukan. Lewat pendekatan ini, diharapkan berbagai kejadian krusial yang tengah melanda Aceh, Ambon, dan sebagainya, mampu dipecahkan secara baik dan damai. *Wallahua'lam*.●

Kongres I PDIP
Karismatik versus Rasional-Obyektif

KOMPAS, 25 MARET 2000

DINAMIKA PDIP menajam pada kongresnya yang pertama di Semarang, Maret ini. Fenomena demikian wajar, apalagi PDIP partai terbuka dan plural. Dinamika yang berkembang pada partai terbesar pemenang Pemilu 1999 ini sangat menarik dicermati. Mirip Kongres PAN di Yogyakarta beberapa waktu lalu, setidaknya hingga kini muncul dua arus besar di tubuh PDIP.

Bedanya, kalau di arena kongres PAN dua arus itu mempersoalkan perkara "ideologi" (sebagaimana yang diringkas media sebagai kelompok pluralis versus kelompok iman dan takwa), di PDIP lebih ke persoalan paradigma, yakni kelompok yang mendukung paradigma politik karismatik versus yang rasional-obyektif.

Pendukung paradigma politik karismatik berpendapat bahwa besarnya partai bagaimanapun tak bisa dihindarkan dari karisma pemimpin, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri. Pilihan yang diambil mereka cukup realistis, mengingat massa politik PDIP adalah massa politik yang memiliki rasa solidaritas tinggi dalam mendukung sosok politik karismatik. Bung Karno merupakan simbol politik yang tepat bagi mereka, lantas diturunkannya ke Megawati. Berpijak pada pengalaman pemilu tempo hari, sulitlah menghilangkan sosok Megawati keluar dari kepengurusan PDIP hanya karena ia sekarang menjabat wakil presiden.

Bagi yang pro-paradigma politik rasional-obyektif, tantangan terbesar buat PDIP, bagaimana mengupayakan partai ini ke arah

kedewasaan politik secara rasional dan obyektif. Massa politik PDIP harus meninggalkan dominasi pengaruh paradigma karismatik bergerak menuju pandangan dan budaya politik baru yang harus dibiasakan, yakni berpolitik secara rasional dan obyektif. Paradigma ini lebih menekankan kemandirian dan kedewasaan politik secara otonom dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif, tanpa terlampau ekstrem menekankan ketergantungannya pada hanya satu sosok individu, sebagai simbol karismatik.

Dalam kongres pertama PDIP kedua arus itu bertemu. Pergulatan wacana tersebut menemukan "ajang pertikaiannya" secara nyata di arena kongres. Secara lahiriah tampak kedua pendukung paradigma itu "bertarung". Kelompok pertama antara lain bisa diwakili oleh kader-kader Megawati yang kerap memainkan semboyan "*pokoke* Mega". Mereka adalah massa politik yang amat fanatik terhadap Megawati, terutama sebagai simbol politik yang tepat bagi PDIP, tak bisa ditawar lagi.

Sementara kelompok kedua – antara lain diwakili Eros Djarot, Haryanto Taslam, dan Dimyati Hartono – mengharapkan agar Megawati, karena posisinya wakil presiden dan telah "menjadi milik semua", tidak dicalonkan lagi sebagai ketua umum partai. Kelompok ini menghendaki Megawati konsentrasi dan menjadi "negarawan" yang baik. Pertimbangan kedua, soal kaderisasi dalam bingkai rotasi kepemimpinan yang sehat dan demokratis di tubuh PDIP agar dilaksanakan.

Baik kelompok pertama maupun kedua, sesungguhnya punya motivasi mirip satu sama lain: hendak melihat PDIP sukses, terutama dalam Pemilu 2004 kelak. Yang satu, pendukung paradigma politik kharismatik, sesungguhnya bukannya menolak secara ekstrem proses-proses demokrasi di dalam tubuh PDIP, dengan mengabaikan sama sekali pandangan rasionalitas-obyektif.

Namun, mereka menginginkannya dilakukan evolusioner, proses perubahan budaya politik bertahap, memakan waktu. Pertimbangannya kebanyakan massa politik PDIP kini belum siap menerima pendekatan rasionalitas-obyektif dalam berpolitik. Jika pun

ini dipaksakan, dengan segala implikasinya, konsekuensinya PDIP akan ditinggalkan oleh massa politiknya yang fanatik – yang sekarang begitu dominan eksistensinya di berbagai daerah.

Kelompok pendukung gagasan politik rasional-obyektif berpengharapan sama: menginginkan partai ini semakin memantapkan dirinya yang terbesar dalam pemilu kelak. Konsekuensinya, rasionalitas-obyektif dalam berpolitik harus dilakukan. Ini bermakna positif bagi peningkatan kualitas sumberdaya politik PDIP, agar tak sekadar mengandalkan politik karisma semata. Misi yang diemban para pendukungnya (yang rata-rata intelektual kampus), memberi pencerahan politik. Untuk menuju ke arah itu dibutuhkan pendekatan revolusioner, kerja cepat tak perlu menunggu lamanya waktu.

FAKTOR MEGAWATI

JELAS, dalam konteks ini, Megawati telah menjadi faktor politik menentukan secara internal dan eksternal PDIP. Bagi kelompok pertama, eksistensi Megawati jelas mutlak diperlukan. Mereka tidak siap bila ditinggalkan sosok putri Bung Karno yang demikian populer di kalangan massa politik PDIP. Tidak bisa dibayangkan, bagaimana ekspresi kekecewaan massa politik fanatik PDIP jika sosok Megawati "dihilangkan" – atau setidaknya tergantikan oleh sosok lain yang tak memiliki daya kharisma. Bagi kelompok ini, Megawati adalah faktor politik yang sakral. Megawati adalah PDIP, PDIP adalah Megawati.

Kelompok rasional-obyektif berpandangan, bukannya faktor Megawati tidak penting. Ia jelas signifikan dalam konteks simbol politik PDIP. Namun, dari segi kesinambungan partai, demi demokrasi dan kewibawaan Megawati sendiri (kebetulan sekarang menjabat wakil presiden), posisinya di PDIP "mutlak" digantikan dengan kader lain. Megawati tetap eksis sebagai pembina PDIP, ia tetap menjadi simbol PDIP, bahkan simbol demokrasi. Kira-kira posisi Megawati, dalam pandangan kelompok ini, mirip posisi Gus Dur di PKB. Gus Dur bukanlah ketua umum partainya, tetapi tetap efektif sebagai simbol politik yang karismatik.

TITIK TEMU

DALAM TAHAP tertentu, sesungguhnya kedua paradigma politik itu, dalam budaya politik PDIP bisa dipertemukan. Hal-hal yang sama perlu lebih banyak dieksplorasi ketimbang yang berbeda. Jika Megawati masih sanggup dicalonkan menjadi ketua umum (ia telah mengatakan demikian), hal ini bukanlah kemenangan kubu kharismatik dan kekalahan kubu rasionalitas-obyektif.

Naiknya Megawati sebagai pemimpin PDIP akan memperoleh catatan kritis kubu rasionalitas-obyektif menyangkut agenda besar yang perlu dituntaskan segera: pendewasaan politik para kader PDIP. Namun, bila atas pertimbangan tertentu Megawati tak mau dicalonkan, bukan berarti pula itu kemenangan kelompok rasional-obyektif. Megawati masih tetap simbol yang berdaya jual tinggi.

Kongres I PDIP ialah fase kritis. Secara internal perbaikan harus dilakukan di tengah besarnya potensi konflik, secara eksternal persaingan jelang Pemilu 2004 sangat dinamis. Mau atau tidaknya Megawati dicalonkan, ada tidaknya dia di PDIP, meminjam Riswandha Imawan, "pertaruhan", apakah pada Pemilu 2004 PDIP memperoleh kembali *blessing in disguise* atau sebaliknya.●

Spiritualitas Sosial, Pluralisme dan Demokrasi

KOMPAS, 31 MARET 2000

DEMOKRASI MEMBUTUHKAN DIMENSI spiritualitas, yakni segala hal yang berkenaan dengan kearifan atas pengalaman eksoterik dan esoteris transendental (*ilahiah*) – biasanya lewat bimbingan religius agama. Pengalaman spiritualitas dan religiusitas masing-masing individu lazim berbeda-beda dan tidak seragam. Justru karena itulah ragam pengalaman esoteris atau batini-

ahnya majemuk. Pengalaman batin dan keagamaan tiap-tiap orang itu unik dan tidak selalu sama.

Dari sini terbetik hikmah, pengalaman spiritualitas dan religiusitas, pada hakikatnya mengajarkan kepada kita tentang realitas dan makna pluralisme, keanekaragaman pengalaman lahir dan batin, sebagai sesuatu yang wajar adanya. Ini cocok dengan makna demokrasi yang menghargai realitas pluralisme dalam masyarakat.

Spiritualitas lebih banyak menonjolkan pengalaman batin (spiritual), yang sifatnya kerapkali amat pribadi dan bersifat transendental. Bila kaitannya lebih banyak menekankan pengalaman spiritual pribadi, maka hal itu disebut spiritualitas pribadi (individu). Setiap proses spritualitas, tentu menghasilkan kearifan-kearifannya tersendiri, yang secara kolektif mampu menumbuhkan apa yang disebut spiritualitas sosial (masyarakat religius). Komunitas sosial yang religius, yang mampu memahami makna spiritualitas secara sungguh-sungguh, jelas memiliki keunggulan secara kualitatif dibanding dengan komunitas sosial yang hampa spiritualitas.

Dewasa ini tumbuh kembali kesadaran pentingnya spiritualisme sebagai energi positif yang wajib dimiliki manusia modern era milenium. Ia semacam kesimpulan dari fenomena maraknya kursus-kursus spiritual. Seolah kearifan spiritual klasik yang datangnya dari Timur (termasuk kearifan kelompok tarekat) hendak menjadi tren di Barat. Peneliti karya-karya Maulana Jalaluddin Rumi, Annemarie Schimmel tatkala berkunjung ke Indonesia tempo hari, menyiratkan hal tersebut, bahwa wacana sufisme sebagai khasanah dimensi mistik Islam pun menggejala di Barat.

BANGKITNYA kesadaran spiritualitas di era milenium ini (sebelumnya, antara lain pernah diramalkan John Naisbitt), jelas merupakan fenomena menarik. Banyak penjelasan menyebutkan mengapa hal itu muncul dan tumbuh. Penjelasan yang paling umum adalah, bahwa manusia modern mengalami keterasingan (alienasi) terhadap hal-hal yang bersifat duniawi (lahiriah, materialistik), lantas mereka berupaya mencari-cari sesuatu yang sifatnya batiniah

(spiritual) dan transendental.

Banyak yang lantas lari kembali ke agama (formal), banyak pula yang lari pada spiritualitas non-agama. Kalangan yang enggan kembali pada agama formal, yakni agama-agama yang ada kini yang telah melembaga, cukup menyebut aktivitas spiritual mereka dengan spiritualitas saja sebagaimana disebut Naisbitt, *Spirituality Yes, Religius Institution No*.

Dahsyatnya gelombang spiritualitas yang ditandai muncul dan populernya buku-buku dan pelatihan-pelatihan spiritual, jelas merupakan fenomena penting sejarah peradaban kemanusiaan. Ia di satu sisi mampu memperteguh posisi agama-agama besar dunia, karena, bagaimanapun setiap gerakan spiritualitas kerap terobsesi pandangan dan tradisi yang telah ada, mapan dan berkembang di kalangan penganut agama. Namun, di sisi lain gelombang spiritualisme itu mencoba mengelak dari posisi agama-agama formal yang mapan, mengingat banyak tumbuh gerakan spiritual yang mengembangkan wacana agnotisisme.

Bila dicermati kerangka dasar munculnya paham-paham spiritualitas non-agama (cenderung agnotis) tersebut, sekularisme. Spiritualitas model begini spiritualitas sekuler. Di sisi lain tumbuh gerakan spiritualisme yang mengupayakan semacam titik temu berbagai (inti spiritualitas) agama-agama. Mereka mengumpulkan wacana spiritual setiap agama, mengemasnya dalam bentuk dialog pencerahan dan pelatihan konsentrasi spiritual. Efeknya, diharap batas perbedaan antaragama melenyap, sehingga secara ekstrem tumbuh "agama baru" dengan praktik ritual dan pemahaman tersendiri. Fenomena demikian lebih dari sinkretisisme (pencampuradukan ajaran antaragama), karena agama sendiri lantas diingkari ketidaksempurnaannya.

TERLEPAS dari fenomena-fenomena itu, catatan yang perlu digarisbawahi atas bangkitnya (gerakan) spiritualitas itu bermakna positif bagi penghayatan terhadap realitas pluralisme dan – dengan demikian – mendukung pula nilai-nilai demokrasi. Ke-

bangkitan spiritualitas sosial sesungguhnya mampu pula bermakna negatif bagi pluralisme dan demokrasi, dengan catatan bila yang kemudian berkembang adalah ekstremitas-ekstremitas spiritualisme, semisal individualisme dan eksklusivisme.

Apa yang dipaparkan di atas mengenai spiritualitas (sosial) lebih merupakan gejala yang belakangan kian terasakan. Spiritualitas di era internet ini, mampu menjadi semacam komoditi "pencerahan" bagi segenap manusia yang kian hari kian menghadapi kesumpekan hidup. Tekanan-tekanan hidup yang kian berat (entah itu tekanan ekonomi, politik, maupun sosial-budaya) membuat kekuatan untuk bereaksi. Reaksi yang paling aman dan nyaman adalah lewat spiritualitas. Hal inilah yang mampu menjelaskan mengapa, misalnya gerakan spiritual Falun Gong merebak di Cina Daratan – yang lantas membuat pemerintah setempat gerah, dianggap berbahaya secara politis.

Menarik untuk diperhatikan saat ini, selain fenomena kebangkitan spiritualitas, fenomena sebaliknya: merosotnya spiritualitas. Secara umum ia disebabkan oleh, setidaknya, dua hal. *Pertama*, penghargaan yang begitu besar terhadap aspek lahiriah (material) dalam kehidupan, sementara sisi-sisi manusiawi atas spiritualitas sosial secara sadar atau pun tak sadar ditenggelamkan. Aspek lahiriah yang dimaksud tak melulu bertumpu sektor ekonomi. Di dunia politik misalnya, klik-klik amoral kerap terjadi, sogok-menyogok di arena birokrasi (dan bisnis politik), teror serta dimensi *politicking* lain merupakan sinyal kemerosotan spiritualitas sosial yang mengancam demokrasi yang sehat.

Kedua, gejala yang menurut Mark Slouka "ruang yang hilang". Ia konsekuensi logis dari pandangan pesimisnya terhadap kehadiran era *virtual reality* (VR) alias realitas virtual. Slouka berpandangan era VR mampu meninggalkan kehidupan nyata alias *real life* (RL), dan menenggelamkan sisi-sisi manusiawi spiritualitas sosial masyarakat. Ruang nyata hilang, ruang maya menggatikannya (Mark Slouka, *Ruang yang Hilang*, *Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Mizan: 2000). Ketika dunia

nyata tersingkir, spiritualitas artifisial yang asosial bisa dominan.

Cocoklah kiranya bila upaya mengembangkan spiritualitas disambungkan peningkatan kesadaran pluralisme dan demokrasi. Tumbuhnya kesadaran spiritual diharapkan membawa pula kesadaran penghargaan perbedaan pendapat dan kemanusiaan. Secara kualitatif demokrasi diuntungkan oleh gebrakan spiritualitas sosial sebagai pilar pentingnya.●

TNI dan Wacana Politik

KOMPAS, 8 MEI 2000

USAI MENJADI PEMBICARA dalam *Halqah* Nasional Hubungan Ulama-TNI di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam, Malang asuhan Ketua Tanfidziyah PB NU KH Hasyim Muzadi, KSAD Jenderal Tyasno Sudarto menyatakan, TNI akan melawan setiap usaha inkonstitusional yang hendak menurunkan pemerintahan yang *legitimate*. Pernyataan Tyasno segera direspons banyak kalangan sebagai telah memasuki wilayah "wacana politik". Mereka khawatir reformasi TNI tak akan jalan atau hanya sekadar lipstik belaka, mengingat pernyataan Tyasno mirip yang kerap dilempar elite militer Orde Baru, guna menjaga *status quo* kekuasaan.

Menjadi fenomena menarik tatkala Panglima TNI Laksamana Widodo AS mengklarifikasi pernyataan Tyasno sebagai normatif semata, tidak masuk wilayah politik, dan formulasi tugas pokok TNI ialah menggagalkan setiap agresi terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta menjamin kepentingan nasional, baik pada lingkup domestik maupun internasional. Dengan demikian, TNI tidak akan memasuki wacana politik.

Lontaran Widodo AS menegaskan kembali komitmen yang pernah disampaikannya di Sidang Panitia *Ad Hoc* BP-MPR. Intinya TNI akan mundur dari keterlibatannya di politik praktis pada 2004. Lontaran itu juga menegaskan hasil Rapim TNI baru-baru ini de-

ngan tujuh butir kesimpulan. *Pertama*, TNI akan selalu menempatkan diri sebagai bagian dari sistem nasional yang bertugas pokok hanya di bidang pertahanan negara. Tidak lagi bertanggung jawab sepenuhnya di bidang keamanan yang telah menjadi tanggung jawab Polri dan tidak lagi melaksanakan fungsi sosial-politik.

Kedua, reformasi internal TNI terus dilanjutkan dengan percepatan yang diperlukan, meliputi aspek pembenahan piranti lunak seperti merevisi UU tentang pokok pertahanan dan doktrin, aspek struktural dalam bentuk validasi organisasi sesuai urgensinya dan aspek kultural yang membudayakan sikap dan tingkah laku prajurit yang profesional dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai HAM.

Ketiga, TNI merupakan institusi negara yang secara konstitusional wajib melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintahan yang sah. *Keempat*, penggunaan anggaran diprioritaskan ke peningkatan profesionalitas dan pemeliharaan alur sistem untuk mendukung kesiapan operasional satuan TNI. *Kelima*, tugas pembinaan dan pembangunan, TNI ke dalam diarahkan untuk mewujudkan TNI yang profesional, efektif, efisien, dan modern. *Keenam*, TNI akan terus membantu Polri menegakkan keamanan sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku. *Ketujuh*, semua prajurit TNI perlu berperan aktif untuk meluruskan opini publik guna membangun citra positif TNI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

DEFENSIF

HAL tersebut menunjukkan TNI tengah melakukan langkah-langkah konkret menuju ideal-ideal reformasi. Posisi TNI tampak cenderung bertahan menghadapi segala penilaian negatif masyarakat terkait keterlibatannya di kancah kekuasaan masa lampau. Dapat dipahami mengapa pihak TNI kini tampak relatif terbuka, dan cepat merespons keluhan-keluhan masyarakat sebagai kekhawatiran atas trauma hegemoni militer masa lalu.

Sejak Orde Baru tumbang, militer (ABRI yang berubah menjadi TNI) menghadapi perubahan cepat dan dramatis. Militer Orde Baru

telah memainkan peran hegemoniknya nyaris di segala bidang kehidupan. *Setting* sosial politik yang Soeharto-sentris, membuat militer kuat bergantung padanya. Bahkan secara ekstrem peran yang cukup melenceng dari tugas mulianya kerap terjadi: sebagai alat kekuasaan, bukan penjaga kedaulatan dan pertahanan-keamanan nasional secara profesional dan proporsional.

Beragam studi menyangkut peran dan perilaku militer di Indonesia, nyaris memasukkan faktor dwifungsi sebagai legitimasi bagi militer untuk tekun aktif di dunia politik, tetapi ironisnya mereka terlampau jauh masuk pada wilayah yang seharusnya menjadi ranah politik sipil, serta jauh meninggalkan fungsi hankamnya. Militer pun mudah terkooptasi sebagai penjaga kekuasaan rezim.

Semua itu dipertanyakan menyusul runtuhnya Orde Baru. Militer dihujat sebagai pilar otoriterisme negara. Maka, cepat-cepatlah ia menyesuaikan diri. TNI masa Jenderal Wiranto telah merumuskan pokok-pokok reposisi TNI. Namun masyarakat masih merasakan TNI belum ikhlas melepas jubah politik. Warna dan wacana politik masih kental. Tuntutan agar Dwifungsi TNI dicabut, kurang mendapat tanggapan. TNI masih bertahan dengan 38 kursi Fraksi TNI-Polri di DPR. Memang, dalam Pemilu 1999 TNI mampu menunjukkan sikap netral. Namun, masih terlibatnya TNI di parlemen, kontradiktif. Dalam hal ini, berbagai kebijakan Presiden Gus Dur dinilai memperkuat supremasi sipil. Gus Dur satu dari empat elite Kelompok Ciganjur yang pada 1998 menyatakan sikap, keterlibatan TNI dalam politik harus ber-akhir pada 2004.

KULIT BAWANG

SEBERAPA jauh TNI mampu mewujudkan obsesinya untuk tak masuk ke wacana politik? Bukankah wacana dan praktik politik setipis kulit bawang? Memang bila politik diartikan secara luas, segala aspek kehidupan senantiasa berkait politik. Maka, sesungguhnya melarang TNI untuk keluar dari pembicaraan politik, berpotensi mengebiri hak kebebasan berpendapat. Barangkali, perlu diluruskan alias diberi batasan, atau setidaknya dikembangkan

etika sejauh mana TNI boleh bicara politik, dengan tetap tidak mengurangi posisi dan fungsinya di bidang pertahanan dan keamanan.

TNI boleh memasuki wacana politik, hanya saja yang bermakna netral dan tak dimaksudkan mencampuri proses politik. TNI boleh berwacana politik – sebab ini merupakan hak siapapun untuk menyatakan pendapat dan berwacana – namun, tidak ditujukan untuk menakut-nakuti dan menggertak orang lain, sehingga proses politik terpengaruh. Barangkali benar pendapat Panglima TNI Widodo AS di atas, boleh saja wacana politik dilakukan sebatas normatif (berkenaan dengan kaidah-kaidah politik dasar). Kalau pernyataan TNI menyangkut bidangnya yang tengah dikonsentrasi saat ini, yakni hankam, hal tersebut menunjukkan dirinya tengah berproses menuju profesionalisme. Namun, kalau terlampau boros menganalisis politik, walaupun normatif sekalipun, tentu merugikan TNI sendiri.

Akan tetapi juga persoalannya, apa batasan wacana politik normatif dengan yang tidak nonaktif? Dalam menyikapi kondisi sosial-politik, tentu sulit mengatakan wacana politik yang dikeluarkan TNI normatif murni. Bagaimanapun orang akan dengan cepat menangkap konteksnya: mengapa TNI membuat pernyataan demikian. Sebuah pernyataan atau analisis politik, sifatnya begitu aplikatif, dimana dimensi normatif dan positif saling berkait satu sama lain. Oleh sebab itulah hendaknya kalangan militer ekstra hati-hati dalam membuat pernyataan politik.

Pernyataan Tyasno dan reaksi terhadapnya merupakan pelajaran berharga, utamanya bagi kalangan TNI. Masyarakat bisa gelisah, sebab Tyasno menyatakan hal tersebut di tengah kondisi politik yang semakin terpolarisasi. Tyasno kebetulan berada di acara yang diprakarsai kalangan NU yang secara psikologis dan kritis-obyektif mencoba mempertahankan posisi politik Gus Dur dari segala goyangan. Maka, stigmatisasi politik ke Tyasno mudah sekali, dalam konteks ini: sebagai orang pendukung kekuasaan Gus Dur sepenuhnya. Padahal belum tentu demikian.

Konsentrasi TNI di bidang pertahanan perlu didukung. Masyarakat tetap perlu mengkritisi TNI, tetapi juga perlu sadar bahwa

tugas dan tanggung jawabnya tidak ringan. Masyarakat tetap perlu kritis atas dinamika yang tengah dihadapi TNI, agar institusi ini tak lagi terjebak sebagai "alat kekuasaan". TNI perlu menanggapi masukan dari masyarakat itu secara konstruktif, tidak represif.●

Pemulihan Krisis
Idealisme Versus Pragmatisme

KOMPAS, 20 JUNI 2000

PERJALANAN pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga kini, setidaknya dinilai sementara pengamat, kerap bahkan dominan idealisme ketimbang pragmatismenya dalam pemulihan multikrisis pasca-Orde Baru. Gus Dur memang presiden yang penuh ide, dan kerap melontarkan idenya secara spontan bahkan, kontroversial. Idealisme Gus Dur terasa lebih menonjol, ketimbang uraian-uraian praktis-pragmatis dalam strateginya membenahi multikrisis. Karena idealisme (versi) Gus Dur banyak diwarnai wacana politik, tidaklah sepenuhnya salah bila ia cenderung tampak lebih suka "berakrobat politik", ketimbang, meminjam istilah Sjahrir, "berdamai dengan pasar".

Pemikiran seorang idealis bagi masyarakat awam kerap sulit dipahami, bahkan cenderung dinilai sekadar "membuang waktu" dalam konteks pembangunan ekonomi bangsa. Dan biasanya, semua praktisi politik (ideolog, juga budayawan) memiliki ideal-idealnya sendiri. Gus Dur yang berlatar belakang budayawan plus intelektual-santri terpelajar, tentu memiliki obsesi-obsesi ideal dalam benaknya. Soal demokrasi, misalnya, Gus Dur terkenal amat moderat dan kerap dinilai terlalu humanis. Dengan alasan "demi demokrasi" (demokrasi tidak mengenal pembedaan kelompok dan pandangan), Gus Dur mengusulkan pencabutan Ketetapan

(Tap) MPRS/XXV/1966 tentang pelarangan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme – yang tentu saja kontroversial dan segera menjadi polemik di masyarakat.

Idealisme acap dikaitkan dengan persoalan politik, bagaimana kondisi yang diinginkan dan prasyarat mencapainya dipenuhi terlebih dulu, sebelum membereskan yang lain-lain. Pemikiran-pemikiran idealistik versi Gus Dur, tentu saja mengingatkan masyarakat pada wacana tempo dulu (zaman Soekarno), yakni saat "politik sebagai panglima". Ini disebabkan sejak dilantik sebagai presiden, setidaknya hingga kini, intensitas penyampaian pemikiran politik Gus Dur begitu tinggi. Bahkan, acap dalam konteks tertentu ia berpengaruh terhadap dinamika kondisi ekonomi yang fluktuatif namun lamban. Ucapan dan tindakan (juga kebijakan) Gus Dur sering dibaca negatif oleh pasar.

GUS DUR dengan idealismenya, telah menjadi faktor yang lebih sering melenceng jauh dari yang dikehendaki pasar dan publik. Reaksi pasar (uang dan modal) mampu terpantau dengan angka-angka, reaksi publik mencuat lewat berbagai ketidaksetujuan terhadap pendapat dan kebijakan Gus Dur – bisa dipantau lewat hasil berbagai *polling* dan berbagai demonstrasi. Bagi Gus Dur dan pemerintahannya, sesungguhnya reaksi negatif pasar dan publik jelas menunjukkan adanya krisis legitimasi (moral dan politik) yang bila terakumulasi secara optimal berakibat fatal. Bila demikian, idealisme berubah menjadi fatalisme.

Sebagai presiden secara konstitusional, Gus Dur bertanggung jawab kepada MPR, yang telah memberinya mandat menjalankan pemerintahan. Tentu saja, hal itu lebih merupakan formalitas dari mekanisme sistem politik di Indonesia, yang tak bisa diabaikan. Namun, ada pula dimensi lain yang juga tidak bisa diabaikan, yakni apresiasi publik terhadap jalannya pemerintahan. Penilaian publik secara kritis dan substansial, merupakan hal yang tak bisa diremehkan. Hal ini sesungguhnya logis semata sebagai konsekuensi penguatan *civil society* dalam masyarakat.

Ide-ide yang dilempar Gus Dur jelas bakal diuji. Tentu secara tidak langsung fenomena ini cukup "menghabiskan energi". Ketika Gus Dur sibuk mengeluarkan wacana kontroversial, energi dan konsentrasi masyarakat dan elite bisa terkuras. Efeknya, pemulihan krisis bisa terbengkalai. Perdebatan publik, sesungguhnya aktivitas yang wajar dalam demokrasi. Namun, bagaimanapun ia tetap berpotensi mendorong konflik horisontal masyarakat. Situasi krisis belum normal. Budaya lama yang monolitik masih terasa. Seharusnya realitas sosio-kultural dan sosio-politik masyarakat dijadikan bahan pertimbangan utama. Namun, Gus Dur kerap melalaikannya.

LONTARAN ide-ide Gus Dur memiliki dua implikasi. *Pertama*, ia merangsang masyarakat terbiasa berbeda pendapat dan mengeluarkan pikiran secara terbuka – sebuah kebiasaan yang jarang ditemukan di masa lalu. *Kedua*, sebaliknya, ia pun merangsang berbagai kelompok masyarakat melakukan konflik secara terbuka, horisontal dan politis. Ini bisa sering terjadi tatkala masyarakat belum siap menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari perbedaan berpendapat. Dengan kata lain, terpolarisasinya masyarakat dalam berbagai pandangan berbeda akibat wacana kontroversial Gus Dur, mampu berdampak konfliktual yang buruk bila berbagai komponen tak mampu mengelolanya potensi konfliknya.

Itulah akrobat Gus Dur. Dengan memilih lebih banyak melontarkan ide kontroversial ketimbang hal-hal yang sifatnya konkret-pragmatis, sesungguhnya ia tengah bertaruh dan bereksperimen. Adalah lebih baik bila pengalaman masa Soekarno diingat dan dipetik hikmahnya. Kala itu, Soekarno bersikukuh dengan idealismenya, misalnya keyakinan akan berhasilnya konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) di Indonesia.

Bila berhasil, dalam benak Soekarno, Indonesia tentu merupakan bangsa yang akan dilihat kebesarannya oleh dunia. Namun, idealisme Soekarno ini tidak sepenuhnya diterima publik. Soekarno boleh dibilang menempuh jalan pemikiran yang berlawanan dengan "kehendak publik". Akibatnya runyam. Terlepas dari gejolak

politik yang terjadi kala itu, rezim Soekarno jatuh – ditumbangkan militer yang mendapat dukungan publik.

Demikian pula yang dialami Soeharto. Sebagai presiden, semula ia begitu pragmatis. Pragmatisme Soeharto mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, menjelang akhir Orde Baru, ia tampak memaksakan kabijakannya yang kontroversial dan ditentang publik. Soeharto arsitek pengasastunggalan Pancasila, yang merupakan puncak dari simbol homogenisasi (penyeragaman) sosio-politik. Soeharto pandai memanfaatkan militer untuk memuluskan obsesi-obsesinya yang kerap melawan arus publik. Karena posisinya yang kokoh dalam politik-kekuasaan, protes publik bisa diredam, namun terakumulasi sebagai bom waktu ketidakpuasan bagi kejatuhannya.

Dalam situasi kini, upaya pemulihan krisis ekonomi diprioritaskan. Konsekuensinya, Gus Dur harus mau mengerem ide-idenya yang kontroversial pemicu penolakan publik dan pasar. Memang benar kondisi pasar juga terpengaruh berbagai luar Gus Dur. Namun, para pengamat ekonomi melihat faktor Gus Durlah yang dominan. Gus Dur perlu lebih pragmatis.

SESUNGGUHNYA para pembantu kunci Gus Dur tak kurang-kurang. Namun, pendekatan Gus Dur, agaknya lebih ke pola konflik ketimbang harmonisasi-sistem. Ini bisa dilihat dari banyaknya tim ekonomi yang dibentuk, dan kegagalannya memperbaiki kekompakan para menteri bidang ekonomi, pasca-dikeluarkannya Meneg Penanaman Modal dan BUMN Laksamana Sukardi dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Jusuf Kalla.

Belakangan terlihat gelagat Gus Dur sebagai presiden dengan "hak prerogatif"-nya berupaya mengendalikan langsung kendali pemulihan krisis ekonomi. Tentu saja ini merupakan langkah yang sifatnya pragmatis. Namun, seharusnya ia merasa, tidak cukup bekal untuk itu. Persoalannya mengapa ia tak memfungsikan secara optimal menteri-menterinya?

Jalan pragmatis perlu ditempuh. Gus Dur hendaknya tak lagi

bereksperimen kontroversial, tak menggunakan pendekatan konflik dalam menyelesaikan hal-hal yang pragmatis, yang berpotensi memicu *politicking* ketimbang kinerja yang baik. Tentu ia bukan pekerjaan mudah. Tindakan pragmatis sudah darurat, mengingat perahu ekonomi Indonesia tengah mengkhawatirkan.●

Elite Versus Nonelite
Resistensi Nonelite Masa Transisi

KOMPAS, 13 JULI 2000

BERBAGAI FENOMENA sosial masyarakat era transisi di Indonesia seperti kekerasan yang melibatkan masyarakat bawah (rakyat kecil), lazim dibaca pengamat sosial sebagai imbas dari konflik elite (rakyat besar). Penjelasan ini tak saja populer dibanding yang lain, semisal frustrasi massa bawah, tetapi relevan saat yang tampak pada letupan konflik horisontal di masyarakat pluralis, justru dibarengi gencarnya konflik antarelite.

Perilaku kaum nonelite berkenaan dengan pelbagai persoalan sosial-politik, ekonomi, dan budaya tak lepas dari imbas perilaku elite. Dalam kultur yang klientalistik, posisi mereka subordinat. Karenanya, relevanlah pepatah, "apabila dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah". Gajah pengibaratan elite, rakyat besar, sementara pelanduk, nonelite, rakyat kecil.

Kendati tak sepenuhnya salah, sesungguhnya ia masih bisa dieksplorasi lebih jauh ke penafsiran yang beragam, mengingat konflik level elite tidak menutup kemungkinan pula tidak berimbas ke nonelite. Hal itu bisa terjadi dengan catatan, bila elite berselisih mampu membatasi konflik secara elegan, baik sengaja ataupun tidak, untuk tidak melibatkan nonelite. Hanya saja, apabila konflik antarelite berlarut-larut, imbasnya ke nonelite tak terelakkan.

Misalnya belakangan ini mengemuka konflik Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin, yang tak sampai berimbas pada anjloknya nilai rupiah. Mengapa demikian? Dari awal pasar membaca, konflik yang berbau politik itu tidak usah direspons terlalu mencolok, *toh* ia telah menjadi kebiasaan. Namun, apabila konfliknya berlarut-larut, lantas memberatkan kondisi politik, imbas ke sektor ekonomi bisa timbul mendadak. Artinya pasar pun mengapresiasinya negatif. Sehingga, nonelite ikut terkena imbasnya.

Apakah nonelite akan sedemikian tergantung elite dalam menentukan sikap politiknya? Dalam konteks tertentu, persepsi elite dan nonelite kerap berbeda. Terlalu gegabah apabila teori ketergantungan nonelite terhadap elite ditelan mentah-mentah. Adakalanya kalangan nonelite begitu tergantung elite, adakalanya tidak.

Ketergantungannya biasanya lebih terfokus ke pelbagai persoalan kebutuhan ekonomi. Elite menengah atas lebih dominan mengendalikan sistem. Namun, dalam konteks penyikapan politik demokratis, kerap ditemukan fenomena perbedaan pilihan. Pada Pemilu 1955, di Laweyan, Solo, misalnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) cukup pula mendominasi. Ini karena secara kuantitatif jumlah buruh batik (*notabene* nonelite) lebih besar ketimbang majikannya yang santri Masyumi. Padahal, secara ekonomi kalangan buruh begitu tergantung majikannya. Fenomena demikian bisa menjelaskan, misalnya dalam Pemilu 1999 di banyak daerah santri justru partai Islam bukan pilihan utama, karena yang menang PDIP yang mampu membawakan simbol-simbol solidaritas nonelite.

FENOMENA demikian menunjukkan lapisan nonelite dalam struktur masyarakat bisa menjadi semacam bangunan-bangunan yang merdeka. Dalam konteks Geertzian, sebagaimana pernah diilustrasikan Mohamad Sobary dalam bukunya, *Kang Sejo Melihat Tuhan*, biasanya nonelite abangan (dalam posisinya sebagai buruh) kerap tidak sependapat dengan kalangan elite santri

yang kebetulan majikan (tuan tanah), meskipun keliru pula apabila konflik mereka dianggap abadi.

Fenomena nonelite dalam koordinatnya, dinamis. Mereka memiliki sensitivitas dan obsesi yang berbeda dengan elite. Perubahan sikap nonelite biasanya terjadi dengan cepat dan berintensitas tinggi, terutama apabila kebutuhan mereka tak dipenuhi elite. Dalam pemilihan kepala desa misalnya, keputusan akhir mendukung calon kepala desa, lazim ditentukan karena soal sepele. Gara-gara elite calon kepala desa tidak memberi "perhatian", pun sesuatu yang bersifat metarial, ia bisa dianggap tak peka terhadap nasib nonelite. Ketekoran politik perhatian, bisa berakibat batal, dimana dukungan tak diperoleh. Dalam konteks ini nonelite pun turut menyuburkan praktik pragmatisme-transaksional.

Biasanya, kalangan elite paham situasi demikian, sehingga dalam penggalangan massa politik musim kampanye gencar dilakukan dengan membujuk-rayu nonelite, termasuk terutama melalui pemberian-pemberian material. Kunjungan elite politik, misalnya, ke pesantren-pesantren menunjukkan, untuk menundukkan kaum santri (tradisional) dan memperoleh legitimasi ke bawah diperlukan teknik tersendiri. Sang elite perlu menundukkan nonelite dengan mengambil hati mereka, sehingga tak sekadar berhenti pada bantuan-bantuan ke para kiainya.

NONELITE biasanya mudah tergoda simbol solidaritas kenonelitan atau kerakyatan. Elite yang pandai ialah yang mampu memanipulasi simbolik kerakyatan. Nonelite mengalami dua tahap proses politik, tahap sebelum sadar politik, dan setelah kritis secara politik. Yang pertama, sekadar berkutat aspek pragmatisme simbolik. Mereka belum bisa mengambil keputusan rasional kalkulatif, kecuali rasional simbolik. Resistensi terhadap elite, biasanya terpicu persoalan tak substansial. Nonelite yang kritis, perilakunya berbeda, mengingat yang dikedepankan dimensi substansif.

Kekerasan massa yang belakangan ini marak melibatkan dua

jenis tersebut. Penghakiman massa tak lepas dari logika simbolik ataukah bisa pula substansif. Frustrasi atau kekerasan massa, kerap dilakukan bukan tanpa disadari. Secara simbolik, karena elite penegak hukum dan pranata sosial dinilai gagal mengibarkan panji-panji kebesarannya. Sementara secara substansif, nonelite menurut Muhammad Qodari (*Tempo*, 2/7/2000) "merasa perlu merebut rasa aman, tanpa perlu menunggunya dari negara".

DALAM beberapa kasus, terasa adanya keterlibatan elite memunculkan konflik horisontal. Nonelite diaduk-aduk, sebagai pihak yang dibenturkan, dikorbankan demi kepentingan politik. Kita memiliki pengalaman begitu lama, elite menghegemoni nonelite, tidak saja secara ekonomi tetapi juga politik. Nonelite terbiasa tak berdaya, nasib mereka menggantung ke elite. Bertahun-tahun hegemoni dan represinya tanpa perlawanan berarti. Elite kekuasaan (Orde Baru) lazim memanfaatkan militer mengatasi masalah.

Kini, saat elite militer bebenah pasca-krisis kepercayaan dan elite politik sibuk menata diri dalam jargon demokrasi, nonelite seharusnya punya agenda menaikkan derajat kesadaran politik dan mengatrol harkat-martabat mereka, agar tidak berhenti sebatas pelengkap penderita. Di masa transisi, nonelite bisa menegaskan kepentingan substansif mereka, menjauh dari jebakan konflik horisontal. Daya kritisnya perlu tumbuh sehat, cerdas berani mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban elite yang punya posisi strategis dalam pengambilan kebijakan publik.●

Kabinet Abdurrahman Wahid Versus Realitas Pragmatis

Politik Pasca-*Reshuffle* Kabinet

KOMPAS, 13 SEPTEMBER 2000

BEBERAPA KALANGAN MENJULUKI kabinet baru Gus Dur hasil *reshuffle* pasca-Sidang Tahunan MPR (Kabinet Gus Dur Jilid II) sebagai *All the Wahid's Men*, mengingat susunan personalianya nyaris didominasi "orang-orangnya Gus Dur". Tiga orang "pengawal" (*the three musketeer*) perbaikan ekonomi-politik Gus Dur, yakni Menko Perekonomian Rizal Ramli, Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo, dikenal sebagai para loyalis. Muka-muka lama juga *loyalis* Gus Dur. Karenanya, sebutan *All the Wahid's Men* tidak terlampau mengada-ada.

Presiden telah menggunakan hak prerogatifnya dalam menyusun ulang kabinet, kendati tampak tanpa peran Wapres Megawati Soekarnoputri. Padahal, posisi wapres cukup strategis sebagaimana diatur dalam keputusan presiden tentang pelimpahan wewenang. Soal ini sesungguhnya sensitif dan telah berkembang di ST MPR, agar pelimpahan wewenang diatur melalui ketetapan (Tap) MPR. Meskipun usulan itu tak terlaksana, banyak kalangan menghendaki presiden berbagi kekuasaan (wewenang atau tugas) dengan wapres. Gus Dur pun menjanjikan, bahkan Kepresnya sudah keluar.

Sebutlah itu fenomena pertama. Yang kedua, terkait hal-hal yang secara psikologis menjelma menjadi respons masyarakat dan pasar. Reaksi mereka tidak begitu bagus. Mereka diliputi semacam skeptisme atas kabinet, dikaitkan reputasi dan integritas beberapa

personalia kabinet yang "bermasalah". Mereka menilai *start* awal Gus Dur mencemaskan dan amat spekulatif.

SECARA POLITIS, Kabinet Gus Dur kali ini tampak memudar kepelangian politiknya. Beberapa personalia yang kebetulan berasal dari partai memang masih ada, tetapi tak semeriah sebelumnya. Nyaris tak ada lagi jaminan yang diberikan partai kepada anggotanya yang jadi menteri, kecuali jaminan langsung Gus Dur. Hal ini justru memperbesar partai memfungsikan dirinya "oposisi". Partai-partai tampak mulai tak khawatir apakah kadernya dipakai atau tidak oleh Gus Dur. Mereka tak khawatir bila suatu saat kadernya dipecat dari kabinet.

Langkah-langkah politik Gus Dur berpotensi dihadang partai-partai. Para politisi di DPR makin besar peluangnya "memlonco" pemerintahan Gus Dur dengan jurus hak interpelasi dan hak angket. Politik pasca-*reshuffle* telah menggeser keseimbangan politik, dinamikanya makin tajam. Kabinet memang bersifat presidensial, namun DPR tetap bisa gencar mengoreksi kebijakan pemerintah.

Kabinet kali ini miskin teknokrat. Agaknya, Gus Dur mementingkan kemampuan konsepsional ketimbang teknis operasional, idealisme-konsepsional ketimbang realitas-pragmatis. Fenomena ini memunculkan dua risiko. *Pertama*, pemulihan ekonomi dihadapkan menguatnya resistensi psikologis publik dan pasar. *Kedua*, kebijakan yang mengabaikan realitas pragmatis, akan tertahan di dataran konsep. Ia tak bisa efektif mempercepat pemulihan krisis. Ia cukup ambisius tetapi mengabaikan prioritas. Akan fatal apabila *sense of priority* tak dipakai, kecuali *sense of Gus Dur talking about*, demi kehendak Gus Dur. Kecenderungan ini terasa dominan kini.

DI MASA transisi, stabilitas politik merupakan "barang mewah". Apa maksud Gus Dur mendudukkan kalangan tentara di kabinetnya pada posisi-posisi strategis? Apakah karena mereka dianggap memiliki tradisi disiplin dan jaringan kokoh, atau demi percepatan stabilitas politik? Barangkali yang lebih penting, demi men-

jaga hubungan Gus Dur dan tentara. Melihat kritisnya sikap publik dan pasar, sudah seharusnya Kabinet Gus Dur termotivasi menunjukkan kemampuan konsepsional dan kinerja teknis operasionalnya sehingga efektif me-*recovery* multikrisis. Bila para menteri merasa tidak mampu, cepat-cepatlah mengundurkan diri.●

Defisiensi Demokrasi

KOMPAS, 7 NOVEMBER 2000

WITH FEW EXCEPTIONS, DEMOCRACY HAS NOT BROUGHT GOOD GOVERNMENT TO NEW DEVELOPING COUNTRIES… WHAT ASIANS VALUE MAY NOT NECESSARILY BE WHAT AMERICANS OR EUROPEANS VALUE. WESTERNERS VALUE THE FREEDOMS AND LIBERTIES OF THE INDIVIDUAL. AS AN ASIAN OF CHINESE CULTURAL BACKROUND, MY VALUES ARE FOR A GOVERNMENT WHICH IS HONEST, EFFECTIVE AND EFFICIENT

– **LEE KUAN YEW**, 10 NOVEMBER 1992

SALAH SATU KRITIK tajam terhadap demokrasi adalah sifat defisiensinya. Mengutip Lee Kuan Yew, pakar politik terkenal Samuel P Huntington mengingatkan, bahwa secara umum demokrasi tidak selalu merupakan pilihan terbaik, karena ia dapat menimbulkan inefisiensi dan ketidakpastian (Huntington, 2000). Dalam banyak kasus masa transisi, catat Huntington, aspek ekonomi justru menurun. Reformasi ekonomi terhalang kepentingan kelompok elite otoriter lama. Hilangnya kendali otoritarian, justru memicu meluasnya kekerasan komunal. Pemerintahan demokratis yang baru tidak berhasil membentuk pemerintahan yang baik dan efektif. Itulah efek lebih lanjut defisiensi demokrasi.

Defisiensi demokratis ini, secara umum akan mengembalikan kekuasaan ke arah otoritarian baru. Rakyat di pelbagai pelosok akan kembali menengok ke masa lalu dimana penguasa diktator menyediakan kebutuhan dasar dan membuat segala sesuatu bekerja. Huntington melukiskan *polling* Robert Arnett yang begitu dramatis:

pada 1993, 30 persen penduduk Moskwa dan St. Petersburg mengatakan kehidupan yang lebih baik, justru ketika berada di bawah penguasa komunis. Hanya 27 persen yang mengatakan kehidupan yang lebih baik ketika berada di bawah pemerintahan demokratis.

Kemelaratan biasa terjadi akibat perubahan politik, dari rezim otoriter ke demokratis. Ia mampu memicu kudeta militer, apalagi apabila kalangan sipil tak mampu secara cepat memutuskan kebijakan strategis, kecuali sekadar *jor-joran* politik. Huntington mencatat selama ini negara yang GNP per kapitanya mencapai 1.000 dollar AS atau lebih, kudeta militer tidak pernah berhasil.

Negara yang GNP per kapitanya mencapai 3.000 Dolar AS atau lebih, tak pernah terjadi kudeta militer. Negara yang yang GNP per kapitanya antara 1.000-3.000 Dolar AS adalah tempat dimana kudeta tidak berhasil terjadi. Sedangkan kudeta yang berhasil terjadi adalah di negara-negara yang GNP per kapitanya di bawah 5.00 Dolar AS. Bila catatan tersebut direfleksikan, tentulah militer di Indonesia bisa melakukan kudeta. Hanya saja persoalannya akan semakin ruwet, sebab kudeta tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya membuat masalah baru muncul jauh lebih kompleks.

ONGKOS sosial politik dalam proses demokrasi tidaklah sedikit. Proses demokratisasi bila salah langkah, mampu menyedot potensi ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lebih luas, terhambat gara-gara tersedot untuk membiayai proses politik. Memang, pembiayaan politik tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah. Ongkos politik justru banyak ditanggung rakyat yang secara sukarela mengorbankan segenap potensi ekonominya untuk berpolitik.

Di Indonesia, pembiayaan politik makin mahal tatkala partai-partai politik yang jumlahnya puluhan, hadir menandai era demokratisasi politik. Pembiayaan politik juga mahal tatkala banyak kalangan yang menginginkan menjadi provinsi sendiri. Kontraprestasi dari mahalnya ongkos politik itu adalah kepuasan politik atas tersalurnya aspirasi yang selama ini tersumbat.

Dalam situasi transisi, kelompok banyak uang leluasa memainkan peran politiknya. Namun, politik uang ada batasnya. Akan muncul kelompok pengimbang kritis, walaupun efektivitas kontrol mereka tidak sepenuhnya optimal. Kelompok prodemokrasi akan menuntut pemerintah transparan dan melakukan kebijakan tegas memproses hukum para konglomerat yang culas di masa lampau dan kini.

Mahalnya proses demokratisasi, sesungguhnya tak bisa sekadar diukur lewat besaran angka rupiah. Dalam masa transisi (yang diharapkan menuju demokrasi), kerap korban nyawa tertelan, akibat makin meluasnya konflik horisontal, tatkala masing-masing kelompok mengedepankan egoisme politik (komunalisme). Era demokrasi menyertakan hadirkan banyak kelompok yang memunculkan potensi konflik terbuka secara horisontal. Ongkos nonmaterial begitu besar, baik sebagian imbas ritual politik pemilu, maupun kasus-kasus politik yang kompleks, sebagaimana terjadi di Aceh, Ambon, Irian Jaya, dan sebagainya.

Di era transisi politik ini, defisiensi demokrasi sesungguhnya telah menggejala. Kalangan yang bersikap apriori terhadap demokrasi bisa makin bertambah, apabila ia tak segera menghasilkan sesuatu yang konkret. Orang kerap merindukan suasana masa lampau yang "aman, tertib, terkendali", walaupun banyak catatan pelanggaran HAM dan penumpukan kroni kekuasaan. Yang penting ekonomi nasional membaik, problem ekonomi masyarakat pun dapat teratasi dengan baik. Bila tidak, mereka apriori, dan tidak mau memahami apa itu demokrasi.

Bagi pihak prodemokrasi, dampak defisiensi demokrasi seharusnya tidak disambungkan pada rekomendasi pengembalian ke tatanan dan budaya kekuasaan lama. Prodemokrasi bukan tidak menyadari defisiensi demokrasi. Mereka sadar dan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa hadir dalam proses demokratisasi, maka diperlukan kesadaran kolektif menangkalnya.

Zaman demokrasi memberi ruang publik dan kesempatan emas masyarakat untuk melakukan perbaikan. Di sisi lain, justru musuh-

musuh demokrasi mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga zaman demokrasi memberi peluang yang sama bagi "kekuatan baik" dan "kekuatan tidak baik" untuk berlomba dan bertarung, kejar-mengejar kekuasaan. Tentu saja setiap kelompok mengklaim pihaknya "kelompok baik", saingannya "kelompok tidak baik". Tetapi, dalam demokrasi, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi, dan iaseharusnya selalu menuju *equilibrium* (keseimbangan), *checks and balances*.

Defisiensi demokrasi, konsekuensi logis sistem demokrasi. Proses menuju demokrasi memang membutuhkan ongkos sosial-politik yang tak sedikit. Diyakini ongkos tersebut menghasilkan sesuatu yang amat bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prodemokrasi berpendapat, proses demokrasi membutuhkan kesabaran revolusioner. Defisiensi demokrasi adalah sebuah kewajaran semata, asal tidak terlampau ekstrem sampai melumpuhkan demokrasi itu sendiri.●

III

REGENERASI TENTARA

[2001]

DALAM MASA TRANSISI ... TARIK-MENARIK KEPENTINGAN TERJADI DENGAN INTENSITAS TINGGI. TIDAK SAJA KEPENTINGAN ANTARPARTAI POLITIK, ANTAR-ELITE POLITIK, TETAPI JUGA ANTARA PUSAT DAN DAERAH. ... TARIK-MENARIK KEPENTINGAN INI, MERUPAKAN HAL BIASA DALAM PROSES DEMOKRATISASI. DARI PROSES TARIK-MENARIK KEPENTINGAN ITU, DIHARAPKAN AKAN MEMUNCULKAN KEBIJAKAN POLITIK YANG TEPAT DAN PROPORSIONAL, SEHINGGA MEMBUAT SEMUA ELEMEN YANG ADA BERGERAK SECARA KONSTRUKTIF, TIDAK BERTABRAKAN.

- OTONOMI, RESENTRALISASI DAN HEGEMONI PUSAT-DAERAH

Demokrasi dan Demassifikasi Politik

KOMPAS, 24 JANUARI 2001

NASIB DEMOKRASI belakangan terasa memburuk, berkenaan munculnya pelbagai konflik yang kontraproduktif. Hubungan Presiden-DPR yang memburuk dapat berimbas ke konflik nonelite dan massif. Fenomena tersebut membuat masyarakat semakin resah, apalagi mereka masih berada dalam suasana *moral panic* akibat teror bom tempo hari.

Konflik politik dalam kondisi yang dikonsepsikan O'Donnel, transisi menuju demokrasi, lumrah saja. Tanpa konflik, politik hambar, perjalanan menuju demokrasi miskin inovasi. Tidaklah mungkin dinamika politik, sestatis apapun, tak menyisakan konflik (*zero conflict)*. Konflik pasti ada, sepotensial apapun. Para pakar manajemen menjelaskan, konflik bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa bencana tergantung pengelolaannya. Bila ia tak terkelola bisa liar destruktif. Bila terkelola, mendorong kemajuan.

Demokrasi itu sistem, cara canggih mengelola ragam potensi konflik dalam masyarakat majemuk, baik kepentingan maupun primordial. Demokrasi mengelola kepentingan orang banyak lewat mekanisme yang disepakati bersama dan mengedepankan prinsip *checks and balances*.

Karena kepentingan orang banyak beragam, jumlah penduduk terus bertambah dan kompleks, demokrasi modern lebih bersifat perwakilan, ketimbang yang pernah diterapkan di Yunani Kuno, demokrasi langsung. Maka muncullah elite politik sebagai wakil absah "penjelmaan rakyat" melalui pemilu di parlemen dan peme-

rintahan. Demokrasi yang kita kenal, secara mekanisme, sesungguhnya semacam penyederhanaan proses pengelolaan pelbagai kepentingan orang banyak itu melalui aturan-aturan yang disepakati bersama yang praktiknya melibatkan peran para elite.

Elite politik sejati memperjuangkan kepentingan rakyat, meskipun kerap berhenti sebatas klaim. Dalam banyak kasus, justru yang kerap dijumpai, aksentuasi perjuangan elite lebih terfokus pada kepentingan lembaga dan pribadinya. Politik memang seni kemungkinan, berkaitan dengan kekuasaan dan distribusi sumberdaya. Namun, kepentingan rakyat sering sekadar klaim yang berhenti sebagai pemanis bibir menjelang pemilu.

DEMASSIFIKASI

TANGGUNG jawab elite sesungguhnya tidak main-main dalam politik massa. Elite bisa melakukan banyak hal dalam mendorong proses demokrasi yang sehat. Setidaknya, mereka diharapkan mampu melakukan tiga hal. *Pertama*, mampu menerjemahkan "kepentingan orang banyak" (tak sekadar basis konstituennya), namun lintas kelompok atau kepentingan publik secara luas. Elite diharapkan mampu merumuskan konsep terbaik guna memecahkan ragam persoalan. Bila sekadar merumuskan persoalan saja "kurang mampu", proses selanjutnya pasti "amburadul".

Kedua, selain merumuskan persoalan menurut visi politik masing-masing dan memperjuangkannya secara sungguh-sungguh, para elite punya tanggung jawab tidak ringan dalam pengelolaan konflik, baik di internal organisasinya, maupun dalam pengendalian massa politik. Ia memerlukan kewibawaan, kharisma dan integritas sebagai pengomando yang bertanggung jawab menggerakkan atau mencegah aktivitas semassif apapun.

Pada praktiknya, mengelola massa untuk selalu tetap dalam "garis komando", bukan pekerjaan mudah. Massa kerap memiliki karakteristik yang berlainan dengan logika elite. Massa, bisa bertindak liar dan anarkis, justru ketika para elite penanggung jawabnya tak mampu lagi mengendalikannya. Massa itu harimau, elite

pawangnya. Harimau bahkan bisa menerkam pawang.

Dalam kancah politik nasional belakangan, para elite tengah bertaruh dengan keadaan. Ketika situasi politik mengecewakan kelompoknya, mereka tampak seperti tak mampu berbuat banyak untuk mencegah aksi massanya yang destruktif. Kasus marahnya massa PDIP setelah terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden, merupakan ilustrasi *gamblang*. Juga betapa dilematisnya petinggi Banser Ansor *Nahdlatul Ulama* (NU) menghadapi keinginan banyak warganya secara massif yang hendak ke Jakarta.

Elite kadang justru menikmati sifat liar massanya. Padahal sikap ini melegitimasi anarki. Kita seperti kekurangan contoh, ikhwal keseriusan elite dalam mencegah perilaku liar massanya. Biasanya, setelah terjadi "hal-hal yang tidak diinginkan", elite cepat-cepat cuci tangan, menegaskan aksi semacam itu bukan kebijakan resmi organisasi, alias di luar kendali.

Kecanggihan mengelola konflik skala massif, termasuk kunci demokrasi yang sehat. Ketika elite mendemassifikasi politik, ia mencerminkan manajemen politik tingkat tinggi. Demassifikasi bukan pengekangan partisipasi politik, tetapi memproporsionalisasikan peran massa dalam politik untuk menyerahkan masalah-masalah politik kepada elite.

Demassifikasi mencegah pendekatan "otot" dalam berpolitik dengan metode pengerahan massa, ancam-mengancam mengatasnamakan sekian ribu orang untuk menggertak secara politik kekuatan lain, serta segala macam *psy war* atas nama massa yang siap "mengamuk". Ia memproporsionalisasikan peran elite dengan pihak-pihak yang diwakilinya agar melakukan tugas dengan baik, dengan kesadaran penuh pada proses demokratisasi-konstitusional. Kata kuncinya kepercayaan (*trust*).

Krisis kepercayaan terhadap elite jelas membahayakan, sebab potensi massa "main hakim sendiri" meningkat. Karenanya, akan lebih fatal bila konflik legislatif-presiden semakin meruncing dan proses konstitusional macet. Ia bisa memicu, sebagaimana disinya-

lir Forum Demokrasi (Fordem) *stateless society*, ketika masyarakat mengabaikan adanya negara dan segala perangkat atau aturannya.

Ketiga, selain merumuskan persoalan dan mendemassifikasi, para elite harus mencerahkan dan mencerdaskan massanya, agar demokrasi berbobot. Demassifikasi tidak akan pernah berhasil bila para elite tidak memiliki kesadaran ideal berpolitik yang mencerdaskan. Ia akan gagal manakala yang terjadi proses pembodohan politik oleh para elitenya.

Demassifikasi politik merupakan pekerjaan rumah yang mendesak, tetapi tidaklah ringan mengingat para elite, baik yang di parpol maupun ormas dan LSM, cenderung kehilangan orientasi berpolitik mencerahkan. Mereka mudah terjebak irama *zero sum game*.

Meski proses demassifikasi sulit, para elite ditunggu perannya. Kita tengah belajar berdemokrasi, yang bersifat sebagaimana disebut Nurcholish Madjid, *trial and error*. Kesalahan lumrah adanya ketimbang belum pernah melakukan apa-apa. Tapi ia harus terus-menerus diperbaiki, maka penting kesiapan memperbaiki diri. Kita terus berupaya menemukan keberkahan demokrasi.●

Politik Buruh dan Jebakan Aksi Anarki

KOMPAS, 20 JUNI 2001

DEMONSTRASI buruh belakangan ini semarak di beberapa tempat, sayangnya hal tersebut diikuti tindakan anarkis, berupa perusakan dan pembakaran. Tindakan anarki yang dilakukan buruh, walaupun tak semuanya begitu, dikhawatirkan menambah ketegasan stereotip, bahwa buruh selalu identik dengan "anarki". Tentu saja hal ini merugikan citra buruh secara keseluruhan, juga "politik buruh" itu sendiri.

Demonstrasi buruh yang menggejolak, tentu tak berdiri sendi-

ri. Ia berkait proses panjang, melibatkan kalangan kritis di luar buruh, semisal LSM buruh, yang aktif memberi isi, mengorganisir, dan menggerakkan buruh. Wujud dan model aksi yang mereka lancarkan pun tidak sekadar spontanitas, namun ia terkait dengan ragam faktor akumulatif sejak lama. Misalnya, rasa ketidakadilan yang terus tumbuh, tidak saja dilakukan oleh pihak pengusaha, namun juga oleh lingkungan eksternal secara makro.

Buruh, merupakan elemen yang berada di tingkat bawah dan paling bawah dari struktur kerja perusahaan. Ia lebih banyak berposisi defensif, sebab nyaris tidak memiliki kekuasaan apa pun untuk mendesain kinerja dan segala aturan yang menyangkut bagaimana perusahaan beroperasi. Mereka, biasanya, menunggu kebijakan dari para manajer perusahaan tentang apa yang mereka kerjakan dan diberi upah berapa.

Dalam banyak kasus, posisi buruh sudah rentan sejak awal, tatkala buruh tak kuasa menolak berapa pun upah yang akan dibayarkan oleh perusahaan, dengan tingkat disiplin kerja yang ketat. Pertimbangan diterimanya pekerjaan itu, biasanya adalah karena daripada si calon buruh menganggur. Pengangguran memang merupakan persoalan serius sejak lama, dan tingkat pengangguran telah meningkat luar biasa, sejak krisis moneter (krismon) 1997.

Menyangkut upah, posisi buruh sejak dulu hingga kini nyaris selalu menimbulkan masalah. Upah yang mereka terima, biasanya pas-pasan alias tak cukup untuk membuatnya hidup secara longgar. Penetapan UMR, biasanya selalu tak menggembirakan, sebab bila dipraktikkan secara riil di lapangan, ia tidak begitu realistis. Dalam posisi yang didesain untuk hidup serba amat sederhana, ditambah peluang mobilitas vertikal yang sempit, sementara desakan hidup meningkat dengan naiknya harga-harga barang dan turunnya nilai rupiah, membuat psikologi resistensi buruh makin "parah".

Para buruh, akibatnya menjadi amat peka terhadap isu-isu yang terkait dengan perubahan nasib mereka. Kepekaan itu menggejolak bila yang muncul adalah isu politik, berupa kebijakan pemerintah

yang dinilainya menguntungkan pihak pengusaha. Ini artinya, nasib mereka akan makin terpuruk dan "tersisih". Demonstrasi menolak SK Mennakertrans Nomor 78 Tahun 2001 dan No 111/2001 yang merupakan revisi atas SK No 50/2000, tak lepas dari situasi psikologis kaum buruh di atas.

Sebagaimana diketahui dua SK, masing-masing No 78 dan No 111 Tahun 2001 tersebut, dinilai memperlemah posisi buruh dan mempermudah pengusaha untuk memecat maupun menskorsing buruh. Oleh pemerintah SK sebelumnya, yang dibuat pada zaman Menteri Bomer Pasaribu, justru dinilai sebagai salah satu penyebab keengganan investor asing menanamkan modalnya di sini. SK No 150/2000 ini mengatur hak-hak buruh, termasuk pesangon dalam mengundurkan diri dan dipecat, maupun diskorsing.

Dalam situasi sosial-politik dan masa depan ekonomi yang serba tidak pasti ini, semakin mudahlah buruh "menggerakkan diri". Mobilisasi buruh, merupakan fenomena yang mudah terjadi. Ini seiring dengan situasi sosial-politik yang berubah. Barangkali, demonstrasi buruh yang terjadi akhir-akhir ini, merupakan demonstrasi yang terbesar selama ini, terutama sejak zaman Orde Baru. Bila dulu serikat buruh tampak selalu defensif dan kurang berani mengambil inisiatif demi memperjuangkan nasib kaum buruh "secara total", tidak lagi kini.

Kehadiran berbagai serikat buruh merupakan fenomena sosial-politik yang dinamis, bukan statis-pasif. Dulu, intervensi politik rezim terlampau kuat di segenap organisasi buruh resmi yang ada. Rezim dan alat kekerasannya terlampau represif dalam menghadapi aksi-aksi buruh, dan biasanya mereka pelindung pihak pengusaha. Kini, begitu keran keterbukaan melebar, para buruh kian berani mengekspresikan diri dalam menuntut hak-hak mereka yang terzalimi.

Terlepas dari keprihatinan menyangkut pelbagai anarki yang terjadi, aksi-aksi buruh belakangan ini sedikit-banyak mengingatkan orang akan pentingnya elemen buruh dalam perusahaan. Sela-

ma ini terbetik pandangan yang mengedepankan opini bahwa karena Indonesia berpenduduk banyak, maka ia otomatis menyediakan pasar yang luas dan harga buruh yang murah. Opini tersebut, di satu sisi merupakan provokasi positif bagi upaya memancing pihak investor, tapi secara tidak langsung, ia menohok para calon buruh atau buruh itu sendiri.

Opini tersebut, bila dibaca dari pihak buruh, merupakan provokasi negatif dan amat merugikan posisi tawar mereka, sebab belum-belum sudah divonis "murah". Nah, pelbagai demonstrasi buruh yang ada belakangan, mencoba untuk menarik perhatian publik, pengusaha dan pemerintah, bahwa posisi mereka tidak bisa lagi diabaikan dan dihargai secara murah. Tentu saja "pesan" itu tak terlampau mengada-ada, dan pada kenyataannya ia membutuhkan proses panjang, dan "tak kunjung usai".

BURUH DAN POLITIK

BURUH dan politik, sejak dulu memiliki hubungan yang romantik, satu sama lain. Pada mulanya para buruh tak begitu mempersoalkan urusan politik secara serius. Tetapi, tatkala hak-hak mereka kerap dilanggar, dan posisi mereka yang terzalimi oleh sistem yang didesain oleh pemilik modal dan pengusaha, maka mulai muncullah gerakan-gerakan buruh yang sifatnya politis, dan bahkan ideologis. Maka, sejak itu buruh dan politik selalu bergandengan. Tetapi, lewat kebijakan politik pula gerakan buruh dilumpuhkan.

Wacana buruh dan politik mengedepan pascarevolusi industri di Inggris, dan terus bergerak di Eropa beberapa abad lalu. Gerakan buruh terkait sikap resistensi mereka terhadap dampak buruk kapitalisme yang mencengkeram seluruh roda dan mesin industrialisasi. Para pengkritik ketidakadilan sistem industrialisasi yang digerakkan para kapitalis lantas bermunculan. Mereka mencoba memotret nasib, dan menyuarakan hak-hak buruh yang tertindas. Di antara pengkritik kapitalisme yang mengedepankan isu-isu kaum buruh versus pemilik modal, Karl Marx. Dan bolehlah dibilang, tanpa isu-isu buruh, teori Marx (Marxisme) menjadi tak relevan.

Teori Marx memang terkesan ekstrem, sebab ia mengasumsikan adanya dua kelas dalam masyarakat, yakni kelas buruh (proletar) dan kelas pemilik modal (borjuis). Dua kelas itu selalu terlibat dalam konflik. Sementara sifat konflik versi Marx tak bisa didamaikan, artinya yang satu harus meniadakan yang lain. Marx sendiri membela kaum proletar (buruh), dan ia menegaskan bahwa konflik akan dimenangkan oleh kelas ini, dengan jalan revolusi. Revolusi yang dimaksud adalah perlawanan total terhadap kelas pemilik modal (borjuis), setelah revolusi dimenangkan, maka Marx terobsesi dengan ide masyarakat tanpa kelas.

Teori Marx terlepas kelemahannya, dikembangkan kalangan Neo-Marxis yang mengedepankan penyelesaian masalah lewat pendekatan konflik. Pelbagai demonstrasi buruh sekarang, agaknya mengarah ke konteks pendekatan konflik, bukan struktural-fungsional, pendekatan harmoni. Pendekatan terakhir dipakai oleh rezim Orde Baru menghadapi konflik buruh-pengusaha dan berakhir dengan tetap memendam potensial konflik yang mencemaskan. Di atas kertas, boleh dibilang telah terjadi *win-win solution*, tetapi hakikatnya *win-lose solution,* pihak buruh dirugikan.

Dalam sejarah Indonesia, politisasi gerakan buruh, kerap dipersemaikan dengan ideologisasi. Pada zaman Orde Lama, nyaris setiap partai memiliki sayap politik buruh. Corak ideologisnya kental, bisa dipakai untuk membedakan identitas satu sama lain. Biasanya isu-isu yang dilempar dikemas rapi seiring kepentingan partai payungnya. Aspek positifnya, buruh memiliki jalur memperjuangkan isu-isu tersebut lewat kekuatan politik parlemen. Negatifnya, di level horisontal menciptakan potensi konflik tidak saja dengan pengusaha, tapi juga antarkelompok buruh.

Di era tumbuhnya kembali partai-partai saat ini, politisasi dan ideologisasi belum optimal. Kaum buruh lebih akrab dengan serikat-serikat buruh yang tak terkait payung formal partai. Agaknya peran LSM dan jaringan yang dimilikinya di level nasional dan internasional, amat signifikan. Mereka lebih leluasa "menggarap" kaum buruh, ketimbang partai-partai politik.

ANARKISME DAN POLITIK

YANG perlu diwaspadai jebakan aksi menjurus anarki. Kekerasan bisa menjadi salah satu jalan yang harus ditempuh dengan dalih mencegah bahaya lebih besar yang dianggap bakal terjadi. Melihat aksi-aksi buruh yang brutal belakangan, agaknya ia digerakkan pancingan yang memaksanya nekat anarki. Terlepas fenomena tersebut, kaum buruh membutuhkan perhatian. Caranya bermacam-macam, tapi hendaknya berempati, perasaan yang *connect* dengan yang tengah menimpa buruh. Bila tidak, pemerintah yang merupakan satu elemen penting dalam hubungan tripartit (pemerintah-pengusaha-buruh) selalu disikapi apriori kaum buruh yang peka perubahan.●

Duet Megawati-Hamzah Rapuh atau Kuat?

KOMPAS, 4 AGUSTUS 2001

TATKALA HAMZAH HAZ, tokoh utama PPP terpilih menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Megawati Soekarnoputri, pertanyaan mendasar segera muncul. Seberapa jauh daya tahan duet Megawati-Hamzah di pentas kepemimpinan nasional, padahal keduanya berbeda "ideologi"? Megawati, ketua umum PDIP representasi Nasionalis. Hamzah dari kubu Islam (yang dalam perspektif Deliar Noer, "Islam modernis", meski dia berlatar belakang NU yang "Islam tradisionalis"). Wacana ideologis dan politik Nasionalis dan Islam, kerap berbeda. Akar sejarahnya sejak zaman Belanda.

Kemunculan Megawati-Hamzah dalam sejarah politik Indonesia merupakan fenomena unik. Mereka bak air dan minyak, tetapi lalu disatukan katalisator kepentingan dan momentum politik demi kepentingan nasional. Cocoklah adagium tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan.

Ini tegas menyiratkan, dalam politik perbedaan ideologis bisa disatukan dalam bingkai koalisi yang didorong kepentingan politik

mendesak. Terbentuknya koalisi politik Megawati-Hamzah, contoh nyata yang menegaskan hal itu. Namun, adagium tersebut pun masih membuka peluang perpecahan.

Selain kepentingan dan momentum, ada dua faktor yang menegaskan kemunculan duet Mega-Hamzah. *Pertama*, secara matematika dan citra politik, pilihan ke mereka, pilihan yang dianggap sedikit risikonya dibanding apabila wapres Mega dari Golkar atau nonpartai. Apabila wapres dari Golkar, PDIP akan berhadapan dua hal sekaligus: Poros Tengah sebagai representasi kelompok Islam (minus NU) dan mereka yang menuntut pembubaran Golkar. Dengan berkoalisi dengan kelompok Islam, apalagi Hamzah berasal dari NU (meski KH Hasyim Muzadi "tidak mengakui" eksistensi ke-NU-annya), goncangan politik-ideologi bisa diantisipasi.

Kedua, PDIP tak melihat keuntungan politik, apabila menempatkan calon nonpartai (apalagi mantan militer). Dengan tema membangun kebersamaan antar-kekuatan politik sipil sebagaimana selalu ditegaskan dalam berbagai acara forum lintas-partai, tak ada alasan yang elegan, apabila wapres dari luar partai. Tema membangun kebersamaan oleh PDIP diupayakan dijaga, demi keseimbangan politik pemerintahan Megawati. Mengikuti pengalaman, realitas politik lebih ditentukan kekuatan-kekuatan politik di parlemen. Agaknya hal sedemikian disadari betul PDIP.

PELUANG PERPECAHAN

FAKTOR INTEGRASI begitu kental mempertemukan duet Mega-Hamzah. Namun, seberapa jauh perekat politik itu mampu bertahan di tengah potensi perbedaan ideologis yang begitu kental? Setidak-nya ada dua sumber. *Pertama*, sumber-sumber perpecahan yang bersifat ideologis. Di sini, sedikitnya ada tiga hal yang sensitif, terutama di kubu pendukung Hamzah: isu presiden perempuan, Piagam Jakarta, dan tuntutan penerapan syariat Islam dan implementasi-nya di berbagai daerah. Sebagaimana terbaca selama ini, PPP pernah menyinggung isu-isu itu. Soal presiden perempuan misalnya, PPP sempat menolak alias lebih mendengarkan nasihat

para kiai yang "berfatwa" tentang hal ini.

Namun, agaknya fatwa itu dilupakan menyusul besarnya peluang dalam konstelasi politik di parlemen. Alasan utama yang dipakai oleh para politisi PPP bukan alasan-alasan normatif keagamaan lagi, tetapi riil politik dan konstitusi. Bagaimanapun, dalam konstitusi Indonesia tak ada diskriminasi menyangkut kedudukan presiden perempuan, dan kebetulan secara riil politik, tak ada alternatif lain selain menaikkan Megawati sebagai presiden, menggantikan Abdurrahman Wahid dalam forum SI MPR yang dipercepat itu.

Sumber perpecahan kedua, menyangkut teknis penyelenggaraan pemerintahan. Ini berkaitan dengan seberapa jauh wapres berperan dalam turut mengelola jalannya pemerintahan. Ini amat penting dicermati, mengingat dalam format politik dewasa ini, kedudukan dan fungsi wapres, bukan sekadar simbol, tetapi harus konkret peran dan fungsinya. *Nah*, apakah peran politik dan kesempatan mengelola peme-rintahan, pihak Hamzah merasa diposisikan baik dan proporsional atau tidak, tentu akan berpengaruh terhadap rapuh ataukah kuatnya duet Mega-Hamzah. Pemarjinalan peran wapres bisa menjadi bumerang. Selain itu, terkait seberapa jauh akomodasi terhadap PPP dalam pemerintahan.

Baik sumber ideologis maupun teknis bisa membuat duet Mega-Hamzah menguat atau melemah. Persoalannya, apakah mereka mampu menjembatani perbedaan, saling berbagi dan memahami satu sama lain, demi keberlangsungan pemerintahan atau sebaliknya. Tantangan mereka kompleks. Dinamika politik bisa fluktuatif oleh konsesi-konsesi jangka pendek, yang bisa menjadi bumerang.

RAPUH ATAU KUAT?

SEKALI lagi duet ini unik. Dalam beberapa hal, ia mengingatkan duet Soekarno-Hatta yang juga unik. Hubungan Soekarno-Hatta pun tak langgeng. Semula duet ini amat cocok dan melengkapi: Soekarno bertipe *solidarity maker*, pembangkit motivasi rakyat, dan simbol persatuan dan harga diri bangsa. Hatta pemimpin yang disiplin, pandai dan cermat mengurusi birokrasi, spesialis urusan

teknis pemerintahan. Keretakan terpaksa terjadi, tatkala Hatta sebagai wapres mengundurkan diri. Pandangannya tentang demokrasi tak cocok lagi dengan manuver politik Soekarno.

Keunikan serupa terjadi pada Gus Dur-Megawati yang dicitra kan kakak-adik. Bukan semata-mata Gus Dur lebih tua, namun juga dikaitkan aspek kesejarahan koalisi Islam tradisionalis dan Nasionalis masa eksperimen Nasakom (Nasionalis diwakili PNI, Agama oleh NU, Komunis oleh PKI) Presiden Soekarno. Pengalaman ini nyaris disimpulkan adanya kedekatan ideologis. Namun, bubarnya Gus Dur-Me-gawati, membuat asumsi itu tidak relevan.

Mereka akan kuat, bila melepaskan perbedaan, rapuh bila terjebak perbedaan neo-ideologis dan apabila kebersamaan memudar. Mereka bisa menempatkan diri proporsional, saling melengkapi dan memperkuat. Harapan ini tak berlebihan, mengingat banyak orang bosan pertikaian yang membuang banyak energi. Duet ini bisa tampil sebagai pemimpin berwibawa dalam menjalankan roda pemerintahan, meski periodenya singkat. Mereka bisa bercermin dari pengalaman agar sejarah kepemimpinannya meninggalkan dasar-dasar pemulihan multikrisis.●

Profesionalisme Tentara Pasca-kemelut Politik

KOMPAS, 23 AGUSTUS 2001

KALANGAN TENTARA, YANG bertekad mewujudkan profesionalisme pertahanan serta menjauhi politik, kenyataannya sengaja atau tidak turut berperan dalam percepatan "penjatuhan politik" Presiden Abdurrahman Wahid. Penolakan TNI dan Polri terhadap dekrit Gus Dur, sebaliknya mendukung pengamanan SI MPR dipercepat merupakan titik penting naiknya Megawati Sukarnoputri sebagai presiden didampingi Hamzah Haz sebagai wapres. Maka, realita di lapangan menunjukkan tentara belum sepenuhnya

lepas dari politik, hanya pola dan pendekatannya yang berbeda – dibanding Orde Baru.

Pasca jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid, peran tentara dalam politik kembali dipertanyakan. Sesungguhnya ini merupakan persoalan klasik, apakah betul tentara telah meninggalkan wilayah politik secara elegan dalam bingkai supremasi sipil? Harapanya ke sana, kendati ia harus menemui proses perlambatan akibat peluang akomodatif tentara dalam pemerintahan Megawati.

Akomodasi tentara di Pemerintahan Megawati, sesungguhnya bukan hal yang tak wajar. Secara politik, Megawati agaknya tak bisa lepas dari dukungan tentara. Sebagaimana diakui Sekjen PDIP Pramono Anung, selain kubu Nasionalis dan agama (Islam), tentara (militer) adalah salah satu pilar utama riil politik di Indonesia saat ini. Ini berarti, secara eksplisit kubu Megawati mengakui bahwa bagaimanapun, eksistensi politik tentara tak bisa diabaikan. Cuma yang perlu dicermati, sejauhmana keterlibatan tentara dalam bingkai reformasi, supremasi sipil, dan demokratisasi.

Setidaknya ada dua arus upaya apresiasi eksistensi tentara di Pemerintahan Megawati. *Pertama*, arus optimis yang diwakili kalangan konservatif yang memandang pengaruhnya dalam politik mutakhir, serta ketegasannya dalam mengatasi berbagai konflik (yang cenderung ke separatisme) bisa diandalkan. Tanpa tentara, sulit memulihkan situasi. Kalangan ini tak mengkhawatirkan demokrasi terancam serius bila tentara terlibat dalam proses pemerintahan. *Kedua*, arus pesimis yang memandang keterlibatan tentara (baik yang masih aktif maupun purnawirawan) dalam pemerintahan, merupakan sinyal kuat terancamnya reformasi, supremasi sipil, dan demokratisasi. Pemanfaatan tentara dalam politik dikhawatirkan membuat pola-pola lama yang destruktif berulang kembali.

Perlu disimak pandangan Daniel S. Lev, bahwa dalam rangka supremasi sipil, jika ada perwira militer baik yang masih aktif maupun purnawirawan yang masuk dalam kabinet, dia harus terpisah selama 10 atau 15 tahun dari institusi militer. Ini dimaksudkan agar tak ada keterkaitan antara institusi militer dengan mereka. Jika ke-

terikatan ini masih ada, perwira itu akan menjadikan militer sebagai semacam partai politik. Tentu saja ini berbahaya.

Usulan menarik lain datang dari Takashi Shiraishi tentang pentingnya kontrol terhadap bisnis tentara, karena ia mendorong keterlibatannya dalam politik. Selain bisnis tentara harus terkontrol, perlu dipikirkan secara cermat bagaimana anggaran tentara tercukupi – sehingga tak berbisnis. Secara umum, kalangan tentara harus biasa berada dalam situasi kontrol sosial dan politik dari masyarakat sipil dalam kerangka demokrasi. Mudah-mudahan, kalangan tentara mampu memahami dan merespon berbagai pandangan masyarakat yang menggugat peran politiknya di masa lalu.

PROFESIONALISME-POLITIK

ISTILAH politik mengalami makna menyempit tatkala dikaitkan dengan peran dan fungsi tentara. Keterlibatan politik tentara diartikan sebagai masuknya tentara ke sistem politik formal (DPR-MPR), serta keterlibatannya dalam pemerintahan (rezim). Tatkala sistem politik baru menghendakinya tidak lagi terlibat di sana, terutama di DPR-MPR, serta adanya aturan ketat bagi tentara masuk ke pemerintahan, kesannya habis sudah peluang politik tentara.

Padahal, peluang politik tentara tetap lebar. Catatan S.E Finer dalam *The Man on Horseback* (1962) menarik disimak, bahwa justru profesionalisme tentara bisa menjadi pendorong intervensi politik. Profesionalisme tentara bagi Finer, ibarat pisau bermata dua: sambil mengakui supremasi sipil, profesionalisme meningkatkan kepentingan korporasi militer. Tentara suka merasa lebih berhak, ketimbang sipil yang partisan. Klaim ini terkait anggapan dirinya milik nasional yang abadi.

Faktor lain intervensi politik profesionalisasi tentara, timbulnya sindikalisme tentara. Sumber krisis, antara lain terjadi bila Menteri Pertahanan yang sipil membatasi anggaran yang diajukan para perwira profesional. Sebab lainnya keengganan tentara menjadi semacam *pemadam kebakaran* pemerintah sipil yang berkuasa.

PENUTUP

ERA transisi menghendaki perubahan ke arah peningkatan profesionalisme tentara. Mengingat peran politiknya secara formal menyusut, seiring pula banyaknya gugatan masyarakat, diperlukan desain sistem yang canggih menegakkan supremasi sipil. Untuk mewujudkannya perlu kecermatan dan tidak frontal. Perlu sosialisasi yang canggih, baik ke kalangan tentara maupun ke sipil.

Di masa Abdurrahman Wahid, konflik memuncak. Sikap dan respons tentara dalam soal politik dipaksa mengemuka kendati bumerang bagi kelangsungan politik Gus Dur. Saat itu TNI dan Polri diuji kondisi eksternal, termasuk intervensi presiden yang vulgar. Untung tidak pecah ke konflik terbuka. Banyak pelajaran bagaimana mereka menghadapi perbedaan pendapat yang tajam dalam demokrasi. Pasca-kemelut diharapkan tentara brbenah secara sungguh-sungguh ke arah profesionalisme dalam bingkai demokrasi.●

NU, Muhammadiyah, dan Civil Islam

KOMPAS, 31 AGUSTUS 2001

PENGALAMAN pasca-jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid melalui SI MPR, memberi catatan tersendiri bagi hubungan NU-Muhammadiyah. Dinamika politik masa Gus Dur, suasananya kurang menguntungkan. Konflik elite berimbas ke bawah. Beberapa infrastruktur sosial Muhammadiyah sempat terkena sasaran perusakan, kendati para kadernya tak terpancing. Tentu, ini catatan tak mengenakkan bagi sejarah hubungan kedua organisasi. Setelah konflik elite mereda, diharapkan masing-masing menarik hikmahnya. Sebaiknya mereka terus konsisten di jalur kultural, memperkuat, apa yang diistilahkan Robert W Hefner *civil Islam*, mengingat keduanya memiliki modal historis dan sosial-kultural kuat.

MEMANG, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu cenderung memiliki akar sejarah yang berbeda. Yang satu, seolah antitesis lainnya. Padahal, tokoh pendiri masing-masing, KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari, konon pernah menjadi teman seperguruan. Kelahiran NU, tak lepas dari munculnya Muhammadiyah. Satu sama lain, sesungguhnya saling melengkapi: Muhammadiyah lebih akomodatif terhadap pendekatan atau metodologi Barat (modernis), NU pada masanya lebih akomodatif terhadap tradisionalisme anti-Barat.

NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di ranah sosio-kultural kemasyarakatan. Masing-masing memiliki minat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Keduanya memakai pendekatan berbeda. Sayang, justru perbedaan ini kerap terekspolitasi, terutama saat disentuhkan dengan persoalan politik. Ketegangan hubungan NU-Muhammadiyah di level *grass-root* belakangan disebabkan suasana politik skala nasional yang kurang menguntungkan.

Dalam dekade terakhir telah terjadi kemajuan luar biasa dalam konteks hubungan sosio-kultural NU-Muhammadiyah. Hal-hal yang selama ini senantiasa dipersoalkan (padahal bersifat *khilafiyah*), telah sedikit-banyak terkikis. Kalangan NU dan Muhammadiyah tak lagi dikuras energinya sekadar mempersoalkan perbedaan cara beribadat masing-masing. Pergumulan wacana di tingkat struktural dan *grass-root* telah terjadi, dan masing-masing telah mencobakan kerja sama positif satu sama lain.

Secara sosial-kultural, masing-masing memiliki keunggulan. Tentu persoalannya, bagaimana sinergisitas dimunculkan dan selalu dirawat dengan baik. Seiring dengan perkembangan zaman, serta kemajuan-kemajuan yang dicapai atas perolehan tingkat pendidikan, muncullah optimisme yang kian membesar.

HUBUNGAN NU-Muhammadiyah, dalam situasi dan kondisi politik apapun harus tetap konsisten, saling memperkuat dan melindungi. Sudah menjadi ciri dasar politik, bahwa pola, corak

koalisi, kebijakan, personalia, bahkan simbol politik pun tak bisa dibilang abadi. Perubahan pasti terjadi, cepat atau lambat. Persis adagium politik, "tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan".

Yang menarik, barangkali setelah turunnya Gus Dur, yang konon merupakan representasi kalangan Islam, kini seakan terobati oleh kehadiran Hamzah Haz. Meski sama-sama berlatar belakang NU, namun secara politik, orientasi keduanya berbeda. Gus Dur mewakili kalangan Islam tradisonalis, Hamzah cenderung merepresentasikan kelompok Islam modernis-konservatif. Maka kalau dulu koalisi yang terjadi adalah antara Islam (tradisionalis) dengan kelompok Nasionalis, kini yang terjadi adalah koalisi duet politik antara kubu Nasionalis dengan Islam (modernis-konservatif).

Pola koalisi politik demikian, semula dianggap *absurd*. Sebab, selama ini yang berkembang asumsi antara Islam tradisionalis dan kubu Nasionalis (sebagai varian NU dan PNI), fenomena "koalisi abadi", setidaknya karena mereka pernah memiliki pengalaman sejarah yang romantis masa lalu (zaman Demokrasi Terpimpin). Dengan pola baru koalisi politik Islam non-NU dengan Nasionalis, rubuhlah asumsi itu dan lantas eksperimentasi politik baru pun terjadi. Seiring makin dinamisnya proses demokratisasi, pola-pola politik yang terjadi pun makin variatif. Dalam hal ini NU-Muhammadiyah dituntut harus lebih bisa mengantisipasi kemungkinan munculnya jebakan-jebakan politik yang tidak perlu.

NU DAN Muhammadiyah sebaiknya terus memfokuskan agenda *civil Islam*. Islam memberi basis bagi penegakan hak-hak sipil masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara, dan oleh sebab itu perlu terus diperjuangkan. Hak-hak sipil itu merentang ke berbagai dimensi, dari soal pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, rasa takut, hingga keadilan di muka hukum. Lingkupnya luas, dan mungkin kurang begitu populer, dibanding, misalnya, bila mereka hanya berkutat pada soal politik-kekuasaan.

Sudah saatnya NU dan Muhammadiyah berdaya dan mampu

merespons secara konstruktif berbagai macam isu yang muncul di arena sosial-politik, tentu lewat pendekatan kultural. Kesan selama ini, ormas-ormas Islam hanya berkutat pada isu-isu yang terkait pada soal ideologis dan formalisasi hukum Islam (syariat) ke dalam hukum negara, dan melupakan isu strategis lain. Padahal, tak ada salahnya bila mereka memberi masukan (respons), dari mulai kebijakan kenaikan harga BBM dan kebijakan-kebijakan praktis lain, utang luar negeri, HAM, hingga persoalan lingkungan hidup. Toh, isu-isu itu, terutama yang berkaitan dengan kebaikan publik juga merupakan "isu agama" dalam konteks muamalah.

Perlu dikembangkan modul penguatan *civil Islam* yang paralel dengan demokratisasi, pencerdasan politik, kemandirian ekonomi, hingga independensi budaya. Wilayah *muamalah* bisa lebih berkembang, sebab tak sekaku isu-isu ideologis. Ini demi kebaikan bersama. Selain peran para senior, yang tak bisa diabaikan, peran generasi mudanya. Komunikasi menjadi hal utama untuk menghindari kesalahpahaman. Para muda kedua ormas bisa lebih luwes, saling mengisi, belajar dari pengalaman. Penumbuhan *civil Islam* bukan tugas ringan. Tapi NU dan Muhammadiyah bisa memeloporinya.●

Kasus Madiun dan Akar Konflik TNI-Polri

KOMPAS, 24 SEPTEMBER 2001

MASYARAKAT DIKEJUTKAN insiden perusakan markas dan pos polisi di Madiun, Jatim oleh oknum TNI. Kejadian serupa jarang terjadi. Spekulasi pun berkembang di masyarakat menyangkut hubungan TNI-Polri, bahwa bentrokan terjadi akibat kecemburuan satu sama lain menyangkut tugas dan wewenang yang berubah. Spekulasi itu tak sepenuhnya salah, mengingat terjadinya perubahan besar dalam tata politik nasional, termasuk pemisahan kelembagaan TNI dan Polri.

Kasus Madiun, ilustrasi yang menujukkan letupan konflik terbuka kalangan TNI versus Polri di masa reformasi. Pada masa lalu konflik mereka bukan tidak pernah terjadi. Kasus-kasus serupa biasanya tak sampai terangkat ke permukaan, karena kepekaaanya. Namun di masa reformasi, kasus sekecil apapun bisa terangkat ke permukaan. Ini akibat peran pers dan memang situasi keterbukaan informasi tak bisa dibendung.

Kasus Madiun bukanlah satu-satunya peristiwa yang muncul di zaman reformasi. Konflik serupa pernah terjadi di Sampit, Kalimantan Barat dan Serui, Irian Jaya – pernah terdengar juga kejadian serupa terjadi di Ambon. Kejadian-kejadian tersebut kasuistis, tak bisa digenelarisasi sebagai konflik TNI dan Polri secara luas. Kasus di Sampit, Serui, dan sebagainya, tak lepas dari kondisi lapangan, alias seting sosio-politik dan sosio-kultural yang berkembang. Namun, tidak menutup kemungkinan konflik-konflik serupa yang potensial, disebabkan oleh dampak atas restrukturisasi politik di tingkat pusat yang berimbas ke tingkat lokal.

Pemisahan kelembagaan TNI dan Polri merupakan tuntutan zaman, sudah saatnya paradigma "supremasi sipil" ditegakkan. Pengalaman Orde Baru menempatkan lembaga polisi di bawah naungan tentara, yang tugasnya terkait dengan menjaga kedaulat-an negara. Tapi, polisi bukan aparat militer melainkan aparat sipil, sebab ia berurusan dengan keamanan publik (wilayah sipil). Polisi sesungguhnya alat "masyarakat sipil", yang sudah seharusnya mematuhi prosedur-prosedur sipil dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini makna demiliterisasi polisi menjadi relevan.

Pemisahan TNI-Polri masih belum lama, dan agaknya tidaklah bisa dihindari potensi-potensi kesalah pahaman dan menterjemahkan tugas dan wewenang masing-masing. Di masa Orde Baru, sebagaimana terasakan selama itu, kalangan militer amatlah dominan dan bisa bergerak di segala bidang, termasuk politik dan ekonomi. Kalangan militer marasakan dampak atas posisi hegemoniknya atas negara, antara lain dengan bebasnya mereka bergerak di wilayah-wilayah yang seharusnya cuma dimiliki kalangan sipil. Militer aktif

waktu itu, banyak yang merangkap jabatan-jabatan sipil. Tentu hal tersebut merupakan hal yang berlebihan.

Berpisahnya TNI dan Polri membawa konsekuensinya masing-masing. Tugas dan wewenang mereka pun dipertegas. Memang, secara praktis tampak betapa banyak "keistimewaan-keistimewaan" kalangan TNI yang terkikis, menyusul reformasi dan restrukturisasi TNI (disesuaikan dengan paradigma "supremasi sipil"). Fenomena sipilisasi TNI, yakni militer aktif harus pensiun bila menempati jabatan sipil (publik), memaksa kalangan tentara untuk memilih sebuah pilihan yang sulit (dilematis).

Sementara dampak atas penataan politik nasional pasca-Orde Baru, menempatkan Polri "di atas angin". Artinya, keleluasaan otonomi pengambilan kebijakan diperolehnya. Hal itu agaknya tak pernah terbayangkan sebelumnya. Polisi semakin banyak berurusan dengan persoalan publik, ketika TNI justru tak lagi terlibat urusan yang terkait hiruk-pikuk dinamika masyarakat sipil. Bahkan fungsi teritorial TNI pun kini telah tereduksi, tak sehebat dan "semenakutkan" dulu. Di era otonomi daerah, tatkala pmerintahan lokal begitu berkuasa, TNI dan Polri dituntut bisa menyesuaikan dengan segala macam aturan. Dinamisnya hubungan TNI-Polri, bagaimanapun tak lepas dari dinamika perpolitikan daerah.

AKAR KONFLIK

KASUS Madiun sesungguhnya juga menagaskan adanya "kegagapan" sebagian kalangan TNI dan Polri dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman. Dalam arti, karena tugas dan wewenang mereka bergeser dari yang dialami tempo dulu, sementara kompleksitas masalah kian menantang, kerap mendatangkan "kegeraman" tersendiri. Terlepas dari hal itu, akar persoalan yang menhantui hubungan TNI-Polri perlu dipecahkan, setidaknya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mirip kasus Madiun.

Banyak hal yang bisa ditarik sebagai akar konflik TNI-Polri, tapi di sini diuraikan empat hal saja. *Pertama*, pelik, kompleks, dan tingginya dinamika masyarakat sipil di masa transisi, belum diimbangi

profesionalisme dan kedisiplinan tinggi baik TNI maupun Polri. Kapolri S Bimantoro, mensinyalir kecenderungan meningginya beban psikologis yang berpotensi memicu kesalahpahaman mereka dalam menjalankan tugas di lapangan.

Kedua, kurangnya koordinasi antar-aparat keamanan (kepolisian) dan TNI. Dampaknya, terasa ada jurang pemisah yang lebar. Langkanya dialog bisa berakibat fatal, lebih mudah tersinggung dan menunjukkan ego masing-masing saat menjalankan tugas. Kondisinya semakin parah bila banyak prasangka berkembang (saling menuduh *overacting*), bukan obyektifitas dan kebijaksanaan.

Ketiga, kedua pihak harus menyadari perubahan mendasar sebagai konsekuensi tuntutan reformasi. Mereka harus menyelaraskan dengan tradisi dan prosedur sipil-demokratis dalam mengatasi masalah. Perlu proses kontinyu, modul pendidikan yang berorientasi ke sana, agar pendekatan tak dinilai jauh dari aspek kemanusiaan yang *civilized*.

Keempat, belum pudarnya godaan pendekatan militeristik. Reformasi TNI dan Polri dalam desain besar perubahan tata politik nasional menghendaki munculnya tentara dan polisi yang rasional dan manusiawi. Pendekatan militeristik sarat dengan kekerasan fisik, dan kerap tidak bisa menyelesaikan persoalan. Justru biasanya kekerasan akan berbuah kekerasan pula. Bukan berarti lantas aparat polisi dan TNI tak boleh mempergunakan senjatanya. Namun, penggunaan senjata itu harus sesuai dengan prosedur-prosedur baku, dan bukan seenaknya sendiri.

PENUTUP

KALANGAN TNI telah memutuskan sikap tegas terhadap pelaku kerusuhan insiden Madiun, memecat dua petinggi TNI di sana. Sementara Kapolri Bimantoro tampak terkesan malindungi anak buahnya, karena mereka dalam posisi melindungi diri. Apapun alasannya, pihak TNI dan Polri harus menindak anak-buahnya yang melanggar hukum dan membuat malu korpsnya. Hikmah utama atas kasus Madiun adalah, agar semua berbenah diri, saling be-

kerjasama secara konstruktif satu sama lain (antara Polri dan TNI, juga masyarakat). Penataan dan instrospeksi diperlukan sebagai landasan utama bagi upaya antisipasi atas harmonisasi hubungan TNI-Polri. Kasus Madiun juga menyiratkan pesan agar hal serupa tak pernah terjadi lagi.●

Demokrasi Versus Desentralisasi Korupsi

KOMPAS, 25 OKTOBER 2001

ADA SEBUAH SINYALEMEN menarik diungkapkan Teten Masduki dari *Indonesia Coruption Watch* (ICW), di masa transisi politik ini terjadi pergeseran pola korupsi yang mencolok. Seiring otonomi daerah, saat paradigma sentralisasi bergeser desentralisasi, pola korupsi seolah berjalan paralel. Terjadilah desentralisasi korupsi. Bila dulu korupsi politik memusat "di lingkungan istana", kini seiring menyebarnya pusat-pusat kekuasaan, menyebar pula pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mungkin ini merupakan konsekuensi sementara demokratisasi. Fungsi *checks and balances* belum berjalan optimal, selain masih banyak faktor yang menyuburkan praktik KKN. Ini tentu amat ironis dan patut dicermati, setidaknya untuk kewaspadaan atau antisipasi terhadap kemungkinan lebih jelek di masa depan. Kendati demikian, fenomena itu harus dibaca hati-hati, agar masyarakat tak pesimis menghadapi masa depan.

Yang pesimis memperoleh pembenaran ketika banyak dijumpai praktik KKN. Kalangan pesimis biasanya merujuk apa yang disebut Lee Kuan Yew, feomena defisiensi demokrasi. Demokrasi tak otomatis menjanjikan perbaikan ekonomi dan pemerintahan yang baik. Sebab, ia tergantung kemauan dan kesungguhan menuju kebaikan bersama. Maka, perjalanan demokrasi harus selalu dikawal

agar mengarah ke kondisi yang lebih baik dan terkontrol, menomorsatukan kepentingan publik.

Kelompok pesimis memandang "desentralisasi korupsi" merupakan ekses ketidaksiapan pelaku demokrasi. Proses demokratisasi harus dioptimalkan guna membalik keadaan menuju kebaikan bersama. Optimalisasi demokrasi dalam aspek nyata dipercaya mampu menurunkan tingkat KKN secara signifikan. Ini bisa terjadi bila *checks and balances* terjadi dan optimalnya kontrol publik.

POLITIK UANG

SALAH satu bentuk korupsi yang paling menggejala terkait praktik politik uang. Di masa transisi, politik uang godaan yang sangat menggiurkan. Mengapa ia semarak di daerah-daerah? Ada dua fenomena memahaminya. *Pertama*, adanya budaya politik lama, warisan Orde Baru yang belum sepenuhnya dapat dilepaskan oleh para elite dan masyarakat. Politik uang hanyalah salah satu (perbendaharaan budaya politik lama), selain gaya politik lama, yakni politik-patron (sistem patronase), dan feodalisme politik.

Sudah menjadi rahasia umum, sejak dulu tiap kali ada pemilihan pimpinan, di tingkat desa sekalipun, politik uang merebak. Apalagi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dulu, "partai" berkuasa leluasa, ditambah kuatnya negara, praktik politik uang mudah di tutupi. Tetapi kini, pelaku politik jauh lebih plural oleh berbagai kepentingan. Peran negara (sebagai perekayasa politik) kian menyusut, elite-elite politik baru kian mendapat porsi lebih. Sayang, porsi lebih itu belum optimal dijalankan di rel demokrasi yang sehat, sehingga virus politik uang mudah menggerogotinya.

Kedua, perubahan iklim politik dari yang sebelumnya tertutup-sentralistik menjadi terbuka-pluralistik, belum diimbangi kedewasaan berpolitik. Ini problem awal proses transisi menuju demokrasi. Betapa banyak godaan yang memerosotkan citra dan makna demokrasi. Bila para elite politik terjerembab ke kubangan politik uang, jangan harap aspirasi publik diperjuangkan. Mereka "mengontrakkan dirinya" untuk kepentingan sang pemberi uang.

Yang memberi maupun menerima sogokan demi maksud politik, sama-sama menyumbangkan kebobrokan yang berakibat sakitnya demokrasi. Konteks politik uang di daerah, situasinya mengkhawatirkan, sehingga perlu langkah antisipatif agar otonomi tidak menghasilkan efek samping seperti itu. Salah satu kuncinya, pemahaman dan sikap yang benar terhadap demokrasi. Proses pencerdasan politik harus hadir dominan.

OTONOMI-DEMOKRASI

DI ERA otonomi daerah, masyarakat dan para elite politik lokal berperan amat signifikan bagi dinamika sosial-politik. Otonomi merupakan pilihan yang dipercaya mendatangkan banyak manfaat dan membantu terciptanya pemulihan "segala krisis", maka masyarakat dan elite politik secara konstruktif harus mendukung logika itu.

Masyarakat dan elite politik lokal, seiring pelaksanaan otonomi daerah - sebagai implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 25/1999 – direfleksikan secara positif, mereka akan mampu mendorong proses politik secara sehat dan demokratis. Demokrasi yang berkembang di berbagai daerah seiring laju reformasi, dalam pandangan positif, akan makin kualitatif bila proyek otonomi daerah berjalan baik.

Variasi atas gaya berdemokrasi akan muncul di berbagai daerah. Dalam ruang lingkup lebih luas, pengalaman masing-masing daerah dapat memberi pelajaran bagi perkembangan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi bisa muncul dari segenap unsur masyarakat sipil hingga elite politik. Mereka mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, baik aspek normatif (moral politik) maupun mekanisme *checks and balances*. Politik uang mungkin merupakan indikator utama yang masih mewabah. Selain itu, yang bersangkutan dengan moralitas politik. Elite politik jelas makin dituntut menunjukkan integritas moral dan politiknya.

TRANSFORMASI YANG SEHAT

TUMBUHNYA pelopor-pelopor demokrasi lokal, tidak otomatis

identik dengan hapusnya penyakit-penyakit politik. Hal-hal yang berpotensi menghambat demokrasi harus dapat diminimalisasi. Inilah proses transformasi budaya politik yang dimaksud. Transformasi itu bermakna proses terus-menerus ke arah kebaikan-kebaikan ideal dalam berpolitik dalam konteks demokrasi.

Proses ini perlu didukung segenap unsur sosial-politik, dan risikonya bisa berlangsung lama. Namun, sebenarnya proses transformasi budaya politik itu bisa dipercepat, bila segenap pihak mampu bersikap dewasa dan memberi dukungan konstruktif bagi proses demokratisasi yang tengah berlangsung.

Minimal ada tiga catatan dalam rangka transformasi politik secara sehat dalam konteks demokratisasi lokal. *Pertama*, pembenahan kualitas sumber daya politik lokal. Kualitas politisi lokal pertama-tama bisa dilihat kapasitas pendidikannya. Politik tanpa kualitas pendidikan yang baik, bisa jadi bumerang bagi proses demokratisasi yang tengah tumbuh. Selain pendidikan (yang amat berkait dengan kualitas ide/konsep), kualitas teknis (yang berkait dengan kemampuan infrastruktural) juga perlu ditingkatkan.

Kedua, dibutuhkan proses pencerdasan politik menuju paradigma rasional-obyektif. Lapisan elite politik sesungguhnya memiliki kesempatan lebih banyak (serta tanggung jawab yang lebih utama) untuk melangsungkan tugas-tugas pencerdasan politik. Mereka sesungguhnya mampu mencontohkan secara konstruktif bagaimana paradigma rasional-obyektif dikedepankan (ketimbang misalnya, paradigma fanatisme kharismatik). Lapisan "akar rumput" juga memiliki kesempatan mendesakkan hal serupa.

Ketiga, masalah yang berkenaan dengan integritas elite politik dan daya kontrol publik. Integritas dan kinerja elite akan terpantau terus oleh publik. Publik kemudian menilai apakah para elite mengabaikan aspek moralitas individual maupun sosial dalam berpolitik atau tidak. Tapi bila publik hanya diam, fungsi kontrol mati, tak ada lagi yang mampu mengoreksi "cacat integritas" elite politiknya. Maka dari itu, publik harus senantiasa bicara (kritis).

Tiga hal itu, diharapkan mampu menjadi motor efektif untuk mendorong transformasi budaya politik; dari yang bersifat manipulatif dan koruptif ke pelaksanaan politik secara bersih dan demokratis. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran manipulasi demokrasi di era otonomi daerah bisa diminimalisasi. Dan tak usah cemas akan masa depan demokrasi, bila semua pihak bersungguh-sungguh mengarahkan pada kebaikan-kebaikan bersama.●

Regenerasi Tentara

KOMPAS, 28 NOVEMBER 2001

REGENERASI KEPEMIMPINAN di TNI disorot menyusul desakan penggantian Panglima TNI, yang justru bermula dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR Raja Kami Sembiring Meliala mempersoalkan usia pensiun panglima TNI yang diperpanjang. Tapi, menurut Ketua DPR Akbar Tandjung, Presiden Megawati telah memberi sinyal pergantian panglima TNI.

Namun, para petinggi TNI justru tampak kurang begitu berminat. Menurut Kapuspen TNI Marsekal Muda Graito Usodo, ketiga kepala staf angkatan (AD, AL, dan AU) berpendapat Panglima TNI Laksamana Widodo AS masih dibutuhkan. Dilihat dari kredibilitas, aksetabilitas, pengalaman, kapabilitas, *leadership*, dan kesehatan, Widodo AS masih memungkinkan. Kepemimpinannya mampu memelihara soliditas TNI (*Kompas*, 21/11/2001).

Sebagai organisasi solid dan canggih, proses regenerasi TNI selalu menarik perhatian publik. Ia bisa menjadi parameter "keberhasilan" regenerasi kepemimpinan nasional secara luas. Bila pemimpin sipil telah berulangkali mengalami pergantian, dan ini bisa dibaca sebagai dinamisnya proses regenerasi politik sipil, mengapa tidak demikian dengan tentara? Mutasi-mutasi TNI selama ini memang kerap terjadi, pergantian kepempimpinan telah beberapa kali

menyentuh level kepala staf angkatan, tapi tak sekerap ranah sipil. Sejak Orde Baru jatuh, pergantian panglima TNI baru dua kali: dari Jenderal Wiranto ke Laksamana Widodo AS.

Cepatnya pergantian kepemimpinan nasional, tidak selalu bermakna berhasilnya proses regenerasi, bahkan sebaliknya bisa dibaca sebagai musibah sejarah atau sekadar konsekuensi biasa saja demokratisasi. Sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998, telah muncul tiga presiden. Ini lebih merupakan konsekuensi logis desain politik baru. Setelah 30 tahun puncak kepemimpinan nasional berada di tangan Soeharto, pergantian presiden ("di tengah jalan" sekalipun) merupakan hal biasa. Namun, seolah-olah hal itu hanya terjadi di wilayah politik sipil.

Alasan baku yang terlontar dari para petinggi tentara mempertahankan komposisi kepemimpinannya, demi soliditas TNI. Alasan ini, di satu sisi bisa dipahami, namun di sisi lain, justru memunculkan pertanyaan. Bisa dipahami, justru karena sistem keorganisasian TNI, komando. TNI harus satu suara dan satu pandangan dalam menykapi pelbagai hal, termasuk sosial-politik. Soliditas penting menangkal munculnya faksionalisasi tajam di tubuh TNI. Apakah TNI memandang telah terjadi semacam "keadaan darurat" sehingga mereka bersikeras mempertahankan eksistensi panglimanya yang seharusnya telah memasuki masa pensiun? Kesannya demikian.

PERLAMBATAN?

PERLAMBATAN regenerasi kepemimpinan TNI terkesan mengemuka pasca-Orde Baru. Hal ini setidaknya ditandai tiga fenomena. *Pertama*, dengan alasan masih dibutuhkan organisasi, Panglima TNI diperpanjang masa dinasnya. Tapi, apapun alasannya, ia tetap menandakan adanya persoalan "kemacetan regenerasi". Kesannya seolah, tak ada "kader TNI" lain yang mampu menggantikan posisi panglima. Fenomena ini, ibarat karikatur simbolik atas sebuah "kemacetan regenerasi".

Kedua, belum banyak pemimpin TNI yang "menonjol", dalam arti membikin terobosan memecah kebekuan di tubuh TNI, mau-

pun demi memulihkan citranya. Pernah ada petinggi tentara cukup vokal, antara lain almarhum Mayjen Agus Wirahadikusumah. Konon, ia cukup kontroversial, pemikirannya tentang reformasi TNI kerap dinilai melampaui zamannya. Pemikirannya yang terkesan menyempal dari *pakem* TNI, justru membuatnya populer. Betapapun obsesinya kandas, setidaknya ia telah melakukan terobosan pemikiran yang bisa jadi masukan berharga generasi TNI mendatang.

Ketiga, kini ditemukan banyaknya "jenderal pengangguran", perwira tinggi militer yang tak memiliki jabatan. Ia memberi sinyal, percepatan regenerasi amat diperlukan. Fenomena "jenderal pengangguran" ialah konsekuensi logis diakhirinya peran sosial-politik TNI. Proses sipilisasi terjadi, tatkala para anggota TNI aktif yang menduduki jabatan pos-pos birokrasi-sipil, harus memilih kembali ke kesatuannya ataukah melepas karirnya di TNI. Banyak yang memilih berkiprah di wilayah sipil, pun kembali ke kesatuannya.

Soal pergantian Panglima TNI, terkait hak presiden. Ini amanat TAP MPR Nomor VII Tahun 2000: presiden harus berkonsultasi ke DPR sebelum mengangkat Panglima TNI dan Kapolri. Peran presiden amat penting, namun prakteknya kerap menemui kesulitan, apalagi bila ada resistensi dari tubuh TNI. Maka, menarik mencermati hubungan presiden dengan TNI.

Sejarah presiden-TNI tak selalu mulus. Pada zaman Bung Karno, beberapa perwira tentara melakukan protes mengarahkan moncong meriam ke istana. Pada masa Gus Dur, resistensi terjadi saat tak satu pun petinggi tentara mendukung maklumat politik. Konteksnya berbeda. Pada zaman Bung Karno, Jenderal AH Nasution termasuk pelopor inisiatif Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di era Gus Dur, TNI paling keras menolak.

Nah, sesungguhnya yang disampaikan Kapuspen terkait masih perlu panglimanya dipertahankan, bentuk resistensi formal-simbolik. Karena, persoalan itu lebih persoalan internal TNI, bukan respons dinamika sosial-politik – bandingkan dengan masa Gus Dur tatkala TNI menolak dekrit. Resistensi formal-simbolik ini, masih

membuat peluang lebar presiden untuk membuat kebijakan yang muaranya mengganti panglima. Namun, bagaimanapun, sinyal penolakan TNI bisa mempengaruhi pola hubungan TNI-presiden.

Apakah Presiden Megawati akan melakukan langkah "berani"? Bukankah posisi kekuasaan politiknya sekarang membutuhkan dukungan TNI yang solid? Presiden cukup tegas mewacanakan reformasi TNI pada HUT TNI 5 Oktober. Salah satu poin pidatonya mengharapkan agar doktrin-doktrin TNI ditinjau kembali, disesuaikan perubahan zaman. Kalau demi reformasi, pergantian Panglima TNI, hal yang tak bisa dihindari – dan wajar saja.

Tapi, kalau pertimbangannya politik-kekuasaan, agar hubungan presiden-TNI "tenang-tenang" dan dukungan TNI stabil, sinyal petinggi TNI harus diperhatikan. Bukankah pergantian kepemimpinan di TNI, segera menemukan soliditas baru di bawah pemimpin barunya? Percepatan regenerasi TNI diperlukan seiring tuntutan profesionalisme. Yang dibutuhkan kepemimpinan yang segar (*fresh*), tidak monoton, mampu menjawab krisis kepemimpinan.●

Otonomi, Resentralisasi, dan Hegemoni Pusat-Daerah

KOMPAS, 13 DESEMBER 2001

DALAM pidato Temu Dialog Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Program Pengembangan Kecamatan Fase II di Istana Negarau, Presiden Megawati mensinyalir perdebatan mengenai otonomi daerah yang dari hari ke hari makin tidak menentu, dan ekses yang ditimbulkan adalah tumbuhnya gambaran pertentangan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, presiden mengharap kepada para gubernur, bupati, dan walikota mengerem semua pihak di daerah masing-masing dari penggunaan isu yang tidak proporsional tersebut (*Kompas*, 17/11/2001).

Agaknya, presiden hendak menegaskan, pemerintah (pusat)

tak ingin melihat munculnya gejolak tidak produktif praktik otonomi daerah. Ini terkait banyaknya perda yang kontraproduktif, dan berbagai tuntutan daerah kurang proporsional termasuk, ancaman memerdekakan diri, bila tuntutannya ke pusat tak terpenuhi. Meski terkesan konservatif, ungkapan presiden itu agaknya masih dalam batas kewajaran. Hal ini bisa dibaca sebagai sinyal yang konstruktif pemerintah pusat dalam konteks pengembangan otonomi daerah.

RESENTRALISASI

PRESIDEN Megawati juga menjanjikan, tak ada pemikiran mengurangi apalagi menghapus otonomi dan kembali ke pola sentralistik (resentralisasi). Paradigma sentralistik telah usang dan tak bisa diterapkan lagi. Pengalaman yang lalu menunjukkannya. Maka wajar bila pemerintah tak bisa mengelak, kecuali melaksanakan paradigma desentralisasi, yang secara lebih luas diterjemahkan ke UU Otonomi Daerah yang kini sedang direvisi.

Di masa transisi saat ini, tarik-menarik kepentingan terjadi dengan intensitas tinggi. Tak saja kepentingan antarpartai, antarelite politik, tetapi juga antar-pusat-daerah. Masing-masing memperjuangkan ide-ide dan kepentingan praktis yang diyakini mampu membuat perubahan berarti. Tarik-menarik kepentingan ini, hal biasa dalam proses demokratisasi. Dari proses tarik-menarik kepentingan itu, diharapkan memunculkan kebijakan politik yang proporsional, sehingga membuat semua elemen bergerak konstruktif, tidak bertabrakan.

Dalam kondisi demikian, pantas dicermati apakah kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah, telah sejalan dengan paradigma desentralisasi. Potensi untuk kembali ke paradigma sentralisasi, sebenarnya tak saja bisa dilakukan pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Yang paling krusial dan menjadi perhatian publik, proses revisi paket UU Otonomi Daerah (UU No 22/1999 dan No 25/ 1999). Karena yang berperan penting pemerintah pusat dan DPR, bisa dipahami kecemasan daerah soal resentralisasi.

Pemerintah pusat dan DPR dituntut jeli memperhatikan pel-

bagai perkembangan daerah, termasuk yang belum terakomodasi secara proporsional. Diperlukan transparansi dan proses dialog yang seimbang antara pusat dan daerah dalam merumuskan aturan-aturan dasar yang hendak dijalankan, sehingga tak akan ada lagi kesan dan kesimpulan bahwa otonomi daerah memang merupakan proyek pusat sebagaimana masa lampau (sentralisasi).

Saat ini harus diakui beberapa kemajuan telah dicapai. Pemerintah pusat telah menampakkan niat baiknya untuk melaksanakan proses otonomi daerah sebaik-baiknya. Misalnya, telah ditetapkan (bersama kalangan DPR) penerapan otonomi daerah khusus, yakni di Aceh dan Papua. Penetapan otonomi secara khusus itu merupakan hal yang di masa lampau sulit dibayangkan bisa terjadi, tetapi hal itu kini dilakukan, bahkan dianggap sebagai solusi terbaik menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Tentu saja tidak semua daerah harus menuntut ke arah yang sama, sebab tantangan dan kondisi sosial-politik masing-masing berbeda.

HARMONISASI

OTONOMI daerah merupakan pilihan rasional dari sistem kenegaraan yang bukan federalisme, tetapi kesatuan. Otonomi mengatur kewenangan daerah secara lebih luas menuju kemandirian dan kemajuan daerah dengan kontrol pusat seminimal mungkin. Tetapi, bukan berarti peran pemerintah pusat diabaikan. Bila pun pemerintah pusat masih memiliki kewenangan strategis tertentu sesuai UU otonomi daerah, hal itu bukan dalam rangka resentralisasi.

Otonomi daerah diharapkan bisa meminimalisasi potensi konflik dan menciptakan iklim harmonis di daerah, juga hubungan pusat-daerah. Harmonisasi pusat-daerah, baik dalam konteks negara kesatuan atau federalisme, merupakan syarat mutlak berjalannya pembangunan menyeluruh. Harmonisasi, bukan berarti terpaku pada sentralisme kekuasaan pusat.

Harmonisasi pusat-daerah pun terkait fungsi saling kontrol (*checks and balances*), sebagai konsekuensi logis demokrasi. Yang dipentingkan proporsionalisasi dan konsistensi kewenangan ma-

sing-masing melalui UU. Pemerintah pusat tak bisa intervensi terlampau jauh, kecuali melaksanakan yang diatur dalam UU. Pusat merupakan mitra konsultatif pembangunan daerah.

Peringatan presiden untuk menghentikan debat tidak menentu, harus dibaca sebagai pesan positif pemerintah pusat dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Kesan selintas memanglah peringatan demikian menunjukkan sikap konservatif (hati-hati dan waspada) pemerintah pusat terkait dinamika yang berkembang di daerah, apalagi ancaman disintegrasi belum pupus. Meski demikian, apapun sikap pemerintah pusat hendaklah tetap diarahkan bagi proses pembangunan agar daerah bisa lepas dari ketertinggalannya.●

IV

KEBANGKITAN ISLAM MODERAT

[2002]

KEKUATAN-KEKUATAN *CIVIL SOCIETY* DI INDONESIA SAAT INI TENGAH MENDAPAT TANTANGAN YANG JAUH LEBIH KOMPLEKS. PADA MASA MENJELANG ORDE BARU JATUH, TEMA-TEMA PERLAWANANNYA LEBIH KONKRET (TIDAK MENGABSTRAK), YAKNI BAGAIMANA REZIM YANG SUDAH KEROPOS ITU DITUMBANGKAN; WALAUPUN SETELAH TUMBANG, PROBLEMATIKANYA TAMBAH KOMPLEKS. KEKUATAN *CIVIL SOCIETY* DISATUKAN OLEH "MUSUH BERSAMA" (COMMON ENEMY) DAN *COMMON DENOMINATOR*, YAKNI AGAR REZIM SOEHARTO TUMBANG. SETELAH TERKABUL, DAN "PUSAT-PUSAT KEKUASAAN" BARU MENYEBAR, SEIRING DENGAN ITU PERTUMBUHAN *CIVIL SOCIETY* TAMPAK KALAH DENGAN PERTUMBUHAN PARTAI-PARTAI POLITIK.

- TERORISME, TANTANGAN *CIVIL SOCIETY*

Jenderisasi Demokrasi

KOMPAS, 14 JANUARI 2002

ISTILAH *Jenderisasi Demokrasi* diilhami Anne Phillips, *Engendering Democracy* (1991). Tema jender dan demokrasi hal yang menarik, apabila dikaitkan dengan praktiknya. Demokrasi menurut Anne Phillips merupakan buah pemikiran politik yang panjang. Sementara, isu feminisme muncul belakangan, tatkala banyak komentator feminis muncul pada abad ke-17 di Eropa. Saat itu demokrasi masih dipraktikkan diskriminatif, imbas diskriminasi demokrasi zaman Yunani kuno yang tak menghendaki perempuan dan budak ikut dalam proses pengambilan keputusan politik dalam bentuk apapun.

Perjumpaan demokrasi dengan prinsip kesetaraan (*equality*) tiba belakangan. Ia merupakan pintu masuk pembicaraan hubungan feminisme dan demokrasi. Pada abad ke-19 tatkala sejarah telah berjalan panjang dan peran gerakan aktif mulai memun-culkan hasil, para perempuan turut memperjuangkan hak berdemokrasi bagi mereka. Saat ini, feminisme merupakan wacana yang terus diupayakan mengedepan, dalam konteks berdemokrasi.

Inti feminisme adalah kesetaraan jender yang bermakna penegakan keadilan dalam memutuskan segala sesuatu dan tidak mengabaikan persoalan perbedaan jenis kelamin. Kesadaran jender terus diupayakan. Jargon yang terkenal "*democracy without women is not democracy*".

DI INDONESIA gerakan perempuan tidak bisa diabaikan perannya dalam mendukung reformasi. Pada saat krisis moneter

(akhirnya krisis ekonomi) akut dimulai 1997, tak sedikit gerakan perempuan melakukan aksi-aksi keprihatinan, misalnya dengan menurunkan isu keprihatinan kenaikan harga susu sebagaimana dilakukan *Suara Ibu Peduli*. Aksi-aksi lain bertema variatif, biasanya himbauan perbaikan keadaan. Aksi-aksi tersebut secara isu, mungkin tak terlampau dinilai politis, tetapi memiliki efek politik penting bagi percepatan tumbangnya rezim otoriter.

Meskipun begitu, sebagaimana dialami negara lain yang baru lepas dari cengkeraman rezim otoriter, tumbangnya rezim otoriter bukan berarti eksistensi gerakan perempuan makin menemukan posisi strategisnya di dunia sosial-politik formal, semisal di parlemen dan pemerintahan. Mereka masih perlu berjuang keras untuk menggapai representasi yang adil, terutama dalam komposisi politik di parlemen. Mereka juga masih berjuang dan terus-menerus bekerja keras menyosialisasikan kampanye kesadaran jender. Perjuangan gerakan perempuan tak kunjung usai, dan kiranya di waktu ini telah lebih maju ketimbang di masa lalu (Barbara J Nelson and Najma Chowdury, *Women and Politics Wolrdwide*, 1994).

Kita juga masih menyaksikan bagaimana para perempuan di bekas negara-negara Uni Soviet posisi politiknya belum begitu menggembirakan, demikian pula di negara-negara Amerika Latin, juga di Indonesia. Dari segi kuantitas, politisi perempuan lebih sedikit dibanding politisi pria. Tapi, secara kualitatif, gerakan perempuan, di mana saja mampu menyajikan wacana keadilan. Berbagai gerakan perempuan, termasuk di Indonesia, tak terlampau terjebak pada aksi-aksi reaktif-radikal, melainkan berupaya selalu menampilkan isu-isu yang berorientasi membuka hati dan kesadaran diri tentang berbagai hal mendasar yang diabaikan dalam proses sosial-politik. Isu-isunya manusiawi dan mencerahkan.

Ada wacana menarik disampaikan Anne Phillips tentang tiga macam demokrasi: demokrasi liberal, demokrasi partisipatoris, dan republikanisme sipil. Demokrasi liberal mengedepankan kebebasan berdemokrasi. Demokrasi partisipatoris menekankan persoalan partisipasi. Republikanisme sipil menekankan bagaimana hak-hak

sipil diperhatikan. Dalam ketiga jenis demokrasi versi Anne Phillips itu, gerakan perempuan (feminisme) mengalami persoalannya masing-masing.

Dalam demokrasi liberal, dimana kompetisi politik dilakukan secara bebas, gerakan perempuan belum tentu memperoleh jaminan memadai. Kalau budaya patriarki masih kental, gerakan perempuan tak bisa terlampau berharap bisa sukses optimal. Demikian pula dalam demokrasi partisipatoris dan republikanisme sipil, posisi gerakan perempuan memiliki persoalannya sendiri. Setidaknya hal ini menggambarkan, dalam model demokrasi apapun gerakan perempuan selalu dihadapkan peluang dan tantangannya.

Dalam konteks ini jenderisasi demokrasi memperoleh dalihnya untuk terus diperjuangkan. Demokrasi memang tidak menjamin isu-isu jender tertampung secara memadai. Kondisinya akan bertambah parah bila kesadaran jender lemah, ditambah lagi tak adanya isu-isu yang signifikan menyangkut tema jender. Untuk menjamin terwujudnya paradigma jender dalam politik dan demokrasi, diperlukan upaya konkret dalam konteks jenderisasi demokrasi.

GERAKAN perempuan memiliki peran penting bagi pertumbuhan demokrasi. Kasus Indonesia cukup jelas menggambarkannya. Hanya saja, dalam kepolitikan formal, kehadiran mereka di parlemen dan pemerintahan belum memadai. Upaya menanamkan kesadaran jender dalam setiap bidang kehidupan membutuhkan proses panjang, telaten, dan berlanjut.

Perlu direnungi ungkapan Bella Azbug (1920-1998), "Perbedaan yang akan terjadi apabila perempuan mempunyai ruang politik yang sama luasnya dengan laki-laki adalah mereka akan mengubah hakikat kekuasaan, bukan kekuasaan yang akan mengubah hakikat perempuan". Pesannya, rezim otoriter bisa tumbang sejak dulu, karena kesadaran jender telah begitu kuat tertanam, artinya tak ada toleransi sama sekali bagi mereka.●

Momentum Kebangkitan Islam Moderat

KOMPAS, 1 FEBRUARI 2002

ISLAM MENOLAK segala bentuk kekerasan, mencintai perdamaian dan keadilan, dan mengajarkan nilai-nilai keutamaan, yakni menghormati kehidupan dan martabat manusia. Pernyataan itu merupakan salah satu poin *Deklarasi Jakarta 2001* hasil *Summit of World Muslim Leaders*, yang dibacakan Mucha-Shim Q Arquisa dari *Asian Muslim Action Network*, Manila, Filipina. Konferensi berlangsung di Jakarta 21-22 Desember 2001, dengan 180 peserta dari 50 negara. Deklarasi terdiri dari tiga butir. *Religion and spirituality*; *civic responsibility in political society*; dan, *interfaith, intercultural, and international relations*. Deklarasi tersebut hendak menunjukkan Islam agama moderat yang cinta damai, anti-kekerasan, dan tidak antikemajuan.

Pernyataan Islam adalah agama moderat, perlu ditegaskan dalam konferensi itu. Agaknya ini tak lepas dari konteks psikologis yang menyertainya, yakni, pascaperistiwa WTC 11 September 2001 yang mempengaruhi citra Islam secara negatif. Jaringan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden dituduh ada di balik teror mengerikan itu. Inilah yang menyebabkan Amerika Serikat memiliki alasan untuk menyerbu Afganistan, mendesak Kubu Taliban yang melindungi Osama. Kubu Taliban yang diklaim sebagai kelompok fundamentalisme-radikal, akhirnya memang terdesak oleh Kubu Aliansi Utara yang moderat.

Pasca-peristiwa WTC (9/11), dunia seolah diingatkan bahaya kelompok Islam fundamentalis-radikal, yang mengedepankan pendekatan kekerasan (*violence*) dalam bentuk terorisme. Pihak Barat

(AS dan negara-negara Eropa) pun lantas rajin kampanye, dunia sedang menghadapi ancaman terorisme, karena itu segala bentuk terorisme harus dilawan. Tetapi, mereka juga cepat-cepat mengklarifikasi, Islam bukan agama teroris, tetapi agama perdamaian, demikian ungkapan Presiden George W Bush. Memang, dalam berbagai kesempatan ditegaskan, yang harus dilawan bukan Islam, namun kelompok-kelompok Islam fundamentalis-radikal yang mengedepankan kekerasan dan teror. Dalam hal ini, Osama Bin Laden dan jaringan Al Qaeda merupakan simbol yang pas.

PASCA-PERISTIWA WTC, Islam sebagai agama maupun kecenderungan pengelompokan mulai diperhatikan banyak pihak, khususnya Barat. Pelbagai wacana dikembangkan, terutama yang berhubungan Islam-Barat pasca-Perang Dingin. Konon, sempat berkembang wacana, Islam musuh baru bagi Barat pasca-runtuhnya komunisme. Peristiwa WTC lantas memperkukuh, yang mereka lawan kelompok Islam fundamentalis-radikal. Dari sinilah Islam moderat memperoleh momentum bangkit, mempelopori dialog antarperadaban, sebagai juru bicara yang menampilkan citra positif Islam. Islam moderat diharapkan memiliki daya tawar peradaban (*civility bargaining*) yang tinggi.

Sebagaimana dicatat Karen Armstrong, penulis *The Battle for God*, fundamentalisme merupakan gejala tiap agama dan kepercayaan, yang merepresentasikan pemberontakan terhadap modernitas. Menurut dia, sebenarnya sekelompok kecil saja kalangan fundamentalis yang melakukan tindakan terorisme (*Tempo*, 30/12/2001).

Bassam Tibi dalam *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (1998), memandang, fundamentalisme Islam hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik dunia, di mana isunya pada masing-masing kasus lebih pada ideologi politik. Kelompok ini berpendapat, Barat telah gagal dalam menata dunia. Karena itu, perlu diganti dengan tatanan baru berdasar interpretasi politik Islam versi mereka. Na-

mun, selama ini, hal itu baru sebatas retorika. Mereka bisa saja merancang terorisme dan kekacauan. Tetapi, Tibi mengingatkan, sebenarnya fundamentalisme Islam beragam dan saling bersaing. Maka sulit membayangkan mereka bisa menciptakan tatanan baru yang komprehensif secara ekonomi, politik, dan militer.

Ahmad S Moussali dalam *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy, and the Islamic State* (1999) menyebut, Islam fundamentalis merupakan manifestasi awal atas gerakan sosial massif yang mengartikulasikan agama dan aspirasi peradaban dan mempertanyakan isu-isu di seputar moralitas teknologi, distribusi ala kapitalis, legitimasi nonnegara, dan paradigma nonnegara bangsa. Islam fundamentalisme, lebih dari sekadar gerakan lokal. Ia beraksi dan bereaksi melingkupi negara bangsa dan tatanan dunia. Ia mempersoalkan tak hanya isu dan aspirasi yang berdimensi lokal, tetapi juga regional dan universal. Fundamentalisme itu sendiri bisa bersifat moderat dan radikal. Bagi Moussalli, "*to radical fundamentalism, tawhid becomes a justification for the domination of others; to moderate fundamentalism, it becomes a justification for not being dominated by others*".

Pendapat-pendapat itu, setidaknya merupakan peringatan, harus dilakukan secara hati-hati dan tepat dalam melihat gejala fundamentalisme agama. Sebab, ia sebenarnya bukan merupakan gejala negatif an sich, tetapi cenderung alamiah. Hanya saja perlu diantisipasi munculnya fatalisme gerakan, di mana tidak saja mencederai citra agama, tetapi juga universalitas kemanusiaan.

MODERATISME dalam menampilkan Islam tak berarti mengorbankan makna Islam itu sendiri. Justru Islam ditampilkan progresif, penuh toleransi. Barangkali tema-tema yang diajukan Charles Kurzman (lihat, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*; Paramadina, 2001), seperti menentang teokrasi, mendukung demokrasi, menghormati hak-hak perempuan, menghormati hak-hak non-muslim, kebebasan berpikir, dan gagasan tentang kemajuan, perlu dikedepankan.

Belakangan di Indonesia muncul perspektif moderat-objektif dalam merespons isu-isu keagamaan global yang dikembangkan berbagai pihak, termasuk antara lain mengemuka pada wacana *post*-tradisionalisme Islam oleh kalangan muda *Nahdlatul Ulama*. Kehadiran mereka, hendak meneguhkan moderatisme Islam Indonesia, yang sebenarnya secara organisatoris telah lama dikembangkan secara dominan oleh dua varian pergerakan Islam terbesar di Indonesia: NU dan Muhammadiyah.

Kehadiran arus utama moderatisme Islam Indonesia itu tampaknya, tak lepas dari kemunculan fenomena fundamentalisme-radikal yang kian ekspresif. Kehadiran kelompok-kelompok yang kerap melakukan aksi-aksi, yang dalam konteks tertentu, mengedepankan kekerasan, dengan dalih memberantas kemaksiatan dan melindungi kaum Muslim dari keteraniayaan (semisal kasus Maluku dan Poso), bagaimanapun menunjukkan sisi lain citra Islam Indonesia. Sayang citra yang terbentuk, kurang menguntungkan bila dilihat dari sisi moderatisme Islam. Dalam konteks ini, Islam moderat, bertugas mencairkan kebekuan dengan menampilkan Islam dalam tema perdamaian, dialogis, dan toleransi.

Tampaknya, Islam moderat, bila ditinjau dari pilihan atas doktrin *amar ma'ruf nahy munkar*, pilihannya lebih terletak pada *amar ma'ruf* (menyeru kepada kebaikan). Karenanya pendekatannya lebih dialogis dan persuasif, ketimbang kekerasan. Sementara pihak fundamentalisme-radikal, memilih *nahy munkar* (mencegah kejahatan) dilakukan massif dan cenderung memakai kekerasan, dengan dalih terpaksa dilakukan demi memberantas kejahatan dan kemaksiatan. Persoalannya, bagaimana penegakan hukum dilakukan, sehingga kelompok-kelompok fundamentalis-radikal tak mudah main hukum sendiri, meski dengan dalih niat baik. Dalam konteks ini, sebenarnya tak bisa dipertentangkan atas kedua doktrin itu. Maka, sebenarnya kelompok Islam moderat juga bertugas mengerem tindakan fatal kelompok lainnya.

Meski sesungguhnya dominan, kelompok Islam moderat di Indonesia, kurang memiliki daya greget, dan seolah kurang mampu

menjawab banyak pertanyaan seputar realitas dinamika keislaman dan keindonesiaan belakangan, kecuali lewat wacana-wacana semata. Inilah yang membuat kelompok fundamentalis-radikal mengerucut, seolah mengambil-alih hal-hal yang di lapangan tidak dilakukan kalangan moderat. Maka, dalam konteks ini perlu ada agenda nyata dari kalangan moderat, tak sekadar bergelut di dataran wacana, tetapi juga aksi nyata. Meraka lebih dulu harus merapatkan barisan, antar-elemen Islam moderat, mengingat tugas berat, meneguhkan peran positif Islam dalam merajut keharmonisan dalam konteks multikulturalisme Indonesia.●

Presiden dan Pengamat

KOMPAS, 18 FEBRUARI 2002

DALAM PIDATO pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Bali Presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan, kondisi negara Indonesia sedang berada pada pilihan pahit di antara sekian banyak kemungkinan yang sama jeleknya. Hampir tidak ada pilihan mudah, apalagi enak, untuk mengatasi masalah. Kalau boleh memilih, lebih mudah menempatkan diri sekadar menjadi pengamat. Pengamat seakan datang dari antah-berantah, steril dari perspektif sejarah dan menempatkan diri seakan ada di atas kurun waktu mana pun. Pengamat lebih mudah memberikan penilaian, tuntutan, kritik, bahkan celaan. Sebab hal itu dapat dilakukan hampir tanpa memerlukan tanggung jawab melaksanakannya (*Kompas*, 25/1/02)

Megawati tampak mengeluh dan membangunnya dengan argumen rasional dimaksudkan agar semua pihak memahami kesulitannya. Menurutnya, rasanya tak seorang pun kini dapat dengan yakin kapan dan bagaimana cara paling tepat dan cepat menyelesaikan persoalan bangsa. Dunia, katanya, berubah cepat dan kadang bagaikan tanpa *pakem*, kesulitan kian beragam, kian luas, membesar, dan makin bertumpuk. Apa pun sebabnya, segala sesuatu seakan telah menjadi saling berkaitan.

Namun, khalayak juga *mafhum* segalanya tak akan menjadi beres, hanya dengan mengeluh dan berupaya membuat publik maklum terus-menerus. Presiden memang bukan pengamat yang lepas dari tanggung jawab sebagai penentu kebijakan strategis bangsa. Yang ditunggu masyarakat, kebijakan strategis pemerintah yang konkret, serta yang penting lagi tidak justru makin mengorbankan kepen-tingan masyarakat atas nama pembangunan. Rakyat sudah cukup berat menanggung beban, akibat mismanajemen pemerintah masa lampau, akibat dari orientasi dan strategi kebijakan pembangunan yang salah (terbukti gagal).

Siapa pun agaknya harus memahami keluhan presiden. Asumsinya, siapa saja yang menjadi presiden di masa sulit ini, tentu akan merasakan seperti apa yang dirasakan Megawati. Apalagi ditambah fakta, sejak Orde Baru tumbang tahun 1998 hingga perubahan kepemimpinan nasional tahun 2001, telah hadir tiga presiden (B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati). Itu semua menandakan, memang sulit menjadi presiden di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dan tengah terjebak lingkaran multikrisis dengan segala tetek-bengeknya, yang bernama Indonesia ini.

TIDAK KOMUNIKATIF

PRESIDEN memang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan nasional. Maka, seharusnya ia dituntut mampu memandu bangsa ini keluar dari jebakan krisis multidimensi. Bolehlah sesekali presiden berwacana, namun diharapkan apa yang dilontarkan, bisa ditangkap publik secara positif dan produktif, bukan kontraproduktif. Kita memiliki pengalaman berharga atas penampilan Abdurrahman Wahid saat menjadi presiden. Ia terlalu banyak berwacana. Sayang, wacana yang dihadirkan tidak selalu produktif, bahkan banyak terkesan kontraproduktif. Abdurrahman Wahid kerap mewacanakan sesuatu yang kontroversial sifatnya. Sementara di jajaran pelaksanaan kebijakan pemerintah, mungkin akibat kontroversi atas wacana yang digulirkan, kerap berbenturan satu sama lain. Jadinya, aparat pemerintahan sendiri banyak menemui

problem dalam bekerja.

Kebalikannya, Megawati tampak kurang suka berwacana. Dalam konteks tertentu ia miskin wacana (meski tugas pemerintah tidak berwacana). Faktor penting yang berperan, menurut cendekiawan Nurcholish Madjid yang berbicara pada Tanwir Muhammadiyah, adalah gaya kepemimpinan Megawati yang tidak komunikatif (*Kompas*, 27/1). Nurcholish mengungkapkan, dengan gaya kepemimpinan sekarang, tidak heran bila presiden mulai menjadi sasaran keluhan masyarakat. Salah satu keterbatasan Megawati, dia tidak komunikatif menyampaikan kebijakan pemerintahannya. Nurcholish menyarankan agar Megawati segera keluar dari kebiasaan lamanya. Persoalan besarnya, ketika ia berhadapan dengan harapan rakyat yang melambung tinggi. Lebih-lebih oleh pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dijanjikanya.

Dengan minimnya komunikasi, kata Nurcholish, Megawati seakan tidak memiliki terobosan. Pada saat kondisi bangsa tak kunjung berubah, semuanya menjadi tampak macet. Bila ia ingin menjadi variabel perubahan, menurut urcholish, itu hanya dapat dilakukan bila Megawati memiliki beberapa persyaratan sebagai very strong committed president. Artinya, dia memiliki visi, aktif, dan agresif, cukup pragmatis, memelihara kepercayaan umum, dan menjadi pelopor pembangunan bangsa.

POSISI PENGAMAT

BETUL, menjadi pengamat lebih mudah ketimbang presiden. Namun, pengamat yang suka berkomentar dan mengkritik kebijakan pemerintah, bukan nihil sama sekali sumbangannya bagi proses pengambilan keputusan strategis pemerintah. Pasti ada satu dua saran pengamat yang dipakai. Maka, tidaklah bijaksana bila mengabaikan sama sekali peran mereka bagi kepentingan bangsa. Ibarat komentator, para pengamat tak sekadar penonton sepak bola, yang kerap hanya sekadar berceloteh mengekspresikan kelebihan dan kekecewaannya pada tim kesayangan. Para pengamat memiliki basis pengetahuan yang memadai, setidaknya mereka telah menekuni

bidangnya relatif tekun.

Seharusnya, pemerintah, anggota legislatif, aparat kejaksaan, Mahkamah Agung, dan seluruh jajaran birokrasi di negara ini, serta para politisi tidak menutup diri oleh kehadiran para pengamat, yang biasanya kritis dalam menganalisis fenomena yang berkembang. Memang tak semua pengamat memiliki kualifikasi yang sama. Dibutuhkan integritas dan konsistensi intelektual (kecendekiawanan) atas diri para pengamat sehingga bisa independen dan seobjektif mungkin dalam mencermati masalah.

Ibarat peracik jamu (obat), para pengamat pakarnya. Mereka memberi resep terbaik jalan keluar kondisi bangsa yang tengah tak menguntungkan. Mereka penulis-penulis resep yang diharapkan jamu terbaik. Tetapi, mungkin terlalu banyak jamu yang harus ditelan, otoritas penentu kebijakan menjadi enggan bahkan bosan. Mungkin jamunya terlampau pahit, lantas dimuntahkan kembali.

Pengamat memang bebas bicara, mengeluarkan komentar dan solusi, tentu seiring etika kebebasan informasi. Sama dengan pelawak yang meraih sukses luar biasa dalam industri humor tanah air, mereka juga bebas bicara, asal tidak keterlaluan, dan hanya sekadar bertujuan mengocok perut pemirsa. Bedanya, para pengamat, bicara tak asal bicara. Bagaimanapun ia harus memasukkan dimensi kebijaksanaan (*wisdom*), pendidikan (*education*), serta pencerahan (*enlightenment*). Para pengamat itu motivator kreatif pembentukan visi, orientasi, dan pilihan kebijakan. Mereka inisiator dan pembuka wawasan yang diharapkan memecah kebekuan atas rumitnya problem yang dihadapi.

Tentu saja, karena saking banyaknya pengamat, pemerintah, politisi, dan publik luas, harus bisa memilah mana uraiannya yang perlu dan tidak. Pengamat juga bukan malaikat. Mereka memiliki kecenderungan politis tertentu. Pengamat juga harus dikritisi oleh publiknya. Dan, bagi presiden, para politisi, birokrat negara, publik luas, serta para pengamat, hendaknya bisa saling mengambil hikmah satu sama lain. Sebagaimana sebuah hadits Nabi mengatakan, katakan yang benar walaupun pahit (*qulil haqa walau kana*

muran). Nasihat bijak, janganlah melihat siapa yang mengatakan, tetapi lihatlah apa substansi yang dikatakannya.●

Arus Balik Neo-Konservatif dalam Perubahan UUD 1945

KOMPAS, 24 APRIL 2002

PERBEDAAN pendapat sementara kalangan atas perubahan UUD 1945 belakangan ini, merupakan dinamika, justru saat semua pihak menghendaki terwujudnya landasan kokoh bagi masa depan bangsa dan negara. Di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, perbedaan pendapat atas proses perubahan, adalah wajar. Yang tidak wajar adalah saat semua elemen sosial-politik yang ada tak mampu berekspresi, dan ini hanya terjadi bila rezim yang berkuasa otoriter. Hanya saja kini, perbedaan pendapat itu menjadi amat menarik, manakala kalangan neo-konservatif berpendapat, proses amandemen UUD 1945 sudah *kebablasan*.

Kalangan neo-konservatif berdalih hendak "menyelamatkan" pasal-pasal "sakral" dari perubahan yang mereka nilai mendasar. Kalangan neo-konservatif, yang menghendaki proses perubahan dihentikan, khawatir perubahan pasal-pasal krusial, yang menurut mereka tidak seharusnya diubah ("disakralkan"). Misalnya Pasal 29 menyangkut agama dan kepercayaan dan Pasal 33 mengenai perekonomian. Dan, yang terkesan tampil keras adalah kalangan neo-konservatif, yang mempersoalkan eksistensi Pasal 1 Ayat 2.

Bunyi Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 hasil perubahan terakhir, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD", padahal sebelumnya berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR". Bunyi pasal baru itu berkonsekuensi politik signifikan atas deeksistensi MPR dan gagasan pemilihan presiden langsung. Kalangan neo-konservatif menghendaki eksisnya MPR. Ini tampaknya selaras dengan ide pemilihan presi-

den langsung yang masih melibatkan peran MPR secara signifikan (sebagai penentu).

EKSPERIMEN

SEJAK UUD 1945 disahkan pada 1945 hingga Orde Baru tumbang, nyaris tidak ada ide untuk mengamandemennya. Nyaris pula tidak ditemukan inovasi kreatif dalam proses ketatanegaraan dan dimensi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Semasa itu boleh dibilang tidak ada eksperimentasi berupa "terobosan konstitusi", kendati zaman yang kian berubah. Dalam praktiknya, UUD 1945 malah kerap dipakai penguasa untuk mengesahkan segala kebijakan yang diputuskan, termasuk hal-hal yang sesungguhnya tidak realistik dan *contradictio interminis*. Pancasila dan UUD 1945, kerap dimanipulasi untuk kepentingan penguasa, dengan mengorbankan potensi-potensi kritis dalam masyarakat.

Kalangan eksperimentalis menghendaki perubahan UUD 1945 melalui proses perubahan yang transparan, akomodatif, dan tidak elitis (karenanya diusulkan adanya Komisi Konstitusi). Mereka berpendapat, kesalahan-kesalahan yang dilakukan penguasa selama ini adalah mereka diberi peluang konstitusi justru untuk mempermaklumkan kebijakan semi-otoriternya. Maka, UUD 1945 harus dibenahi. Reformasi konstitusi, dengan demikian mutlak dilakukan segera, setidaknya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Disebut kalangan eksperimentatif, karena dengan mendesakkan proses perubahan bagi UUD 1945 dan ternyata disepakati, maka sesungguhnya yang terjadi adalah proses pencarian bentuk dan eksperimentasi baru dalam berkonstitusi. Tanpa keberanian melakukan eksperimentasi, sementara pengalaman buruk telah terjadi setidaknya 32 tahun Orde Baru, yang terjadi tentu stagnasi.

Konsekuensinya, fluktuasi pendapat kian mudah ditemui. Contoh nyata, soal penilaian atas hasil amandemen yang hingga kini sudah mencapai tahap ketiga. Satu pihak, ia dianggap kebablasan. Sebaliknya pihak lain, tidak. Bila digambar, ibaratnya ada dua ekstrim pendapat yang berseberangan. Sementara pendapat-pendapat lain,

ada di dalam rentangan antara dua ekstrem pendapat tadi.

NEO-KONSERVATIF

DALAM konteks ini, posisi pendapat kalangan "reformis" berseberangan secara ekstrem dengan kalangan konservatif. Semuanya, baik kalangan "reformis" maupun konservatif, sebenarnya adalah kalangan eksperimentalis. Sebab, semuanya konon telah sepakat perubahan UUD 1945 dilakukan. MPR telah melakukan tiga tahap perubahan, dengan adanya bunyi pasal-pasal baru yang telah disepakati. Pasal-pasal krusial, semisal Pasal 29 serta pasal yang menyangkut pilpres langsung, memang belum tersepakati. Tetapi, ternyata, yang dikehendaki kalangan neo-konservatif bukan bagaimana menunda pembahasan perubahan yang belum tersepakati, namun, yang terjadi "arus balik" kalangan neo-konservatif, dengan menolak hasil-hasil rumusan sebelumnya.

Sikap dan gerakan arus balik inilah yang menjadi persoalan. Diperkirakan proses perubahan UUD 1945 bakal memperoleh gangguan serius, justru dari dalam MPR sendiri. Friksi antara kalangan eksperimentalis "reformis" dan eksperimentalis konservatif, bisa kian menajam. Pada saat situasi konflik menajam, dan justru di saat titik temu antarmereka sulit dicapai – sebab di antara mereka sendiri mendesak untuk menghentikan proses perubahan – pada saat itulah letupan konflik politik terbuka meluas. Bila itu terjadi, hanya akan mengundang pihak otoriter ke panggung politik.

KEPENTINGAN POLITIK

TAMPAKNYA, penolakan atas hasil perubahan UUD 1945 terkait kepentingan politik jangka pendek. Mereka tampak tidak siap dengan perubahan cukup mendasar dalam sistem politik nasional, terutama dikaitkan dengan pemilihan presiden langsung dan deeksistensi MPR. Maka dicari alasan seolah demi kepentingan nasional jangka panjang. Seharusnya, apa pun hasil perubahan kali ini disepakati dulu, dan tetap dievaluasi, sehingga kelemahan-kelemahannya bisa diketahui untuk disempurnakan kelak, dengan meli-

batkan komisi konstitusi.

Idealnya, perubahan konstitusi melibatkan komisi konstitusi yang representatif dan bisa kerja maksimal. Namun, tetap perlu memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang. Misalnya, apakah dengan memindahkan konflik di MPR dalam konteks perubahan UUD 1945 keluar (masyarakat), bisa akan lebih efektif dan optimal hasilnya? Apakah seandainya komisi konstitusi diberi kesempatan melakukan tugas mulia itu, mampu menjamin potensi konflik terkendali? Itu perlu dipikirkan. Mungkin, sementara ini harus direlakan MPR menjalankan tugasnya secara optimal, tanpa melibatkan komisi konstitusi, kecuali bila MPR bersepakat menyerahkan proses perubahan pada komisi konstitusi.

Politisasi atas makin meruncingnya perbedaan pendapat, yang disertai gagasan radikal, yakni menghentikan proses perubahan, mudah terjadi. Dan, tampaknya masing-masing fraksi di MPR siap memuntahkan peluru masing-masing untuk saling melemahkan lawan mereka, dengan memanfaatkan perbedaan pandangan itu. Tidak tertutup kemungkinan kalangan neo-konservatif memiliki skenario klasik, meski berbeda modus operandinya, yakni mengembalikan semuanya pada konstitusi lama (mirip dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959).

Bagaimanapun deadlock atas proses perubahan UUD 1945, langsung atau tak langsung, akan berakibat fatal. Sebab, ia terkait segala aturan hukum yang ada. Diperkirakan akan muncul klaim-klaim politik beraneka, akibat beragamnya penafsiran (multitafsir) terkait dengan landasan konstitusi yang tidak jelas posisinya: ada yang mengakui UUD 1945, ada yang tidak karena penghentian perubahan yang diklaim tidak adil secara politik. Dampaknya akan makin luas berimbas ke segala bidang secara destruktif.

Siapa saja, dari hati nurani kalangan neo-konservatif dan lainnya mengatakan, bagaimanapun masa depan bangsa harus lebih baik. Arus balik yang dilakukan kalangan neo-konservatif, barangkali juga dimaksudkan demikian. Namun, implikasi politiknya

harus dipikirkan lebih seksama, apakah arus balik neo-konservatif itu, bakal membawa ke situasi fatal atau sebaliknya. Bila mereka memaksakan menghentikan proses perubahan UUD 1945, ujung-ujungnya adalah kondisi yang fatal. Sebab, bagaimanapun proses itu harus terus berjalan, mengingat perubahan UUD 1945 adalah amanat reformasi.●

TNI dan Amandemen UUD 1945

KOMPAS, 16 MEI 2002

SIKAP Fraksi TNI/Polri MPR atas proses amandemen UUD 1945 yang belakangan diperdebatkan, sungguh menarik perhatian. Fraksi TNI/Polri mendukung penuh proses amandemen UUD 1945 dengan tidak meng-ubah *Pembukaan* dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Fraksi TNI/Polri mengaku memiliki langkah guna mengantisipasi kemungkinan *deadlock* dalam proses pengesahan amandemen UUD 1945 yang akan diputuskan dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 2002. Fraksi ini berpendapat, perubahan UUD 1945 harus terus dilakukan MPR sebagai amanat dari Ketetapan (Tap) MPR Nomor XI/MPR 2001 dan tuntutan reformasi. Sikap itu di sampaikan anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR dari Fraksi TNI/Polri I Ketut Astawa (*Kompas*, 18/4/2002).

Sikap Fraksi TNI/Polri tentu sudah dikonsultasikan dengan Markas Besar TNI. Sikap sedemikian bisa dibaca dari dua sudut pandang. *Pertama*, kalangan neokonservatif yang menghendaki dihentikannya proses amandemen UUD 1945, membacanya sebagai kemunduran. Sebagaimana diketahui, kalangan neokonservatif, yakni mereka yang menghendaki UUD 1945 tidak banyak berubah, belakangan gencar melakukan manuver opini dan aktivitas politik yang menghendaki dihentikannya proses amandemen konstitusi

yang selama ini telah berjalan. Alasannya, sudah *kebablasan*. Mereka menyayangkan sikap Fraksi TNI/Polri yang terlampau lemah dalam menyikapi persoalan amandemen konstitusi yang sudah "kebablasan" itu.

Kedua, kalangan eksperimentalis-reformis membacanya sebagai kemajuan, meski masih menyisakan "kesangsian kritis" pada TNI/Polri. Disebut sebagai kemajuan karena, selama ini pihak TNI/Polri banyak menunjukkan sikapnya yang menonjolkan ciri konservatif – yang terkesan antiperubahan. Dalam konteks amandemen UUD 1945, ternyata pihak TNI/Polri tegas mendukung proses amandemen konstitusi dan tak menghendaki *deadlock*. Meski demikian, masih ada "kesangsian kritis", apakah statemen TNI/Polri itu dilakukan sungguh-sungguh, atau sekadar basa-basi politik, demi menumbuhkan citra dukungan terhadap reformasi.

Namun, sengaja atau tidak, sikap TNI/Polri itu berimplikasi menepis kesan kuat, pihaknya selalu konservatif secara amat kaku dalam memandang banyak persoalan. Dalam konteks perkembangan sosial-politik di Indonesia, tidak tampak dengan signifikan "kengototan" TNI/Polri untuk menjauh dari proses demokratisasi. Sebaliknya, suka atau tidak, peran kalangan TNI/Polri dikehendaki justru dalam rangka mendorong proses demokrasi dan reformasi. Ini merupakan keinginan kolektif yang membuat TNI/Polri, saat ini, dalam banyak hal terkesan lebih bersikap hati-hati, justru untuk menjaga wibawa konservatismenya, yakni netral dalam berpolitik-karena mereka menyadari bahwa sesungguhnya politik kini bukan wilayahnya.

CIRI konservatisme TNI/Polri tidak hilang betul, misalnya dengan mengemukanya pendapat, Pembukaan UUD 1945 tidak usah diubah, karena ia adalah dasar normatif dan filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konservatisme terkait keinginan untuk menjaga "nilai-nilai tertentu" yang sulit ditawar. Ia kerap dimaknai semacam "kekolotan". Konservatisme tentara di Indonesia kini ditandai tiga kalimat kunci. Tentara: (1) mengedepan-

kan persatuan dan kesatuan; (2) mendukung proses konstitusional; (3) menjaga jarak dari dunia politik.

Tiga kalimat kunci itu selalu dijadikan alasan utama untuk melakukan resistensi, misalnya terhadap Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai kerap melakukan manuver politik ke pihak tentara. Dalam hal ini, dapat dipahami bila pihak TNI/Polri tidak mendukung "dekrit politik" Presiden Wahid. Saat Megawati Soekarnoputri menggantikan posisi presiden lewat Sidang Istimewa (SI) MPR yang dipercepat, sesungguhnya tak bisa dikatakan yang bermain adalah sikap konservatif, mengingat secara politik, pihak TNI/Polri mendukung kehadirannya. Tetapi sikap konservatif muncul saat TNI bersikeras menyelesaikan kasus Aceh dengan pendekatan militer, justru di tengah-tengah proses dialog yang tengah digalakkan, dan memang banyak menyita waktu dan energi.

Sikap konservatif, terkait dengan upaya memproteksi diri dari berbagai alternatif pemikiran yang bersifat eksperimentatif. Dalam banyak kasus yang terkait dengan "pertahanan nasional" TNI terbiasa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tanpa menyisakan "ruang dialog". Terhadap segenap ancaman disintegrasi bangsa, cara-cara militer dianggap paling efektif. Tentu saja, ia mampu meredam satu persoalan, tetapi justru menyisakan banyak permasalahan lain, yang lebih kompleks (semisal pelanggaran HAM, serta berbagai bibit konflik yang bisa meledak sewaktu-waktu).

Berbeda dengan cara militer, demokratisasi sipil mensyaratkan dikembangkannya ruang dialog multi-pendekatan. Pihak militer bisa saja tergoda tidak sabar. Sikap konservatif tentara berpeluang menimbulkan konflik dengan kalangan sipil. Perbedaan pemaknaan hal-hal mendasar berpeluang terjadi. TNI/Polri harus menyadari, lingkungan eksternal yang membingkainya sekarang adalah demokratisasi, bukan otokrasi.

Apakah konservatisme tentara dapat mengganggu demokrasi? Tak begitu mengkhawatirkan, apabila konteksnya wajar. Ia bisa menjadi bumerang, bila statis, tertutup, tidak adaptif, dan neomi-

literistik. Maka, sudah seharusnya kalangan sipil terus memantau kecenderungan demikian, agar tak terulang kesalahan tempo dulu. Sikap TNI/Polri harus tetap dibaca sebagai konservatisme "yang tengah melunak".

GERAKAN neokonservatif menolak amandemen UUD 1945, bahkan mengusulkan agar prosesnya dihentikan, mendorong konsekuensi kembali ke UUD 1945. Salah satu alasan utamanya, demi persatuan dan kesatuan, serta memfokuskan energi bangsa pada hal-hal positif. Karena amandemen UUD 1945 sudah dianggap *kebablasan*, demi persatuan dan kesatuan (alasan konservatif), lebih baik UUD 1945 dipertahankan, dengan menyetop proses amandemen yang berjalan. Persoalannya, apakah cara demikian pun menyelesaikan persoalan? Apakah ia tak justru pemicu bumerang kecenderungan konflik politik yang bisa memicu destabilitas?

Tampaknya TNI/Polri telah melihat kemungkinan itu, maka keluar sikapnya di atas. Kesannya, sikap yang diambilnya adalah "jalan tengah" yang tidak membela pihak "pro" maupun "kontra" terhadap proses amandemen UUD 1945. Asumsinya sama, "persatuan dan kesatuan" mengalahkan segalanya. Yang berbeda soal cara. TNI/Polri, agaknya tidak mau bersikap fatalistik, dengan misalnya ikut menolak pro-ses amandemen. Bila itu dilakukan, padahal proses amandemen sendiri amanat MPR dan reformasi, justru bakal menjadi bumerang bagi "persatuan dan kesatuan" itu sendiri.

Kalangan eksperimentatif-reformis, juga punya asumsi yang sama menyangkut "persatuan dan kesa-tuan", namun lain cara mengartikulasikannya. Justru, menurutnya sikap konservatif harus diakhiri, diganti sikap rasional-inovatif, mengingat pengalaman kega-galan yang selama ini terjadi. Salah satu cerminan nyata atas sikap rasional-inovatif itu adalah mengamandemen UUD 1945, justru demi menjaga "persatuan dan kesatuan" yang menjangkau ke depan, dengan format yang tidak harus tetap. Format boleh berubah, namun hakikatnya "persatuan dan kesatuan" tetap terjaga.

Sikap kalangan TNI/Polri itu juga dipengaruhi oleh pandangan

kalangan eksperimentatif-reformis ini. Pada masa transisi, TNI/Polri tak mau lagi terjebak "urusan politik". Mereka memilih tampil hati-hati, tidak gegabah. Sikap demikian berefek pada peningkatan citranya sebagai entitas yang ada dalam bingkai demokrasi.●

Panglima Kooplihkam Datang, Maluku Aman?

KOMPAS, 10 JUNI 2002

MAYOR Jenderal Djoko Santoso telah dilantik sebagai Pangdam XVI/Pattimura, menggantikan Brigjen Mustopo (30/5/2002). Mayjen Djoko Santoso sebelumnya Panglima Divisi Infanteri II Kostrad, sedangkan Brigjen Mustopo selanjutnya menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI. Pergantian Pangdam XVI/Pattimura itu diputuskan berdasar Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 388 Tahun 2002, 27 Mei 2002, dengan memperhatikan usulan KSAD tentang pengajuan jabatan perwira tinggi TNI AD. Koopslihkam sendiri dibentuk untuk menjamin kesatuan komando di Maluku dan membawahi Satgas Keamanan dan Satgas Penegakan Hukum yang unsurnya berasal dari TNI dan Polri.

Gubernur Maluku Saleh Latuconsina menyebut pengalihan komando operasi dari Brigjen ke perwira bintang dua, merupakan hasil analisis dan evaluasi kerja Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) dalam menyikapi situasi di Maluku. Kondisi yang terjadi di Maluku, katanya, menuntut peningkatan status komando operasi pemulihan keamanan.

Dari situ tampak, inisiatif kebijakan tersebut dilakukan PDS. Panglima Laksamana Widodo AS (waktu itu) menyebut, duduknya anggota TNI sebagai Pangkoopslihkam Maluku merupakan hak PDS Maluku, yaitu Gubernur Saleh Latuconsina. Menurut Widodo, pembentukan Pangkoopslihkam tak memerlukan keputusan presiden (keppres), karena dalam keppres sebelumnya sudah jelas mengenai

pembentukan darurat sipil. Pangkoopslihkam merupakan evaluasi obyektif atas efektivitas darurat sipil di Maluku (*Kompas Cybermedia*, 30/5/2002).

MESKIPUN demikian, pengangkatan Mayjen Djoko Santoso memang kontroversial, dan terkesan menyempal dari kebiasaan dan aturan baku. Tak heran bila beberapa LSM mengkritik penunjukan Panglima Koopslihkam di Ambon. Pembentukan Panglima Koopslihkam, selain menunjukkan kegagalan fungsi teritorial TNI yang selama ini dibanggakan, juga dinilai sebagai upaya memberlakukan darurat militer secara terselubung, meski tanggung jawabnya tetap ada di tangan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku.

Menurut mereka, penunjukan perwira tinggi militer untuk mengatasi gangguan keamanan di Ambon, telah menabrak Ketetapan (Tap) MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri yang menempatkan Polri sebagai pemelihara keamanan, dan TNI sebagai alat pertahanan negara. Selain itu, pembentukan Koopslihkam di Maluku dikhawatirkan justru meningkatkan pelanggaran HAM. Koopslihkam dinilai pintu masuk penanaman nilai-nilai dan pemapanan politik militeristik sekaligus membangun citra sipil tidak mampu menyelesaikan konflik. Dalam hal ini pemerintah, khususnya Presiden sebagai penanggung jawab penguasa darurat sipil, seharusnya melakukan kajian atas penanganan Darurat Sipil yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No 23/ Prp/1959 lebih dulu sebelum menyetujui Koopslihkam.

Namun, di balik kritik keras LSM, dukungan dan harapan terhadap kebijakan baru tersebut juga banyak. Misalnya, Ketua MPR Amien Rais masih menaruh optimisme. Amien berpendapat masalah di Ambon sudah lama ruwet sehingga diperlukan pendekatan berbeda, yaitu ketegasan. Menurutnya, bila sepintas pendekatan baru ini tak sesuai aturan main yang biasa dipakai, mengapa tidak dilakukan pendekatan berbeda (*Kompas*, 30/5/2002)

KALANGAN TNI tentu saja menolak tafsiran bahwa penggantian Panglima Kodam Pattimura dengan jenderal berbintang dua sebagai pengondisian menuju darurat militer. Catat saja keterangan Jenderal Endriartono Sutarto, bahwa hal itu hanya bagian dari bantuan militer untuk normalisasi kehidupan di Maluku. Pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan di Maluku yang dirangkap Panglima Kodam, katanya, semata-mata hanya untuk menarik satu garis komando yang akan memudahkan koordinasi aparat keamanan di Maluku.

Kebijakan ini memang didukung penuh pemerintah. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menolak tudingan LSM dan mengajak memahami konsep pemerintah, tidak serta-merta menyerangnya sebagai kembalinya represif militerisme. Gubernur terkesan posisinya setingkat Panglima Koopslihkam yang berpangkat Mayor Jenderal, ada kekhawatiran akan sulit melakukan koordinasi. Tetapi, Yudhoyono menepis, karena UU No 23/1959 sudah jelas mengatur Gubernur membawahi semua aparatur di daerah. Sementara Mendagri Hari Sabarno menegaskan, karena yang dijalankan adalah supremasi sipil, maka kendali politik selalu di bawah Gubernur. Ia yakin, tentara yang reformis tahu aturan mainnya (*Kompas Cybermedia*, 30/5/2002).

PILIHAN kebijakan baru pemulihan keamanan di Maluku kali ini terkesan "semi darurat militer". Terlepas pro-kontra, yang jelas kalangan TNI diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya mengatasi persoalan keamanan Maluku. Namun, harap dicatat, ia hanya, meminjam istilah fasilitator Gerakan Baku Bae Maluku, Ichsan Malik, "satu tiang" di antara dua tiang yang harus berperan aktif, yakni gubernur selaku PDSD dan masyarakat. Tugas aparat keamanan di sana memang cukup berat, terutama dikaitkan dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Jajak pendapat tentang *Baku Bae*, misalnya menyebutkan, 50,2 persen masyarakat Maluku berpendapat, selama ini aparat keamanan tidak bertindak profesional. Dari jumlah itu, 24,6 per-

sen berpendapat aparat bertindak berat sebelah dan memihak. Sejumlah 25,8 persen berpendapat aparat keamanan bertindak melebihi batas dan justru memperkeruh situasi. Hanya 23,9 persen responden berpendapat aparat keamanan obyektif, adil, dan tidak me-mihak. Selebihnya menjawab cukup membantu, tidak tahu, atau tidak memberikan jawaban (*Kompas*, 31/5/2002)

Selain hal itu (kepercayaan yang rendah dari masyarakat), setidaknya ada tiga catatan yang dapat dikembangkan dalam konteks kebijakan baru itu. Pertama, ini adalah kesempatan antara pihak PDSD de-ngan aparat keamanan, yakni polisi dan TNI untuk bisa lebih mantap melakukan koordinasi. Selama ini, sering terdengar, antara pihak PDSD dan aparat keamanan kurang bisa melakukan koordinasi di lapangan sehingga hasilnya fatal. Namun demikian, harap dicatat, pihak PDSD harus tetap memegang prinsip supremasi sipil.

Kedua, meskipun hadir kebijakan baru yang memberi "kesempatan lebih" pada TNI, pendekatan militeristik harus dikurangi. Keberhasilan aparat keamanan justru terletak pada bagaimana pihaknya mampu meminimalisasi konflik dengan kekerasan. Tindakan represif, dikhawatirkan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan secara efektif. Sebaliknya, jika polisi dan tentara mampu tampil simpatik dan dipercaya masyarakat maka efektivitas pemulihan keamanan akan tercapai.

Ketiga, bagi TNI keputusan ini ujian. Di tengah sorotan tajam kesalahan masa lalu, serta berbagai hal yang membuat citranya yang masih negatif, kebijakan baru bisa merepotkan apabila pihaknya tak bisa tampil baik dan memenuhi harapan semua pihak. Peluang membuat pelanggaran nyaris sama besarnya dengan peluang untuk tampil tegas, namun simpatik. Faktor keberhasilannya antara lain terletak pada naiknya tingkat kepercayaan masyarakat, bahwa aparat keamanan bisa betul-betul menciptakan rasa aman. Sebab, bila gagal, pasti situasinya lebih runyam lagi.

Kini harapannya kehadiran Panglima Koopslihkam bakal me-

ningkatkan rasa aman, agar masyarakat bisa melakukan rekonsolidasi dan membangun kembali suasana tenang dan damai.●

Profesionalisme dan Transparansi Tentara

KOMPAS, 17 JULI 2002

CATATAN *Kompas* (27/6/02) "Mengharapkan Tentara yang Profesional", amat menarik, dan cukup menggambarkan bagaimana profesionalisme tentara diuji oleh banyaknya keterbatasan. Catatan yang ditulis oleh Nasru Alam Aziz itu memberangkatkan pada tekad Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menjadikan TNI sebagai institusi profesional yang tak lagi terlibat dalam politik praktis ataupun menjadi alat kekuasaan, melainkan sebagai alat negara. Demikian pula, KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu berkali-kali menekankan pada berbagai kesempatan agar prajuritnya bekerja keras, bekerja melebihi panggilan tugasnya sebagai tentara. Tuntutan peningkatan intensitas kerja diharapkan dapat mengatasi kondisi sulit yang dihadapi TNI AD, menyusul badai krisis yang melanda negeri ini.

Upaya peningkatan profesionalitas tentu sangat berkait dengan seberapa besar kesejahteraan para prajurit. Disebutkan dalam catatan itu, ternyata gaji pokok seorang tamtama dengan pangkat terendah hanya Rp 540.000 per bulan dan tertinggi Rp 850.000 per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak prajurit terpaksa bekerja sampingan di luar jam dinas.

Untungnya, para petinggi tentara mentolerir mereka untuk mencari penghasilan tambahan itu. Yang penting, tugas pokoknya sebagai prajurit tidak terabaikan dan, saran Ryamizard, pekerjaan sambilannya bukan membekingi tempat judi atau tempat maksiat. Belum lagi soal penyediaan rumah dinas bagi prajurit juga masih jauh dari mencukupi. Juga soal santunan dari Asuransi ABRI (Asa-

bri) yang amat terbatas, demikian pula jaminan biaya hidup minimal bagi prajurit yang telah pensiun.

Kondisi peralatan dan persenjataan yang dimiliki TNI (AD, AL dan AU) untuk mendukung tugas pokoknya pun memprihatinkan. Dalam dengar pendapat dengan Komisi I DPR Ryamizard menceritakan kondisi peralatan dan persenjataan TNI AD. Menurut KSAL Laksamana Bernard Kent Sondakh dari total 113 KRI yang dimiliki TNI AL saat ini – meliputi kapal tempur, kapal patroli, dan kapal pendukung – tak ada satu pun yang siap tempur sesuai fungsi asasinya. Kapal-kapal tersebut hanya siap dalam arti mampu berlayar (*Kompas*, 2/7/2002).

CATATAN di atas menghentakkan khalayak, betapa tuntutan profesionalisme TNI terbentur persoalan teknis-internal yang serius. Mengapa hal-hal demikian bisa terlantar selama ini? Kalaupun anggaran terbatas, haruskah dampaknya sebegitu parah? Ada dua hal menarik terlontar dari Presiden Megawati mengawali diskusi panjang soal keterlantaran prajurit dan soal kondisi peralatan dan persenjataan tentara. *Pertama*, Megawati mengunjungi asrama perumahan tentara yang kondisinya memprihatinkan. Lantas, presiden menyampaikan bantuan – yang lantas memunculkan "asramagate", karena belakangan dananya diambil dari Banpres, yang seharusnya sudah tidak ada. Yang jelas, kunjungan Megawati ke asrama tentara tersebut, merupakan pintu masuk khalayak dalam memandang keterbatasan kondisi prajurit – yang jarak kesejahteraannya cukup jauh dengan para petinggi mereka.

Kedua, tatkala Presiden Megawati mengunjungi Slovakia (22/6/2002) dan menemukan fakta harga-harga peralatan militer lebih murah dibandingkan yang telah dibeli selama ini. Ia segera meminta TNI dan Polri tidak mengulangi kesalahan masa lalu, yakni melakukan *mark up* pembelian persenjataan. Menyinggung soal itu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, mengakui masih ada kasus-kasus *mark up* (penggelembungan nilai) dalam pengadaan peralatan ke-

butuhan TNI. Ia berjanji akan membangun sistem yang transparan dan terbuka dalam setiap tender pengadaan untuk mencegah *mark up* (*Kompas*, 25/6/2002). Untuk mengusut kasus *mark up* yang mungkin terjadi, Endriartono menganggap tidak perlu membentuk tim khusus. Sebab, secara otomatis, jika terjadi penyimpangan akan ditangani oleh Itjen TNI.

PROFESIONALISME dan transparansi dua kata kunci yang, suka tidak suka, akan selalu disorotkan ke TNI, juga Polri. Profesionalisme menuntut mekanisme transparansi pengelolaan anggaran. Pengalaman selama Orde Baru, terasa transparansi merupakan "benda asing", dan cukuplah hal demikian menjadi pelajaran agar di masa mendatang tidak terulang lagi hal-hal yang memperparah KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di kalangan tentara. Bagaimanapun TNI dan Polri bukanlah institusi yang "kebal hukum". Penegakan hukum di dalam instituri-institusi tersebut, pun seharusnya juga merambah ke persoalan-persoalan yang terkait penyelewengan anggaran dan bisnis "tidak sah".

Persoalan bisnis tentara sendiri, langsung mendapat sorotan tajam begitu Soeharto *lengser*. Tidak hanya soal keterlibatan mereka dalam politik saja yang mengerucut, tapi bisnis tentara yang menggurita itu, juga jadi bahan bidikan publik. Pertanyaan sederhana muncul, apakah pantas institusi tentara melakukan kegiatan *profit oriented*? Idealnya tidak, bila kesejahteraan prajurit telah benar-benar ditanggung negara. Tapi, negara memiliki anggaran terbatas. Sebagaimana disinggung di muka, sejumlah alasan keterbatasan bisa dipakai juga untuk memaklumi bisnis tentara.

Terlepas dari hal itu, pertanyaan selanjutnya, apakah hasil bisnis tentara itu benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh prajurit hingga di level bawah? Jawabnya, sudah bisa dipastikan tidak. Perlu diteliti lebih lanjut, hipotesis yang menyebut bahwa sebagian besar hasil bisnis tentara dimanfaatkan oleh para petinggi tentara, dan tidak menyentuh kesejahteraan prajurit di tingkat bawah. Bila hal ini betul, maka soal bisnis tentara perlu ditinjau ulang. Mungkin

perlu dinasionalisasi – dikelola oleh negara, dan hasilnya dimasukkan secara resmi sebagai bagian dari anggaran tentara.

MUNCULNYA bisnis tentara tak lepas dari "siasat" tentara untuk memenuhi kebutuhannya, yang bila hanya menggantungkan dari anggaran yang ada tidaklah cukup. Di masa dominasi tentara kuat di masa lampau (Orde Baru), nyaris apa yang dilakukannya di dunia bisnis, tak ada yang berani "mempersoalkannya". Hal itu, merupakan bagian dari "siasat kebudayaan" tentara lebih luas, ketimbang sekedar berlindung di balik doktrin *civic mission*.

Studi Budi Susilo SJ dan A Made Tony Supriatna (*ABRI, Siasat Kebudayaan 1945-1995*, Kanisius:1995) setidaknya menunjukkan bahwa kalangan tentara merasakan dirinya sebagai salah satu lembaga yang berusaha untuk mencari konsensus dari persoalan-persoalan hidup massa-rakyat di Indonesia. Maka, catatnya, tentara juga harus bersiasat memanfaatkan (budi) bahasa atau unsur-unsur kebudayaan lainnya, dalam bentuk retorika tertentu. Sebuah siasat budaya yang diharakan: cukup meyakinkan dan patut dipercayai oleh para pembaca dan pendengarnya.

Dalam konteks ini, sebagai bagian dari "siasat kebudayaan" tentara, khalayak dibikin maklum dan menyetujui bahwa bisnis tentara adalah hal yang wajar dan tak bisa dipersoalkan. Tapi, tatkala gelombang sejarah menghendaki reformasi dan demokrasi ditegakkan, maka "siasat kebudayaan" tentara harus berubah. Yang dulu "nyaris tak tersentuh", kini dipersoalkan secara serius. TNI dan Polri bagaimanapun, karena keduanya adalah institusi yang berkaitan erat dengan eksistensi publik, maka mekanisme transparansi dalam pengelolaan manajemen administrasinya harus diperhatikan dan dikedepankan.

Kalau aspek transparansi ini diabaikan, setidaknya ada dua hal yang terkena dampaknya. *Pertama*, imbas internal. Kalau KKN terjadi, maka hal itu merugikan tidak hanya institusi, tapi ribuan prajurit yang tingkat kesejahteraannya tak kunjung membaik. Di masa reformasi soal kesenjangan pendapatan dan "ketidakadilan" yang

menimpa mereka, bisa dilontarkan secara terbuka. Kasus protes ratusan tamtama dan bintara militer yang menuntut pengembalian uang muka kredit rumah yang tak kunjung dibangun beberapa waktu lalu, merupakan ilustrasi ironis. Apalagi yang diperjuangkan adalah rumah tipe 27, tipe terkecil. Bagaimana kalau mereka sadar, akibat KKN oknum petinggi-petinggi mereka, telah menyebabkan tingkat kesejahterannya tak naik-naik?

Kedua, terkait kewibawaan institusi di mata pihak eksternal. Tatkala TNI dan Polri dituntut untuk profesional dan semakin canggih dalam menangani persoalan-persoalan publik secara elegan dan simpatik, kewibawaan jelas amat urgen. Bila wibawa merosot, maka "selamanya" mereka akan jadi bulan-bulanan publik, di dalam dan luar negeri.

Tugas Jenderal Endriartono dan Kapolri Jenderal (Pol.) Dai Bachtiar tak ringan. *Pertama*, mereka harus membenahi segala soal teknis administratif internal masing-masing, supaya kasus-kasus KKN, semacam *mark up* tidak terulang . *Kedua*, pihaknya dituntut terbuka, tak terkesan menutupi persoalan penggunaan anggaran, sehingga publik (terutama DPR) bisa mengontrol dan menilainya. *Ketiga*, pihaknya dituntut tetap memikirkan kondisi prajurit dan kondisi peralatan dan persenjataan yang terbatas, di tengah-tengah tantangan profesionalisme – yang sudah menjadi tekadnya.

Kalau TNI dan Polri mau berbenah dan transparan, secara bisa tampil secara elegan dan simpatik, publik pun akan, tidak saja memaklumi tapi juga mendukung langkah-langkah terbaik guna kebaikan bersama, terutama kemajuan institusi TNI dan Polri, serta kesejahteraan anggotanya.●

Politik Tentara Belum Berakhir

KOMPAS, 15 AGUSTUS 2002

DALAM sebuah tulisannya berjudul Fundamental Proses Per-ubahan UUD 1945 (*Kompas*, 6/8/2002), Agus Widjojo, Wakil Ketua MPR yang juga penasihat Fraksi TNI/Polri MPR, antara lain mengemukakan pendapatnya bahwa, "akhirnya, perubahan apa pun yang dihasilkan, harus bertujuan memenuhi tolok ukur: (1) mampu mengayomi dan menjawab tuntutan ciri kebhinnekaan bangsa; (2) memberi ketegasan sistem politik bebas dari sifat kerancuan koalisi; (3) mampu membangun pemerintahan yang efektif guna mengendalikan arah pembangunan nasional dan dibangun di atas landasan kesepakatan terhadap kaidah fundamental visi tata penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia masa depan yang demo-kratis, modern, dan beradab berdasarkan Pancasila".

Boleh dibilang, itulah rumusan sikap konservatif tentara merespons perubahan sistem politik nasional. Perubahan memang sulit dielakkan, walaupun hasilnya belum dapat dipastikan. Namun, asumsinya perubahan sistem politik berdasar inisiatif konstruktif Perubahan UUD 1945 diharapkan mengarah ke penguatan demokrasi, sehingga memperbaiki multikrisis, dan memperkuat posisi bangsa yang bermartabat, kokoh, dan mandiri.

"Politik TNI adalah politik negara", demikian kalimat yang kerap meluncur dari para petinggi TNI, tatkala ditanya soal politik. TNI tidak mau terjebak pada urusan politik, dan tidak mau pula menjebakkan diri berpolitik. TNI ingin mempertegas profesionalismenya di bidang pertahanan dan keamanan nasional, di bawah paradigma supremasi sipil. Pandangan demikian, belakangan kerap

terlontar dari kalangan tentara. Dan, jelas perlu pembuktian.

Tampaknya di Sidang Tahunan (ST) MPR 2002, kalangan TNI/Polri ingin membuktikan bahwa pihaknya tidak alergi perubahan. Dikeluarkannya sikap TNI/Polri tentang Perubahan UUD 1945 dalam ST MPR oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto merupakan gejala menarik dalam dinamika politik militer transisi.

Tentara lewat Panglima mengeluarkan dua pilihan: kembali dulu ke naskah asli UUD 1945 hingga Pemilu 2004; dan alternatif kedua menyepakati seluruh hasil perubahan UUD 1945 sebagai konstitusi transisi, yang kemudian dikaji ulang oleh Komisi Konstitusi (*Kompas*, 31/7/2002). Kesannya memang bersayap. Tidak ada satu tafsir yang bisa memastikan pandangan politik TNI/Polri tersebut. Sikap hati-hati dan wait and see memang menonjol.

Pantas dicatat, TNI/Polri bukan faktor penghambat proses Perubahan UUD 1945. Di tubuh internal TNI/Polri, tampak ada dua kecenderungan: (1) yang setuju untuk mempertahankan UUD 1945, katakan kelompok konservatif garis keras; dan (2) yang setuju Perubahan UUD 1945, sebut saja kelompok konservatif lunak.

Tampaknya, eksistensi dan pengaruh kalangan konservatif garis keras, tidak signifikan, sebab yang keras berteriak kebanyakan justru para purnawirawan. Sementara sikap politik TNI/Polri jelas tak mungkin dibikin keras, melainkan harus dikesankan independen dan tidak antiperubahan.

Hanya saja, kini pergesekan pendapat internal TNI/Polri tak terasa keluar, dibanding fragmentasi yang transparan di masa Presi-den Abdurrahman Wahid. Mungkin ini wujud dari "keberhasilan konsolidasi internal TNI" di bawah komando Panglima TNI Jenderal Endriartono, yang dikenal tegas dalam menerapkan sistem komando. Lantas, dari mana publik bisa merasakan adanya "fragmentasi" di tubuh TNI kini? Antara lain dari pilihan sikap di atas.

CATATAN yang ditegaskan oleh Agus Widjojo tersebut tergolong bersifat "konservatif lunak". Tapi, namanya juga "kriteria normatif", hal itu tidak menutup kemungkinan memuncul-

kan adanya penafsiran berbeda. Cara pandang kalangan tentara soal poin "mampu mengayomi dan menjawab tuntutan ciri *kebhinnekaan* bangsa" misalnya, mungkin berbeda dengan pendapat lain dari kalangan non-militer.

Apakah hal itu dimaksudkan sebagai cara untuk kembali ke sentralisasi pengendalian kekuasaan? Ataukah, justru mempertegas paradigma desentralisasi, dengan prioritas yang lebih pada ciri kebhinnekaan daerah? Agaknya masih perlu diskusi panjang soal ini. Intinya, kelak, bagaimanapun segala problematika bangsa tak bisa diselesaikan dengan keputusan sepihak dengan mengabaikan proses dialog sipil-militer.

Ditariknya kekuatan politik TNI/ Polri dari DPR dan MPR, secara tegas menandakan berakhirnya campur tangan politik formal mereka. Namun, bukan berarti lantas TNI/Polri tidak berpolitik sama sekali-mengingat politik tak sebatas bermakna formal, yakni memiliki wakil di parlemen.

Pandangan TNI maupun Polri soal pelbagai persoalan sosial politik nasional adalah bagian dari politik. TNI dan Polri masih memiliki peluang berpolitik secara tidak langsung. Intinya, politik mereka penerjemahan sikap konservatif yang menjadi ciri khasnya yang susah dihilangkan. Bagi tentara, perubahan politik boleh terjadi, tapi prinsip-prinsip dasar yang konservatif, tak boleh dilanggar. Soal perubahan sistem politik, sistem neo-bikameral segera diterapkan, maka dipastikan tak akan ada wakil TNI/Polri lagi di parlemen.

Bolehlah diucapkan selamat tinggal politik TNI/Polri di parlemen. Kini, mereka harus menaati tata main yang muncul atas sistem politik baru, di mana semua wakil rakyat dipilih oleh rakyat, tak ada yang diangkat. Bila hendak berprofesi dikancah politik anggota TNI/Polri harus pensiun dulu, dan bisa berkompetisi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). TNI/Polri memang tidak perlu berkecil hati bila, lantas, posisinya di DPR dan MPR hilang. Mungkin hal ini harus dibaca sebagai bagian dari sumbangan mereka yang berharga bagi masa depan bangsa dan negara.

TNI/POLRI SEBAIKNYA memilih jalan yang menegaskan bahwa Indonesia akan bisa melewati masa transisi dengan baik, ke arah alam "demokrasi yang sesungguhnya". Sehingga pihaknya bukan menjadi faktor penghambat demokrasi, alias faktor yang mempertegas kehadiran kondisi "transisi permanen", sebuah masa transisi yang tak kunjung usai.

Intervensi politik, baik langsung ataupun tidak, dengan cara kasar ataupun halus-oleh kalangan militer dikhawatirkan hanya akan membawa kondisi politik nasional ke dalam sistem yang semi-otoriter. Maka, yang perlu didorongkan ke militer Indonesia adalah, kehendak kuat untuk mengakhiri masa transisi, menuju demokrasi. Artinya ia harus mendorong proses demokratisasi.

Bagi kalangan sipil, "bahaya tentara" masih membayang. Tentara masih kerap diartikan sebagai kelompok kepentingan yang memiliki ambisi politik, yang setiap saat bisa menciptakan peluang, dan merebut peluang itu untuk "berkuasa". Mungkin tidak lewat kudeta militer yang amat tidak populer itu. Melainkan, dengan cara yang lebih bersifat menciptakan kondisi politik, di mana lantas kalangan politisi sipil tak ada pilihan lain selain memberikan sebagian besar kekuasaan politik pada tentara.

Kini, kalangan konservatif lunak dominan di TNI, sehingga tidak alergi perubahan. Persoalannya, bagaimana bila yang mendominasi kelompok konservatif garis keras? Di tengah arus deras perubahan, bila tentara tidak mau berubah, maka hanya akan membuat kondisinya menjadi fatal. Wawasan politik tentara perlu terus dikembangkan untuk memahami secara tepat di mana pihaknya bisa menempatkan diri dalam demokrasi. Memperluas wawasan politik bagi elite tentara, jelas amat diperlukan, supaya tidak berbenturan dengan kehendak politik sipil. Tetapi lebih dari itu, mereka bisa menghargai demokrasi, bukan untuk merebut kekuasaan politik.

FAKTOR eksternal, juga amat berpengaruh, yakni kondisi kalangan sipil. Memang dualisme sipil-militer menyisakan banyak pertanyaan, dan dalam konteks tertentu kurang relevan dipaksa-

kan. Akan tetapi, bila yang dimaksud kalangan sipil adalah para pemain politik formal, di mana partai-partai politik dominan, maka dinamika mereka menjadi faktor. Bila dinamika politik sipil goyah, dan cenderung memberi kesimpulan awal atas kondisi "instabilitas politik permanen", maka dalam kondisi seperti itu militer lebih mudah tergoda untuk kembali terjun ke wilayah politik kekuasaan.

Politik TNI/Polri belum berakhir. Mereka suka memilih idiom "politik negara" sebagai hal yang menegaskan pihaknya tidak berpolitik oleh pertimbangan sempit. Mereka masih tetap berpolitik, dengan pertimbangan yang luas, secara "politik negara". Sebaiknya klaim "politik negara" itu kelak tidak dijadikan dalih TNI/Polri kembali berpolitik praktis. Sebaiknya pula tidak ada tafsir sepihak atas "politik negara" itu. Maka di masa depan TNI dan Polri harus lebih bisa bersikap terbuka. Eksklusifitas harus dihilangkan. Sisi manusiawi harus dikedepankan, sehingga tempatnya di mata publik menjadi lebih terhormat, ketimbang di masa lampau, tatkala tentara dipakai sebagai penjaga kekuasaan rezim.●

Budaya Konflik TNI-Polri

KOMPAS, 5 OKTOBER 2002

HARIAN *Kompas* (1/10/2002) memberitakan terjadinya kontak senjata yang melibatkan pasukan TNI AD dari Batalyon Lintas Udara (Linud) 100/Prajurit Setia dengan aparat kepolisian dari pasukan Brimob Kompi A Polda Sumatera Utara, di Binjai, Kabupaten Langkat. Kejadian itu tak dapat dikendalikan selama kurang lebih sembilan jam, Minggu malam hingga Senin (30/9) pagi. Jumlah korban meninggal dunia sedikitnya delapan orang.

Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagaimana dituturkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, menyatakan keprihatinannya. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto pun memerin-

tahkan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk memecat semua prajurit termasuk komandannya – yang melakukan penyerangan bersenjata.

Kejadian itu sungguh menghentak publik. Di tengah suasana reformasi dan meningkatnya kebutuhan akan rasa aman, justru pihak aparat sendiri melakukan penodaan. Bentrok semacam itu, bukan baru kali ini. Kasus Madiun, setahun lalu, saat sebuah Pos Polisi diserang anggota Batalyon Infanteri (Yonif) 501 Bajra Yudha, masih belum lekang. Menurut catatan Kompas, sepanjang September 1998 hingga Agustus 2002 telah terjadi sembilan kali peristiwa serupa. Penyebab dan motifnya bermacam-macam, tetapi yang jelas melibatkan unsur balas dendam.

Masyarakat layak bertanya, mengapa justru si era semua pihak diharapkan bisa menata diri secara baik, intensitas konflik terbuka antara unsur TNI versus Polri tergolong tinggi? Lantas, bagaimana masyarakat bisa percaya sepenuhnya dengan aparat, dalam urusan keamanan warga sipil?

LIMA PENJELASAN

SEDIKITNYA ada lima hal yang bisa dikemukakan terkait fenomena tersebut yang setidaknya menjelaskan bagaimana konflik TNI versus Polri "membudaya". *Pertama*, masih kentalnya budaya militerisme di TNI maupun Polri. Militerisme (diperhalus sebagai "pendekatan keamanan") sudah berjalan lama dan "membudaya". Orde Baru ikut memberi sumbangan budaya militerisme. Dulu, budaya ini dipakai negara "menyelesaikan masalah" yang mengganggu stabilitas politik dengan mengabaikan HAM. Kini setelah perubahan paradigma, pendekatan militeristik tidak populer. Tetapi, sisa-sisa "budaya militerisme" masih kuat, bahkan memperoleh keleluasaannya di berbagai daerah (misalnya dalam konteks berlainan, di Aceh, Papua, dan Maluku).

Kedua, belum tuntasnya hubungan TNI dan Polri pasca-pemisahan kelembagaan, terutama aspek psikologisnya. Dulu di zaman Orde Baru lembaga Kepolisian ada "di bawah" (subordinasi) TNI/

Polri, tetapi kini posisinya boleh dibilang "sejajar". Yang lebih banyak berurusan dengan segala persoalan keamanan sipil (publik) adalah Polri. Adapun TNI bisa dimintai bantuannya untuk mengatasi persoalan keamanan suatu daerah, bila ada permintaan dari Polri. Singkat kata, mekanisme baru, dicoba diterapkan, mengikuti prosedur yang diderivasi dari paradigma supremasi sipil. Namun, sosialisasi dan realitas di lapangan – mungkin karena belum terbiasa dan "membudaya" kerap menimbulkan kesalahpahaman dan konflik terbuka.

Ketiga, masih rendahnya tanggung jawab dan kepekaan atas perlindungan kepentingan-kepentingan publik secara luas oleh kalangan TNI dan Polri. Publik (masyarakat luas) masih kerap dilihat sebagai obyek ("pelengkap penderita"), bukan subyek yang mesti dimuliakan dan didahulukan kepentingan-kepentingannya. Fungsi TNI dan Polri dalam konteks "kepelayanan publik" dalam banyak kasus masih mengecewakan. Eksklusivitas (bukan inklusivitas) masih menonjol. Sepertinya, masih banyak kalangan TNI dan Polri yang tidak sadar bahwa mereka kini sudah ada pada masa bukan Orde Baru. Kesadaran untuk menjadi TNI dan Polri Reformasi masih rendah. Karena "kompetisi pengabdian" TNI dan Polri masih kerap menganggap masyarakat sebagai "obyek perahan", maka potensi konflik terbuka antar-mereka masih menganga.

Keempat, terkait pernyataan Wakil Persiden Hamzah Haz bahwa pemicu utama kasus Binjai, karena aparat menjadi beking pelaku kejahatan. Maka, ia meminta pimpinan TNI dan Polri membersihkannya (*Kompas*, 2/10/2002). Sudah menjadi rahasia umum, kalangan TNI dan Polri memiliki proyek-proyek bisnis yang dilakukan secara resmi (lewat yayasan-yayasan yang mereka dirikan), maupun yang setengah resmi dan tidak resmi. Lahan bisnis setengah resmi dan tidak resmi itu biasanya sudah dikapling-kapling sedemikian rupa, sehingga satu sama lain diharapkan tidak "saling mengganggu". Tentu saja, yang melakukan hal itu oknum TNI dan Polri. Hal ini memang menggelisahkan, dan kerap menjadi keluhan masyarakat, karena oknumnya berkelompok-kelompok. Penjelasan

mengapa TNI dan Polri masih mempertahankan bisnisnya, karena secara faktual tingkat kesejahteraan aparat TNI dan Polri amat terbatas. Hal ini perlu pemecahan tersendiri.

Kelima, merosotnya wibawa pimpinan TNI dan Polri. TNI/Polri bekerja dengan sistem komando. Sederhananya, anak buah harus taat perintah atasan, alias tidak boleh menyimpang dari tugas yang diberikan. Hal itu dilakukan dengan tingkat disiplin tinggi. Persoalanya, mengapa banyak anak-buah TNI dan Polri yang berani menyempal tradisi, tidak mengindahkan pemimpinnya, dan berbuat nekat, yang disadari hanya menumbuhkan kefatalan? Adakah pengaruhnya dengan kasus-kasus khusus (semisal pelanggaran HAM berat) terkait dengan petinggi TNI/Polri, yang tidak menyentuh posisi mereka, tetapi justru terkesan lebih banyak "mengorbankan anak-buah"? Bila ada kaitannya tentu akan menjadi "menarik", mengingat anak-buah merasa kerap dieksploitasi dan akhirnya dikorbankan guna melindungi kesembronoan para pemimpinya.

KEPENTINGAN PUBLIK

MENCIPTAKAN harmonisasi hubungan TNI dan Polri, dalam konteks fungsi, tugas, dan peran masing-masing, jelas diperlukan. Tetapi, kepentingan publik harus pula diutamakan. Perlu dipahami, TNI dan Polri posisinya bukan di atas (superstruktur) masyarakat (publik) dan publik pun bukan sub-ordinat TNI/Polri. TNI dan Polri adalah aparat (alat) untuk menjaga fungsi-fungsi kepentingan publik dari gangguan keamanan dan teror ketidaktenteraman yang dilancarkan pihak-pihak tertentu terhadap publik.

TNI dan Polri bekerja atas amanat rakyat untuk menjalankan tugas negara. Gaji, senjata, dan fasilitas lain yang dimiliki mereka pada hakikatnya berasal dari uang rakyat, yang antara lain disetorkan ke negara lewat pajak. Karena ditugasi dan dengan uang rakyat, maka kepentingan publik (rakyat) harus diutamakan, bukan dimanipulasi. Tidak hanya bagi TNI dan Polri, aparat birokrasi sipil pun harus pula demikian. Kebiasaan memanipulasi kepentingan publik harus dibuang.

Konsolidasi internal TNI dan Polri pasti diperlukan, dan dalam masa transisi seperti ini, butuh waktu dan kesabaran. Konsolidasi internal sebaiknya jangan sampai memunculkan "semangat korps" yang berlebihan, yang justru rawan konflik dengan kesatuan (korps) lain. Semangat korps perlu ditumbuhkan, tetapi jangan sampai menjadi "semangat perang".

Harapannya, kasus Binjai kasus terakhir konflik terbuka TNI versus Polri di lapangan. Tetapi, bagaimana hal ini bisa dijamin? Inilah persoalannya. Desain kebijakan makro perlu dilihat kembali, dengan membuang secara signifikan "budaya militeristik" dan kejahatan, dengan lebih menonjolkan sisi manusiawi dan HAM. Bila tidak, kejadian yang sama akan terus berulang.●

Terorisme, Tantangan *Civil Society*

KOMPAS, 16 OKTOBER 2002

BELASAN organisasi agama, nonkeagamaan, serta partai politik, Minggu (13/10), di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, mengutuk dan mengecam keras peledakan bom di Bali serta Manado, yang dilakukan dengan kejam oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Di antara yang hadir antara lain KH Amidhan (MUI), M Hidayat Nurwahid (Partai Keadilan), Siti Hartati Murdaya (Walubi), Ab Muhsin Ahmad Mattas (Front Pembela Islam), Muhammad Ibrahim (Partai Buruh Indonesia), Mei Susilo (DPP Wanita Katolik Indonesia), Muchtar Beni Biki (Persis), Lukman Hakiem (PPP), Nico Uskono (PP Pemuda Katolik), Usyamah Hisyam (Parmusi), Chandra Setiawan (Majelis Tertinggi Konghuchu Indonesia), dan lainnya (*Kompas Cyber Media*, 13/10/2002).

Dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan Wakil Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, dinyatakan, "Kami semua seba-

gai bagian dari masyarakat Indonesia dan civil society di Indonesia mengecam sekeras-kerasnya tindakan peledakan bom yang terjadi di Bali dan Manado yang kami nilai tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dan oleh karena itu kita mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengusut secara tuntas dan segera, sehingga pelaku serta aktor intelektual dari tindakan-tindakan seperti itu dapat segera ditangkap dan diselesaikan lewat jalur hukum".

Pernyataan sikap bersama itu, hanya satu dari sekian banyak yang disampaikan *civil society* di Tanah Air. Intinya mengutuk terorisme dan peringatan agar tidak terpancing provokasi memecah belah bangsa. Ledakan bom di Bali yang menewaskan ratusan jiwa (kebanyakan orang asing) itu, bagaimanapun mampu menumbuhkan perbedaan penafsiran, yang berujung saling mencurigai. Apalagi, terjadinya di saat isu terorisme internasional merebak pascaserangan 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat.

Di Indonesia, beberapa kelompok berbendera Islam sempat menjadi sorotan terkait pemberitaan media massa Barat yang mengaitkannya dengan jaringan terorisme internasional (*Al Qaeda*). Namun, selama ini memang tidak ada bukti keterlibatan itu. Sebaliknya, sorotan itu dinilai bentuk konspirasi Barat dalam menyukseskan agendanya.

Di tengah situasi psikologis yang tidak menguntungkan itu, bom di Bali meledak. Ia jelas bukan peristiwa lokal, melainkan berdimensi internasional. Apa yang disikapkan oleh *civil society* pun bersifat global dan universal. Indonesia tengah menjadi sorotan dunia, terlepas apakah meledaknya bom di Bali itu kejadian yang berdiri sendiri ataukah konspirasi internasional.

CIVIL SOCIETY

KEKUATAN-kekuatan *civil society* di Indonesia saat ini tengah mendapat tantangan yang jauh lebih kompleks. Pada masa menjelang Orde Baru jatuh, tema-tema perlawanannya lebih konkret (tidak mengabstrak), yakni bagaimana rezim yang sudah keropos itu ditumbangkan; walaupun setelah tumbang, problematikanya

tambah kompleks. Kekuatan civil society disatukan oleh "musuh bersama" (*common enemy*) dan common denominator, yakni, agar rezim Soeharto tumbang. Setelah terkabul, dan "pusat-pusat kekuasaan" baru menyebar, seiring dengan itu pertumbuhan *civil society* tampak kalah dengan pertumbuhan partai-partai politik.

Kekuatan *civil society* terletak pada keberagamannya yang bergerak berdasar inisiatif dan kemandirian yang bahkan bisa saja berhadapan dengan negara (*state*). Partai politik, sesungguhnya juga merupakan kekuatan *civil society*, walaupun ia punya akses lebih besar ke negara. Meminjam pendapat Dawam Rahardjo, partai memiliki dua kaki, satu ke negara, satunya lagi di wilayah *civil society*. Yang menjadi ciri khusus *civil society* adalah ciri *civilized*-nya, atau dalam istilah Nurcholish Madjid (yang mengartikannya masyarakat madani) adanya ikatan keadaban (*bond of civilities*) yang tertanam kuat dan gerakan masyarakat yang mandiri.

Dengan demikian, *civil society* memiliki seperangkat basis normatif yang tak bisa diabaikan. Kelompok-kelompok yang mengedepankan kekerasan dan terorisme, tentulah telah mengabaikan ikatan keadaban, sehingga mereka bukan bagian dari *civil society*. Di alam yang makin menuntut toleransi dan kesadaran tinggi atas pluralisme ini, cara dialog (menyeru kebaikan bersama) lebih utama ketimbang cara-cara kekerasan yang melanggar hukum publik. Kekerasan dan teror ialah musuh utama *civil society*.

Di Indonesia saat ini, tampaknya, wacana *civil society* mulai tergeser oleh hiruk-pikuk politik. Kekuatan-kekuatan *civil society* tampak tergopoh-gopoh mendesakkan banyak tuntutannya, tetapi sebegitu rupa banyak menemukan kega-galannya. Ini bisa dimaklumi mengingat posisinya di luar kekuasaan. Ia hanya satu bagian kecil, sebagai pemasok input, dari arus deras proses politik.

Kekuatan-kekuatan *civil society* kerap terbentur oleh tembok oligarki politik. *Civil society* sebagai "kekuatan kebaikan", ternyata dalam banyak hal, tidak efektif menghadapi "kekuatan abstrak" yang dimainkan para "aktor politik" yang memiliki akses kekuasaan dan akses rekayasa yang canggih. Maka, kalau demikian, musuh

abstrak ini lebih berbahaya. Mereka digerakkan oleh aktor-aktor yang menguasai cara-cara merekayasa yang canggih, kalau perlu mengedepankan terorisme.

Terorisme biasanya tidak diakui oleh pelakunya. Ini yang membedakannya dengan kekerasan biasa. Aktor teror selalu bersembunyi (lempar batu sembunyi tangan). Pelbagai kejadian teror yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia belakangan ini – yang setelah Orde Baru jatuh makin merajalela – menunjukkan ciri utamanya bahwa sang aktor selalu ber-sembunyi di balik peristiwa (teror).

Peristiwa bom di Bali, teror terbesar di Indonesia selama ini, merupakan kaca baru baru *civil society* merapatkan barisan. Tatkala proses perubahan politik belum mencapai titiknya yang optimal, di mana semuanya berada dalam relnya, ditambah perilaku politik yang membaik, tantangan teror menghadang. Terorisme merupakan tantangan utama, selain politik uang, desentralisasi, KKN, kekerasan negara, dan persoalan-persoalan lokal dan nasional lain. Kekuatan *civil society* tidak boleh kontraproduktif.●

Menemukan Kembali Kedamaian dalam Agama

KOMPAS, 10 NOVEMBER 2002

BERSAMA Prof KH Ali Yafie, penulis pernah terlibat diskusi "Menemukan Kembali Kedamaian dalam Agama". Pertanyaannya, apakah agama sudah jauh dari kedamaian? Yang benar saja? Agama idealnya mengedepankan ideal-ideal alias basis normatifnya yang dekat dengan kedamai-an dan ketenteraman. Agama menyerukan pada umatnya untuk saleh, individual maupun sosial. Maka, karena agama mengajarkan kedamaian, bagaimana mungkin agama jauh dari kedamaian?

Setelah didiskusikan, ada dua penafsiran soal tema itu: (1)

terkait bagaimana pelakunya memaknai ajaran agama; (2) ketidakdamaian terjadi tatkala orang mengabaikan ajaran agama, oleh sebab itu untuk menemukan kedamaian, harus kembali ke agama. Yang pertama membedakan agama dan pelaku agama. Agama, yang mengajarkan kedamaian, cinta kasih, saleh individual, dan saleh sosial, bisa menjadi terkesan sebaliknya oleh tingkah laku pelakunya yang memanipulasi agama untuk kepentingan sempit dan jangka pendek.

Saking kerapnya muncul *contradictio in terminis* antara ajaran kebaikan agama dengan realitas tingkah laku pengikutnya, orang kerap salah, dan lantas menyimpulkan (sebagaimana John Lennon) bahwa agama (*religion*), sebagaimana negara (*country*), surga (*heaven*), neraka (*hell*), dan kepemilikan (*posession*); dituduh sebagai penyebab berbagai macam peperangan (*kill or die for*). John Lennon, terlampau simplistis, dan "menyalahkan", antara lain agama sebagai penyebab peperangan. Pesan Lennon tersebut sesungguhnya dapat dipahami, tatkala agama lantas bukan lagi menjadi urusan manusia dengan Tuhan semata, tetapi lebih merupakan persoalan sosiologis.

Dalam sejarah Eropa, agama pernah dipandang sumber masalah. Para "pemikir bebas" (*philosopes*) Eropa di zaman pencerahan (*aufklarung*) mengekspresikan ketersinggungan mereka pada "belenggu agama" lewat serangkaian gagasan "melawan arus". Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) misalnya, memandang negara seharusnya merupakan sebuah *contract social*, sehingga menggugurkan paradigma "kedaulatan Tuhan" dalam politik. "Daulat Tuhan" yang diartikan sebagai kekuasaan mutlak raja-raja, tak bisa diterima dalam kalkulasi alam pikiran manusia, *absurd* dan cenderung dipakai dalih bertindak sewenang-wenang. Demikian pula John Locke yang menyangsikan "daulat Tuhan", menyemaikan pemikiran baru model liberalisme, *civil society*, dan demokrasi.

Apakah seandainya agama tak ada, kondisinya akan lebih baik, sebagaimana dibayangkan John Lennon? Belum tentu juga. Kondisi umat manusia yang suka berperang, sudah ada sebelum agama-

agama besar muncul. Agama menawarkan panduan memahami dan menjaga eksistensi kemanusiaan manusia, lewat kehadiran teks-teks Ilahiah. Ia referensi umat manusia menemukan jawaban, terutama berkenaan keimanan. Agama pun menawarkan sistem etika bagi eksistensi kemanusiaannya.

Setelah agama-agama besar eksis, perang pun kerap terjadi, dengan tingkat kerusakan tak kalah mengerikan. Agama bisa menjadi motif berperang. Perang "atas nama agama" menjadi sesuatu yang tak dapat dihindari, tidak saja terkait saling klaim kebenaran yang diyakini, melainkan juga oleh efektifnya sistem simbol keagamaan yang menggerakkan pemeluknya tergerak berperang. Motivasi agama, biasanya lantas bercampur dengan realitas sosiologis dan politis di lapangan, sehingga "perang agama" lebih merupakan fenomena politis, ketimbang fenomena agama.

AGAMA SUBSTANSIF

JOHN Naisbitt dan Patricia Aburdene dalam *Megatrends 2000* membedakan agama dari dua sudut pandang: substansif (*spirituality*) dan teknis-kelembagaan (organisasional). Secara substansi, bicara soal keimanan dan sebagainya, tidak jadi soal. Paling jauh perbedaan wacana yang berbeda antaragama. Namun, biasanya, ada titik-titik temu yang bisa dikembangkan sehingga secara substansif agama bisa dikembangkan secara konstruktif. Islam, Kristen, dan Yahudi, tiga agama yang lahir di kawasan Timur Tengah, dalam beberapa hal memiliki kesamaan, di antara belantara perbedaan.

Yang jadi soal, tatkala agama melembaga. Naisbitt dan Aburdene menyinggung masa depan agama bukan terletak pada *religion institutions*, tetapi lebih ke yang substansi (spiritual). Slogannya yang terkenal "*spirituality yes, religion institutions no*". Keduanya terkesan gejala *New Age* di Barat yang menekankan *spirituality* non-kelembagaan. *New Age* lebih fleksibel dan "tanpa bentuk yang baku" sebagaimana agama formal. Bagi *New Agers*, formalisasi spiritualitas dalam agama yang melembaga dipandang kurang relevan, walaupun mereka tak mempersoalkan eksistensi agama formal.

Barangkali, makna spiritualitas akan tereduksi, sehingga formalisasi agama hanya akan menghambat kesejatian spiritualitas. Tak mengherankan apabila banyak *new agers* yang mengklaim mengambil saripati agama-agama (semacam sinkretisme), ke dalam ramuan spiritualitas baru yang dianggap lebih sejati. Lebih jauh, pandangan ini hendak mengkritik eksistensi agama-agama formal yang disibukkan teknis organisasional. Problemnya bukan terletak substansi agama, namun teknis-organisasionalnya. Dalam kasus Islam, kerap muncul pertanyaan kenapa satu Islam beragam kelompok teknis-organisasional? Teks pedoman agama ada yang monotafsir, tetapi ada pula yang multitafsir.

Tampaknya sudah menjadi desain dasar penciptaan manusia yang diturunkan ke muka Bumi diperlengkapi dengan kebebasan berkehendak. Di samping itu, juga ada fakta pluralisme, manusia bermacam-macam suku dan ras, sebagai *sunatullah*. Masing-masing punya kecenderungan dan wawasan pemikiran yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhinya menyikapi kehadiran agama. Lingkungan sosial juga berpengaruh besar bagi melebarnya perbedaan penafsiran atas ayat-ayat multitafsir. Pertimbangannya bukan lagi semata-mata individual, tapi juga sosial.

EKSKLUSIF DAN INKLUSIF

SECARA substansif, posisi agama tidak bisa disalahkan. Sebab, keyakinan agama (yang berbeda satu agama dengan lainnya) sudah menjadi sesuatu yang melekat. Agama merupakan sistem keyakinan yang melampaui dimensi logika dan rasionalitas manusia. Yang menjadi persoalan, tatkala penganut agama justru bersikap dan berpolah tingkah kontraproduktif sehingga lantas (ajaran) agama yang salahkan.

Maka, menjadi sangat penting bagi pemeluk agama menyikapi dan membawakan agamanya di komunitas umat manusia yang belum tentu agamanya sama dengan dirinya. Ada dua model penyikapan: (1) eksklusif, mengistimewakan kelompoknya ke fanatisme yang berlebihan, cenderung mempersoalkan dan menggugat keya-

kinan lain, baik yang masih dalam satu agamanya, maupun, apalagi agama lain; (2) inklusif: intinya kebalikannya yang eksklusif. Yang inklusif menyadari hakikat pluralisme sebagai *sunatullah*, toleran, tidak menyalahkan kelompok lain secara diametral (bagiku agamaku, bagimu agamamu). Dalam konteks kekinian, kalau persoalannya ialah makin jauhnya rasa kedamaian, maka sikap inklusif dalam beragama amat dibutuhkan.●

V

NURCHOLISH MINUS KONVENSI

[2003]

PASCA-ORDE BARU, DI TENGAH INGAR-BINGAR EUFORIA POLITIK, CAK NUR TAK IKUT-IKUTAN MENYEMPLUNGKAN DIRI KE PARTAI. TETAPI, KALI INI UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA, CAK NUR DAN "TIM SUKSESNYA" HARUS BERGERAK EKSTRA KERAS MEMPEROLEH DUKUNGAN PARTAI. MEMANG, KATANYA, BEBERAPA PARTAI (KHUSUSNYA PARTAI GOLKAR) SEDANG MENJAJAKI KEMUNGKINAN PENCALONAN CAK NUR SEBAGAI PRESIDEN.

- KONSEKUENSI KESEDIAAN CAK NUR

Demiliterisasi dan Damai Aceh

KOMPAS, 25 FEBRUARI 2003

DEMILITERISASI MERUPAKAN ISTILAH yang populer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) belakangan ini. Maklum, sejak 9 Februari 2003, tepatnya dua bulan setelah ditandatangani Kesepakatan Penghentian Permusuhan di Geneva, perkembangan proses damai di Aceh antara pihak pemerintah RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) memasuki fase demiliterisasi dan fase membangun saling percaya.

Dalam fase demiliterisasi, GAM meletakkan senjata, mengumpulkannya di tempat-tempat yang ditentukan. Sementara TNI akan merelokasi pasukannya dan mengubah posisi dari ofensif menjadi defensif. Untuk melaksanakan dan meng-awasi realisasi di lapangan, telah dibentuk Komite Keamanan Bersama (KKB), diketuai Mayjen Thanongsak Tuvinun dari Thailand. Komite ini dibentuk Pemerintah RI, GAM, dan *The Henry Dunant Centre* (HDC).

Demiliterisasi merupakan tahap krusial dalam proses menuju damai di Aceh. Kedua belah pihak (GAM dan RI) harus mampu membuktikan kesungguhannya di lapangan. Bila pada fase sebelumnya telah dibangun rasa saling percaya, maka fase selanjutnya dimintakan bukti. Inilah yang disebut tahap krusial. Belum lagi ditambah masih adanya jurang perbedaan substansif yang dipahami kedua pihak.

GAM tampaknya masih kurang rela memasukkan proses perdamaian dalam kerangka otonomi khusus Provinsi NAD. Berbagai pernyataan dan aktivitas GAM selama ini, mengesankan, pihak-

nya memanfaatkan waktu untuk konsolidasi. Sementara pihak RI memandang proses damai di Provinsi NAD bukan menuju kemerdekaan, tetapi dalam kerangka keutuhan wilayah RI.

PERBEDAAN penafsiran antara pihak GAM dan pemerintah seharusnya tidak menjurus ke kondisi yang kian memburuk di lapangan. Untuk tetap menjaga proses perdamaian bisa dipastikan berlangsung, maka perbedaan pendapat itu tidak usah diperuncing sehingga mempengaruhi proses perdamaian di lapangan. Di sinilah sebenarnya peran dan fungsi mediator, dalam hal ini pihak HDC, betul-betul diuji.

Pihak HDC harus aktif menjalankan tugasnya sebagai mediator agar perbedaan pandangan makin menipis, untuk akhirnya diharapkan perbedaan itu bisa dhilangkan. Proses damai di lapangan masih terus diikuti proses perundingan di tingkat elite Pemerintah RI dan GAM. Maka, dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan semua pihak untuk menumbuhkan kesepahaman sehingga proses perdamaian di Aceh bisa dipastikan makin meningkat sesuai yang diagendakan bersama.

Proses perdamaian Aceh harus selalu dipastikan dalam bingkai otonomi khusus, sehingga ujungnya bukan pemisahan diri. Dalam kerangka itu, tak boleh lagi mengedepankan pendekatan kekerasan (militeristik), melainkan mematuhi skenario damai. Sebagaimana diakui Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, konflik Aceh bukan sekadar persoalan separatisme semata, tetapi juga ada fenomena social discontent di sana. Ini harus dipahami, TNI dan Polri ada di lapangan. Memang berat menghadapi manuver politik dan militer GAM, tetapi keputusan pemerintah pusat tetap harus dipatuhi dan dijalankan secara baik.

Lewat penandatanganan Geneva, proses perdamaian di Aceh menunjukkan perkembangan signifikan. Ada kesepahaman yang tak bisa ditolak kedua pihak, bahwa *social discontent*, berupa keterbelakangan, kemiskinan, dan ketertinggalan pembangunan di Aceh harus diakhiri. Inilah modal utama pembangunan rasa saling

percaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berlarut-larut di Aceh. Seharusnya modal inilah yang terus dikembangkan, dan jalan damai itu merupakan syarat mutlak terciptanya kondisi sosial-politik dan ekonomi Aceh secara lebih baik dan kokoh.

JALAN damai menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memulihkan kondisi Aceh yang tercabik konflik bersenjata. Semua pihak berharap agar ujung semua itu perdamaian abadi. Kendati jalan damai masih berliku, semua pihak seharusnya tetap optimistis, ia bisa diwujudkan. Melalui komitmen bersama, tidak mustahil proses perdamaian di Aceh segera terlaksana. Sehingga diharap Aceh bangkit dari keterpurukan mendalam pasca-konflik berlarut-larut dan segera melakukan percepatan pembangunan.

Evaluasi pemerintah setelah dua bulan pasca-ditandatanganinya Kesepakatan Penghentian Permusuhan, menunjukkan kehidupan masyarakat membaik, menuju tingkat kehidupan yang normal. Intensitas kekerasan menurun. Tercatat, sebelum 9 Desember 2002, terjadi 9-12 kasus tindak kekerasan, menjadi rata-rata 2-3 kasus per hari. Jumlah korban meninggal pun menurun. Sebelum 9 Desember 2002, jumlah korban meninggal 250 orang, sementara sebulan setelah itu 26 orang (*Kompas*, 11/2/2003).

Proses perdamaian di Aceh prinsipnya harus disegerakan. Selain demiliterisasi, diperlukan situasi psikologis guna membangun dialog seimbang yang lebih baik. Arogansi masing-masing harus ditekan demi terwujudnya penyelesaian konflik yang *win-win solution*. Tugas berat ke arah itu tidak saja menggelayuti Pemerintah RI dan GAM, tetapi juga pihak luar yang ditunjuk menjadi mediator dan fasilitator perdamaian di Aceh. Pembangunan kepercayaan (*trust*) harus berjalan setapak demi setapak. Bila sudah dicapai tingkat keberhasilannya secara signifikan, maka ia mulai bisa dirasakan sebagai modal yang amat berharga.

SEBAGAI BANGSA beradab, kita tidak menghendaki perang. Perang, di mana pun menyebabkan banyak kerugian fisik

dan nonfisik, tidak ada pembangunan, melainkan penghancuran. Di Aceh, persoalannya masih dalam tingkat bagaimana "perang" segera diakhiri melalui kesepakatan damai. Proses perdamaian pasca-demiliterisasi diharapkan berjalan baik. Setelah itu, proses pembangunan dapat diwujudkan, sehingga kelak, tantangan utamanya bukan perang, tetapi mengentaskan rakyat Aceh dari ketertinggalan dan kemiskinan pasca-konflik berkepanjangan.●

Kontroversi Pasal 19 Draf RUU TNI

KOMPAS, 8 MARET 2003

JAJARAN TNI telah menyelesaikan draf RUU TNI yang cukup kontroversial. Ada usulan, terkait dengan apa yang dipaparkan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, walaupun kewenangan pengarahan kekuatan TNI berada di tangan presiden, dalam keadaan mendesak Panglima TNI harus diberi kewenangan menggunakan kekuatan TNI. Mekanismenya, Panglima TNI tinggal melaporkan langkahnya kepada presiden dalam waktu 1 x 24 jam. Dalam draf RUU, usulan ini dicantumkan di Pasal 19. Endriartono meyakinkan pasal tersebut tak akan digunakan untuk melakukan kudeta. Pasal tersebut semata-mata mengandung maksud penanganan situasi kedaruratan (*Kompas*, 28/2/03). Dijelaskannya pula, kewenangan tersebut, baru dilakukan apabila keadaannya benar-benar darurat, dan presiden tak dapat, atau tak sempat dilapori.

PASAL kontroversial (Pasal 19) draf RUU TNI itu selengkapnya, "(1) Dalam keadaan mendesak, di mana kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa terancam, Panglima dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai langkah awal guna mencegah kerugian negara yang lebih besar. (2) Penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilaporkan kepada presiden paling lama dalam waktu 1 x 24 jam." Pasal

terobosan dari jajaran TNI tampak rancu dengan Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi, "Kewenangan pengerahan kekuatan TNI berada pada presiden."

Titik tolak perdebatan Pasal 19, secara substantif setidaknya terletak pada tiga persoalan. *Pertama*, bagaimana kalau dikaitkan dengan paradigma supremasi sipil. *Kedua*, apa yang dimaksud keadaan mendesak dan siapa yang memutuskan. *Ketiga*, apa yang dimaksud dengan keselamatan segenap bangsa terancam, dan siapa yang menentukan kesimpulan demikian.

Dilihat dari paradigma supremasi sipil, jelas pasal ini "bermasalah", mengingat militer secara substantif alat negara yang aktor-aktor pengambil kebijakannya ditentukan proses demokrasi. Dalam soal pemutusan kebijakan berskala luas, TNI tak bisa memutuskan kebijakannya sendiri, mengingat dalam struktur dan sistem kenegaraan, posisi TNI tidak berada dalam ranah "*elected politician*" (yang terpilih dalam proses pemilu demokratis).

Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Drat RUU TNI menegaskan, yang dimaksud penggunaan kekuatan TNI dalam keadaan mendesak adalah tindakan awal dalam situasi, dimana keputusan harus segera diambil berdasarkan pertimbangan ruang, waktu dan sasaran, dengan perkiraan risiko yang dihadapi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik TNI. Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kerugian moril maupun materiil yang disebabkan oleh pelanggaran wilayah/kedaulatan negara, kerusuhan massal, bencana alam, dan lain-lain.

Penjelasan demikian masih cenderung menempatkan TNI sebagai institusi penafsir utama ynang subyektif. Karena itu, bila pasal ini meluncur mulus, ia akan bertentangan dengan kaidah *objective civilian control* Samuel Huntington dalam konteks hubungan sipil-militer. Maka, secara ekstrem boleh dibilang, usulan TNI (Pasal 19), tergolong nekat dan "melawan arus". Selain "melawan arus" kaidah supremasi sipil, ia juga bersinggungan dengan desain tata politik nasional sebagaimana tertuang dalam Konstitusi (UUD 1945) dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 10 UUD 1945 (amandemen keempat) menyatakan presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Maka, presiden seharusnya tak bisa dilangkahi keputusannya oleh Panglima TNI. Sebenarnya, Pasal 16 draf RUU TNI sudah sinkron dengan hal tersebut, apalagi manakala dikaitkan juga dengan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pertahanan Negara No 3/2002 yang intinya menegaskan bahwa presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan TNI.

Dalam pengerahan kekuatan TNI menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan presiden itu harus mendapat persetujuan DPR. Disebutkan, dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, presiden dapat langsung mengerahkan pasukan TNI dengan syarat dalam waktu paling lamat 2 x 24 jam mengajukan persetujuan kepada DPR. Jika DPR tidak menyetujuinya, presiden harus menghentikan pengerahan operasi militer.

TERKAIT dengan kekuasaan presiden dan hubungan politiknya dengan DPR, sebuah keputusan politik untuk memberikan payung hukum ke pihak TNI, memang bisa memakan waktu. Persoalan inilah yang digelisahkan kalangan TNI sehingga muncul ide sebagaimana dituangkan ke Pasal 19. Tampak, situasi psikopolitik TNI prihatin mendalam menanggapi arus perubahan yang banyak mereduksi peran mereka.

Pasal 19 RUU TNI merupakan tawaran maksimal yang cukup ekstrem. Tidak mengherankan bila segera disambut ketidaksetujuan banyak kalangan. Mereka berargumen, pasal itu identik "kudeta militer" yang dilegalkan UU. Kendati pihak TNI berjanji menjamin pasal itu tak akan disalahgunakan, menolak disebut sebagai "pasal kudeta", tetap saja memicu kontroversi. Masalahnya tak lepas faktor *trust* (kepercayaan) masyarakat yang tengah kendur. Jaminan apapun, cenderung kurang dipercaya publik mengingat psikopolitiknya demikian. Pemerintah selayaknya meninjau ulang usulan tersebut. Kalau tetap lolos, tugas DPR merevisinya.●

Balada Politik Lokal

KOMPAS, 24 APRIL 2003

PERISTIWA politik dramatik tingkat lokal terjadi. Gubernur Lampung terpilih, M Alzier Dianis Thabrani yang tersangka dan berstatus tahanan, bak film *action* dipaksa naik helikopter yang disiapkan membawanya ke Mabes Polri dari Lapangan Markas Polda Lampung. Ia diduga pelaku tindak pidana kejahatan penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan korupsi. Bila bukan gubernur terpilih, peristiwa itu biasa-biasa saja. Tetapi kali ini, tidak biasa.

Kasus Alzier, bisa jadi satu dari sekian kasus di tingkat lokal di mana tokoh politik terpandang tiba-tiba terjerat pasal kriminal. Kita pun jadi kerap dihadapkan drama demi drama ditahannya politisi lokal oleh pihak berwajib. Belum lekang ingatan peristiwa ditangkapnya Mochamad Basuki dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Surabaya yang bersama wakilnya Ali Burhan, ditahan di Rutan Kelas I Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka diduga korupsi Rp 1,2 miliar (meski audit BPKP senilai Rp 22,5 miliar) di DPRD Surabaya.

Kasus-kasus kriminal politisi yang menjadi kecenderungan dewasa ini, bisa disaksikan dramatikanya oleh masyarakat lewat media massa. Kini tidak ada lagi polemik apakah tersangka kasus korupsi perlu ditayangkan wajahnya di televisi atau tidak. Bahkan detik-detik penangkapan mereka pun disorot habis media. Kasus Alzier dan Basuki sekadar "puncak gunung es" dari beragam peristiwa serupa yang tak muncul ke permukaan, alias banyak yang tak ketahuan. Mengapa peristiwa-peristiwa demikian bermunculan?

PASCA-Orde Baru, politik lokal sangat dinamis. Ini bisa dijelaskan, setidaknya lewat tiga hal. *Pertama*, potensi konflik ter-

buka mudah terjadi, kejadiannya tak bisa ditutup-tutupi lagi oleh kekuatan politik pusat. Pada zaman Orde Baru, jangankan konflik politik, konflik sosial pun "tidak sampai ke permukaan". Itu disebabkan oleh kuatnya "negara" dalam mengontrol *tetek bengek* urusan politik tingkat lokal hingga nasional, secara sentralistik.

Kedua, mengemukanya fenomena "desentralisasi korupsi". Meminjam sinyalemen Ketua *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Teten Masduki, kondisi pasca-Orde Baru, tak hanya struktur kebijakan sentralistik yang berubah, seiring otonomi daerah (desentralisasi), tetapi juga pola korupsinya. Bila dulu korupsi terpusat, bisa dipilah ke lingkup "istana", kini polanya menyebar di daerah-daerah. Setidaknya lebih ekspresif.

Ketiga, dampak eforia politik yang tak diimbangi pemahaman akan hakikat berpolitik yang benar. Berpolitik dianggap sama dengan berbisnis. Mochamad Basuki misalnya, terang-terangan bilang, "Kalau mau kaya jadilah politisi!" Tentu ungkapan demikian aneh, mengingat profesi politisi berbeda dibanding pengusaha. Kalau politisi kaya tidak wajar, bisa dipastikan dari korupsi. Hakikat berpolitik menyejahterakan rakyat, sejatinya tidak boleh ditumpangi kepentingan memperkaya diri.

HIPOTESIS MENGAPA perilaku korupsi mengemuka bisa terus berkembang. Kalau demokrasi dipandang proses dimana *trial and error* disikapi dengan perbaikan dan tidak akan mengulang kesalahan, maka itu harus terus diupayakan. Masyarakat dan elite akan bercermin, hal-hal yang keliru dan salah selama ini tak pantas dipertahankan. Proses penegakan hukum harus tidak memandang bulu. Siapa saja, entah itu presiden, anggota DPR, konglomerat, bila melanggar hukum harus diproses hukum.

Peristiwa-peristiwa korupsi pelajaran agar kelak tak terulang. Kalau fungsi *checks and balances* berjalan baik, peluang politisi melakukan praktik menyimpang pun bisa mudah digagalkan. Kini, kondisi perpolitikan lokal masih diwarnai cerita-cerita ironis. Keterbatasan sumber daya manusia dipadu rendahnya moralitas politisi,

ditengarai memicu perilaku korputif di mana-mana.

Tugas masyarakat mengawasi para pemimpin lokalnya, mestinya juga demikian dengan partai-partai. Partai bertanggung jawab dalam proses sirkulasi elite secara sistematis, agar yang muncul yang berkualitas. Di sisi lain, tantangan semua pihak adalah menghilangkan kultur politik uang yang terasa semakin menjadi-jadi. Ketika mentalitas permisif dominan, politik uang menyubur. Sayang kekritisan masyarakat kerap dilemahkan oleh mental mereka sehingga mudah bertekuk lutut di hadapan politik uang.

Dalam skup lokal, kendala demokrasi tampak masih demikian kuatnya. Corak budaya feodal masih sangat kental. Memang pusat-pusat *civil society* tengah bergerak ke daerah-daerah, namun sejauh ini, dalam banyak kasus, masih belum optimal. Sementara kalangan DPRD dan partai tak berdaya menangkal kejahatan-kejahatan sistematis dalam politik, termasuk yang berkedok kepentingan pembangunan daerah. Format-format korupsi baru pun menyeruak. Desentralisasi politik perlu dibarengi desentralisasi korupsi, sehingga perwujudan pemerintahan yang bersih dan baik, diharapkan justru hadir dari daerah-daerah.●

Konsekuensi Kesediaan Cak Nur

KOMPAS, 7 MEI 2003

CENDEKIAWAN Nurcholish Madjid alias Cak Nur akhirnya menyatakan kesediaannya sebagai calon presiden. Hal itu diungkapkannya pada jumpa pers di Universitas Paramadina, Jakarta. Pendekatan yang dilakukan *platform*, bukan diri pribadi. *Platform* didahulukan, bukan orang. “Sehingga saya tetap tulus mengharapkan bila ada seorang Kennedy itu lebih baik. Artinya, umurnya masih muda, baru 40-an tahun, mempunyai wawasan, mempunyai karisma. Dan kalau bisa, kaya, supaya bisa membiayai sendiri kampanyenya. Sebab, kalau tidak, akan terjerumus *money*

politics," ujarnya seperti dikutip *Kompas* (28/4/2003).

Lepas sudah rasa *geregetan* yang selama ini menyelubungi pikiran dan perasaan para pendukungnya. Mereka rindu sosok pemimpin yang tak sekadar "pemimpin", tetapi juga "guru". Dua elemen itu melekat pada sosok Cak Nur. Kerinduannya itu seolah terobati, saat Cak Nur menyatakan kesediaannya, meski belum jadi presiden. Ini baru langkah awal baginya melangkah untuk berkontestasi merebut kursi kepresidenan pada pemilihan presiden langsung 2004. Kesediaan Cak Nur cukup fenomenal mereprsentasikan sosok nonparpol.

Sebagai intelektual Muslim, Cak Nur cukup berpengaruh. Media massa kerap menyebutnya "lokomotif pembaruan pemikiran Islam Indonesia". Pidatonya di awal tahun 1970-an, saat masih menjadi Ketua Umum PB HMI, dijadikan titik pijak pembaruan. Kontroversi berkembang. Pemikiran Cak Nur dipandang "terlampau modern". Istilah "sekularisasi" dimasalahkan. Bahkan, dalam batas tertentu, Cak Nur, belakangan juga Abdurrahman Wahid, dituduh agen Zionis. Sebuah tuduhan yang mengada-ada.

BEBERAPA KELEMAHAN

DI lain pihak Cak Nur kian dikenal sebagai pemikir Islam yang inklusif. Kini, Cak Nur relatif sudah lebih bisa diterima "semua kalangan". Ia tumbuh dan berkembang dari varian santri yang berwawasan kebangsaan. Berbagai tulisannya mengetengahkan wacana-wacana keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan.

Berbeda dengan Abdurrahman Wahid yang "Islam tradisionalis", Cak Nur kerap disebut lokomotif pemikiran bercorak "Islam neo-modernis". Cak Nur tak memimpin sebuah ormas Islam besar, sebagaimana Gus Dur figur sentral NU. Cak Nur bergerak bukan di tataran massa, tetapi di ranah gagasan, konsep, dan memfokuskannya ke segmentasi kelas menengah perkotaan. Inilah yang menjadi "kekurangan" Cak Nur. Dia kurang dikenal di *grass root*.

Kelemahan lain, dia tak punya partai. Pada pasca-Orde Baru, di tengah ingar-bingar euforia politik, Cak Nur tak ikut-ikutan me-

nyemplungkan diri ke partai. Tetapi, kali ini untuk mencapai tujuannya, Cak Nur dan "tim suksesnya" harus bergerak ekstra keras memperoleh dukungan partai. Memang, katanya, beberapa partai (khususnya Partai Golkar) sedang menjajaki kemungkinan pencalonan Cak Nur sebagai presiden.

Saling ketergantungan terjadi. Satu sisi Cak Nur membutuhkan kendaraan, dukungan formal partai. Sisi lain, partai sedang mencari kandidat yang pantas untuk dijagokan sebagai capres. Realitas politik kelak yang menentukan, apakah *platform* Cak Nur bisa bertemu kepentingan dengan partai. Kalaupun dianggap kelemahan pula, selama ini Cak Nur belum berpengalaman sebagai "orang dalam sistem". Ia selalu di luar sistem, tak pernah menjadi pemimpin politik formal, atau setidaknya masuk di lingkaran birokrasi kekuasaan.

Cak Nur tokoh "luar sistem", meskipun ketokohannya tak berkurang hanya karena disejajarkan tokoh-tokoh "dalam sistem". Pada 1998, Cak Nur bersama tokoh lain berhasil mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tetapi, setelah itu, apa pun alasannya, Cak Nur tak ikut "berebut kekuasaan". Cak Nur memilih menjadi "tukang kritik" yang cerdas.

PERSAINGAN POLITIK SANTRI?

TAHUN 1990-an, Abdurrahman Wahid menulis kolom di majalah *Tempo*, "Tiga Pendekar dari Chicago". Yang ia maksud Nurcholish Madjid, M Amien Rais, dan Ahmad Syafii Maarif. Kini, dua "Pendekar Chicago" sudah menyatakan siap turun gelanggang. Gus Dur sendiri juga siap maju. Kalaupun Syafii tak tampil, kompetisi politik Cak Nur versus Amien di tengah kandidat lain, pun cukup menggambarkan hal tersebut. Ini bisa menjadi titik lemah, juga sebaliknya dari sisi dinamika politik santri.

Cak Nur dan Amien dari satu varian sama: Islam modernis. Karenanya, massa pemilih santri akan terpecah untuk memilih salah satunya, sehingga kontraproduktif. Dalam konteks inilah, pilihan Amien dan Cak Nur *absurd*, apabila dikaitkan pilihan keduanya menjadi orang nomor satu, bukan nomor dua. Masing-masing akan

mencari pasangan untuk kemudian saling berlaga. Terlepas kalkulasi seperti itu, kesediaan Cak Nur, lebih baik ditempatkan dalam kerangka demokratisasi.

EPILOG

CAK Nur yang cendekiawan memang lebih bayak bergelut di wilayah pemikiran. Kelak ia dituntut membuktikan, *platform*-nya bisa dijalankan. Cak Nur juga diharapkan tampil lain dibanding Dus Dur. Kegagalan Gus Dur yang sempat memunculkan kesimpulan mengada-ada, seorang santri-cendekiawan pasti akan gagal memimpin bangsa, soalnya suka "aneh-aneh", harus ditepisnya.

Semua sosok seyogyanya bersedia muncul berebut dukungan partai untuk bisa menjadi kandidat presiden. Ini wajar dalam demokrasi. Dari sisi kemanfaatan, rakyat bisa melihat kejelasan sejak awal, siapa saja tokoh yang ditimbang untuk dipilih. Andaipun Cak Nur jadi presiden, tidaklah otomatis dia langsung menjadi "juru selamat". Ia dituntut kependekarannya melalui implementasi *platform* yang dibawanya. Itu tak mudah.●

Nurcholish Minus Konvensi

KOMPAS, 2 AGUSTUS 2003

TERJAWAB SUDAH kebimbangan Nurcholish Madjid (Cak Nur) terkait jadi-tidaknya ikut konvensi calon presiden Partai Golkar. Nurcholish urung. Sebagaimana diberitakan (*Kompas*, 31/7/2003), pertimbangannya mundur sudah dipikirkan, bahwa dia melihat adanya kesenjangan nilai dan etika antara *platform* dan prinsip yang dipegangnya dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik Konvensi Golkar.Kondisi ini diperkuat majunya Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dalam konvensi. Setelah menarik diri dari konvensi, Nurcholish berharap mendapat kendaraan

politik dari "aliansi partai-partai politik" sebagai kekuatan politik alternatif.

SAAT resmi memutuskan "membeli tiket" pencalonan melalui konvensi alasan Nurcholish, perekrutan terbuka melalui konvensi merupakan gagasan yang selaras prinsip demokrasi dalam proses reformasi politik yang berlangsung melalui proses meritokratik dan prestasi, dan pola afiliasi yang hanya bersifat kontrak yang rasional dan terbuka, bukan afiliasi emosional yang lebih tertutup (*Kompas*, 1/7/2003). Tapi, publik segera meresponsnya dalam dua pendapat berbeda.

Pendapat pertama, yang terjadi bukan "Cak Nurisasi" Partai Golkar, tetapi sebaliknya. Artinya, sosok Nurcholish sebagai cendekiawan independen yang "moralis" akan gagal membalikkan citra "kebobrokan" Golkar atas masa lalu. Nurcholish hanya akan termanfaatkan sebagai, meminjam Eep Saefulloh Fatah "mesin cuci" Golkar. Maka akan terjadi "Golkarisasi Cak Nur". Pihak ini "tak bisa membayangkan" bagaimana kelak Cak Nur berkampanye, memakai seragam partai, mengepalkan tangan sambil berteriak "hidup Partai Golkar". Semakin tragislah citranya. Pendapat kedua mengatakan sebaliknya: tak ada masalah dengan semua itu, politik tak usah dibebani citra moral. Yang penting realitas politik dihadapi dengan keberanian dan risiko.

Namun, pendapat pertama tampak lebih kuat. Publik dan pemerhati politik menyayangkan langkah politik Cak Nur ikut konvensi. Cak Nur tergesa-gesa memutuskan mendeklarasikan kesiapannya ikut konvensi. Pertimbangan waktu sebenarnya tampak rasional-kalkulatif: tampaknya "tidak ada jalan lain" yang bisa diharapkan menjadi kendaraan politik Nurcholish, selain Partai Golkar. Hal ini bisa dipahami mengingat resistensi partai ini atas Nurcholish paling kecil. Apalagi, UU Pilpres belum terketahui pasti, sementara yang berkembang syarat pencalonan partai politik atau gabungannya yang berhak mencalonkan presiden ialah yang memperoleh suara 20 persen.

Dalam UU Pilpres Pasal 5 Ayat 1 disebutkan, pasangan calon presiden atau wakil presiden diajukan parpol atau gabungan parpol. Lalu Pasal 5 Ayat 4, pasangan calon sebagai yang dimaksud Ayat 1 hanya dapat diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15 persen perolehan kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Tetapi, rumusan persyaratan pengajuan capres seperti yang tercantum pada Pasal 5 Ayat 4 itu baru berlaku pada Pemilu 2009 dan seterusnya.

Sedangkan untuk Pemilu 2004 mendatang telah diatur khusus aturan peralihan Pasal 103 UU ini. Pasal dimaksud berbunyi, "khusus untuk Pemilu 2004 parpol atau gabungan parpol dapat mengajukan calon presiden atau wakil presiden yang memenuhi persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya tiga persen dari jumlah kursi DPR atau lima persen dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR".

Artinya, semua parpol kecil maupun besar dalam Pemilu 2004 bisa mengajukan pasangan capres dan wapres. Meski parpol kecil tidak memperoleh kursi di DPR, tetapi setelah bergabung dengan parpol lain. secara akumulasi perolehan suara sah secara nasional, parpol atau gabungan parpol itu dalam pemilu anggota DPR mencapai lima persen tetap bisa mengajukan pasangan capres dan wapres. Hal itu pasti dijadikan pertimbangan Nurcholish. Karena itu bisa dipahami, pihaknya berharap pada aliansi partai-partai politik lain, di luar Partai Golkar.

TANPA Nurcholish, Konvensi Partai Golkar tetap berjalan. Beberapa nama sudah muncul: Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Wiranto, Akbar Tandjung, dan Jusuf Kalla. Konvensi yang diketuai Oetojo Oesman tak membatasi penjaringan sebatas kader-kader utama saja, tetapi juga membuka kesempatan bagi lainnya. Konvensi itu, terlepas dari aneka tafsir politik atasnya, bagaimanapun akan menjadi eksperimentasi politik menarik. Tidak mengherankan bila jalannya konvensi mendapat perhatian banyak kalangan.

Dengan cara menggelar konvensi, Partai Golkar sedikitnya meraih tiga keuntungan. Pertama, pihaknya tetap masih akan dipandang sebagai kekuatan politik besar dan signifikan, di tengah konstelasi politik nasional. Dengan kata lain, faktor Partai Golkar, bukan main-main. Kedua, kesempatan bagi partai ini untuk "membersihkan diri" dari tuduhan dan beban "dosa sejarah". Ketiga, upaya ini dilakukan untuk menarik simpati publik: bahwa pihaknya berupaya membuktikan dirinya mendorong proses demokrasi politik dengan menyelenggarakan seleksi kepemimpinan lewat prosedur konvensi – terlepas dari kecurigaan yang diarahkan padanya.

Bagi Nurcholish, ikut atau tidak ikut Konvensi Partai Golkar, sebenarnya tetap menanggung segala konsekuensi politik atas deklarasi kesediaan dirinya di pinang partai politik. Begitu mengatakan bersedia dicalonkan diri sebagai presiden, lalu aktif melakukan aktivitas politik di lapangan, pamor dan citranya sebagai moralis nonpartisan otomatis tereduksi. Banyak yang menyayangkan langkah politik Nurcholish, tetapi dengan pertimbangan "matang", pihaknya tetap melenggang. Nurcholish sudah "telanjur basah".

Memang ada beban di pundak Nurcholish yang tak bisa disembunyikan, saat bersedia ikut konvensi, yang lalu dibatalkan. Beban itu, akibat masih melekatnya stigma Partai Golkar sebagai turut bertanggung jawab atas kesalahan masa lalu. Ungkitan atas pertanyaan "peran masa lalu" oleh publik, adalah beban sekaligus tantangan bagi Nurcholish untuk menetralisir.

Bila Nurcholish gagal menjelaskan posisi dan kontrak politiknya dengan Partai Golkar – terutama di dataran pragmatis, bukan wacana – maka "kelemahan" ini akan disambar pesaing politiknya. Politik kadang kejam dan mengabaikan soal-soal krusial di wacana moral. Inilah dilema Nurcholish, saat ia sudah menapaki level "bapak bangsa", yang idealnya tak perlu berebut jabatan (kekuasaan).

Ada tiga tantangan sekaligus bagi Nurcholish bila tetap ikut konvensi: (1) internal Partai Golkar; (2) reli politik dengan kandidat lain di dalam dan di luar konteks konvensi; dan (3) fluktuasi popularitasnya di mata publik. Internal Partai Golkar plural, Nurcholish

bisa memanfaatkan jaringan politisi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tetapi belum tentu bisa didukung sepenuhnya, bila ada pertimbangan krusial yang harus mengalahkannya. Ia juga berlomba dengan banyak kandidat di dalam dan luar Partai Golkar.

Yang paling krusial, penilaian publik atas manuver Nurcholish. Apabila manuver yang dibikin mengesankan, popularitasnya tentu naik. Sebaliknya, bila salah melangkah, popularitas bisa *anjlok*. Dengan menarik diri dari konvensi, Nurcholish tampak memilih menjaga ritme popularitas atas dirinya. Nurcholish telah meninggalkan Partai Golkar. Harapannya yang tertuju pada aliansi partai-partai politik bisa dipahami, mengingat itulah alternatifnya. Tapi, apakah aliansi partai-partai politik itu menghendaki Nurcholish? ●

Teror atas Demokrasi

KOMPAS, 7 AGUSTUS 2003

JAKARTA kembali digoncang bom, kali ini menimpa Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/8) siang. Ada korban meninggal dan luka-luka. Teror kali ini langsung memperoleh perhatian banyak kalangan, dari aparat keamanan hingga pejabat negara. Tidak hanya di dalam negeri, kalangan luar negeri juga menyimak teror itu.

Berbagai komentar merebak mengutuk aksi teror di jantung Jakarta itu. Pelaku peledakan bom itu belum dipastikan. Di balik itu, tampak pesan khusus bermotif politik. Tak saja bom meledak saat Jakarta masih menggelar ST MPR, tetapi juga menjelang Pemilu 2004. Tidaklah mungkin teror lepas sama sekali dengan aura politik. Karena itu pantaslah bila meledaknya bom di JW Marriott bagian dari teror atas demokrasi.

BULAN Januari 1941, setelah memenangkan jabatan presiden untuk masa bakti ketiga, Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) menyampaikan pidato tahunan di depan Kongres, di tengah

situasi dunia yang suram. Pada kesempatan itu, berkaitan dengan demokrasi, Roosevelt menyebut adanya empat kebebasan pokok manusia: (1) kebebasan berbicara dan berpendapat di mana pun di dunia; (2) kebebasan setiap orang beribadat kepada Allah dengan caranya sendiri di mana pun di dunia; (3) bebas dari kekurangan (ekonomi); (4) bebas dari rasa takut. Demokrasi mensyaratkan hal itu dan semua khalayak maklum adanya.

Teror, terkait penciptaan rasa takut, yang jelas merusak kebebasan pokok manusia. Bila teror terjadi, dipastikan ketakutan akan muncul sehingga dalam konteks tertentu, bisa merusak tiga jenis kebebasan yang lain. Takut bicara, kebebasan beribadah terganggu, juga punya efek buruk atas perbaikan ekonomi secara luas. Teror yang terus terjadi jelas mengganggu sendi-sendi kebebasan dalam berdemokrasi. Dengan demikian terorisme adalah musuh utama demokrasi. Demokrasi politik tidak akan muncul bila yang berkembang adalah teror-teror politik.

Demokrasi membutuhkan tingkat keadaban (*civility*) tinggi, di mana nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan, ditegakkan. Kompetisi politik yang terbingkai dalam alur utama sistem demokrasi, menyediakan aturan main yang harus direspons dengan etika politik tingkat tinggi. Kekuasaan adalah tujuan antara yang hendak dicapai, dan seharusnya bukan tujuan utama. Bila kekuasaan dipandang sebagai tujuan utama, akan muncul kecenderungan kuat untuk menggasak nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam demokrasi, dan muncullah penghalalan segala cara: termasuk menyelenggarakan teror di tengah kemelut politik.

TEROR, terutama dalam bentuk aksi-aksi kekerasan fisik, dikhawatirkan banyak pihak berkait pelaksanaan Pemilu 2004. Kekhawatiran itu, bisa dipahami mengingat Pemilu 2004 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu 1999 dilangsungkan secara aman. Tetapi kesuksesan itu belum tentu akan bisa diulangi kembali pencapaiannya di tahun 2004, bila teror politik terus merebak. Tidak satu kali ini saja teror politik terjadi. Yang masih hangat ialah

meledaknya bom di lingkungan Gedung MPR/DPR, Jakarta, dan pelakunya belum tertangkap.

Potensi kekerasan dalam Pemilu 2004, tampak lebih besar dibanding Pemilu 1999. Peserta reli politik 2004 makin berderet panjang, sebab yang dipilih kelak bukan hanya anggota DPR di pusat dan daerah, tetapi juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), paket presiden, dan wakil presiden secara langsung.

Perbincangan politik di tingkat nasional, kini mulai mengerucut ke persoalan pilihan presiden secara langsung. Nama-nama kandidat satu per satu bermunculan. Ini satu tradisi yang baru dimulai, dalam rangka perubahan sistem politik secara lebih demokratis pasca-Orde Baru. Persaingan politik akan terus mengerucut, dan bukan tidak mungkin diwarnai merebaknya kasus kekerasan dan teror politik-baik di tingkat nasional, maupun lokal. Inilah yang harus diwaspadai dan diantisipasi sungguh-sungguh.

Jelas, yang dituntut pertama kali untuk itu ialah profesionalisme aparat keamanan (pihak kepolisian). Bisa dipahami kondisi mereka terbatas, namun seharusnya tidak selalu dipakai alasan untuk teledor atas hal-hal yang mampu mencederai keamanan publik. Pihak aparat keamanan makin dituntut tidak eksklusif, mengobyekkan masyarakat, sebaliknya harus inklusif, sebab bagian dari masyarakat yang bertindak sebagai pengayomnya.

Juga patut dipertanyakan kinerja lembaga intelijen nasional, guna menangkal aksi-aksi teror politik. Tugasnya memang berat. Apalagi kondisi politik yang demikian terpolarisasi dan dengan tingkat dinamika (perbedaan kepentingan) yang tinggi. Lembaga intelijen, aparat keamanan (kepolisian), dan kalangan militer, seharusnya tidak melibatkan diri dalam konflik-konflik politik yang tengah berkembang – dan justru mengingkari tugas mulia mereka.

PASCA-Orde Baru, serentetan peledakan bom terjadi di Jakarta maupun luar Jakarta. Yang terbesar terjadi di Bali, 12 Oktober 2002. Perkembangan makro-internasional, selain faktor internal (dalam negeri), tidak bisa dilepaskan dari setting aksi-aksi

teror belakangan. Proses pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke pemerintahan selanjutnya, tidak bisa dikatakan bersih dari peristiwa kekerasan politik. Meski lain bila dibandingkan dengan peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, di mana kekerasan kolektif berkembang sedemikian rupa.

Proses politik pasca-Orde Baru diakui tidak berjalan mulus. Dari tahun 1998 sampai sekarang, telah terjadi tiga kali pergantian presiden: Soeharto ke BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri. Inilah catatan awal di masa transisi. Memang masih banyak tantangan menghadang dalam situasi politik transisional belakangan.

Carut-marut atas kondisi bangsa, tampaknya menggugah banyak pihak untuk "merasa bisa" memimpin, dan karena itu kompetisi politik ramai. Sayang, moralitas politik terkadang dilupakan. Indikator yang memprihatinkan ialah masih merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme. Bila KKN terus merebak, dipastikan makin terpuruklah bangsa ini. Itu juga sebentuk teror atas masa depan demokrasi. Maka ibaratnya, demokrasi terjepit di antara teror fisik dan teror KKN.

Sudah seharusnya peningkatan kewaspadaan atas terorisme ditumbuhkan. Mereka harus dilawan dengan cara-cara yang antisipatif dan dengan pola-pola pendekatan yang tepat. Secara sistemik harus ada yang dibereskan. Penataan demokrasi politik, harus diimbangi oleh berubahnya mentalitas berdemokrasi. Teror, intrik, dan kekerasan politik, hanyalah akan memperpuruk bangsa ini. Karena itu, harus dilawan. Proses transisi politik (menuju demokrasi) dewasa ini harus terus disokong kesuksesannya, meski harus menghadapi banyak risiko, utamanya teror dan kekerasan politik.●

Netralitas TNI dalam Pemilu 2004

KOMPAS, 4 OKTOBER 2003

PANGLIMA TNI Jenderal Endriartono Sutarto telah menyatakan tekadnya, agar reformasi untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan arah yang benar, semua pihak diminta tidak lagi mencoba menarik TNI ke kancah politik praktis dan partisan. Dalam Pemilu 2004, TNI akan bersikap netral dengan tidak akan menggunakan hak pilihnya. Karena itulah, HUT Ke-58 TNI, 5 Oktober 2003, mengambil tema "Sebagai Pejuang Bangsa, TNI Bertekad Menyukseskan Pemilu 2004".

PERNYATAAN itu menyejukkan. Bahwa militer di Indonesia, secara institusional patuh pada perubahan sistem politik nasional, yang antara lain menghendaki dilangsungkannya pemilu pada 2004. Tema itu sebenarnya merupakan tema politik. Meski demikian, ia masih dalam makna wajar, tidak bertentangan dengan tekad TNI, meninggalkan gelanggang politik praktis dan partisan. Meninggalkan gelanggang politik praktis dan partisan, tidak berarti TNI tidak boleh membahas tema politik sama sekali.

Hal ini bisa dipahami, mengingat TNI merupakan bagian dari unsur bangsa, yang berhak merespons berbagai hal yang berkembang, terutama atas dinamika sosial-politik yang ada. Namun, respons itu harus tetap dalam koridor. Bahwa di alam demokrasi modern, di mana militer telah berparadigma supremasi sipil, respons-responsnya atas persoalan sosial-politik harus proporsional. Dalam kasus militer di Indonesia, di mana doktrin dwifungsi ternyata memunculkan banyak penyelewengan, seharusnya pengalam-

an masa lalu diambil hikmahnya. Bahwa TNI harus profesional dan tidak campur "persoalan sosial-politik" di lapangan.

MENURUT Huntington (1952), institusi militer di lingkungan masyarakat mana pun dibentuk oleh: (1) suatu kepentingan fungsional yang berasal dari berbagai ancaman terhadap keamanan masyarakat; dan (2) kepentingan sosial yang muncul dari kekuatan sosial, ideologi, dan berbagai institusi dominan di masyarakat.

Institusi-institusi yang hanya mencerminkan nilai-nilai sosial mungkin saja tidak sanggup menjalankan fungsi kemiliterannya secara efektif. Sebaliknya, nilai sosial tidak mungkin dimasukkan ke dalam institusi masyarakat militer yang secara murni dibentuk oleh kepentingan fungsional. Interaksi antara kedua kekuatan ini merupakan intisari dari permasalahan hubungan sipil-militer.

Dalam kasus Indonesia, kehadiran institusi TNI tak lepas dari dua kekuatan itu. TNI tak muncul begitu saja menjadi profesional sejak awal. Ia tumbuh dari upaya perlawanan rakyat dalam membela bangsanya mengusir penjajah. Memang, ada beberapa perwira militer profesional didikan Belanda, tetapi bukan berarti kemunculan TNI sudah tertata baik pada mulanya.

Kepentingan sosial yang muncul dari kekuatan sosial, ideologi, dan berbagai institusi dominan di masyarakat, tidak bisa diabaikan. Karena kehadirannya seperti inilah, kelak militer Indonesia merasa cocok dengan doktrin dwifungsi yang memberi keleluasaan penuh selain di bidang pertahanan-keamanan, juga sosial-politik. Kini, tak bisa dielakkan lagi, segala kekeliruan masa lalu, perlu diperbaiki. Fungsi sosial-politik telah dihapuskan. Demikian pula keamanan, yang sepenuhnya diserahkan ke pihak institusi kepolisian. TNI berkonsentrasi pada bidang pertahanan nasional. Semua diatur dalam undang-undang yang hadir di alam demokrasi ini.

Kesimpulannya, terkait dengan institusi TNI, kaitannya dengan politik dan Pemilu 2004, tidak ada persoalan. Yang justru sedang hangat dibicarakan publik adalah kehadiran para mantan perwira TNI yang kini beramai-ramai masuk kancah politik formal.

Beberapa di antaranya bahkan hadir sebagai "calon presiden" menyongsong 2004. Tidak ada larangan untuk itu.

Namun, ini tetap menjadi sebuah fenomena. Para mantan perwira TNI kerap mengemukakan penjelasan umum kepada publik, bahwa mereka jangan dipandang sebagai militer, tetapi sejak pensiun otomatis telah menjadi sipil kembali. Penjelasan itu muncul, tak lepas dari berkembangnya dikotomi sipil-militer di masyarakat. Namun, publik banyak yang memberi catatan khusus, meski demikian mereka adalah sipil berlatar belakang militer. Bahkan sering disederhanakan sebagai "militer".

Catatan khusus yang ada dibenak publik, mantan perwira militer, pasti masih punya sisa-sisa pengaruh institusi TNI. Setidaknya mereka punya jaringan yang bisa dimanfaatkan, yang terdiri atas militer yang sudah tidak aktif dalam kedinasan, maupun yang masih aktif. Bahwa mereka punya "pengaruh dan jaringan" terkait wilayah militer, yang demikian itulah yang menjadi "kelebihan" mereka di banding politisi sipil murni.

Namun, tidak usah digelisahkan terlampau serius, cukup menjadi catatan saja. Mengingat, yang penting proses politik harus dilalui siapa saja secara demokratis. Bahwa akhirnya rakyat yang menentukan, siapa pemimpin (presiden) terbaiknya, yang diberi kepercayaan memimpin negeri ini tanpa harus membedakan apakah ia politisi sipil murni, ataukah berlatar belakang militer.

Yang harus tetap dijaga agar politisi berlatar belakang militer tidak memanipulasi simbol-simbol TNI untuk kepentingan politik jangka pendek. Sebab, citra institusi TNI taruhannya. Karena itu, Panglima TNI dan jajarannya seharusnya aktif menjaga institusinya agar tidak dimanipulasi secara politik, terutama oleh politisi berlatar belakang militer itu.Koordinasi keluarga besar TNI seharusnya diorientasikan pada upaya menjaga citra institusi TNI, bukan koordinasi untuk memenangkan pemilu.

WACANA dan praktik hubungan sipil-militer dalam konteks paradigma supremasi sipil di Indonesia memang masih muda

usia. Pasca-Orde Baru hubungan itu mulai menemukan polanya. Restrukturisasi kelembagaan dilakukan, penataan kembali peran militer diserasikan. Dalam konteks Pemilu 2004, posisi TNI jelas, netral politik. Pada Pemilu 1999 TNI telah membuktikannya dengan baik. TNI berdiri di luar arena politik, berbeda dengan tiap pemilu Orde Baru, ketika militer mesin politik Golkar.

Hanya masih ada catatan, dan kelak TNI harus bisa membuktikan, pihaknya betul-betul netral dalam Pemilu 2004. Catatan itu, Pemilu 2004 juga memilih presiden secara langsung. Persoalan muncul ketika ada beberapa "calon presiden" dari kalangan sipil berlatar belakang militer. Apakah institusi TNI akan dinilai netral sepenuhnya dalam konteks ini kelak, perlu dibuktikan.

Aparat TNI harus bisa meyakinkan dan membuktikan netralitas politiknya, menjaga jaringan institusi tidak dimanipulasi untuk kepentingan pemilu. Ini penting, mengingat godaan politik masa transisi demikian besar. Apalagi sudah banyak yang merasa gelisah atas kondisi sosial-politik dan kesejahteraan yang merosot. Diperlukan konsistensi di tengah sejumlah godaan.●

Sikap TNI Bila Pemilu Gagal

KOMPAS, 29 DESEMBER 2003

KEPALA Staf TNI AD Jenderal Ryamizard Ryacudu dalam amanatnya sebagai inspektur upacara pada Hari Juang Kartika pekan lalu, antara lain mengatakan TNI AD sangat berharap Pemilu 2004 berjalan aman, lancar, dan tertib. TNI AD tidak ingin pesta demokrasi yang akan sangat menentukan perjalanan bangsa ke depan itu berdarah-darah akibat benturan antaranak bangsa demi ambisi kelompok. Jika hal ini terjadi, TNI AD akan turun untuk mencegah perpecahan negara akibat pertikaian dan pertumpahan darah sesama anak bangsa (*Kompas*, 23/12).

Dalam konteks TNI dan politik 2004, pernyataan Ryamizard menarik perhatian, setelah sebelumnya Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto pernah mengingatkan kemungkinan sabotase pemilu. Pertanyaan yang muncul, apa sesungguhnya kepentingan tentara dalam momentum politik 2004?

Tentara tentu tidak ingin Indonesia berantakan gara-gara pemilu gagal. Pandangan konservatif tentara menegaskan bahwa Indonesia harus tetap utuh, demokrasi seharusnya tidak justru mempercepat perpecahan. Maka, tidak ada pilihan lain, Pemilu 2004 harus sukses. Saat ini, kalangan elite TNI merasa peka atas perkembangan lingkungan strategis bangsa. Indonesia masih berada di fase transisi, masih akan terus bergejolak, "serba tidak pasti". Dalam konteks pemilu, Ryamizard mengingatkan infiltrasi asing yang bertujuan memecah belah bangsa.

Indonesia berada di titik lemah diteropong dari kondisi pertahanan nasionalnya. Jadi, ancaman asing dilihat secara nyata – apalagi terorisme sudah masuk. Sementara ancaman dalam negeri juga bisa dijelaskan oleh mereka. Kalangan tentara menganggap ancaman dalam negeri, demikian seriusnya, membentang dari persoalan separatisme hingga permainan politik sipil yang sembrono – yang masih mengandalkan pentingnya KKN.

PERSOALANNYA ialah bagaimana kalau Pemilu 2004 gagal? Menyimak nada peringatan Jenderal Ryamizard, arahnya jelas: TNI tidak akan tinggal diam. Tampaknya pihak TNI, sebagai salah satu unsur penting dalam politik Indonesia – meskipun peran politik formalnya telah direduksi (diakhiri) – akan melakukan semacam ijtihad politik menembus kebuntuan politik yang ada. "Kudeta politik" atau apa pun namanya akan terjadi apabila kalangan politisi sipil nyata-nyata tidak berhasil dalam menyelenggarakan eksperimentasi politik sipilnya dalam Pemilu 2004.

Soal seberapa jauh pihak TNI akan melibatkan kalangan sipil dalam proses politik selanjutnya, itu urusan nanti. Ini salah satu bayangan yang mungkin akan terjadi kelak. TNI tampaknya telah

siap-siap menjadi, meminjam istilah Nurcholish Madjid, "ban serep" apabila "ban demokrasi politik" bocor dan rusak.

Dalam konteks ini, penting menyimak pandangan TNI atas demokrasi. Bila menyimak dokumen-dokumen yang dikeluarkan pihak TNI sejak 1998, tak ada kesan sedikit pun TNI antidemokrasi atau alergi atas proses demokrasi yang berjalan. Secara kelembagaan TNI telah berubah, menuruti skenario pemerintahan sipil. Perubahan memang drastis, tatkala peran politik tentara direduksi. Dari sini terlihat, di atas kertas TNI bukan lagi faktor penghambat demokrasi setelah Orde Baru. Tampaknya juga tidak mungkin ia akan menjadi faktor pendukung utama transisi permanen.

Itu catatan di atas kertas. Praktiknya di lapangan bisa berubah, setidaknya oleh dua faktor (pemicu) utama. *Pertama*, menguatnya konservatisme tentara. Semakin merebak ancaman keamanan, semakin menguat sikap konservatif tentara. Biasanya tentara resah apabila negara tengah terancam perpecahan (disintegrasi) secara serius, oleh faktor internal dan eksternal. Saat ini, singkatan yang populer di kalangan tentara dan sementara masyarakat ialah NKRI.

Saking seringnya NKRI disebut, seolah ideologi tentara "keutuhan wilayah" NKRI. Patokannya jelas, NKRI harus utuh secara wilayah dan tetap terus eksis. Kalau proses demokrasi mentok dan bila ujungnya memunculkan perpecahan, ia harus diwaspadai. Penyelenggaraan Pemilu 2004 pun perlu diwaspadai sebab di dalamnya tersimpan potensi kegagalannya – kalimat Jenderal Ryamizard, "berdarah-darah".

Kedua, dinamika politik sipil. Demokrasi politik melibatkan banyak kelompok sipil yang saling berpacu berebut kekuasaan. Ada 24 partai peserta pemilu dengan segenap fragmentasi politiknya. Potensi anarki cukup besar, bila para elite gagal mengelola konflik. Keberhasilan eksperimentasi politik sipil tergantung kedewasaan politik mereka. Mereka harus realistis menerima dukungan rakyat dalam pemilu, lapang dada apabila kalah. Mereka harus sepaham, dalam berkompetisi tak boleh merusak proses demokrasi.

HARUS diakui faktor TNI masih sangat penting di masa transisi politik di Indonesia saat ini. Ia bisa menjadi "juru selamat" atau justru mempercepat keruntuhan proses demokrasi itu sendiri. Jadi "juru selamat" bila ia mampu menyangga proses demokrasi berjalan dengan baik di masa transisi ini.

Kalaupun gagal dan terpaksa mengambil alih keadaan, dipastikan cepat-cepat ia persiapkan proses politik demokratis sesudahnya, sebagaimana dicontohkan Samuel P Huntington dalam kasus kudeta militer di Portugal 1974. Di sini terlihat bahwa TNI tidak akan menjadi faktor dalam konteks transisi permanen. Justru ia berusaha mengakhiri masa transisi secara demokratis.

Sebaliknya TNI akan menjadi faktor penentu percepatan kegagalan proses demokrasi bila pihaknya tergesa-gesa dan terlampau cepat mengambil kesimpulan dan menjatuhkan vonis bahwa telah terjadi kegagalan dalam berdemokrasi. Dengan kata lain bila tentara terpancing ke dalam kotak-kotak politik dan kondisinya diperparah oleh penajaman fragmentasi politik di dalamnya.

Hal ini mungkin terjadi sebab tentara bukan merupakan entitas tunggal. Di dalamnya juga rentan konflik akibat fragmentasi internal. Bila yang dilakukan tentara dalam intervensi politik salah langkah, apabila pemilu gagal misalnya, bisa bukan penguatan integrasi yang didapat, tetapi mempercepat disintegrasi. Pihak tentara seharusnya memastikan kalau pemilu gagal, kondisi berdarah-darah bisa dicegah.

Hari-hari ini ujian bagi Indonesia, apakah eksperimentasi demokrasi bisa berjalan dengan baik. Sekali gagal, susah untuk memulai kembali. Demokrasi, merujuk Winston Churchill, bukan merupakan sistem yang terbaik, tetapi belum ada sistem yang lebih baik darinya. Seharusnya demokrasi selaras keinginan bersama untuk menata kembali kehidupan bangsa lebih baik. Prasyarat-prasyarat bagi terciptanya iklim dan demokrasi yang sesungguhnya harus diperkuat agar tak mudah roboh. Untuk itu, dan supaya proses transisi segera diakhiri (menanggapi Ahmad Syafii Maarif), Pemilu 2004 harus berlangsung sukses.●

VI

PEMERINTAHAN YANG KUAT

[2004]

BAGAIMANA NASIB DEMOKRASI BILA TITIK TEKANNYA KELAK PEMERINTAHAN YANG KUAT? BUKANKAH SEPANJANG SEJARAH PERPOLITIKAN BANYAK NEGARA, HADIRNYA PEMERINTAHAN YANG KUAT, TERMASUK INDONESIA MASA ORDE BARU, TERPAKSA MEREDUKSI DEMOKRASI? ASUMSI UTAMA MENGAPA DEMOKRASI HARUS DIREDUKSI DEMI PEMERINTAHAN YANG KUAT ADALAH – SEPERTI DIKALIMATKAN IGNAS KLEDEN – SELAMA RAKYAT BELUM MAKMUR, DEMOKRASI BISA DITUNDA DULU PELAKSA-NAANNYA DAN PEMERINTAHAN OTORITER DA-PAT DIBENARKAN ASAL EFEKTIF.

- PEMERINTAHAN YANG KUAT

Tentara dan Parlemen

KOMPAS, 14 JANUARI 2004

SEJUMLAH nama pensiunan tentara/polisi menyemarakkan daftar calon anggota legislatif berbagai parpol peserta pemilu, memperebutkan 550 kursi anggota DPR. Mereka akan bertarung di 69 daerah pemilihan (32 provinsi), memperebutkan 145 juta pemilih. Mereka antara lain Mayjen (Purn) TNI Sumarsono, Mayjen (Purn) TNI Andi Djalal, Mayjen (Purn) TNI Syamsu Djalal, dan Mayjen (Purn) TNI Cholid Ghozali yang ada dalam jajaran Partai Bintang Reformasi. A.M. Ghalib dan Yunus Yosfiah bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. Dari daftar Partai Indonesia Baru terdapat nama Laksda (Purn) TNI TH Lubis, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada Ferry Tinggogoy.

Dari Partai Persatuan Demokrasi dan Kebangsaan (Partai PDK) ada nama Marsda (Purn) TNI Teuku Syahr, Marsda (Purn) TNI Purnomo Basuki, dan Laksma (Purn) TNI Djoko Soetopo. Dari PAN ada nama antara lain Laksda (Purn) TNI Fahmi Djamaris, Brigjen (Purn) TNI Christhoporus Katon, dan Brigjen (Purn) TNI Badjoeri Widagdo. Theo Syafei dan RK Sembiring Meliala ada di PDIP (*Kompas*, 5/1/ 2004).

Fenomena demikian setidaknya memunculkan tiga pendapat. *Pertama*, hal itu merupakan bagian strategi kalangan keluarga besar tentara untuk menguasai parlemen. Dengan demikian, mereka memiliki akses untuk kembali berpolitik. Meski mereka sudah pensiun, tetapi dikhawatirkan masih memiliki hubungan erat dengan institusi tentara. Konsekuensinya pola politik mereka tak ubahnya pola politik militer sebagaimana dulu pernah berpengaruh.

Kedua, pendapat sebaliknya. Hal itu bukan bagian dari strategi

tentara untuk menguasai parlemen. Bagaimana mungkin tentara sempat menyusun strategi, mengingat mereka masuk melalui partai-partai politik yang dikendalikan kalangan sipil? Pendapat ini diperkuat kenyataan, tentara/polisi sekarang berbeda dengan dulu. Kini upaya profesionalisme kelembagaan tengah berproses. Fungsi politik dalam doktrin dwifungsi sudah ditinggalkan, bahwa istilah dwifungsi sudah tidak dikenal lagi, meninggalkan kenangan yang tidak mengenakkan.

Ketiga, pendapat yang menyebutkan bahwa hal itu merupakan fenomena biasa. Tidak ada kaitannya dengan apakah ia bagian dari desain besar politik militer mutakhir atau tidak. Itu adalah bagian konsekuensi politik biasa. Bahwa saat keran demokrasi politik beralih dari demokrasi parsial ke demokrasi liberal, peran aktif tentara dalam politik formal berakhir. Namun, kalangan pensiunan tentara memiliki hak politik (dipilih dan memilih) biasa seperti warga negara (sipil) lain. Secara prosedural tidak ada persoalan. Tidak ada diskriminasi politik atas mantan tentara atau sipil dalam berkompetisi di pemilu.

BERDASARKAN tiga penjelajahan pendapat berbeda atas fenomena caleg tentara itu, tampaknya yang menjadi persoalan bukan teknis prosedural, tetapi terkait persoalan budaya politik. Kalangan yang mewaspadai fenomena ini sebagai bagian kebangkitan politik tentara di Indonesia biasanya bersandar pada referensi atas peran dan pengalaman di masa lalu kalangan tentara, yang pernah mengharu biru politik Indonesia.

Rumus bakunya, tradisi politik kalangan tentara berbeda dengan sipil. Disiplin tentara dan sistem komando yang mentradisikan adanya satu pendapat biasanya membuat sosok tentara demikian terkesan bahkan hingga pensiun. Mereka tetap merasa sebagai keluarga besar tentara dan patuh pada "politik markas besar". Jadi, meski sudah purnawirawan, tetapi dikhawatirkan haluan politik mereka identik dengan haluan politik tentara.

Bahwa budaya politik militer dengan sipil berbeda, itu bisa

dimaklumi. Maka, yang harus dilakukan adalah memelihara budayanya di wilayah masing-masing. Adalah kewajiban bagi kalangan tentara, baik yang masih aktif atau yang sudah pensiun, untuk melakukan adaptasi seirama dengan arus politik sipil (supremasi sipil) yang demokratis. Harus ada proses transformasi yang signifikan dari budaya tentara ke budaya politik sipil. Ini catatan pertama.

Kedua, harus ada kondisi di mana kalangan tentara dan sipil ada dalam kepentingan bersama sehingga proses demokratisasi bisa dipastikan kelangsungannya. Di parlemen kelak, Fraksi TNI/Polri dipastikan tidak ada lagi. Namun, elemen tentara/polisi berbaur dengan politisi lain yang berkendaraan partai politik. Ini lebih merupakan tantangan budaya ketimbang tantangan politik.

DISADARI, dalam konstelasi partai-partai di Indonesia saat ini, posisi-posisi mantan tentara cukup penting dan stretegis di jajaran kepengurusan, beberapa berposisi sekretaris jenderal dan ketua bidang. Hanya sedikit yang meniti karier dari bawah. Kecuali yang memelopori partai sendiri.

Para petinggi partai biasanya mendekati sosok mantan tentara dan menempatkannya di posisi strategis. Fenomena seperti itu menyiratkan pesan, kalangan politisi sipil suka tidak percaya diri dengan kemampuan kader-kadernya dan masih suka menarik kalangan mantan tentara ke dalamnya. Kesannya, mantan tentara masih dijadikan simbol politik, yang dimaksudkan seolah partai itu "didukung" kalangan tentara. Sosok-sosok mantan tentara di partai politik bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan komunikasi politik antara para politisi sipil dan pihak petinggi tentara aktif.

Terkait dengan posisi para mantan tentara kelak di parlemen, ada dua variasi kemungkinan (ekstrem), terkait posisi politik kalangan sipil dan tentara. Pertama, mereka lebih condong bekerja sebagai bagian institusi sipil dengan pola pikir dan aksi yang amat sejalan dengan agenda politik sipil. Artinya, mereka bekerja dan mengabdi kepada proses-proses politik yang wajar dan demokratis. Dengan kata lain, mereka betul-betul menjadi sipil dengan mem-

perjuangkan serta menjaga terselenggaranya aspirasi politik dan supremasi sipil.

Kedua, kecenderungan menjadi kepanjangan tangan arus utama politik militer yang dikendalikan "markas besar". Artinya, referensi pendapat dan sikap markas besar tentara dijadikan pedoman utama dalam menentukan sikap dan arah politiknya di parlemen. Dengan demikian, yang terjadi ialah terselenggaranya agenda-agenda politik militer di parlemen. Kalangan mantan tentara itu, kepanjangan tangan dari kepentingan politik tentara.

Dua kecenderungan itu bisa tarik-menarik sehingga tercapai kompromi. Yang terjadi nyaris mirip saat tentara/polisi memiliki wakil resmi di parlemen. Dulu, proses tawar-menawar kepentingan dilakukan antarfraksi, antarpolitisi sipil dan militer yang terlembagakan resmi di parlemen. Namun kelak, titik temu kepentingan itu lewat pola di atas. Meski demikian, jika dilihat peta perbanding-an kekuatan, jumlah politisi sipil dipastikan lebih besar daripada mantan tentara. Maka, titik temu kepentingan (jika ada) yang dimaksud pasti memerlukan proses tidak sederhana.

Apabila dikatakan, ada gejala strategi kalangan tentara menguasai parlemen dengan menunggang kendaraan partai-partai politik, ia tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Dua kecenderungan di ataslah yang terjadi dan di tengah-tengahnya bisa fluktuatif sifatnya: apakah condong ke agenda politik sipil ataukah tentara. Namun, tidak bijak bila mengabaikan sisi positifnya. Mereka bisa menjadi mediator dan katalisator komunikasi politik antara kalangan partai politik dan representasi tentara.

Secara institusional, partai politik dan institusi tentara mempunyai wilayah tugas masing-masing. Akan tetapi, persoalan politik biasanya keluar dari persoalan institusi. Ia terkait banyak kehendak dan kepentingan pelaku (aktor) yang ada. Dimensi keaktoran inilah yang bakal dimainkan para politisi mana pun, termasuk yang mantan tentara. Bisa dinilai kelak, apakah mereka lebih condong kepada proses-proses demokrasi atau sebaliknya.●

Pemerintahan yang Kuat

KOMPAS, 8 MEI 2004

GOVERNMENT IS NOT REASON; IT IS NOT ELOQUENT; IT IS FORCE. LIKE FIRE, IT IS A DANGEROUS SERVANT AND A FEARFUL MASTER

- GEORGE WASHINGTON

SEPERTI DIBERITAKAN *Kompas* (26/4/ 2004), Konferensi Tahunan *Boao Forum for Asia 2004* di Boao, Hainan, Republik Rakyat China, yang diikuti 42 negara dan diliput sekitar 400 wartawan dari berbagai negara, antara lain mengemukakan, kriteria utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ideal ialah sebuah pemerintahan yang kuat dan efektif. Pemerintahan yang kuat tercermin dari jalan serta efektifnya roda pemerintahan, berwibawanya hukum, kemampuan memilih prioritas pembangunan negara, serta konsentrasi dan terjaminnya keamanan. Negara-negara yang pemerintahannya kuat bisa menjadi contoh atas pandangan ini: China, Jepang, Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat.

KIRANYA MENARIK mengapresiasi hal itu, dikaitkan dinamika politik Indonesia mutakhir. Saat ini hiruk-pikuk politik Indonesia tak lepas dari upaya menemukan pemimpin nasional, yang dilakukan dalam mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Sampai tulisan ini dibuat, ada empat calon presiden yang menonjol, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, Amien Rais, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka, dengan pasangan masing-masing akan berlaga di pemilu presiden 5 Juli 2004.

Yang menarik, dari wacana dan paparan yang disampaikan, hampir semua mengemukakan perlunya pemerintahan yang kuat.

Tampaknya semua sepakat, tantangan kepemimpinan masa depan masih kompleks sehingga pemerintahan yang efektif mutlak dibutuhkan. Di tingkat grass root, tampaknya isu ini demikian laku. Perolehan suara Partai Demokrat yang signifikan misalnya, terkait diterimanya isu pentingnya pemerintahan yang kuat, yang dalam hal ini disimbolisasikan sosok SBY.

Dalam benak publik, pemerintahan yang kuat tampaknya belum bisa dilepaskan dari kehadiran pemimpin berlatar militer. Pada pemilu 5 April, sosok Wiranto "belum jelas eksistensinya" karena masih digantung Partai Golkar. Arah pilihan publik lari ke Partai Demokrat dengan figur sentral SBY. Setelah Wiranto memenangi Konvensi Partai Golkar, pilihan publik terbelah, SBY atau Wiranto.

Terlepas fenomena itu, menarik menjawab pertanyaan, apakah pemerintahan yang kuat identik dengan calon presiden berlatar belakang tentara? Jawabnya tidak mesti demikian. Tidak ada hubungan antara pemerintahan yang kuat dan kepemimpinan politik sipil atau berlatar belakang tentara. Kepemimpinan kuat harus dipegang mantan tentara atau sipil murni adalah mitos. Kuat-lemahnya pemerintahan tergantung kemampuan pemimpin mengefektifkan roda pemerintahan, mengembangkan kewibawaan hukum, kemampuan memilih prioritas pembangunan serta konsentrasi dan terjaminnya keamanan. Meski demikian, berkembang asumsi kepemimpinan tentara "setingkat lebih maju" dibanding kepemimpinan sipil dalam konteks manajemen keamanan. Sementara pemerintahan yang kuat dikaitkan variabel keamanan. Kepemimpinan tentara dianggap lebih terampil dalam mengendalikan keamanan.

Yang menjadi kegelisahan sementara kalangan, bagaimana nasib demokrasi bila titik tekannya kelak pemerintahan yang kuat. Bukankah sepanjang sejarah perpolitikan banyak negara, hadirnya pemerintahan yang kuat, termasuk Indonesia masa Orde Baru, terpaksa mereduksi demokrasi? Asumsi utama mengapa demokrasi harus direduksi demi pemerintahan yang kuat adalah – seperti dikalimatkan Ignas Kleden – selama rakyat belum makmur, demokrasi bisa ditunda dulu pelaksanaannya dan pemerintahan otoriter dapat

dibenarkan asal efektif.

Argumentasi itu bisa disangkal mengingat kurang makmurnya rakyat lebih dipahami sebagai, meminjam Amartya Sen, *lack of income* (kekurangan pendapatan) ketimbang *lack of capability* (kekurangan kemampuan). Penundaan demokrasi dalam pengelolaan negara selama Orde Baru ternyata berbuah tak sedap, justru banyak pengalaman buruk menimpa. Pemerintahan yang kuat ternyata ambruk di kemudian hari, sebab ternyata yang dibangun semacam "rumah kartu". Itulah pengalaman Orde Baru.

DI ERA Reformasi, mereduksi hakikat demokrasi selain tak populer pun tak beralasan. Sudah menjadi tekad bersama, di masa transisi, proses demokrasi harus terselenggara baik. Karena itu, bisa dipahami bila terjadi perubahan sistem politik secara mendasar lewat amandemen UUD 1945.Jadi, untuk mewujudkan pemerintah yang kuat, siapa pun presidennya tidak bisa melakukan kebijakan politik yang mereduksi demokrasi.

Banyak yang berupaya mengingatkan capres mantan tentara memiliki persoalan masa lalu, kendati gaungnya tak sampai ke *grass root*. Maka, mereka harus menjelaskan keberpihakannya pada demokrasi. Secara institusional, TNI sudah mengalami perubahan mendasar. Meski demikian, mengingat pengalaman sejarahnya, kadang apa yang mereka lakukan masih memicu kecurigaan "penghambat demokrasi". Di sisi lain, capres dari aliansi sipil pun ditantang kemampuannya menuju ke kepemimpinan yang kuat. Pengalaman presiden sipil selama ini belum mampu menunjukkan pemerintahan yang kuat. Berbagai friksi politik terjadi. Pemerintahan datang-pergi dalam tempo cepat. Fenomena ini justru memperkuat asumsi, mereka tak sekokoh tentara. Indonesia terus menjadi sorotan dunia: kepemimpinnya dan demokratisasinya.●

Lumayan ada Debat Capres

KOMPAS, 2 JULI 2004

KPU telah menggelar debat capres bertajuk "Dialog Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden" di Hotel Borobudur, Jakarta. Terlepas kekurangannya, debat capres KPU pantas diapresiasi positif. Pada hari pertama, pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi tampil bersama pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo (30/6). Hari kedua, tampil tiga pasangan lain: Hamzah Haz-Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Wiranto-Salahuddin Wahid (1/7). Moderatornya Ira Koesno, menghadirkan beberapa panelis dan penonton.

Kesan umum atas debat capres kali ini: masih serba canggung, kurang maksimal, dan tidak mencerminkan "debat sesungguhnya". Tidak ada yang baru dari segi kemasan format, suatu "debat tanpa debat" *jor-joran* unjuk pendapat. Sementara dari substansi materi yang dilontarkan oleh para pasangan capres-cawapres, tak menunjukkan adanya perkembangan baru, bahkan Effendi Gazali berani menyebutnya sebagai *communication without substance*.

Begitulah debat capres ala Indonesia, bandingkan dengan debat capres ala Amerika. Meski demikian, acara tersebut merupakan sebuah rintisan tradisi yang baik dalam kerangka menambah bobot demokratisasi di Indonesia. Dalam debat capres tersebut, sesungguhnya peluang untuk "saling mendebat" amat terbuka, dengan mengutarakan ketidaksetujuan pendapat yang dilontarkan pasangan capres dalam menanggapi isu yang dilontarkan panelis.

Praktiknya, hal tersebut tak dilakukan maksimal. Kalaupun

ada, yang muncul kebanyakan justru ungkapan kesetujuan pendapat yang dilanjutkan lontaran kalimat tambahan. Pasangan Megawati-Hasyim dan Amien-Siswono bahkan menolak menyatakan setuju atau tidak setuju atas lontaran pendapat pasangan lawan.

Unsur kontras dan *attacking* (menyerang) yang seharusnya hadir secara proporsional dalam sebuah debat atau dialog politik tersia-siakan. Menyerang lawan politik secara terbuka di depan publik masih dianggap tabu dan bertentangan dengan budaya ketimuran yang menganjurkan agar sebaiknya saling memuji, "pantun berbalas pantun", dan "*ewuh pakewuh*".

Kesan lain debat capres kali ini, dominannya ketegangan masing-masing pasangan, seolah terbebani "bayangan kekalahan" bila sedikit saja "berbuat kesalahan" dalam menyampaikan substansi dan menata penampilan (pencitraan). Moderator pun kelihatan kurang santai dan cukup tegang dalam memandu acara bersejarah tersebut. Yang muncul justru sebuah debat capres tanpa senyum.

PAYUNG hukum debat capres oleh KPU ilah Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, "kampanye dapat dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antarcalon". Aturan itu diperjelas melalui Surat Keputusan KPU No 35/2004 tentang Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dijelaskan Pasal 26, "Kampanye debat publik/debat terbuka antarpasangan calon dilakukan oleh dua atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon. Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan atau melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain".

Dari undang-undangnya, menyiratkan model kampanye debat bukan semacam kewajiban sebab ia dapat dilaksanakan (dapat pula tidak). Maka, hal itu menjadi amat tergantung pihak KPU. Karena

model kampanye debat amat bermanfaat bagi publik, seharusnya di masa depan aturannya harus lebih tegas. Apabila kelak undang-undang tentang pemilu direvisi, soal debat capres harus dicantumkan secara jelas sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Dengan demikian memperoleh "payung hukum" yang kuat. Artinya, KPU wajib menyelenggarakan. Konsekuensinya, acara debat capres akan dipersiapkan secara lebih sungguh-sungguh.

Perlu diusulkan, sebaiknya penyelenggara debat Panitia Debat Capres Nasional yang dibentuk KPU dengan melibatkan berbagai unsur, utamanya para pakar komunikasi politik. Panitia bertugas merumuskan berbagai hal mengenai format debat, hak dan kewajiban peserta debat maupun panelis, dan yang harus dipatuhi penonton. Sebaiknya pula agar payung hukumnya kuat, eksistensi panitia debat ditegaskan dalam undang-undang, bukan semata hak prerogatif KPU untuk bisa membentuk atau tidak.

FORMAT debat versi KPU sesungguhnya mirip yang diformatkan berbagai stasiun televisi: ada pasangan capres sebagai peserta (minimal dua pasang), ada moderator, beberapa panelis, dan penonton (pendukung ataupun independen). Format tersebut cenderung kurang inovatif, kaku, formal, monoton, dan menjemukan – terkadang menggelikan. Betapapun demikian, pengalaman debat capres resmi ini tetap menjadi referensi berharga ke depan agar formatnya berubah menjadi "pertunjukan debat" yang menarik, hidup, tidak menjemukan, dan menambah pengetahuan.

Durasi waktu perlu ditambah, dipatok waktu minimal dan maksimal, misalnya dua sampai empat jam. Lantas masing-masing pasangan menyepakati mau berapa jam, agar lebih leluasa. Kalau durasinya panjang, dibagi dua sesi yang di selanya diberi jeda cukup, antara sepuluh sampai lima belas menit, agar pasangan berkesempatan berkonsultasi dengan tim suksesnya. Acara ini disiarkan secara terbuka oleh media elektronik (televisi dan radio) tanpa harus diganggu lalu lintas iklan – apalagi gangguan teknis.

Salah satu yang perlu dirombak, mekanisme yang membatasi

masing-masing pasangan enggan saling berdebat. Supaya unsur kontras dan *attacking* terjembatani secara layak, masing-masing diberikan kesempatan bertanya, menjawab, menyangkal pernyataan pasangan lain. Harus ditegaskan etika debat yang baik (yang terumuskan rinci), misalnya tidak saling menyerang pribadi dan tidak mengeksploitasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Intinya, peserta debat tetap berdewasa sikap, tidak "kekanak-kanakan". Sehingga, publik lebih bisa menilai: siapa capres yang tinggi intelektualitas sekaligus stabil emosionalitasnya, secara lebih obyektif. Penonton yang menyaksikan langsung debat harus mematuhi *code of conduct* yang telah ditetapkan: tertib dan tenang. Mereka bukan suporter sepakbola. Peng-alaman kekisruhan penonton, cukup menjadi bahan agar di masa depan lebih terantisipasi.

Lumayan ada debat. Acara itu bermanfaat bagi proses demokrasi. Perlu dibudayakan debat yang sesungguhnya secara dewasa dan mendidik. Publik menerima banyak manfaat dari penyelenggaraan debat yang diformat inovatif, agar publik memperoleh gambaran lebih jelas pasangan capres-cawapres yang hendak dipilihnya.●

Fenomena Dua *King Maker*

KOMPAS, 2 SEPTEMBER 2004

PETA politik menjelang pilpres putaran kedua, 20 September, makin dihiasi manuver politik "mengejutkan", sekaligus "membingungkan". Koalisi Kebangsaan yang mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi segera ditandingi Koalisi Kerakyatan bentukan pasangan SBY-JK. PAN sudah menyatakan netral, sementara PKB memutuskan akan netral. Di sisi lain, kekuatan pemilih golput tak boleh diingkari. Menurut Sukardi Rinakit ("Skenario Politik 1/3", *Kompas*, 31/8/2004), pada pemilu legislatif, jumlah mereka sekitar 22 juta orang, lalu meningkat menjadi 30 juta pada

pilpres putaran pertama. Pada pilpres putaran kedua nanti, tak tertutup kemungkinan jumlahnya akan menembus lebih 40 juta. Itu berarti, mereka merebut hampir sepertiga suara pemilih. Dengan konstruksi "skenario politik" seperti itu, menurut Rinakit, *king maker* akan datang dari kubu golput.

Kubu golput, tentu dikuasai oleh kalangan akar rumput. Alasannya macam-macam, termasuk terpengaruh oleh sikap beberapa simpul elite politik yang golput. Golputnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam pemilu presiden putaran kedua, seperti halnya pada putaran pertama, tentu akan memiliki pengaruh di akar rumput NU yang fanatik terhadap dirinya. Penulis cenderung menggolongkan kasus demikian ke fenomena *king maker* nonelite, untuk membedakannya dengan king maker elite.

Dalam pilpres kali ini, elite dan massa sama-sama "menentukan", tergantung sejauh mana dinamika politik bergerak dan berpengaruh. Bisa jadi otonomi pemilih akan dengan mudah tergilas oleh mesin politik koalisi partai politik yang digerakkan oleh "kerja keras" para elitenya. Bisa jadi pula otonomi pemilih teraktualisasikan secara nyata, tanpa "terpengaruh" oleh mesin politik.

DARI peta politik di lapisan elite atas, Partai Golkar sebagai pemenang pemilu berposisi "menentukan". Ia disimbolisasikan oleh Akbar Tandjung, nakhoda Koalisi Kebangsaan. Akbar dan jajarannya harus lebih bekerja ekstra keras menggerakkan mesin politiknya. Akbar, sebagaimana Gus Dur, berada dalam wilayah elite lapis atas. Politik pemenangan capres memang tak ditentukan manuver dan pengaruh para elite lapis atas semata. Tetapi, mereka tetap lapis kunci, *king maker*. Akbar merupakan faktor menentukan bergeraknya mesin politik Golkar. Ia *king maker* di wilayah "kekuasaan politiknya" (Partai Golkar dan Koalisi Kebangsaan). Gus Dur juga *king maker* di wilayah pengaruhnya.

Manuver para elite, terkhusus koalisi partai politik, bisa dipahami efektivitasnya dengan logika politik elite, dan tidak bisa dipaksakan penjelasannya dari sudut pandang logika nonelite. Dari logika

elite, jelas, apa yang dilakukan oleh kubu SBY maupun Megawati, aktif menemui sejumlah "tokoh kunci" dan berpe-ngaruh, dengan mudah dapat dipahami. Mereka butuh dukungan para pelaku politik papan atas, mengingat tanpa adanya "simbol dukungan" mereka dipercaya memunculkan sejumlah kesusahan politik. Risikonya, harus ada konsesi-konsesi politik tertentu yang harus dibayarkan guna meraup dukungan ini. Misalnya, yang pa-ling konkret adalah soal tawaran komposisi jabatan kabinet.

Menjadi aneh, bahkan, terkesan sombong, dalam "budaya politik Indonesia" , bila capres meremehkan kekuatan politik "arus atas", dan menyerahkan sepenuhnya pada kekuatan pilihan "arus bawah". Setidaknya, harus ada investasi politik, yakni dengan melakukan komunikasi politik di lapis atas, mengingat diyakini hal ini akan bermanfaat kelak bila seorang calon presiden telah terpilih.

Pilihan-pilihan tokoh yang dikunjungi dan diajak "berkoalisi" boleh jadi mampu menyurutkan dukungan rakyat. Tetapi, tampaknya, untuk kasus Indonesia, hal ini tak perlu dikhawatirkan, kecuali, mungkin kalau yang ditemui mantan Presiden Soeharto. Ketidak-khawatiran tersebut karena yang berkembang sejak 1998 bukan pola, meminjam Samuel P Huntington, *replacement* alias pergantian pemain sampai "ke akar-akarnya", tetapi *transplacement* dimana aktor lama dan baru berbaur serta berkompetisi dalam sebuah mekanisme politik yang terbuka dan demokratis.

LANTAS, bagaimana logika nonelite? Rakyat *king maker* sejati yang abstrak, penentu sebenarnya dalam pilpres langsung. Pola yang tercatat dari pengalaman pemilu dan pilpres putaran pertama 2004, terkait kecenderungan tidak taatnya nonelite atas arahan politik elite. Satu hal yang membedakan antara fenomena *king maker* elite dan *king maker* nonelite adalah orientasi kepentingan politiknya. *King maker* elite orientasinya cenderung lebih pragmatis, sementara king maker nonelite cenderung lebih idealis (harapan). Sampai ke tahap pemilihan presiden, lapisan nonelite hanya dapat berharap, kondisinya kelak akan lebih baik. Soal kelak banyak

harapan yang tak terkabul, itu urusan belakangan.

Pada putaran kedua, rakyat sudah memiliki referensi yang cukup untuk menentukan pilihan politiknya. Pilihan mereka kini: memilih salah satu pasangan tersisa atau golput. Besarnya golput, kalaupun demikian adanya, tidak akan memengaruhi tingkat legitimasi pasangan terpilih. Kalau diperas lagi, king maker nonelite terdiri dari dua kelompok utama: massa mengambang (*floating mass*) dan kalangan (yang berniat) golput. Maka, tidak mengherankan bila masing-masing pasangan tersisa berlomba "menggarap" dua lahan ini: merangkul massa mengambang (yang sikap politiknya labil), mencegah golput dan meraup dukungan darinya.

Dua fenomena *king maker* dalam perpolitikan Indonesia kini, tak bisa diabaikan. Kuatnya presiden terpilih, kalau tak mampu mengelola dinamika politik lapis elite, jalannya pemerintahan kurang efektif. Maka manuver politik (koalisi) elite perlu. Tapi *king maker* nonelite lebih perlu untuk didekati.●

Menuju Praktik Demokrasi Oposisional

KOMPAS, 22 SEPTEMBER 2004

SETELAH tanda-tanda kemenangan kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK), "sulit terbendung", salah satu pertanyaan mengemuka dalam format politik ke depan adalah, apakah praktik demokrasi oposisional akan terjadi? Pertanyaan ini menarik mengingat kubu Koalisi Kebangsaan tetap pada pendiriannya, akan mempertegas kerja sama politiknya hingga 2009. Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, akan menolak tawaran posisi menteri di pemerin-tahan bila pasangan calon Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi (Mega-Hasyim) kalah suara dalam pemilu presiden putaran kedua. Partai Golkar bersama partai lain dari Koalisi Kebangsaan akan memo-

sisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PPP lebih tegas akan menempatkan diri sebagai partai oposisi (*Kompas*, 30/9/2004).

BILA konsistensi Koalisi Kebangsaan berjalan, artinya, tidak seperti diperkirakan beberapa kalangan bahwa koalisi akan bubar menyusul kekalahan pasangan Mega-Hasyim, maka pemerintahan SBY-JK akan menghadapi "lawan politik" yang tidak dapat disepelekan. Di parlemen tingkat pusat dan daerah, seharusnya dominasi politik yang terjadi adalah dominasi politik Koalisi Kebangsaan. Koalisi ini akan menjadi kelompok pengimbang atas rencana-rencana dan implementasi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pascapemilu presiden (pilpres) putaran kedua, era baru politik Indonesia dimulai, ditandai wacana dan praktik demokrasi oposisional.

Fenomena itu memiliki beberapa kelebihan dan "kekurangan". Kelebihannya antara lain, kontrol DPR atas kebijakan pemerintah cenderung kuat. Karena itu, diharapkan fungsi checks and balances dapat terlaksana secara lebih baik. Seperti dipahami, pemerintahan baru memiliki legitimasi politik yang "super kuat", mengingat pasangan presiden dipilih rakyat secara langsung.

Tetapi di sisi lain, parlemen juga memiliki kekuatan politik: berperan dan berwenang dalam pembuatan undang-undang, anggaran belanja, dan kontrol kebijakan. Praktik politik pasca-pilpres adalah praktik politik elite, di mana parlemen (yang sebenarnya heterogen itu) di satu sisi dan pemerintah di sisi lain saling melakukan komunikasi politik atas aneka kebijakan (publik) tertentu. Singkat kata, diharapkan DPR akan lebih berkonsentrasi pada kewenangan dan bidang tugasnya secara lebih baik.

Namun, bukan berarti format demikian tanpa kelemahan. Kelemahan mendasarnya bila pemerintahan baru "tersandera" oleh kebijakan politik dari DPR. Proses pengambilan kebijakan akan berlarut-larut, sehingga *political cost*-nya makin menggelembung. Berlarut-larutnya proses pengambilan kebijakan, akan berdampak

luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, Efektivitas dan efisiensi terhalangi. Bila Koalisi Kebangsaan kompak di parlemen, dipastikan pemerintahan SBY-JK kesusahan dalam menuai *deal* politik, terutama dalam konteks legislasi dan anggaran. Ekstremnya, pemerintahan berjalan tertatih-tatih menghadapi DPR.

ADA yang mengatakan, hadirnya Koalisi Kebangsaan dan efeknya, dalam peningkatan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan pemerintah merupakan "teror politik". Prediksi kelak pemerintahan tak efektif, akibat "tersandera" realitas politik DPR yang mayoritas tak mendukung eksekutif, membuat pemerintahan SBY-JK terhantui. Tetapi apakah ia akan terbukti efektif? Apakah pemerintahan kelak akan terus tersandera dan tidak mampu menggiring kebijakan politiknya secara baik? Hal itu tergantung tiga faktor.

Pertama, konsistensi oposisi. Koalisi Kebangsaan akan berjuang keras mengonsolidasi diri, memantapkan konsistensi bergerak di jalur oposisi. Realitas politik kerap membuktikan, konsistensi bisa rapuh. Adakalanya, koalisi tak efektif menggolkan ketua DPRD, juga gubernur dan bupati. Koalisi Kebangsaan "gagal" di Jawa Timur, berhasil di DKI Jakarta dalam menggolkan ketua DPRD. Apakah setelah SBY-JK menang, Koalisi Kebangsaan akan mencatatkan keberhasilannya dalam konstelasi politik parlemen dan eksekutif daerah? Politik kita susah ditebak. Bila para elite politik tingkat atas tidak memantau dan mengarahkan saksama, bisa jadi yang muncul kekalahan demi kekalahan. Tantangan Koalisi Kebangsaan justru bagaimana mengendalikan "pragmatisme politik" itu sendiri.

Kedua, faktor kecanggihan komunikasi politik pemerintah. Saat pemerintahan baru terbentuk, daya tawar politiknya naik, seiring rasa percaya dirinya yang mengemuka pascapilpres secara langsung. Pemerintah merasa punya legitimasi politik amat tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam posisi seperti itu, kualitas komunikasi menjadi amat bermakna sebagai ekspresi "daya hidup" pemerintahan baru. Tentu saja pemerintahan baru tidak

sepenuhnya menyerah dalam memperjuangkan kebijakannya, lobi politik tingkat tinggi akan terus berlangsung, dan dalam konteks ini para komunikator politik mesti ditampilkan.

Ketiga, terkait faktor bagaimana konsesi-konsesi politik baru terciptakan melalui kecanggihan komunikasi politik eksekutif dan DPR. Ada titik-titik kompromi yang muncul dengan sendirinya, setelah kedua pihak menerima konsesi politik tertentu. Tidak ada yang puas seratus persen dalam proses politik, tetapi konsesi-konsesi politik yang diambil kedua pihak, akan mampu mencairkan kebekuan, mengingat kompromi telah tercapai.Kompromi politik yang dihasilkan dalam suasana demokrasi oposisional, diharapkan akan menunjukkan kematangan kualitasnya, sehingga benar-benar sesuai aspirasi publik dan efektivitas masa depan bangsa.

HARAPAN utama atas fenomena demokrasi oposisional adalah bagaimana fungsi check and balance benar-benar terwujud dengan baik dalam pentas politik, serta menghasilkan produk-produk dan praktik kebijakan publik yang makin berkualitas. Bagaimanapun pasca-pilpres, rakyat akan menjadi penilai dan pencatat: apakah aspirasi mereka akan tertampung dan terjembatani dengan baik, atau justru sebaliknya.

Kelak, rakyat di daerah masih akan memainkan peran penentu dalam pemilihan kepala daerah langsung. Demokrasi elite bergerak di DPR/DPRD dan eksekutif di pusat dan daerah. Kita bersyukur atas hadirnya pemerintahan baru pascapilpres, juga berterima kasih dengan pemikiran dan gerakan koalisi parlemen (yang kali ini diperankan Koalisi Kebangsaan) yang telah membawa dinamika politik dalam bingkai demokrasi oposisional. Yang penting, bagaimana ke depan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia konsisten. Kalaupun terformat dalam bingkai demokrasi oposisional, harus sama-sama mencari jalan keluar terbaik, bukan "jalan buntu". Selanjutnya, adalah tugas bersama untuk tidak mengulangi (mencegah) praktik-praktik politik ala Orde Baru, yang potensial dilakukan pemerintah dan parlemen.

Stagnasi politik yang merupakan "hantu" bagi pemerintahan ke depan tidak akan terjadi bila ada komunikasi dan proses politik yang baik dan dewasa. Mengingat, masa depan politik Indonesia pascapilpres akan lebih banyak ditentukan seberapa besar elite politik berkiprah. Dengan praktik demokrasi oposisional, mudah-mudahan perilaku politik yang "menyimpang" (mengingkari amanat rakyat) akan terkoreksi dan tersingkir.●

Reformasi TNI, Tak Cukup Sampai di Sini

KOMPAS, 5 OKTOBER 2004

HADIAH HUT Ke-59 TNI 5 Oktober 2004 berupa disetujuinya RUU TNI menjadi UU oleh DPR dalam rapat paripurna 30 September lalu. Maka, TNI mempunyai tambahan payung hukum setelah RUU TNI disahkan menjadi UU oleh tanda tangan Presiden Megawati Soekarnoputri (*Kompas*, 1/10/2004). Dengan demikian, TNI memasuki babak baru kesejarahan, menuju tentara modern dan profesional yang dicintai rakyat. Ada kemajuan dalam substansi UU TNI, bahwa ia telah mengadopsi paradigma supremasi sipil sedemikian rupa, meski masih menyisakan catatan.

Hal-hal yang menyebabkannya dianggap maju antara lain: regulasi komando teritorial (koter), dihapuskannya "bisnis militer" secara bertahap dalam lima tahun, serta penegasan penghapusan fungsi politik dan kekaryaan. Yang masih menjadi ganjalan, soal posisi struktural institusi TNI yang masih di bawah presiden langsung, bukan kementerian pertahanan, sehingga dikhawatirkan masih memiliki pengaruh politik atas kebijakan publik pemerintah.

Karena itu, disetujuinya RUU TNI bukan sesuatu yang bersifat final, dalam konteks reformasi TNI diberlangsungkan. UU TNI – bila sudah ditandatangani presiden – memberi kesempatan kepada TNI untuk berbenah. Sifatnya tidak "revolusioner", tetapi ada pena-

hapan dalam menuju perubahan. Untuk meregulasikan koter dan menghapuskan bisnis militer diperlukan waktu. Artinya, di masa transisi ini, peluang TNI untuk melakukan sesuatu secara konstruktif, seiring masih adanya celah untuk ikut menentukan kebijakan, khususnya terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan tidak berpolitik, diharapkan TNI berkonsentrasi membenahi dan mereformasi dirinya secara sungguh-sungguh.

Dengan regulasi koter diharapkan tanggung jawab masyarakat kian meningkat dalam partisipasinya mendukung upaya bela negara dalam konteks sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Tetapi harus dicegah efek munculnya pola-pola militerisme. Tanggung jawab masyarakat dalam sishankamrata bukan berarti mengeksploitasi gaya militeristik (memiliterkan masyarakat), tetapi mengembangkan rasa tanggung jawab dan kesiagaan rakyat menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keamanan bangsa atas ancaman dari dalam dan luar negeri.

Di sisi lain, salah satu risiko hadirnya UU TNI ialah kebutuhan peningkatan anggaran. Ini terkait secara tak langsung dengan penghapusan unit-unit bisnis militer. Dalam konteks ini, TNI tidak diperbolehkan menggalang dana dari bisnis-bisnis yang dilakukan lewat yayasan-yayasan bentukannya. Anggaran militer harus diproporsionalisasikan. Memang kondisi infrastruktur pertahanan yang kita miliki memprihatinkan, selain tingkat kesejahteraan prajurit. Ke depan ia harus diperhatikan betul agar TNI mampu profesional, ditunjang sarana-prasarana memadai.

TIDAK semua elemen di negara ini menginginkan institusi TNI lemah. Karena itu, proses penataan institusi TNI harus dilakukan secara baik, hal-hal yang di luar kewenangannya harus tidak boleh lagi dicampuri. Saat ini alam demokrasi telah membaik, rakyat (publik) dan masyarakat politik akan melihat bagaimana kesungguhan TNI mereformasi diri. Apakah perlu dikhawatirkan akan adanya remiliterisasi?

Dengan kata lain, apakah dalam praktiknya TNI enggan me-

lakukan perubahan mendasar, baik penataan struktural maupun mental? Semua pihak hendaknya berbaik sangka, TNI dan pemerintahan baru memiliki niat baik untuk konsisten berdemokrasi secara *on the right track*. TNI berkesempatan membangun hubungan sipil-militer yang berorientasi – apa yang disebut Huntington sebagai – kontrol sipil obyektif (*objective civilian control*).

SBY sebagai presiden berlatar belakang militer, bukan pemikir yang terlampau konservatif, tetapi moderat dan *open minded*. Karena itu, terkait strategi pertahanan (dan keamanan) mendatang, perlu terus diingatkan, harus dikaitkan ke konsolidasi demokrasi. Strateginya harus realistis, dikaitkan lingkungan internal dan eksternal yang terus berubah. Pengalaman masa lalu hendaknya menjadi cermin. Konsep strateginya harus komprehensif, tak condong ke darat, tetapi proporsional laut dan udara.

REFORMASI internal TNI memenuhi amanat UU TNI, tak lepas dari perkembangan lingkungan eksternal. Politik pasca-2004 adalah politik yang dinamis. Dinamika politik parlemen dan pemerintahan demikian semarak menuntut adanya pencermatan secara mendalam. TNI tidak akan lagi berpolitik praktis, tetapi belakangan ini Panglima TNI mempertimbangkan penggunaan hak politik (hak pilih) para anggota TNI untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hak itu didasari legitimasi bahwa semua komponen bangsa, baik sipil maupun militer, memilikinya tanpa diskriminasi.

Tentu saja bila hak tersebut digunakan, ada risiko khusus terjadinya konflik politik militer karena aspirasi politik berbeda. Risiko ini ditanggung Panglima TNI, artinya ia harus mampu menjaga netralitas dan stabilitas internal TNI. Kalangan TNI tidak boleh terpancing dengan tawaran-tawaran politik yang langsung atau tidak langsung muncul dari partai-partai politik yang tengah berlaga di kompetisi politik nasional dan lokal.

Yang juga perlu dibenahi, selain menata mentalitas (agar tidak militeristik), juga cara berpikir kalangan TNI. Sudah bukan zamannya TNI berpikir lebih super ketimbang (politisi) sipil, sep-

erti kerap dilegitimasikan pejabat militer Orde Baru. Kalangan TNI perlu memahami dan tidak usah terpancing dinamika politik sipil dan pemerintahan. Militer adalah alat negara, posisinya tidak lebih tinggi dari presiden.

Dalam hubungan dengan masyarakat luas serta komponen-komponen bangsa yang lain, TNI harus mau merasa sejajar, tidak lebih tinggi derajatnya (bermental, meminjam J Kristiadi, "nDoro-isme"). Dalam alam demokrasi tidak ada kastaisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada warga negara kelas satu dan seterusnya, apa pun profesinya.

Karenanya, dalam rangka konsilidasi dan membangun kebersamaan semua komponen bangsa, kualitas kesalingmengertian perlu diciptakan. Tak terkecuali TNI. Eksklusivitas TNI di tengah masyarakat harus dihindari. Reformasi TNI belum selesai, tak cukup sampai di sini. Sudah saatnya TNI memanfaatkan peluang bagi reformasi (secara bertahap) sebagaimana diamanatkan UU TNI. Pemerintahan SBY-JK diharapkan mampu menciptakan iklim kondusif bagi proses konsolidasi demokrasi yang menempatkan posisi dan peran TNI semakin profesional.●

Sumpah Pemuda, Menpora, dan *Civil Society*

KOMPAS, 28 OKTOBER 2004

PERINGATAN Sumpah Pemuda 28 Oktober kali ini disuguhi hadiah istimewa berupa kembalinya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dijabat oleh Adhiyaksa Dault. Setidaknya, hal tersebut menandakan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menganggap penting eksistensi dan peran dunia kepemudaan. Dengan adanya kementerian pemuda, negara pun merasa memiliki "tanggung jawab" atas dinamika kepemudaan nasional. Apa hubungannya dengan Sumpah Pemuda dan pola pembinaan

pemuda di masa lalu? Sumpah Pemuda selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral (mistis) karena dengannya Indonesia seperti sekarang ini terwujud.

Dulu, ketika Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, Indonesia masih berupa konsep (bayang-bayang). Hal yang paling mengesankan ialah para pemuda (*Jong Java*, *Jong Celebes*, dan *jong-jong* lainnya) amat sadar akan perjuangan kemerdekaan dari penjajah Belanda dan membentuk sebuah tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu: Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka dan melangsungkan pembangunan nasional, Sumpah Pemuda tidak dilupakan. Setiap 28 Oktober diperingati secara sederhana untuk mengenang peran dan kiprah para pemuda pada masanya. Namun, pengalaman sejarah membuktikan bahwa peringatan Sumpah Pemuda pun begitu terkait dengan konteks kepentingan politik penguasa. Sumpah Pemuda diambil alih oleh "negara". Pada masa Orde Baru, eksistensi kementerian pemuda dipakai sebagai antara lain upaya untuk melanggengkan paradigma korporasi negara, dan tentu saja peringatan Sumpah Pemuda amat terkait dengan cita-rasa *mainstream* kepolitikan yang ada.

Memang lahirnya Sumpah Pemuda tak lepas dari dimensi politik yang ada kala itu – yang dimainkan oleh elite-elite pemuda pergerakan. Sumpah Pemuda adalah perekat kesadaran nasional yang amat fenomenal dalam sejarah kebangsaan kita. Di setiap zaman tentu ada elite-elite pemuda yang berkiprah di segala sektor dan memiliki kepekaan politik kebangsaan.

Dalam catatan sejarah kita, pemuda biasanya menjadi pendobrak kebekuan sejarah, tetapi yang lantas mengisinya kebanyakan adalah para elite politik yang seharusnya tidak bisa dibilang pemuda lagi. Pemuda adalah kekuatan yang dinamis, sekaligus menggiurkan untuk dimanfaatkan secara politik (kekuasaan) – sebagai kalangan pendobrak alias "pendorong mobil mogok".

ADA sementara kalangan yang khawatir bahwa eksistensi Menpora akan memperkokoh dominasi negara atas dunia kepemu-

daan nasional, yang pada hakikatnya telah menjadi kekuatan *civil society*. Pola pembinaan kepemudaan di masa Orde Baru, sebagaimana banyak ditegaskan dalam kajian-kajian kepolitikan ilmiah-akademis, bersandar pada pola pengokohan korporatisme.

Artinya, semua komponen sosial-politik kepemudaan harus berada di bawah kontrol dan kendali negara. Kementerian pemuda di masa lalu antara lain berfungsi untuk "menjinakkan" radikalisme kalangan pemuda yang emoh dihegemoni negara. Misalnya pada saat asas tunggal Pancasila diterapkan untuk setiap organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk ormas kepemudaan (OKP), maka betapa sibuknya sosok menteri pemuda waktu itu untuk membujuk dan "menjinakkan" elemen pemuda radikal. Semua itu dapat dipahami mengingat secara menyeluruh negara (*state*) begitu dominan, pilihan berdemokrasi secara fair pun belum dilakukan.

Namun, setelah Orde Baru jatuh, semua harus ditata-ulang. Paradigma lama ambruk dan hadirlah paradigma baru, *civil society*. Negara tidak boleh ikut campur terlampau jauh pada urusan-urusan masyarakat seperti masa lalu. Pembinaan bidang kepemudaan tidaklah berarti mengontrol dan mengekang dinamika kepemudaan menurut kemauan politik yang berkuasa. Justru sebaliknya, negara perlu melihat kekuatan-kekuatan kepemudaan yang ada sebagai sebuah realitas yang plural dan otonom. Menpora, sebagai wakil "negara" dalam hal ini, hanyalah sekadar fasilitator atas inisiatif-inisiatif kepemudaan secara positif dan konstruktif.

KARENA komponen kepemudaan nasional demikian beragam kini, Menpora tidak akan membatasi mitra kerjanya hanya kepada OKP-OKP yang ada, tetapi juga yang lain, sebagaimana yang terhimpun dalam banyak lembaga swadaya masyarakat. Menpora harus berorientasi program, dan mitra kerjanya adalah pemuda dari segala spektrum yang ada. Akan tetapi harus diberi aturan yang jelas, mana kelompok pemuda yang layak untuk dipercaya menjalankan program yang ada.

Hal ini untuk mencegah masuknya kelompok pemuda yang

asal-asalan, yang tak memiliki persyaratan memadai dan tidak layak untuk disebut sebagai kelompok pemuda. Penting kiranya bagi Menpora untuk merumuskan siapa pemuda yang dimaksud, siapa saja yang dapat mengakses program dan aktivitas yang digelar bekerja sama dengan instansinya.

Hal di atas hanyalah teknis. Visi kementerian pemuda seharusnya menjangkau kepemimpinan pemuda secara berbobot, mempersiapkan komponen pemuda sebagai pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Karena itu, Menpora tidak boleh merusak perkaderan kepemimpinan pemuda secara alami yang tengah berlangsung, dengan pola-pola intervensi seperti di masa lampau. Justru Menpora mengupayakan kondisi kondusif bagi bergeraknya dinamika perkaderan kepemimpinan kepemudaan baik di dalam maupun luar kampus. Krisis kepemimpinan memang menjadi keprihatinan kini, dan karena itu pembibitan pemimpin di kalangan pemuda menjadi sangat perlu untuk didukung.

Di alam demokrasi yang mementingkan prinsip keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*), seharusnya hal inilah yang diimplementasikan. Prinsip tersebut sangat paralel dengan konsep *civil society*, yang menekankan kemandirian dan keberdayaan kelompok-kelompok otonom dalam masyarakat sehingga mampu mengatakan "tidak" terhadap kebijakan negara yang intervensif (fatalistik) dan merugikan kepentingan publik. Demikianlah, Menpora harus mampu melakukan obyektivikasi atas realitas dan kecenderungan kepemudaan mutakhir. Jangan sekali-kali terjebak upaya penjinakan, pengontrolan, dan "penguasaan" atas pluralisme kepemudaan yang ada – mengingat *absurd* adanya.

BERAGAM kelompok kepemudaan yang ada di Tanah Air menunjukkan, realitas pluralisme kepemudaan itu *sunatullah* (hukum alam), yang harus dikelola dengan tepat. Jadi, konteks manajemen konflik amat bermanfaat di sini. Makna Sumpah Pemuda pun harus didemistifikasi, dalam arti tidak dipandang sebagai upaya legitimasi pemaksaan akan "persatuan dan kesatuan", tetapi sebagai

dokumen yang menyemangati segenap komponen yang ada untuk hidup berdampingan secara damai dan tertib dalam sebuah bangsa (nation). Konteks historis menjadi amat penting dalam merefleksikan peran pemuda ke depan sebagai sosok-sosok yang siap menggantikan generasi lanjut secara lebih baik dan bermutu.

Pesan utama Sumpah Pemuda adalah nasionalisme. Dan pemuda sangat terkait dengannya. Nasionalisme kita saat ini dihadapkan pada banyak masalah, mulai dari pengupayaan tegaknya demokrasi, hak asasi manusia, gejala disintegrasi, hingga penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba). Permasalahan yang dihadapi, khususnya pemuda beragam. Ada baiknya Menpora membantu memetakan permasalahan itu, dan dengan segenap komponen pemuda membuat program yang bermanfaat. Kementerian Pemuda pada akhirnya tidak boleh eksklusif, menutup diri dari segenap dialog dan masukan dari berbagai komponen pemuda, dan harus pandai menyerap aspirasi.●

Desimplifikasi Partai Golkar

KOMPAS, 13 DESEMBER 2004

MUNAS PARTAI Golkar di Denpasar pertengahan Desember ini, mendapat banyak sorotan. Hal itu wajar mengingat Partai Golkar adalah fenomena politik tersendiri dalam lanskap politik Indonesia pasca-Orde Baru. Secuplik sejarah masa depan partai politik Indonesia, akan terteropong momentum munas itu.

Adalah fakta politik, Partai Golkar tidak tenggelam bersama perubahan politik menyusul berakhirnya Orde Baru. Ia termasuk salah satu kekuatan politik kolektif yang mempertegas berjalannya pola *transplacement* (istilah Samuel P Huntington) bahwa kekuatan politik lama tidak tumbang setelah ada perubahan politik mendasar, tetapi masih terlibat aktif, bahkan eksis dan signifikan.

Eksistensi Partai Golkar ditunjukkan kemenangannya pada

Pemilu 2004 (urutan pertama), juga Pemilu 1999 (urutan kedua). Artinya, partai ini masih memperoleh dukungan kuat masyarakat (konstituen politik) Indonesia. Tatkala sistem demokrasi bekerja dan kekuatan politik Partai Golkar – dengan "paradigma baru"– hadir, bersaing dengan partai lain, tidak dapat disalahkan bila ia memperoleh banyak dukungan suara. Menang atau kalah (banyak atau sedikit) dukungan merupakan konsekuensi atas kompetisi politik yang demokratis. Partai Golkar – Mochtar Pabottingi menyebutnya "bablasan Orde Baru" – merupakan fenomena partai serius di Indonesia yang punya prospek partai masa depan. Karena itu, mengapa Munas di Bali menjadi penting untuk dicermati.

BANYAK kalangan suka menyederhanakan masalah (simplifikasi) dalam melihat fenomena politik Partai Golkar. Simplifikasi dalam memandang dinamika politik Partai Golkar terkait pandangan normatif (bagaimana seharusnya), bukan bagaimana kenyataannya. Misalnya, partai ini segera diperkirakan akan tenggelam menyusul kebangkrutan Orde Baru.

Asumsinya para pendukungnya akan lari ke partai lain – seiring berubahnya isu-isu politik anti-Orde Baru – dalam pemilu ia akan ditinggalkan pemilih (konstituen). Juga, karena Partai Golkar tidak lagi menguasai pemerintahan sepenuhnya ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Seorang pejabat yang dijuluki "tokoh reformasi" saat itu sempat berujar, Partai Golkar sebentar lagi akan masuk kotak sejarah.

Ternyata simplifikasi itu keliru. Partai ini masih eksis dan kuat. Dukungan politik tingkat elite politik kenegaraan (termasuk birokrasi) dan konstituen masih kuat meski sistem politik berubah. Di sisi lain tampaknya ada faktor keberuntungan, proses politik yang pragmatis – di tengah alam demokrasi – pasca-Orde Baru telah menyelamatkan partai ini. Partai Golkar telah menjadi faktor determinan dalam setiap proses politik, terutama di sidang parlemen.

Simplifikasi lain ditunjukkan asumsi banyak kalangan atas fenomena Akbar Tandjung. Ketika ia terkena kasus hukum, ba-

nyak pihak menyimpulkan, tamatlah karier politiknya dan lumpuhlah Partai Golkar. Kenyataannya, Akbar dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung. Partai Golkar tersandera kasus Akbar, tetapi bukan berarti terjadi kemandekan atas proses konsolidasi dan soliditas organisasi. Justru, yang terjadi, proses konsolidasi itu berjalan terus, bahkan dalam hal ini Partai Golkar paling serius.

DALAM memandang perjalanan Partai Golkar, dalam konteks Munas Bali, selayaknya dilakukan desimplifikasi, tak menyederhanakan masalah. Munas ini berbeda dengan Munaslub 1998 di Jakarta. Kondisi politik sudah kondusif, ditandai banyak kader partai yang *come back*, menyemarakkan kompetisi internal, khususnya di daerah-daerah. Para *sesepuh* (yang punya saham di awal berdirinya partai, dan tak banyak komentar saat partai ini dihujat publik) tak sungkan turun gunung, dengan dalih hendak menyelamatkan masa depan partai.

Munas adalah arena tertinggi pengambilan keputusan internal partai. Publik akan disuguhi proses demokrasi politik. Konsistensi demokrasi internal dalam munas terletak pada bagaimana pesertanya menyetujui aturan main, terlepas apakah "pola permainan" yang ada melibatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi dan DPD kabupaten/kota atau DPD provinsi. Juga apakah calon ketua umumnya terbuka (untuk kader partai) atau tertutup (membatasi pada pengurus aktif). Kalangan eksternal dapat terjebak simplifikasi dalam memandang konteks ini, dengan segera menyimpulkan proses demokrasi terhambat di internal partai, serta menyiapkan kesimpulan, sebagai "akal-akalan". Padahal, tidaklah mudah untuk menjustifikasi, proses politik internal yang ada tak demokratis.

BANYAK kalangan berharap adanya kelembagaan politik yang kuat, antara lain ditunjukkan dengan adanya partai politik yang kokoh dan mumpuni. Dalam konteks ini, melihat dua kali pengalaman pemilu, Partai Golkar berpeluang untuk itu. Kini persoalan kepemimpinan dan regenerasi menjadi dua sorotan. Dalam konteks kepemimpinan, faktor Akbar berhasil menunjukkan kuali-

tasnya sebagai pimpinan partai di masa-masa sulit, dan mengembalikan posisi partainya "secara terhormat", menang Pemilu Legislatif 2004, meski gagal memenangkan calon presidennya. Banyak yang tidak suka pada gaya kepemimpinan Akbar, tetapi obyektif ia adalah sosok pimpinan partai politik yang sukses menjaga marwah partainya di masa-masa krusial.

Regenerasi internal merupakan pekerjaan rumah yang serius, siapapun yang menjadi ketua umum. Sistem perkaderan dan perjenjangan politik di internal partai perlu dibenahi. Akses kalangan muda partai ke jenjang kepengurusan lebih tinggi harus terakomodasi. Hal ini tak dapat dilihat simplistis mengingat ada lalu lintas kepentingan elite politik level atas, terlepas siapa ketua umumnya nanti.

SILANG sengkarut kepentingan muncul dalam forum munas kali ini. Secara makro, bahkan pemerintahan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu menaklukkan Partai Golkar, yang karena terikat Koalisi Kebangsaan, memosisikan sebagai kelompok penyeimbang di parlemen. Pemerintahan SBY butuh stabilitas politik, dalam arti dukungan politik optimal atas segala kebijakan dan sikap-sikap politiknya. Masih menjadi tanda tanya, apakah isu stabilitas politik ini akan mampu menggeser isu *checks and balances* mengingat, secara simplistis, sudah menjadi kesimpulan umum kebanyakan kader Partai Golkar bermentalitas memimpin di pemerintahan, bukan menjadi oposisi.

Munas memang bukan sekadar memilih siapa ketua umum partai. Meski demikian, tetap menjadi penting membaca aneka kecenderungan yang akan dilakukan siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum. Terlepas dari itu, tantangan partai ke depan kian berat, bentuk-bentuk ujian politiknya variatif dan tidak sesederhana yang dibayangkan.●

Partai Golkar Pasca-Akbar

KOMPAS, 21 DESEMBER 2004

MUHAMMAD Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 pada munas Bali. Ia memperoleh dukungan 323 suara, sementara Akbar Tandjung 156 suara (padahal dalam putaran pertama Akbar memperoleh 191 suara) dan tiga suara tak sah. Kemenangan JK, yang ditopang oleh Surya Paloh (diposisikan sebagai Ketua Dewan Penasihat), Aburizal Bakrie (Menteri Koordinator Perekonomian), Agung Laksono (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Sultan Hamengku Buwono X, Prabowo Subianto (mantan Komandan Jenderal Kopassus), dan Ginandjar Kartasasmita (Ketua Dewan Perwakilan Daerah) itu, diperkirakan akan mengubah wajah Partai Golkar ke depan. Bagaimana dengan Partai Golkar pasca-Akbar?

Adalah Akbar Tandjung yang dalam pemilihan ketua umum berkoalisi dengan mantan capres Wiranto telah membuat kebijakan politik yang khas selama ini di tubuh Partai Golkar. Yang terpokok adalah, kebijakan yang terkait dengan eksistensi Koalisi Kebangsaan, di mana partai ini melakukan kerja sama koalisi secara permanen dengan PDIP dan beberapa partai lain.

Akbar mengubah haluan politik secara tegas: menjadikan koalisi yang dijalankan di pusat hingga daerah, sebagai kelompok penyeimbang (oposisi), dengan lebih memfokuskan peran dan fungsi parlemen secara optimal dan kritis terhadap pemerintahan. Pilihan tersebut ternyata mengandung risiko berat, ironisnya, justru dari internal Golkar sendiri, yakni penolakan (resistensi). Ternyata, sayangnya, mentalitas duduk dan berkuasa di pemerintahan tidak dapat dengan cepat tertransformasikan menjadi mentalitas beroposisi.

Akbar mengalami kekalahan begitu dramatis di arena munas. Ia bagai dikeroyok lawan-lawan politiknya dari "delapan penjuru angin". Banyak kalangan yang menganalisis, kekalahan tersebut terjadi, *pertama*, sebagai konsekuensi logis atas sikap-sikap politik Akbar selama ini, yang berisiko ditinggalkan elite-elite strategis terdekatnya, yang pada masa lampau banyak disokong perjuangannya, tetapi lantas meninggalkannya. *Kedua*, kelihatannya Akbar terlampau yakin atas imbauan moralnya, dengan mengingatkan para peserta munas tentang apa yang dialami partai ini di masa-masa susah dan keberhasilannya membangun eksistensi partai.

Sayang, imbauan moral tersebut tak berkekuatan politik. Realitas lapangan menunjukkan lain. Dibukanya aturan Dewan Pengurus Daerah II memperoleh hak suara, ironisnya, justru menjadi bumerang bagi Akbar. Orientasi atau pertimbangan pragmatis (termasuk isu berkembangnya politik uang), nyatanya cenderung lebih menonjol ketimbang idealis-sebagaimana ditawarkan Akbar.

BAGAIMANAPUN Akbar, berikut gagasannya menjadikan Golkar kelompok penyeimbang berikut kontroversinya, tetap tercatat dalam sejarah kepolitikan mutakhir. Kini, walaupun JK mengatakan tetap menjalankan fungsi *checks and balances* dalam konteks hubungan dan respons Golkar terhadap dinamika politik nasional, tetapi karena ia sendiri kebetulan adalah wakil presiden, maka posisi sebagai kelompok penyeimbang pasti tidak akan dapat berjalan secara optimal. Apalagi, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono ada dalam satu paket dengan JK.

Partai ini akan segera berubah dari posisi kelompok penyeimbang yang memiliki peluang implementasinya secara optimal di DPR, menjadi "alat operasional politik" pemerintah – apalagi kalau Agung Laksono gagal "membawa diri" dalam memainkan peran optimal DPR. Dengan kata lain, setidaknya pemerintah akan bisa dengan amat mudah menjinakkan fungsi-fungsi oposisi yang sesungguhnya hendak dikembangkan Partai Golkar secara permanen.

Partai Golkar di bawah JK segera diidentikkan sebagai partai

pemerintah, yang erat kaitannya dengan pilihan kebijakan pemerintahan Presiden SBY secara luas. Beragam kebijakan pemerintah, termasuk yang kontroversial, yang memperoleh sorotan publik, akan segera diidentikkan sebagai kebijakan yang tak lepas dari Partai Golkar, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru. Selanjutnya, Partai Golkar akan dinilai ulang oleh konstituennya. Keberhasilan dan kegagalan pemerintahan segera terkait kembali dengan eksistensi dan citra partai Pohon Beringin ini – mengingat posisinya sebagai kelompok penyeimbang, "tercabut" dengan sendirinya oleh kenyataan bahwa JK adalah wakil presiden.

Sebagaimana diketahui, selama enam tahun belakangan, Partai Golkar telah mampu memantapkan diri sebagai partai politik yang membaik citranya, seolah lepas dari kejelekan-kejelekan perannya di masa lalu. Partai ini ternyata masih menjadi tumpuan harapan sebagian rakyat, mengingat ia mampu memperoleh dukungan suara terbesar kedua pada Pemilu 1999 dan pemenang pemilu legislatif 2004.

JK dan segenap jajaran pengurusnya banyak menerima warisan-warisan positif, tetapi juga sebagaimana diingatkan Akbar Tandjung, Jusuf akan banyak mengalami kesulitan. Posisinya sebagai wakil presiden telah menjadi bahan sindiran (sinisme) yang luas di masyarakat – khususnya di tingkat elite. Fatsun politik JK dipersoalkan, di nilai sebagai sebuah kemunduran bagi masa depan demokrasi, tatkala ia justru mempertegas kembali rangkap jabatan dan amat terkait dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

SECARA internal, Partai Golkar pasca-Akbar mengalami perombakan drastis. Secara struktural ada posisi wakil ketua, secara personal pun muncul banyak "wajah-wajah baru" (tapi lama). Biasanya orang segera mencermati sejauh mana JK mengakomodasi kubu Akbar, atau sejauh mana de-Akbarisasi dilakukan. Akan amat disayangkan, bila kalangan potensial (khususnya yang muda) dari kubu Akbar dimarjinalkan, dibatasi peluang karier politiknya ke depan. Kubu JK sebaiknya objektif dan tak terjebak orientasi politik

sempit atas pengaruh kekuasaan politiknya di internal partainya. Secara eksternal, para pesaing Golkar akan mereposisi ulang sikap dan kebijakan politiknya.

Elite-elite strategis Partai Golkar pasca-Akbar tampak didominasi politisi-pengusaha (konglomerat ekonomi, sekaligus politik). Dominasi faksi pengusaha diperkirakan mempermudah proses akumulasi kapital (penggalangan dana) menghadapi Pemilu 2009. Fenomena demikian menumbuhkan perhatian publik terus mencermati bagaimana cara partai ini meraup dana politiknya. Sebab bagaimanapun, faktor dana merupakan penentu "nasib politik" partai-partai. Bagaimana prospek Partai Golkar pada 2009? Semuanya bergantung apakah ia mampu merebut hati rakyat, justru seiring perkembangan kompleks politik rakyat. Lima tahun ke depan, akan dicatat apakah ia mampu merefleksikan dirinya sebagai partai masa depan.●

VII

BILA PARTAI PECAH

[2005]

KESTABILAN DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN DI MASA DEMOKRASI LONGGAR DEWASA INI, TAK LEPAS DARI KIPRAH DAN SIKAP PARPOL-PARPOL. TENTU SAJA, SIAPA PUN YANG MEMERINTAH PASTI MEMBUTUHKAN DUKUNGAN PARPOL-PARPOL, SERTA SEOPTIMAL MUNGKIN MENEKAN KEHADIRAN "OPOSISI". PADA ZAMAN-PARTAI-PARTAI SAAT INI, KERAP PEMERINTAH SUSAH UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN OPTIMAL DARI MEREKA SECARA MURNI BERDASARKAN KEPENTINGAN "KESAMAAN VISI" SEMATA. PASTI-LAH ADA PERTIMBANGAN PRAGMATIS, DAN BISA JADI IA LEBIH (AMAT) MENONJOL.

- BILA PARPOL PECAH

Pergantian Panglima TNI

KOMPAS, 24 FEBRUARI 2005

SEBAGAIMANA diatur dalam perundangan, pergantian Panglima TNI "hak prerogatif presiden", DPR hanya dimintai persetujuannya. Karenanya, kunci tetap di presiden. Pilihan presiden akan mendapat respons berbagai kalangan. Bila responsnya positif, ia menjadi kredit poin, tetapi bila negatif, mungkin presiden terpaksa mengatakan, "*I don't care with my choice*".

Meski terasa sederhana, pergantian panglima TNI di masa Presiden SBY tak semudah membalik telapak tangan. Presiden pasti sudah memiliki skenario. Sejak presiden mengirim surat pencabutan surat Presiden Megawati ke DPR menyangkut usulan pergantian Panglima TNI, skenarionya berkembang, terkait kemungkinan menguatnya resistensi politik DPR.

SEBAGAIMANA memilih personalia kabinet, publik segera dihadapkan "seni pengambilan keputusan" *a la* SBY memilih Panglima TNI, yang berbeda dengan konteks pilihan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid saat mengangkat Laksamana TNI Widodo AS, atau Megawati memilih Jenderal TNI Endriartono Sutarto.

Habibie, Gus Dur, dan Megawati sama-sama presiden dari kalangan sipil. Habibie tak begitu soal dengan posisi Wiranto dalam rangka menjaga kepentingan transisional. Gus Dur memggebrak dengan mengangkat panglima dari unsur AL dikaitkan argumentasi masa depan kemaritiman. Sementara Megawati, tak ingin punya masalah dengan militer sebagai dampak kemelut hubungan militer – Gus Dur.

Jika Gus Dur berani "menyempal dari tradisi konservatif", tidak

demikian halnya dengan Mega. Bagaimana dengan SBY, presiden pertama berlatar belakang militer sejak Soeharto jatuh? Apakah ia akan mengangkat unsur AD kembali atau justru memilih yang lain dengan prioritas unsur AU? Jika tetap memilih kalangan AD, siapa? Inilah yang menjadi teka-teki.

INFORMASI yang beredar, empat kandidat berpeluang menjadi Panglima TNI: Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD), Letnan Jenderal TNI Djoko Santoso (KSAD), Laksamana Madya Slamet Soebijanto (KSAL), dan Marsekal Muda Djoko Suyanto (KSAU). Baik KSAD, KSAL, maupun KSAU baru saja dilantik SBY, dan ketiganya dikenal sebagai militer nonpolitik dan nyaris tidak pernah berkomentar tentang politik di luar proporsi profesinya. Berbeda dengan mantan KSAL dan KSAU yang telah memasuki masa pensiun, Ryamizard masih memiliki usia aktif di dinas kemiliteran meski tidak seberapa lama lagi.

Dibanding ketiga pesaingnya, Ryamizard tergolong paling senior. Tetapi, belum tentu ia yang dipilih SBY, karena alasan politik. Ryamizard lebih dikenal sebagai "militer-nonpolitik", tetapi kesan kecondongannya mendukung Megawati di pilpres lalu masih belum terhapus, apalagi Megawati pernah menyampaikan surat ke DPR perihal persetujuan pengangkatannya sebagai Panglima TNI. Namun, surat itu lalu dicabut SBY. Memilih Ryamizard dapat menggugurkan berbagai catatan itu. Tapi, dengan risiko ketidaknyamanan. Boleh jadi SBY akan dihantui sejumlah kekhawatiran.

Beberapa kabar mengemukakan, SBY akan mengangkat Djoko Santoso sebagai panglima, tetapi dengan demikian harus "melangkahi" Ryamizard. Bila SBY memilih skenario ini, sebenarnya tidak menjadi soal, tetapi akan terbentur etika politik. Publik mungkin akan mencibir SBY terlampau tergesa-gesa mengangkat Djoko, yang sejak lama (terutama saat SBY menjabat Kepala Staf Sospol) dikenal sebagai "orang dekat"-nya. Bila hal ini dilakukan, publik segera diingatkan kembali, misalnya, atas pengangkatan mantan tim sukses SBY, Syamsir Siregar sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Maka,

yang terjadi ialah SBY-isasi militer.

Mungkin saja SBY sedikit memainkan manuver, dengan mengangkat kandidat di luar unsur AD, kemungkinan besar AU, karena selama ini belum pernah memperoleh "giliran". Di tengah jalan, SBY dapat menggantinya dengan pilihannya dari AD, yakni Djoko Santoso. Maka, kesannya SBY dinamis dalam menggerakkan regenerasi TNI. Belum ada gambaran lain di luar skenario itu. Yang jelas, pergantian Panglima TNI tak boleh ditunda-tunda. Siapapun pilihannya, prerogatif presiden, tapi prosesnya harus transparan, alasannya dipahami kalangan luas, agar tak memicu spekulasi.

SIAPAPUN Panglima TNI, tantangan ke depan tidak ringan, mengingat belum tuntasnya hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-Orde Baru. Secara eksternal, dinamika kepolitikan nasional mengharuskan TNI mampu memposisikan diri secara tepat. Perkembangan internasional pun mengharuskan TNI memperkuat kekuatan pertahanan yang kini amat terbatas. Di sisi lain, proses reformasi internal belum tuntas. Yang masih menjadi "perdebatan" antara lain struktur kelembagaan (di bawah presiden atau Dephan), bisnis militer, komando teritorial (koter), hingga anggaran pertahanan yang dirasa cekak. Di tengah kondisi kesejahteraan prajurit dan infrastruktur (peralatan dan persenjataan) yang memprihatinkan, profesionalisme TNI dituntut.

SBY tinggal memilih kandidat terbaiknya. Asal, tidak menyeretnya ke kancah politik, apalagi untuk mengamankan obsesi politik pribadinya. Sebagai tentara bertipe pemikir moderat-konservatif, SBY diharapkan konsisten pada pendapatnya untuk berpegang pada konstitusi, yang telah disepakati secara demokratis. SBY dan militer harus menunjukkan progresivitasnya memperbaiki dan meningkatkan kualitas hubungan sipil-militer, dengan adanya *blue print* (cetak biru) dan implementasinya yang jelas dan terukur.

Berbeda dengan era Gus Dur, era SBY lebih menjamin adanya hubungan harmonis antara presiden dan militer. Tetapi, yang menarik justru saat SBY, seorang presiden berlatar belakang militer,

ternyata mampu melakukan sejumlah langkah percepatan reformasi TNI tanpa harus memperoleh resistensi hebat dari internal TNI. Memilih Panglima TNI yang tepat penting dilakukan SBY. Tetapi, lebih penting lagi adalah kemajuan apa yang dicapainya kelak, setidaknya hingga 2009 dalam menata hubungan sipil-militer di Indonesia, dan sejauh mana reformasi TNI tertuntaskan.●

PDIP Pasca-Kongres

KOMPAS, 4 APRIL 2005

SEPERTI sudah dapat diduga sebelumnya, Megawati Soekarnoputri akhirnya ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP. Megawati terpilih secara aklamasi, walaupun dengan sejumlah kritikan atas dinamika demokrasi internal partai yang "semrawut". Apa makna kemenangan Megawati? Secara internal, kemenangan itu menunjukkan bahwa "politik karisma" Megawati masih awet. Sejumlah kritikan atas mandeknya demokrasi internal partai dan desakan untuk melakukan "pembaruan" yang berimplikasi pada upaya "penggantian" Megawati ternyata tak mempan menghadapi arus kelompok fanatisme-konservatif yang terkesan "galak" itu. Dengan demikian, sesungguhnya PDIP sebagai partai semakin menegaskan kokohnya apa yang disebut Syamsuddin Haris sebagai "personalisasi kekuasaan" (*Kompas*, 31/3).

PDIP masih akan bertumpu pada figur, bukan "sistem". Apabila ketergantungan ini tidak dapat dilepas dan Megawati tidak cepat membenahi sistem (demokrasi) internal partai, pascatahun 2009 nasib partai ini kemungkinan besar akan semakin "tidak jelas".Terlepas dari dinamika demokrasi internal yang "unik" dan dalam taraf tertentu "mengecewakan" itu, dengan dipegangnya kembali posisi ketua umum oleh Megawati, hampir dapat dipastikan akan melanggengkan kebijakan politik partai, setidaknya hingga tahun 2009, sebagai "kelompok penyeimbang" (mirip oposisi) atas "kekuatan politik" pro-pemerintah, terkhusus di Senayan.

Banyak kalangan yang menduga, kalau saja yang terpilih bukan Megawati, partai "moncong putih" ini cepat atau lambat akan melunak sikap politiknya atas banyak kebijakan pemerintah. Ide "kelompok penyeimbang" ini terus bergerak tatkala Koalisi Kebangsaan "kalah" dalam arena pemilihan umum presiden (pilpres) 2004 dan kini setelah Partai Golkar diketuai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, "hanya" bertumpu pada kekuatan politik PDIP.

Secara psiko-politik, Megawati memiliki "persoalan serius" dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga susah dibayangkan apabila sikap dan langkah politik PDIP melunak. Megawati kelihatannya masih belum melupakan "kenangan pahit" tatkala SBY, yang pernah menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong Royong, tiba-tiba "menyalip di tikungan" dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pilpres 2004. Fakta kemudian membuktikan bahwa SBY-Jusuf Kalla menang. Apakah Megawati berubah sikap melunak atas kebijakan-kebijakan politik mantan anak buahnya? Di sinilah letak persoalan psiko-politik yang dimaksud.

BAGI PDIP sendiri, ke depan tantangannya semakin kompleks. Sepertinya "hidup-mati" terletak pada sekadar faktor Megawati. PDIP gagal berubah menjadi partai politik modern justru karena menggantungkan pada figur tradisional. Kelihatannya Megawati akan segera melakukan "pembersihan" pada para pengurus partai yang "kritis" kepadanya. Dan apabila itu dilakukan, ia semakin leluasa dalam mengimplementasikan "personalisasi kekuasaan"-nya.

Dalam kondisi seperti itu, risikonya ia akan gampang kehilangan "kendali" mengingat pertaruhannya semakin berat. Artinya apa yang diputuskan oleh Megawati, karena lemahnya kontrol internal, bisa banyak keliru. Namun, justru hingga tahun 2009 orang akan melihat "the real Megawati" alias Megawati yang sebenarnya. Orang sudah punya penilaian atas karakter kepemimpinan Megawati selama ini. Namun, fakta politik "mengalahkannya" dan lantas orang akan melihat apakah ia dapat bangkit kembali, atau justru makin terpuruk "prestasi politiknya".

Megawati atau bukan yang memimpin PDIP, partai ini tak lepas dari kelemahan cukup mendasar: sumber daya manusia yang cenderung lemah dan emosional. Semrawutnya demokrasi internal menandakan betapa masih memprihatinkannya kondisi sumber daya manusia partai yang gampang tersulut emosi. Potensi konflik partai ini sejak kelahirannya tergolong cukup besar. Memang infrastruktur partai sudah meluas, tetapi kurang diisi oleh sumber daya manusia partai yang mampu menyeimbangi "gerak maju politik", khususnya di tingkat lokal.

Seharusnya Megawati segera menyadari bahwa aspek ketergantungan figur saja tak cukup, bahkan terlampau membahayakan masa depan partai. Ke depan, pilihan politik makin beragam, proses pendidikan politik pun berjalan terus. PDIP dapat ditinggalkan apabila ternyata dianggap sudah tidak layak lagi dijadikan tumpuan harapan *wong cilik*. Juga bilamana saja konflik internal terus-terusan terjadi, sementara karisma Megawati kian "tergerogoti" dari dalam dan dari luar – dengan munculnya figur-figur politik baru yang lebih dianggap "menjanjikan" (pembawa harapan).

IBARAT pertandingan tinju, sorot mata penonton antara lain kini tetap diarahkan pada PDIP sebagai representasi "kelompok penyeimbang" versus kekuatan-kekuatan politik pro-pemerintah. PDIP, sebagai kekuatan politik, risikonya bisa menjadi "kesepian" atau teralienasi apabila kekuatan-kekuatan politik lain tidak sejalan dengan jalan pikiran dan langkah politiknya.

Pada saat ini saja, mengambil kasus penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak, realitanya, kekuatan pro-pemerintah di parlemen ternyata lebih besar setelah ada "kompromi". Hanya Partai Kebangkitan Bangsa dan PDIP saja yang tegas-tegas menolak. Ini hanya satu *test case*, yang mengisyaratkan, kelihatannya alienasi-alienasi politik semacam itu akan lebih banyak dialami oleh PDIP sebagai "kelompok penyeimbang".

PDIP dan Megawati sesungguhnya tengah bertaruh dengan dirinya sendiri melawan perubahan dan dinamika politik Indonesia,

baik secara lokal maupun nasional. Para *wong cilik* yang diklaim sebagai basis konstituen dapat segera mengalihkan dukungan politik bilamana PDIP gagal menjadi simbol-simbol pembela mereka. Padahal sudah banyak bukti bahwa PDIP gagal mempertahankan simbolnya sebagai partai politik *wong cilik*. Secara internal, mungkin Megawati bisa meredam segala gejolak di dalamnya sebagaimana dibuktikan selama ini, bahwa konflik "akan selesai" begitu Megawati angkat bicara – walaupun sekadar bersifat "balsem", sementara. Bisa jadi kelompok-kelompok di seberang kubu Megawati nekat mendirikan partai baru, tetapi hampir dapat dipastikan – dan pengalaman juga membuktikan – "partai-partai sempalan" itu masih akan kalah jauh pamornya.

Secara internal, Megawati karena *full time* mengurusi dan merekonsolidasi kekuatan politik partainya. Tentu akan amat siasia bilamana ia hanya diam dan kurang memerhatikan aspek konsolidasi. Megawati perlu "belajar banyak" kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung yang terbukti berhasil membesarkan partainya lewat konsolidasi internal dari tingkat daerah hingga nasional, terlepas dari faktor perbedaan kepentingan politik antarelite menjelang pilpres yang lalu.

Suka tidak suka, Megawati tetap faktor utama di PDIP dan keluar ia akan memainkan pengaruh politiknya yang "tanpa kompromi". Publik secara luas akan "diuntungkan" oleh eksistensi PDIP sebagai komponen utama "kelompok penyeimbang" utamanya dalam konstelasi politik nasional – terlepas dari kepentingan subyektif politiknya. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat terus-terusan bersikap "*semau gue*" dan harus mengindahkan dinamika *checks and balances*. Tanpa itu, demokrasi akan kehilangan rohnya.

Apabila Megawati dan PDIP konsisten, publik akan merasakan kemanfaatan keberadaannya. Namun, kasus Kongres PDIP menunjukkan partai-partai nasional ternyata masih memiliki banyak titik lemah yang bisa menghambat "daya hidup" dan masa depannya, termasuk karena tersandera perilaku para elitenya.●

TNI Kita yang Lemah

KOMPAS, 28 APRIL 2005

KENAPA AMERIKA SERIKAT DISEGANI NEGARA LAIN? SELAIN MEMILIKI KEKUATAN EKONOMI, MEREKA MEMILIKI ANGKATAN PERANG YANG KUAT. DUA KEKUATAN ITU MEMBUAT MEREKA MEMILIKI *BARGAINING POWER* DENGAN NEGARA DAN KEKUATAN MANAPUN. MENGGANGGU AS ATAU KEPENTINGANNYA SAMA DENGAN MEMBANGUNKAN MACAN TIDUR. KALAU SAJA ANGKATAN PERANG KITA KUAT, TAK MUNGKIN MALAYSIA MEREMEHKAN KITA SEPERTI INI.

UNGKAPAN Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di atas (*Kompas*, 9/3) bernada pengandaian yang berujung keprihatinan atas kondisi kekuatan pertahanan nasional dewasa ini. Alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI amat terbatas sehingga membuat gerak langkahnya dalam penanganan bencana tsunami di Aceh dan dalam rangka *show of force* dengan pihak Malaysia, berkenaan dengan sengketa Blok Ambalat, juga terbatas.

Kalau sudah begini, banyak yang sadar kembali dan bertanya mengapa pertahanan Indonesia tidak diperkuat sejak dulu. Waktu 32 Orde Baru sesungguhnya merupakan waktu yang cukup untuk menjaga kekuatan pertahanan nasional "lebih kuat" dari kenyataan yang ada kini. Presiden Soeharto yang juga seorang Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) seharusnya memerhatikan postur pertahanan nasional dengan penuh perhatian. Tetapi, faktanya lain, alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI tidak terperhatikan, sebagaimana juga kesejahteraan prajurit para prajuritnya. Sebaliknya justru yang menonjol adalah merambahnya militer dalam dunia politik-dan bisnis.

Pertahanan memang tak sekadar alutsista. Namun, alutsista yang lengkap dan kuat dapat dijadikan indikator nyata kondisi pertahanan nasional suatu negara. Angkatan perang yang kuat tentu diimbangi dengan alutsista yang kuat pula. Dalam hal ini, bermodal semangat "tidak takut mati membela bangsa" saja tidaklah cukup. Di sisi lain, yang paling utama adalah bagaimana desain strategi pertahanan nasional dikembangkan secara tepat, terfokus, dan menjawab tantangan ke depan. Maka, sudah saatnya kita harus mau belajar pada kelemahan selama ini dan memperbaikinya.

ANGGARAN DAN ALUTSISTA

AGAR postur pertahanan nasional kuat, salah satu konsekuensinya berkaitan dengan anggaran. Selama 2000-2004 anggaran pertahanan mencapai Rp 14,27 triliun per tahun. Angka itu kira-kira 0,88 persen PDB rata-rata per tahun atau kira-kira 4,29 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rata-rata per tahun. Itu artinya anggaran pertahanan Indonesia paling rendah di antara negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang alokasi anggaran pertahanan rata-rata per tahun masih sudah di atas 2 persen produk domestik bruto (PDB).

Menurut catatan, tahun 2004 total anggaran pertahanan Rp 13,266 triliun, naik 15 persen dari anggaran pertahanan 2003 yang sebesar Rp 11,536 triliun. Dari Rp 13,266 triliun, sebanyak Rp 10,721 triliun dialokasikan untuk anggaran pembangunan, khususnya memantapkan satuan operasional dan kesiapan alutsista. Sisa Rp 2,544 triliun digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Walaupun alokasi kesiapan alutsista kelihatan lebih besar daripada untuk kesejahteraan prajurit, kondisinya masih tetap jauh dari optimal.

Peningkatan anggaran pertahanan mutlak. Cuma, mesti dilihat juga kepentingan sektor lain. Indonesia kini masih "multikrisis", kalaupun ada peningkatan anggaran semestinya proporsional. Di tengah keterbatasan, TNI makin dituntut profesional. Ini tentu tantangan tidak ringan. Tetapi, dengan terfokusnya TNI sebagai alat pertahanan, tantangan tersebut semestinya "lebih ringan" diban-

ding masa lalu ketika mereka disibukkan juga pada masalah politik. Apresiasi dunia luar terhadap TNI juga mulai membaik, antara lain ditandai dengan dibukanya kembali program *International Military Education and Training* (IMET) oleh Amerika Serikat (AS).

Program IMET merupakan satu hal yang harus dihargai meski TNI dan Pemerintah Indonesia harus hati-hati dengan "udang di balik batu" AS. Jangan sampai AS memanfaatkannya sebagai kartu penekan bagi kepentingan subyektifnya – misalnya dengan dalih pemberantasan terorisme. Indonesia harus tetap mengedepankan akal sehat dan memanfaatkan program itu secara proporsional.

Soal lemahnya TNI dalam konteks pertahanan dapat dijelaskan, dulu karena condong atau terfokus kepada persoalan politik, TNI kurang memfokuskan ancaman yang datang dari luar. Masih belum lekang dalam ingatan frase "ekstrem kanan" dan "ekstrem kiri" demikian populer untuk mengidentifikasi macam ancaman dari dalam. TNI, atau yang dikenal dengan nama ABRI, sibuk berurusan dengan "ancaman dari dalam" ini. Tetapi, sejak jatuhnya Orde Baru, "ancaman dari dalam" ternyata lebih banyak sekadar mitos. Sementara ancaman dari luar kian terasakan: Timor Timur lepas, Aceh bergejolak, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, serta konflik Blok Ambalat.Kalau sudah begini, dapatlah dipahami apabila TNI perlu memodernisasi sistem persenjataannya. Soal penambahan anggaran pastilah perlu persetujuan DPR.

STRATEGI PERTAHANAN

DALAM konteks ini, saya setuju dengan pandangan peneliti CSIS Edy Prasetyono bahwa penambahan anggaran berapapun besarnya tidak berarti apa-apa tanpa ada perubahan strategi pertahanan. Indonesia harus segera bergerak dari strategi pertahanan kontinental menuju strategi pertahanan maritim dengan zona berlapis. Strategi pertahanan maritim memiliki matra terbuka, manuver fleksibel, dan pergerakan lebih leluasa untuk penangkalan dan penindakan. Ini sesuai karakter geografis kita. Dalam strategi pertahanan maritim, tumpuan kekuatan akan diletakkan pada kekuat-an pertahanan laut

dan udara. Untuk itu, TNI AL dan AU harus terus diperkuat di masa mendatang (*Kompas*, 9/3).

Dengan demikian, pengalihan fokus pembangunan pertahanan nasional dari pertahanan darat, ke laut dan udara, bukan tanpa alasan yang lemah. Ke depan, seiring dengan tidak terlibatnya lagi TNI dalam politik, konsekuensinya fokus ke pertahanan darat pelan-pelan mesti digeser. Hal ini bukan berarti meremehkan posisi dan peran TNI AD – yang selama ini terkesan selalu termanjakan oleh anggaran – tetapi semata-mata demi masa depan postur pertahanan nasional yang kokoh.

Ke depan perlu meredesain strategi pertahanan nasional Indonesia secara serius. Tentu ini merupakan kerja besar dan berjangka panjang. Untuk menjadi bangsa yang memiliki *bargaining position* yang tinggi di mata negara-negara lain, sesungguhnya tak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi dalam kasus Indonesia ialah kesanggupannya untuk dengan cepat mengakhiri multikrisis. Indonesia adalah negara dengan batas-batas kedaulatan wilayah yang "amat besar", maka di masa depan seharusnya mampu tampil sebagai negara yang kuat dan demokratis.

Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri secara baik, kuat, dan sehatnya segala bidang, akan menjadikan modal dasar bagi politik luar negeri Indonesia – yang tidak dapat dipandang "sebelah mata". Indonesia memang telah sukses melaksanakan demokrasi elektoral (pemilu legislatif dan presiden) dan masih menanggung risiko pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi eksperimentasi demokrasi yang ada masih menyisakan risiko (kegagalan) tak ringan. Kalau sampai proses demokrasi gagal, mimpi menjadi bangsa yang "mandiri", khususnya dalam hal pertahanan nasionalnya, makin menjauh.●

Bila Parpol Pecah

KOMPAS, 10 MEI 2005

ALL POLITICAL PARTIES DIE AT LAST OF SWALLOWING THEIR OWN LIES
- JOHN ARBUTHNOT

PERPECAHAN internal partai politik menggejala kembali. Setidaknya hal tersebut ditunjukkan oleh meruncingnya konflik internal PDIP, Partai Bintang Reformasi (PBR), PKB, PPP, dan dalam kadar tertentu juga Partai Demokrat, PAN dan Partai Bulan Bintang (PBB). Kecenderungan perpecahan parpol-parpol tersebut segera mengundang perhatian publik: mengapa sampai terjadi, dan siapa yang diuntungkan?

Kelihatannya sudah menjadi "hukum sejarah", bila kekuatan politik partai di Indonesia fluktuatif: kadang menguat kadang melemah. Partai-partai politik menguat terkait momentum politik tertentu. Demikian pula saat melemah: ada momentum politik tertentu yang membuat konflik internal meruncing dan pecah. Dalam sejarah politik Indonesia fenomena divergensi atau perpecahan partai-partai kerap terjadi, ketimbang penyatuan (konvergensi).

Para pengamat politik biasanya menunjukkan dua faktor penyebab meruncingnya konflik parpol: internal dan eksternal. Secara internal polanya nyaris sama sejak dulu sampai sekarang: terjadi perbedaan pandangan politik yang berujung pada perbedaan penyikapan, yang tidak dapat dipertemukan, apalagi setelah terbungkus oleh ego politik individu atau kelompok. Kadar pragmatisme dapat dijadikan ukuran untuk menilai sejauh mana egoisme politik tersebut mengerucut. Pada masa kini, perpecahan politik karena pragmatisme, lebih kental ketimbang perbedaan ideologi.

Hal tersebut dapat dialami oleh partai berdasar ideologi tertentu atau *catch-all* alias yang menghimpun segala corak latar-belakang para aktivis politiknya (plural). Dalam partai mono-ideo-logis, bukan pertengkaran perbedaan menafsirkan ideologi yang dipercayainya ke dalam format politik riil, tetapi yang kelihatan dominan belakangan adalah semata-mata pertengkaran pragmatisme perebutan alokasi sumber daya kekuasaan.

Demikian pula atas jenis partai *cacth-all*. Unsur-unsur penopang "menyatu-memudar"-nya bukan karena persoalan bagaimana mereka memperkuat basis ideologi yang menyatukannya, tetapi lebih ditentukan oleh magnet pragmatisme kekuasaan dan (mohon maaf) uang. Dimensi kepatutan (etika) politik pun tersingkir.

SECARA eksternal, biasanya, yang paling utama dikaitkan dengan "faktor pemerintah". Ada pertanyaan baku, walaupun sesungguhnya bersifat "amat menuduh" dalam hal ini: sejauh mana pemerintah berhasil mengintervensi parpol-parpol. Tidak menjadi soal utama kalau parpol tersebut adalah "parpol pemerintah" atau mendominasi pemerintahan. Tetapi kalau tidak dominan, apalagi "oposisi", maka pertanyaan di atas layak dikemukakan.

Kestabilan dan dinamika pemerintahan di masa demokrasi longgar dewasa ini, tak lepas dari kiprah dan sikap parpol-parpol. Tentu saja, siapa pun yang memerintah pasti membutuhkan dukungan parpol-parpol, serta seoptimal mungkin menekan kehadiran "oposisi". Pada zaman-partai-partai saat ini, kerap pemerintah susah untuk memperoleh dukungan optimal dari mereka secara murni berdasarkan kepentingan "kesamaan visi" semata. Pastilah ada pertimbangan pragmatis, dan bisa jadi ia lebih (amat) menonjol.

Diintervensi atau tidak, apabila faktanya gejala perpecahan parpol, selain parpol berkuasa tentunya, kuat, pemerintah akan diuntungkan secara politis. Di atas kertas, pemerintahan SBY-JK, dalam konteks ini lebih kuat dibanding sebelumnya. Indikasinya: *pertama*, Wakil Presiden JK telah berhasil merebut kepemimpinan

Partai Golkar. Implikasi politiknya amat jelas: haluan politik Partai Golkar yang semula memosisikan diri sebagai "kelompok pengimbang" di balik menjadi "partai pemerintah". Artinya pula, gejolak politik di parlemen lebih dapat dikontrol.

Kedua, perpecahan internal parpol-parpol menyebabkan konsentrasi mengkritisi pemerintahan melemah. Mereka tentu suka atau tidak suka disibukkan oleh bagaimana mengurus dan menyelesaikan konflik internalnyaûyang cukup memakan energi. Akibatnya, dikhawatirkan pelaksanaan prinsip *checks and balances* terabaikan.

PUBLIK tentu tidak ingin dikecewakan oleh parpol-parpol, yang telanjur berharap mereka mampu mengoptimalkan fungsi-fungsinya secara baik. Di masa depan sikap "anti-parpol" akan menemukan bentuknya sendiri, yang berbeda dengan apa yang pernah terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru.

Di era Orde Lama ada tiga kekuatan politik utama di Indonesia: parpol yang menonjol adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Bung Karno dan tentara. Pengamat politik Herberth Feith, telah menjelaskan persaingan segitiga antara ketiga kekuatan politik utama itu pada akhir 1950-an.

Bung Karno di akhir 1950-an makin ekspresif menunjukkan ketidaksukaannya pada parpol-parpol. Di salah satu pidatonya, ia mengajak untuk "menguburkan" parpol-parpol. Bung Karno pernah punya ide pembentukan partai tunggal, tetapi dalam perkembangannya yang terjadi justru sistem multipartai setelah keluar Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Alasan Bung Karno, lebih ke aspek normatif-konservatif: resah dengan konflik antar-parpol, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu ia putuskan untuk mengambilalih Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin.

Di sisi lain, tindakan Bung Karno beririsan dengan kepentingan politik militer yang juga tidak suka dengan (dinamika) partai-partai. Dalam perkembangannya, dalam rangka bersaing secara politik dengan PKI, militer kala itu membangun kekuatan politik fungsi-

onal (kekaryaan), kelompok politik nonparpol, yang merupakan cikal bakal lahirnya Golongan Karya kelak.

KENYATAANNYA Orde Baru tidak memberi tempat pada sistem multipartai. Partai politik disederhanakan, menjadi dua: PPP dan PDIP sementara Golkar enggan disebut sebagai partai, padahal menjalankan fungsi-fungsi partai politik. Partai politik diasumsikan sebagai semacam "biang kerok", pengancam persatuan dan kesatuan, atau sebagai kelompok yang belum siap untuk memegang kendali pembangunan.

Tetapi kini, pasca-Orde Baru, "penguasa" sudah tidak bisa lagi mengerdilkan peran parpol-parpol. Yang dapat dilakukan adalah bagaimana meraup sebanyak mungkin dukungan dari mereka. Sementara eksistensi parpol betul-betul ditentukan oleh "pasar politik", rakyat sebagai konstituen. Hukuman yang paling keras adalah anjloknya pemilih dalam pemilu.

Dari perspektif kekuatan-kekuatan politik, jelaslah kiranya bila parpol-parpol lemah, maka, masa depan "demokrasi" terancam. Bagaimana jadinya bila parpol-parpol gagal menyuguhkan kader-kader yang berkualitas, padahal mereka bakal menduduki jabatan-jabatan publik? Tentu akan ada stagnasi (kemandekan) bahkan kemunduran.

Kalau parpol-parpol sudah kehilangan jatidiri dan "harga diri", dan selanjutnya "kekuatan politiknya" melemah, maka tentu akan banyak pihak yang saling berlomba menjadi kekuatan alternatif. Kalau kekuatan alternatif yang dominan mengambil alih kelemahan parpol-parpol itu presiden dan militer, sebagaimana terjadi di masa Orde Lama, bagaimana? Akankah sejarah berulang?

Waktu belum habis untuk berbenah. Pembangunan dan penguatan kelembagaan parpol harus diutamakan. Bukannya individu tidak penting dalam parpol –mengingat bila dikaitkan dengan tren pemilihan langsung– tetapi penguatan kelembagaan jauh lebih penting. Integritas, konsistensi, kesinambungan (keawetan) lembaga partai politik, tidak boleh disepelekan, hanya karena memilih

mementingkan popularitas figur-figur yang diusungnya.

Sudah saatnya parpol-parpol di Indonesia kini menjadi parpol-parpol "yang sesungguhnya", bukan sekadar kendaraan politik sesaat bagi para elite politik yang semata-mata ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan. Parpol-parpol Indonesia harus segera dibebaskan dari beban-beban yang tidak perlu dan "pembajakan" para elitenya.●

Jebakan-jebakan Politik PKS

KOMPAS, 29 JULI 2005

TATKALA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan munas pertama di Jakarta, akhir Juli, ia tergolong partai yang tengah bertumbuh. Dalam sebuah seminar, Jakob Oetama menilai, PKS merupakan fenomena politik baru Indonesia, yang menonjol di atas rata-rata. Melihat gejala ini, ada kecenderungan PKS bisa bertahan permanen dan mempunyai pengaruh pada lingkungan sosial politik (*Kompas*, 26/7).

Pandangan Jakob kiranya dapat menjadi pintu masuk ke pertanyaan, apakah PKS merupakan fenomena politik sesaat ataukah "permanen"? Sebagai parpol kader, tentu apa yang diraih PKS merupakan sebentuk prestasi politik. Namun, pengalaman dua kali pemilu legislatif belum dapat dijadikan ukuran. Ingat PKS adalah reinkarnasi Partai Keadilan (PK) yang dalam Pemilu 1999 tak memenuhi *electoral threshold*.

Yang perlu diacungi jempol dari PKS kini kemampuannya menunjukkan kepada publik proses kaderisasi politiknya berjalan baik. Sebagai parpol kader, tantangan ke depan PKS lebih berat, karenanya segenap pengurus parpol ini tidak boleh "gede rasa". Perolehan suara PKS di pemilu legislatif lalu tidak semata-mata disebabkan oleh faktor internal, melainkan lebih pada faktor eksternal. PKS lebih diuntungkan oleh dukungan kaum *swing voters*.

Pengamatan demikian tak berarti mengabaikan apa-apa yang secara internal telah dilakukan oleh parpol yang dipimpin Tifatul Sembiring ini. Secara internal, tak ada masalah dengan PKS, demikian pula dengan konstituennya yang homogen dan relatif bersifat tetap itu. Saat ini PKS berada di "puncak prestasi" penguatan kaderisasi internalnya – konstituennya tak mudah bergeser.

Bila dilihat pengalamannya di pentas politik formal, parpol ini baru hadir pada 1999. Namun, embrionya sudah terdapati sejak 1980-an, di kala kelompok-kelompok *halaqah* menjamur di masjid-masjid kampus, menggusur organisasi ekstra kemahasiswaan Islam semacam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Militansi kadernya lebih terbangun, inspirasi politiknya tak lepas *Ikhwanul Muslimun*, kelompok politik Demokrat-Islam di Mesir, dengan tokoh utamanya Hassan Al Bana itu. Kader-kader PKS menganggap mendukung PKS adalah "beribadah".

Yang menjadi tantangan utama PKS, apakah ia sanggup merangkul *swing voters* lebih banyak? Pertanyaan ini serius mengingat kelihatannya basis konstituen PKS tidak mengalami perkembangan signifikan. Secara kualitas ya, tetapi kuantitas, PKS harus bekerja keras meraup wilayah kompleks dan heterogen.

PARPOL BERSIH

POPULARITAS PKS di mata pemilihnya karena kerapiannya mencitrakan diri sebagai parpol bersih. Mereka percaya pada simbol-simbol kebersihan parpol ini. Parpol ini masih dianggap sebagai "parpol langit" di tengah-tengah banyaknya pilihan politik yang membosankan. Dengan memberikan dukungan kepada PKS, publiknya berharap ia akan menularkan "kebersihan politik".

Akan tetapi politik tidak hitam putih. Ia kerap abu-abu. PKS pun tidak dapat selalu tercitrakan sebagai "partai langit". Maka, tantangan kedua bagi PKS ialah ia harus segera mengubah citranya sebagai "partai yang membumi". Artinya, PKS harus mampu menunjukkan kader-kadernya yang "mumpuni" di berbagai sektor - tidak sekadar gemar melarikan masalah ke aspek normatif, tetapi tidak

solutif. Ke depan, kalau PKS masih ingin eksis dan berlanjut, kadar solutifnya harus jauh lebih dominan ketimbang kadar normatifnya sehingga citra PKS sebagai partai agama akan pupus.

Tantangan-tantangan di atas berarti juga jebakan bagi PKS. Ringkasnya, kalau PKS masih terus tampil secara konservatif – normatif tanpa mau merambah ke wilayah *swing voters*, maka bukan tidak mungkin pada tahun 2009 target politiknya anjlok – katakan ekstremnya, perolehan suara di pemilu legislatif minimal sama dengan yang diraupnya pada tahun 1999.●

Damai Aceh, Harapan dan Kehati-hatian

KOMPAS, 15 AGUSTUS 2005

BABAK baru perdamaian Aceh diharapkan hadir pasca-kesepakatan Helsinki. Di usia 60 tahun Indonesia, diharapkan kasus Aceh selesai: tak ada persoalan separatisme, masyarakat berada dalam kedamaian dan berkonsentrasi membangun daerah. Harapan selalu ada di Aceh, walaupun kalau melihat ke belakang, setitik pesimisme masih menghantui. Harapan dibayangi trauma kegagalan. Tetapi kini, di kala kondisinya masih luluh lantak akibat tsunami, harapan lebih besar daripada pesimisme. Kelihatannya masyarakat Aceh sudah amat bosan dengan kondisi tak aman, lantas bergegas membangun daerahnya yang porak poranda.

Pemerintah telah mengambil sebuah terobosan politik dengan mengambil langkah perundingan informal dengan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki. Langkah politik pemerintah itu memang kurang populerdi mata sementara kalangan, mengingat tingginya risiko politik yang ada. Kekuatan-kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat kelihatannya sepakat dengan "jalan pemerintah", kecuali yang agak vokal mengingatkan risiko-risikonya adalah Fraksi PDIP.

Di luar parlemen, beberapa aksi terjadi di Jakarta yang bermaksud agar pemerintah membatalkan perundingan Helsinki dan tidak mengakomodasi GAM. Hal tersebut memberi sebuah pesan agar Pemerintah Indonesia hati-hati dengan keputusannya, dan yang lebih penting jangan salah langkah.

Apa yang akan terjadi kelak di Aceh adalah buah eksperimentasi politik pemerintahan SBY. Kelihatannya kasus Aceh akan menjadi model penyelesaian kasus-kasus serupa, tentu sesuai konteks masing-masing. Tetapi, bisa jadi kasus Aceh akan dijadikan model bagi kalangan tertentu di daerah untuk melakukan "tawar-menawar politik" dengan pusat. Kalau partai lokal diperbolehkan di Aceh, pemerintah pusat harus siap dengan segala konsekuensinya. Model partai lokal di Aceh tidak menutup kemungkinan membuat daerah lain menuntut hal serupa. Apakah pemerintah telah mengkalkulasikan risiko dan konsekuensinya?

TUNTUTAN KEARIFAN

SEMUA sepakat bahwa penyelesaian Aceh harus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua berharap kondisi membaik di Aceh. Harapan kini membuncah walaupun terselimuti kehati-hatian. Masyarakat Aceh kelihatannya adalah pihak yang paling amat berhati-hati dalam hal ini, sebab mereka harus mampu menjadi subyek yang harus menghadapi persoalan dari dua arah sekaligus: pemerintah dan bekas GAM. Masyarakat Aceh membuka lembaran baru dengan tuntutan kearifan yang lebih tinggi lagi.

Pemerintah Indonesia kali ini memasang taruhan lebih tinggi bagi perdamaian Aceh. Pemantau asing siap melakukan tugas beratnya di Aceh. Walaupun ada jaminan tidak akan ada internasionalisasi - dalam arti campur tangan negara asing dalam membela GAM - fungsi dan peran para pemantau asing itu harus jelas dan optimal. Jangan sampai justru menjadi "kerikil dalam sepatu" proses perdamaian di Aceh.

Bagaimanapun, proses perdamaian Aceh harus dilihat secara optimis. Selain Aceh, yang menjadi sorotan kini antara lain kasus

Papua. Tidak ada salahnya bila pemerintah diingatkan untuk jauh lebih hati-hati, mengingat rumitnya permasalahan. Pemerintah dihadapkan pada "bara dalam sekam", harus jitu dalam mengatasi ancaman disintegrasi. Pendekatannya tentu jangan melulu politik, tetapi juga kultural, demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan.

Fase politik yang dikepung oleh ancaman disintegrasi harus segera diakhiri sehingga masa depan Indonesia menjadi lebih dapat terpastikan. Indonesia tidak akan maju menjadi bangsa yang besar dan kuat kalau urusan persatuan dan kesatuan bangsanya masih menjadi permasalahan paling pokok. Ujian Indonesia sebagai bangsa akan dituai hari-hari ini. Semoga saja lulus dengan predikat *summa cum laude*.●

Ujian Kepemimpinan SBY

KOMPAS, 8 SEPTEMBER 2005

HARI-hari ini pemerintahan SBY dihadapkan masalah pelik terkait menggejolaknya perekonomian nasional. Yang mencolok, anjloknya nilai tukar rupiah hingga naiknya harga bahan bakar minyak. Pada 31 Agustus pemerintah mengeluarkan Paket Ekonomi yang langsung diumumkan SBY. Tetapi, begitupun, kalangan ekonom, pelaku pasar, dan dunia usaha secara umum menilai paket itu masih "jauh dari harapan" (*Kompas*, 1/9/2005).

Presiden SBY benar-benar dihadapkan "alam nyata", betapa permasalahan yang datang bertubi-tubi membutuhkan pengambilan keputusan serta tindakan cepat dan tepat. Tetapi, yang terjadi belum menunjuk ke sana. Selain soal ekonomi, pemerintah juga menuai kritik terkait kebijakan penyelesaian kasus Aceh berdasarkan nota kesepahaman.

Setelah satu tahun memimpin Kabinet Indonesia Bersatu, SBY menyatakan akan melakukan evaluasi. Mungkin akan ada *reshuffle*. Tapi, tidak mudah bagi SBY merombak kabinet, mengingat risiko

benturan politik. Pilihannya membentuk kabinet pelangi, sebagai bentuk atas *share* partai-partai politik, terutama yang dianggap berjasa, ibarat bumerang. Seandainya dulu, kabinet berpostur kabinet ahli (*zakeen kabinet*), mungkin ceritanya akan lain.

Memulihkan kepercayaan pasar (*market trust*) merupakan ujian utama, bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan. Ia pun terakit erat dengan politik. Besar-kecilnya kepercayaan pasar turut dipengaruhi dinamika politik. Menurut Sun Tzu, ahli strategi China klasik, kalau sebuah negeri mampu membangun kekuatan pertahanannya dengan baik, musuh enggan menyerang. Maka, manakala pemerintah mampu mengatasi gelombang badai kompleksitas permasalahannya, kritik dan goyangan oposisi apapun, tak akan mampu menganjlokkan kepercayaan publik dan pasar.

Kekuatan pasar kerap tanpa ampun. Karakternya berbeda dengan konteks legitimasi politik. Ujian kepemimpinan SBY pun faktor terbesarnya terletak kemampuan SBY sendiri untuk mengelola segala sesuatunya, tanpakesan keraguan.

KOMUNIKASI POLITIK

SBY mulai agak kesulitan menghadapi gelombang permasalahan strategis bangsa. Ia beberapa kali mengimbau membangun kebersamaan, tapi kesannya agar semua pihak bersatu mendukung pemerintah, termasuk lawan-lawan politiknya. Kalau itu yang dimaksud, syarat utamanya SBY harus memperbaiki komunikasi politiknya dengan seluruh elemen politik formal maupun informal. Sebagai politikus ia diuji. Publik yang terlanjur menilai SBY pandai beretorika segera kecewa apabila hanya sebatas retorika. Komunikasi politik penting di tengah budaya opisisi yang belum tumbuh.

Tidak ada jalan lain, Presiden SBY harus menunjukkan kepada publik dan pasar bahwa tim kabinetnya solid dan kapabel agar kepercayaan pasar pulih. Hal ini penting mengingat sejak awal pembentukan kabinetnya, performance yang ada tidak meyakinkan, ternyata bukan sebuah *zakeen* kabinet, melainkan lebih pada share politik. Apabila kesalahan itu diulangi, kredibilitas pemerintahan

SBY akan makin anjlok.

Tantangan berat lain presiden adalah menunjukkan dirinya, wakil presiden, dan kabinetnya betul-betul bekerja demi kepentingan bangsa, bukan politik atau bisnis. Jika rangkap jabatan tak terkelola, demikian juga apabila aura kepentingan bisnis masih kental, ia akan berimbas pada *performance* pemerintah yang tidak baik.●

Masih Perlukah Pragmatisme?

KOMPAS, 16 SEPTEMBER 2005

TATKALA RIRI Riza memfilmkannya, Soe Hok Gie hadir kembali. Apalagi bila kita membaca kembali artikel-artikel Soe Hok Gie tempo dulu. Saya menemukan salah satunya, "Betapa Tidak Menariknya Pemerintah Sekarang" (*Kompas*, 16 Juli 1969). Artikel itu menyorot pemerintahan awal Orde Baru yang disibukkan diplomasi bersama pihak asing. Soe Hok Gie mengutip komentar temannya, betapa tidak menariknya menjadi menteri luar negeri Indonesia. "Kerjanya cuma berusaha menunda bayar utang-utang lama. Atau cari utang-utang baru," begitu tulis Soe Hok Gie.

Tapi Soe Hok Gie menetralisir penilaian itu. Catatnya, "Pastilah penilaian orang-orang seperti teman saya itu tidak tepat. Ada soal lain yang berbelit-belit dan menyulitkan. Tetapi kesan umum dari "masyarakat luas" adalah seperti teman saya itu." Bila kita baca lebih lanjut, artikel itu menggambarkan "suasana hatinya" yang galau dengan kondisi pemerintahan. Semua belum terurus maksimal. Terjadi krisis keteladanan. *Rule of law* langka. Soe Hok Gie mencatat, "Setiap hari kita dengar cerita-cerita tentang oknum-oknum militer yang menampar rakyat biasa, tentang ngebut anak-anak penggede, atau tentang penyelundupan yang dilindungi."

Baginya *rule of law* penting diterapkan tegas. Menurutnya, "Jika Soeharto dan pemerintahnya berhasil menunjukkan bahwa

ada kesungguhan pemerintah di dalam menegakkan *rule of law*, maka dukungan masyarakat akan bertambah terasa." Di akhir karangannya, ia mencatat kesan tahun pertama Pembangunan Lima Tahun, disambut acuh tidak acuh oleh rakyat. "Hampir tidak ada komunikasi yang dimengerti masyarakat umum dan pemerintah yang terlalu pragmatis," catatnya.

PRAGMATIS DAN BOSAN

SOE HOK GIE mungkin benar. Di manapun, pemerintahan yang terlampau pragmatis pasti tak menarik. Hidup dalam irama gerak yang pragmatis, membosankan, justru tatkala nilai-nilai yang dianggap sakral dalam masyarakat terpinggirkan. Pragmatis menyenangkan, kalau kaitannya capaian material, karena memang itulah ukurannya. Kaum pragmatis selalu mencari klaim pembenaran, ukuran keberhasilannya materi, termasuk tatkala sebuah pemerintahan memakai pendekatan tersebut.

Pragmatisme pembangunan Orde Baru didukung pilar teknokrat dan tentara. Trilogi pembangunan ialah pembenaran pendekatan pragmatis: kemajuan ekonomi (pertumbuhan dan lantas pemerataannya), mutlak perlu dukungan stabilitas politik dan keamanan. Untuk menciptakannya harus ada rekayasa canggih seperti penyederhanaan partai-partai politik, pun pembatasan berekspresi dan berpendapat lewat kontrol ketat terhadap pers.

Andai saja Soe Hok Gie diberi kesempatan Tuhan menyaksikan adegan-adegan pembangunan Orde Baru, ia akan menjadi amat bosan. Nyatanya pragmatismelah yang berkembang, tidak membangun komunikasi politik yang sehat dan demokratis dengan rakyat. Keberhasilan pragmatisme Orde Baru hanyalah "semu", kesenjangan melebar, kekayaan lebih menggumpal pada kaum elite lapis atas yang tak lepas dari KKN.

POPULIS-UTOPIS

SEKARANG zamannya lain, tapi inti persoalannya hampir sama dengan zaman peralihan *setting* intelektual Soe Hok Gie. Peme-

rintahan pasca-Orde Baru dihadapkan multikompleks persoalan. Pendekatan yang dipakai beragam. B.J. Habibie membuat kebijakan populis: pemilu dipercepat, masyarakat dibebaskan membentuk partai-partai, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dihapuskan, hingga amandemen UUD 1945. K.H. Abdurrahman Wahid melakukan gebrakan HAM: eksistensi politik dan budaya kalangan Tionghoa dipulihkan. Megawati juga dalam beberapa hal populis kebijakannya, walaupun corak konservatif menonjol, misalnya terkait penanganan masalah Aceh lewat darurat sipil dan militer.

Tetapi, baik Habibie, Gus Dur, dan Megawati, oleh sementara kalangan dianggap tak menarik. Habibie dipersoalkan derajat legitimasi kekuasaannya. Gus Dur terjerat bumerang kontroversi. Megawati, banyak diam. Apakah pemerintahan sekarang menarik? Antara ya dan tidak. Menarik, karena ia pemerintahan pertama kali dalam sejarah Indonesia yang presiden dan wakilnya dipilih langsung. Rakyat berpartisipasi dengan segala konsekuensinya.

Tetapi, sebuah pemerintahan, setidaknya menurut subyektivitas masing-masing individu warga negara, segera menjadi tidak menarik kalau pilihan-pilihan kebijakan yang diambil tak realistis dan gagal meraih empati publik. Dulu, pemerintah tak menarik karena terlampau pragmatis, kini orang akan jadi bosan kalau pilihan kebijakan pemerintah populis, tetapi utopis di satu sisi, namun praktiknya justru terlampau pragmatis.

Kita sekarang, yang masih diberi umur oleh Tuhan setelah wafatnya Soe Hok Gie, paham bila kondisi sosial-politik dan ekonomi nasional sudah amat berbeda. Model krisis masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, bila dibandingkan dengan dari Orde Baru ke era reformasi, juga tentu berbeda. Lingkungan politik internasional pun sudah bergeser. Perang Dingin sudah usai. Problem pemerintahan pasca-Soeharto tak sekadar utang luar negeri. Pilihan-pilihannya sulit, akibat "salah urus" dan pelbagai efek "sindrom negara gagal". Bisakah semua itu diselesaikan secara pragmatis?

Kita tak tahu persis seandainya Soe Hok Gie masih hidup, ia

akan berkata apa tentang pemerintah sekarang. Yang jelas, tatkala sentralisme kebijakan yang pragmatis terdobrak, ironisnya yang merebak justru desentralisasi pragmatisme yang merayap ke berbagai institusi, sementara struktur mentalitas "manusia Indonesia", sebagaimana dicirikan Mochtar Lubis, masih belum berubah.●

Bangsa-bangsa Asia Butuh Mentalitas Baru

KOMPAS, 16 OKTOBER 2005

KISHORE MAHBUBANI, *BISAKAH ORANG ASIA BERPIKIR?*, BANDUNG, TERAJU MIZAN, 2005, XXVIII + 318 HALAMAN

JUDULNYA provokatif, terkesan mengejek. Pengarangnya bersudut pandang negatif. Ia berbeda dengan buku Anwar Ibrahim tentang *Asian Renaisance*, eksotika, dan kekuatan nilai-nilai Asia (*Asian values*). Buku Mahbubani mengulas Asia punya nilai-nilai, tetapi tenggelam dibandingkan Barat. Hal demikian mengingatkan polemik Sutan Takdir Alisjahbana (STA) tempo dulu. Pada 1930-an, ia pernah berdebat, apakah kita harus meniru budaya Barat. Ia menjawab tegas, keharusan menyerap budaya Barat kalau mau maju. Yang lain, Purbatjaraka, misalnya sebaliknya: nilai-nilai Timur harus digali dan kembangkan.

Buku ini juga mengingatkan kontroversi buku Samuel P Huntington *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order* (1996). Ia membedah peta peradaban pasca-Perang Dingin, ke dalam *The West and the rest* (Barat dan yang lainnya: Amerika Latin, Afrika, Islam, Sinic (China), Hindu, Ortodoks, Buddhis, dan Jepang), dan potensi "benturan antar-peradaban".

KONTEKS INDONESIA

ATAS pertanyaan, "Bisakah Orang Asia Berpikir?", M. Dawam

Rahardjo dalam kata pengantar mencatat, pertanyaan itu pantas ditujukan ke bangsa Indonesia saat ini yang secara politik sangat dinamis, secara ekonomi tidak sejahtera, secara sosio-kultural, khususnya pendidikan, terbelakang (hal ix). Apakah orang Indonesia mampu berpikir bagi kesinambungan bangsa? Banyak yang gelisah. Apakah masa depan Indonesia masih tetap seperti Indonesia saat ini di mana luas wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Medan hingga ke Ambon?

Parakitri T Simbolon (2005) mengutip pidato Bung Karno, 17 Agustus 1954, "*Allahu Akbar*! Dulu orang berkata bahwa Republik Indonesia tidak akan tahan delapan minggu. Kini ia telah berusia lebih dari 450 minggu." Bagi Bung Karno sang presiden, keberhasilan "bangsa dan negara kita" adalah berkat "Tuhan Yang Maha Esa". "Seandainya Bung Karno masih Presiden RI," catat Parakitri, "awal pidatonya dalam peringatan 17 Agustus 2005, mungkin akan sama, cuma jumlah minggunya disesuaikan menjadi 3.120. Tetapi kira-kira penjelasannya tidak semata karena faktor Tuhan. Mungkin Bung Karno, catatnya lagi, akan menetapkan tahun 2005 sebagai "Tahun Perhitungan", "*A Year of Reckoning*"."

Bung Karno kerap mengutip "ayat perubahan": Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, bila kaum itu, bangsa itu tidak mampu mengubah dirinya sendiri. Terkait provokasi Mahbubani, eksistensi dan kesinambungan Indonesia, terletak sejauh mana orang Indonesia mampu berpikir, sebagai landasan mengelola perubahan zaman, selain faktor Tuhan (takdir).

ASIA YANG MENAWAN

KITA segera mafhum dalam konteks apa Mahbubani menulis buku ini. *Bisakah Orang Asia Berpikir?* (Juni 1997) adalah makalahnya pada *International Conference on Thinking* ke-7 di Singapura. Ia segera provokatif karena membandingkan peradaban dan "cara berpikir" orang Asia dengan Barat. Asia memang menawan. Letaknya di belahan dunia yang membentang dari Jepang hingga Indonesia menembus Asia Tengah, Jalur Sutra, hingga Dunia Arab, di mana

sejumlah agama besar hadir di sini: Islam, Buddha, Hindu, hingga Konfusianisme. Penduduknya 60 persen penduduk dunia.

Seribu tahun lalu orang China dan Arab memimpin ilmu dan teknologi, dunia pengobatan, dan astronomi. Bangsa Arab mengadopsi sistem desimal dan angka 0 hingga 9 dari India dan mempelajari cara membuat kertas dari orang China. Universitas pertama di dunia didirikan pada 971 di Kairo, Mesir. Sebaliknya bangsa Eropa masih berada dalam "Zaman Kegelapan" yang dimulai saat Kekaisaran Romawi runtuh pada abad ke-5. (hal 7).

Ketertinggalan Asia dibanding Barat hingga kini, ironisnya, belum terkejar. Memasuki abad ke-21, 500 tahun setelah kehadiran penjajah Portugis pertama kali di Asia, catatnya, hanya satu bangsa Asia yang telah mencapai tingkat perkembangan Eropa dan Amerika saat ini: Jepang. Pikiran orang Jepanglah yang pertama kali bangkit di Asia, dimulai dengan Restorasi Meiji pada 1860-an. Mahbubani bertanya penuh keheranan: jika otak orang Asia bisa berpikir, mengapa saat ini hanya satu bangsa Asia yang mampu menyetarakan dirinya dengan bangsa Barat?

TIGA JAWABAN

MAHBUBANI menyediakan tiga jawaban. Jawaban ya, karena prestasi masyarakat Asia Timur yang luar biasa dalam beberapa dekade belakangan. Juga adanya perubahan penting pikiran-pikiran orang Asia, pikiran Asia mulai bergerak. Jawaban tidak didasari alasan kolonialisme bangsa-bangsa Barat terhadap Asia yang masih menyisakan kolonialisme mental, yang mempertegas posisi inferioritas bangsa-bangsa Asia.

Mungkin merupakan jawaban berikutnya. Alasannya lebih banyak. Di sektor ekonomi, kebanyakan masyarakat Asia, mencakup masyarakat Asia Timur, menghadapi jalan panjang sebelum mampu meraih tingkat stabilitas dan harmoni politik sebagaimana yang dicapai masyarakat Barat. Di bidang keamanan, keuntungan besar yang dimiliki masyarakat Barat atas masyarakat lain di dunia adalah perang di antara mereka pada masa lalu, sementara di Asia

ketegangan antar-kawasan masih terjadi.

Alasan lain, orang Asia menghadapi tantangan serius di bidang sosial. Jejak feodal, sisa primordialisme dan nepotisme masih terus menghambat perwujudan masyarakat meritokratis. Di sisi lain belum terjawab apakah *mind* Asia mampu mengembangkan paduan nilai yang tepat, yang akan memelihara kekuatan tradisional Asia dibandingkan nilai-nilai Barat. Mahbubani melihat kelebihan orang Asia dewasa ini, mengingat tatkala mereka melihat peradaban Barat, mereka dapat melihat dua perspektif sekaligus: "puncak kesenangan yang dihuni sebagian besar masyarakat Barat" dan "pilihan-pilihan alternatif yang bisa dijadikan model bagi masyarakat mereka sendiri" (hal 15).

MENTALITAS BARU

BUKU ini bunga rampai tulisan yang kebanyakan ditulis sebelum terjadi Peristiwa 11 September 2001. Tetapi, di *Pengantar* edisi ketiga, Mahbubani menegaskan, serangan teroris tersebut memaparkan dengan gamblang bahwa "kita tengah memasuki abad yang penuh ancaman". Ancaman nyata yang dihadapi saat ini, catatnya, adalah kenyataan "kita berlayar pada abad ke-21, namun tetap menggunakan mental maps (peta-peta mental) abad ke-19". Untuk mempersiapkan dunia baru, tegasnya, kita harus berani mengikis kebijaksanaan konvensional, mengempas pola pikir lama, dan mulai berpikir dalam koridor-koridor mental baru.

Peringatan agar kita memiliki mentalitas baru harus dicamkan. Mochtar Lubis sudah mengingatkan kita pada *Pidato Kebudayaan* di Taman Ismail Marzuki 1977 bertema "Manusia Indonesia". Ciri utama mereka tingginya mentalitas oportunis. Membaca Mahbubani diharapkan membuat kita, orang Asia yang tinggal di kota-kota dan kampung-kampung Indonesia berbenah, mengubah pola pikir dan mentalitas lama, mentalitas abad ke-19, menjadi mentalitas abad ke-21. Selama *mindset* belum terprogram, selama itu pula kita tidak mampu keluar dari keterpurukan. Sadarkah bahwa kita semua tengah menderita penyakit mental?●

Kocok Ulang dan *Reshuffle* Kabinet

KOMPAS, 17 NOVEMBER 2005

KOCOK ULANG pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR saat ini, nyaris tenggelam isu *reshuffle* kabinet. Padahal, keduanya sama-sama penting, dalam konteks rekonsolidasi politik setelah setahun pemerintahan SBY-JK. Kocok ulang relatif mulus. Struktur ditambah, dari satu ketua tiga wakil, menjadi satu ketua empat wakil. Total ada 16 ketua dan 62 wakil ketua, dari sebelumnya 16 ketua dan 46 wakil. Ia segera berkonsekuensi anggaran.

DIBAGI PROPORSIONAL

DPR sepakat formasi pimpinan alat kelengkapan dibagi proporsional berdasarkan perolehan suara Pemilu 2004. Konsekuensinya, fraksi-fraksi besar jatahnya lebih banyak: Fraksi Partai Golkar mendapat empat ketua, 14 wakil ketua; Fraksi PDIP tiga ketua, 12 wakil; Fraksi PPP dua ketua, tujuh wakil; Fraksi Partai Demokrat dua ketua, enam wakil; Fraksi PAN dua ketua, enam wakil; Fraksi PKB satu ketua, enam wakil; Fraksi PKS satu ketua, lima wakil.

Peta politik parlemen kini kian solid, lepas bayang-bayang koalisi kebangsaan. Sebenarnya dengan kemenangan JK dalam Munas Partai Golkar akhir 2004, wacana koalisi kebangsaan versus koalisi kerakyatan sudah tak relevan. Partai Golkar yang oposisi langsung berubah propemerintah. Presiden SBY telah menjanjikan *reshuffle* kabinet. Kabinet Indonesia Bersatu, seperti ragam kabinet sebelumnya pasca-Orde Baru, akomodatif terhadap kepentingan partai-partai. Tatkala isu *reshuffle* berembus, seluruh partai propemerintah berharap-harap cemas, dan terkesan lebih sibuk.

REKONSOLIDASI POLITIK

APA makna kocok ulang dan *reshuffle* kabinet? Bagi pemerintah jelas, rekonsolidasi politik setelah setahun berjalan. Pemerintah ingin hadir sebagai kekuatan politik optimal hingga 2009. Maka peta politik harus jelas dan aman. Jangan sampai ada kekuatan politik riil (partai-partai propemerintah) yang lepas, kecuali terus mendukung pemerintah. Bahkan jika perlu partai oposisi, seperti PDIP, dikondisikan mendukung pemerintahan.

Reshuffle kabinet memang belum diumumkan. Tetapi, skenario dan dampak politiknya dapat diperkirakan. *Pertama*, jika SBY besar-besaran merombak kabinet, ia bisa memicu resistensi serius dari partai yang dikecewakan. *Kedua*, jika *reshuffle* hanya dengan mengganti satu-dua personel yang tak berkait partai, tak akan ada resistensi berarti. Konstelasi politik masih seperti saat ini. Mungkin sekali SBY karena kehati-hatiannya memilih yang risiko politiknya kecil: mengganti dan memindahkan personal kabinet, hanya satu-dua orang. Tabu bagi presiden bila ada satu atau beberapa partai pendukung lepas karena kecewa tak terakomodasi.

Jadi, secara politis, posisinya tetap aman meski risikonya berpindah langsung ke masyarakat. Publik bisa kian kecewa karena dihadapkan beberapa menteri yang pandai, sombong dan tak berempati. Citra pemerintahan SBY bisa jadi tetap terkoyak, jika komposisi kabinetnya tak banyak berubah. Apalagi, apabila situasi hidup masyarakat makin berat. Wajar bila pemerintah merekonsolidasi politik sebagai suatu seni pemerintahan. Tapi, jika karya seni itu tak diimbangi kebijakan efektif, bisa-bisa justru bumerang.●

VIII

TIBA-TIBA RINDU PEMBANGUNAN

[2006]

PANCASILA TENTU TAK SALAH. TETAPI, PARA PEMRAKTIKNYA YANG TIDAK KONSISTEN. SELAMA INI KOLEKTIVISME TIDAK DIBARENGI PRINSIP-PRINSIP EGALITARIANISME, SEHINGGA YANG MENGUAT JUSTRU FEODALISME. KOLEKTIVISME DI MASA LALU DIARAHKAN SECARA POLITIK UNTUK MENDUKUNG PRAGMATISME STABILITAS POLITIK. IA MENJADI KONTRADIKTIF DALAM KENYATAANNYA. DALAM KONDISI SEPERTI ITU INDIVIDUALISME TAK DAPAT DICEGAH. KOLEKTIVISME KEHILANGAN TELADAN.

- TAK KUNJUNG MIMPI PANCASILA

Puncak Stabilitas Politik SBY?

KOMPAS, 2 JANUARI 2006

BAGAIMANA politik Indonesia 2006? Berbasis pijak pada dinamika politik 2005, peta politik 2006 dapat diperkirakan. Secara umum kondisi politik 2005 relatif stabil. Berbagai kekuatan politik telah melakukan reposisi dan rekonsolidasi pasca-Pemilu 2004. Pada 2006 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada pada puncak-puncaknya "stabilitas politik". Warna "monolitik" akan makin terkonfirmasikan pada 2006.

Pernyataan di atas setidaknya terkonfirmasi setelah menganalisis "kekuatan-kekuatan politik" Indonesia 2005. Arbi Sanit (1981) dan Farchan Bulkin (1985) menempatkan militer, partai politik, serta pemuda dan mahasiswa, kaum intelektual, golongan pengusaha, serta kelompok-kelompok penekan yang lain sebagai unsur-unsur kekuatan politik. Bagaimana kondisi, dinamika, dan peta kekuatan mereka selama 2005 dan perkiraannya pada 2006?

Pada 2005 telah terjadi rekonfigurasi peta kekuatan politik partai-partai. Beberapa partai telah menetapkan posisi partai pendukung (suporter) pemerintah (Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan belakangan Partai Golkar), termasuk yang menyatakan sebagai "mitra kritis" (*critical supporter*) (Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional). Setelah SBY merombak kabinet, Partai Kebangkitan Bangsa (Muhaimin Iskandar) pun telah ikut terakomodasi. Kini praktis tinggal PDI Perjuangan (PDIP) yang masih konsisten memfungsikan diri sebagai "partai oposisi" atau kelompok pengimbang.

Peta politik demikian mempermantap dukungan parlemen atas

pemerintahan SBY-JK. Diperkirakan pada 2006 konstelasi politik kepartaian dan parlemen relatif sama dengan 2005. Pemerintahan akan menuai stabilitas dukungan partai-partai politik.

MAKIN MENONJOL

DI sisi lain, terutama pasca-pilpres 2004, lembaga kepresidenan telah menjadi kekuatan politik tersendiri. Selama 2005, lembaga ini, seiring kecenderungan *executive heavy*, menunjukkan eksistensi dan pengaruhnya. Pada 2006 diperkirakan eksistensi lembaga kepresidenan akan makin menonjol dan aktif melakukan upaya-upaya politik untuk menjaga citra SBY.

Adapun dengan militer, selama 2005 hubungan militer-presiden relatif stabil meskipun Presiden SBY yang purnawirawan jenderal itu menunda-nunda penggantian Panglima TNI. Pada 2006 stabilitas hubungan tersebut semakin mantap, terutama setelah terjadi pergantian Panglima TNI. Di sisi lain, penataan bisnis militer tidak akan memunculkan resistensi secara signifikan. Dengan demikian, posisi politik presiden telah "aman" dari faktor militer.

Sementara kalangan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama 2005 telah menurun intensitas dan skala (eskalasi) aksinya merespons isu-isu strategis, termasuk kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Fenomena ini akan terulang pada 2006. Dibandingkan dengan fenomena 1998 terasa sekali terjadi penurunan "militansi" kalangan mahasiswa dan LSM sebagai "garda depan" *civil society* yang aksentuatif.

Pada 2006 kiprah pengusaha dalam dunia politik akan menonjol dan mempersubur perilaku dan kebijakan pragmatis. Dominasi mereka memperkuat posisi politik pemerintah, terlepas konteks persaingan pengaruh politisi-pengusaha JK versus SBY. Pada 2006 para politisi-pengusaha masih akan cenderung mendinamisasi politik Indonesia, kendati tak sampai mengganggu stabilitas pemerintahan.

Apakah pemerintahan SBY-JK akan mampu memanfaatkan

stabilitas politik 2006 efektif memperbaiki kondisi ekonomi? Dengan modal perombakan kabinet, pemerintah masih menanggung risiko permasalahan ekonomi kompleks, terutama yang terkait dengan makin beratnya beban masyarakat akibat pengangguran dan kemiskinan, yang mampu memicu kerawanan sosial. Stabilitas politik pun bisa terguncang.●

Bukan Negara Polisi (Rahasia)

KOMPAS, 10 FEBRUARI 2006

TINDAKAN polisi memata-matai anggota DPR terungkap setelah ditemukan Surat Perintah Polda Metro Jaya, Sprin/72/I/2006 yang ditandatangani Direktur Intelijen Keamanan Komisaris Besar S Handoko. Surat itu memerintahkan penyelidikan rencana F-PDIP dan F-PKS terkait pembentukan tim investigasi impor beras (*Kompas*, 8/2).

Tentu tindakan itu berlebihan mengingat apa yang diselidiki tak ada urusannya dengan pelanggaran hukum atau perbuatan kriminal anggota DPR. Apa yang berkembang di DPR, dalam konteks ini semata-mata dalam domain politik. DPR lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi kontrol kebijakan.

Memang pihak kepolisian secara struktural berada di bawah eksekutif, tetapi tidak ada kewenangan sama sekali bagi mereka mengintervensi di wilayah politik – dalam konteks perseteruan politik antara legislatif versus eksekutif, yang biasa terjadi di dalam proses demokrasi politik. Apa yang dilakukan kepolisian memata-matai anggota legislatif jelas mengancam masa depan demokrasi *checks and balances*. Anggota DPR jelas merasa risi dengan ancaman atau teror mata-mata tersebut sehingga tidak mampu menjalankan fungsi kontrol kebijakan pemerintah secara optimal.

NEGARA POLISI

IRONIS tatkala sistem politik demokrasi telah berjalan, masih muncul hal-hal yang tak saja merancukan sistem ketatanegaraan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip demokrasi. Apakah ini puncak gunung es tatkala praktik otoritarianisme diam-diam berlangsung di era demokrasi ini?

Dalam sistem kepolitikan demokratis, polisi dan angkatan bersenjata harus menunjukkan netralitas politiknya dan konsisten mendorong proses demokrasi. Mereka tidak boleh kembali terlibat di arena politik praktis dan harus berkonsentrasi pada tugas dan kewajiban profesionalnya. Mereka tak boleh menjadi bagian kekuatan politik yang tengah berkonflik secara politik.

Belajar dari pengalaman kelam masa lalu, jangan sampai Indonesia jatuh kembali menjadi negara polisi (*police state*) yang bertindak represif atas rakyatnya, yang dipetakan sebagai ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang mengancam rezim. Negara polisi identik negara totaliter yang dikendalikan oleh polisi rahasia sebagai alat yang berkuasa melanggengkan kekuasaan. Ambil contoh, rezim Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler; Uni Soviet, khususnya di bawah Joseph Stalin; Italia di bawah Benito Mussolini; Spanyol di bawah Francisco Franco; Kamboja di bawah Pol Pot dan Khmer Merah; Cile di bawah Augusto Pinochet; hingga Irak di bawah Saddam Hussein.

Negara di alam demokrasi, bukanlah Leviathan (monster dasar laut) yang mengerikan sebagaimana bayangan Thomas Hobbes. Sebaliknya, negara hadir sebagai arena tempat para pengelolanya memperoleh legitimasi rakyat melalui sebuah pemilu yang jurdil dan demokratis. Pengelola negara pun tidak kebal hukum, harus taat pada hukum dan konstitusi yang berlaku.

TAATI PRINSIP DEMOKRASI

HAL-hal yang masih menjadi kontradiksi dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk pemanfaatan intelijen yang keliru dan menjurus pada praktik totaliter, harus segera dihilangkan. Semua pihak

harus mau belajar menaati mekanisme sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Hingga saat ini masih mudah dijumpai peristiwa yang mengancam, bahkan melecehkan demokrasi substansial. Peristiwa tersebut merentang mulai penyerbuan secara anarki massa ke kelompok keagamaan tertentu, pemukulan, hingga polisi memata-matai anggota DPR. Para elite politik, aparat keamanan, dan militer semakin dituntut mendorong terciptanya pembelajaran politik yang demokratis. Jangan malah lebih banyak memberi contoh yang merancukan demokrasi. Bagaimana budaya demokrasi yang kuat mampu terbentuk kalau aktornya mempraktikkan sikap antidemokrasi?●

Nasionalisme Kita Siapa Mau Terjun Ambalat?

KOMPAS, 11 MARET 2006

ADA kisah lucu sewaktu para pemuda Indonesia memprotes Pemerintah Malaysia soal klaim Ambalat. Terpampang poster dan teriakan: "Kami Siap Diterjunkan ke Ambalat". Mungkin mereka tidak sadar, atau tidak terlalu berpikir, Ambalat adalah sebuah blok di dasar laut. Mereka pikir Ambalat itu sebuah pulau. Jadi bagaimana, apakah mereka betul-betul mau nekat terjun ke dasar laut? Itu sepenggal kisah nasionalisme Indonesia mutakhir. Tapi, apakah nasionalisme harus diletupkan secara emosional, dan melupakan hal-hal yang bersifat rasional?

Kajian tentang bangsa (*nation*) dan kebangsaan (*nationalism*) telah digeluti sejak lama oleh berbagai kalangan, khususnya kalangan ilmuwan sosial. Studi-studi mutakhir tentang nasionalisme setidaknya menunjukkan bahwa topik ini masih memperoleh perhatian sedemikian rupa, dibanding dengan isu globalisasi dan globalisme, misalnya. Anderson (1991), Handler (1998), Gellner (1983), Breuilly (1985), Hroch (1996), Renan (1996), Billig (1996),

Brubaker (1996), Hechter (2000), merupakan beberapa ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan wacana tentang bangsa dan kebangsaan tersebut.

Nyaris semua peneliti yang mendefinisikan nasionalisme memberangkatkan konsepnya dari sesuatu yang abstrak. Terdapat keinginan subyektif untuk membentuk bangsa (Renan), sebagai komunitas yang terbayangkan (Anderson). Di sana lantas tumbuh solidaritas dan kebersamaan untuk menciptakan dan mempertahankan identitas kebangsaannya itu. Oleh sebab itulah, dapat dipahami bahwa konsep nasionalisme lebih cenderung emosional ketimbang rasional. Walaupun, beberapa yang lain memaknai secara lebih rasional (Gellner).

Dalam konteks inilah, segera dapat dipahami kalau nasionalisme kita dewasa ini "terjepit" dalam tiga ketegangan. *Pertama*, ketegangan menempatkan nasionalisme secara ideologis versus pemaknaannya secara pragmatis. Negara-negara dunia ketiga tempo dulu masih akrab dengan kata-kata "anti-imperialisme" dan "anti-kolonialisme". Tapi, kini kata-kata itu seolah "kurang patut" didengungkan kembali, padahal masih relevan. Yang menonjol justru yang pragmatis: mana yang dianggap menguntungkan untuk "dikerjasamakan", walaupun "negara-negara ketiga" selalu berposisi subordinat "negara-negara maju" (terkhusus adikuasa).

Kedua, ketegangan antara konsep dan praktik menerjemahkan nasionalisme secara emosional versus rasional. Emosional, terkait dengan pokoknya negara-bangsa harus tetap utuh, apa pun caranya, sesungguhnya merupakan ranah konservatif-biasanya kalangan militer harus demikian. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ini diwujudkan dalam bentuk penyikapan bahwa NKRI sudah final. Di seberang itu, ada konsepsi yang lebih rasional dan longgar tentang nasionalisme yang berdasar kemanusiaan (humanisme). Bahwa bangsa harus tetap utuh, tetapi apa makna keutuhan sebuah bangsa bila tanpa dihargai hak-hak kemanusiaan? Bukankah kata Mahatma Gandhi, "*my nationalism is humanity*"?

Ketiga, ketegangan antara konsep dan praktik menerjemahkan nasionalisme dalam konteks globalitas versus lokalitas. Globalitas, sebuah negara-bangsa dihadapkan pada dinamika tata-dunia mutakhir: dimana sudah tidak lagi terdiri dari dua kutub, dicanangkannya pasar bebas dan segala imbasnya. Lokalitas, terkait dengan keinginan-keinginan lokal dari sebuah negara-bangsa, yang macam-macam bentuknya: dari soal ketimpangan antarkawasan hingga separatisme; bibit-bibit nasionalisme etnisitas.

SIAPA KITA?

BANGSA KITA masih dalam kondisi *shock* (kaget), sebagaimana tatkala Samuel Huntington dalam *Who Are We?* (2004) mengabarkan betapa *shock*-nya AS pasca-peristiwa 911. Sejak era reformasi hadir, era baru kehidupan kebangsaan pasca-Orde Baru (1966-1998), Indonesia menapaki pengalaman baru, yang dalam banyak hal terasa pahit: ada pembantaian bernuansa agama dan etnisitas, separatisme dan terorisme.

Fenomena tersebut mengajak kita bertanya kembali tentang hakikat kebangsaan kita, justru di tengah suasana eforia politik yang, bahkan hingga kini (hampir delapan tahun reformasi), masih belum hilang. Eforia membuat kita gagal untuk bersikap realistis. Kegagalan bersikap realistis itu terbaca di kalangan elite politik nasional, baik yang berada dalam pemerintahan maupun parlemen. Perombakan sistem kepolitikan dan sistem ketatanegaraan "secara mendasar", ternyata pun mengandung banyak celah. Gerak cepat dan ketergesaan membuahkan plus-minus.

Plus, karena perubahan didasari semangat berdemokrasi di mana tidak boleh terjadi lagi penindasan-penindasan atas hak-hak politik masyarakat oleh negara (*state*). Minusnya, demokrasi ternyata tidak segera diikuti oleh kesiapan mentalitas para elite dan pelaku politik lainnya. Tetapi, bagaimanapun, iklim kebebasan telah memberi pesan obyektif pada kita tentang permasalahan bangsa kita yang ternyata telah sedemikian akutnya ini.

Ancaman disintegrasi adalah riil saat ini; konon beberapa

kalangan di berbagai daerah bersuara kritis terhadap pemerintah pusat, bahkan disertai ancaman pemisahan diri. Mereka merasa telah ditelantarkan selama ini oleh kebijakan sentralistik. Otonomi daerah adalah jalan tengah yang diambil oleh para politisi nasional, seolah menjembatani antara model negara kesatuan dan negara federal. Di sisi lain, terlihat pula bahwa, eforia politik, perasaan yang terpinggirkan oleh pembangunan, orientasi dan praktik kebijakan yang represif dan indoktrinatif di masa lalu, terkesan membuat berbagai kalangan enggan menengok kembali Pancasila sebagai perekat ideologis sebuah bangsa. Padahal, di dalam Pancasila jawaban normatif bangsa Indonesia ditemukan.

NASIONALISME RASIONAL

BAGAIMANA MENEMPATKAN nasionalisme di tengah ingar-bingar globalisasi dan lokalisasi? Kita harus pandai mengatur kadar nasionalisme yang diperlukan di tengah kompleksnya persoalan (dari ketidakadilan hingga kemiskinan). *Pertama*, dalam kondisi yang "porak-poranda", krisis ekonomi yang masih amat terasakan, terlunta-luntanya anak-bangsa yang bekerja di negeri orang, hingga fisik yang hancur seperti di Aceh dan Nias, maka kadar pragmatisme dapat dipahami kalau lebih diperbesar. Terpaksa kita, sebagai bangsa, harus pragmatis untuk saat ini. Bukan pragmatis seratus persen, tetapi dalam takaran yang proporsional. Tujuannya untuk menata kembali keterpurukan kita.

Kedua, kadar emosionalitas direndahkan, rasionalitas ditinggikan. Bangsa bukan lagi komunitas yang sekadar dibayangkan. Setiap komponen bangsa bekerja keras menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan. Nasionalisme rasional lebih dari nasionalisme membayangkan (*beyond imagine community*). *Ketiga*, nasionalisme kita adalah tepat bersikap di tengah arus global, dan pandai mengelola urusan lokalitas. Dunia tengah mencari variasi keseimbangan baru, setelah tak ada lagi "dua karang".

Kita sekarang tengah mendayung di antara satu karang, dan ombak yang besar, yang hampir menyebabkan kita sebagai bang-

sa tenggelam. Kita sekarang juga tengah mendesain tata-politik (demokrasi) lokal, yang sesungguhnya seperti akrobat, mengingat implementasi demokrasi pluralis muncul di sini. Nasionalisme kini dan kelak sesungguhnya merupakan seni mengelola bangsa. Indonesia baru ialah yang mampu menghadapi atau menyiasati berbagai ketegangan secara elegan dan bermartabat.●

Tak Kunjung Mimpi Pancasila

KOMPAS, 15 MARET 2006

TULISAN Sulastomo, "Masih Relevankah Pancasila?" (*Kompas*, 4/3/2006), mempertegas keluhan berbagai kalangan akan kesan terpinggirnya Pancasila sebagai wacana politik. Namun, ia menyajikan suatu refleksi menarik, mengingat pendekatan yang ditawarkan Pancasila yang sarat dengan kebersamaan/kegotong royongan cenderung mendekati prinsip-prinsip yang dirumuskan sebagai *The European Dream*.

Merujuk Jeremy Rifkin, kalau *The American Dream* menekankan individualisme, *The European Dream* menekankan perlunya hubungan antarmanusia (*community relationship*), kebersamaan (atau gotong royong). Hanya saja, menurut Sulastomo, "kekeliruan" kita selama ini, kita belum mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah kebersamaan, khususnya dalam bidang kesejahteraan dan perekonomian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Bahkan, yang tampak adalah kaidah-kaidah individualisme.

Perdebatan mana yang sesuai dengan bangsa Indonesia, apakah individualisme atau kolektivisme, sesungguhnya telah menjadi klasik. Pancasila cenderung meletakkan jawaban kolektivisme, lebih baik. Penjelasannya normatif, dan sayangnya pula kita keku-rangan contoh meyakinkan kolektivisme itu lebih baik. Kritik "pertama kali" hal ini dilakukan antara lain oleh Sutan Takdir Alisjahbana,

tentang perlunya prinsip-prinsip individualisme Barat.

PANCASILA TIDAK SALAH

PANCASILA TENTU tak salah. Tapi, para pemraktiknya yang tak konsisten. Selama ini kolektivisme tak dibarengi prinsip egalitarianisme, sehingga yang menguat feodalisme. Kolektivisme di masa lalu diarahkan secara politik mendukung pragmatisme stabilitas politik. Ia menjadi kontradiktif dalam kenyataannya. Dalam kondisi seperti itu individualisme tak dapat dicegah. Kolektivisme kehilangan teladan. Inilah yang menyebabkan generasi muda cenderung menganggap tema kegotongroyongan mengawang-awang.

Apabila dirasakan, saat ini Pancasila telah gagal diletakkan sebagai basis utama mimpi besar manusia Indonesia secara kolektif. Masih banyak yang merasakan trauma ketika mendengar Pancasila, justru karena di masa lalu ia dikhotbahkan, diindoktrinasikan, disakralkan, ditafsir-tunggalkan, dijadikan *political hammer*, dan ironisnya lagi tingkah laku para pejabat yang ke mana-mana menyuarakan Pancasila tak memberi teladan yang selaras Pancasila.

Merajalelanya korupsi, misalnya, jelas merugikan Pancasila. Citra Pancasila jadi jeblok karenanya. Padahal, Pancasila tidak salah. Ajarannya bagus dan mendasar. Selama kontradiksi-kontradiksi antara ajaran (Pancasila) dan perbuatan manusianya belum banyak berkurang, kelihatannya susah untuk memandang positif peran Pancasila sebagai suatu azimat bangsa.

TIDAK SEBATAS MORAL

MIMPI PANCASILA kerap dianggap terlalu abstrak bagi masyarakat pluralis seperti Indonesia ini, walaupun Pancasila diramu dari realitas pluralisme bangsa. Cukupkah Pancasila diletakkan di wilayah filosofis/normatif, tanpa detil-detil operasionalisasinya? Cukupkah manusia Pancasila itu manusia yang baik budi pekertinya saja? Tidak. Mimpi besar Indonesia yang diinspirasikan Pancasila harus realistis dan operasional.

Orang baik dan bermoral saja tak cukup. Sosiolog Ignas Kleden

bahkan berpendapat, tidak ada kaitannya kebaikan moral dan pertumbuhan ekonomi. Orang bermoral yang miskin siasat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pragmatisme tak ada artinya. Pancasila menginginkan sistem ekonomi bermoral, seyogianya siasat ekonominya berlegitimasi moral yang jelas.

Banyak yang perlu diperbincangkan. Kalau Pancasila mau direjuvenasi, sebaiknya semua pihak duduk, mendaftar permasalahan obyektif kebangsaan. Harus ada desain ulang penerjemahan Pancasila dan lingkup implementasinya. Kalau Pancasila ideologi terbuka, semua spektrum masyarakat berkesempatan sama menyumbangkan ide-idenya. Merumuskan *mimpi Pancasila* perlu kolektif dan pluralistik. Pancasila tak boleh lagi dipolitisasi.●

Setelah Thaksin Mundur

KOMPAS, 16 APRIL 2006

AKHIRNYA PERDANA Menteri Thailand Thaksin Sinawatra mengundurkan diri. Padahal Partai *Thai Rak Thai* memenangi pemilu paling unik dalam sejarah politik Thailand, mengingat diikuti satu kontestan saja. Thaksin mengajak oposisi bergabung di pemerintahan barunya, tetapi tetap saja ditolak. Ia kemudian mencari alasan yang tepat mengundurkan diri.

Dalam lansekap politik Thailand, alasan tepat mengundurkan diri selalu dikaitkan eksistensi raja. Demikian pula Thaksin yang kemunduranya seolah-olah segaris kemauan Raja. Pengunduranya diumumkan beberapa jam setelah ia bertemu Raja Bhumibol Adulyadej di Istana Hua Hin, Bangkok. Thaksin memohon maaf kepada semua rakyat, khususnya 16 juta pendukungnya, pun mengimbau agar berkorban untuk Raja. Babak baru politik Thailand terjadi.

KELAS MENENGAH

SALAH SATU hal yang dapat menjelaskan kejatuhan pemerintahan Thaksin adalah keberhasilan mobilisasi politik kelas menengah yang

dilakukan kalangan oposisi. Sebenarnya tidak tepat kalau dikatakan mobilisasi oleh kalangan oposisi. Tepatnya, antara kalangan kelas menengah di sana beririsan kepentingan dengan kalangan oposisi.

Salah satu sebab marahnya kelas menengah di sana, antara lain, adalah dijualnya saham perusahaan telekomunikasi raksasa milik keluarganya, Shin Corp, kepada Temasek Singapura dengan harga 1,9 miliar dollar Amerika Serikat. Ada dua macam reaksi negatif atas tindakan Thaksin itu.

Pertama, sementara kalangan kecewa, karena perusahaan yang dijual tergolong aset strategis negara yang seharusnya tidak dikuasai perusahaan asing. Jadi ada semacam alasan nasionalisme di sini. Kedua, kekecewaan yang berkembang di sementara kelas menengah, terkait dibebaskannya transaksi penjualan keluarga Thaksin dari pajak penjualan. Ini mencuatkan sentimen ketidakadilan alias diskriminasi dalam proses berekonomi.

Thaksin sendiri sebenarnya juga merupakan representasi kelas menengah di Thailand, justru karena kesuksesannya dalam berbisnis. Ia berlatar belakang pengusaha, dan menerapkan "manajemen pengusaha" dalam pemerintahannya. Namun, jangan lupa, sesungguhnya Thaksin pun mengembangkan program perekonomian yang mampu menjangkau kepentingan rakyat kecil.

Karena itu, konstituen terbesar Thaksin terlihat di kalangan menengah ke bawah yang hidup di desa-desa. Thaksin sendiri, sejak awal krisis politik mendera, setel yakin bahwa posisi politiknya masih amat kokoh. Maka ia berani menantang partai-partai oposisi untuk bertanding ulang dalam pemilu yang dipercepat tiga tahun lebih awal.

Pihak oposisi secara kalkulatif kalah kalau nekat menuruti skenario Thaksin. Mereka menolak ikut pemilu. Otomatis partai Thaksin menang karenanya, kendati tipis. Legitimasi politiknya hanya tujuh persen, mengingat kemenangannya hanya 57 persen. Setelah gagal membujuk oposisi mendukung pemerintahannya, Thaksin, yang sejak semula terlihat sabar menghadapi gelombang demon-

strasi, akhirnya menyerah juga.

PELAJARAN

KRISIS POLITIK Thailand tidak segera berakhir dengan mundurnya Thaksin. Justru babak baru politik di sana baru akan dimulai kembali. Selain disibukkan mencari sosok yang tepat mencari pengganti Thaksin, segala problematika yang mendera selama pemerintahan Thaksin tidak begitu saja selesai dengan sendirinya.

Ini merupakan pelajaran pertama yang dapat dipetik, bahwa setiap yang dianggap akhir krisis politik, sebenarnya merupakan awal krisis politik baru. Pelajaran selanjutnya, popularitas kepemimpinan Thaksin ternyata memiliki keterbatasan, tatkala harus bersaing politik di level atas. Ini membuktikan, legitimasi politik populer dapat digugur oleh tekanan politik tingkat tinggi yang dimainkan kolaborasi kekuatan oposisi dan kelas menengah.●

Aksi Buruh dan Kambing Hitam

KOMPAS, 8 MEI 2006

DEMONSTRASI buruh yang rusuh di Jakarta pada 3 Mei 2006 mengundang ragam komentar. Dalam hal ini, Presiden SBY me-ngatakan dirinya telah mendapat masukan bahwa ada komponen bangsa, baik perseorangan, kelompok, maupun ikatan identitas yang lain, yang barangkali belum ikhlas, belum *legowo*, menerima hasil Pemilu 2004 lalu, yang mungkin berada di balik kerusuhan tersebut (*Kompas*, 4/5).

Komentar Presiden dipertegas kembali oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Kepala BIN Sjamsir Siregar yang menuduh keterlibatan pihak tertentu, yang memprovokasi dan menunggangi aksi buruh tersebut (*Kompas*, 5/5). Namun, sinyalemen tersebut segera menuai komentar balik dari berbagai pihak,

yang menyatakan ketidaksetujuannya. Mantan Ketua MPR Amien Rais misalnya, mengatakan komentar Presiden, "sebagai hal yang sudah kuno dan tidak lebih dari imajinasi". Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno juga menilai analisis Presiden itu *ngawur*.

Tentu saja pemerintah berhak khawatir atas menggejolaknya demonstrasi buruh yang destruktif, dan dapat mengarah pada tuntutan politik lebih jauh itu. Namun, komentar Presiden yang mengaitkan peristiwa itu dengan ketidakpuasan atas hasil Pemilu 2004 dapat menimbulkan kegelisahan selanjutnya, khususnya bagi kalangan elite politik yang selama ini kritis pada pemerintah, baik di dalam maupun di luar parlemen. Dan itu kontraproduktif.

TANTANGAN DAN GEJOLAK

MESKIPUN demikian, semua pihak pantas introspeksi. Memimpin negeri yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa, dengan tingkat permasalahan rumit ini tentu tak mudah. Baik buruh, pemerintah, maupun elite politik yang menang atau kalah dalam Pemilu 2004 tidak dapat tidak akan setuju dengan pernyataan tersebut. Siapa pun yang menjadi pemerintah di masa suram ini akan dihadapkan pada ragam tantangan dan gejolak.

Pemerintah telah mengupayakan "sekuat tenaga" iklim investasi kondusif di Tanah Air. Tentu, pemerintah akan kecewa dengan hal-hal yang dapat mengganggunya. Karena tugasnya berat, ia selalu membutuhkan dukungan. Dukungan itu tak hanya dibutuhkan saat pemenangan pemilu saja, tetapi yang bersifat langgeng.

Saat ini pemerintah menghadapi situasi perekonomian yang tak mudah. Pengangguran yang meninggi dan anjloknya daya beli membuat masyarakat mudah frustrasi. Pemerintah harusnya menjadi pelipur lara dan pemotivator, bukan justru memunculkan komentar-komentar yang membikin blunder. Destruktivitas berbagai demonstrasi politik belakangan, utamanya di Tuban, dan daerah-daerah lain, tidak dapat semata dipandang dari sisi teori konspirasi dan "penunggang gelap". Ia harus dilihat secara komprehensif.

Lontaran Presiden dapat dipahami positif (*positive thinking*).

Sayangnya ia segera memunculkan efek politis yang cenderung negatif. Presiden seolah telah membuka *front* untuk dukungan seluas mungkin. Seyogianya pemerintah tak mengeluarkan pernyataan sinikal kontraproduktif. Apalagi pernyataan yang diklaim didasarkan data intelijen dipakai sebagai bahan lontaran, sehingga sengaja atau tidak meerupakan serangan psikologis ke lawan-lawan politiknya. Selain kontraproduktif, pernyataan demikian mampu memicu resistansi yang sesungguhnya tak perlu terjadi. Pemerintah dapat dituduh telah menjalankan cara berpolitik otoritarian.

KEMAMPUAN MERESPONS KRITIK

ADA baiknya pemerintah lebih simpatik dan empatik. Tiap hari, bahkan pada masa-masa normal, pemerintah selalu dihadapkan sejumlah kritik. Kemampuan meresponsnya menjadi ukuran sejauh mana ia dewasa berdemokrasi. Komunikasi politik yang baik, mutlak bagi semua elite. Keseimbangan politik akan terjaga apabila manajemen konflik dipahami. Keberhasilan pemerintah diukur kemampuan motivatitnya di tengah kesukaran hidup yang meningkat. Pemerintah dituntut dewasa, bukan suka mencari kambing hitam.●

Tiba-tiba Rindu Pembangunan

KOMPAS, 26 MEI 2006

PEMBANGUNAN ADALAH kata ampuh yang dulu menjadi semacam jimat. Kata itu membuat alergi para reformis. Anehnya, setelah sewindu reformasi para reformis terheran-heran. Meminjam Indra J Piliang, "*Kok* tak ada pembangunan?" Lihatlah jalan-jalan rusak, gedung-gedung sekolah runtuh. Kesan kemunduran terjadi. Apakah tak ada pembangunan selama ini? Jawabannya mengecewakan. Ada yang berpendapat "tidak ada pembangunan sama sekali". Ada yang lebih halus (eufimistik), "pembangunan tetap berlangsung, tapi mengalami hambatan atau kurang efektif".

Dulu, demi pembangunan, terlepas dari pendekatannya yang "mengekang kebebasan", mutlak diperlukan stabilitas politik dan keamanan. Sandingan kata pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Kue harus dibikin sebesar mungkin, baru dibagi-bagi. Artinya, pemerataan itu efek tetesan (*trickle down effect*). Itu dulu, paradigma Orde Baru. Kenyataannya, pembangunan Orde Baru artifisial. Buktinya, di pengujung Orde Baru, kekokohan ekonomi Indonesia "terlibas habis" oleh badai krisis yang dahsyat. Ekonomi Indonesia ambruk. Kritik atas hakikat pembangunan mengemuka kembali. Ideologi pembangunanisme (*developmentalism*) disalahkan, dipandang "biang kerok kehancuran". Namun, kini para reformis harus membaca ulang sisi-sisi baik pembangunan.

MENTAL PENYELEWENG

PEMBANGUNAN YANG dimaksud, berbeda dengan *a la* Orde Baru. Pembangunan di era reformasi sudah terdemokratisasikan. Artinya, ada suatu kemajuan yang dicapai dalam pembangunan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, yang antikorupsi dan tidak membuat efek peminggiran.

Terhambatnya pembangunan di era reformasi justru disebabkan oleh, ironisnya masih bersimaharajalelanya korupsi, dengan pelipatgandaan yang luar biasa. Sentralisme pembangunan telah dikoreksi habis oleh para desainer pembangunan era reformasi, tetapi, ironisnya, kemunculan titik-titik kekuasaan baru belum diimbangi dengan kehadiran mentalitas baru yang tidak korup.

Efek dari "tidak adanya pembangunan" adalah terpinggirnya rakyat, sebagai kaum marjinal. Aneh memang. Dulu pembangunan berimbas pada peminggiran kaum marjinal. Kini "ketiadaan pembangunan" juga sama. Namun, jelasnya, rakyat tambah menderita kalau "tidak ada pembangunan" karena kondisinya stagnan. Rakyat bertahan di tengah dampak krisis yang efeknya demikian terasa. Industri kecil yang dulu sempat bertahan kini banyak yang betul-betul rontok, tak kuat menahan biaya produksi dan ongkos tenaga kerja.

Ketiadaan pembangunan, yang indikasinya juga dilihat dari

mandeknya pembangunan infrastruktur, terkhusus lagi jalan raya, telah membuat aktivitas perekonomian ikut lumpuh. Biaya transportasi pengiriman barang menjadi tinggi. Para pengusaha menengah, kecil, bahkan mikro, terengah-engah mempertahankan eksistensi usahanya. Itu semua merupakan efek dari tidak bergeraknya sektor riil. Di level makro, kalaupun ada pertumbuhan, bersifat semu.

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH

PRESIDEN DAN wapres terpilih memiliki tanggungjawab menjamin terselenggaranya pembangunan nasional. Demikian pula para kepala daerah yang visi dan misinya harus diimplementasikan optimal, berpegang prinsip-prinsip *clean and good government*. Jadi tugas pemerintah sesungguhnya berat. Dinamika politik harus terjaga baik agar lebih produktif dan tidak saling menyandera. "*Politics*," kata Bernard Crick, "*can not make man good, but they can make it easier or harder for us to be good*." Reformasi sudah berjalan, tetapi para elite dalam maupun luar pemerintahan belum efektif. Mereka meraba-raba "dalam keremangan".●

Pemerintah yang Gagal Memerintah

KOMPAS, 13 JUNI 2006

KEJADIAN DI Timor Leste dan kritik sementara kalangan atas lambatnya penanganan gempa di Yogyakarta memberi pelajaran berharga, bagaimana pemerintahan mampu memerintah. Governabilitas pemerintah sedang diuji oleh dua hal, kerusuhan yang menjurus *national disorder*, dan dalam menghadapi bencana. Masing-masing pemerintah, di mana pun, dituntut mampu memerintah. Artinya mampu membuat kebijakan yang efektif, dengan tingkat resistensi rendah, dan derajat kepuasan warga yang tinggi. Pemerintah dapat mengelola konflik dengan baik sehingga

tidak timbul kekisruhan di mana-mana.

Orang-orang birokrasi pemerintahan pasti memperoleh banyak masukan dari proses pendidikannya, berbagai bacaan tentang cara memerintah yang baik. Demikian pula pemerintah yang berasal dari kalangan politisi, dituntut belajar cepat, memadukan pengalaman politiknya dengan seni memerintah. Yang jelas, apakah pemerintah berasal dari birokrasi murni atau politisi murni, sama-sama berhadapan dengan publik yang diperintah.

Konteks tulisan ini tidak mengulas bagaimana sebuah pemerintahan itu efektif, efisien, sehingga birokrasi perlu dipangkas. Namun, lebih terkait integritas kepemimpinan sebuah pemerintahan yang betul-betul mampu memadukan dua pendekatan, yang bagi pembaca politik di Indonesia tidak asing lagi. Pendekatan kepemimpinan itu, saya kutip dari Herbert Feith: *solidarity maker* dan *problem solver*. Yang satu merujuk gaya kepemimpinan Soekarno, satunya lagi Mohammad Hatta. Soekarno motivasional, Hatta seorang administratur yang baik.

Memang kategorisasi Feith telah dibahas dan diperbincangkan luas. Ada kritik dan masukan. Lantas ada yang moderat dengan mengatakan baik Soekarno maupun Hatta memiliki dua kemampuan itu: menggalang dan memotivasi publik dan memiliki kemampuan administratif yang baik. Dwitunggal itu, akhirnya "gagal" dan "tanggal". Mereka dipisahkan oleh politik. Tercatat, politik yang menyatukan dan akhirnya memisahkan dua tokoh proklamator itu. Bagaimanapun itu adalah pelajaran berharga.

BIBIT KETIDAKPERCAYAAN

DI NEGARA demokrasi mana pun, hadirnya tokoh pemerintahan tak dapat dilepaskan dari politik. Maksudnya, profesionalitas kerja pemerintah di satu sisi dihadapkan pada *tetek-bengek* persoalan yang terkait fungsi-fungsi kepelayanan publik, dan di sisi lain berhadapan dengan dinamika politik, yang terkait konteks pengambilan dan implementasi kebijakan.

Terkadang, pemerintah disibukkan oleh aneka pekerjaan "menundukkan lawan-lawan politiknya". Belum lagi kalau para politisi yang ada di pemerintahan itu masih memiliki keinginan untuk maju dalam pemilihan umum, dan ambisi-ambisi mempertahankan kekuasaan. Tidak dapat dimungkiri, politik telah "mengerangkeng" pemerintahan Alkatiri, Perdana Menteri Timor Leste. Ia, bagaimanapun, telah menjadi bagian dari konflik politik yang terkesan "tak berujung". Ia memecat kalangan militer yang desersi, tetapi justru menuai resistensi yang demikian hebat.

Konflik militer versus Alkatiri segera meluas menjadi kerusuhan eskalatif di Dili, dan membuat pemerintah "angkat tangan". Wibawa pemerintah di ujung tanduk. Kedatangan pasukan asing merupakan solusi instan yang hanya meredakan kerusuhan. Tetapi, tanggung jawab masa depan Timor Leste tetap pada pemerintah.

Jika Timor Leste dikhawatirkan menjurus pada "negara gagal" (*state failure*), siapa yang bertanggung jawab paling utama selain pemerintahnya? Ada kesamaan antara peristiwa rusuh di Timor Leste dan bencana di Indonesia: publik kecewa pada pemerintah. Meski kadar kekecewaannya berbeda, tetapi hakikat kecewa tetap kecewa, dan itu merupakan bibit ketidakpercayaan pada pemerintah. Publik kadang tidak paham dengan cara kerja pemerintah. Ujung ekstrem ketidakpercayaan ialah pembangkangan.

Di Timor Leste pembangkangan mengejawantah. Di Indonesia sebatas potensi. Kadar kepercayaan fluktuatif, sebagaimana ditunjukkan hasil-hasil jajak pendapat lembaga riset politik. Sebenarnya banyak contoh kasus di Indonesia, terkait pembangkangan sipil, utamanya di daerah pra maupun pasca-pilkada. Peristiwa-peristiwa pembangkangan sipil dan aneka kerusuhan seharusnya betul-betul dijadikan pelajaran, utamanya bagi kalangan politisi kita.

DAYA GOVERNABILITAS

BANYAK KALANGAN menyarankan agar politisi yang telah duduk di pemerintahan, segera berubah menjadi negarawan. Simbol-simbol politik identitas mereka harus dilepas, berdiri di semua kelom-

pok dan golongan. Tetapi, rupanya itu sekadar konsepsi abstrak. Para politisi-pemerintahan memiliki subyektivitas politik masing-masing, dan berupaya menyeimbangkan posisi dan kepentingannya di antara politisi lain.

Bagi Pareto (dalam Bottomore, 1966), tidak ada negarawan, yang ada elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non-governing elite*). Di bawah lapisan nonelite, mereka adalah publik luas yang diperintah. Elite yang memerintah dapat melakukan berbagai pendekatan pada nonelite agar mereka dapat "diperintah" dengan efektif: baik dengan metode pemaksaan maupun kerelaan.

Semakin tinggi resistensi, semakin tinggi elite pemerintah melakukan pendekatan pemaksaan. Tetapi, hal itu tidak dapat dilakukan di masa-masa normal, mengingat hanya menumpuk bom waktu. Idealnya, nonelite betul-betul dalam kondisi yang rela untuk diperintah. Dalam konteks ini, pemerintah berhasil menancapkan hegemoni, bukan dominasi. Publik yang rela ialah yang percaya.

Tetapi, publik yang percaya akan berubah sikap, jika pemerintah "tidak dapat memerintah". Dalam benak mereka, apa arti pemerintah jika "gagal memerintah". Karena itu, penting bagi pemerintah mana pun untuk menjaga daya governabilitas mereka. Jika pemerintah hanya menonjolkan seremoni, tanpa tindak lanjut yang cepat dan jelas, rakyat pasti makin kecewa.

Dari Klaten dan sekitar Yogyakarta dilaporkan di tengah situasi bencana, rakyat masih trauma dengan getaran dan bunyi-bunyian. Mereka trauma bunyi sirene. Pemerintah datang dan pergi begitu saja.●

Bencana dan *Political Distrust*

KOMPAS, 20 JULI 2006

IN POLITICAL SITUATION, HOWEVER, THE ASSUMPTION OF SOLIDARITY WITH OTHERS OFTEN IS SUSPECT, AND HEREIN LIES THE AMBIGUOUS, EVEN PARADOXICAL, NATURE OF THE TOPIC OF DEMOCRACY AND TRUST

- MARK WARREN (DEMOCRACY AND TRUST, 1999)

SEMENTARA PENANGANAN korban bencana Yogyakarta dan sekitarnya akibat gempa belum tuntas, bencana gempa dan tsunami muncul di pantai selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, dan menelan ratusan jiwa. Memang musibah demi musibah harus dilihat secara proporsional dan arif. Tetapi, masyarakat juga harus tetap kritis atas tanggung jawab pemerintah sebagai koordinator penanganan bencana.

Diberitakan, hingga kini masih banyak korban bencana yang kecewa dengan sikap dan kebijakan pemerintah. Beberapa waktu lalu seorang teman dari Yogyakarta mengirim pesan singkat, "Para korban bencana gempa mulai mencemaskan realisasi bantuan pemerintah yang tidak kunjung tiba, sementara cadangan pangan sudah menipis. Jika dalam sepekan suasana memburuk dikhawatirkan akan timbul chaos dan penjarahan".

Sejauh itukah? Saya tidak yakin. Tetapi, jika pemerintah tidak mengantisipasi, persoalannya bisa jadi semakin gawat. Pascagempa Yogyakarta, rakyat yang tertimpa bencana sungguh masih amat berharap akan perwujudan "janji" bantuan pemerintah yang "besarnya" sudah mereka ketahui dari media.

Mereka yang terlampau berharap, merasakan kekecewaan sebab bantuan itu amat prosedural, karenanya lambat. Banyak korban tak terjangkau dan hanya mendengar suara sirene rombongan pejabat peninjau. Jika rakyat tidak "berbesar hati", mereka akan kian kecewa dengan birokrasi pemerintah yang lambat. Reaksinya ada empat kemungkinan. *Pertama*, mereka cukup sekadar mengeluh. Mereka menerima keadaan, tetapi dengan mengeluh (*gerundel*) karena beratnya beban dan lambatnya bantuan.

Kedua, mereka melakukan resistensi vertikal, mendemo pemerintah. *Ketiga*, mereka melakukan resistensi horizontal, akibatnya "terpaksa" melakukan aksi kriminal dan upaya sejenis untuk "mempertahankan hidup". *Keempat*, mereka menjadi "rumput kering" yang mudah dibakar kalangan tertentu yang menghendaki "revolusi sosial". Kelihatannya tidak sampai sejauh "revolusi sosial". Tetapi yang jelas, fenomena political distrust (ketidakpercayaan) publik kepada pemerintah dengan ekspresi bermacam-macam.

TETAP KRITIS

ADALAH KEWAJIBAN *civil society* kritis pada negara (*state*) dan pasar (*market*). Dalam kajiannya, *Democracy and Trust* (1999), Mark E Warren menyarankan ditempatkannya demokrasi secara tepat di tengah-tengah kekuatan *civil society*, negara, dan pasar (ekonomi). Interaksi ketiganya membutuhkan *trust* (kepercayaan). Hal ini dimaksudkan agar terjadi proses politik yang sehat, karena ketiga komponen itu bekerja dalam koridor menjaga *trust*.

Mengutip Fukuyama (*Trust*, 1995), harus ada *the ethics of trust*, etika politik yang harus dijaga masing-masing pihak. Proses politik berjalan formal maupun nonformal. Yang formal dilakukan kelembagaan politik partai-partai. Yang nonformal dilakukan berbagai *interest group*, yang mengerucut dalam *civil society*. Demokrasi memberikan koridor kebebasan berpolitik sepanjang tak melanggar konstitusi. Negara, dalam iklim dan sistem demokrasi, tak usah gelisah dengan fenomena *civil society*, justru selama pemerintah mampu menjaga *political trust*. ●

Mungkinkah Golkar Oposisi?

KOMPAS, 13 SEPTEMBER 2006

SYAMSUL Muarif, Ketua Umum SOKSI, pada penutupan Mukernas I SOKSI di Jakarta, meminta Partai Golkar mengevaluasi dukungan politiknya terhadap pemerintah yang berkuasa. Sebab, Golkar hanya dijadikan bumper. Dukungan kritis Golkar tak menunjukkan hasil signifikan. Namun, ia tak meng-usulkan Golkar mengambil sikap oposisi, tetapi juga tak perlu mengambil sikap mendukung.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla membantah. Katanya, sejak awal hubungan Golkar dengan pemerintah adalah hubungan kritis, obyektif, dan proporsional. Golkar sulit untuk beroposisi dengan pemerintah karena Golkar mendukung apa pun yang bersifat pembangunan. Saat ini, kata JK, tak ada satu partai pun yang bercita-cita menjadi oposisi. Menurut dia, setiap partai berkeinginan menguasai pemerintah (*Tempo Interaktif*, 21/8/2006, dan *Kompas,* 22/8/ 2006).

Kutipan berita di atas merupakan perkembangan "terbaru" partai pemenang Pemilu 2004 ini. Dalam Pemilu 2004 Golkar memperoleh dukungan 24,5 juta suara atau naik 0,8 juta dibanding Pemilu 1999. Di DPR jumlah kursinya bertambah delapan, walaupun secara persentase turun dari 26 persen menjadi 23,3 persen. Di tengah-tengah iklim kompetisi politik yang makin kompleks, fenomena ini merupakan suatu prestasi. Untuk menghadapi pemilu masa depan, pekerjaan kian berat. Tiga wajah partai, yakni partai di tingkat akar rumput (*grass root*), *party in the office*, serta *party in*

the government — apakah di legislatif atau eksekutif, harus terkelola dengan baik, mengingat pengambilan kebijakan yang tidak tepat di level "pemerintahan" akan berdampak serius ke bawah. Apalagi kalau sebuah partai tidak terurus dengan baik.

PERUBAHAN *MINDSET*

PADA mulanya sebagai kekuatan politik "tidak pandang bulu" (*catch all party*), Golkar sengaja didesain sebagai "alat kekuasaan" Orde Baru. Karena itu, *mindset* Golkar bukan partai politik. Tradisi persaingan politik yang demokratis tak berkembang. Afan Gaffar mengelompokkannya sebagai *hegemonic party system*. Namun, perubahan sistem politik pasca-Orde Baru membuat Golkar di bawah Akbar Tandjung mengeluarkan "paradigma baru". Akbar mendesain *mindset* baru. Golkar bukan "alat kekuasaan" lagi, sehingga siap berkompetisi secara fair dengan yang lain.

Mindset partai hanya menyediakan dua pilihan dalam konteks *party in the government* kalau pihaknya menang atau berada dalam koalisi pemenang pemilu, maka ia akan mendukung sepenuhnya sebagai "partai pemerintah". Namun, kalau partai itu kalah, pilihannya jelas: mengambil posisi sebagai kekuatan politik pengimbang (oposisi). Hal ini berlaku dalam sistem kepolitikan apapun: apakah parlementer atau presidensial. Demokrasi politik membutuhkan konsistensi sikap politik sejak awal.

Meski demikian, mindset tersebut oleh partai-partai politik (di Indonesia) diturunkan ke tingkat semacam "etika politik". Kalimat "mendukung tetapi kritis" atau "mitra yang kritis", bagaimanapun merupakan kalimat yang rancu — justru karena sebuah partai politik tidak punya sikap yang jelas sehingga menaruh kakinya di dua wilayah yang berbeda. Demokrasi *checks and balances* dirancukan maknanya dengan dalih kultur oposisi di Indonesia tidaklah wajar.

Ide Koalisi Kebangsaan yang dulu digulirkan Akbar Tandjung dan Megawati dalam *mindset* partai dengan mudah dapat dipahami. Namun, ide tersebut tak lagi diteruskan saat JK, salah satu peserta Konvensi Pencalonan Presiden Partai Golkar yang mengundurkan

diri dan menerima tawaran pencalonan Partai Demokrat sebagai calon wakil presiden itu, memimpin Golkar.

Mindset Golkar sebagai partai politik modern pun tergusur, bahkan mengalami *setback*, ke *mindset* lama, yang menguatkan mitos bahwa Golkar harus mendukung kekuasaan. *Mindset* harus di kekuasaan inilah yang salah kaprah. Pertaruhan Golkar amat berat, tatkala pemerintah kian hari kian terakumulasi kritik, Golkar bisa banyak kena getahnya. Maka, tak ada salahnya apabila sebagian kalangan Golkar mengusulkan menimbang ulang, sebaiknya Golkar di luar kekuasaan, berdiri tegak sebagai kekuatan politik pengimbang, yang tidak kalah wibawanya dengan pemerintah.●

Mengapa Militer Thailand Kudeta?

KOMPAS, 26 SEPTEMBER 2006

ADA yang getir setiap kali kudeta militer dilancarkan, meskipun damai. Demikian pula halnya dengan kudeta di Thailand yang dilakukan oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaratglin atas pemerintahan PM Thaksin Sinawatra, 19 September. Proses demokrasi politik yang berjalan berikut plusminusnya di sana berakhir di ujung bedil.

Kudeta di Thailand sudah mentradisi. Sejak 1932, ketika negara Gajah Putih itu menjadi Monarki-Konstitusional, sudah 23 kali kudeta terjadi. Pola-pola yang sama terus berulang ketika para pemimpin kudeta menyusun atau merubah konstitusi demokrasi parlementer, guna memperkuat legitimasi politiknya. Theeravit (1979) mencatat atas fenomena demikian demokrasi di Thailand "lahir dari ujung laras senapan". Catatnya, "semua konstitusi mendapat restu dari Tuhan, seperti yang dibaca dalam pembukaannya, tetapi konstitusi-konstitusi itu tidak pernah selamat dari bedil".

Setiap gejolak politik yang selesai dan kambuh kembali oleh sebab kudeta di Thailand, bagaimanapun selalu menarik dicermati. Lansekap politik Thailand tak lepas dari raja sebagai simbol "penentu" politik. Setiap kudeta yang dilancarkan, selalu dikaitkan klaim memperoleh "restu" raja. Tetapi, raja sendiri sesungguhnya tidak mampu menghentikan tradisi kudeta, walaupun ia amat berkepentingan sekali dengan militer.

Kondisi politik di Thailand amat memungkinkan kudeta. Reaksi dan resistensi atas kebijakan pemerintahan PM Thaksin mengeras, ribuan kelas menengah Thailand mendesaknya mundur. Thaksin pun sempat mengundurkan diri dari jabatan PM, tetapi proses politik telah membuatnya naik lagi ke panggung politik. Karir politiknya belum berakhir, dan masih menjadi faktor penentu gejolak politik Thailand sebelum militer "mengakhirinya".

Percepatan kudeta terjadi setelah Thaksin mengumumkan negara dalam keadaan darurat, memecat Panglima Angkatan Darat, memindahkan jabatannya ke kantor PM. Ia meminta militer tak mengerahkan pasukannya "secara ilegal". Tetapi, tatkala Thaksin tengah di New York, para petinggi militer mengambilalih pemerintahan. Krisis politik Thailand belum hendak berakhir, meskipun militer berjanji mengawal proses demokrasi melalui pemilu 2007.

Klaim para pengkudeta di Thailand mirip dengan yang terjadi sebelumnya, dan merupakan klise atas sejumlah kudeta di negara-negara berkembang. Secara normatif militer bermaksud menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, menjaga persatuan dan kesatuan, oleh karenanya "kebuntuan politik" harus diakhiri. Militer yang berjanji "menjaga jarak dengan politik", dikesankan seolah-olah terpaksa melakukan tindakan tersebut. Tetapi, kecuali beberapa kasus, militer gagal mengkahiri krisis politik.

Tak semua kudeta berakhir otoritarianisme. Di Thailand, kudeta terjadi puluhan kali, tetapi sistemnya tetap demokrasi parlementer. Huntington (1987) mencontohkan kudeta di Portugal pada 1974 yang mampu memicu gelombang demokrasi. Mereka mengembalikan tatanan politik demokrasi, setelah berhasil mereka pun men-

jaga jarak, tidak ikut campur lagi dalam politik. Tetapi, mestikah militer angkat senjata dalam setiap kali perubahan politik, demi demokrasi sekalipun?

Kasus kudeta di Thailand meninggalkan pelajaran berharga. Meskipun kudeta merupakan "cara kuno", tetapi ia masih dapat terjadi di negara demokrasi. Militer tetap "entitas politik" dimana para perwiranya punya pandangan dan sikap tersendiri sebagai respons atas dinamika politik. Biasanya mereka konservatif. Dalam titik tertentu ketika kekecewaan terakumulasi, militer pun bergerak, untuk menegakkan "demokrasi dengan ujung laras senapan".●

Ujian Politik Partai Golkar

KOMPAS, 8 NOVEMBER 2006

BERBAGAI isu hangat akan dibahas pada Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, 13-16 November 2006. Meski demikian, berbagai isu itu bermuara pada pertanyaan mendasar, bagaimana Partai Golkar mampu menentukan sikap politiknya secara tepat di tengah iklim politik yang kian dinamis mendekati 2009.

Apa yang akan terjadi pada rapimnas itu, bagaimanapun merupakan potret mutakhir dinamika elite internal Partai Golkar di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, yang kebetulan menjabat wakil presiden (wapres), dalam menyikapi beragam perkembangan politik. Atmosfer politik Golkar kini sedang menghangat seiring kian dramatiknya faksionalisasi internal. Eksistensi faksi-faksi dalam sebuah entitas politik sebenarnya merupakan hal yang wajar, apalagi bagi partai bercorak *catch all* (diterjemahkan Ichlasul Amal "partai tidak pandang bulu") seperti Golkar.

Banyak unsur penopang Partai Golkar. Beragam elite yang disertai beragam "kepentingan" pun hadir di sana. Bagaimana kepemimpinan Partai Golkar mampu mengelola ragam kepentingan, itulah yang menarik dicermati, mengingat faktor kepemimpinan amat

menentukan sejarah masa depan partai ini.

FAKTOR JK

TAMPILNYA JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional di Bali akhir 2004, mencatatkan realitas, pihaknya didukung beragam kelompok kepentingan internal partai, karena adanya kepentingan jangka pendek atau jangka panjang yang sama. Dalam perkembangannya, faktor JK telah dan sedang memainkan posisi dan peran amat penting dalam interaksi politik internal partai. Gaya dan corak kepemimpinan JK, politisi berlatar belakang pedagang ini, dalam memimpin dan mengendalikan sebuah partai politik besar, modern, dan prospektif, amat menentukan ke mana arah partai melangkah.

Meski demikian, mengandalkan posisi JK sebagai wapres semata tidaklah cukup untuk mengelola partai besar itu, di tengah arus kritisisme yang kian menguat. Sudah menjadi kewajiban politik, kompleksitas kepentingan internal, baik yang bersifat substansif maupun pragmatis, akan terus menuntut diberi ruang yang nyaman. Jika sinyal resistensi politik internal kini mulai terasa, hal itu segera merangsang publik untuk bertanya: ada apa dengan Golkar?

Kini JK menghadapi dua tantangan sekaligus. *Pertama*, problem-problem internal, khususnya faksionalisasi dan manajemen partai. Di sini, kekokohan pengaruh politiknya terus diuji, seberapa mampu ia mengelola ragam kepentingan yang ada, tanpa membuahkan resistensi politik yang "membahayakan". Apakah gaya dan pola kepemimpinan JK akan mampu mengatasi gejolak internal dan mampu mengembangkan manajemen partai yang efektif dalam melembagakan dukungan publik?

Kedua, problem-problem eksternal, terkait posisinya sebagai wapres di tengah konstelasi kepolitikan nasional yang dalam banyak hal bersifat paradoks dan berdampak pada harmonisasi hubungan Presiden dan Wakil Presiden. Persaingan politik antara dua sosok dengan kalkulasi politik masing-masing, antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan JK, kelihatannya absurd, tetapi bukan tidak

mungkin terjadi. Bila demikian, posisi Partai Golkar akan serba dilematis.

IBARAT PELANDUK

SEBAGAIMANA diberitakan media, menjelang rapimnas "suara lain" sedang muncul di internal partai, baik yang datang dari unsur Kelompok Induk Organisasi (KINO) maupun beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang menghendaki pencabutan dukungan Partai Golkar atas pemerintah. Tuntutan itu tak lepas dari buah kekecewaan kader partai atas politik akomodasi pemerintah, dalam konteks ini Presiden SBY, yang dipandang tidak memberi jatah politik secara proporsional kepada Golkar.

Dilema politik juga mengemuka saat posisi dan pengaruh Wapres dirasakan kian teredusir. Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), misalnya, diartikan sebagai upaya Presiden mengesampingkan peran Wapres. Reaksi di kalangan elite utama Partai Golkar pun terkesan keras. Sebagian lapisan elite Partai Golkar membaca, pembentukan UKP3R sebagai puncak persaingan politik SBY-JK. Jika itu benar, Partai Golkar ibarat pelanduk bisa jadi korban dua gajah yang berseteru.

Oleh karena itu menjadi menarik, sejauh mana rapimnas menghasilkan sikap politik yang secara institusional tepat, tanpa terbelenggu dilema politik yang menyertainya. Masih belum terjawab, apakah kelak internal partai kian solid, atau kian gamang dalam ragam kerisauan politik yang tak kunjung susut.

PARTY ROOTING

PARTAI, kata Samuel P Huntington (1968), hanya bisa menjadi kuat jika mampu melembagakan dukungan massa. Polanya bisa mobilisasi, tetapi jauh lebih efektif partisipasi. Mobilisasi banyak kelemahan, sehingga amat riskan jika sebuah partai mengambil kebijakan memobilisasi massa sebulan dua bulan sebelum pemilu. Idealnya, begitu pemilu usai, saat itu partai bekerja, memperkuat basis dukungan, melalui berbagai strategi *party rooting* (peng-

akaran partai).

Apakah Golkar telah melakukan party rooting secara efektif pada kepengurusan kali ini? Kelihatannya belum, bahkan terkesan muncul sikap menggampangkan, seolah kemenangan dalam pemilu lebih ditentukan mobilisasi instan, yang amat menggantungkan mesin-mesin pragmatisme. Absennya ketua umum partai dalam konsolidasi di daerah-daerah seharusnya diimbangi aktifnya pengurus yang melakukan fungsi-fungsi konsolidasi. Akan tetapi, hal itu belum efektif dijalankan.

Hal-hal sepele tetapi mendasar itu jika terabaikan bukan tidak mungkin Golkar akan menuai kemunduran serius. Apakah Partai Golkar akan mampu melewati ujian politik yang makin hari makin berat? Sejarahlah yang kelak akan membuktikan.●

IX

BILA PARTAI TANPA POLITISI

[2007]

INDONESIA JUGA BERKEPENTINGAN DENGAN TERWUJUDNYA KONDISI POLITIK YANG DEMOKRATIS TETAPI STABIL. SISTEM KEPOLITIKAN PRESIDENSIAL YANG BERPADU DENGAN REALITAS MULTIPARTAI PENUH JEBAKAN INSTABILITAS. KEGADUHAN POLITIK YANG KERAP MUNCUL PUN BERPELUANG MEMBELENGGU GERAK PERKEMBANGAN EKONOMI.

- MENGAPA POLITIK PERLU?

Demitologi Bencana

KOMPAS, 15 JANUARI 2007

BERTUBI-TUBINYA bencana di Tanah Air — pesawat Adam Air hilang, kapal Senopati Nusantara tenggelam, dan jemaah haji kelaparan di Mekkah — membuat sementara pihak mengaitkannya dengan mitologi. Bencana-bencana itu seolah kelanjutan tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, tsunami di Pangandaran, letusan Gunung Merapi, hingga Lumpur Sidoarjo. Semuanya dikaitkan dengan keberadaan pemerintahan SBY-JK.

APA YANG SALAH?

APA YANG salah dari pemerintah? Mengapa bencana bertubi-tubi? Analisis mitologis yang berkembang mengatakan, pemerintah didukung rakyat, tetapi kurang didukung alam. Dengan kata lain, SBY-JK kurang beruntung. Pengaitan ini jelas tidak bisa diterima "akal sehat", termasuk usulan agar pemerintah diruwat.

Namun, ia tak bisa diremehkan. SBY-JK datang lewat jalur pencitraan. Citra dipengaruhi banyak hal, yang masuk akal, emosional, yang tak masuk akal, bahkan mitologis. Meski masyarakat Indonesia telah berada di era modern, dimensi mitologis masih subur. Dunia paranormal tumbuh subur, terang-terangan, maupun sembunyi-sembunyi. Impian akan datangnya sosok mesianik, "juru selamat" alias "ratu adil", juga masih mengemuka pada sebagian masyarakat meski eranya sudah amat berbeda.

Hubungan antara mitos dan politik sebenarnya telah menjadi kajian tersendiri. Dalam *The Land of Idols: Political Mythology in America* (1993), Michael Parenti mengharapkan terwujudnya

masyarakat pascapolitik mitos, "*a truly democratic society*". Mungkin kita segera melontarkan kalimat, di AS saja dunia kepolitikannya masih terbebani problem mitologi, apalagi Indonesia yang konstruksi masyarakatnya amat lekat dengan mitos-mitos.

Bukankah budayawan Mochtar Lubis dalam *Manusia Indonesia* (1977) pernah menyindir manusia Indonesia, antara lain, sebagai sosok-sosok yang masih percaya pada mitos-mitos? Terpilihnya SBY-JK dibarengi dengan membuncahnya harapan publik. Harapan politik kerap beda tipis dibanding mitos politik. Harapan yang berlebihan tentu tidak masuk akal karena SBY-JK tentu bukan manusia super atau, meminjam Iwan Fals, setengah dewa.

Namun, terpilihnya pasangan tersebut juga konsekuensi politik pencitraan. Jadi, sejak awal seharusnya keduanya menyadari, ada segmen masyarakat yang mengharapkan sekali efektivitas pemerintahan, tegas dan tangkas dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Pada satu sisi, SBY-JK sadar atau tidak dibesarkan oleh mitos-mitos, di sisi lain, dalam konteks ini, perjuangan mereka melawan mitos-mitos itu sendiri.

KEMASUKAKALAN

DI DEPAN publik, SBY-JK berupaya meyakinkan bencana-bencana itu tak terkait dimensi mitologis. SBY pernah mengatakan agar seluruh rakyat melihat dan memahami kehadiran bencana yang bertubi-tubi itu dengan "kacamata ilmu pengetahuan" (*Kompas.com*, 21/6/2006). Memasuki 2007, SBY berjanji "bekerja lebih konkret dan menggunakan bahasa terang" (*Kompas*, 27/12/2006).

"Bahasa terang" yang dimaksud terkait hal-hal yang masuk akal. Namun, Presiden mungkin akan banyak menemui kesulitan menyangkut penggunaan "bahasa terang" guna menjelaskan mismanajemen komunikasi, semisal simpang siur hilangnya pesawat AdamAir. Pekerjaan tambahan presiden, wakil presiden dan para pembantunya ialah menjelaskan secara terang sesuatu yang berkembang secara tidak masuk akal, menetralisasi, mengajak publik percaya pada yang masuk akal.

Penangkalan pencitraan negatif akibat berkembangnya mitos mestinya tidak dijawab secara permukaan alias superfisial. Bukan wacana dan retorika, tetapi kecakapan menggerakkan segenap sumberdaya untuk bekerja konkret. Kritik atas pemerintahan SBY-JK hingga tahun ketiga, tak dipungkiri masih berputar belum optimalnya kinerja akibat lemah manajemen. Unsur penopang pemerintah terlampau beragam. Lalulintas kepentingan mereka gegap gempita. Ada kalanya pemerintahan kewalahan, meski kekuatan politik di parlemen telah tertaklukkan.

Dengan janji bekerja konkret dan bahasa terang, SBY-JK, maupun SBY di satu sisi, dan JK di sisi lain, akan berpacu dengan popularitas. Ini merupakan dampak idolaisasi politik demokrasi langsung. SBY-JK telah ditempatkan sebagai idola politik pendukungnya. Semula mereka cenderung "dimitoskan" dwitunggal, seperti Soekarno-Hatta. Namun ini terlampau berisiko, jika dikesan hubungan keduanya kurang harmonis. Jangan muncul terang-terangan memudarnya soliditas sebelum 2009. Karena bisa berdampak kepada nasib bangsa.●

Mengapa Politik Perlu?

KOMPAS, 2 MARET 2007

I WILL DO POLITICS OF UNITY

- MUHAMMAD YUNUS

PERAIH NOBEL Perdamaian 2006 Muhammad Yunus rupanya benar-benar *cancut tali wandha*, bertekad bulat hijrah ke dunia politik, justru ketika politik Banglades terlilit benang kusut. Aktivis Bank Grameen yang lekat dengan rakyat kecil itu tak punya pilihan lain kecuali memenuhi panggilan politik. Akankah ia berhasil? Bukankah dunia politik lain? Pria kelahiran 1940 ini tampak paham, dunia politik penuh risiko. Rumus bakunya sangat ber-

beda dengan di luar politik. Dalam politik, tak ada kawan dan lawan abadi selain kepentingan. Idealisme kerap terbentur pragmatisme.

Dalam wajahnya yang buruk, politik ditandai hal-hal menyakitkan. Ia kerap bak dunia mafioso dalam novel Mario Puzo, *The Godfather*, di mana terdapat unsur-unsur diametral: kesetiaan, pengkhianatan, hadiah, hukuman, pujian, cercaan, harapan, sekaligus penyesalan. Butuh mental khusus masuk ke dunia abu-abu ini.

Dan, Yunus terobsesi ke sana. Namun, bukan politik dalam wajahnya yang negatif yang ia kehendaki, tetapi politik yang, meminjam M Amien Rais, yang tingkatannya tinggi (*high politics*). Yunus prihatin terhadap kondisi bangsanya yang karut-marut, ditandai instabilitas politik, kemiskinan, dan korupsi. Partai politik yang dideklarasikan Nagorik Shakti (Kekuatan Rakyat) diimpikan sebagai partai ideal yang melibatkan banyak "orang jujur" (*Kompas*, 23/2/2007).

Yunus berbekal idealisme pengentasan kemiskinan. Seperti dikutip *The Independent* (5/5/1996), Yunus mengatakan, suatu hari cucu-cucu kita harus pergi ke museum untuk melihat seperti apa kemiskinan itu. Ia jengah dengan kemiskinan dan terus berjuang melawannya, bahkan dengan berpolitik sekalipun. Bekal lainnya adalah popularitas yang sejatinya telah jauh melampaui politik.

Obsesi kepolitikannya, kepemimpinan yang kuat dan pemerintahan yang baik. Untuk itu ia akan memanfaatkan popularitas dan jaringan "konstituennya" di desa-desa untuk menghidupkan mesin politik partai barunya. Kelihatannya Yunus akan mudah melakukan itu. Namun, ia akan kesulitan dalam menghadapi serangan para lawan politiknya, terutama kalangan oposisi Liga Awami pimpinan mantan PM Sheikh Hasina di satu sisi, dan Partai Nasional Banglades (BNP) pimpinan mantan PM Begum Khaleda Zia di sisi lain.

FAKTOR TENTARA

POLITIK Banglades, sebagaimana negara-negara berkembang lain amat dinamis. Demokrasi parlementer yang diterapkan membuka peluang timbul-tenggelamnya pemimpin politik. Selain itu, tenta-

ra masih menjadi faktor menentukan. Jadi, apakah ia akan mendapat dukungan politik riil dari berbagai pihak dan bisa membentuk kepemimpinan yang kuat dan pemerintahan yang baik? Yunus harus bekerja keras dalam mengubah secara cepat pola pikir aktivis sosial ke pola pikir politik yang sarat dengan perebutan dukungan.

Kisah tentang majunya Yunus ke arena politik itu jika direfleksikan dengan kepolitikan Indonesia sekarang lumrah saja. Sejak reformasi bergulir, panggung politik kita kebanjiran tokoh, termasuk yang amat populer sebagai "tokoh reformasi" yang berlatar belakang intelektual publik. Partai politik telah menjadi kendaraan mereka untuk tampil meraih dukungan. Namun, realitas politik membuktikan, hadirnya "tokoh reformasi" pun nyatanya tak sejajar dengan besarnya dukungan politik. Ibarat pepatah, gayung pun tak bersambut.

Meski demikian, dewasa ini para tokoh yang seharusnya resi, sebagaimana Yunus, terpaksa masuk ke gelanggang politik dengan mendirikan partai dan siap bersaing. Ambil contoh, apa yang dilakukan Wiranto dengan Partai Hanura yang dideklarasikan belum lama ini. Sebagaimana Nagorik Shakti, ia punya kemiripan, setidaknya berangkat dari keprihatinan yang sama: kondisi bangsa tak kunjung membaik akibat kepemimpinan yang lemah.

Dengan serius masuk dunia politik, terlepas apakah akan mendapat dukungan yang signifikan atau sebaliknya, baik Yunus maupun Wiranto lebih ksatria. Jika idealismenya ingin terwujud lewat politik, dunia politik harus dimasukinya meski besar risikonya.

STABILITAS POLITIK

DI sisi lain, tantangan demokratisasi Banglades dan Indonesia juga mirip: masing-masing berupaya keras mewujudkan stabilitas. Di Banglades, kemelut demi kemelut seolah tak berakhir dan telah membelenggu kemajuan ekonomi negara. Stabilitas politik masih termasuk barang mewah di Banglades.

Indonesia juga berkepentingan dengan terwujudnya kondisi politik yang demokratis tetapi stabil. Sistem kepolitikan presiden-

sial yang berpadu dengan realitas multipartai penuh jebakan instabilitas. Kegaduhan politik yang kerap muncul pun berpeluang membelenggu gerak perkembangan ekonomi. Kondisi demokrasi (politik) di Indonesia belum mencapai level aman.

Menurut Menko Perekonomian Boediono, pendapatan per kapita Indonesia yang kini diperkirakan sekitar 4.000 dollar AS masih jauh dari level aman demokrasi, kecuali jika sudah mencapai 6.600 dollar AS (*Kompas*, 25/2/2007). Kemajuan ekonomi agaknya selaras dengan keberlanjutan demokrasi. Untuk mencapainya, rumus stabilitas politik masih relevan. Selain, yang utama, faktor kepemimpinan yang hingga kini masih menjadi sorotan. Untuk itu, politik masih diperlukan.●

Bola Liar Interpelasi

KOMPAS, 11 APRIL 2007

KEPUTUSAN pemerintah menyetujui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 guna memberi sanksi tambahan bagi Iran yang tetap mengerjakan proyek pengayaan uraniumnya telah menggulirkan usulan penggunaan hak interpelasi sejumlah anggota DPR. Jumlah pengusul tercatat sudah lebih separuh anggota DPR, 278 dari 550. Haruskah usulan interpelasi kandas? Pertanyaan itu terkesan sinis, tetapi berdasar, setidaknya jika dibandingkan berbagai pengalaman sebelumnya. Sinis karena niat interpelasi lebih merupakan bagian dari permainan (drama) politik saja.

MUDAH DIPATAHKAN

PARA penandatangan semula bersikap keras dan berapi-api, mungkin karena tahu, *toh* di tengah jalan akan kandas. Karena itu, dengan ikut memberi tanda tangan usulan interpelasi, setidaknya mereka telah memperoleh semacam kredit poin. Karena itu, membengkaknya jumlah penanda tangan bukanlah ukuran usulan interpelasi bakal berlanjut. Secara personal, kelak, para penanda tangan akan

tidak dapat berkata apa-apa lagi apabila partai politik tempatnya bernaung memerintahkan agar usulan itu dibatalkan.

Di luar itu, posisi politik pemerintah masih kuat, setidaknya partai-partai pendukung tak menunjukkan sikapnya yang mengancam untuk menarik diri secara serius. Dalam kondisi seperti itu, niat interpelasi akan "dengan mudah" dapat dipatahkan. Perwujudan demokrasi *checks and balances* selama ini belum tergambar jelas karena masih "berat sebelah" saat magnet politik yang berkuasa jauh lebih kuat ketimbang oposisi.

Seharusnya pemerintah tidak usah alergi dengan interpelasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla setidaknya menyiratkan hal itu. Ia menjelaskan tiga opsi yang harus disiapkan. *Pertama*, pemerintah akan menjelaskan sikapnya di Komisi I DPR. *Kedua*, memberikan penjelasan tertulis ke DPR. *Ketiga,* jika interpelasi disetujui, Presiden akan memberikan penjelasan (*Kompas*, 1/4/2007).

Interpelasi tak berarti kiamat bagi pemerintah. Bayang-bayang peristiwa Gus Dur yang jatuh dari kursi kepresidenan didahului interpelasi, tentu tak relevan mengingat konteksnya berbeda. Saat itu Gus Dur *common enemy* partai-partai. Sementara Presiden SBY masih kuat kekuasannya. Ia mungkin menyebalkan, tapi tak mungkin dijatuhkan mendadak. Pemerintah telah berupaya keras menaklukkan partai-partai, agar persoalan tak berlanjut ke ritual interpelasi. Logis kiranya jika pemerintah menghendaki agar partai-partai yang menolak sikap pemerintah, melunak.

PPP sudah menarik diri dari usulan interpelasi. Alasannya bisa memahami penjelasan Menteri Luar Negeri. Cepat atau lambat, partai-partai lain diperkirakan akan melakukan sikap yang sama. Pertarungan opini juga makin marak di media. Satu sisi menyalahkan inkonsistensi pemerintah, sisi lain membela seraya mengingatkan agar energi bangsa tak habis hanya untuk mengurusi Iran. Apakah para penandatangan sekadar memberi gertak sambal? Bisa jadi demikian. Semuanya akhirnya akan ditentukan elite-elite strategis partai bersangkutan.

KERIKIL DALAM SEPATU

BERLANJUT-tidaknya interpelasi, dengan demikian, tergantung momentum. Apakah momentumnya menguat atau melemah, tergantung dari faktor internal dan eksternal yang berkembang. *Pertama*, soliditas dan dinamika internal partai bersangkutan, lebih kental mana pemihakan elite di dalamnya: ke pemerintah atau ke popularitas partai? *Kedua*, terkait perkembangan politik sehari-hari (*day to day*). Ikatan partai-partai ke pemerintahan SBY, bagi beberapa partai pendukung, bukan "harga mati".

Sikap dan pemihakan masih bisa berubah seiring angin politik. Bagi partai-partai tertentu, usulan interpelasi diyakini sebagai tindakan populer untuk mendapat simpati publik luas. Mereka akan kena imbas kesan inkonsisten jika di tengah jalan membatalkan sikapnya. Maka, partai-partai akan sibuk mencari alasan yang tepat jika sikapnya melunak, kecuali jika terjadi turbulensi politik yang menyebabkan partai-partai pendukung pemerintah berlomba menarik diri. Ia akan menjadi "bola liar" jika pemerintah menganggapnya remeh, gagal menjelaskan sikapnya, dan gagal mengubah sikap kekuatan politik pro-interpelasi.

Meski demikian, keputusan pemerintah akan menjadi "kerikil dalam sepatu" yang terus mengganjal. Kepemimpinan SBY akan terkesankan inkonsisten dan tidak populer pada kelompok Islam politik. Bisa jadi hubungan psikologis antara SBY dan kalangan ormas Islam bisa memburuk, tetapi tidak akan memengaruhi sikap kalangan Islam politik yang propemerintah.

Seperti buah simalakama, di satu sisi SBY harus mengambil sikap yang kerap tidak populer dan segera menuai badai resistensi. Di sisi lain, ritme popularitas harus terjaga agar tidak anjlok. Bagi pemerintah (SBY), mempertahankan keseimbangan politik partai-partai amat penting. Soal substansi dan ketidakpopuleran mungkin hanya bersifat "amat temporer". Kelak, publik yang "daya ingatnya pendek" akan melupakannya.

Namun, lagi-lagi resistensi-resistensi semacam itu tak boleh

diremehkan. Satu dua bisa cepat dilupakan, tetapi akumulasinya mampu memicu anjloknya popularitas, naiknya antipati. Kini, beberapa jajak pendapat mencatat temuan kecenderungan penurunan popularitas pemerintah. Bagi presiden yang hadir oleh kuatnya pencitraan, "kerikil dalam sepatu" tentu meresahkan. Meski diyakini, ia tidak akan menjadi "bola liar". ●

Sensasi Perombakan

KOMPAS, 10 MEI 2007

SETELAH DITUNGGU harap-harap cemas, Presiden SBY melakukan *reshuffle* kabinet jilid dua. Siapa dan di mana posisinya dalam kabinet baru, ternyata tak jauh berbeda dengan yang diperkirakan media massa. Tak seperti perombakan kabinet pertama, *reshuffle* kali ini tak menyentuh Tim Ekonomi, lebih ke Tim Hukum.

Maka, *reshuffle* kali ini belum menyentuh harapan publik yang menginginkan perombakan total. *Reshuffle* masih merupakan semacam ritual politik sensasional, jangka pendek, dan tidak tuntas, karenanya belum yang terakhir. Pertimbangan akomodasi politik masih menonjol, walaupun Presiden mengaku tidak ditekan siapapun. Presiden ekstra hati-hati, tidak ingin ada turbulensi politik, walaupun partai-partai kelihatan belum puas benar.

Empat menteri yang disorot publik, Yusril Ihza Mahendra (Mensesneg), Hamid Awaluddin (Menkum dan HAM), Sugiharto (Menneg BUMN), Syaifullah Yusuf (Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal), tak lagi ikut dalam kabinet. Posisi mereka digantikan oleh Hatta Radjasa, Andi Matalatta, Sofyan Djalil, dan M Lukman Edi. Sedang Djusman Syafei Djamal dan Muhammmad Nuh, menjabat sebagai Menterian Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh digantikan oleh Hendarman Supandji.

Mengapa ada *reshuffle*? Tentu karena kinerja kabinet dinilai tidak efektif. *Reshuffle* dipercaya sebagai solusi. Tetapi mengapa *reshuffle* perlu dilakukan berkali-kali? Siapa yang "salah"? Tampaknya, Presiden SBY berupaya keras melawan kesan dan analisis negatif yang muncul di berbagai media, bahwa dirinya lah yang paling bertanggungjawab atas tidak efektifnya pemerintah. Padahal, presiden *can't do no wrong*. Kalau pemerintah tidak efektif, maka tetap saja yang "salah" bukan presidennya, tetapi personalia-personalia kabinet yang lembek kinerjanya.

Tetapi, kualitas "kelambanan" itu diperparah dengan kinerja menteri yang negatif. Pihak pro-SBY mencoba memahamkan bahwa bagaimanapun "bosnya" tidak salah. Adapun kemudian "kejadiannya lain", hal itu semata-mata terkait dengan "kebutuhan politik waktu itu". Tatkala perkembangan politik telah "berubah drastis", ketika "kalangan oposisi" telah ditundukkan, maka "kebutuhan politik"-nya ikut berubah. Sehingga muncul permakluman bahwa *reshuffle* demi *reshuffle*, bukan kesalahan SBY.

Tatkala pertama kali SBY memilih menteri-menterinya, maka idealnya tak akan ada reshuffle lagi. Mestinya SBY tak salah pilih, sebab akan fatal di kemudian hari. Bila pilihannya tidak tepat, jalannya pemerintah bisa "goncang". Lain halnya kalau memang hal demikian disengaja untuk memunculkan kesan hero bagi sang presiden. Lewat ritual-ritual politik *reshuffle*.

Tetapi, Presiden tampak amat terpaku pada pertimbangan *day-to-day politics*, dan karenanya harus pandai berakrobat politik, dengan cara menciptakan sensasi-sensasi politik guna mendongkrak dan mempertahankan citranya. Dalam konteks tertentu, kasusnya hampir mirip dengan gaya Presiden Abdurrahman Wahid pada masanya. Hanya, kalau Abdurrahman Wahid terkesan cepat memutuskan dan "tanpa kompromi", SBY sebaliknya. Dalam hal ini, publik dihadapkan pada tipologi kepemimpinan yang berbeda.

Reshuffle kali ini tetap pertaruhan politik pemerintah. Apakah ia akan mampu melipatgandakan efektifitas pemerintahan? Tergan-

tung kinerja para personalianya. Tapi jangan lupa, kunci utamanya terpulang ke *leadership* SBY sendiri. Apakah *leadership* SBY lebih menonjol ketimbang sensasi politik yang diciptakannya?

Reshuffle kabinet memang tak lepas dari sensasi politik SBY. Sensasi bagian dari trik memoles citra politik, seolah ada kejutan luar biasa yang "dalam sekejap mampu membalik keadaan", seperti sulap yang membuat penontonnya terkagum-kagum. Kelemahan-kelemahan ditutup rapat oleh "janji-janji dalam bentuk lain", yang sesungguhnya "artifisial" dan "akrobatik". Sensasi cenderung sekadar menyiasati, bukan memanfaatkan momentum secara optimal, sehingga masih menyisakan situasi serba dilematis.●

Bila Partai Tanpa Politisi

KOMPAS, 12 JUNI 2007

MAJOR POLITICAL PARTIES HAVE A ROLE, BUT THEY ARE INCAPABLE OF INITIATING FUNDAMENTAL CHANGE BECAUSE THEY ARE FUNDAMENTALLY TIED TO THE STATUS QUO. THEY ARE THE STATUS QUO

- MARIANNE WILLIAMSON

DALAM SEMINAR di Universitas Indonesia, Daniel Dhakidae mensinyalir, intelektual kita dibentuk oleh kondisi masyarakat yang menyedihkan. Lingkungan perguruan tinggi semakin jauh meninggalkan universitas yang bercita-cita jadi pusat semua keunggulan. Media elektronik hanya melahirkan kaum pendengar dan penonton. Persepsi tentang partai, bisnis politik besar. Dan parlemen mempraktikkan parlementarisme yang ditandai direndahkannya politik, sebagai sekedar alat mengangkat personel pemerintahan dan kekuatan yang mengaturnya, modal. Itulah *capitalo-parliamentarism* (*Kompas*, 13 Juni 2007).

Konteks pendapat Dakhidae terkait otokritik gagalnya intelektual sebagai kelompok pembaru di tengah "kerakusan politik" yang

mengemuka sebagai ekses praktek *capitalo-parliamentarism*. Tentu, pemetaan tersebut membuat kita segera nelangsa. Bayangkan kalau kebudayaan dan politik kita kehilangan habitatnya, ketika kampus-kampus dibikin megah, tapi gagal menciptakan akademisi-intelektual. Ketika media meninabobokan kekritisan, tatkala parpol tanpa politisi, ketika parlemen berlogika kapital. Runyam bukan? Tetapi begitulah, demokrasi politik kita yang "liberal" dewasa ini memang menyediakan ruang untuk itu.

APA ALASAN kita mencemaskan partai tanpa politisi? *Pertama*, partai kehilangan "aktor yang sesungguhnya", politisi-substansial, pemain intinya. Politisi itu sebutan orang yang bergerak di bidang politik, terkhusus aktivis partai politik. Tapi ia bukanlah profesi tersendiri, karena terkait "panggilan mengabdi", bukan panggilan "memperkaya diri".

Politisi boleh berasal dari berbagai latar belakang, apakah mantan aktivis mahasiswa, tokoh informal dalam masyarakat, mantan tentara, dokter ataukah pengusaha. Menjadi politisi ialah menjadi orang yang memiliki keyakinan politik dan mempejuangkannya. Tujuan mulianya terkait dengan bagaimana menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. Menjadi politisi, sejatinya tak kalah mulianya dibanding begawan. Tak selamanya "politik itu kejam".

Kedua, dominannya aktor-aktor figuran alias politisi-artifisial, yang memandang partai adalah suatu "bisnis politik besar" yang tidak saja bersifat protektif atas aktivitas-aktivitas bisnis para pengurusnya, tetapi juga bak "kapal keruk kapital" yang efektif. Tatkala logika untung-rugi *a la* bisnis ekonomi telah merambah ke wilayah politik, maka partai menjadi identik dengan perusahaan yang berorientasi profit. Negosiasi politik direduksi secara substansial bahwa yang ada "membeli" atau "dibeli".

Ketiga, partai dimanfaatkan sekedar sebagai tempat numpang lewat, dan menjadi sarang kaum oportunis. Ketika magnit politik partai adalah pragmatisme, tidak ada idealisme sama sekali, maka seberapa kuat daya integrasinya? Ketika pembangunan kelemba-

gaan partai ditopang oleh para aktor yang tidak otentik, lalu, di mana lagi letak kemenarikannya?

PARTAI tanpa politisi, bak kolam ikan tanpa ikan. Ikan terdesak oleh kecebong, kodok, belut dan ular, yang ramai-ramai hendak *bancakan* kekuasaan. Ketika politisi terdesak dari habitatnya, keseimbangan ekosistem politik makro tentu terganggu. Kualitas politik akan minus, karena sering dilangkahinya fatsun politik. Betapa tak eloknya proses politik yang monoton transaksional. Para politisi idealnya pemimpin transformasional, punya visi dan mampu mendedahkannya ke program nyata yang mencerdaskan publik. Alangkah konyolnya bila para politisi justru bangga menenggelamkan diri pada segala praktik transaksional, dimana uang diposisikan sebagai alat sogok yang sah.●

Plus Minus Calon Perseorangan

KOMPAS, 6 AGUSTUS 2007

SETELAH MK memberikan lampu hijau calon perseorangan dalam pilkada, bagaimana kelanjutannya? Pemerintah dan DPR berpendapat sama, bahwa UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah harus direvisi. Sebelum ada revisi, tak ada calon perseorangan dalam pilkada (*Kompas*, 3/8/2000).

Dari sudut waktu, terobosan MK memang dilematis. Tidak dikeluarkannya Perppu oleh Pemerintah, menunjukkan kesan bahwa keputusan MK tidak langsung direspons sertamerta. Prosesnya membutuhkan waktu. Padahal, sebagian kalangan masyarakat sudah tidak sabar lagi agar aturan pelaksanaanya harus segera dibuat. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta misalnya, kalangan pro-calon perseorangan meminta pilkada ditunda.

REVOLUSI DEMOKRASI ELEKTORAL

TERLEPAS dari respons dan dinamika politik tersebut, keputusan MK merupakan awal dari sebuah "revolusi" demokrasi prosedural di Indonesia. Ia selain memberi kesempatan bagi tokoh potensial nonpartai tampil dalam pilkada, juga menjadi preseden bagi diperbolehkannya capres perseorangan. Kalau demikian, atas nama jaminan hak-hak politik warga negara dan kebebasan politik, kita masuk ke fase demokrasi liberal murni.

Dari sisi masyarakat, hadirnya calon perseorangan semakin menambah alternatif. Proses kehadiran elite-elite pemimpin politik pun datang dari banyak pintu. Mungkinkah dibukanya pemimpin-pemimpin bermutu akan hadir? Bisa ya, bisa tidak. Calon-calon bermutu bisa saja terhambat oleh banyak kendala. Calon-calon tak bermutu bisa saja mendominasi, karena banyak "gizi" alias uang dan "popularitas". Memang, dalam kontes demokrasi langsung, "uang" memang amat menentukan, tetapi bukan segalanya. Publik bisa terkecoh oleh pencitraan. Pemimpin yang hadir sekedar berbasis citra, tentu keropos sejatinya. Harapannya, semakin banyak pengalaman, keterkecohan publik tidak akan terulang lagi, kecuali apabila tipologi pemilih masokis mendominasi. Mestinya publik akan makin belajar dewasa memilih pemimpin. Karenanya, dalam perspektif ini, calon perseorangan bisa bermanfaat.

Hanya yang perlu hati-hati adalah, potensi konfliknya. Semakin terbuka peluang pencalonan politik, makin terbuka pula potensi konflik berikut variasinya. Manajemen konflik calon perseorangan (*ad hoc*), mungkin lebih susah ketimbang manajemen konflik partai sebagai lembaga politik. Itulah salah satu kelebihan partai. Tetapi kelemahannya adalah jebakan birokrasi lembaga, yang kemudian diterobos oleh calon perseorangan. Jadi, calon perseorangan hadir untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan partai.

NASIB PARTAI-PARTAI

PARTAI-partai pun tidak akan lagi menjadi kendaraan politik yang super-eksklusif. Karenanya, konstelasi politik pun langsung ber-

ubah tajam mengingat partai bukan satu-satunya jalan ke kekuasaan. Deekslusifikasi partai berkonsekuensi pada harus makin lincahnya ia mengeksiskan diri. Jangka panjang calon perseorangan cenderung mendorong penyedikitan jumlah partai.

Hanya yang kelembagaannya kuatlah yang bertahan. Partai akan amat "kerepotan", tetapi kehadiran calon perseorangan justru mengkondisikan penguatan kelembagaan. Partai akan terpicu ekstra keras menjalankan mesinnya. Partai akan mengoptimalisasikan fungsi-fungsinya, pun makin pandai menyeleksi kader-kadernya. Bisa jadi, publik pun akan lebih percaya calon partai ketimbang independen. Pengalaman Amerika Serikat contoh yang baik. Kuatnya kelembagaan Partai Republik dan Demokrat nyaris tak memberikan peluang kemenangan calon perseorangan.

Jalur pemasok utama kader dan sirkulasi elite politik tetap melibatkan partai yang memang didesain untuk itu. Partai menciptakan sistem perkaderan politik semapan mungkin. "Sejelek-jelek" partai, ia lembaga politik yang sengaja diniatkan untuk kepentingan kekuasaan. Kalau lembaga partai kuat, kehadiran calon perseorangan anomali, keanehan.

Kalau partai mampu mengurus dirinya sehingga kuat kelembagaannya dan mendominasi *mindset* masyarakat, tak ada alasan untuk sinis oleh kehadiran calon nonpartai. Partai-partai seperti itu akan amat mudah "menggilas" para calon perseorangan. Karenanya, proses politik pun tetap bertumpu pada partai-partai, calon perseorangan hanya interupsi saja. ●

Pemimpin

KOMPAS, 1 NOVEMBER 2007

ALL OF THE REALLY STRONG LEADERS I HAVE KNOWN HAVE BEEN HIGHLY INTELLIGENT, HIGHLY DISCIPLINED, HARD WORKERS, SUPREMELY SELF-CONFIDENT, DRIVEN BY A DREAM, DRIVING OTHERS. ALL HAVE LOOKED BEYOND THE HORIZON. SOME HAVE SEEN MORE CLEARLY THAN OTHERS.

- RICHARD NIXON, LEADERS, 1982

MENJELANG PEMILU 2009, masyarakat dihadapkan berbagai atraksi politik elite. Meski mereka punya dalih atas kegiatan politiknya, satu sama lain sedang menciptakan manuver dan pengaruh. Boleh saja dikatakan, itu biasa, tetapi dimensi kepatutannya dapat dipertanyakan. Politisi kadang tidak mempersoalkan konteks kepatutan, meski berlomba mematut diri saat semakin disadari rumus baku demokrasi elektoral yang utama, pencitraan.

TERASA DINAMIS

PERLOMBAAN MERAUP citra bagus menjadi terasa hari-hari ini. Semua sedang menuju 2009. Karena politik, antara lain, seni kemungkinan, berbagai penjajakan politik perlu dilakukan. Akibatnya, terjadi silaturahmi antarelite politik meski dalam konteks tertentu terkesan *ubyang-ubyung*, asal jalan.Silaturahmi merupakan tradisi politik yang bagus. Tidak selamanya potret politik harus mirip film kartun Tom dan Jerry yang terus berkelahi. Dalam tradisi bangsa Timur, silaturahmi baik-baik saja meski politik punya logikanya sendiri. Memang, praktiknya kerap susah memadukan faktor budaya Timur dengan "budaya demokrasi". Dalam budaya Timur, calon pemimpin menunggu didesak dicalonkan, lalu secara teatrikal

mengatakan dengan berat hati menerimanya sebagai amanah dan panggilan. Baru kemudian cari dukungan. Budaya demokrasi menerobos hal itu, meneriakkan ambisi menjadi calon, tidak dianggap tabu.

Menjelang 2009, kondisi politik kita terasa dinamis. Berbagai perubahan politik akan terjadi, sesuai *sunatullah* politik. Bidak-bidak papan catur politik telah terhampar, masing-masing punya derajat kekuatan dalam permainan yang harus saling mengalahkan, meski bisa jadi remis. Hukum sebab-akibat pun terjadi, meski mungkin akan muncul anomali-anomali. Semua kelak dapat dijelaskan, sebagaimana fenomena politik pasca-1999 dan 2004.

POLITIK INDONESIA

NAMUN, POLITIK Indonesia agak rumit. Politik multipartai lebih ingar bingar di pusat dan daerah. Aneka formasi politik baru hadir. Setiap kehadiran memunculkan lawan yang siap bersaing di kompetisi politik berikut, dan semakin hari semakin dianggap biasa. Namun, investor kadang dibuat bingung dengan fenomena demikian. Mereka bertanya, sambil berupaya memastikan keamanan investasinya, apakah hiruk-pikuk politik akan identik dengan berbagai perubahan kebijakan yang kian membuat ketidakpastian berusaha? Pertanyaan itu wajar karena kepemimpinan politik akan berpengaruh kepada berbagai sektor, apalagi ekonomi.

Apakah diskontinuitas politik identik diskontinuitas kebijakan ekonomi? Sejauh ini politik Indonesia memang ramai. Namun, setiap pemimpin politik yang hadir pasti berkepentingan menjaga kontinuitas kebijakan ekonomi, terutama dalam konteks keamanan dan kenyamanan berinvestasi. Kecuali, jika pemimpin politik yang hadir berkarakter dan berparadigma revolusioner.

Kepemimpinan yang revolusioner dalam derajat tertentu diperlukan untuk melepaskan diri dari jerat kepungan neoliberalisme dan mengondisikan kemandirian bangsa. Tetapi, tetap tidak boleh menakutkan investor. Perlu didiskusikan lebih jauh, apakah telah mendesak kepemimpinan nasional kita bergaya Ahmadinejad, Evo

Morales, atau yang lain?

Setiap pemimpin punya gayanya sendiri. Seperti diingatkan Richard Nixon: pemimpin bukan sekadar manajer. Ia bukan sekadar teknik. Pemimpin itu puisi, manajer itu prosa. Pemimpin bekerja tidak mengikuti fluktuasi jajak pendapat. Meski dalam konteks demokrasi elektoral, mengukur diri itu penting. Popularitas dapat dikuantifikasi. Meski pemimpin tidak harus menjadi penguasa, dan pemimpin yang besar, pengaruhnya besar meski di luar struktur kekuasaan karena mereka bukan pemimpin instan.●

Bila Golkar Minus Konvensi

KOMPAS, 23 NOVEMBER 2007

PADA 22-25 November, Partai Golkar menggelar rapimnas di Jakarta. Ia momentum penting menghadapi Pemilu 2009. Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla berpendapat, untuk mendapatkan capres, Partai Golkar tak akan menerapkan aturan konvensi seperti menjelang Pilpres 2004, tetapi kembali pada prosedur AD/ART yang menetapkan pemilihan capres melalui rapimnas paling cepat enam bulan sebelum pilpres, Oktober 2009.

JK yang juga wapres mengatakan beberapa kritik penyelenggaraan konvensi menjelang Pilpres 2004. Apabila diringkas, *pertama*, sistem konvensi prosesnya baik, tapi, yang masuk dan ikut konvensi bermacam-macam (bintang film, pelawak, dan lainnya) sehingga "sama sekali tidak menggambarkan suatu kebesaran partai". *Kedua*, "hasilnya juga tidak berhasil" karena yang terpilih "bukan tokoh Golkar yang betul" (*Kompas*, 15/9/2007).

Walaupun menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono pencalonan presiden merupakan ungkapan dari pribadi-pribadi di Partai Golkar (*Kompas*, 15/9/2007), tetapi pernyataan JK merupakan sinyal besar, Partai Golkar kali ini memang minus kon-

vensi. Apakah ini sebentuk kemajuan atau kemunduran?

TIDAK BERMANFAAT?

APA yang dikemukakan JK tentu merupakan pandangan subyektifnya, tidak didasari kajian mendalam dan komprehensif. Seolah konvensi tidak ada manfaatnya sama sekali bagi partai pemenang pemilu 2004 itu. Memang konvensi tak lepas dari latar belakang dinamika politik internal Golkar kala itu, serta pesertanya pun beraneka rupa dari paranormal Nasrullah Marzuki, Wiranto yang purnawirawan jenderal, hingga nyaris saja cendekiawan Nurcholish Madjid. Itu memang konsekuensi mekanisme konvensi yang merujuk pada Golkar sebagai partai *cacth all* dan pluralis.

Inovasi Partai Golkar kala itu diberitakan terus-menerus oleh media massa, dan respons positif (tidak sinis) dari masyarakat pun muncul. Cobalah cek kembali hasil jajak pendapat *Cetro* waktu itu, dari 946 responden yang tersebar di lima kota besar menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden (58 persen) tidak setuju jika konvensi dianggap akal-akalan (*Kompas*, 9 September 2003). Terlepas banyak kritik, masyarakat melihat sesuatu yang menarik. Penilaian "akal-akalan" pun juga tak terbukti, mengingat yang menang bukan Akbar Tandjung, tetapi Wiranto.

Apabila Wiranto yang kemudian berpasangan dengan Salahuddin Wahid, gagal dalam Pilpres 2004, itu merupakan masalah lain. Penyebab kegagalannya banyak faktor dan tidak serta-merta dapat dialamatkan pada konvensi. Ingat pula bahwa faktanya Partai Golkar menang dalam pemilu legislatif 2004. Pelaksanaan konvensi sendiri dilakukan jauh sebelum pemilu legislatif dan di-umumkan sebelum menjelang pemilu tersebut. Capres Golkar pun ikut berkampanye saat itu.

Penolakan konvensi JK terkesan lebih menekankan hasil akhir ketimbang menghargai proses. Begitulah salah satu *style* utamanya sebagai seorang pemimpin yang kebetulan berlatar belakang saudagar. Apabila Golkar sekadar bersandar asumsi, kalau pemerintah sukses, tentu Golkar kena limpahan dukungan suara, bisa jadi

keliru. Simpati atas keberhasilan pemerintah mungkin akan lebih banyak ditujukan ke partainya Presiden SBY.

JUSUF KALLA CAPRES?

WALAUPUN masih banyak celah untuk dikritisi, Partai Golkar sudah mendapatkan citra positif atas inisiatifnya menyelenggarakan konvensi menjelang Pilpres 2004. Apabila "mendadak" Partai Golkar meninggalkan konvensi, tanpa menyediakan alternatif inovasi politik yang lebih menarik, masyarakat akan bertanya-tanya. Mungkin pula ada yang meragukan komitmen pembaruan Partai Golkar. Kalau dulu orang menilai konvensi *ijtihad* politik yang menempatkan Golkar selangkah lebih maju ketimbang partai-partai lain, ketiadaan konvensi menjadikan Golkar "selangkah lebih mundur".

Pilihan JK meniadakan konvensi cukup berisiko. Golkar bisa dianggap tak konsisten dengan citranya sebagai partai modern. Bisa saja kemudian citra Golkar tidak lebih baik dari yang diprediksikan beberapa lembaga jajak pendapat belakangan. Golkar berada dalam lingkaran dilema. Belum tentu keberhasilan pemerintah berimbas positif pada Golkar, justru karena *chemistry* politik JK dan SBY terkesan tak solid. Apalagi kalau terbukti bahwa pada Pilpres 2009 JK sudah tak lagi berpasangan dengan SBY.

Di sisi lain, tampaknya Golkar juga masih bimbang dengan pilihan-pilihan politik ke depannya. Apakah kira-kira semua faksi di tubuh Golkar telah mengikhlaskan JK sebagai capres Golkar kelak? Tentu saja prosesnya belum final, dan tentu dinamika politik internal Golkar akan terjadi. Bukankah Golkar adalah partai politik yang statis saja? Golkar harus pandai keluar dari dilemanya.

Kalau yang dijadikan ukuran hasil akhir, kita lihat saja nanti hasil pemilu, apakah lebih baik ketimbang 1999 dan 2004? Yang jelas, nasib dan sejarah masa depan Golkar berada di tangan para politisi "delapan penjuru angin" sekaliber Surya Paloh, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, dan yang lain, yang berkoalisi memenangkan JK dalam Munas VI di Bali, akhir 2004 lalu.●

X

PEMIMPIN PILIHAN IKLAN

[2008]

NURCHOLISH MADJID KERAP MENGATAKAN, KITA HARUS MENGAMBIL DAN MEMPERTAHANKAN APA-APA YANG SUDAH BAIK DAN MENINGGALKAN APA-APA YANG TIDAK BAIK DI MASA LALU. TAK SEMUA PENINGGALAN BUNG KARNO DAN PAK HARTO PLUS PARA MANTAN PRESI-DEN BERIKUTNYA, JELEK. PASTI ADA SISI-SISI BAIK YANG PERLU DILANJUTKAN. PERLU *MIKUL DHUWUR MENDHEM JERO* ATAS SISTEM YANG TERSELEKSI. KONTINUITAS PENTING. TANPANYA, KITA AKAN SELALU MEMULAINYA LAGI DARI NOL.

- MENGGALI SISTEM BAIK MASA LALU

Menggali Sistem Baik Masa Lalu

KOMPAS, 11 JANUARI 2008

KETIKA MANTAN Presiden Soeharto masuk rumah sakit merebak wacana, apakah ia dimaafkan atau tidak. Secara kemanusiaan Pak Harto perlu dimaafkan, tetapi proses hukum harus tetap jalan, agar kasusnya tak menggantung. Maka, dibutuhkan kebesaran jiwa. Obyektif, Orde Baru tak jelek semua. Ada hal-hal baik yang perlu diterapkan di era reformasi.

Setelah sekian tahun reformasi, tak semua berjalan baik. Baik atau jelek, tiap-tiap individu punya standar. Tetapi, secara umum orang sepakat selain demokratis, kita harus sejahtera. *Tajuk Rencana Kompas* (7/1/ 2008) mencatat, "Seperti halnya Presiden Soekarno, selain kekurangan dan kesalahan, Pak Harto juga meninggalkan kinerja yang positif. Indonesia mengalami periode perbaikan perikehidupan sosial ekonomi serta menempati posisi yang dipandang oleh negara-negara ASEAN dan negara lain. Sayang, prestasi swasembada pangan tak berhasil kita pertahankan".

Nurcholish Madjid kerap mengatakan, kita harus mengambil dan mempertahankan apa-apa yang sudah baik dan meninggalkan yang tidak baik di masa lalu. Tak semua peninggalan Bung Karno dan Pak Harto plus para presiden berikutnya, jelek. Pasti ada sisi-sisi baik yang perlu dilanjutkan. Perlu *mikul dhuwur mendhem jero* atas sistem yang terseleksi. Kontinuitas penting. Tanpanya, kita akan selalu memulainya lagi dari nol.

OBYEKTIF

KITA HARUS obyektif belajar pada keberhasilan dan kegagalan.

Kebijakan pangan dan pertanian nasional, misalnya. Mengapa Indonesia pernah berhasil semasa Orde Baru? Adakah sistem atau subsistem yang layak diterapkan ulang? Tentang kebijakan politik luar negeri dalam konteks negara-negara ASEAN. Mengapa dulu Indonesia amat berpengaruh? Apakah yang perlu diambil hikmahnya dari pengalaman politik luar negeri kita di masa lalu? Tentang kebijakan kependudukan, bagaimana kondisinya kini? Apakah pola-pola kebijakan Orde Baru masih ada yang dapat diterapkan?

Demikian pula dengan efektivitas koperasi unit desa (KUD), mengapa perannya kini surut? Bagaimana pula komunikasi pemerintah dan rakyat, bahkan sampai di desa-desa untuk membahas soal pembangunan, bukan semata-mata politik?

HARMONI

MEMANG, KONDISINYA sudah amat berbeda. Di masa lalu negara berperan "sentral" dan "demokrasi terkendali" melalui rekayasa politik penyederhanaan partai. Akselerasi pembangunan nasional Orde Baru dilakukan dengan menciptakan stabilitas politik yang meminggirkan kebebasan politik. Namun, bukannya "politik" tidak ada. Demokrasi ala Orde Baru banyak kekurangan, bahkan disebut sebagai "demokrasi seolah-olah". Tetapi, mengapa pada pasca-Orde Baru hakikat "permusyawaratan perwakilan" atau "demokrasi perwakilan" sila ke-4 Pancasila terpangkas? Mengapa pula model demokrasi kita dewasa ini cenderung pada praktik murni demokrasi liberal?

Meski dalam konteks masyarakat madani, negara Orde Baru amat kuat, harmoni dalam masyarakat ditekankan. Represivitas, kalaupun dilakukan, dimaksudkan untuk menciptakan harmoni dan stabilitas. Di era demokrasi, represivitas tak diperlukan lagi mengingat diasumsikan, masyarakat sudah "dewasa politik". Tetapi tanpa "represivitas", tepatnya ketegasan, bagaimana negara efektif menyelesaikan konflik sosial yang mudah bergejolak?●

Reposisi Politik PKS

KOMPAS, 11 FEBRUARI 2008

MUSYAWARAH Kerja Nasional PKS di Denpasar, Bali, menghasilkan rekomendasi seputar membangkitkan semangat kebangsaan di tengah keterpurukan bangsa. Keterpurukan di sektor ekonomi dan budaya terasa kian mengikis nasionalisme dan semangat kebangkitan bangsa (*Kompas*, 4/2/2008). Sebagai partai berideologi Islam, tampaknya PKS tidak mau dicap eksklusif. Karena itu, Mukernas PKS tak sekadar mengakomodasi, tetapi juga mempromosikan isu-isu pluralitas dan "semangat kebangsaan".

Menurut aktivis PKS, Fahri Hamzah, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin mengatakan siapa yang tidak mengakui keberagaman akan hancur. PKS hendak mengesankan partainya tidak antipluralitas. Dengan mengusung isu tersebut, PKS menargetkan dukungan suara 20 persen pada Pemilu 2009. Meski target itu – dengan melihat pengalaman dan perkembangannya di lapangan – masuk kategori "optimis", PKS harus tetap hati-hati. Salah satu problem, kalau bukan justru dilema partai politik "berlabel Islam" adalah kesalahan dalam *positioning*.

Guna meraih tambahan suara, mereka perlu *ijtihad* dengan tema-tema pluralitas. Tetapi, risikonya bisa gagal meraih segmen "pemilih sekuler", padahal segmen pemilih Islam simbolik yang setia, telanjur enggan. Apakah PKS telah memikirkan konsekuensi itu? Hal penting lain, merebaknya gagasan koalisi politik PKS dan PDIP. Wacananya masih embrional, tapi mungkin Mukernas Bali sinyal awal perwujudannya. Tentu semua masih berproses sesuai perkembangan dan kalkulasi politik. Bagi PKS, agaknya tak ada soal berkoalisi dengan kekuatan politik manapun. Dalam berpolitik, per-

timbangannya lebih banyak pragmatis ketimbang ideologis.

Mukernas Bali juga merupakan sinyal, pertimbangan ideologis bisa dibelakangkan. Dengan manuver politik demikian, lagi-lagi, apakah PKS akan diikuti konstituen setianya? Tampaknya, kalaupun ada yang keluar, persentasenya tak signifikan. Alasannya, belum ada partai yang dianggap identik dengan tampilan PKS pra-Mukernas Bali. Maka, mereka yang patah arang akan cenderung memilih golput. Apakah ada aliran signifikan ke partai Islam lain di luar PKS? Tampaknya juga tidak. PKS telanjur membesar, terstruktur, infrastrukturnya kuat. Dari segi citra, meski ada sinisme, belum tampak ada penurunan drastis.

WAJAH LAIN

TETAPI, lagi-lagi tantangannya tidak ringan. Kompetisi politik makin tajam. Saat PKS "melonggarkan bajunya" tidak akan semudah PKB, misalnya. Di PKB ada faktor daya tarik Gus Dur sebagai "bapak pluralisme". Kalangan nonsantri NU, tepatnya non-Muslim, dalam banyak hal merasa nyaman bersama Gus Dur.

Upaya PKS menggelindingkan isu pluralitas tampaknya dilakukan dengan mempelajari banyak hal, termasuk belajar pada *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP), partai yang sedang berkuasa di Turki. Partai itu digerakkan aktivis Islam dalam menyiasati kungkungan ideologi negara sekuler. AKP tak menentang sekulerisme secara terbuka, tetapi mencoba tampil amat Islami. AKP sukses, antara lain karena dinilai dapat bekerja dan berprestasi. Citra Islam yang modern, maju, dan "terbuka" amat penting untuk menepis anggapan, Islam "biang keladi" banyak persoalan.

Dengan tidak risi suarakan isu pluralitas, PKS kian mengesankan dirinya kekuatan politik Islam "substansial" ketimbang "simbolik". Kelak, pemilihlah yang menentukan, apakah PKS dinaikkan derajatnya sebagai partai besar atau tetap sedang-sedang saja.●

Gonjang-ganjing Politik PKB

KOMPAS, 31 MARET 2008

GONJANG-ganjing politik melanda PKB saat mayoritas peserta Rapat Pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB meminta ketua umum Muhaimin Iskandar mengundurkan dari. Keputusan itu diambil secara *voting* tertutup (*Kompas*, 28/3/2008). Apakah nasib politik Muhaimin akan seper-ti pendahulunya, Matori Abdul Djalil dan Alwi Shihab, yang terpental dari PKB? Salah satu jawabannya terletak pada bagaimana sikap politik KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Dewan Syuro partai itu.

Partai ini unik dalam memosisikan Gus Dur, sehingga sering mengingatkan posisi Pak Harto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar di masa Orde Baru yang "berkuasa penuh". Gus Dur menegaskan, proses penyelesaian konflik di tubuh DPP PKB dengan meminta mundur Muhaimin sudah melalui prosedur yang benar dan tidak melanggar AD/ART partai (*Kompas*, 28/3/2008). Hal itu membuat posisi politik Muhaimin di PKB kian terjepit, kecuali jika ada perubahan sikap politik Gus Dur.

Gus Dur menjadi faktor amat dominan di PKB sejak kelahirannya. Pertanyaan kerap mengemuka, bagaimana jadinya jika PKB tanpa Gus Dur? Ada dua jawaban. PKB akan ditinggalkan konstituennya, alias cepat atau lambat bubar, seiring munculnya kompetitor sejenis. Atau sebaliknya, PKB semakin eksis dan tumbuh menjadi partai politik modern yang tidak bergantung pada otoritas Dewan Syuro. Permintaan pengunduran diri Muhaimin dapat dibaca sebagai puncak konflik internal PKB, yang ada kaitannya dengan faktor loyalitasnya kepada Gus Dur. Loyalitas dalam menyokong Gus Dur sebagai kandidat presiden pun dianggap belum cukup.

PENCALONAN GUS DUR

GUS Dur hendak mencapreskan diri kembali? Pertanyaan itu kini banyak terlontar. Biasanya, pertanyaan itu disusul pertanyaan lain yang kontradikif: apa tidak keliru? Secara kalkulatif-rasional, ia susah dilakukan. *Pertama*, jika persyaratan pencalonan presiden diperketat, belum tentu PKB dapat mencalonkan sendiri jagonya. *Kedua*, KPU bisa jadi tidak meloloskannya karena alasan tafsir atas persyaratan "sehat jasmani dan rohani". *Ketiga*, kalaupun Gus Dur lolos, akan sulit merebut dukungan pemilih di tengah ketatnya persaingan antarkandidat.

Sebagian besar pengamat berpendapat pencalonan kembali Gus Dur kurang masuk akal. Gus Dur pernah menjadi presiden dan dilengserkan akibat reputasi dan sepak terjangnya. Gus Dur juga memiliki keterbatasan fisik. Publik sudah punya penilaian tersendiri. Namun, bagi Gus Dur, masalahnya bukan menang atau kalah. Ia ingin memperjuangkan hak politiknya sebagai warga negara yang seharusnya tidak didiskriminasi dalam berpolitik.

Gus Dur memang mempunyai keterbatasan fisik. Namun kalau itu alasan penolakan pencalonannya, Gus Dur paling menentang. Tapi, kalau bukan untuk menang, mengapa harus memaksakan mencalonkan Gus Dur? Karena supremasi politik Gus Dur masih sedemikian kuat di PKB, seolah tak ada pilihan lain.

Konflik politik PKB memetakan pola terbelahnya dua kelompok, yakni yang loyal Gus Dur dan yang kritis. Lokomotif baru kalangan loyalis mengerucut pada putri Gus Dur, Yenny Wahid. Yang kritis, yang mengedepankan logika politik kalkulatif, sudah terpental, karena berbenturan dengan mekauan politik Gus Dur. Gus Dur memiliki sikap, pendapat, dan sepak terjang yang kerap susah dipahami. Pendukungnya menganggap Gus Dur politisi berprinsip. Namun, pengkritiknya menilai "*semau gue*".

DEMOKRASI INTERNAL

APA yang sedang terjadi dalam konflik internal PKB membuat pu-

blik bertanya, sejauh mana demokrasi internal partai berjalan. Isu itu telah hadir seiring terbentuknya partai-partai politik. Isu itu pernah melanda Golkar yang direspons dengan "paradigma baru" dan dipangkasnya struktur Dewan Pembina, pasca-Musyawarah Nasional Luar Biasa 1998.

Namun, langkah mendemokratisasikan diri itu ternyata tidak segera diikuti partai-partai politik lain. Memang tidak ada klausul yang mengatur keharusan demokratisasi internal partai secara rinci dalam UU Partai Politik, meski sebenarnya semangatnya sudah terlihat. Sayang, partai-partai politik kita cenderung menghambat kemurnian proses demokratisasi internal dengan membuat aturan atau mekanisme tidak demokratis.

Keberadaan struktur Dewan Syuro atau Dewan Pembina justru kerap menghambat demokratisasi internal partai. Partai, dalam banyak kasus, terlihat seperti perusahaan, milik orang-orang tertentu. Oligarki politik terasa sekali. Nepotisme dalam perekrutan kader-kader partai pun menjadi kecenderungan. Hal sedemikian sesungguhnya berbahaya bagi masa depan partai itu sendiri. Bagaimanapun, konflik di PKB dan dominannya Gus Dur merupakan potret, apakah partai yang bergantung pada sosok akan lebih efektif ketimbang yang mengembangkan sistem.●

Tiga Wajah Parpol Kita

KOMPAS, 15 MEI 2008

DALAM *The Evolution of Party Organizations in Europe: Three Faces of Party Organization*, Richard Katz dan Peter Mair (1994) berpendapat, parpol memiliki tiga wajah, *party in public office, party on the ground*, dan *party in central office*. Diterjemahkan secara bebas, wajah parpol bisa dilihat dari aktivitas kader mereka di pemerintahan dan parlemen, akar rumput, dan aras pusat, keorganisasiannya. Sejauh mana wajah parpol kita?

Di tingkat pengambilan kebijakan, parpol-parpol tampak antusias memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Dalam pembahasan RUU bidang politik, mereka yang punya wakil di parlemen sepakat meralat aturan peralihan perundang-undangan sebelumnya, bahwa parpol yang tak mencapai angka di atas ketentuan ambang batas elektoral (*electoral threshold*) tidak boleh ikut pemilu selanjutnya. Ketentuan baru yang mereka sepakati, parpol yang "memperoleh kursi di DPR hasil Pemilu 2004" dapat langsung mengikuti Pemilu 2009 sebagaimana terbaca dalam Ketentuan Peralihan Pasal 316 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Dalam konteks hubungan antarparpol, pola koalisi yang timbul aneh. Tak ada pola *checks and balances* melembaga baik yang berkuasa maupun "oposisi". Di aras *party in central office* "jenis kelamin" parpol-parpol kita banyak yang tak jelas, apakah parpol pemerintah yang otomatis "mengamankan" kebijakan pemerintah ataukah yang memosisikan sebagai "kelompok pengimbang". Parpol "dua kaki" jelas membingungkan. Jadi, belum ada tradisi berkoalisi atau beroposisi politik yang kuat dan konsisten.

Apakah soal koalisi demikian perlu diatur dalam UU? Guna mentradisikan koalisi yang konsisten, kelihatannya hal itu perlu. Politik memang berkemungkinan *esok dele sore tempe*, tetapi setidaknya harus ada jangka waktu yang jelas: selama satu periode pemerintahan, di mana posisi parpol-parpol, mendukung "yang berkuasa" atau "oposisi"?

GAGALNYA PARPOL

DI AKAR rumput keberadaan parpol, setidaknya setingkat simbol, sudah terasakan. Parpol yang berorientasi kader telah berupaya menancapkan ruang pengaruhnya hingga ke tingkat perdesaan. Hal ini dapat dipahami mengingat tidak ada lagi formula "massa mengambang" (*floating mass*). Aroma politik, tepatnya politik penuh konflik pun, sudah sampai ke tingkat paling bawah dalam struktur politik. Konflik internal parpol dalam kadar tertentu terasa sekali di level

bawah.

Konflik internal parpol membuat citranya *anjlok* di akar rumput. Dualisme kepengurusan parpol masih menjadi kecenderungan yang mewabah. Dampaknya, di tingkat akar rumput perlu diwaspadai. Dalam satu segi, konflik di tingkat pusat kurang begitu berpengaruh di tingkat paling bawah. Namun, kalau berlarut-larut dan meledak ke dalam konflik terbuka, imbasnya menjadi fatal. Konflik internal parpol bisa berujung "gagalnya" parpol.

Fenomena antipartai juga disebabkan perannya yang tak populer dalam proses kebijakan publik. Ada tiga kemungkinan: antipartai yang berujung sikap golput, yang bereaksi dengan mendirikan parpol baru, atau menjatuhkan diri menjadi pemilih bertipologi *masokis* (*masochist*). Dalam berbagai pilkada, jumlah golput lumayan besar, bahkan ada yang jadi pemenang. Dalam pemilu nasional, jumlah golput bisa membengkak. Makna parpol besar atau kecil dalam demokrasi langsung, akan selalu terkait apakah yang mereka tawarkan dapat diterima publik atau tidak. Parpol perlu introspeksi agar diterima masyarakat.●

Golkar dan Masa Depan SBY-JK

KOMPAS, 10 JUNI 2008

DALAM konferensi pers di Gedung DPR, Ketua FPG Priyo Budi Santoso memberi sinyal, masa depan SBY-JK bisa tak menentu. FPG yang mendukung pemerintah, kini justru membebaskan anggotanya mendukung hak interpelasi atau angket yang mengkritik kebijakan pemerintah (*Kompas*, 1/6/2008).

Golkar tengah kecewa dan getir terkait perkembangan politik belakangan sebagai akumulasi peristiwa yang "tidak mendapat apresiasi yang seharusnya" dari pemerintah. Faktor Golkar menentukan kekuatan koalisi. Jika Golkar resisten, tentu kontraproduktif

bagi masa depan pemerintah. Sinyal kekecewaan itu mencerminkan posisi Golkar yang serba dilematis. Posisinya unik, tetapi tak terakomodasi optimal di pemerintahan.

Secara kelembagaan, kekecewaan Golkar terkait dalam banyak pilkada, pihaknya sering merasa diperlakukan tak adil. Golkar kecewa dengan penyelesaian konflik Pilkada Lampung dan Maluku Utara. Dalam hal ini, posisi JK cukup membingungkan. Ketika partai yang dipimpinnya kecewa dengan pemerintah, bukankah itu sama dengan memprotes "diri sendiri"? Lalu, siapa yang hendak dibela JK? Golkar, "pemerintah", atau "keduanya"?

Kebingungan itu, konsekuensi rangkap jabatan. Karenanya, publik cepat memaknai ekspresi kekecewaan itu sebagai serangan politik yang dialamatkan ke SBY sebagai presiden dan Partai Demokrat, meski yang menjadi sasaran antara adalah Mendagri Mardiyanto. Apa yang dikecewakan Golkar secara ekspresif itu, bagaimanapun, merupakan bentuk dari tekanan politik institusinya pada "pemerintah", seolah melupakan sejenak pihaknya bagian koalisi pemerintah.

POLITIK ITU DINAMIS

MENENTU-tidaknya masa depan politik SBY-JK tergantung banyak faktor. Sekiranya semua sepakat, politik itu dinamis. Hadir dan bubarnya koalisi politik bisa terjadi dalam tempo lebih cepat atau lebih lambat dari yang diperkirakan, tergantung proses memberi dan menerima (*take and give*) yang ada. Koalisi terbentuk karena ada kesepahaman politik (*political deal*), yang terdeteksi dari derajat kepuasan masing-masing, terukur dari kalkulasi pragmatis.

Ekspresi protes Golkar merupakan sinyal melemahnya kepuasan politik yang berpotensi merusak hubungan SBY-JK. Itu faktor pertama. Faktor lain terkait reaksi balik kubu SBY dan Partai Demokrat. Selama reaksi baliknya wajar, ketegangan tak meninggi, stabilitas hubungan terjaga. Yang juga menentukan, perkembangan politik eksternal, seberapa fluktuatif popularitas SBY dan JK serta tiap-tiap partai. Kalkulasi bisa dilakukan sebelum atau sesudah

pemilu. Sebelum pemilu, masing-masing mencoba menahan diri. Setelah pemilu semakin kelihatan ke mana arah politiknya.

Dalam jangka pendek, kekecewaan Golkar tak akan mengganggu stabilitas koalisi pemerintahan. Jika Golkar keluar, koalisi akan goyah, apalagi jika disusul lainnya. Pada titik ekstrem, Partai Demokrat satu-satunya tumpuan SBY. Di tengah kompetisi politik yang seru, perjuangannya tak gampang. Skenario politik masih terbuka. Asumsi bisa bergeser. Bisa jadi ekspresi kekecewaan Golkar sekadar "gertak politik". Asumsi itu akan bisa bergeser jika ada "gempa politik" yang lebih besar.●

Pemimpin Pilihan Iklan

KOMPAS, 24 JULI 2008

MENJELANG PEMILU 2009, frekuensi iklan politik melonjak. Iklan-iklan itu tak hanya memperkenalkan partai-partai, tetapi juga sosok-sosok politik. Tak ada salahnya kandidat politik memasang iklan. Tujuannya agar publik mengenal dan populer. Derajat popularitasnya ditentukan dengan jawaban "ya saya tahu" saat ada pertanyaan dari lembaga survei. Namun, popularitas tak sama dengan elektabilitas. Jadi, memasang iklan saja belum cukup. Inilah tinjauan dari sisi lembaga atau sosok individu.

BAGAIMANA DARI sisi publik? Respons beragam. Di tengah situasi ekonomi yang belum membaik, publik bertanya berapa besar dan dari mana biaya iklannya. Pertanyaan itu yang sering muncul pertama kali, bukan justru substansi atau materi iklan. Demokrasi langsung memang mahal. Namun, biasanya psikologi publik amat dipengaruhi kondisi sosio-ekonominya. Sayang, jika uang dihambur-hamburkan untuk ongkos politik.

Publik seolah dalam lautan janji saat menatap iklan-iklan politik. Janji-janji itu kerap amat hiperbolik, kurang realistis. Kalau bukan janji, pengiklan politik memosisikan diri sebagai "dewa pe-

nyelamat", mesias, yang bisa mengatasi semua persoalan. Karena itu, mereka memerlukan dukungan dan legitimasi.

Partai dan sosok perlu pencitraan. Karenanya, mereka sibuk berdandan agar publik terpikat. Iklan hanya sebagian dari teknik komunikasi modern. Publik yang kritis melihat iklan sebagai sekadar artifisial, permukaan, label alias pengenalan merek. Karena artifisial, yang ditawarkan belum tentu otentik. Iklan belum tentu menghasilkan pemimpin sejati.

JIKA PEMASANG iklan dikatakan bukan calon pemimpin otentik, tidak 100 persen benar. Otentik atau tidak, tak terkait apakah ia memasang iklan atau tidak. Iklan hanya cara, sedangkan otentisitas kepemimpinan, proses. Pemimpin otentik terlihat dari proses panjang (*track record*) alamiahnya. Publik yang "sadar" akan melihat pemimpin otentik secara keseluruhan, menghitung plus-minusnya.

Menurut Donald H McGannon, *leadership is action, not position*. Pemimpin yang tidak bisa berbuat dan hanya mengandalkan posisinya semata-mata secara terbatas, mereka tak bisa diharapkan membawa perubahan. Pemimpin otentik tak dibuat-buat, mampu merespons masalah secara improvistif. Ia bak pelawak yang cerdas improvisatif, di mana itu lebih otentik ketimbang yang sekadar membaca teks. Kepemimpinan otentik, tak terjebak gincu iklan-iklan politik.

MASALAHNYA, kita lemah dalam menimbang pemimpin otentik. Ada yang terpaksa memilih pemimpin yang dianggap "paling baik di antara yang baik" atau "yang dianggap baik, di antara yang tidak baik". Namun, pemimpin yang baik belum tentu otentik. Dati sini, katakan, mereka yang mampu memilih pemimpin sejati adalah kualifikasi publik level satu.

Level kedua, publik tradisional neo-primordial yang kerap mengabaikan otentisitas. Kualifikasi kepemimpinan yang kompleks dilewatkan begitu saja, sehingga mengerucut pada pola *pejah-ge-*

sang. Level ketiga, mereka yang suka kemasan-artifisial ketimbang isi-substansi. Di sinilah partai dan sosok politik berpeluang meraup pendukung.

Level keempat, mereka yang tak berdaya dan terjebak pola masokis. Sebenarnya, publik jenis ini cukup kritis, mampu mengeluh atas keadaan dan kepemimpinan, tetapi tidak sanggup untuk tidak memilih selain partai atau sosok yang pernah "menyakitinya" itu. Level kelima, yang apatis, tidak percaya lagi pada institusi atau siapa pun dapat memperbaiki keadaan. Mereka tak sekadar golput (*nonvoters*) teknis.

Pendidikan politik harus terus dilancarkan. Media massa juga bertanggung jawab dan berperan dalam proses pendidikan publik. Iklan-iklan politik boleh ditayangkan, tetapi ulasan media harus mencerdaskan. Pemasang iklan harus memenuhi kaidah etika politik agar semarak tetapi etis.●

Wacana Koalisi Golkar dan PDIP

KOMPAS, 29 AGUSTUS 2008

SETELAH gagal mewujudkan gerak-politik bersama pasca-pertemuan Medan dan Palembang tahun lalu, beberapa elite Partai Golkar dan PDIP mewacanakan koalisi menjelang Pemilu 2009. Lagi-lagi, alasan dasar yang dipakai kesamaan ideologi. Baik Golkar maupun PDIP sama-sama partai nasionalis yang berposisi di tengah yang mewadahi beragam segmen (*cacth all party*).

Namun, kesamaan "ideologi" saja tidaklah cukup untuk mengoperasionalisasikan kerangka koalisi. Akibatnya, ia berhenti di tingkat wacana. Kedua partai tampak tak memasang "harga mati" dan masih membuka diri bagi berbagai macam kemungkinan. Maka, berharap ada koalisi besar PDIP-Golkar sebelum pemilu 2009, tentu terlalu berlebihan.

Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri. Realitas faksional di masing-masing partai, khususnya Golkar, membuat manuver-manuver yang tercipta tak kunjung matang. Masing-masing pihak terbuka menciptakan ruang manuvernya sendiri, yang sering berbuah benturan. Di lapangan, kalkulasi politik pragmatis condong mengedepan ketimbang realisasi komitmen ideologis. Golkar dan PDIP, dalam banyak kasus gagal berkoalisi, bahkan berhadapan dalam banyak pilkada.

Hingga saat ini, tradisi koalisi permanen belum tumbuh. Golkar dan PDIP sesungguhnya pernah merintis upaya tersebut melalui Koalisi Kebangsaan. Tapi, begitu JK yang *notabene* wapres berhasil menjadi ketua umum partai yang sebelumnya dipimpin Akbar Tandjung, Koalisi Kebangsaan langsung bubar. Apabila tak ada perubahan politik internal Golkar yang demikian ekstrem pasca Munas ke-7 di Bali itu, eksperimen Koalisi Kebangsaan akan sangat menarik di dalam dinamika demokrasi *checks and balances*.

Pasca-Koalisi Kebangsaan wacana berkoalisi kembali hadir, puncaknya tatkala Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh dan petinggi PDIP Taufiq Kiemas memotori pertemuan Medan dan Palembang. Sayangnya, koalisi ini tidak matang. Rencana pertemuan selanjutnya yang akan dilakukan di Jawa Barat, gagal. Di Golkar juga pernah terlontar gagasan koalisi permanen pendukung pemerintahan, serta melancarkan kritik atas partai-partai yang terkesan setengah hati mendukung pemerintahan SBY-JK. *Toh*, koalisi permanen pun berhenti di tingkat wacana pula. Golkar dan Partai Demokrat belum membuat koalisi apa-apa jelang 2009 ini. Karenanya, rencana-rencana politik masih demkian terbuka.

Partai-partai yang berada di tengah, baik tengah-kanan maupun tengah-kiri, kini semakin beragam. Artinya segmentasi politik "ideologi tengah" bakal diperebutkan banyak partai. Dalam pemilulegislatif satu sama lain adalah pesaing. Sementara sentimen ideologi di era demokrasi langsung yang pragmatis ini, belum terbukti manjur dalam menggerakkan konvergensi politik. Kalaupun terbentuk koalisi "permanen" pasca-pemilu legislatif menjelang pilpres,

yang mengemuka justru kepentingan pragmatis, dengan pertimbangan *take and give* dalam sharing kekuasaan.

Yang perlu diamati juga pola oligarki masing-masing partai. Aktor-aktor oligarki partai sangat menentukan "hasil akhir" pengambilan kebijakan politik. Maka, realitas fragmentasi internal partai perlu diteropong. Hubungan antar-aktor satu partai dengan yang lain perlu ditelaah. Kesamaan berorganisasi di luar partai masih dianggap faktor yang cukup menentukan. Kendati, analisis itu bisa melenceng jauh ketika kesamaan organisasi masa lalu tidak menentukan, kecuali pragmatisme.

TAMPAKNYA kedua elite partai telah mengambil pelajaran dari rencana-rencana mereka sebelumnya. Mengutamakan isu koalisi ideologis di tengah realitas pragmatisme, terlalu riskan. Terbukti, partai-partai Islam tampak tersinggung dengan wacana yang seolah-olah memposisikan mereka "tidak nasionalis". Eksesnya dapat mengarah kepada ketegangan politik yang kurang perlu. Karenanya, dapat dipahami mengapa misalnya, Taufik Kiemas mendirikan sayap Islam *Baitul Muslimin* di PDIP dan hadir dalam Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh PKS, partai yang kerap disebut sebagai *common enemy* itu.

Bayangan bahwa jika Golkar-PDIP berkoalisi pra-pemilu akan tambah besar kelak, barangkali hanya akan "menguntungkan" satu pihak. Pihak PDIP mungkin lebih optimis, dukungan suaranya bakal melonjak sesuai yang diperkirakan banyak lembaga jajak pendapat. Sementara Golkar, bisa "turun kelas" sebagai partai menengah. Kecemasan-kecemasan soal posisi dukungan suara itu, sangat menentukan pergerakan niat berkoalisi. Di sisi lain, wacana memasangkan Megawati-JK atau JK-Megawati, perlu dicermati *chemistry* politik antar-keduanya, khususnya seberapa besar derajat kepatutan dan elektabilitasnya.

Megawati harus mencari figur yang memperkuat kimia politiknya. Bagi Mega, dan siapapun capres, ketepatan memilih pasangan akan sangat menentukan. Satu sama lain tak boleh lagi terkesan

menegasikan. Sementara JK juga akan disibukkan mengkalkulasi dirinya, soal apakah tetap berpasangan lagi dengan SBY, banyak variabel yang menentukan. Kini, kalkulasi politik belum dapat dirinci. Pengalaman membuktikan, pertarungan antar-partai akan tidak sama dengan antar-figur.●

Rapim Golkar dan Isu Capres

KOMPAS, 17 OKT OBER 2008

MASA depan politik Partai Golkar terefleksikan dalam perhelatan Rapimnas IV pada 17-20 Oktober 2008. Pesertanya diperkirakan tak mempersoalkan penentuan caleg berdasar suara terbanyak dan peniadaan konvensi. Agenda formal tinggal ketok palu. Yang menarik, ketika dinamika Rapimnas mengkonfirmasi peta kompetisi internal elite Golkar, terkait isu capres. Faksi Jusuf Kalla menghendaki mendukung kembali pasangan SBY-JK.

Tetapi, SOKSI menyuarakan dukungan pada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara MKGR mewacanakan sejumlah nama, walaupun opsi utama capres dan atau cawapres tetap JK (*Kompas*, 14/10/2008). Usulan nama di luar JK menarik. Dalam hal ini, dapat dimaklumi komentar Ketua Bidang Politik Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahwa kepastian pencalonan kembali SBY–JK, tergantung dinamika politik Golkar dan JK sendiri (*Koran Tempo*, 14/10/2008).

MAYORITAS DIAM

DINAMIKA politik Golkar kini berbeda dengan menjelang Pemilu 2004. Golkar tak melanjutkan tradisi konvensi. Konsekuensinya, spekulasi nama-nama capres mengemuka. Posisi JK sangat kuat, nyaris tanpa perlawanan, kecuali kekecewaan parsial dan cepat patah, sebagaimana kasus Fadel Muhammad dan Yuddy Chrisnandi. Ketidaksetujuan atas kebijakan partai, "nyaris tak terdengar" di daerah. Mayoritas diam di Golkar, tentu menguntungkan faksi JK.

Dinamika internal Golkar tak terlihat tajam dari luar, kendati ia sangat begantung perkembangan politik dari luar. Skenario memasangkan kembali SBY-JK, tergantung faktor SBY dan Partai Demokrat. Posisi JK dilematis apabila ternyata kelak suara Golkar lebih besar ketimbang Partai Demokrat, sehingga banyak pihak dapat menuntut agar Golkar mengajukan capres sendiri.

FAKTOR PEMILU

GOLKAR dan partai-partai lain masih akan ditentukan perolehan suara dalam pemilu. Karenanya yang justru menjadi pertanyaan terpokok, bukan siapa yang akan didukung sebagai kandidat presiden atau wapres, tetapi apakah Golkar mampu mempertahankan posisi perolehan suaranya di urutan pertama pada Pemilu 2009? Para petinggi Golkar yakin target 30 persen suara akan tercapai, kendsti tak sedikit yang meragukan.

Kita dapat mencatat beberapa realitas untuk Partai Golkar ke depan. *Pertama*, persaingan politik luar biasa tajam. Tak hanya Partai Hanura dan Gerindra, yang banyak eks-Golkar, tetapi juga partai tengah lain seperti Partai Demokrat dan PDIP. *Kedua*, tokoh-tokoh yang ditawarkan partai-partai lain tak kalah menarik. Golkar tampak masih kuat merek politiknya, tetapi tatkala *voters* dihadapkan banyak pilihan yang hampir sama, merek bisa dilupakan. Berkembangnya kultur pragmatis di Golkar, bisa jadi bumerang, apabila Golkar semakin jauh dari obyektivitas dan *meryt system*.

Ketiga, struktur dan infrastruktur Golkar yang terkesan solid, belum mampu menjadikan mesin partai efektif. Kalahnya banyak kandidat kepala daerah provinsi menkonfirmasikannya. Konvensi yang dulu "oli bagi mesin partai" tak ada lagi. Akibatnya, mesin partai statis, bahkan destruktif akibat tingginya potensi konflik menyusul format penentuan caleg bedasar suara terbanyak. *Keempat*, kepemimpinan JK tak optimal mengefektifkan koordinasi politik Golkar hingga *grass root* guna memperkuat pengakaran partai. JK punya keterbatasan waktu, selain gaya kepemimpinannya yang banyak kontraproduktif sebagai pemimpin partai.

EPILOG

RAPIM Golkar kali ini merupakan gejala awal kepolitikannya hingga 2009. Masihlah susah untuk menentukan hasil akhir keseluruhan proses. Beredarnya nama-nama capres, menunjukkan bahwa "wajah politik" Golkar tidak tunggal, dan dapat memperkuat depersonifikasi JK di Golkar. Menentukan secara final kandidat presiden dalam rapim, justru akan kontraproduktif bagi Golkar, apabila kemudian justru memicu gejolak internal. Padahal Golkar harus merebut simpati pemilih. Wacana koalisi harus dipinggirkan dulu, karena tantangan yang lebih utama justru di pemilu legislatif.●

Langkah Politik Raja Jawa

KOMPAS, 4 NOVEMBER 2008

SULTAN Hamengku Buwono X mengumumkan kesediaannya dicalonkan menjadi presiden. Keputusan itu muncul dalam *Pisowanan Ageng* di Yogyakarta, 28 Oktober 2008. Maka Sultan telah menegaskan posisi politiknya. Kepastian maju merupakan modal melangkah, menepis keraguan publik yang mengidolakan. Sultan melangkah lebih maju, kalau bukan lebih jauh, dalam politik praktis dengan target yang jelas. Bukan hal mudah bagi Tim Sukses Sultan memobilisasi dukungan partai. Sejauh ini, baru Partai Republika Nusantara yang bersedia mengusung. Partai Golkar, tempat Sultan beraktivitas, belum menentukan dukungan. Jadi, dukungan partai masih spekulatif.

DESAKRALISASI

DENGAN keputusan politis itu, Sultan rela "melepas" simbol kebesaran sebagai raja sebab dalam demokrasi berlaku prinsip egalitarianisme. Desakralisasi atas Sultan – yang diagungkan secara kultural – terjadi saat menjadi menjadi "manusia biasa" atau "manusia politik" yang berebut legitimasi rakyat. Demokrasi tak memandang para "pemain" di dalamnya sebagai Sultan atau bukan Sultan. Siapa

yang banyak didukung, dialah yang menang.Sultan menyatakan siap dengan segala konsekuensinya. Namun, sementara kalangan "rakyat"-nya, ada yang ngeman, tak rela jika kelak Sultan kalah. Seharusnya Sultan konsisten di wilayah dan simbol kultural. Namun, Sultan telah kuat tekadnya.

Kini, yang penting bagi Sultan, bagaimana mampu memunculkan pengaruh yang menguntungkan atas pemosisiannya sehingga melipatgandakan "dukungan". Timnya pasti akan bekerja sesuai nalar marketing politik, melakukan langkah-langkah terukur. Secara popularitas, Sultan cukup dikenal. Namun, popularitas saja belum final. Apakah rekam jejak Sultan akan diapresiasi positif dan orang akan memilihnya?

Sementara kalangan menghitung, Sultan memiliki kelebihan, antara lain karena ia seorang raja Jawa. Dalam komunitasnya, ia memiliki karisma dan dianggap amat layak sebagai tokoh alternatif pembawa perubahan. Meski demikian, bisa jadi variabel "raja Jawa" itu merupakan kekurangannya. Variabel itu membuat berat sosok Sultan. Dengan mau berkiprah di politik praktis, stasiun kebesarannya turun. Sultan telah "melempar dadu", berspekulasi dalam permainan demokrasi langsung, yang membuatnya bekerja keras dalam iklim yang ekstrakompetitif.

KALKULASI POLITIK

TENTU saja Sultan tak bisa dikatakan "asal maju dan tanpa perhitungan". Sultan dan timnya telah menakar risiko. Hanya aneh, terkesan Sultan mempunyai "ambisi politik". Hal itu coba dipatahkan dalam kemasan Pisowanan Ageng. Sultan terkesan tak kuasa menolak desakan "rakyat" agar siap dicalonkan sebagai presiden. Namun, dengan itu justru hakikat kesultanan yang kultural dan "sakral" terdekonstruksi.

Atas perkembangan politik Sultan pasca-*Pisowanan Ageng*, ada beberapa hal yang perlu dilihat. *Pertama*, fluktuasi popularitas dan perkiraan elektabilitas politik Sultan. Pasti ada reaksi atas keputusan Sultan: ada yang suka dan tidak suka. Soal ini lembaga-

lembaga survei akan mengonfirmasikannya.

Kedua, apresiasi dan akhirnya dukungan partai-partai. Hal ini akan terus berproses. *Ketiga*, analisis dan simulasi komposisi pasangan. Siapa pasangan tepat mendampingi Sultan bukan hal sederhana. Sultan memosisikan diri sebagai calon presiden, membuat partai-partai politik tertentu menjadi dilematis. Sementara kalangan Partai Golkar yang menginginkan pasangan Jusuf Kalla-Sultan, misalnya, akan kecewa jika Sultan hanya sebagai capres.

Keempat, analisis pesaing. Pesaing Sultan tidak bisa dipandang ringan. PDIP kembali mencalonkan Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat mantap dengan SBY. PAN mengelus ketua umumnya, Soetrisno Bachir. PKS "menetapkan" banyak nama sebagai kandidat capres. Bersandar pada partai-partai baru tampak berisiko. Jangan-jangan perjuangan Sultan akan langsung anjlok pascapemilu legislatif. Namun, kita masih akan mencermati, bagaimana langkah Sultan selanjutnya. Bagaimana pula partai-partai politik dan rakyat.●

XI

PERTARUHAN INDONESIA

[2009]

PRAKTIK-PRAKTIK PEMILU LOKAL DI INDONESIA MENYUMBANGKAN CATATAN ATAS KECENDERUNGAN PERILAKU POLITIK ELITE DAN MASYARAKAT YANG DIKESANKAN KIAN PRAGMATIS. APATISME JUGA HADIR DI TENGAH KEGALAUAN ATAS KEJUTAN DEMOKRASI DENGAN SISTEM DAN MEKANISME PEMILU YANG BERUBAH-UBAH. MESKI DEMIKIAN, BANYAK PIHAK TETAP BERKEPENTINGAN AGAR PEMILU SUKSES DAN TIDAK MENGHENDAKI PESTA DEMOKRASI YANG MENENTUKAN SEJARAH MASA DEPAN ITU GAGAL

- PERTARUHAN INDONESIA

Demokrasi Pilihlah Aku

KOMPAS, 12 JANUARI 2009

SETELAH MK memutuskan ketentuan perolehan suara terbanyak untuk para caleg untuk lolos ke Senayan, semakin tegaslah format demokrasi langsung kita, demokrasi ekstra-liberal berbasis individu, atau sebut saja "demokrasi pilihlah Aku". Konsekuensi utama keputusan tersebut, semua partai peserta pemilu tidak lagi memiliki kontrol ketat penentu terpilihnya caleg. Nomor urut caleg tidak relevan, tergantikan kekuatan individu caleg. Partai hanya berfungsi kendaraan dan simbol (merek) politik.

Iklan-iklan partai di televisi dan media cetak bersifat memperkuat merek politik caleg. Sebanyak 38 buah partai nasional dan 6 buah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah saling beradu merek. Partai-partai lama, khususnya lima besar hasil Pemilu 2004 bersaing satu sama lain, juga dengan yang baru. Persaingan simbolik (baik simbol "agama" maupun "non-agama") dan mengemukanya berbagai jargon dan tema kampanye, tersembul ke ruang publik.

Modal minimal para caleg "demokrasi pilihlah Aku" untuk merebut ruang publik adalah stiker dan spanduk. Ekspresi ketatnya kompetisi politik terpancar dari ribuan wajah caleg plus *vote getter* masing-masing, yang terpampang di aneka stiker dan spanduk yang tersebar di mana-mana. Pemandangan ini jelas sangat beda dengan jalan-jalan Indonesia pada 1955 dan kampanye-kampanye pada enam kali pemilu Orde Baru serta dua pemilu era reformasi.

Eksperimentasi "demokrasi pilihlah Aku" memang masih sangat awal. Pada Pemilu 2004 model ini diterapkan pada pemilu anggota DPD, selain tentunya pilpres serta berbagai pilkada yang pada hakikatnya adalah persaingan antar-individu politik yang didukung

partai. Pada pilkada, calon perseorangan telah diperbolehkan, dan tak menutup kemungkinan kelak pilpres pun mengakomodasinya sebagai pengejawantahan hak politik individu.

EGOISME DAN BOSISME

APA konsekuensi praktik "demokrasi pilihlah Aku"? *Pertama*, persaingan antar-individu caleg, bahkan di dalam partai sangatlah ketat. Masing-masing terpacu berebut simpati saling mengungguli. Siapa yang paling aktif mengkampanyekan diri, dialah yang memiliki peluang lebih besar, ketimbang yang pasif. Diperlukan banyak modal, khususnya finansial untuk mendongkrak citra, terutama bagi yang kadar popularitasnya rendah. Pendekatan pragmatis akan banyak digunakan, sepaket dengan politik uang (*money politics*).

Kedua, *jor-joran* antar-caleg berisiko menghadirkan aneka bentuk politiking, dengan mengemukanya kampanye hitam (*black campaign*). Soal saling menjatuhkan ini, merupakan cerminan dari egoisme politik "pilihlah Aku dan jangan pilih yang lain". Urusannya akan jadi panjang kalau terbentur konflik politik yang terus terbawa-bawa hingga pasca-pemilu.

Ketiga, karena finansial paling penting, tidak menutup kemungkinan pola neo-bosisme politik mengemuka. Ia merupakan fenomena yang pernah menggejala di Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Filipina, di mana para politisi dibandari para "cukong" dan "mafia". Mereka memanfaatkan persaingan bebas politik dengan kekuatan finansial dan jaringan mafia mempengaruhi secara lembut (politik uang) maupun keras (intimidasi).

Keempat, "demokrasi pilihlah Aku" juga sangat diwarnai oleh adat-kebiasaan pemilih. Kalau adat-kebiasaan itu diwarnai persepsi politik yang bias gender, tentu caleg-caleg perempuan dirugikan. Pertimbangan primordial juga akan cenderung mengemuka, khususnya dalam masyarakat tradisional yang preferensi politiknya terbatas. *Kelima*, kelihatannya model kampanye "*door to door*" juga akan marak. Para caleg dan timnya akan turun dari pintu ke pintu untuk menyapa calon pemilihnya. Kampanye model menyapa

langsung masyarakat memang sangat melelahkan, tetapi barangkali lebih efektif, ketimbang bentuk kampanye lain.

Keenam, kalau sudah terpilih, maka diperkirakan akan muncul bentuk-bentuk "kesombongan politik baru" dari para elite politik di DPR. Mereka merasa telah demikian "*ngos-ngosan*" berebut dukungan dan legitimasi. Bila tersindir sedikit, bisa saja mereka langsung mengatakan, "Aku ini anggota DPR yang terpilih dengan suara terbanyak, maka janganlah macam-macam kau".

Ketujuh, dalam jangka panjang para anggota DPR dituntut pandai-pandai merawat dukungan (konstituen). Kompetensi, kapasitas, dan integritas akan menentukan popularitas, akseptabilitas, dan reelektabilitas yang tinggi kelak. Setelah terpilih, "*what next*"? Arena DPR tentunya merupakan arena ujian, bukan "bancakan".

Kedelapan, meskipun banyak pilihan, namun bukan berarti membuat kelompok golongan putih alias golput (*nonvoters*) menipis. Ada lapisan masyarakat yang apatis (*emangnya gua pikirin*) terhadap banyaknya pilihan dengan alasan substansial maupun teknis. Ini tantangan bagi para caleg dan partai.●

Drama Politik PDIP

KOMPAS, 2 FEBRUARI 2009

MESKI Rapat Kerja Nasional PDIP di Solo (27-29 Januari) menyita perhatian, misteri cawapres belum terjawab tuntas. Terlalu banyaknya nama yang disebut justru membuat sosok sang pendamping yang dikehendaki kian misterius. Rakernas itu juga meninggalkan sindiran khas Megawati, sebagai pihak "oposisi", bahwa pemerintah seperti tengah bermain yoyo.

PDIP amat yakin dapat mencalonkan presidennya sendiri. Megawati diperkirakan bakal "berduel seru" berhadapan dengan pesaing "bebuyutan" SBY, jago Partai Demokrat. Bagi Mega dan SBY, Pemilu Presiden 2009 adalah, meminjam judul novel Ernest

Hemingway, *A Farewell to Arms*, "pertempuran penghabisan". Namun, bagaimana jika ada pesaing lain yang menjadi kuda hitam dan mampu mewujudkan wacana koalisi alternatif? Tentu persaingan akan menjadi lebih kompleks dan itu bukan tak mungkin.

FAKTOR CAWAPRES

DALAM berebut dukungan, faktor calon wakil presiden (cawapres) tidak dapat disepelekan, kalau bukan justru amat menentukan. Maka, berkembanglah asumsi utama, cawapres masing-masing akan menentukan kemenangan. Dengan catatan, jika mereka saling memperkuat, bukan menegasikan.

Asumsi SBY sebagai sosok yang sudah populer dan "pasti menang" dengan atau tanpa JK bisa terpatahkan oleh kekuatan Megawati seandainya mampu berpasangan dengan cawapres yang tepat sehingga lebih diapresiasi lebih positif oleh pemilih. Mengingat cawapres amat menentukan, tampaknya ini yang membuat "dua pendekar" itu saling menunggu siapa yang bakal digandeng sebagai pasangan.

Pasca-Rakernas Solo, publik dipaksa menunggu lebih lama atas jawaban misteri pendamping Megawati. Seperti kisah-kisah wayang, PDIP memang seolah sedang membuka "sayembara memperebutkan pendamping sang putri". Beberapa nama telah disebut, manuver demi manuver terjadi. Anas Urbaningrum (Partai Demokrat) menyindir sebagai "*shopping* politik". Bagaimanapun, itulah bagian dari realitas proses politik PDIP.

Hitung-hitungan politik dilakukan secermat mungkin karena kontes politik pemilu presiden ditentukan banyak variabel. Pemenangnya tidak serta-merta. Perang citra (klaim) sudah pasti untuk memengaruhi persepsi masyarakat agar memberi dukungan. Kontribusi dan pengaruh para elite utama di seputar Megawati akan menentukan pilihan akhir, terlepas dari pertimbangan yang berbeda-beda atas jago-jago yang hendak dipasangkan. Faktor suara arus bawah yang didengar di Rakernas Solo juga penting. namun, faktor Megawati sendirilah yang tetap utama.

MASA DEPAN PDIP

PDIP dan partai-partai lain semakin dihadapkan pada tantangan kian berat dalam Pemilu 2009. Kompetitor kian beragam dan berimpitan. Kendala PDIP dan partai lain yang semula yakin pada aturan nomor urut adalah telanjurnya komposisi calon anggota legislatif (caleg) ditetapkan secara subyektif. Padahal, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan nomor urut itu dan menegaskan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. PDIP dihadapkan pada ”pasar bebas politik” dan amat riskan dengan fenomena banyaknya caleg “salah letak”.

Meski demikian, simbol dan ikon khas PDIP masih bertahan di tengah rumitnya medan politik. Moncong putih masih mendengus menggelorakan slogan membela *wong cilik*, dengan ikon sang ibu bijak di tengah realitas keluarnya sejumlah elite internal partai yang lantas mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan.

Terlepas dari kesangsian PDIP masih moncer, *positioning* politiknya tak sedilematis Partai Golkar yang belakangan terkesan tertatih-tatih menetapkan tema kampanye yang efektif. PDIP punya modal historis sebagai “partai oposisi” yang berpeluang menjadi alternatif utama bagi yang tak suka gaya dan kebijakan pemerintah. Meski demikian, rakyatlah yang bakal menentukan nasib partai yang dipimpin putri Bung karno ini.●

Alternatif Politik Partai Golkar

KOMPAS, 23 FEBRUARI 2009

PERKEMBANGAN menarik pasca-Rapat Konsultasi Nasional (Rakonnas) Partai Golkar adalah “kompaknya” para ketua DPD Tingkat I mendesak ke Ketua Umum Jusuf Kalla, agar partai berlambang pohon beringin ini mengajukan capres sendiri. Uniknya, hal itu disampaikan di kediaman dinas Wakil Presiden,

dan JK kesulitan untuk menolak (*Detik.com*, 19/2/2009).

Jalan untuk menentukan siapa yang bakal didukung menjadi capres dan cawapres Partai Golkar, sudah terbentang setelah DPP telah menebar surat edaran ke seluruh DPD. Surat edaran itu berisi maklumat agar DPD mengusulkan sejumlah nama untuk disurvei. Walaupun, pengumuman siapa yang bakal didukung secara resmi baru akan diputuskan seusai pemilu legislatif, langkah tersebut dianggap "kemajuan" tersendiri, setelah konvensi ditiadakan, apalagi apabila JK setuju Golkar akan mengajukan capres sendiri.

Keputusan penjaringan nama-nama capres Golkar merupakan konsekuensi rekomendasi Rapimnas Oktober 2008, dan menepis skenario tunggal menyandingkan kembali JK sebagai cawapres SBY. Golkar sendiri "terbelenggu" posisi JK sebagai Wapres, dimana JK sendiri justru berada dalam bayang-bayang politik "kekuatan eksternal". Gaya kepemimpinan JK tak sepenuhnya membuat gairah berpartai para kader meluap-luap dan memposisikan Golkar sebagai "macan yang ditakuti". JK nyatanya "tidak cukup waktu" mengurus partai, karena posisinya sebagai wapres. Kalahnya banyak kandidat Golkar di berbagai pemilihan kepala daerah juga menjadi catatan tersendiri.

Partai ini tak leluasa menawarkan kader-kadernya sebagai capres sejak awal, berbeda dengan Golkar "zaman konvensi" menjelang Pemilu 2004. Tanpa konvensi, elite internal yang punya kans sebagai capres Golkar merasa menemui jalan buntu. Penjaringan nama dan penggunaan indikator survei, tidak semenarik inovasi konvensi. Dalam hal ini DPD-DPD sekadar pelengkap, mengingat hasil akhir tetap di tangan elite DPP, beda dengan model konvensi yang menempatkannya sebagai subyek menentukan. Akibatnya, konstelasi politik internal Golkar lebih banyak ditentukan drama kompetisi antar-elite di level struktural. Demokrasi internal Golkar mengalami kemunduran.

KEBESARAN PARTAI

ARUS desakan politik DPD agar Golkar mengajukan capres sendi-

ri, tak lepas dari sudut idealisme bahwa partai sebesar Golkar menyesuaikan diri dengan kebesarannya itu. Dari sudut ini, kalkulasinya tak sekedar menang-kalah dalam pilpres, melainkan mampu tampil sebagai "partai pelopor" demokrasi *cheks and balances* di Indonesia. Namun, *mindset* sedemikian segera dihadapkan mengemukanya arus pragmatisme politik yang tak semakin surut. Oligarki politik memang bisa melanda hampir semua partai, tapi kalau kadar "kolutif dan nepotik"-nya terlalu berlebihan, jelas sudah sangat membahayakan. Golkar sudah berada dalam lampu kuning pragmatisme politik.

Posisi Golkar kini tak lebih dilematis dibandingkan "masa susah" 1999 dan masa "penuh hujatan" menjelang 2004. Golkar tak memiliki *positioning* politik yang makin kuat, karena tak sepenuhnya merupakan partai pemerintah, tapi juga bukan "oposisi". Di pemerintahan elite-elitenya dikesankan hanya "entitas politik bayang-bayang" SBY dan Partai Demokrat.

Insiden Achmad Mubarok, yang menyebut Golkar bakal memperoleh 2,5 persen suara pada pemilu kelak, merupakan "tamparan" bagi elite struktural Golkar. SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah melakukan manuver politik yang jitu dengan meminta maaf atas slip of tongue anak buahnya itu ke pihak Golkar. Kesannya, justru Partai Demokrat lebih siap untuk menang.

Untuk menembus "kebuntuan" dan membawa kembali pada kebesaran partai, sesungguhnya saat ini Golkar punya kesempatan besar untuk segera mengumumkan mengusung capres sendiri. Peluang Golkar untuk memajukan capres alternatif di luar SBY dan Megawati, sangat besar. Walaupun, konsekuensinya, JK harus rela mengesampingkan pikirannya untuk digandeng kembali oleh SBY, dan memposisikan "secara ksatria" sebagai ketua umum yang secara totalitas mengedepankan kepentingan jangka panjang partai.●

Setelah Manuver Megawati-JK

KOMPAS, 27 MARET 2009

BERAGAM komentar mengiringi pertemuan dua ketua umum, Megawati Soekarnoputri (PDIP) dan Jusuf Kalla (Partai Golkar). Pertemuan itu menghasilkan lima butir kesepakatan tertulis. Kesannya, PDIP dan Golkar telah merintis suatu koalisi jangka panjang yang bisa berimplikasi penting bagi Pilpres 2009. Sepertinya Koalisi Kebangsaan jilid II tengah dihidupkan, setidaknya spiritnya. Tetapi, nuansa dan dinamika politiknya kini sudah sangat lain. Dulu, Koalisi Kebangsaan dibangun dengan semangat bekerja optimal agar capres-cawapres mereka terpilih dan akan menjadi kekuatan pengimbang (oposisi) apabila tidak.

Koalisi ini gagal mengantarkan kandidatnya, tapi terus mencoba konsisten sebagai oposisi. Suatu saat JK terpilih menggantikan Akbar Tandjung, lantas ia mengarahkan Golkar ke pendukung pemerintah. Kini koalisi hadir justru ketika PDIP masih konsisten sebagai "oposisi", padahal Golkar pendukung pemerintah. Kesepakatan itu terjadi terutama karena mengemukanya faktor JK yang harus bermanuver setelah mengakomodasi tuntutan internal bahwa Golkar akan mengajukan capres sendiri. Di sisi lain, JK tampak sudah patah arang dengan SBY yang menggantung nasib politiknya, dengan belum mengumumkan pasangan cawapresnya.

PUKULAN TELAK

MANUVER politik JK-Megawati merupakan semacam pukulan telak bagi kubu SBY. JK tampak meninggalkan pesan yang jelas bahwa tanpa bergabung lagi dengan SBY, ia bisa bermanuver politik secara

"lebih baik dan lebih cepat". JK tengah bermanuver secara *zig-zag*, walaupun meninggalkan risiko yang tidak kecil bagi lembaga partai yang dipimpinnya. Masa depan SBY-JK menjadi semakin tidak jelas, dengan manuver tersebut.

Terlepas dari normatifnya kesepakatan JK-Megawati, dalam jangka pendek PDIP cenderung lebih diuntungkan. Golkar terkesan tampak menjadi subordinat PDIP karena sebagai partai oposisi, PDIP bisa menggandeng pendukung pemerintah. Fenomena tersebut menjadi rancu. Koalisi sebelum pemilu memang ideal dilakukan, tetapi seharusnya telah dipersiapkan lama, bukan beberapa pekan menjelang pemungutan suara. Koalisi dadakan mudah sekali rapuh dan pecah. Apalagi dalam konteks pilpres, egoisme politik semakin mengemuka tidak saja antarpartai, tapi bahkan intrapartai. Koalisi bisa pecah gara-gara tidak ketemu mana tokoh yang sepakat untuk didukung bersama.

Di internal Golkar, JK sendiri sesungguhnya dihadapkan banyak pesaing, walaupun diberitakan mayoritas DPD Tingkat I Golkar mendukungnya sebagai capres tunggal Golkar (*Kompas*, 15/2). Sungguhpun demikian, tak berarti JK otomatis capres tunggal karena harus menunggu hasil Rapimnasus seusai pemilu legislatif. Seandainya JK ditetapkan sebagai capres, maka ia akan kesulitan untuk mengompromikan skenario dengan pihak PDIP.

BEREBUT MASSA GOLKAR

KALAU itu terjadi, Blok J, untuk menyebut pencapresan JK, akan berhadapan dengan Blok M (Megawati) dan Blok S (SBY). Dalam konteks ini, baik Blok M maupun Blok S berkepentingan memperoleh dukungan optimal, justru dari massa Golkar. Di tingkat elite Blok J bisa saja populer, tetapi di akar rumput belum tentu. Apalagi kalau Blok M atau Blok S menggandeng tokoh Golkar lain, seperti AT, Sultan Hamengku Buwono (HB) X, atau yang lain.

Survei CSIS, LIPI, LP3ES, dan Puskapol UI, misalnya, diperoleh hasil bila dipasangkan dengan JK, SBY mendapat dukungan sekitar 50,1 persen, meninggalkan pasangan Megawati-HB X (27,1

persen). Ketika SBY dipasangkan dengan AT, prediksi perolehan suara masih 46,7 persen, Megawati-HB X (31,7 persen) dan JK-Hidayat Nurwahid (5,8 persen) (*Kompas*, 12/3). Tampak elektabilitas SBY-AT yang tertinggi seandainya duet SBY-JK tamat.

Dari segi ikon politik yang berpengaruh luas, posisi AT tak dapat diabaikan, bahkan mesti dipertimbangkan. AT bisa sangat berpengaruh dalam menarik massa Golkar dan menjadi lokomotif kemenangan. Megawati juga bisa menggandeng sosok seperti AT untuk tujuan yang sama. Kecuali, kalau memang baik SBY maupun Megawati mengabaikan potensi massa Golkar, yang kalau solid akan "utuh" lari ke Blok J. Terlepas dari kalkulasi itu berbagai kemungkinan bisa saja terjadi.●

Pertaruhan Indonesia

KOMPAS, 11 APRIL 2009

MAJALAH *The Economist* (edisi 4 April 2009) menurunkan tajuk *The Indonesian Surprise*, mengulas fenomena demokrasi politik, Pemilu 2009 di Indonesia. Dicatat, pemilu ketiga di Indonesia era reformasi ini merupakan regional role model. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar telah memberikan contoh praktik demokrasi politik bagi negara di kawasan Asia Tenggara.

Namun, *The Economist* juga mencatat adanya kesulitan besar, yakni bagaimana demokrasi pemilu dilaksanakan. Meski sudah ada pengalaman sebelumnya (1999 dan 2004), teknik penyelenggaraan pemilu selalu menghadapi sejumlah kesulitan serius: sistem pemilu yang kompleks dan berubah-ubah serta pengaturan logistik pemilu yang tak mudah, mengingat Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 240 juta penduduk.

KPU amat optimistis bahwa soal teknis pemilu sudah optimal. Masyarakat sempat cemas dengan kesiapan KPU. Dengan sistem

pemilu yang baru, KPU perlu bekerja ekstrakeras. Pascapemungutan suara 9 April, tantangan masih berliku. Sengketa pemilu harus dapat diselesaikan dengan baik, anarki politik harus dicegah. Dalam perspektif *The Economist*, kesannya pemilu di Indonesia adalah sesuatu yang "amat berisiko", akrobatik, tetapi harus dilalui. Risiko demokrasi pluralis harus ditanggung oleh Indonesia yang memang plural ini.

JUJUR DAN ADIL

TERLEPAS DARI catatan *The Economist*, kecemasan yang biasa ditimpakan atas "kejutan demokrasi" di Indonesia adalah, minimnya persyaratan, khususnya jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam "demokrasi syarat" tingkat kesejahteraan masyarakat yang minim dapat menjadi masalah. Kualitas demokrasi bisa merosot saat yang berkembang adalah pragmatisme-transaksional yang sarat politik uang dalam praktik demokrasi politik.

Dengan sistem yang lebar peluangnya bagi politik uang dan kecurangan pemilu, kualitas demokrasi kian dipertanyakan. Yang menjadi masalah serius adalah adanya ketidakpastian dalam mengawal hasil perhitungan suara. Mekanisme pengawasan manual amat riskan atas peluang kecurangan pemilu. Kepastian terhadap terlaksananya prinsip jujur dan adil dalam pemilu masih menjadi masalah bersama.

Pemilu 1999 dan 2004 telah mendapat apresiasi tingkat dunia dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang fenomenal. Tetapi, mata dunia juga kian jeli, apakah pemilu berlangsung sesuai dengan standar internasional. Celah-celah kecurangan pemilu terbuka lebar dan Panwas kurang gereget dalam mengawasi jalannya pemilu, dan membuat kapok para pelanggar. Sementara banyak masyarakat bersikap apatis dengan parpol dan pemilu.

Praktik-praktik pemilu lokal di Indonesia menyumbangkan catatan atas kecenderungan perilaku politik elite dan masyarakat yang dikesankan kian pragmatis. Apatisme juga hadir di tengah

kegalauan atas kejutan demokrasi dengan sistem dan mekanisme pemilu yang berubah-ubah. Meski demikian, banyak pihak tetap berkepentingan agar pemilu sukses dan tidak menghendaki pesta demokrasi yang menentukan sejarah masa depan itu gagal. Trauma anakisme politik masih membayang dan rakyat sudah bosan dengan konflik akibat perseteruan politik elite.

MODEL DEMOKRASI

PERTANYAANNYA, apakah Indonesia pasca-Pemilu 2009 kian mantap sebagai model negara demokrasi? Jawabannya, bagaimana kenyataan lapangan pada hari pemungutan suara dan setelahnya. Para pemantau pemilu akan menilai, apakah pemilu sukses sesuai dengan standar demokrasi internasional.

Jika dinilai memuaskan, Indonesia akan kian mantap sebagai model negara demokrasi. Sebaliknya, bila buruk praktik demokrasinya akan menjadi sorotan dunia. Penilaian dunia amat penting, bukan saja meningkatkan *trust*, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif bangkit dari keterpurukan yang diawali penciptaan stabilitas politik yang demokratis. Demokrasi *a la* Indonesia sedang menghadapi ujian berat. Pemilu 2009 pertaruhan besar dalam mempertahankan reputasi indonesia sebagai negara demokrasi. ●

Demokrasi Tujuh Puluh Persen

KOMPAS, 18 JUNI 2009

AKHIR-AKHIR ini masyarakat dibingungkan oleh hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Lembaga Riset Indonesia (LRI). LSI yang dibiayai *Fox Indonesia* — konsultan politik psangan SBY-Boediono — memprediksi 71 persen responden akan memilih SBY-Boediono, 16,4 persen Megawati-Prabowo, dan 6,0 persen JK-Wiranto. Sementara hasil survei LRI yang diumumkan, 7 Juni 2009, SBY-Boediono akan dipilih 33,02 persen, JK-Wiranto

29,29 persen, dan Megawati-Prabowo 17,56 persen. LRI tak mengungkap penyandang dana survei, meski Johan Silalahi, pemimpin lembaga itu dikenal dekat dengan pasangan JK-Wiranto.

Terlepas dari konteks profesionalitas dan integritas kedua lembaga jajak pendapat, juga lembaga serupa lainnya, persoalan etis mengemuka. Jika aktivitas jajak pendapat disponsori kelompok politik tertentu, dan seyogianya untuk konsumsi internal, mengapa harus diumumkan kepada publik. Bukankah itu kampanye terselubung? Biasanya masalah etis yang relatif gampang dipatahkan. Tetapi, jika yang tidak etis terus dilakukan, tentu tak elok. Politik kerap tak terlampau memasalahkan keetisan. Apakah politik itu seperti gaya bertinju Muhammad Ali atau Mike Tyson tak dipentingkan. Dalam kondisi tertentu, politik dimaknai sekadar kalah-menang. Al Gore pernah berkomentar, *the presidency is more than a popularity contest*. Kandidat mutlak perlu populer. Tetapi pilpres seharusnya tak sebatas unjuk popularitas, tontonan, tetapi harus jadi tuntunan yang mencerdaskan, bukan membodohkan.

TUJUH PULUH PERSEN

BAGAIMANA JADINYA jika ada kandidat mendapat dukungan di atas 70 persen? Kandidat yang layak memenangi penghargaan *Demokrasi Tujuh Puluh Persen Award* ini jelas menang telak. Kemenangannya mengingatkan pada istilah yang populer Orde Baru, *single majority*. Tingkat legitimasinya superkuat, kendati belum menjadi jaminan pemerintahan pascapilpres kokoh sekali.

Sejarah kepemimpinan politik di Indonesia misalnya, pernah ditandai oleh basis legitimasi politik pemerintahan Soeharto yang kuat, karena perolehan suara Golkar pada Pemilu 1997 benar-benar fenomenal, dukungan suaranya di atas 70 persen. Namun, gejolak moneter dan politik membuat Soeharto jatuh. Pada era Demokrasi Terpimpin, Soekarno memperoleh dukungan politik "superkokoh", tapi ternyata rapuh. Konteksnya lain-lain. Siapa tahu dalam era demokrasi langsung saat ini dukungan berlimpah betul-betul berkah, bukan bumerang.

ENTITAS DINAMIS

KEINGINAN DAN ikhtiar kandidat tertentu agar pilpres satu putaran dapat dipahami, tetapi bukan merupakan keharusan. Masyarakat tak terlalu memasalahkan apakah pemenang pilpres berpersentase dukungan 70 persen atau tidak. Namun, demokrasi *check and balances* harus tetap jalan. Yang terpenting lagi tanggung jawab pemerintahan pascapilpres dalam membuktikan janji-janji kampanye. Pemilih bukan entitas yang statis, tetapi amat dinamis. Dukungan 70 persen di awal, belum tentu mampu bertahan hingga akhir masa jabatan.

Jatuh bangunnya rezim demokratis tak lepas dari fluktuasi respons kinerja pemerintah. Dalam demokrasi parlementer, fenomena ini tampak sekali. Di Inggris, misalnya popularitas Perdana Menteri Gordon Brown memudar seiring mencuatnya kasus anggaran dan kalahnya Partai Buruh dalam pemilu Uni Eropa. Dalam sistem presidensial, ketidakpuasan biasanya tak sampai membuahkan keputusan mempercepat pemilu, tapi bukan berarti harus diabaikan. Besarnya dukungan justru beban, bahkan arus balik, jika tak diimbangi kualitas kebijakan. Setiap pemimpin dituntut mampu mengelola kekuasaan, tahu cara memulai dan mengakhirinya.●

Pengalaman Pemilu 2009

KOMPAS, 13 JULI 2009

APA yang dapat dicatat dari Pemilu Legislatif dan Pilpres 8 Juli 2009? Tiap orang punya sudut pandangnya. Ada yang biasa-biasa saja, senang, ada pula yang menggerutu, terutama jika namanya tidak tercantum dalam DPT karena hak politiknya hangus. Pemilu 2009 lebih baik atau tidak dapat dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, terutama sejak 1999.

Sistem pemilu sudah berubah dan mengandung beberapa konsekuensi. Misalnya, dengan dibukanya aturan penetapan pera-ih

kursi berdasar suara terbanyak, bukan nomor urut, membuat perilaku politik aktor dan pemilih berubah. Perubahan perilaku di level aktor, terutama calon anggota legislatif, tampak dari hadirnya konsekuensi atas persaingan terbuka antar-aktor internal dan eksternal partai dalam berebut dukungan suara.

Persaingan ketat membuat perilaku pragmatis sering demikian menonjol. Pragmatisme berebut kemenangan juga amat berimbas pada level pemilih. Aktor bersaing berebut pemilih dengan banyak cara, termasuk adakalanya melakukan politik uang bahkan secara demonstratif. Pada level pemilih yang tidak kritis, pilihan ditentukan oleh yang memberi uang terbanyak.

Hal-hal seperti ini terasakan, tetapi sulit dibuktikan apalagi diperkarakan, mengingat banyak kasus yang diungkap Bawaslu pun tak terselesaikan melalui proses hukum. Catatan lain yang sering dianggap kemajuan, justru karena publik sudah mulai merasakan pemilu merupakan bagian kehidupan politik yang biasa-biasa saja. Diskusi dan perdebatan politik (yang ideologis pun) tak sampai memengaruhi aktivitas hidup yang lain.

BANYAK CATATAN KAKI

DI ranah pelaksana, kedua pemilu masih dipenuhi catatan kaki. Yang mengemuka, kisruh DPT. Banyaknya warga yang memiliki hak pilih, tetapi tak tercantum di DPT, membuat mereka tak dapat mengikuti pemungutan suara. Silang sengkarut DPT ini tak sampai membatalkan hasil pemilu, tetapi mengecewakan, suatu catatan buruk. Jumlah golput administratif membengkak, kualitas demokrasi elektoral menurun. Isu sensitif DPT membuka mata agar lebih tertib menata kependudukan dan teknis penyelenggaraan pemilu yang menjamin hak-hak politik warga.

KPU boleh berdalih waktu yang diberikan sempit, mengingat UU tentang Parpol, UU tentang Pemilu, serta UU tentang Pilpres selesai dalam hitungan bulan untuk diimplementasikan. Belum lagi ada pasal multi-interpretatif yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi yang banyak mera-lat

pasal-pasal tertentu membuat suasana terkesan tak pasti dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa elite-elite politik DPR yang menggarap aturan main politik sejak awal tak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan teknis pemilu yang ideal.

MENGGENJOT KUALITAS

PERTARUNGAN kepentingan yang begitu menonjol membuat UU bidang politik bak wadah akomodasi politik yang tambal sulam, tak diawali desain kelembagaan ideal. Akibat sistem didesain tak optimal, buntutnya panjang. Jika mau dirunut, penurunan kualitas pemilu kali ini tak dapat dilepaskan dari perebutan kepentingan antarelite dan partai dalam membuat aturan main (sistem). Tidak ada suatu *blue print* yang jelas, kecuali terbentuk akibat dinamika politik sesaat, jauh dari prinsip permanensi aturan main.

Guna menggenjot kualitas Pemilu 2014, UU bidang politik harus dibongkar agar celah kekisruhan dan konflik politik serta kecurangan tak muncul lagi. Bagaimanapun Pemilu 2009 memberi pelajaran bahwa kualitas demokrasi elektoral kita harus diperbaiki. Indonesia telah dicap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dengan masih banyaknya catatan kaki pelaksanaan Pemilu 2009, Indonesia belum bisa menjadi model yang sempurna.●

Politik Kebudayaan Kita

KOMPAS, 31 AGUSTUS 2009

RAMAI-ramai protes klaim Tari Pendet oleh pihak tertentu di Malaysia, mengingatkan kita pada klaim-klaim atas produk kebudayaan Indonesia lainnya. Sejauh manakah politik kebudayaan kita? Desain besar apa yang harus dihadirkan pasca-polemik kebudayaan tak lagi terdengar? Munculnya aneka protes sebagai bentuk ketersinggungan atas klaim produk-produk kebudayaan kita oleh Malaysia seharusnya segera memicu perlunya dipikirkan kembali hal-hal mendasar atas politik kebudayaan kita. Hendak di-

arahkan ke mana kebudayaan bangsa ini?

Berbagai kebudayaan yang sudah sejak dulu dan melekat ke dalam identitas Indonesia tidak lepas dari proses interaksi dengan pengaruh-pengaruh bangsa-bangsa lain. Tidak ada produk budaya yang murni hadir tanpa proses interaksi dengan yang lain. Yang menjadi khas adalah saat ada tafsir yang estetis diwujudkan ke berbagai bentuk produk kebudayaan. Lokalitas itulah yang otentik.

Karena itu, meski pernah didefinisikan kebudayaan nasional puncak kebudayaan-kebudayaan daerah, bukan berarti homogenisasi produk-produk kebudayaan lokal. Indonesia merangkai mosaik khazanah kebudayaan yang kaya, *Bhinneka Tunggal Ika*. Yang diributkan dengan Malaysia lebih banyak konteks kebudayaan materi. Padahal, kebudayaan bersifat abstrak (nonmateri), tidak dapat dikuantitatifkan. Karena itu, tugas pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tak dapat dipaksakan diderivasikan ke angka-angka. Ketika kebudayaan didepartemenkan, harus jujur diakui, justru terasa mempersempit makna kebudayaan itu sendiri.

REORIENTASI POLA PIKIR

SATU PENINGGALAN berharga atas Polemik Kebudayaan 1930-an yang melibatkan Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Soetomo, Ki Hadjar Dewantara, Purbatjaraka, dan lainnya adalah mengajarkan kepada kita pentingnya pola pikir kebudayaan yang tepat bagi bangsa kita yang plural ini. Di wilayah gagasan, masalah kebudayaan kita belum selesai.

Polemik kebudayaan perlu dilanjutkan, setidaknya untuk merangsang progresivitas pemikiran kebudayaan kita sebagai bangsa yang harus lebih maju. Bahaya besar akan muncul jika soal-soal gagasan kebudayaan tidak lagi didiskusikan secara terbuka dan merangsang suatu pemikiran terobosan bagi bangsa yang saat ini banyak dirundung masalah ini. Polemik kebudayaan itu jangan hanya disimpan di laci sejarah.

Jika kesadaran kebudayaan (maknanya lebih luas ketimbang kesenian) telah tertanam di benak kita sebagai bangsa yang besar

dan punya banyak potensi, setidaknya upaya untuk menemukan kembali orientasi kita sebagai bangsa yang digagas oleh pendirinya berdasarkan falsafah Pancasila tidak sulit.

KEKUATAN PEMIKIRAN

KEBANGGAAN SEBAGAI bangsa tak pernah lepas dari kekuatan pemikiran. Jika tak pernah ada rangsangan dan gairah menyalanyala tradisi berpikir kebudayaan, kita tak akan pernah menemukan letak kebanggaan itu dan tanpa sadar melarutkan diri ke tengah pusaran negativitas globalisasi, menjadi bangsa inlander kembali.

Kita berada pada abad yang besar, kata Hatta mengutip penyair Jerman, Schiller, tetapi menemukan "orang-orang kerdil". Sindiran itu masih terasa hingga kini. Orang kerdil yang dimaksud, malas berpikir dan berbuat, apalagi mencipta karya besar bagi kejayaan bangsanya. Kita sudah banyak ketinggalan dalam kompetisi "di segala bidang" dengan bangsa-bangsa lain. Terinspirasi Hatta, kita harus bergerak cepat. Tinggalkan pepatah "biar lambat asal selamat". Ubah menjadi "harus cepat dan selamat". Soal klaim tari Pendet oleh pihak lain, pemerintah bisa segera mengambil langkah nyata, termasuk mematenkan banyak khasanah kebudayaan kita. Namun, kebudayaan tak sekadar terkait hal-hal demikian, tetapi terutama cara berpikir dan bertindak kita.●

Yudhoyono dan Labirinnya

KORAN TEMPO, 29 oktober 2009

TATKALA PRESIDEN SBY mengumumkan menteri-menteri yang tergabung di dalam KIB II, saya teringat salah satu novel menarik sastrawan Nobel, Gabriel José García Márquez, *The General in His Labyrinth* (1989). Novel ini mengisahkan harihari terakhir pemimpin pembebasan Kolombia, Simón Bolívar. Sang jenderal dihadapkan pada labirin permasalahan yang diciptakannya sendiri agar ia mampu memenangi strategi. Novel ini setidaknya

mengingatkan pembaca bahwa entah mengapa orang besar suka menciptakan labirinnya sendiri.

Dalam mitologi Yunani, *labyrinth* (*labyrinthos*) mengacu pada suatu struktur desain bangunan yang diciptakan oleh Daedalus, yang fungsinya untuk menahan Minotaur, makhluk setengah manusia setengah kerbau yang akhirnya dibunuh oleh pahlawan Athena, Theseus. Daedalus telah membuat labirin tersebut demikian rumit sehingga bahkan ia sendiri hampir tidak bisa melarikan diri setelah membangunnya. Adapun Theseus dibantu oleh Ariadne, yang memberikan gulungan benang sebagai petunjuk untuk dapat menemukan jalan keluar dari labirin yang rumit itu.

Dalam perkembangannya, labirin dipahami sebagai taman yang dirancang dengan banyak percabangan yang rumit penuh teka-teki dengan pilihan jalur dan arah yang penuh jebakan. Siapa yang masuk ke bangunan labirin, akan banyak menemukan jalan tertutup, dan susah keluar, walaupun ada jalan keluarnya. Siapa bisa keluar dari labirin, sepertinya ia telah berhasil mengurai benang kusut.

GAYA YUDHOYONO

APAKAH Presiden Yudhoyono telah salah mengambil keputusan? Tak dapat dikatakan demikian, walaupun masing-masing orang, apalagi pengamat politik, punya catatan berbeda-beda. Presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat siapa saja menjadi bagian dari KIB II. Termasuk, pada menit-menit terakhir, ketika Presiden memutuskan mengangkat Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Nila Juwita Anfasa Moeloek.

Presiden memiliki gaya tersendiri dalam merekrut para calon menteri, dengan cara memanggil mereka ke kediaman di Cikeas, memberi petunjuk, membuat pakta integritas yang harus diteken, serta melakukan tes kesehatan yang, sengaja atau tidak demonstratif. Wartawan meliput adegan-adegan itu, dan menayangkannya seperti sebuah siaran *infotainment*. Menurut Hatta Rajasa, (Menteri Koordinator Perekonomian), apa yang dilakukan Presiden Yudhoyono merupakan sebuah tradisi baru.

Presiden Yudhoyono, bagaimanapun, telah mampu menaikkan pamor Cikeas sebagai salah satu "pusat kekuasaan" penting saat ini, sebagaimana Cendana pada masa Orde Baru. Tetapi tentu saja Yudhoyono berbeda dengan Soeharto, baik dalam konteks kehadirannya ke panggung politik maupun gaya kepemimpinannya. Dalam memilih menteri, Soeharto melakukannya secara diam-diam, walaupun yang dipilihnya ada kalanya mengejutkan.

Yudhoyono hadir tak lepas dari konteks popularitas tokoh. Barangkali, sebagaimana dicatat juga oleh Fachry Ali, dalam sejarah kepresidenan kita, dalam hal-hal tertentu, Yudhoyono mampu menyejajari popularitas Soekarno, presiden Indonesia pertama kali. Yudhoyono merupakan presiden yang pertama kali dipilih melalui pemilihan umum langsung, dan derajat keterpilihannya pada pemilihan presiden 2009 lebih dari 60 persen, sehingga ia dan Boediono sebagai pasangannya melenggang sebagai pimpinan nasional 2009-2014.

Ciri politik pemerintahan Presiden Yudhoyono dan KIB II kali ini lain dengan sebelumnya. Kali ini Yudhoyono sudah lebih *by design* dalam menghadirkan diri dan membentuk kabinet, ketimbang lima tahun lalu yang kesannya lebih banyak yang by accident, termasuk ketika memilih pasangannya, yakni JK. Seperti diprediksi banyak pengamat, hubungan politik Yudhoyono-Kalla tak berlanjut, dan kini tampillah ke panggung politik, Boediono, ekonom yang dikenal tidak suka banyak bicara.

LABIRIN

KARENA *by accident*, eksistensi Kalla bagi Yudhoyono seperti sebuah labirin. Tentu dengan tidak mengecilkan peran Kalla, kesannya pecah kongsinya Yudhoyono-Kalla karena Yudhoyono merasa kurang lagi pas bersanding dengan sosok yang berkarakter saudagar. Ciri persaingan pengaruh memang terasa pada tahun terakhir pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Dan, tatkala Yudhoyono memutuskan tak lagi berpasangan dengan Kalla, sepertinya Yudhoyono berhasil keluar dari labirinnya.

Tetapi, tatkala KIB II diumumkan, dan ternyata komposisi politikus lebih dominan ketimbang teknokrat atau profesional, sementara kalangan menilai bahwa Yudhoyono tidak menggunakan kapasitas optimalnya dalam membentuk kabinet ahli. Dengan kata lain, kabinet yang disusunnya bisa menjadi bumerang bagi masa depan pemerintahannya, mengingat terlampau mengandalkan pembagian kekuasaan (*power sharing*) dengan partai-partai politik pendukung, dan dalam beberapa pilihan tanpa mengedepankan kompetensi. Yudhoyono telah menciptakan labirinnya.

Pihak Yudhoyono sendiri lebih menginginkan suatu postur kabinet kerja, dan dengan demikian tidak ingin terjebak pada polemik kabinet ahli (*zaken kabinet*). Karena itulah susunan kabinet yang mengakomodasi para politikus partai dianggap sudah pas. Yang penting adalah kinerjanya kelak, yang akan terus dievaluasi. Dalam logika ini, justru Yudhoyono tidak hendak membuat labirin, tatkala para menterinya terikat pada pakta integritas yang telah mereka teken. Tapi, kalaupun dikatakan Yudhoyono membuat labirin, ia sudah memegang kuncinya.

Apakah Yudhoyono sedang membuat labirinnya atau tidak tentu tergantung penafsiran masing-masing. Tetapi, tentu saja sebagaimana presiden-presiden sebelumnya, Yudhoyono punya kelebihan dan kekurangan. Setidaknya Yudhoyono di masa kini dapat belajar dari pengalaman-pengalaman presiden sebelumnya. Pada masa lalu, Soekarno terjerat oleh labirin yang diciptakannya, yakni poros politik Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Entah, setuju atau tidak, Soeharto pun terjerat labirin Dana Moneter Internasional (IMF). Presiden B.J. Habibie kurang beruntung dengan kasus jajak pendapat Timor Timur.

Sementara itu, labirin KH Abdurrahman Wahid terlampau berkelok-kelok, rumit dan berpuncak pada Maklumat Presiden yang minus dukungan. Adapun Presiden Megawati Soekarnoputri tak mampu mempertahankan popularitas pemerintahannya dan gagal terpilih kembali dalam pemilihan presiden langsung.

Yang menjadi permasalahan utama bagi Yudhoyono pascapenyusunan kabinetnya adalah bagaimana membuat KIB II efektif. Yudhoyono harus membuktikan bahwa ia tidak sedang membuat labirin. Karena itu, capaian 100 hari kerja ini sangat penting untuk dilihat, apakah personalia KIB II mampu menunjukkan performa sebagai bagian integral dari sebuah kabinet kerja.

Menteri yang kinerjanya kurang bagus layak dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diganti. Tetapi, kalaupun akan ada beberapa kali *reshuffle* kabinet, hendaknya Yudhoyono lebih mengedepankan perspektif kompetensi, selain tentu saja keseimbangan politik. Dengan demikian, Yudhoyono tetap dapat keluar dari labirin yang diciptakannya.●

Pansus Century dan Kontrol Publik

KOMPAS, 8 DESEMBER 2009

PADA 1 Desember, Pansus Hak Angket Kasus Bank Century DPR disepakati, diketuai politisi Partai Golkar, Idrus Marham. Beragam pendapat menyertai pembentukannya. Ada yang meragukan, bahkan mencemaskan bahwa ini merupakan "sandiwara politik". Namun, ada juga yang optimistis, pansus DPR akan bekerja "tidak main-main" karena ada kontrol publik. Yang jelas pansus merupakan pendekatan politik atas kasus menghebohkan, bukan saja di dunia perbankan, tetapi juga keadilan. Sejauh mana pansus bekerja tentu tergantung banyak faktor, antara lain sejauh mana efektivitas kontrol publik.

Publik kritis harus menyadari, memang demikianlah realitas politik di DPR saat ini setelah pansus berikut komposisi pimpinannya terbentuk. Realitas itu tak dapat diubah karena merupakan cermin aneka kekuatan politik hasil pemilu yang dijalankan secara demokratis. Publik hanya bisa kritis mengawasi, memberikan se-

mangat, masukan, dan hal-hal lain agar pansus dapat bekerja dengan baik, menghasilkan keputusan optimal.

Pimpinan pansus tentu bukan yang menentukan segalanya. Mereka hanya semacam — meminjam istilah JK — moderator. Mereka menyusun agenda, aksi, atau langkah-langkah bersama anggota pansus lain, yang prosesnya, seperti tergambar dari sidang-sidang mereka, dilakukan secara terbuka.

Sidang Paripurna DPR sudah menyepakati, sidang-sidang pansus harus dilakukan secara terbuka. Ini tentu merupakan perkembangan signifikan bagi dunia demokrasi politik nasional dan merupakan peluang bagi publik untuk ikut terlibat berbagai persidangan itu, meski tidak memiliki hak suara, tetapi dapat mencatat apa saja perkembangan yang terjadi dari hari ke hari. Publik punya hak bicara di media dan jika DPR memerlukan kesaksian para tokohnya.

MERAWAT AKAL SEHAT

WAJAR jika publik terperangah dengan kasus Bank Century. Dari sisi akal sehat, publik merasa terpukul atas kejadian ini, mengingat adanya aspek penistaan atas keadilan. Proses pengambilan kebijakan penalangan Bank Century memunculkan pro-kontra. Namun, setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan hasil audit investigasinya, ternyata banyak hal dilanggar. Juga terkait penyelewengan penggunaan dana, atau kejahatan perbankan.

Kini, proses politik berjalan seiring proses hukum. Antara politik dan hukum memang amat berkaitan, tetapi hasil akhir keputusan politik DPR akan sangat ditunggu. Keputusan politik tentu akan memunculkan pro-kontra politik. Maka, manakala keputusan pansus dipandang tidak obyektif, dikhawatirkan gejolak politik akan terjadi. Namun, jika keputusan politik pansus sejalan dengan akal sehat dan penjelasannya dapat dipahami publik, gejolak politik dapat diredam.

Yang dimaui publik kejujuran dan obyektivitas. Jangan sampai dua hal itu tenggelam oleh arogansi dan subyektivitas kekuasaan. Memang, ranah politik biasanya susah dipahami, justru karena

banyaknya adegan politik yang kontradiktif. Pansus pun ditantang untuk (1) bekerja dengan alur yang tidak menenggelamkan obyektivitas; (2) mampu menyimpulkan hasil kerja secara obyektif, tentu dengan menomorsatukan keadilan, bukan menang-kalah politik.

EKSTRAPARLEMENTER

GERAKAN ekstraparlementer yang marak di luar DPR juga merupakan realitas obyektif. Pasang surut ekstraparlementer selaras dengan derajat kepuasan publik terhadap kinerja politik DPR. Namun sebagaimana di DPR, gerakan itu pun heterogen. Suatu aksi bisa ditandingi yang lain. Hal itu biasa, yang penting jangan sampai memicu kekerasan dan kekacauan. Pemerintah pun wajib mencegah kekacauan. Idealnya diterapkan pendekatan lembut, bukan keras yang berpotensi memunculkan masalah baru.

Idealnya, aksi-aksi publik adalah gerakan moral, terlepas dari dapat berdampak politik. Gerakan ekstraparlementer, bagaimanapun, merupakan catatan kaki yang harus diperhatikan oleh mereka yang bersidang di dalam gedung DPR. Bisa saja ekstraparlementer bukan *vis à vis* dengan mereka, tetapi justru komplementer. Karena itu, sebenarnya DPR harus punya hubungan atau komunikasi yang baik dengan berbagai gerakan publik, yang pada dasarnya merupakan bentuk ekspresi berpendapat.●

XII

ORANG BESAR DARI MANA DATANGNYA?

[2010]

"*ALL MY GAMES*," KATA INDIRA GANDHI, PERDANA MENTERI PEREM-PUAN INDIA PADA MASANYA, "*WERE POLITICAL GAMES*". POLITISI MESTINYA SADAR BAHWA SEJAK AWAL POLITIK ADALAH JUGA MERUPAKAN SUATU PERMAINAN, TAK SEKEDAR ADU KETANGKASAN TETAPI LEBIH DARI ITU ADALAH ADU KEKUATAN. PENDEKATANNYA, BISA SECARA KERAS (DOMINATIF) ATAU SEBALIKNYA LEMBUT (*SOFT*) ATAU HEGEMONIK. DALAM MENYERANG DAN BERTAHAN, POLITISI BISA BERGAYA SEPERTI APAKAH MOHAMMAD ALI ATAUKAH MIKE TYSON DALAM BERTINJU

- MERENUNGI POLITIK KITA

Orang Besar, Dari Mana Datangnya?

KOMPAS, 5 JANUARI 2010

KH ABDURRAHMAN Wahid atau Gus Dur wafat. Sebuah pertanyaan terlintas, dari mana datangnya orang besar? Tak dapat dimungkiri, terlepas ragam kontroversi, Gus Dur orang besar milik bangsa. Gus Dur milik semua, termasuk kalangan minoritas yang mengusungnya sebagai tokoh pluralisme. Gus Dur, oleh berbagai kalangan dengan sudut pandang, sosok multiperspektif. Menurut Jaya Suprana, Gus Dur yang humoris itu hanya permukaannya saja, hatinya humanis. Di kalangan *Nahdlatul Ulama* Gus Dur kerap dianggap seorang wali. Bagi yang berseberangan pandangan, Gus Dur hanyalah sosok yang menyebalkan.

Bagi yang dekat dan rasional, Gus Dur itu manusia biasa yang punya sisi makro dan mikro. Gus Dur makro hadir dengan ikon tema-tema besar, seperti humanisme, pluralisme, demokrasi, dan universalisme. Gus Dur mikro kontradiktif dengan tema-tema tersebut sehingga memunculkan penilaian Gus Dur otoriter, tak konsisten, dan *semau gue*. Tapi, Gus Dur tetaplah orang besar. Ia pernah menjadi presiden setelah memperoleh momentum politik tepat pasca-Pemilu 1999 ketika proses politik di MPR bermuara pada munculnya sosok "juru penengah" yang diyakini mampu merangkul semua pihak.

SALAH TEMPAT

GUS DUR SEBUAH resultan politik. Tanpa menjadi presiden pun, Gus Dur sesungguhnya tetap orang besar. Ia intelektual yang mempunyai integritas, punya komunitas kultural NU dan partai politik.

Ia pemikir yang punya massa dan jaringan pertemanan yang luas. Justru politik kekuasaan membuat kebesaran Gus Dur teruji. Banyak kebijakannya yang "revolusioner" dan wacananya yang "terlampau berani". Gus Dur meresmikan tahun baru *Imlek*, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, membubarkan Departemen Sosial, Departemen Penerangan, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, menjajaki kemungkinan kerjasama politik dengan Israel, hingga meminta maaf kepada eks-anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai korban politik. Ada yang disambut baik, ada yang menyisakan kontroversi dan penolakan.

Banyak yang mengkritik Gus Dur sebagai presiden, yang sengaja atau tidak kebijakannya *blunder bagi* stabilitas kekuasaannya. Gus Dur akhirnya dilengserkan "di tengah jalan" melalui Sidang Istimewa MPR. Tukang kritik Butet Kartaredjasa menilai Gus Dur tokoh besar yang ketika menjadi presiden salah tempat, karena sejatinya tempatnya punakawan. Gus Dur itu Kiai Semar yang bijak. Ketika menjadi presiden, tak heran apabila banyak memunculkan "kegegeran". Betapapun demikian, di tengah wacana dan upaya mendekonstruksi banyak hal, Gus Dur tetap dikagumi kawan dan lawan. Sepeninggalnya nyaris tak ada sosok yang mampu menandinginya sebagai orang besar yang khas di tengah realitas Keindonesiaan yang penuh anomali.

MELAMPAUI DARAH BIRU

GUS DUR BUKAN saja sosok pemimpin (kultural dan politik) yang hanya dapat dijelaskan dalam perspektif *trait theory*. Dalam perspektif tersebut, orang besar itu dilahirkan. Aspek genetis alias "darah biru"-lah yang paling banyak memengaruhi. Darah kepemimpinan Gus Dur mengalir dari kakeknya, KH Hasyim Asy'ari dan ayahnya, KH Wahid Hasyim.

Dalam tradisi NU, Gus Dur memiliki legitimasi "darah biru" yang sangat kuat. Tetapi, ia memproses kehadirannya tanpa sekadar mengandalkan legitimasi tersebut. Ia sosok yang disiplin di dunianya, keintelektualan. Dalam konteks ini, ia menjadi manusia

penjelajah dunia wacana, berdiskusi, dan beraktivitas sosial. Ia kritis terhadap metodologi pembelajaran perkuliahannya sewaktu di Mesir. Ia tumbuhkan metodologi ilmu di dalam dirinya. Akan tetapi, ia pun mempunyai kepekaan budaya yang tinggi, humanis, dan sederhana. Visinya jauh menjangkau di luar komunitas NU.

Gus Dur, karenanya, tidak hanya sebatas elite, yang terseleksi secara "genetis", tetapi leader yang memiliki visi tajam, wawasan budaya yang baik, dan teruji. Gus Dur adalah sosok pemimpin yang jauh melampaui modal genetik yang dimilikinya, dan sesuai dengan nama aslinya, Abdurrahman Addhakil, ia kualitatif, "mendobrak" dan "menaklukkan". Ia unik dan Indonesiawi.●

Testimoni Century dan Rashomon

KOMPAS, 28 JANUARI 2010

KETIKA MASYARAKAT bingung dengan aneka testimoni atas mereka yang dimintai keterangan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century DPR, saya ingat kumpulan cerpen Ryunasuke Akutugawa, *Rashomon* (edisi bahasa Inggris, 1952). Dalam *In a Grove* (Di dalam Belukar), Akutugawa mengisahkan "kebenaran" yang dipaparkan berbagai saksi kasus matinya sesosok lelaki.

Kesaksian penebang kayu di hadapan penyidik berbeda dengan yang dipaparkan pendeta pengembara. Kesaksian seorang bekas penjahat, nyatanya berbeda dengan yang dipaparkan sang perempuan tua. Pengakuan Tajomaru pun berbeda dengan pengakuan dosa seorang perempuan yang datang ke Kuil Kiyomizu. Akhirnya, semua kesaksian itu berbeda dengan kisah roh lelaki yang mati itu melalui mulut Biksuni Kuil Shinto.

Pembaca yang jeli pun perlu berkernyit dahi: versi testimoni mana yang paling benar? Apakah kisah roh itu yang paling otentik? Apakah roh itu benar-benar bebas kepentingan? Kalaupun satu tes-

timoni dengan yang lain dirangkai, apakah konstruksi cerita barunya yang paling benar?

Satu peristiwa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Testimoni-testimoni kisah Akutugawa itu ada yang saling menyokong, ada yang menegasikan, sebagaimana pula testimoni para saksi kasus Century. Merangkai testimoni mozaik kebenaran pun susah, mengingat perspektif yang dimintai keterangan berbeda-beda. Publik susah membedakan kebenaran dan pembenaran. Kelak, kebenaran politiklah yang akan mengakhiri.

Hal ini bisa dipahami, mengingat testimoni-testimoni di DPR itu merupakan bagian dari proses politik, yang tentu saja tak dapat dilepaskan sepenuhnya dari subyektivitas politik antarkekuatan (kepentingan). Arena "pengadilan politik" DPR itu tak lepas dari perspektif "pertunjukan politik", yang karena terbuka untuk publik, maka berkembanglah banyak versi opini dan penilaian.

"Kebenaran politik", berisiko bertentangan dengan "rasa keadilan dalam masyarakat". Masyarakat berharap "kebenaran politik" tak jauh dari "kebenaran yang sejati" (*bener kang sejati*, yang sebenarnya alias substansial), satu dari berbagai versi kebenaran: kebenaran versi diri sendiri (*benere dewe*, versi testimoni), kebenaran orang banyak (kebenaran demokratis alias *benere wong akeh*), dan kebenaran hukum formal (pasal-pasal perundang-undangan). Proses politik jangan mengingkari proses hukum. Negara kita negara hukum. Tetapi, tentu semua berharap ujung proses politik itu tak berlanjut secara tak terkontrol (*out of control*).

ROH KEJUJURAN

DALAM kisah Akutugawa, karena susahnya mencari titik temu kebenaran dari berbagai versi testimoni, hakim terpaksa mencari versi kebenaran lain, langsung dari roh lelaki yang mati. Barangkali roh orang mati dapat berkata lebih jujur dari saksi-saksi yang masih hidup. Persoalannya, apakah kesaksian roh orang mati dapat dipegang sebagai suatu "kebenaran"?

Salah satu pesan sederhana tetapi mendasar dari kisah Akutugawa itu adalah betapa mahal harga kejujuran, dan betapa ia harus terus dicari walaupun dari roh orang mati. Ini merupakan suatu kritik sosial yang sangat serius: apakah sudah tak ada lagi kejujuran di tengah-tengah orang yang masih hidup? Lebih detail lagi, apakah sudah tak ada lagi kejujuran di tengah-tengah orang-orang politik?

Almarhum Gus Dur suka membawa tema yang mengaitkan antara politik dan kejujuran walaupun kejujuran dalam politik itu menyisakan pertanyaan serius: kejujuran versi siapa? Sayangnya, tidak ada pertanda yang nyata yang dapat dilihat orang, seperti kisah Pinnokio, yang semakin ia berbohong, maka hidungnya semakin panjang. Kejujuran semakin "susah diukur", tetapi barangkali masih bisa dirasakan oleh "hati nurani kolektif".●

Merenungi Politik Kita

KOMPAS, 9 MARET 2010

MENCERMATI *DAY to day* politik pasca-menangnya Opsi C sebagai rekomendasi Sidang Paripurna DPR, yang kemudian disambut pidato Presiden SBY, Wapres Boediono, dan Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, rasa-rasanya kita berada di dalam situasi politik yang semakin konfrontatif. Telah terjadi *quasi*-Bharatayuda di jagat politik kita. Barangkali berlebihan kesan demikian, tetapi, bukankah yang cukup menonjol belakangan adalah pengertian politik sebagai sebuah adu kekuatan?

Pada 1936, ilmuwan politik Amerika Serikat, Harold Dwight Laswell, menerbitkan buku *Politics: Who Gets What, When, How*. Judul buku tersebut merupakan definisi politik menurut pengertiannya. Sengaja atau tidak, Laswell telah menanamkan pengertian yang paling pragmatis atas politik, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Apa yang dilontarkannya itu sangat mudah dipahami, bahwa memang demikianlah politik.

Akar konfrontasi, dari kacamata Laswell, terjadi ketika definisi tersebut diterapkan dan mengundang ketidakpuasan dari para pelaku kunci politik. Pengertian "mendapatkan sesuatu", bukan berarti yang bersifat fisik, seperti uang atau materi lain, tetapi, tentu juga yang non-material, seperti ideologi, kedudukan, harga diri, dan gengsi. Di dalam "mendapatkan sesuatu", semua kekuatan politik saling bersaing di dalam suatu arena permainan politik.

"*All my games*," Kata Indira Gandhi, Perdana Menteri perempuan India pada masanya, "*were political games*". Politisi mestinya sadar bahwa sejak awal politik adalah juga merupakan suatu permainan, tak sekedar adu ketangkasan tetapi lebih dari itu adalah adu kekuatan. Pendekatannya, bisa secara keras (dominatif) atau sebaliknya lembut (*soft*) atau hegemonik. Dalam menyerang dan bertahan, politisi bisa bergaya seperti apakah Mohammad Ali ataukah Mike Tyson dalam bertinju.

Tetapi jangan lupa, politik tidak semata identik adu-kekuatan. Politik juga banyak dibahas dari sudut pandang filsafatnya. Dari Aristoteles kita mengenal ungkapan zoon politicon, manusia pada dasarnya merupakan "seekor binatang politik". Tetapi Aristoteles, tidak berpandangan negatif pada politik, justru ketika ia mendefinisikannya sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

POLITIK DAN MORAL

DALAM FILSAFAT politik, kita juga mengenal istilah *political virtue*, di mana *virtue* itu sendiri bermakna *moral excellence*. Dalam berpolitik, karenanya, moral jangan dilupakan, mengingat urusan politik itu sejatinya adalah urusan moral. Oleh sebab itulah, kita biasa mendengar ungkapan-ungkapan seperti kesetiaan (loyalitas) dan dedikasi, atau pengkhianatan dan penggerogotan dalam politik, dan banyak istilah "moral" lain, dalam konteks *political game*.

Wapres Boediono, dalam pidatonya sebagai repsons pascarekomendasi DPR, menegaskan dirinya tidak akan mundur serta "tidak akan mengkhianati kepercayaan Presiden dan meninggalkan

Beliau". Kalimat "tidak akan mengkhianati" adalah "kalimat moral", yang biasa diungkapkan para samurai di Jepang pada masanya. Dari sudut pandang pendukung Boediono, kalimat itu bijak. Tetapi, tidak demikian bagi para lawan politik yang menghimbau agar dirinya mundur karena telah terdelegitimasi secara politik.

Partai-partai koalisi yang berseberangan pendapat dengan induk koalisi, diprotes sebagai "pengkhianat". Tetapi partai-partai itu berargumentasi pihaknya tidak mau "mengkhianati kebenaran". Dalam konteks ini, "kebenaran" yang dibelanya terletak di Opsi C. Dalam logika praktis koalisi, konsekuensinya mereka harus dihukum keluar dari barisan koalisi pemerintah. Tetapi, tentu saja segera menyusulkan konsekuensinya. Rekalkulasi dan pergeseran peta politik itu biasa di dalam dinamika politik yang demokratis.

MEMAHAMI KONSEKUENSI

DEMIKIANLAH, politik tetap subyektif. Kebenaran politik, tentulah subyektif, dimana pemenuhannya dilakukan dengan cara "adu kekuatan". Kebenaran politik bisa merupakan "kebenaran orang banyak" atau "kebenaran entitas elite politik". Dalam demokrasi, politik juga identik dengan dukungan, baik atas mereka yang dipilih langsung ataupun tak langsung.

Politik juga identik kebijakan publik. Para penentu kebijakan publik, tentu saja adalah pejabat politik. Profesionalitas mereka, mestinya harus dibarengi dengan kesadaran multiaktor. Pejabat politik, akan selalu berhadapan dengan risiko politik. Peristiwa menteri kabinet yang di-*rhesuffle* oleh Presiden, misalnya, tentu merupakan peristiwa politik. Karena itu rancu bila ada pejabat politik mengatakan bahwa dirinya tidak mau berurusan dengan politik.

Politik punya logika sendiri. Orang yang dikenal bersih, sederhana dan jujur, bisa terkena imbas, walaupun bersikukuh mengatakan dirinya tak bersalah. Politik hari ini sering tak dapat dipahami sekarang, tetapi bisa jadi puluhan tahun lagi. Sejarah akan menilai, mengapa MPRS menolak Pidato Nawaksara Bung Karno. Sejarah juga akan menilai yang terjadi di belantara politik kita hari ini.●

Golkar, *Cancut Taliwondo*?

KOMPAS, 9 MARET 2010

MENGERASNYA sikap Partai Golkar dalam pengusutan kasus Bank Century belakangan ini memunculkan pertanyaan serius, apakah partai politik pimpinan Aburizal Bakrie ini telah ber-*cancut taliwondo*, bertekad bulat untuk menghadapi risiko politik dalam berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Pertanyaan itu penting mengingat hal ini menyangkut masa depan koalisi.

Aburizal telah tegas mengatakan bahwa Partai Golkar konsisten mengusut kasus Bank Century, tak akan mundur dan mengubah sikap meski ada ancaman. Sebagaimana diberitakan, belakangan ini Presiden Yudhoyono mewacanakan penegakan hukum terhadap kejahatan pajak serta adanya praktik tidak sehat atau kolusif antara bisnis dan politik yang kian menjadi opini publik.Hal tersebut segera ditafsirkan mengarah kepada Aburizal dan Golkar. Dalam isu pajak, Aburizal meresponsnya dengan mengatakan, "Jangankan ancaman pajak, diancam tembak mati pun Golkar tidak gentar"(*Kompas*, 11/2/2010).

Pernyataan berbalas pernyataan antara Yudhoyono dan Aburizal tampaknya telah menjadi bagian dari suatu psywar yang dikhawatirkan bisa berpola *zero sum game*. Reaksi Aburizal yang keras seolah merupakan konfirmasi bahwa Golkar telah ber-*cancut taliwondo* dalam menghadapi risiko dikeluarkannya Golkar dari kabinet dan koalisi. Dalam psywar ini, faktor reputasi Aburizal sebagai politisi berlatar belakang pengusaha, serta institusi Golkar, turut menjadi taruhan.

DEFISIT MOMENTUM

ASUMSI utama pemerintahan Yudhoyono jilid II memperoleh dukungan politik Golkar, koalisi akan lebih kuat. Meskipun sistem politik yang ada bukan perlementer, tetapi dinamika politik DPR sangat menentukan. Karenanya, kekuatan koalisi diharapkan selalu kompak menopang pemerintah. Namun, asumsi itu tidak sepenuhnya tepat mengingat pola dan motivasi berkoalisi bukan bersifat sangat "ideologis", tetapi cenderung lebih pada "kalkulasi politik yang pragmatis".

Kesepakatan tertulis antara Yudhoyono dan partai-partai koalisi mengatur hal-hal yang bersifat normatif dan garis besar. Tidak dinyatakan di dalamnya suatu *reward and punishment* yang terperinci. Akibatnya, tafsiran partai-partai bisa berbeda dengan apa yang dikehendaki Yudhoyono. Masih ada celah manuver yang dapat dimainkan partai-partai koalisi untuk bersikap berbeda dengan Yudhoyono. Sayangnya, upaya Yudhoyono menyinggung konteks etika politik partai-partai koalisi saja tidak segera membuat mereka bersikap akomodatif.

Di sisi lain, sikap "dua kaki" partai-partai koalisi merupakan fenomena yang disebabkan juga oleh kenyataan kebutuhan untuk populer dan "kepentingan jangka panjang". Karenanya, mereka memainkan jurus kritis di dalam menampakkan wajahnya "di pemerintahan" (*party in the government*). Ini penting mengingat partai berkesempatan menjadi magnet simpati publik, suatu kampanye efektif, selain mengurus organisasi (*party in the office*) dan pengakaran partai (*party rooting*, *party in the grass root*). Partai-partai koalisi tak ingin "defisit momentum".

MASA DEPAN KOALISI

BETULKAH diplomasi politik telah gagal? Suasananya politik demikian menghangat saat ini, tetapi belum sepenuhnya dikatakan gagal. Komunikasi politik masih bisa diperbaiki selama masih ada kesempatan. Dalam konteks ini, gaya berpolitik masing-masing tokoh sangatlah berpengaruh. Gaya politik Aburizal tentu berbeda

dengan pendahulunya, JK. Demikian pula dengan yang lain. Salah paham dalam berkomunikasi tentu bisa jadi bumerang.

Masa depan koalisi tidak semata-mata ditentukan oleh cakupan dan besar struktur insentif kekuasaan (*sharing power*) semata, tetapi juga sangat terkait dengan konteks "harga diri" partai. Ukuran "harga diri" itu abstrak, lebih irasional. Dalam konteks politik "siapa dapat apa", tentu juga tidak semata-mata diukur semata-mata jangka pendek. Partai politik adalah urusan jangka panjang.

Dalam konteks inilah sikap cancut taliwondo Golkar tidak dapat disikapi secara reaksioner pula oleh induk koalisi sehingga membuat suasana "perang potensial" menjadi "perang aktual". Yudhoyono masih butuh dukungan Golkar selama belum ada penggantinya. Peluang untuk merangkul PDIP, misalnya, tampak masih sangat absurd oleh kerasnya sikap Megawati Soekarnoputri.

Masa depan koalisi akan ditentukan dari sikap-sikap politik Golkar dan partai-partai koalisi lain yang belakangan juga berupaya menunjukkan sikap kritis. Golkar dan, terutama Partai Keadilan Sejahtera, akan menjadi faktor politik yang penting yang menentukan masa depan koalisi. Namun, barangkali ada pertimbangan lain dari Yudhoyono agar tidak terjadi jalan buntu politik.●

Musim Kongres Partai-partai

DOKUMENTASI PENULIS, 1 APRIL 2010

DUA partai besar hendak menyelenggarakan kongres mereka dalam waktu dekat, PDIP dan Partai Demokrat (PD). Keduanya menarik untuk disimak. PDIP masih konsisten sebagai oposisi, PD adalah partai pemerintah. Walaupun demikian, sesungguhnya keduanya memiliki beberapa persamaan, yakni berideologi tengah dan ikon politik tokoh (Megawati Soekarnoputri dan SBY).

PD merupakan "bayi ajaib" yang cukup menggemparkan. Pada

pemilu pertama kali, 2004, perolehan suaranya 7,45% (8.455.225) setara dengan 57 kursi di DPR, termasuk jajaran lima besar. Keajaiban terjadi pada Pemilu 2009, ketika suara PD melonjak dratis dengan memperoleh 148 kursi di DPR, setelah mendapat 21.703.137 suara (20,4%). PD berhasil membirukan banyak provinsi, khususnya di Aceh, Jakarta, dan Jawa Barat.

Kemenangan PD membuat partai ini bergeser dari partai menengah ke partai papan atas. Pertanyaannya, apakah PD akan mampu mempertahankan posisinya pasca-SBY? Kemenangan PD disebabkan banyak faktor, salah satunya faktor kharisma politik citra SBY. Personifikasi terjadi pada PD ketika publik mempersepsikannya dengan sosok SBY.

SOSOK-SENTRIS

JANGKA panjang, PD tentu tidak boleh lagi sosok-sentris, tetapi sebagaimana dikatakan SBY sendiri, harus menjadi partai modern yang mandiri. Problem mendesak PD yang harus dijawab oleh kongres, bagaimana partai ini meletakkan dasar-dasar transformasi dari partai citra (jangka pendek) menjadi partai sistem (jangka panjang). SBY memang masih dibutuhkan, karena alasan historis dan psiko-politik. Tetapi, peran-peran itu harus proporsional, agar tidak menjadi bumerang.

Di sisi lain PDIP juga memiliki problem ketergantungan pada sosok. Seorang pengurus teras partai ini pernah mengatakan, tanpa Megawati, PDIP sudah lama diakuisisi dan di-*bailout*. Megawati masih menjadi tumpuan harapan PDIP ke depan, walaupun secara politik terbaca mengemukanya konflik dirinya dengan Taufik Kiemas. Kubu Megawati masih tetap menghendaki PDIP sebagai oposisi. Tetapi kubu Taufik sebaliknya. Inilah yang menjadi persoalan hangat di Kongres PDIP.

Tetapi, yang jauh lebih penting bagaimana mengangkat kembali citra PDIP yang perolehan suaranya anjlok pada pemilu terakhir. PDIP mendapat 93 kursi (16,6%) di DPR setelah mendapat 14.600.091 suara (14,0%) pada Pemilu 2009. Dengan hasil tersebut,

PDIP menempati posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR. Padahal sebelumnya kedua (2004) dan pertama (1999).

Dari sisi transformasi partai sosok ke partai sistem, sesungguhnya PDIP lebih siap. Sumberdaya politik PDIP sudah terbentuk sedemikian rupa. Hanya saja, para elite PDIP masih sangat memerlukan sosok Megawati sebagai simbol (ikon) dan sekaligus patron. Dalam konteks yang hampir sama, para elite PD juga memperlakukan SBY demikian. PDIP dan PD ialah contoh kasus bagaimana partai politik memiliki problem demokrasi internal yang hampir sama.

Pola demokrasi internal partai-partai saat ini terkesan masih belum begitu jauh berbeda dibandingkan dengan yang dialami Golkar pada masa Orde Baru yang didominasi oleh peran Ketua Dewan Pembina. SBY di PD dan Soeharto di Golkar Orde Baru, sama tetapi berbeda. Keduanya, sama-sama berperan sangat strategis di organisasi, hanya lingkungan internal dan eksternal politiknya saja yang berubah. Problem demokrasi internalnya hampir sama.

Partai Golkar era reformasi telah memangkas eksistensi Dewan Pembina yang punya peran luar biasa itu, mereduksinya sebagai Dewan Penasihat dan belakangan Dewan Pertimbangan, yang tidak memiliki fungsi eksekutor kebijakan. PKB juga ada struktur Dewan Syuro. Pada saat ketua Dewan Syuro dijabat Abdurrahman Wahid (Gus Dur), internal partai justru mengalami perpecahan serius. Ada perlawanan yang dramatis atas Gus Dur. Kasus PKB merupakan kisah yang menunjukkan bahwa konflik internal partai secara terbuka bukan tidak mungkin terjadi, justru ketika ada sosok yang dianggap kuat secara politik, tetapi sudah tak lagi efektif.

PARTAI MASA DEPAN

TEORITIS partai sistem lah yang awet. Tetapi, pada praktik politik di Indonesia, menuju ke sana tidak mudah. Kultur patronase dan tradisi menjunjung tokoh, membuat upaya membangun partai sistem kerap tersisihkan. Demokrasi langsung juga membuat paradigma membangun kelembagaan partai, sering tergusur oleh paradigma idoalisasi alias kontes idola. Yang terakhir ini memang perlu,

tetapi kalau hanya hal itu yang ditekankan, maka partai bisa keropos, karena tidak pernah menjadi partai yang sebenarnya.

Dalam membangun kelembagaan partai yang berorientasi jangka panjang, di perlukan basis nilai (ideologi) yang jelas, kesisteman yang tertata, baik perkaderan, keuangan, struktur dan infrastruktur. Juga adanya proses demokrasi internal yang baik, manajemen konflik yang canggih, sehingga soliditas tetap terjaga. Baru setelah itu, pencitraan yang baik, yang otomatis akan terjadi ketika partai mampu mengoptimalkan perannya di tiga wilayah: *in the government* (parlemen dan pemerintahan), *in the office* (administrasi yang baik yang berjalan sesuai paradigma kelembagaan), dan *in the grass root* (persentuhan kualitatif dengan masyrakat). Dari sisi masyarakat, yang diinginkan adalah partai-partai yang sehat dan fungsional.●

Mengelola Politik Karisma

KOMPAS, 15 APRIL 2010

DEMOKRASI MENISCAYAKAN karisma. Hingga kini kita masih menyimak banyak fenomenanya. Di Indonesia, tak hanya Megawati yang mempertegas posisinya sebagai Ketua Umum PDIP, tetapi juga SBY yang restunya menentukan siapa pucuk pimpinan Partai Demokrat. Di Thailand, demonstran Kaus Merah yang menggegerkan pentas politik, tak lepas dari efek karisma mantan PM Thaksin Shinawatra. Di AS, hadirnya Barack Obama sebagai presiden juga tak dapat dielakkan dari karisma.

Sosiolog Max Weber pernah menjelaskan otoritas karismatis. Ia terkait persepsi adanya individu yang memiliki karakter pribadi dan kesucian luar biasa, heroik, serta berdimensi kewahyuan. Otoritas karismatis ini bersifat familial dan keagamaan (*religious*). Otoritas tradisional bersifat patriarkal, patrimonial, dan feodal. Otoritas legal lebih terkait pada aspek hukum dan kenegaraan modern dan

bersifat birokratis.

Dalam konteks kekuatan karismatis, Joseph Nye mencatatnya sebagai *the special power of a person to inspire fascination and loyalty*. Dalam tulisannya *The Mystery of Political Charisma* (*The Wall Street Journal*, 6/5/2008), Nye mengulas hal-hal yang dikaitkan dengan fenomena politik karisma, khususnya atas Obama. Apakah karisma tumbuh dari individu, para pengikut (*followers*), atau di dalam situasi tertentu? Nye melihat karisma Obama terletak pada pengikutnya, yang terbimbing dalam menentukan calon yang tepat, justru sebagai cermin kebutuhan mereka ketika suasana negara yang menghendaki perubahan.

Para ilmuwan politik telah mencoba mengukur skala karisma, misalnya dalam menentukan peringkat kandidat presiden. Dalam proses kuantifikasi tokoh ini, karisma ternyata bukan untuk semua orang dan bersifat fluktuatif. John F. Kennedy yang sering dianggap karismatis misalnya, gagal meraup mayoritas *popular vote* pada Pilpres 1960, peringkat popularitasnya pun fluktuatif selama menjadi presiden. Obama juga demikian. Rating popularitasnya fluktuatif, apalagi ketika beberapa kebijakan tak populer ditempuh.

Jelas, karisma tak sekadar *the mandate of heaven*. Karisma selalu diuji. Apa yang di Indonesia dikenal "Ratu Adil" yang mesianistis tetap akan ada batasnya, justru ketika suatu saat disimpulkan akan tak ada pemimpin yang mumpuni. Jatuh bangunnya pemimpin yang ironis, setidaknya mencatatkan hal itu.

Adakalanya, karisma situasional dan kontekstual. Nye mencontohkan Winston Churchill. Pada 1939, Churchill sangat karismatis, sepak terjangnya memukau membangkitkan rakyat Inggris di masa Perang Dunia II. Namun, pasca-1945, ketika masyarakat berbalik dari memenangkan perang untuk membangun negara kesejahteraan, karismanya menurun dan harus pensiun dari politik. Apa yang diilustrasikan Nye memberi pesan, semua politisi butuh karisma, tetapi persoalannya apakah ia mampu mengelolanya untuk memprediksi sebagai pemimpin sukses.

KECERDASAN PEMIMPIN

KITA TIDAK dapat menyalahkan karisma. Harus kita akui, dalam masyarakat modern pun, hadirnya persepsi politik, bahkan yang bertipe *pejah-gesang* pun masih dimungkinkan. Dalam konteks Indonesia, Asia Tenggara, bahkan Asia, yang memiliki sejarah dan tradisi feodalistis panjang, psiko-politik irasional-karismatik masih terasa. Politik dinasti suka mengejewantah dalam berbagai bentuknya, terutama juga di daerah-daerah, seiring pilkada langsung.

Manakala pola politik karisma mengarah ke ketidakcerdasan, sangat disayangkan. Yang terpilih semestinya tak berhenti sebatas menjadi elite, tetapi harus menjadi pemimpin (*leader*). Dalam masyarakat yang semakin rasional, manakala pemimpin karismatis gagal, masyarakat akan mencari sosok-sosok baru.

Citra karismatis dibutuhkan, mulai dari politisi yang kelasnya dalam tahap memperkenalkan diri (dikenal), naik kelas ke disukai, hingga ke level didukung. Setelah kekuasaan politik diraih berkat citra karismatis, karismanya akan terus diuji. Pemimpin sejati (otentik) tak khawatir karismanya. Ia bekerja sesuai keyakinan dan visi. Kalau dukungan mengalir kepadanya, ia akan tetap rasional, tak manipulatif, bukan menikmatinya sebagai sosok mitologis.●

Regenerasi Kepemimpinan Parpol

KOMPAS, 21 MEI 2010

BELAKANGAN INI sementara kalangan mengeluhkan regenerasi kepemimpinan partai yang melemah. Tokoh-tokoh muda masih susah tampil karena faktor bayang-bayang generasi senior. *Kompas* pernah menulis laporan terpilihnya tokoh-tokoh lama sebagai pimpinan sejak akhir 2009 menunjukkan lambatnya proses regenerasi kepemimpinan bangsa. Popularitas atau tingkat keterkenalan politisi muda di mata publik masih rendah, tertinggal

jauh dibandingkan politisi senior yang pernah maju dalam pilpres sebelumnya. Rendahnya popularitas itu akan membuat tingkat keterpilihan mereka rendah pula.

Laporan yang dihimpun dari pandangan sejumlah pengamat tersebut mengingatkan kembali pada permasalahan klasik regenerasi kepemimpinan kita. Kelihatannya, tidak akan ada proses percepatan regenerasi dalam panggung politik kita. Namun, tidak dapat juga dikatakan regenerasi itu sangat lambat.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam konteks regenerasi parpol kita dewasa ini. *Pertama*, regenerasi sering terhambat oleh realitas tidak berjalannya secara optimal demokrasi internal parpol. Fenomena kepartaian kita masih banyak bersifat paradoks, manakala demokrasi internal partai terhambat oleh realitas patronase politik, bahkan menjurus pada kecenderungan pelanggengan politik keluarga alias dinasti.

Kedua, adanya kultur politik pragmatis dan kepengikutan permisif, sangat menguntungkan kekuatan dinasti (*power*) dan pemilik modal (*money*) dalam pengambilalihan atau pelanggengan kekuasaan. Mereka "maju tak gentar, membela yang bayar", membela yang magnet kekuasaannya *kinclong*. Para politisi dari genealogi "aktivis" yang merintis karier politik dari bawah tidak punya aliran "darah biru" (dinasti) ataupun minus modal (uang), hanya memiliki peluang yang sempit. Sosok seperti Barack Obama tentu sulit muncul dalam kondisi demikian. Jurus yang mengemuka, sabar, mencari celah (revolusioner), atau mengikuti arus yang ada. Kebanyakan politisi "aktivis" mengikuti arus yang ada.

PERKADERAN

OLIGARKI keluarga dan modal di internal parpol memang masih merupakan realitas obyektif yang gampang dijumpai di hampir semua parpol. Kalaupun susah diatasi, kita hanya bisa berharap elite politik yang dihasilkan cukup punya kecerdasan dan kualifikasi kepemimpinan politik yang dapat diandalkan. Bila tidak, kualitas kepemimpinan politik kita akan bermasalah, dan turut memperle-

mah kualitas demokrasi.

Karena demokrasi internal parpol kita masih banyak ”bermasalah”, kalau bukan paradoks dengan jargon demokrasi yang mereka dengungkan, gagasan menghidupkan jalur independen masih sangat relevan. Meski demikian, jalur parpol tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Para aktivis harus tetap ada dan bersabar di parpol, sementara jalur independen seharusnya dibuka saja.

Keberadaan jalur independen tak akan mengerdilkan parpol manakala parpol terkelola secara modern dalam arti terinstitusionalisasi dengan kokoh. Justru dengan dimunculkannya jalur independen, parpol terpicu untuk memperkokoh institusionalisasi politiknya. Parpol akan serius di dalam menciptakan kader, yang siap bersaing dengan kandidat independen.

Sistem pengaderan parpol merupakan kunci bagi proses sirkulasi elite dan regenerasi kepemimpinan parpol. Di tengah iklim persaingan yang tajam dan cairnya politik kita (pindah parpol menjadi kebiasaan), proses pengaderan tidaklah mudah. Yang dibutuhkan parpol justru konsistensi dalam pengaderan. Itu kontribusi positif bagi demokrasi. Dalam iklim persaingan tajam, parpol tak boleh hanya sekadar berebut pendukung, tetapi juga tidak membangun sistem pengaderannya dengan baik.

Tanggung jawab parpol menciptakan kader. Tentu bukan “kader jenggot” yang menggantung ke atas tanpa akar ke bawah. Kader artifisial selalu memiliki keterbatasan, sebab hanya bertumpu “kesadaran palsu” konstituen yang tak kritis. Mereka tak hanya berurusan semata-mata dengan parpol, melainkan juga tanggung jawabnya kepada publik. Demokrasi internal parpol bukanlah hajatan internal semata-mata yang jauh dari ”urusan publik”. Bagaimanapun parpol tetap entitas yang selalu berurusan dengan publik.●

Daya Kritis dan Survivalitas PKS

KOMPAS, 16 JUNI 2010

PADA 16-20 Juni 2010 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Munas II di hotel mewah *Ritz Carlton*, SCBD, Jakarta. Pemilihan tempat, tampaknya terkait upaya partai ini menaik-kan citra sebagai partai menengah ke atas, partai Islam yang mo-dern. Munas kali ini, tak segegap gempita kongres Partai Demokrat, tetapi, justru menunjukkan ketenangan partai ini. Soal regenerasi kepemimpinan, PKS tampak memilih tidak perlu ramai-ramai.

Sejak kehadirannya pada 1999 dengan nama Partai Keadilan, dan kemudian pada Pemilu 2004 menjelma menjadi PKS, partai ini sangat fenomenal. PKS menyalip seluruh partai Islam dan bertahan pada ranking atas. Pada Pemilu 2009, PKS memperoleh 8.206.955 suara (7,9%) setara dengan 57 kursi (10%) di DPR. Realitas inilah yang membuat PKS cukup diperhitungkan.

DAYA KRITIS

SEJAK 2004 PKS memposisikan sebagai partai pendukung pemerintah. Inilah yang menyebabkan mobilitas vertikal kader-kadernya di pemerintahan terjamin. Namun demikian, kepada publik PKS ingin tetap menunjukkan signifikansi daya kritisnya. PKS mampu memainkan ruang manuver untuk mengkritisi berbagai kebijakan, walaupun pada akhirnya merapat kembali pada suara politik versi pemerintah.

Dalam kasus Bank Century, PKS termasuk yang kritis. Bersama Partai Golkar dan PPP, PKS memilih bersuara layaknya kubu oposi-

si. Di sisi lain, PKS juga menunjukkan tak mau larut dalam gagasan politik Partai Golkar dimana ketua umumnya merupakan Ketua harian Setgab Koaliai tentang perlunya dana aspirasi. Manuver politik PKS memang kerap membuat resah kubu SBY, tetapi keberadaannya di koalisi pemerintahan masih tetap dibutuhkan. Apalagi, pendekatan politik kubu SBY atas PDIP gagal. PKS termasuk kekuatan politik yang melanggar prinsip koalisi "*ngono yo ngono ning ojo ngono*", untuk menggambarkan bahwa manuvernya sering dinilai "kebablasan".

Selama ruang manuver tersedia lebar bagi PKS di lingkungan koalisi, maka PKS akan terus berupaya mempertinggi daya kritisnya. Dengan menjaga tingkat popularitasnya di wilayah pengambilan keputusan atau kebijakan politik level atas, sesungguhnya PKS tengah melakukan upaya mempertahankan konstituennya. Namun, manakala manuver dilakukan tanpa perhitungan seksama, ia dapat menjadi bumerang bagi PKS sendiri. Publik, dapat dengan mudah mempertanyakan konsistensi PKS, manakala manuver-manuver politiknya tidak lagi dapat dipahami basis argumentasinya.

SURVIVALITAS

DI level infrastruktur partai ini telah berkembang. Upaya mengikat konstituennya tidak saja dilakukan dengan pendekatan ideologis, tetapi juga beragam aktivitas sosial. Ia telah menjadi partai kader, yang tempaknya, sejak Munas I sadar akan strategi merambah atau melebarkan sayap di luar lingkup pasar terbatas mereka. Ideologi Islam, ditawarkan sebagai bukan penghalang bagi yang lain atau eksklusif, tetapi lebih banyak diterjemahkan sebagai pro-masalah-masalah sosial dan kemanusiaan.

Survivalitas PKS antara lain tergantung pada militansi kader-kadernya, daya ikat konstituennya, serta daya pikat ke potensi-potensi pendukung suara baru. Yang terakhir itulah yang tampaknya bakal menjadi fokus ke depan. Survivalitas PKS tampak akan berjalan lurus dengan inklusivitas, bukan eksklusifitas politik. PKS harus menjadi partai yang *beyond the symbol*.

Model partai politik berbasis pendukung Muslim di negara berpenduduk mayoritas Muslim tetapi ideologi negaranya bukan Islam yang cukup berhasil adalah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki. Partai bersimbol lampu bohlam ini mampu memikat mayoritas pendukungnya, menjadi partai yang memerintah, justru karena pendekatannya yang lebih substansif, mampu menawarkan program memikat. Tetapi, tampaknya juga karena adanya sosok pemimpin kharismatik, Recep Tayyip Erdoğan.

PKS tampak akan bergerak ke "pendekatan substansif", tetapi sayangnya belum tampak sosok internalnya yang cukup menonjol secara kharismatik. KH Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syuro PKS), Tifatul Sembiring (Menteri Infokom), Hidayat Nurwahid (mantan Ketua MPR RI), M Anis Matta (Sekjen PKS), atau Luthfi Hasan Ishaaq (Presiden PKS), seolah-olah masih merupakan tokoh-tokoh internal partai saja. Transformasi tokoh dari "milik PKS" menjadi "milik semuanya", merupakan tantangan bagi partai ini dalam rangka melebarkan sayap.●

Muhammadiyah dan Arus Politik

KOMPAS, 3 JULI 2010

MUKTAMAR Satu Abad Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta 3-8 Juli 2010 ini, menyisakan pertanyaan mendasar menyangkut bagaimana hubungannya dengan politik kekinian. Terkait dengan hal itu, beberapa otokritik telah dilancarkan oleh tokoh-tokoh Muhammdiyah. Abdul Munir Mulkhan, misalnya melihat akhir-akhir ini Muhammadiyah mulai terperangkap pada isu kekuasaan yang membuatnya kurang peduli pada nasib mereka yang terpinggirkan, baik karena persoalan ekonomi maupun budaya (*Kompas*, 30/6/2010).

Otokritik tersebut mewakili suatu arus utama yang menolak

Muhammadiyah terlibat terlalu jauh dalam politik-praktis. Penilain demikian tampaknya lebih dialamatkan pada elite Muhammadiyah yang secara langsung atau tidak suka bermanuver politik. Muhammadiyah sendiri tidak mengharamkan politik, bahkan menganjurkan para kedernya untuk paham politik. Juga, tidak melarang kadernya berkiprah di partai-partai politik.

Yang lebih banyak disorot adalah sikap politik Muhammadiyah dalam merespons soal-soal politik-praktis. Berbagai pihak akan melihat, merasakan, dan memberi penilaian atas ke manakah kecenderungan politik Muhammadiyah dari sikap politik elite-elite utamanya. Organisasinya boleh jadi selalu berlabel independen, tetapi subyektivitas politik elitenya, sering terasa menonjol.

Arus pendapat lain, sebagaimana terekam di diskusi hubungan Muhammadiyah dan politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta, adalah agar justru sebaliknya, Muhammadiyah memfasilitasi kader-kader strategisnya yang terjun di politik praktis. Konsekuensinya, tidak menjadi soal manakala pengurus teras partai merangkap pengurus penting Muhammadiyah, asal aturannya jelas. Dengan begitu, Muhammadiyah menjadi terminal pengelolaan sumberdaya politiknya secara berkualitas. Yang penting, sikap-sikap Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, tidak membelok ke arah politik praktis. *Checks and balances* dapat terjadi, ketika kader-kader politik Muhammadiyah saling mengimbangi, sehingga tidak lahir keputusan politik praktis yang konfliktual.

POLITIK NILAI

MUHAMMADIYAH tumbuh dalam suasana sosial politik yang dinamis. Saat organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan 1912, gelora politik anti-kolonial sangat terasa. Bersama yang lain Muhammadiyah merespons semangat anti-kolonial, tetapi tidak dengan pendekatan politik-praktis, melainkan politik-kultural. Sejak dulu, Muhammadiyah lebih dikenal organisasi Islam yang melakukan gerakan transformasi kultural, dengan berbagai jenis unit aktivitas amal usaha.

Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang bercorak pembaharu, memiliki keprihatinan yang tinggi terhadap permasalahan sosial-masyarakat atau umat yang terpinggir (kaum *mustadh'afin*). Politik Muhammadiyah adalah politik nilai, khususnya nilai membela kaum terpinggir, ke-sejahteraan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tentu menjadi beban berat bagi para kadernya untuk mengemban dan mengaktualisasikan nilai-nilai itu.

JATIDIRI

ARUS politik memang kuat sekali pada era reformasi ini. Para tokoh Muhammadiyah sendiri, selama ini telah melakukan beberapa eksperimentasi (*ijtihad*) politik dengan mendirikan dan mengembangkan partai politik. Yang menonjol adalah berdiri dan eksisnya PAN yang dimotori oleh M Amien Rais. PAN termasuk salah satu partai yang lolos ketentuan *parliamentary threshold* di DPR. Berbeda dengan PAN, eksperimentasi Partai Matahari Bangsa (PMB) yang dibidani oleh kalangan muda Muhammadiyah, masih belum berhasil dalam kontestasi demokrasi elektoral.

Corak pilihan politik kader Muhammadiyah memang plural. Pilihan mereka tidak hanya tertuju ke partai Islam, baik yang bersimbol atau berbasis massa Muslim, tetapi juga pada partai-partai tengah yang bercorak *catch-all*. Pluralitas pilihan politik kader Muhammadiyah tersebut sangat terkait dengan corak Muhammadiyah sendiri yang rasional-moderat. Soliditas politiknya, tampak tak serekat jamaah NU yang bernaung di bawah PKB, walaupun partai tersebut elitenya terpecah-pecah.

Modernitas gerakan Muhammadiyah, lebih mengemuka pada wilayah state of mind, bukan pada tradisionalitas patronase kultural atau politik. Inilah yang menyebabkan "fatwa politik" petinggi Muhammadiyah, tidak mudah untuk begitu saja ditaati. Semoga Muhammadiyah, tepatnya elite-elitenya, dapat dengan baik dan proporsional dalam membawa jatidiri Muhammadiyah, untuk tidak ikut larut dalam ingar-bingar politik-praktis yang konfliktual.●

Bangsa Ulat, Bangsa Kepompong

KOMPAS, 21 AGUSTUS 2010

HINGGA usia kemerdekaannya yang ke-65 ini, kita masih sering mendengar Indonesia itu bagaikan raksasa tidur (*the sleeping giant*). Asumsi dasarnya, kita punya sumberdaya alam melimpah, wilayah sangat luas, jumlah penduduk besar, keanekaragaman yang mengagumkan, serta segenap potensi lain, yang sayangnya belum tergarap optimal. Indonesia itu raksasa yang kehadirannya disadari sejak kemerdekaannya. Tetapi ironisnya, ia raksasa yang masih tertidur, seolah-olah tak ada kepastian kapan terbangun dan menunjukkan giginya.

Indonesia hadir melalui gerakan nasionalisme yang kokoh. Embrio nasionalisme setidaknya terlacak mengental di era pergerakan nasional pasca-1908, tertegaskan 1928, mencapai titik puncaknya 1945. Setelah itu, ujian demi ujian dihadapi. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang oleh Bung Karno disebut "jembatan emas" untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan momentum yang selalu dikenang dan direfleksikan secara simbolik.

Meskipun sudah merdeka, *nation and character building* kita masih terus berproses dan belum kunjung usai hingga kini. Substansi kemerdekaan terus mengalami perkembangan penafsiran secara teknis, bagaimana memaknai kemerdekaan itu dalam pembangunan di segala bidang. Sejak kemerdekaan berbagai formula dan titik tekan pembangunan telah dieksperimentasikan, dengan segala keberhasilan dan kegagalannya.

Pada era reformasi, pengalaman sejarah kita ringkas kembali ke dalam eksperimentasi demokrasi *trial and error*. Amandemen

konstitusi merupakan pengalaman sejarah yang sedianya dimaksudkan membangunkan sang raksasa tidur. Namun fokus ke arah sana belum tercapai, mengingat amandemen masih terasa diwarnai pasal-pasal "kepentingan jangka pendek" kontraproduktif.

Eksperimentasi demokrasi terus dilakukan, walaupun tak serta-merta membuat politik kita efektif. Demokrasi langsung, secara filosofis bagus, karena prosesnya melibatkan peranserta rakyat dalam memilih para pemimpin, sehingga legitimasi yang terpilih sangat kuat. Namun, ia tak lepas dari eksesnya. Praktik demokrasi saat ini masih banyak memprihatinkan dan perlu dibenahi.

Demokrasi (langsung) memang merupakan modal dasar implementasi paradigma pembangunan yang demoktaris. Tetapi, jalannya, selalu dibayang-bayangi anarkhi karena tergerusnya modal sosial (*social capital*). Demokrasi tak salah. Hanya eksesnya yang harus dicegah, agar kita tak terjebak sebagai bangsa ulat, yang tak kunjung mengepompong untuk menjadi kupu-kupu.

Kita gunakan analogi ulat, kepompong, kupu-kupu dalam refleksi kemerdekaan Indonesia, karena bertepatan bulan Ramadhan. Proklamasi pun bertepatan Ramadhan. Dalam konteks ibadah Ramadhan, kearifan tradisional kita menjelaskan untuk mencapai derajat ketakwaan (kupu-kupu), kita harus menghilangkan sifat dan karakter ulat dalam diri kita, memasuki fase kepompong, fase penyucian jiwa.

Budayawan Emha Ainun Nadjib menyebut Ramadhan sebagai proses peragian menuju kematangan jiwa. Muaranya pencerahan, keindahan, sebagai pancaran dari puncak ketakwaan. Fase kepompong, fase peragian menuju kematangan jiwa atau spiritual. *Nah*, dalam konteks Indonesia, agar raksasa bangkit, kita harus mau masuk ke fase kepompong atau peragian.

Syaratnya, prosesnya harus "sempurna", sebab manakala tidak, kita akan susah mengepompong dan cenderung masih terus mengulat. Atau, manakala tidak serius, yang terjadi setengah ulat setengah kepompong. Proses peragian yang tidak sempurna, tak memung-

kinkan hasil akhirnya manis, melainkan masam. Dibutuhkan keprihatinan, kesabaran, keuletan, dan kecanggihan berproses transformatif dari mentalitas lama ke yang baru, dan itu tak hanya dilakukan rakyat saja, tetapi yang lebih wajib para elite pemimpinnya.

TAK MENGEPOMPONG?

ADAPUN NIKMAT kemerdekaan yang kita rasakan, tak lepas dari keprihatinan dan perjuangan nyata dari segenap elemen bangsa. Mereka mengalami fase kepompong yang sempurna, sebelum mewujud kupu-kupu. Tetapi, ingat metamorfosis akan selalu berjalan sedemikian rupa sebagai suatu siklus. Kita yang sudah jadi kupu-kupu, terjatuh lagi sebagai ulat dan seterusnya.

Dinamika sejarah bangsa diwarnai peristiwa jatuh-bangun. Tentu ia meninggalkan sejumlah pelajaran berharga. Sejarah masa lalu, catatan berharga untuk merenda sejarah masa depan. Apabila kita ingin betul-betul sebagai raksasa yang bangkit berpengaruh, mentalitas kita harus benar-benar siap mengepompong.

Sayang sekali ekspresi menjadi "bangsa kepompong" itu masih diwarnai oleh tampilan mereka yang secara ekspresif mempertunjukkan watak ulat. Merajalelanya korupsi, mengecambahnya praktik politik uang, meluasnya kerusakan lingkungan, "membudayanya" kekerasan atas nama agama atau atas sentimen primordial, hingga berbagai atraksi kerakusan ekonomi dan politik-kekuasaan, ketidakadilan yang jelas di depan mata, dan perilaku-perilaku destruktif lain membuat kita tak kunjung mengepompong.

Inilah yang membuat bangsa ini masih jalan di tempat, kalau bukan mundur ke belakang. Saat untuk jalan ke depan tersandera untuk masih dominannya perwatakan-perwatakan ulat atas bangsa kita. Kalau kita tetap berbaik sangka dengan apa yang disebut Budayawan Mochtar Lubis sebagai "manusia Indonesia", maka perlulah kita menoleh pada sistem. Intinya, bagaimana sistem berbangsa kita berkonsolidasi mengarah sebagai "bangsa kepompong", suatu bangsa yang belajar sungguh-sungguh, dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk maju.

Di bidang politik, mengepompong berarti siap memperkokoh konsolidasi demokrasi. Di bidang ekonomi, mempersiapkan strategi optimalisasi sumberdaya kemandirian. Di bidang hukum, harus ada kepastian keadilan. Di bidang sosial budaya, harus jadi bangsa yang solider, berintegritas. Di bidang pertahanan dan keamanan, harus kuat, efektif. Semua itu dibingkai dalam sistem yang efektif, bukan tambal sulam dan sekadar menuruti kemauan kepentingan jangka pendek kalangan politisi *an sich*.●

Warisan Kepemimpinan Maridjan

KOMPAS, 2 NOVEMBER 2010

THE LEADER WHO IS HUMBLE RARELY ALLOWS THE POWER OF THEIR POSITION TO CLOUD THEIR JUDGEMENT.
- LEROY MCCARTY

KITA BERDUKA karena Mbah Maridjan, sang juru kunci Gunung Merapi meninggal dalam posisi bersujud menyusul letusan gunung berapi paling aktif di Jawa tersebut. Ucapan duka cita juga layak untuk diucapkan bersamaan meninggalnya korban letusan lainnya, juga korban bencana alam gempa bumi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan musibah banjir bandang di Wasior, Papua Barat. Kita memang sedang menghadapi cobaan bencana alam di mana-mana.

Sebuah pemberitaan *online* mengulas meninggalnya Maridjan dengan kalimat yang memungkinkan pembacanya menyimpulkan apa yang dilakukan sosok sepuh itu cukup fatal. Memang, pada 2006 Maridjan selamat. Tempat tinggalnya, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tidak dilewati awan panas atau *wedhus gembel*, tetapi tidak untuk saat ini. Seorang pakar menjelaskan, letusan kali ini eksplosif sehingga menyebabkan banyak korban jiwa.

Almarhum sangat fenomenal. Sebagai sosok informal, ia sempat melakukan interupsi, ternyata masih ada pemimpin unik sepertinya di Indonesia. Ia hadir di tengah realitas kepemimpinan formal yang sering menerima kritik tajam karena kemandegannya. Mungkin banyak Maridjan lain yang belum terpublikasi di ranah komunitas lokal kita. Maridjan mencoba merepresentasikannya, setidaknya tampil jelas sebagai salah satu contoh kasus kepemimpinan informal yang layak diulas.

TIGA TELADAN

APA YANG dapat kita petik dari kepemimpinan Maridjan? Ada beberapa catatan atas gaya kepemimpinan informalnya yang bersahaja sebagai penjaga Merapi atas legitimasi Keraton Yogyakarta itu. *Pertama*, menyangkut integritas dan loyalitasnya. Ia punya integritas dan reputasi yang tak diragukan, tentu dalam ukuran-ukuran tradisionalitas-informal. Adapun Sultan Hamengku Buwono IX mengangkatnya sebagai juru kunci, tentu saja bukan main-main. Dan, Maridjan loyal dengan penunjukannya itu, menjalankan tugas dalam bingkai pengabdian dan sesuai amanat.

Kedua, ia sederhana dan bijak. Harap diingat, Maridjan bekerja dalam alam kearifan lokal yang metasains dan alam pikir makrokosmos (*jagat-gedhe*) yang khas Jawa. Ia bukan pakar di bidang kegunungapian, tetapi tampaknya lebih banyak bekerja berdasarkan intuisi dan nalar. Keterangan-keterangan Maridjan pada tahun 2006 atas fenomena alam Merapi demikian sederhana, dengan bumbu-bumbu perumpamaan yang gampang ditelaah orang.

Ia juga mengedepankan suatu etika yang khas, yang harus dihayati menyangkut hubungan antara manusia, gunung berapi, dan Tuhan. Ia sering mengatakan, ojo ndhisiki kerso, jangan mendahului kehendak-Nya. Ini menunjukkan bahwa Maridjan punya disiplin religius tersendiri, dengan berdoa, ikhtiar, dan pasrah.

Ketiga, ia pemimpin yang bertanggung jawab dan berani ambil risiko. Tampaknya, tak ada pretensi agar Maridjan sendiri dicap sebagai teladan. Akan tetapi, ia sering menunjukkan kepada publik

bahwa ia punya tanggung jawab, dan atas dasar itu ia berani ambil risiko. Karena itulah, perilakunya sering cukup kontroversial. Dengan alasan berdoa kepada-Nya, ia justru naik ke puncak, kawasan yang paling berbahaya pada 2006. Dengan alasan yang sama pula, ia tak mau meninggalkan desanya saat sebelum akhirnya ia diberitakan meninggal. Ia tak menolak pengungsian warga, tapi ia sendiri tak mau mengungsi. Memang kontradiktif. Karena itu, wajar apabila penilaian publik terbelah ke dalam dua pendapat berseberangan: ia berani ambil risiko atau ia sesungguhnya sosok yang fatalis.

DUA EKSTREM

MASIH BANYAK yang bisa diulas dari gaya kepemimpinan Maridjan, tetapi tiga hal di atas sudah mencukupi sebagai wasiat yang dapat dicatat dari sosok bintang iklan minuman energi itu. Setelah Maridjan meninggal, saya sependapat dengan anjuran agar kita lebih serius beralih dari paradigma intuisi ke sains modern. Akan tetapi, saya juga sepakat sains modern dikembangkan tanpa harus mengabaikan kearifan lokal. Dari sini, seolah-olah antara Maridjan dan sains modern dua ekstrem, walaupun penjelasannya seringkali selaras argumentasi sains. Intinya, sains dan kearifan lokal harus berdampingan, sedemikian rupa demi kemaslahatan semua.●

Bangsa Main-main

KOMPAS, 18 NOVEMBER 2010

HEBOH penampakan Gayus Tambunan tengah menonton pertandingan tenis di Bali mencerminkan proses penegakan hukum negeri ini masih sangat diwarnai adegan main-main. Kasus ini membuat getir. Rasa keadilan tertampar. Publik seolah semakin mendapat penegasan bahwa di negeri kita uang adalah segalanya. Semua bisa dibeli, termasuk ketidakadilan. Lantas, sedih nian rasanya manakala orang masih dapat dengan mudah melabeli negeri ini sebagai negeri suap, surganya para penyuap dan tersuap,

serta bangsa main-main, yang tak pernah serius. Apakah perwatakan sejati kita memang demikian?

Para sejarawan biasanya mengajak menengok kembali zaman VOC atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur (1602-1798). Perusahaan Belanda yang bercokol di koloni yang sekarang disebut Indonesia itu memiliki sejumlah hak istimewa dalam memonopoli perekonomian. Ia semacam negara dalam negara. Dan, betapa kekayaan Nusantara disedot luar biasa. Tetapi, ironisnya VOC kemudian bangkrut dan dibubarkan. Salah satu versi populer mengapa bangkrut, karena mengecambahnya kultur dan praktik korupsi yang dipicu gaya hidup hedonis dan boros. Pejabatnya terbius mentalitas feodalisme yang konon terinspirasi dari raja-raja Jawa.

Tuntutan untuk menyelaraskan gaya hidup metropolis dan terbukanya peluang untuk korupsi karena sistem membuat praktik korupsi menyubur. Gayus adalah satu potret puncak gunung es teater perilaku korupsi yang terungkap. Ia membuat sakit hati, bukan hanya ribuan pegawai negeri yang bergaji pas-pasan, tapi juga hampir kita semua. Betapa perilaku zaman VOC nyatanya masih terpraktikkan sedemikian rupa pada era reformasi ini.

MAIN-MAIN

KETIDAKSEMPURNAAN reformasi kita, antara lain, terutama disebabkan oleh masih bertahannya mentalitas main-main yang notabene juga mentalitas koruptif. Tentu saja pikiran positif masih mengajak untuk mengatakan, jumlah orang jahat lebih sedikit dibandingkan dengan yang baik. Tetapi, bukankah kita punya pepatah ”Akibat nila setitik, rusak pula susu sebelanga”?

Mentalitas culas itu, manakala terpraktikkan, sedikit atau banyak, akan berakibat fatal bagi semua. Apalagi, apabila mentalitas itu terpraktikkan dalam sistem yang koruptif. Ketika peluang terbuka lebar, muncullah upaya untuk bermain-main dengan api, yang sesungguhnya mudah membakar.

Yang terkena proses hukum terpikir untuk menyuap aparat penegaknya. Dengan berbagai dalih, tak cuma gaji yang pas-pasan,

juga guna memenuhi standar gaya hidup hedonis, para aparat tergoda pula oleh main-main itu. Adegan-adegan di bawah gunung es, kita bayangkan lebih mengerikan, ketimbang yang terungkap di puncaknya karena daya rusaknya luar biasa.

Mentalitas korupsi membuat banyak yang sadar atau tidak menjadi kurang serius bekerja. Alam bawah sadar sering kali menggoda mempraktikkan sologisme, janganlah bekerja terlalu keras dan serius demi pencapaian prestasi puncak secara obyektif dan cemerlang, *toh* hal seperti itu tak membuat sekaya koruptor. Dengan kata lain, alam bawah sadar di tengah-tengah kultur dan sistem koruptif sering mengajak berkompromi dan bermain api.

Hal itu menjauhkan kita dari berpikir dan bertindak mandiri memajukan bangsa mengingat sejak mulai dari mentalitas, masih terbebani oleh paradigma jalan pintas, culas, mengorbankan yang lain, menginjak-injak keadilan sosial. Pada bagian ini patutlah kita renungkan apa yang sering dikeluhkan para tokoh perjuangan tempo dulu, kita masih terbelenggu oleh mentalitas bangsa terjajah, bangsa kuli.

TRIAL AND ERROR

SEMANGAT UNTUK memperbaiki sistem agar korupsi tak dapat dipraktikkan dengan demikian mudah, sesungguhnya telah menjadi bagian integral dari paket reformasi. Kebijakan antikorupsi merupakan bagian utama dari reformasi birokrasi. Pembenahan membutuhkan konsep yang implementasinya membutuhkan waktu. Namun, sampai kapan?

Demokrasi memungkinkan, apa yang sering dikatakan Nurcholish Madjid, *trial and error*. Semangat dan kesungguh-sungguhan melakukan evaluasi dan perbaikan harus mewujud secara nyata. Perbaikan mutlak dilakukan sungguh-sungguh, bukan sekadar main-main. Kalau main-main saja, kita tak akan maju-maju. Bahkan, seolah kita sedang membangun rumah pasir di pinggir pantai, yang mudah hancur tersapu ombak.

Mudah-mudahan kita tidak terlalu sering mengulangi kesalahan dan tetap berhati-hati dalam melangkah ke depan, dengan penuh kesungguh-sungguhan.●

Bangsa yang (Perlu) Berlari

KOMPAS, 29 DESEMBER 2010

IF YOU'RE YOUNG AND TALENTED, IT'S LIKE YOU HAVE WINGS.

- HARUKI MURAKAMI, WHAT I TALK ABOUT WHEN I TALK ABOUT RUNNING

DALAM KOMPETISI global antarbangsa, khususnya dalam bidang ekonomi, realitas yang ada sering digambarkan sebagai pertandingan olahraga lari. Ada lari jarak pendek, menengah, dan jauh. Bangsa yang kuat dan lincah mampu berlari stabil dan memicu percepatan. Bangsa yang banyak masalah seperti pelari yang cepat lemas, berkunang-kunang, tidak percaya diri, dan selalu tertinggal di belakang.

Soal filsafat orang berlari ini dapat ditemukan dalam novel Haruki Murakami, *What I Talk About When I Talk About Running* (2008). Murakami tertarik pada pertanyaan apa mantra atau doa khusus bagi seorang pelari sehingga ia bisa jadi juara. Tidak ada! Yang ada bagi seorang pelari *pain is inevitable, suffering is optional*. Bersakit-sakit tak terhindarkan, menderita itu biasa. Itulah disiplin yang ditunjukkan dengan tiada hari tanpa latihan.

Saya menikmati novel itu sebagai sebuah motivasi hidup, bahkan juga bagi sebuah bangsa. Hidup kita seperti orang yang berlari. Kita mesti bergerak karena seorang pelari selalu bergerak. Pelari yang tak bergerak berarti mati. Bergerak itu berikhtiar. Tak seorang pelari pun juara secara kebetulan. Tak ada perwujudan obsesi secara instan.

Tentu saja kita berasumsi bahwa perlombaan lari itu berjalan

secara wajar. Permulaan lari harus sama. Perangkat yang dipakai sama. Para pelari tidak boleh memakai obat perangsang. Namun, realitasnya tidak sepenuhnya demikian. Ada bangsa yang posisi permulaannya jauh di depan, ada pula bangsa yang sama sekali belum siap. Namun, kompetisi pasar bebas tidak dapat ditunda dalam praktik. Perlombaan lari pun telah dan terus berlangsung.

BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?

INDONESIA bangsa yang terus berproses. Ia bangsa yang hadir dari letupan sejarah nasionalisme antikolonial. Ketika lahir, ia mewarisi segudang masalah yang ditinggalkan bangsa penjajahnya. Di antara masalah yang kompleks itu, kalau mau ditarik ke yang agak inti terkait dengan konteks kerangka pikir, mentalitas, dan etos kedisiplinannya: kita memiliki warisan mentalitas bangsa terjajah di tengah kondisi alam relatif nyaman tetapi kurang direspons dengan etos kerja.

Sesungguhnya banyak yang mengagumi nasionalisme Indonesia. Dari titik ini kehadiran Indonesia sangat otentik sebagai bangsa yang melahirkan dirinya sendiri, yang penuh semangat dan potensial. Hanya saja, potensi-potensi itu masih banyak yang belum menjadi aktus justru antara lain oleh hal-hal yang menjebak dirinya. Banyak hal yang masih tersia-siakan. Bahkan, sebagaimana ditulis seorang pengamat ekonomi, kita masih sangat suka dengan ”seni membuang kesempatan”. Ironis memang, seperti pula yang dikatakan seorang budayawan, kita suka menjadi ”gelandangan di rumah sendiri”.

Kalau ada orang yang mengecam keras bangsanya sendiri, maka janganlah segera dituduh antinasionalisme. Kita memang sedang butuh cambuk dari dalam. Tak perlulah cambuk itu *Tjamboek Berdoeri* sebagaimana judul buku Kwee Thiam Tjing. Cukup cambuk yang keras agar kita semakin disiplin. Semangat keswadayaan dari masyarakat sipil perlu ditangkap positif oleh pemerintah dan elite-elite politik bukan dalam kerangka politisasi, tetapi keikhlasan membangun bangsa.

Praktik pragmatisme-transaksional yang berkembang di dunia politik, ekonomi, hukum, bahkan sosial-budaya tentu tidak membuat kita semakin produktif. Kita terlena pada kemeriahan dan bertengkar demi simbol-simbol, tetapi lupa substansi dan orientasi perkuat daya saing bangsa. Politik kita seharusnya sudah melewati simbol, politik kebangsaan. Ekonomi kita harus didukung secara prima agar kaki dan tangan tak terikat sehingga bisa berjalan dan berlari kencang. Bukan mandek atau jalan di tempat. Penegakan hukum demikian pula: harus progresif.

MEMOTIVASI DIRI

TIDAK ADA bangsa yang bangkit tanpa adanya motivasi yang kuat untuk bangkit. Motivasi itu terutama harus datang dari pemimpin. Rakyat tak cukup dapat memotivasi diri. Pemimpin itu membuat yang dipimpin bergairah dan bergerak. Memang tidak mudah menjadi pemimpin bagi bangsa yang terlalu kompleks permasalahannya, yang beban-bebannya perlu diurai satu per satu.

Retorika perlu, tetapi tidak cukup. Pemimpin yang wajar tahu seberapa perlunya retorika. Bahkan, untuk kepentingan yang lebih besar, pemimpin harus berani menentang arus. Itu sebabnya, pemimpin tak harus berorientasi pada popularitas. Apakah dinamika politik kita, mengingat pemimpin bangsa hadir melalui jalur politik, kondusif untuk itu? Belum sepenuhnya demikian.

Optimisme semestinya tak berhenti di retorika. Namun, harus tampak dalam aksi nyata dan tak dibuat-buat alias otentik. Otentisitas inilah yang kian langka di tengah gemuruh praktik demokrasi elektoral. Akumulasi ketidakotentikan atau kamuflase politik memperparah dan memperlemah jati diri serta kepercayaan diri.

Supaya bangsa kita bisa berlari kencang, peran elite sangat penting dalam mengubah paradigma dan kerangka pikir politik kepentingan menjadi politik kebangsaan. Politik kita harus produktif: tak boleh defisit, membuang kesempatan, dan terjebak pada praktik sekadar pemburu rente.

TURUN MESIN, SIAP TANDING

SESUNGGUHNYA KITA punya kesempatan emas turun mesin, menata sistem secara efektif, agar lebih siap tanding. Itulah awal era reformasi. Memang sistem telah berjalan dan masih bisa diperbaiki. Butuh proses yang tidak sepele, terutama apabila sudah menyangkut konsensus antar-kekuatan politik. Konsensus yang ada masih belum sepenuhnya mampu membangun cetak biru sistem kebijakan yang berkualitas. Ibarat pelajar mengerjakan soal ujian, jawabannya masih banyak yang tidak tepat.

Fase itu seharusnya dilewati dengan baik. Namun, perlu dicatat bahwa kenyataannya: bangunan sistem kita masih rapuh dan kuyup konflik. Selama urusan politik dan persatuan masih membelenggu, kita seperti belum berkutat memperbaiki mesin kendaraan yang aus dan bermasalah. Kita masih berhenti kalau bukan jalan di tempat. Padahal, dunia sudah tantang kita berlari kencang.Penggambaran ini terasa agak ekstrem. Namun, kalaupun kita merasakan perkembangan, sepertinya kita masih berlari-lari kecil saja. Kita perlu berlari, terus berlari, semakin kencang dan melampaui jargon "Kita pasti bisa!"●

XIII

DEMOKRASI NOVELTIK

[2011-2012]

KISAH KAUM DEMOKRAT VERSUS PERILAKU ANTIDEMOKRASI, MIRIP NOVEL-NOVEL DETEKTIF AGATHA CHRISTIE, SHERLOCK HOLMES, DAN PARA PENGARANG MASA KINI YANG CERITANYA RUMIT-RUMIT ITU. INTINYA, UNTUK MELENYAPKAN "PEMBAJAKAN DEMOKRASI OLEH KAUM PENJAHAT" BUTUH PROSES, PENUH LIKU-LIKU, BAHKAN ADAKALANYA TAK TERHINDARKAN BANYAK KORBAN BERJATUHAN

- DEMOKRASI NOVELTIK

Demokrasi Noveltik

KOMPAS, JANUARI 2011

KISAH perjalanan demokrasi itu seperti novel. Tak semua prosesnya *happy ending*. Seringkali mengemuka ironis dan tragis. Untuk negara sedemokratis Amerika Serikat pun kisah tragis sering terjadi. Misalnya belum lama ini diberitakan enam orang tewas, tiga belas terluka termasuk anggota Kongres Gabrielle Giffords, dalam serentetan penembakan di Arizona. Presiden Barack Obama perihatin atas "tragedi yang tidak berperikemanusiaan" itu (*Kompas.com*, 10/1/2011).

Kisah tragis semacam itu bisa terjadi di mana saja, dan tampaknya masih akan terus menghiasi lembaran sejarah demokrasi itu sendiri. Kekerasan itu musuh utama kaum demokrat, walaupun ironisnya demokrasi sering ditumpangi pihak yang memanfaatkan kekerasan untuk tujuan politik. Seruan "kekerasan harus diakhiri" sangat relevan, walaupun tidak dapat mencegahnya sama sekali.

Kisah kaum demokrat versus perilaku antidemokrasi, mirip novel detektif Agatha Christie, Sherlock Holmes, dan para pengarang masa kini yang ceritanya rumit. Untuk melenyapkan "pembajakan demokrasi oleh kaum penjahat" butuh proses, penuh likuliku, adakalanya tak terhindarkan banyak korban. Novel demokrasi kita masih tebal, kisahnya masih seru: penuh intrik dan tipu daya, retorika dan malapetaka. Kaum demokrat dihadapkan musuh yang "tak kelihatan" – bisa jadi dirinya sendiri tak sadar antidemokrasi.

SEPERTI NOVEL

ISTILAH "novel demokrasi" yang saya pinjam dari John Keane, "*the noveltic of democracy*". Keane menulis buku tebal, hampir 1000

halaman berjudul *The Life and Dead of Democracy* (2009). Ia banyak mengulas pasang naik dan surutnya praktik demokrasi Barat, dan menelisik kembali ke gagasan awalnya. Buku ini segera mengingatkan pendapat Winston Churchill, demokrasi memang bukan sistem yang terbaik, tetapi masih yang terbaik dibandingkan sistem-sistem lain yang pernah dicoba.

Dalam sub judul *the noveltic of democracy* Keane mendiskusikan konteks hubungan antara agama dan demokrasi khususnya merujuk pengalaman Barat. Bahwa agama mestinya bukan merupakan kendala bagi demokrasi. Agama bisa jadi spirit demokrasi, mengingat demokrasi substansial banyak yang berimpitan dengan nilai-nilai agama, seperti keadilan, kesederajatan, penghargaan HAM, antikekerasan, hingga kebebasan yang bertanggungjawab.

The noveltic of democracy kita masih diwarnai pernik-pernik perilaku antidemokrasi. Kita tentu prihatin tiap menyaksikan pemberitaan-pemberitaan media massa, khususnya di televisi-televisi yang "setiap saat" menyiarkan perilaku antidemokrasi di mana-mana. Catat berapa berita perusakan kampus oleh para oknum mahasiswa, tawuran pelajar, penghakiman massa, penyerangan tempat ibadah, demonstrasi yang berakhir ricuh, bentrok antarmassa kandidat pilkada, dan ekspresi-ekspresi "orang-orang marah" lainnya.

Sudah demikian rapi penjelasan ihwal dari mana kata run amok berasal. Sumbangan perbendaharaan kata Melayu ke Bahasa Inggris itu, membuat seolah-olah kita terus-menerus dibayang-bayangi oleh "budaya mengamuk", suka menyelesaikan masalah dengan "pukul dulu urusan belakangan". Novel demokrasi kita masih diwarnai kekerasan kecil-kecilan di mana-mana – tapi yang namanya kekerasan, besar atau kecil, intinya tetap kekerasan.

POLITIK DAN HUKUM

PROSES pembudayaan demokrasi memang selalu dihadapkan pada hal-hal yang merintanginya. Pelebaran jarak antara substansi dan prosedur seringkali justru banyak memunculkan adegan-adegan noveltik antidemokrasi. Proses demokrasi elektoral yang tak diser-

tai oleh budaya demokrasi, hanya menyuburkan praktik pragmatisme-transaksional. Demokrasi tenggelam dalam praktik-praktik antidemokrasi.

Dari sini, penegarakan hukumlah yang diharapkan tampil efektif. Namun, seperti politik, penegakan hukum kita juga noveltik, bahkan kisahnya terlalu melingkar-lingkar tak jelas ujung pangkal. Seringkali hukum hanya tampil seperlunya, sambil lalu. Dan manakala hukum hanya embel-embel saja tanpa daya, ekspresi-ekspresi antidemokrasi dijamin makin variatif. Karenanya, pembiaran-pembiaran yang naif semakin biasa terjadi.

Soal penegakan hukum yang lembek bisa jadi karena memang niatnya masih sangat bermasalah, sistemnya kacau, tantangannya semakin pelik, atau aparatnya yang penuh keterbatasan. Secara khusus, masalah utama para elite penegak hukum ialah masih di seputar membangkitkan satu kata: keberanian.

Hukum dan politik kelihatannya seperti dua entitas yang berbeda, dan semestinya memang demikian. Tetapi, novel politik kita seringkali kental terasa ketika politik merambah dunia hukum sedemikian rupa. Politisasi hukum terasakan akibatnya, tetapi tentu saja susah membuktikannya. Misteri kekuatan-kekuatan besar di balik kasus-kasus besar, sepertinya selalu beredar dalam masyarakat yang semakin rasional.

Dalam orde di mana negara tak lagi sepenuhnya mampu mewujud sebagai, apa yang disitir Thomas Hobbes, *Leviathan*, monster dasar laut yang ganas itu, novel politik yang terbeber di pentas demokrasi kita, pertarungan antar-kekuatan besar yang seringkali tak mampu dipahami rakyat awam. Tanggungjawab pendidikan politik elite kurang terekspresikan impresif, kecuali aktivitas kepentingan yang dikemas secara pencitraan. Namun, teladan elite berpolitik tetap dirindukan.

Cara mengingatkan elite tak selalu dengan menyudutkannya, tetapi memberi sentuhan agar mereka bekerja benar dan bertanggungjawab. Novel demokrasi arus bawah yang terberitakan mudah

mengamuk, tentu tak dapat sepenuhnya dilepaskan dari gaya, sikap, dan perilaku elite (arus atas). Novel demokrasi kita belum lepas dari watak rakus dan jahat. Walaupun tak mungkin manusia berubah malaikat, sistem demokrasi yang baik diharapkan dapat mengantisipasi aksi-aksi musuh antidemokrasinya.●

Militer dan Transisi Demokrasi Mesir

KOMPAS, 14 FEBRUARI 2011

SETELAH delapan belas hari aksi demonstrasi menewaskan lebih 300 orang dan melukai ribuan lainnya, Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri. Wakil Presiden Omar Suleiman mengatakan bahwa untuk sementara pemerintahan dipegang oleh Dewan Agung Militer Mesir (*Kompas*, 12/2/2011).

Hal tersebut membuktikan militer merupakan kekuatan politik paling penting pada proses transisi pasca-Hosni Mubarak. Selama demonstrasi, terkesan militer dapat menahan diri untuk tidak bertindak represif. Militer enggan merepresentasikan diri sebagai pelindung rezim Mubarak yang kadar popularitasnya, meminjam sastrawan perempuan Mesir, Nawal el Sadawi, "di titik nol".

Bahkan, militer cukup berhasil dalam mengendalikan keadaan, dan tidak serta-merta dipandang sebagai musuh kaum demonstran. Tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi bila militer bertindak represif membubarkan demonstrasi anti-Mubarak. Kalau itu terjadi, mungkin kondisinya akan mirip Peristiwa Tiananmen, 1989.

MILITER DAN DEMOKRASI

STEVEN A Cook dalam *Ruling but Not Governing, the Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey* (2007) mencatat, militer (*military enclave*) merupakan kekuatan politik penting pelindung rezim yang berkuasa di ketiga negara yang menjadi kajian studinya. Namun, dalam kasus Turki, sejak isu demokrasi

mengemuka yang tak lepas dari tekanan Uni Eropa dan hadirnya pemerintahan AKP sejak 2002, pengaruh politik militer mulai melemah.

Cook menggarisbawahi pola dominasi militer sebagai pelindung rezim otoritarian telah terpatahkan di Turki. Tetapi tidak di Aljazair dan Mesir. Namun, dapat dicatat sekarang, militer sangat berpeluang mengakhiri transisi politik ke arah rezim yang demokratis di Mesir. Polanya akan cenderung sama dengan kasus Portugal 1974, yang menarik perhatian Samuel P Huntington sehingga mencatatnya dalam *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (1991), sebagai pemicu gelombang demokrasi ketiga. Bedanya, pada kasus Portugal, militer melakukan kudeta, tetapi lantas menciptakan pemerintahan yang demokratis.

Dewan Agung Militer, yang tengah membawa politik, tak punya pilihan selain mengakomodasi tuntutan demokratisasi warga Mesir yang jengah dengan praktik-praktik politik rezim sebelumnya. Ujung dari proses politik transisi diharapkan tercipta suatu pemerintahan yang demokratis. Karena itu, agenda terpenting untuk segera direalisasikan oleh Dewan Agung Militer adalah mempersiapkan pemilu yang demokratis.

Kasus Turki dan Mesir setidaknya menunjukkan militer variabel politik penting dalam proses demokrasi di negara berpenduduk mayoritas Muslim itu. Apabila berhasil, keduanya, dalam batas keunikan masing-masing, dapat menjadi contoh model negara-negara Muslim di Timur Tengah dan Afrika lainnya. Ini akan menjadi bagian dari jawaban, apakah Islam kompatibel dengan demokrasi.

TIDAK DISKRIMINATIF

SEKARANG, yang menjadi isu sensitif di negara-negara Muslim, kekhawatiran hadirnya kelompok-kelompok Islam radikal. Di Mesir, kelompok *Ikhwanul Muslimin* termasuk yang dikhawatirkan. Tetapi, yang perlu dicatat, dalam kasus Turki dan Indonesia, yang mengemuka justru fenomena Muslim demokrat di mana kekuatan politik Muslim memainkan peran penting dalam demokrasi.

Manakala instrumen demokrasi telah tertanam kokoh, keterbukaan politik mekanisme *checks and balances* tercipta, diasumsikan proses deradikalisasi politik terjadi dengan sendirinya. Dalam konteks transisi politik Mesir, sikap dan kebijakan yang tidak diskriminatif dalam pengelolaan politik pasca-Mubarak tentu saja menjadi persyaratan yang penting.

Kalau jalan pemilu dipilih, rakyat Mesir akan memberi legitimasi bagi kehadiran rezim demokratis pasca-Mubarak. Bagaimana dampak rezim politik pasca-Mubarak terhadap konstelasi politik regional Timur Tengah dan internasional, perlu pembahasan tersendiri. Belajar dari peran militer sebagai pendorong demokratisasi, seyogianya militer Mesir tak membuat *blunder* dalam proses transisi. Prioritas mendesaknya menjaga stabilitas, agar kerugian sosial dan ekonomi tak semakin membesar pasca-demonstrasi. Rakyat harus berkonsentrasi kembali bekerja setelah berhasil menumbangkan rezim Mubarak, sembari mengawasi proses transisi.●

Mengevaluasi Pemimpin

KOMPAS, 26 SEPTEMBER 2011

DAPATKAH pemimpin dievaluasi? Pertanyaan ini cukup aneh, karena biasanya yang sering diwacanakan dievaluasi itu anak buah. Apakah presiden yang dipilih secara demokratis, juga perlu dievaluasi? Pertanyaan ini lagi-lagi aneh, karena biasanya yang sering diwacanakan dievaluasi itu menteri-menterinya.

Istilah yang lebih lunak, barangkali bukan dievaluasi, tetapi dinilai. Istilah dievaluasi terkesan targetnya pelengseran atau penggantian, tetapi kalau dinilai, sekedar diberi masukan. Namun, tetap saja intinya mengevaluasi atau menilai pemimpin itu wajib dalam logika demokrasi. Jangankan dalam demokrasi, dalam sistem politik feodalistik *a la* pewayangan saja, dengan "*sense of humor*" yang tinggi para punakawan biasa angkat bicara mengevaluasi tuannya.

Setiap politisi yang sadar kepemimpinannya pasti sadar sejak

awal, bahwa sepanjang perjalanannya akan selalu dinilai khalayak. Ekspresi kritik moderat-kualitatif yang mengemuka dalam seminar-seminar dan opini-opini media massa, atau yang lebih radikal melalui beragam demonstrasi, merupakan bentuk-bentuk penilaian yang lazim.

Dalam sistem demokrasi, para pemimpin ialah sosok-sosok demitologi yang biasa dikritik. Karena bukan sosok mitis sekarisma apapun, mereka tetap dinilai sikap dan kebijakannya secara rasional-terukur. Tentu, pada level masyarakat dengan tingkat partisipasi politik tinggi, daya kritisnya kuat, dan kepedulian mengkritik pemimpin lebih tinggi ketimbang yang awam.

SENI MEMUTUSKAN

KARENA pemimpin itu sosok berpangaruh, yang dinilai pertama kali kualitas pengaruh dan efektivitas kepemimpinannya. Seorang presiden misalnya, dinilai kemampuannya mengendalikan kabinet, tidak semata-mata dari sudut politik, tapi juga dimensi influensialnya dalam kualitas kerja. Ia harus sepenuhnya menunjukkan tanggung jawab atas pilihan politik dan konsekuensinya. Karenanya, setiap muncul isu *rhesuffle* kabinet, ulasan yang mengemuka semestinya tak sekedar evaluasi kinerja menteri berikut respons partai politik yang terlibat, tetapi juga bagaimana presiden tampil sebagai seniman politik yang terkait gaya pemimpin memutuskan sesuatu.

Apakah presiden akhirnya melakukan pergantian sosok-sosok kabinetnya atau tidak, itu hak prerogatifnya. Tetapi, ibarat petinju, kalau di mata penonton Muhammad Ali tampak menyia-nyiakan momentum bagus meng-*knock out* lawannya, pasti muaranya kecewa. Penonton yakin Ali masih tetap menang angka, tetapi kecewa dengan hilangnya banyak momentum. Presiden punya mekanisme dan petimbangan sendiri dalam memutuskan. Justru di tengah situasi krusial di mana masyarakat menunggu hasil keputusan itulah, menariknya mencermati bagaimana seni pemimpin memutuskan.

Sebagaimana peluang-peluang dalam petinju, atau pinalti

dalam sepakbola, dinamika pemerintahan dan kepolitikan nasional, pemerintahan adakalanya dinilai menarik dan membanggakan, adakalanya menjengkelkan. Ketika era ideologi berakhir berganti dengan pragmatisme pembangunan, para aktivis yang idealis biasa menilai bahwa pemerintahan yang ada monoton dan tidak menarik. Walaupun, ketika ekonomi tidak tumbuh, kemiskinan dan pengangguran membesar karena *jor-joran* ideologi-aliran, sama juga tidak menariknya.

Pada saat ini memang harus disadari, tidak gampang menjadi pemimpin politik yang otentik dan efektif, justru di tengah-tengah era kepolitikan yang liberal-pragmatis. Tapi, seyogyanya pemimpin akan merasa rugi, manakala dinilai banyak menyia-nyiakan kesempatan, dan sebaliknya bangga, manakala fungsi-fungsi kepemimpinannya jalan dan mengesankan.

PENDISIPLINAN

DI TENGAH realitas-objektif pragmatisme, tetap saja para pemimpin politik punya peluang besar untuk merubah keadaan, bahkan dapat merubah kultur. Tidak seperti kebudayaan, ranah politik suka dipandang punya keterbatasan. Kebudayaan berpintu banyak, politik berpintu satu. Tapi, politik itu kekuatan dan pengaruh. Dan pemimpin politik punya peluang untuk mendisiplinkan banyak hal.

Kepemimpinan juga berarti pendisiplinan. Gaya dan pendekatan memimpin berpengaruh pada proses pendisiplinan itu. Pemimpin bangsa mestinya berpengaruh melampaui sekedar mendisiplinkan kabinet, tetapi mendisiplinkan bangsa. Tidaklah mungkin itu dilakukan sekedar melalui jargon-jargon, kecuali dengan motivasi, aksi, dan kebijakan nyata.

Kita tidak perlu pemimpin besar penuh simbol-simbol, melainkan pemimpin biasa saja asal efektif mendisiplinkan banyak hal. Yang pengaruh dan daya inspirasinya jauh melampaui kebesaran dan jangka waktu jabatannya. Pada tiap elite politik perlu disadarkan bahwa mereka bukan orang biasa, melainkan para pemimpin yang bukan sekedar pejabat yang penuh simbol kebesaran.●

Revolusi dari Toilet

DOKUMENTASI PENULIS, 5 JANUARI 2012

KETIKA isu renovasi toilet di Gedung DPR mengemuka, saya ingat apa yang dikisahkan Kishore Mahbubani. Dalam *Asia Hemisfer Baru Dunia* (Penerbit *Kompas*, 2008), ia mengisahkan pengalamannya bersentuhan dengan modernisasi pertama kali, "pada hari kedatangan *flush toilet*". Pada hari itu, catat sosok yang menjalani masa kecilnya di Singapura ini, ia merasa telah terjadi loncatan perubahan mendadak dalam hidupnya. Menurutnya, akses sehari-hari pada *flush toilet* boleh jadi merupakan indikator yang terbaik betapa sekian banyak dari 6,5 miliar manusia di dunia kita sekarang, masih hidup dalam dunia pramodern.

SELARAS Mahbubani, kehadiran *flush toilet* terkait kemajuan dunia modern. Tapi, ternyata, piranti modern belum sepenuhnya disikapi sesuai mentalitas kemodernan. Seorang satpam di sebuah kantor pernah mengeluh tentang banyaknya tamu yang, kalau pipis, tidak disiram. Padahal, tinggal pencet, air mengucur deras, menggelontor kotoran yang tersisa.

Kalau demikian ceritanya, percuma saja orang menemukan benda yang bernama *flush toilet* itu, manakala penggunanya tak taat logika dan aturan kemodernan fungsional benda itu. Maka, apa beda orang-orang yang punya toilet canggih di rumah atau kantornya tapi tak mau menyiram, dengan saudara-saudara kita yang masih mandi cuci kakus (MCK) di Sungai Citarum? Karenanya, belum tentu, dari sudut kecanggihan toilet, dapat dikatakan para anggota DPR lebih bermental modern ketimbang yang tidak bertoilet.

Toiletisasi masyarakat pramodern penting dari sudut kesehatan dan kepraktisan. Salah satu program unggulan para mahasiswa saat

kuliah kerja nyata di desa-desa adalah membangun sarana MCK, termasuk toilet yang lebih modern. Tapi, bisa jadi MCK yang telah dibangun dengan dana yang tidak sedikit itu, tak dimanfaatkan oleh penduduk. Kalau itu terjadi, maka saya kira, penyebabnya adalah pendekatannya yang terlalu teknis, kurang sosiologis dan kultural. Memindahkan kultur pratoilet menjadi kultur modern "peradaban toilet", karenanya, bukanlah hal sepele.

PARA ILMUWAN politik pengajur teori modernisasi yang populer sejak dekade 1960-an, terjebak pada logika teknis di atas. Modernisasi yang dilancarkan cenderung akultural, *top down*, sentralistik, homogen, dan terlampau menekankan *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi. Baru pada pasca-perang dingin, tampak, mereka ramai-ramai menegaskan pentingnya budaya. Dalam kajian mereka, kegagalan modernisasi selama ini, sangat terkait dengan konteks budaya (Harrison dan Huntington, *Culture Matters*, 2001).

Modernisasi akultural, tidak hanya tercermin dari adanya toleransi pada praktik-praktik penyelenggaraan kekuasaan yang tidak demokratis, tetapi juga tercermin dari perilaku orang-orang yang tidak mampu beradaptasi dengan piranti-piranti modern yang memudahkan hidup mereka secara beradab. Contoh yang paling jelas, adalah "orang modern" yang ternyata berperilaku tak senonoh terhadap *flush toilet*-nya di atas. Mentalitas pragmatisme-transaksional terpantul, karena merasa itu bukan tugasnya, kecuali kewajiban petugas toilet. Mentalitas dilayani itu, diam-diam mengendap dan terekspresikan pada hal-hal yang dipandang sepele dan tak substansial. Padahal, ia terkait kualitas peradaban.

MAKA, bukan hanya besarnya anggaran renovasi toilet yang patut disorot. Lebih dari itu, pola pikir dan mentalitas menegakkan peradaban. Demokrasi akan sangat hambar, "tidak layak tonton", manakala pendekatannya diwarnai ekspresi akultural. Memasuki dunia modern tak terelakkan berarti tumbuhnya ketaatan lebih besar pada aturan hukum. Tetapi, yang jauh lebih mendasar juga ekspresi-ekspresi etisnya.●

Di Mana Partai-partai?

KOMPAS, 27 FEBRUARI 2012

THE MORALITY OF A [POLITICAL] PARTY MUST GROW OUT OF THE CONSCIENCE AND THE PARTICIPATION OF THE VOTERS.

- ELEANOR ROOSEVELT

BEBERAPA hasil lembaga survei belakangan ini menunjukkan kecenderungan anjloknya popularitas hampir semua partai politik kita. Kondisi semacam ini mengkonfirmasi bahwa fluktuasi reaksi antipartai sedang dalam titik yang rendah. Masyarakat jenuh dengan partai-partai yang kurang aktual keberadaannya. Mereka hadir dengan pamrih, bukan sebenar-benar "dewa penolong" bagi kompleksitas masalah sehari-hari.

Sesungguhnya partai-partai sekarang punya kesempatan luas mengakar ke bawah (*party rooting*), karena tidak berlakunya lagi praktik "massa mengambang" (*the floating mass*). Namun, kelihatannya partai-partai masih belum beranjak dari posisinya sebagai "benda mati", berupa kibaran bendera dan simbol-simbol, bukan gerakan sosial yang peduli dan konkrit.

Masyarakat tak butuh bendera dan simbol, kecuali peran nyata mengatasi masalah mendesak dan mendasar. Ketika media massa menyorot jembatan "Indiana Jones" di suatu daerah terbelakang, di mana partai-partai? Ketika pembangunan tidak beranjak maju, di mana partai-partai? Partai-partai masih sebatas mementingkan "politik panggung", enggan mengembangkan diri sebagai "gerakan sosial". Paradigma yang dipraktikkan terlalu kuno dalam perkembangan demokrasi kita. Yakni, paradigma memoles wajah dengan bedak dan gincu pencitraan menuai dukungan suara secara instan.

Mereka hanya perlu "pinjam tangga" legitimasi rakyat, untuk sekadar naik ke kekuasaan. Ketika mereka dibutuhkan kiprahnya nyata, justru tak kunjung hadir. Ketika hendak pemilu, mereka ramai-ramai hadir justru tak memberi pendidikan politik, melainkan praktik pragmatisme-transaksional. Masyarakat sering tak tahan dan menjadi masokis, semakin "disakiti", semakin "merasa nyaman". Maka, hancurlah kultur "demokrasi kita".

POLITISI YANG OTENTIK

INILAH yang membuat partai cenderung berwajah menyebalkan. Tak ada yang tampak sungguh-sungguh memberdayakan. Partai bukan perusahaan, tetapi sebagai instrumen politik ia mampu mendorong perubahan. Terutama, apabila kepemimpinan partai visioner dalam membangun kelembagaan partai, mengarahkan ke sana. Bukan yang pendek jangkauan visinya, yang semata mementingkan politik oligarkis. Partai yang baik, bukan sekedar mesin pendulang suara, kecuali punya kader bermutu, politisi otentik.

Partai otentik tak ahistoris dengan permasalahan rakyat, benar-benar membangun kader dan menuai simpati rakyat, dibesarkan rakyat. Kalau partai dipercaya dan menjadi tumpuan harapan, para politisinya tak bakal sibuk "menyedekahi" konstituen, tetapi sebaliknya mereka akan didukung beramai-ramai ongkos politiknya. Jadi, bagi partai, tidak saja diperlukan kelembagaan yang kuat, tetapi juga kemampuannya melakukan revolusi perilaku politik.

MEMULIHKAN KEPERCAYAAN

YANG DIBUTUHKAN partai, pemulihan kepercayaan. Mestinya partai ada di masyarakat, menjadi bagian dari solusi. Mereka harus mengada, bukan sebatas poster dan simbol, melainkan ada kader yang jelas. Akar-akar partai harus tertanam kuat. Partai-partai memang tak selalu merupakan "pahlawan" dalam segala urusan, tetapi setidaknya hadir dengan kultur egaliternya, menyapa dan menjadi bagian dari masyarakat dalam menghadapi kompleksitas hidup. Kalau tidak, adanya partai-partai itu, sama dengan tidak adanya.

Bisakah partai mengelak dari pola patronase dan politik uang yang mempersubur praktik pragmatisme-transaksional, padahal ia sudah seperti benang kusut raksasa yang tersendat di ujung gang, sehingga sangat susah diurai? Tanpa upaya sungguh-sungguh berbagai pihak, terutama partai sendiri, benang itu semakin kusut. Upaya perbaikan harus datang dari segala arah, butuh proses dan harus ada yang berani memulai.●

Eksperimen Politik Golkar

DOKUMENTASI PENULIS 30 JUNI 2012

AKHIRNYA, secara resmi Aburizal Bakrie dikukuhkan sebagai capres dari Partai Golkar pada Rapimnas III di Bogor, 29 Juni 2012. Pengukuhan itu sebagai tindaklanjut hasil Rapimnas sebelumnya yang merekomendasikan ia satu-satunya tokoh Golkar yang dicapreskan. Keputusan itu berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, dan juga dengan banyak partai lain yang belum mengukuhkan capresnya.

Semasa kepemimpinan Akbar Tandjung, pencapresan Golkar dilakukan melalui konvensi. Semasa JK ia dilakukan melalui keputusan Rapimnas pasca-pemilu. Penjelasan Golkar merubah strateginya, agar hanya ada skenario tunggal dan pencapresannya tidak terlambat. Maksudnya, supaya semua fokus menggerakkan mesin politik Golkar dengan waktu yang cukup untuk mensosialisasikan dan mendongkrak elektabilitas capres. tetapi ekepreimen demikian memang cukup berisiko. Manakala Aburizal tak populer dan mendapat "penolakan", Golkar akan turut kena imbasnya.

Terlepas persoalan demokrasi internal cara pengambilan keputusannya yang nyaris tanpa riak politik berarti, kenyataannya Aburizal sebagai pemegang kekuasaan eksekutif partainya, tak terbendung lagi untuk dicapreskan. Setelah ini ia akan dipaketkan dengan partainya sebagai satu kesatuan kampanye. Karenanya, yang akan dihadapi bukan lagi keluarga besar partainya, melainkan publik

luas yang memiliki beragam aspirasi dan preferensi politik. Komunikasi elektoral Aburizal sedang diuji sekarang.

MELINTASI SIMBOL

SEBAGAIMANA keputusan Golkar semasa JK, tampilnya Aburizal adalah keputusan *beyond the symbols*. Pemilih terbesar pilpres terkonsentrasi di Jawa. Sehingga, terobosan *beyond the symbols* sangat terkait dengan "mindset" politik yang lebih rasional, ketimbang sekedar bersentimenkan Jawa atau luar Jawa. Tetapi, kenyataannya, apakah peta politik elektoral Indonesia sudah demikian "beyond the symbols"?

Tampaknya, simbol Kejawaan masih menjadi mitos kuat politik Indonesia, dan Golkar berani menerobosnya. Kecuali istrinya, Aburizal bukan orang Jawa. Dalam logika politik simbol, ini jadi persoalan. Karenanya, pemberian penghargaan kepada para tokoh budaya Jawa oleh Aburizal belum lama ini, setidaknya merupakan bagian dari upaya mengatasi persoalan itu.

Di sisi lain, juga masih muncul wacana kuat, dan ini sah-sah saja, agar ia berpasangan dengan tokoh yang memenuhi unsur Jawa dan mantan militer. Dalam khasanah politik simbol, Aburizal juga dihadapkan pada persepsi publik Jawa yang suka mengidentifikasi tokoh politik dengan tokoh pewayangan. Betapapun terobosan politik "*beyond the symbols*" meninggalkan peajaran bagi demokrasi, tetapi dalam kompetisi antar-tokoh, tetap saja mengemuka persoalan pengkarakteran.

Di sisi lain, politisi berlatarbelakang pengusaha ini juga bergulat dengan sejumlah negativitas, antara lain penuntasan kasus Lapindo. Pihaknya pasti sudah memperhitungkan bagaimana kasus itu akan menjadi kampanye negatif yang merugikan, berikut strategi untuk membaliknya menjadi modal positif.

Sebagaimana tokoh-tokoh lain, pergerakan elektabilitas Aburizal harus terus dicermati. Itu penting bagi Golkar untuk mengambil kebijakan politiknya kelak. Golkar adalah partai modern dan ra-

sional, karenanya pertimbangan yang semata-mata emosional saja, akan bisa fatal. Pengalaman sebelumnya, terutama Pilpres 2009, cukup untuk menjadi bahan pelajaran.

MASA DEPAN GOLKAR

BAGAIMANAPUN pencapresan Aburizal merupakan bagian dari sejarah masa depan Golkar. Apakah pencapresannya menjadi faktor negatif atau positif bagi pergerakan elektabilitas partainya, harus terus-menerus dicermati. Ini wajar, karena sifat pilpres dan pemilu legislatif itu berbeda. Manakala pendekatan dan langkahnya tidak tepat, bisa saja Aburizal justru faktor negatif bagi pemenangan partainya. Tetapi, yang penting sekarang adalah, bagaimana Golkar bisa memenangkan dirinya dalam pemilu legislatif. Eksperimen politik Golkar penuh konsekuensi. Seberapa efektif rumus kesatuan tokoh dan partai dalam kampanye, akan benar-benar diuji di lapangan.●

Komik dan Wajah Kepolitikan Kita

DOKUMENTASI PENULIS 24 JULI 2012

BAPAK Komik Indonesia, RA Kosasih wafat pada usia 93 tahun (24/7/2012). Kita berduka telah kehilangan maestro komik terkemuka. Tetapi, ajaran komik Kosasih tetap membekas kuat, ketika kita baca ulang komik-komiknya yang legendaris, dari Mahabharata dan Ramayana hingga Sri Asih, pahlawan super perempuan yang Indonesiawi itu. Dari komik-komiknya, sesungguhnya kita tengah belajar tentang ketokohan, yang terbagi dalam sifat kepahlawanan versus kejahatan, kepantasan versus keserakahan. Sadar tidak kita, ikonografi tokoh-tokoh yang menyembul dalam komik-komik Kosasih adalah gambaran dari wajah kepolitikan kita?

Komik adalah jenis media untuk menyampaikan pesan. Pembaca yang kritis akan berupaya menangkap hikmahnya. Setidaknya

sejak dekade 1950-an, komikus-komikus Indonesia berupaya menampilkan karakter-karakter tokoh universal yang Indonsiawi. Misalnya, Sri Asih merupakan upaya keras Kosasih dalam menghadirkan tokoh kita sendiri, walaupun inspirasinya dari komik Barat. Penciptaan cita rasa Indonesia penting untuk menumbuhkan nasionalisme, pun agar kita tidak lupa dengan wajah sendiri.

Alur cerita komik-komik kita pada abad lalu, biasanya khas. Satu sisi ada pihak yang didzalimi tokoh-tokoh jahat. Ada yang menjadi korban kejahatan. Kemudian, hadir tokoh yang tampil membela yang lemah. Tokoh ini tidak sombong, penampilannya khas tapi sederhana, dan yang terpenting, sakti mandraguna. Ada beberapa tokoh rekaan seperti Si Buta dari Gua Hantu dan Panji Tengkorak, ada juga tokoh yang diambil dari legenda yang pernah ada, seperti Si Pitung atau Jampang dari Betawi.

Dari tokoh-tokoh itu, hadir suatu persepsi umum bahwa kita butuh pemimpin yang bisa menyelamatkan dari tekanan atau kejahatan keadaan. Kita butuh tokoh yang tulus tanpa pamrih, pahlawan pembela kebenaran, yang tidak pernah membebani rakyat, melainkan membebaskan rakyat dari tekanan hidup. Karakter-karakter tokoh komik wayang yang digambarkan Kosasih, lebih kompleks lagi, tetapi prinsipnya sama. Kita akan segera bisa tersambung dengan tokoh yang pantas dan otentik sebagai ksatria sejati, serta mana yang serakah alias antagonis.

Tidak semua tokoh protagonis itu lurus-lurus saja kehebatannya, melainkan penuh dengan ujian dan cobaan. Artinya, tidak ada tokoh yang muncul seketika, mendadak sakti tanpa sebab yang jelas. Bahkan Gatutkaca pun perlu digembleng di kawah Chandradimuka. Pendawa Lima pun pernah kalah main judi, dan sebagai akibatnya mereka terusir dan terlunta-lunta. Para tokoh protagonis selalu sadar akan harga diri, dan punya standar etika yang konsisten ditaati.

Meskipun tertimpa berbagai ujian dan cobaan, tokoh yang baik secara ikonografis digambarkan sebagai yang lemah lembut secara etika. Sebaliknya, yang jahat berangasan, anarkhis dan dipenuhi dengan nafsu kekuasaan yang tinggi untuk merebut dan memperta-

hankannya dengan segala cara. Misalnya Arjuna yang kstaria lemah lembut itu, akan sangat kontras manakala disandingkan dengan Raksasa Cakil atau Terong. Yang tak kalah menarik lagi, baik di sisi baik maupun jahat, terdapat komunitas punakawan yang tugasnya mengingatkan agar yang baik tak terjerumus jahat, yang jahat bisa menjadi baik. Hanya, komunitas terakhir itu biasanya marjinal.

Dunia politik kita, sesungguhnya hampir persis dengan kisah-kisah komik dan tokoh-tokohnya. Sependapatkah kita, bahwa dalam tradisi demokrasi elektoral satu orang satu suara, citra atau kekuatan tokoh itu penting? Kalau sepakat, maka dalam menimbang pemimpin mana yang layak, ukuran umumnya adalah kewajaran dan kepantasan. Karena syarat untuk menjadi tokoh antagonis, pertama-tama harus wajar dan pantas.

Komik dan wayang, sering terlampau ekstrim menggambarkannya secara fisikal. Misalnya, yang protagonis berdada bidang, yang jahat bergigi taring. Tetapi, bukan berarti substansi terhilangkan. Karena logikanya, simbol itu muara dari etika dan isi. Yang permukaan perwujudan dari kedalaman. Semua sudah melalui proses panjang kreativitas para pujangga. Tapi masih bisa terjadi pembalikan simbolik, atau setidaknya anomali, bahwa tidak semua raksasa itu jahat. Tidak semua kstaria berkumpul di kubu politik Pandawa yang secara simbolik baik, karena yang berhak atas kekuasaan. Ada banyak kstaria pula di kubu Kurawa.●

Semangat Mencari Pemimpin

DOKUMENTASI PENULIS, 26 SEPTEMBER 2012

SALAH satu wacana yang mengemuka ketika Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) memenangkan Pilkada DKI adalah evaluasi partai-partai politik. Pasalnya, Jokowi-Ahok yang didukung sedikit partai, ternyata tetap menang melawan pasangan Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli (Foke-Nara) yang pada putaran kedua didukung banyak partai. Betapapun Jokowi-Ahok

juga hadir dari partai, pesan penting pasca-pilkada DKI adalah agar partai-partai bekerja lebih optimal lagi dalam menyuguhkan calon-calon pemimpinnya kepada publik.

Dalam pilkada, partai lebih leluasa dalam menghadirkan calon ketimbang perseorangan atau independen. Tetapi dalam pilpres, calon-calon pemimpin nasional untuk menduduki jabatan presiden dan wakil presiden masih dimonopoli partai-partai. Terkait dengan yang terakhir ini, publik mau tidak mau bergantung kepada lembaga partai politik sebagai penentu akhir siapa calon yang didukungnya.

Di wilayah kepartaian sendiri, unsur kekecewaan juga mengemuka pada partai-partai yang khawatir tidak akan mencapai dukungan yang cukup untuk dapat mengajukan calon. Kalaupun ketentuan presidential threshold diturunkan menjadi limabelas persen, maka hanya beberapa partai saja yang mampu menghadirkan calon. Kelihatannya semangat membatasi pasangan calon cukup kuat di parlemen sekarang, khususnya oleh fraksi-fraksi besar, sehingga cukup mustahil manakala threshold dihilangkan. Jenjang-jenjang prosedural itulah yang membuat seleksi kepemimpinan nasional menjadi sangat terbatas.

KEKUASAAN VERSUS REALITAS

KELESUAN semangat mencari calon pemimpin nasional secara optimal tampaknya melanda partai-partai. Proses pencarian calon pemimpin itu, kalaupun sudah ada yang melakukan, untuk ukuran publik rasanya masih demikian eksklusif. Publik atau setidaknya pandangan-pandangan publik tidak terikutsertakan. Proses demokrasi internal partai rata-rata juga belum berkembang. Hal ini bisa dipahami mengingat, pola dominannya elitisme-oligarkis, kaau bukan justru bosisme. Tentu bukan tidak ada demokrasi di tubuh partai, tetapi kecenderungannya terarah secara minimalis saja.

Partai seolah telah berkembang menjadi arena robotik yang terkendali sedemikian rupa oleh struktur insentif yang sangat efektif, justru karena penyuburan tradisi pragmatis. Kekuasaan menentukan keputusan akhir secara cepat, tanpa harus mempertimbang-

kan aspek-aspek realitisnya. Kekuasaan, dalam praktiknya dipakai untuk mengingkari pertimbangan-pertimbangan logis, kepada eksperimen politik yang "membahayakan" masa depan partai. Ia juga menyuburkan sentimen antipartai.

Apa yang disuguhkan partai akan menjadi referensi publik. Suguhan calon, memaksa publik menimbang. Tetapi, publik idealnya menjadi referensi partai, ketika partai memutuskan calonnya. Yang terakhir ini, bisanya tak dilakukan sungguh-sungguh, kecuali lebih banyak memakai parameter elektabilitas kuantitatif. Ketika hal itu dilakukan, aspek kualitas-deliberatif cenderung terabaikan.

KUALITAS DAN ELEKTABILITAS

PUBLIK maunya partai-partai menyuguhkan calon-calon pemimpin yang tidak minimalis. Tetapi, barangkali ini kurang realistis. Tetapi juga tidak bijak, manakala partai dipojokkan dan diemohi. Publik juga harus bertanggungjawab untuk mau memberi referensi kepada partai-partai. Artinya, publik atau asosiasi-asosiasi yang berkembang di masyarakat, seyogyanya lebih proaktif, setidaknya dalam menumbuhkan semangat mencari pemimpin yang kualitatif dan memenuhi semangat zaman.

Pemimpin harus diciptakan. Rekam jejaknya harus jelas dan transparan. Pandangan-pandangannya juga tergambar. Peran media penting. Media yang independen memberi kesempatan yang "sama" kepada semua potensi calon pemimpin tampil. Karena, hal demikian tidaklah mungkin dilakukan media "partisan". Publik bisa mendorong agar media proporsional. Harapannya, publik, partai dan media mampu menghadirkan resultan yang penting.

Kita perlu menengok negara-negara demokrasi dalam mencari pemimpin. Di Amerika Serikat misalnya, kehadiran calon pemimpin nasional melibatkan interaksi partai dan publik. Tradisi konvensi sudah berjalan baik di sana, dimana lembaga partai telah berfungsi optimal dalam membuka diri dan menyediakan prosedur. Tak hanya publik di internal partai, tetapi publik luas juga berkesempatan untuk menimbang-nimbang sang calon pemimpin. Kekurangan

sedikit saja, bisa diperdebatkan panjang lebar. Memang susah untuk menghadirkan pemimpin yang kuat. Tetapi, semangat mencari pemimpin itu tampak dalam rangkaian konvensi.

Di Indonesia, eksperimen memunculkan pemimpin telah berkembang di daerah-daerah dengan pola berbeda-beda. Fenomenanya semakin menunjukkan kecenderungan yang lebih "realistis". Pola konvensi juga sudah lazim, walaupun sering tenggelam oleh pola hasil jajak pendapat. Kualitas pemimpin seharusnya berimpit dengan tingginya elektabilitas, tetapi seringkali tidak demikian. Tetapi semangat untuk mencari titik temu antara kualitas dan elektabilitas itu, sudah mulai terasa di daerah-daerah.

Publik bisa mendorong elektabilitas calon yang berkualitas. Tanpa sikap proaktif publik, calon berkualitas akan selalu "tertinggal kereta" dan luput untuk dikenali serta akhirnya dipilih pemilih. Partai harus semangat dalam mencari pemimpin, publik dan media juga harus proaktif untuk menghadirkan yang terbaik.●

Momentum Demokrasi Ekonomi

DOKUMENTASI PENULIS, 14 NOVEMBER 2012

PADA sidangnya 13 November 2012, MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki hukum mengikat. Fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan pemerintah, c.q. kementerian terkait, sampai diundangkannya UU yang baru yang mengatur hal tersebut. Keputusan tersebut merupakan puncak dari uji materi yang diajukan oleh 42 pemohon, baik organisasi maupun perorangan.

Terlepas dari teknis transisi kebijakan migas pasca ditiadakannya BP Migas, apa yang diputuskan MK tersebut merupakan ba-

gian dari dinamika demokrasi ekonomi. MK memperhatikan suara masyarakat (*civil society*) yang mengamati adanya ketidakberesan dalam regulasi ekonomi nasional yang dipandang lebih banyak mengakomodasi kepentingan asing. Dengan kewenangannya untuk menilai dan memutuskan seluruh regulasi ekonomi, bertentangan atau tidak dengan konstitusi, maka MK telah menjadi instrumen demokrasi ekonomi Indonesia.

Keputusan MK tersebut cukup disambut baik di kalangan masyarakat, setidaknya direpresentasikan oleh organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh terkemuka yang mengajukan uji materi. Bahwa tekanan publik, bisa membuat kebijakan nasional berubah. MK telah menjadi saluran untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Tentu saja ini merupakan suatu peristiwa politik juga, ketika tekanan publik mampu meyakinkan MK mengambil keputusan strategis.

KEBIJAKAN PUBLIK

POLITIK terkait kebijakan publik. Kita tahu terutama sejak era Reformasi 1998, reformasi politik terjadi atas tekanan publik. Kebijakan politik berubah drastis. Walaupun hampir setiap lima tahun sekali UU bidang politik terus diperbaiki, tetapi poinnya tetap pada perubahan itu sendiri. Di bidang lain, terutama ekonomi, masih banyak yang belum beranjak berubah.

Dengan kata lain, reformasi telah membuahkan banyak hasil pada reformasi politik, tetapi tidak demikian halnya pada reformasi ekonomi. Memang, apabila ditelusuri sejak awal Reformasi, aspirasi-aspirasi untuk merubah kebijakan ekonomi nasional secara mendasar banyak mengemuka oleh tokoh-tokoh reformasi. Tetapi, upaya memperjuangkannya tidak seintensif reformasi politik, lagi pula tampak belum adanya keberanian dari para pemimpin bangsa untuk melakukan reformasi ekonomi secara drastis.

Tentu banyak penjelasan dan alasan mengapa reformasi ekonomi secara drastis tidak terjadi di Indonesia. Bila dikaji dari perspektif ekonomi neoliberal, maka tampaknya tidak mudah bagi siapapun yang memimpin negeri ini untuk merubah secara radikal

kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada. Semua, berbicara atas nama kepentingan nasional, tetapi dengan dalih sendiri-sendiri. Ekonomi konstitusi, lebih banyak menjadi wacana multitafsir, ketimbang rumusannya yang jelas dan aplikatif.

OPTIMISME KE DEPAN

PELUANG kita untuk melakukan reformasi ekonomi yang konsisten pada "ekonomi konstitusi", masih angat terbuka ke depan. Kita sudah memiliki banyak instrumen untuk menuju ke sana. Ada institusi MK, dan tentu juga lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPD. Partai-partai politik juga merupakan instrumen penting, yang tampaknya selalu ditantang untuk lebih rasional dan tidak melawan arus aspirasi publik. Di sisi lain *civil society* kita ternyata tidak "mati".

Inti demokrasi ekonomi, sesungguhnya hampir sama de-ngan demokrasi politik, *checks and balances*. Kalau demokrasi politik ada *trial and error*, dalam demokrasi ekonomi juga demikian. Selama ada kebijakan ekonomi yang dipandang *error* dari sisi kepentingan nasional, maka harus segera dikoreksi secara tegas. Dan, dalam hal ini harus ada kepemimpinan yang kuat dan berani, dengan dukungan kolektivitas segenap *stake holders* bangsa.

Bagaimanapun, apa yang diputuskan oleh MK itu telah menjadi fakta sejarah yang segera ditindaklanjuti, dan bukan untuk dilawan. Semoga ini meninggalkan pelajaran penting dan pemicu segenap pengambil kebijakan untuk tidak saja menyadari pentingnya demokrasi ekonomi, tetapi juga mengutamakan skala prioritas tertinggi kepentingan nasional. Indonesia negara besar, kaya sumberdaya alam dan memiliki banyak potensi, maka jangan sampai para pemimpinnya mengalami disorientasi dan salah kelola.●

XV

INTELEKTUALISASI POLITISI

[2013-2014]

TIDAK TERLAMPAU BERLEBIHAN KALAU BANYAK YANG MENGATAKAN, KRISIS INTELEKTUALITAS AMAT TERASA DI DUNIA POLITIK KITA SAAT INI. PROSES, DINAMIKA, HINGGA PRODUK-PRODUK POLITIK BANYAK YANG JAUH DARI SEMANGAT DAN NILAI INTELEKTUALITAS. ELITE YANG BERKUASA (THE RULLING ELITES) MEMANG TIDAK DIDOMINASI KAUM INTELEKTUAL MESKI INTELEKTUALITAS BUKAN MONOPOLI KAUM INTELEKTUAL. DALAM KONTEKS INILAH INTELEKTUALISASI POLITISI DIPANDANG MENDASAR.

- INTELEKTUALISASI POLITISI

Hakikat Persaingan Partai

KOMPAS, 23 JANUARI 2013

POLITICAL PARTIES ARE LIKE POETS, BORN, NOT MADE
- HENRY FORD

KETIKA KOMISI Pemilihan Umum telah menetapkan sepuluh partai politik peserta pemilu, kompetisi semakin jelas. Dalam bingkai demokrasi prosedural, partai-partai berebut pengaruh. Sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, mempertegas hakikat persaingan tidak semata antarpartai, tetapi antarelite. Bahkan, inilah kali pertama eksperimen perebutan pemilih *one person, one vote, one value* (OPOVOV) di pasar politik yang terbuka.

Nomor calon anggota legislatif (caleg) tidak lagi sesignifikan pemilu bersistem proporsional tertutup. Kecuali aspek psikologis, caleg nomor urut satu tidak otomatis terpilih. Semua harus berpeluh dalam kompetisi yang meniscayakan kanibalisme politik.

Maka, persaingan tidak hanya bersifat eksternal atau antarpartai, tetapi persaingan di dalam tak kalah seru. Kegaduhan politik 2013 hingga Pemilu 2014 akan didominasi persaingan yang cenderung pragmatis-transaksional. Multipartai berebut pemilih terbatas dan beradu strategi di dua pemilu, legislatif dan pilpres.

Namun, tingginya partisipasi membuat para elite politik tidak terlalu resah dengan fenomena golongan putih (golput) atau *non-voters*. Di tingkat lokal, memang banyak pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dimenangkan golput. Hanya saja, gejala demikian belum akan terjadi pada pemilu nasional. Artinya, pasar politik na-

sional masih terbuka atau prospektif.

PENYEMPITAN IDEOLOGI

BANYAK PENELITIAN dan analisis mengenai karakter pemilih, tetapi aspek kultural yang masih sangat melekat di bangsa Timur mengenai fenomena patron sosial kurang dibahas. Para elite sosial akan menjadi penentu ke mana arah dukungan politik. Mereka adalah kelompok referensi penentu sehingga menjadi sasaran para elite politik yang tengah bersaing. Elite-elite sosial itu, setidaknya dalam rekam jejak era reformasi ini, cenderung mengabaikan aspek ideologis.

Penyebabnya, pertama, kaburnya ideologi politik di Indonesia pasca-Orde Baru. Partai yang satu dengan yang lainnya hampir tidak berbeda, kecuali simbolnya. Partai seolah hanya sebatas simbol. Sementara dalam menyikapi kebijakan publik, tidak tampak partai yang mengusung isu pemihakan ideologis.

Spektrum ideologi politik kita juga semakin sederhana. Sepuluh peserta Pemilu 2014 secara umum dapat dibelah jadi dua, yakni nasionalis dan Islam. Sebagai perbandingan, sepuluh peserta Pemilu 1971 lebih variatif ketika partai Kristen dan Katolik eksis. Pada Pemilu 2014, konstituen akan dihadapkan pada pilihan non-ideologis.

Kedua, gencarnya pendekatan pragmatis-transaksional membuat pergerakan politik lebih banyak disetir oleh struktur insentif ketimbang ideologi. Artinya, aksi politik Laswellian *who gets what* yang mengemuka. Dalam konteks ini, mobilisasi politik akan menggejala dengan penggeraknya adalah kapital. Maka, ongkos politik semakin mahal pasca-Reformasi.

KONTES ELITE

KARENA PENANDA ideologis kabur, yang mengemuka adalah tokoh. Partai adalah alat pelontar tokoh-tokoh. Pemilu-pemilu era Reformasi, khususnya setelah pilpres langsung, sesungguhnya merupakan kontes elite atau tokoh. Maka, kepopuleran tokoh menen-

tukan. Piranti media menjadi sangat penting.

Idolisasi politik mengemuka. Ketika KPU memperbolehkan kampanye terbatas partai peserta pemilu (11 Januari 2013 hingga 5 April 2014), itu hanya formalitas saja. Kampanye yang sesungguhnya telah berlangsung lama. Masyarakat hanya menjadi obyek penetrasi pengaruh elite partai. Dari sisi inilah, eksistensi dan peran kelompok kritis dalam masyarakat sangat dibutuhkan.

Kelompok kritis berisiko menjadi kue bika, dari atas diimpit partai-partai dan dari bawah oleh masyarakat yang permisif. Sayang, menjelang Pemilu 2014 elemen independen pro-demokrasi tidak sesemarak era transisi (1998-1999 dan 1999-2004). Institut demokrasi banyak yang tidak lagi terdengar kiprahnya.

Dengan langkanya kelompok kritis yang independen, dalam demokrasi kontestatif ini kita hanya bisa berharap pada bekerjanya checks and balances. Artinya, para elite yang berlaga itu yang saling mengontrol, baik dalam internal partai maupun antarpartai. Tetapi, yang perlu diingat adalah sisi gelap yang bisa terjadi lebih sering, yakni kerja sama transaksional-pragmatis.

Di tengah realitas demikian, etika dan rasionalitas politik harus tetap mengemuka. Di seberang wilayah etika, penegakan hukum harus kuat. Perangkat-perangkat formal yang berfungsi dalam pengawasan pemilu dituntut bekerja ekstra keras. Penegak hukum harus berwibawa, konsisten, dan independen.

EPILOG

MASALAH DARI pemilu ke pemilu sepanjang Reformasi ini sebenarnya hampir sama, yaitu sebagai momen *vivere pericoloso* yang mempertaruhkan kualitas demokrasi. Pemilu mestinya tidak boleh sekadar disikapi secara teknis, melainkan harus diwaspadai sebagai sebuah permainan politik.

Pemilu dengan gaya demokrasi elektoral yang demikian bebas ini harus dipikirkan untuk tidak melabrak bangunan integrasi bangsa. Legitimasi demokrasi penting dalam suatu bangsa yang

berdaulat. Karenanya, ia harus dijaga untuk tak berhenti sebatas permainan. Demokrasi teknis harus dengan cepat bertransformasi ke demokrasi makna. Bila demikian, persaingan politik bukan dipandang semata persaingan demokrasi teknis, melainkan persaingan yang bermakna. Inilah tantangan para elite partai. ●

Defisit Kemodernan Politik

KOMPAS, 31 MEI 2013

HARIAN *KOMPAS* (20 Mei 2013) merangkum pandangan, setelah 15 tahun reformasi, parpol gagal memberi perubahan substansial kepada rakyat. Parpol yang berperan strategis dalam demokrasi, justru berkutat urusan pertarungan kekuasaan demi keuntungan segelintir elite. Pandangan yang segera diamini berbagai pihak ini, kritik serius bagi elite parpol. Mengapa sampai demikian?

Jawaban akademisnya, parpol abai memperkuat kelembagaannya. Institusionalisasi jalan di tempat, bahkan tekor. Wajah politik kita, akibatnya, tidak hadir dari pancaran organisasi politik modern yang memiliki disiplin kesisteman (*systemness*) yang baik. Sebaliknya, dinamika digerakkan oleh *dawuh para gusti* alias kehendak konsentrasi elite berkuasa. Praktik presidensialisme-parpol, ironisnya terpotret sedemikian itu.

Modernisasi politik yang ditandai penguatan kelembagaan justru di era reformasi ini tak sepenuhnya dijadikan orientasi. Tradisionalitas patron-klien atau patronase politik yang meminggirkan logika kemodernan tampak lebih dominan. Disiplin kesisteman tergeser pemusatan kekuasaan dengan segala derivasi perilaku elite oligarki partai. Fungsi kepemimpinan bergeser sekadar merebut dan mempertahankan kekuasaan faksional, sesaat, dan kurang kontributif dalam menyokong perubahan substansial.

Para elite saat ini seharusnya belajar kembali pada pengalam-

an para elite pelopor kebangsaan tempo dulu. Salah satu pelajaran berharga dari Kebangkitan Nasional adalah pendekatan organisasi modern. Berdirinya *Boedi Oetomo* 1908 — sering dipakai sebagai titik yang menandai perubahan strategi perjuangan — oleh Sejarawan Anhar Gonggong disebutnya dari fisik ke visi. Strategi fisik yang sebelumnya merujuk pendekatan tradisional bertransformasi ke strategi visi melalui kehadiran sejumlah organisasi modern.

Modernitas organisasi kemudian menjadi ciri menonjol tiap pergerakan. Visi sosial-politik diterjemahkan lebih tertata. Militansi terawat oleh disiplin anggota yang patuh pada sistem. Meskipun organisasi-organisasi tersebut diawasi ketat pemerintah kolonial, tingkat pelembagaan politiknya tinggi. Konsistensi para aktivis yang bergerak melalui organisasi modern tampak dari kerapian susunan pengurus, berjalannya kongres-kongres, dan ragam gebrakan yang terasakan oleh rakyat.

Berpolitik secara modern mengemuka. Para elite menyembul dengan peran kepemimpinan masing-masing. Mereka memperhatikan perkaderan, sehingga organisasi ialah basis kader. Di tengah kondisi rakyat yang terbatas tingkat pendidikan dan kesejahteraannya, sikap dan kebijakan organisasi, nyata. Para elite tak elitis. Politik tak hanya bermakna mengupayakan kemerdekaan bangsa, tapi juga mencerdaskan dan memajukan ke-sejahteraan rakyat.

DEINSTITUSIONALISASI POLITIK

PARA ELITE tampil sebagai pemimpin-pemimpin politik yang jelas. Modernitas organisasi yang dilengkapi sikap kepemimpinan para elitenya klop dengan sambutan rakyat yang penuh harap. Yang tercipta adalah kebersamaan. Karena itu, meskipun ditindas penguasa kolonial, gairah perjuangan yang telah memperoleh bentuk baru kemodernan politik jauh lebih efektif.

Wajah kemodernan politik kita dewasa ini tampak tereduksi arus kuat deinstitusionalisasi partai-partai politik. Ini gejala gawat karena dinamika didominasi sekadar oleh ”tinju-tinju politik” yang tanpa seni. Konsepsi pelembagaan politik, yang sudah menjadi

klasik, misalnya, dikemukakan Huntington dengan empat kriteria, yakni adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensi.

Tekanan stabilitas dan soliditas organisasi versi Huntington, sering dikritik membenarkan jalan nondemokrasi. Makanya, wacana pelembagaan politik dewasa ini selalu dilekatkan dengan demokrasi. Bahwa pelembagaan politik mempersyaratkan keberadaan partai-partai politik yang demokratis. Tantangan utamanya bagaimana stabilitas dan soliditas tercipta secara demokratis.

Ukuran utamanya, terjaminnya proses pengambilan keputusan secara otonom dan demokratis. Kalau hal itu diabaikan, kemodernan partai diterapkan setengah hati. Pengambilan keputusan dan kesisteman, selain aspek nilai, merupakan hal-hal yang mendasar dalam pelembagaan partai. Meskipun semua partai berharap memperoleh citra yang baik di mata publik, kerangka institusionalisasi tidak merekomendasikan langkah-langkah yang instan. Pemusatan kekuasaan dan langkah-langkah instan pencitraan tak saja berbahaya bagi partai bersangkutan, tapi juga masa depan demokrasi. Sayangnya, hal seperti itu yang kita rasakan hari-hari ini.●

Intelektualisasi Politisi

KOMPAS, 9 JUNI 2013

EXPERIENCE WITHOUT THEORY IS BLIND, BUT THEORY WITHOUT EXPERIENCE IS MERE INTELLECTUAL PLAY

- IMMANUEL KANT

TIDAK TERLAMPAU berlebihan kalau banyak yang mengatakan, krisis intelektualitas amat terasa di dunia politik kita saat ini. Proses, dinamika, hingga produk-produk politik banyak yang jauh dari semangat dan nilai intelektualitas. Elite yang berkuasa (*the rulling elites*) memang tidak didominasi kaum intelektual meski intelektualitas bukan monopoli kaum intelektual. Dalam konteks inilah intelektualisasi politisi dipandang mendasar.

Indonesia pernah mengalami masa di mana dunia politik nasional didominasi politisi-intelektual. Masa itu, perdebatan intelektualnya ingar-bingar. Presiden pertama, Bung Karno, tipe politisi intelektual. Sebelum kemerdekaan, Bung Karno banyak menulis gagasan tentang bangsa, kemanusiaan, dan anti-penjajahan. Politisi zaman itu genealoginya intelektual terdidik.

Generasi kita di zaman sekarang dengan mudah menelusuri rekam jejak pemikiran politik mereka. Bung Karno, misalnya, menulis *Di Bawah Bendera Revolusi*, Bung Hatta *Demokrasi Kita*, Bung Sjahrir *Perjuangan Kita*, Tan Malaka *Madilog*, Pak Natsir *Capita Selekta*, A.H. Nasution *Memenuhi Panggilan Tugas*, dan T.B. Simatupang *Laporan dari Banaran*. Hampir semua menulis secara otentik. Pandangan dan sikap politiknya jelas. Itulah cermin generasi politisi intelektual terdidik.

IDEOLOGIS KE TEKNOKRATIS

DI ZAMAN kita, hal itu tak terjadi lagi. Definisi kaum intelektual lebih cair, tak semata yang berpendidikan tinggi. Fragmentasi ideologis tak setajam masa lalu. Karena itu, kebutuhan berdebat ideologis dan berpolemik di media massa dipandang kurang relevan. Yang semarak, *talk show* di televisi yang durasinya singkat dan para politisi dituntut bisa atraktif.

Bahkan, nyaris tak ada tuntutan intelektualitas penyusunan visi-misi ketika seseorang hendak maju sebagai pejabat politik. Tradisi menulis buku langka, kecuali semi-biografi untuk kepentingan pragmatis. Kita sudah melalui fase perdebatan bertele-tele di Badan Konstituante, Dekrit Presiden pada 1959, kemudian masuk ke era Orde Baru, di mana tradisi perdebatan intelektual bergeser drastis: dari ideologis ke teknokratis. Para politisi Orde Baru dihadapkan pola pikir baku pembangunanisme. Mereka yang berpikir di luar kerangka itu, misalnya perspektif dependensia, letaknya di luar arus utama.

Intelektualisasi politik Orde Baru, proses dan hasil akhirnya terlihat dari produk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN

adalah produk intelektual "sakral" yang harus dijalankan oleh Presiden.Pola pikir teknokratis juga merangsek ke DPR dan mewarnai produk-produk legislatif. Pemerintah lebih proaktif mengajukan rancangan undang-undang dan mengoptimalkan pengaruhnya sehingga DPR jadi semacam "tukang stempel".

Nuansa "penyeragaman politik" terasa sekali. Dalam logika Orde Baru, itu semua demi kebaikan bersama: menopang stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Logika membuat kue besar dan kemudian terbagi rata mengemuka. Teori menetes ke bawah (*trickle down effect*) populer.

REINTELEKTUALISASI

BAIK INTELEKTUAL zaman ideologis maupun teknokratis membentuk pengalaman masing-masing. Pada era reformasi, ketika situasi kepolitikannya lain, kaum intelektual banyak yang terakomodasi di dunia politik. Pada mulanya mereka pelopor dan dinamisator reformasi. Mereka begitu mewarnai panggung politik di era transisi meski harus berbaur dengan politisi lama sebagai konsekuensi pola politik, meminjam Huntington, transplasi.

Reformasi diterjemahkan dan kemudian mewujud pada konstitusi, sistem kepolitikan, lembaga, dan otonomi daerah yang serba baru, hingga sosialisasi gagasan empat pilar kebangsaan oleh MPR. Semua itu hadir di tengah iklim kebebasan politik dan pers mutakhir. Tak ada lagi yang terlampau disakralkan, termasuk Pancasila. Ia dipandang rasional, bukan mitologis dan indoktrinatif.

Intelektualisasi berarti rasionalisasi. Semua produk politik bisa direvisi dengan pertimbangan ada aspek rasional yang lebih penting. Bahkan, pada praktiknya, banyak produk legislasi, terutama bidang politik selalu berubah-ubah. Terasa sekali politisi kita gagal mendesain produk legislasi yang basis akademisnya kuat dan bisa langgeng. Faktor penting lain adalah adanya Mahkamah Konstitusi sebagai otoritas yang bisa "merevisi" produk-produk legislasi itu. Masyarakat dan para intelektual di luar arus kekuasaan berpeluang "berpolitik" melalui mekanisme uji materi (*judicial review*).

Banyaknya produk politik yang tak optimal karena prosesnya terlampau berorientasi pragmatis, membuat nuansa intelektualitas di panggung politik nyaris tak terasa. Argumen-argumen teoretis kurang mendapat tempat. Meminjam Immanuel Kant, tampaknya kita lebih banyak merasakan *experience without theory*. Sementara kaum intelektual tak begitu berminat masuk politik. Mereka cenderung apatis karena politik dirasa kurang menguntungkan bagi yang punya gagasan. Gagasan sebagai ciri kaum intelektual terbentur batas-batas kepentingan praktis politik. Produk politik bukan muara gagasan, tetapi konsensus kepentingan.

Kita perlu peran lebih besar kaum intelektual dalam politik walaupun mereka tidak harus terlibat dalam politik sehari-hari. Kaum politisi pun harus membuka diri dan bekerja sama lebih erat dengan para intelektual agar terbentuk pola intelektualisasi politik yang mandiri dan kreatif.●

Calon Presiden Pilihan Survei

KOMPAS, 17 SEPTEMBER 2013

THE PRESIDENCY IS MORE THAN A POPULARITY CONTEST
- AL GORE

SEJAK pilpres diselenggarakan langsung, survei politik semakin penting. Tak dimungkiri, metode survei merupakan cara ampuh melihat kecenderungan politik. Kita masih ingat, kemenangan SBY-JK pada Pilpres 2004 sudah dapat dicandra oleh hasil-hasil survei. Pada Pilpres 2009 dan menjelang Pilpres 2014, lembaga survei sudah sedemikian hiruk-pikuknya dalam meneropong popularitas dan elektabilitas para bakal capres.

Dalam demokrasi langsung, popularitas tokoh penting. Wajar manakala politisi, sebagaimana artis, butuh terkenal. Politisi harus

hadir dan aktual. Kalau tidak, mereka akan tenggelam. Politisi dituntut sigap merespons banyak hal, dibarengi kecanggihan merawat basis dukungan. Ibarat kontes penyanyi idola, politisi tak hanya dituntut bersuara merdu, tetapi juga pandai meraup dukungan. Media massa, pengamat politik, dan komentar publik di ranah media sosial, ibarat juri komentatornya.

KONTES IDOLA

IDOLISASI tak dapat dinafikan. Tokoh dan parpol, seringkali dua entitas berbeda. Tokoh bisa lebih populer ketimbang parpol, bahkan tokoh bisa melejitkan popularitas parpol. Namun, dalam sebuah sistem politik yang ditandai kokohnya kelembagaan parpol, mestinya tokoh dibesarkan dan dilejitkan po-pularitasnya oleh parpol. Terkadang, dalam beberapa kasus, tokoh parpol bukanlah politisi berpengalaman sehingga tak merasa perlu memperkokoh institusi partai. Ketika partai direbut kekuasaannya dari elite terdahulu, elite sentralnya langsung mencapreskan diri. Tentu ini sah-sah saja, tetapi ia segera berhadapan dengan hukum kontes idol politik.

Parpol sangat istimewa dalam sistem politik dewasa ini, terlebih ditilik dari tata cara pilpresnya. Semua kandidat harus melalui parpol. Konstitusi tak memungkinkan majunya kandidat independen. MK telah menutup pintu bagi kemungkinan itu, kecuali konstitusinya diubah. Namun, selama parpol tak berniat mengamendemen konstitusi, kontes bakal capres akan sangat bergantung mereka. Padahal, tidak semua parpol mau menggelar konvensi.

Konvensi bisa jadi semacam pilpres mini. Memang belum tentu capres hasil konvensi memenangi pilpres, tapi punya efek melejitkan popularitas parpol yang menyelenggarakannya. Pilpres mini dan pilpres punya semangat sama, meski logikanya berbeda. Capres konvensi bisa kuat elektabilitasnya, bisa juga tidak. Kontestasi politik selalu mempertimbangkan perbandingan. Kerap popularitas dan elektabilitas antar-capres berimpitan. Adakalanya pula tak seimbang. Hasil-hasil survei menuntut rasio publik.

MENCARI PEMIMPIN

DALAM situasi seperti sekarang, kita diingatkan pendapat Al Gore di atas. Mestinya, pilpres tak sekadar perlombaan kepopuleran tokoh. Kita tentu akan tergoda membuat kalimat, seperti, kepopuleran tokoh belum tentu mencerminkan kualitas kepemimpinannya. Khalayak ramai bisa jadi suka kepada tokoh tertentu, bukan karena kualifikasi kepemimpinannya, melainkan karena faktor lain.

Harus diakui, mengukur kualitas kepemimpinan tokoh bagi publik cukup sulit. Popularitas tokoh baru biasanya dinilai sekadar antitesis tokoh lama. Dalam konteks inilah, publik tak sepenuhnya bisa memiliki daya obyektivikasi yang cukup untuk memilih pemimpin. Nah, perspektif Al Gore di atas menuntut, tanggung jawab pemasok kepemimpinan, yakni parpol-parpol.

Perspektif Al Gore juga mengajak kita tak mendewa-dewakan hasil survei, sebab ia bukan satu-satunya penentu. Bagi parpol yang kuat kelembagaannya, kontes kepresidenan bukan segala-galanya. Ia tak ingin asal-asalan. Lebih baik jadi oposisi terhormat, ketimbang pilihan lain. Kesadaran dan pola pikir demikian terdengar terlalu ideal di era pragmatis. Tetapi, untuk kebutuhan jangka panjang, parpol harus kuat kelembagaannya, agar jadi pemasok pemimpin bangsa yang lebih bermutu.●

Arus Balik Politik Kekerabatan

KOMPAS, 2 NOVEMBER 2013

WACANA ANTIPOLITIK dinasti (kekerabatan) yang marak belakangan ini, dikaitkan berurusannya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan KPK. Seperti mendapat momentum, berbagai elemen masyarakat Banten memprotes fenomena tersebut. Masih dalam lingkup keluarga, kerabat Atut ada yang menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang, Wali Kota Tangerang Selatan,

Wakil Bupati Serang, dan Wali Kota Serang. Fenomena ini juga tak luput dari komentar Presiden SBY.

Berita *Kompas* (19/10/13) mencatat, setidaknya ada 37 kepala daerah terpilih memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat daerah lain. Mereka tersebar di sejumlah provinsi. Sebagian kerabat meneruskan jabatan yang sama. Bupati Indramayu Anna Sophanah meneruskan jabatan suaminya, Irianto MS Syafiuddin. Demikian pula dengan Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, Bupati Bantul Sri Suryawidati, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, yang melanjutkan posisi suami masing-masing. Adapun Mohammad Makmun Ibnu Fuad menggantikan ayahnya, Fuad Amin, sebagai Bupati Bangkalan.

Pola lainnya, maju dalam pilkada dengan posisi berbeda. Contohnya, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, sedangkan anaknya, Rycko Menoza, menjadi Bupati Lampung Selatan. Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dan anaknya, Ivan SJ Sarundajang, Wakil Bupati Minahasa. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan adiknya, Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa.

Dalam konteks ini, perlu diapresiasi upaya Kementerian Dalam Negeri yang mengusulkan pembatasan kerabat yang mencalonkan diri dalam pilkada dan juga legislatif. Kendatipun responsnya tidak seragam terkait dengan pembatasan itu di DPR, setidaknya isu politik kekerabatan terus menggelinding.

KONFLIK KEPENTINGAN

ISU TERSEBUT memicu kritik, politik kekerabatan tak sebatas dinasti politik lokal, tetapi juga lingkup partai dan nasional. Dengan demikian tak dapat dicegah, makna politik dinasti mengalami kemuluran atau perluasan. Makna yang luas ini bisa dipahami karena kekerabatan dalam politik, praktiknya bisa merambah ke banyak tempat: partai, legislatif, eksekutif, dan jabatan publik lainnya.

Yang ditolak dalam politik kekerabatan sebenarnya bukan pelarangan hak politik seseorang. Namun, untuk menghindarkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, seseorang

yang masih satu kerabat — apakah ke atas atau ke samping dengan pejabat politik aktual — perlu diberi jeda waktu kompetisi politik. Inilah yang memerlukan aturan.

Selain konflik kepentingan, jaringan politik kekerabatan juga berpotensi menyandera kepentingan publik. Apalagi apabila kebijakannya didasari pola pikir kepentingan kekerabatan. Ia akan mirip dengan ekses oligarki politik yang mementingkan elite atau kelompoknya. Maka, kalau konflik kepentingan menjadi payung utamanya, reformasi politik masih jauh dari final. Isu politik kekerabatan tingkat lokal hanyalah pintu masuk untuk menguak isu-isu politik yang lebih mendasar konflik kepentingan di tingkat nasional.

Politik kekerabatan yang marak membentuk polanya tersendiri. Corak klientalistik dan bosistik dalam politik kekerabatan yang marak di lingkup lokal juga akan terpantul dalam cermin politik nasional. Filipina adalah contoh kasus yang agak ekstrem dalam soal ini. Kritik juga marak, tetapi upaya pengaturan yang lebih jelas belum berhasil dilakukan. Dalam kasus Filipina pula, kekerasan politik juga lazim terkait dengan fenomena persaingan politik keluarga.

DEMOKRASI LOKAL

PRAKTIK POLITIK kekerabatan tingkat lokal biasanya ditandai jaringan kerabat politik yang tidak memperoleh tandingan yang setara. Daya rambahnya terus menguat, bahkan tak mudah terkoreksi oleh *civil society*. Lagi pula, yang lazim mengemuka bukan semata sentimen klientalistik keningratan, tetapi lebih pada corak pragmatis-transaksional. Untuk merawat popularitas dan jaringan kekerabatan, butuh biaya besar, potensi korupsinya pun besar. Wacana antipolitik kekerabatan sebaiknya menjadi pelajaran bagi partai-partai untuk memperkuat basis perkaderan dan orientasi meritokratiknya. Di sisi lain, *civil society* harus lebih proaktif dalam menjernihkan demokrasi lokal.●

Balada Senjakala Kekuasaan

KOMPAS SIANG (EDISI ONLINE), 4 DESEMBER 2013

KASIHANILAH PEMIMPIN YANG TERPERANGKAP DI ANTARA PENGKRITIK YANG TIDAK MENCINTAI DAN PECINTA YANG TIDAK MENGKRITIK.

- JOHN GARDNER, NOVELIS

KEPEMIMPINAN dan kekuasaan selalu terkait. Namun, kekuasaanlah yang selalu menjadi magnit. Beberapa bulan setelah masa kepresidenannya berakhir, Eisenhower ditanya apakah meninggalkan Gedung Putih telah mempengaruhi permainan golfnya. "Ya," jawabnya, "lebih banyak orang mengalahkan saya sekarang".

Dari sepotong kalimat Eisenhower itu, kita diajak menebak, dan kemungkinan jawaban dari tebakan kita itu benar, bahwa ketika berkuasa ia lebih banyak memenangkan permainan golfnya. Seperti kita orang Timur, mungkin banyak anak buah yang sungkan untuk mengalahkan bosnya dalam pertandingan olahraga. Kalau bos mengajak golf, para anak buah sibuk mengatur diri bagaimana supaya selalu dalam posisi kalah.

Jawaban Eisenhower tersebut, tampaknya mewakili banyak pejabat politik yang tidak lagi aktual. Kendatipun tidak dalam konteks sindrom pasca-berkuasa (*post-power syndrom*), apa yang disitir Eisenhower itu mencerminkan ketika kekuasaan tak lagi digenggaman, seorang pemimpin seperti kehilangan magnit. Hal ini wajar sebagai salah satu kaidah hukum kekuasaan.

Para pemimpin di senjakala kekuasaan dengan ekspresi ane-

ka rupa, biasanya secara naluriah khawatir manakala tak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru. Karenanya, ia mengupayakan jaminan politik agar kehidupannya nyaman. Di Indonesia, terutama sejak masa transisi 1998 lazim terdengar istilah *khusnul khatimah*, merujuk pandangan yang menginginkan agar seorang presiden dapat mengakhiri kekuasaannya dengan baik.

Itu harapannya. Tapi di era demokrasi bebas belakangan ini, harapan itu agak sedikit terganggu kebebasan informasi yang berlebihan. Para pemimpin dan mantan pun banyak disikapi tidak secara *mikhul dhuwur mendhem jero*. Kalau pemimpin terlibat pelanggaran hukum, tentu kasusnya tak dapat dikubur. Mahkamah sejarah memberi pelajaran, tak ada pemimpin yang sempurna.

UJIAN KEKUASAAN

ADA BENARNYA ujaran Abraham Lincoln, jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Kekuasan memang ujian sempurna bagi karakter seseorang. Tidak jauh-jauh, contoh kisahnya yang selama ini berkembang di masyarakat adalah lakon wayang *Petruk dadhi Ratu*. Petruk, salah satu aktor Punakawan yang sedianya merepresentasikan rakyat jelata, mendadak menjadi raja. Maka, apa yang terjadi? Karakter Petruk yang asli bermunculan. Tentulah Petruk bukan penguasa demokratis, tetapi sebaliknya dia berbuat banyak hal yang membuat negara jadi berantakan.

Itu penggambaran. Dalam alam nyata, para pakar psikologi kepribadian bisa mengulas panjang lebar karakter presiden-presiden kita. Salah satu hal yang penting untuk dicermati, bagaimana mereka memecahkan persoalan, memotivasi pengikut, memposisikan diri dalam politik, dan dalam menerima kritik. Dalam hal kritik, kita segera memahami ujaran John Gardner di atas. Ketika pemimpin reaktif terhadap kritik, ia seperti tengah kehilangan cermin.

PEMIMPIN KECIL

DI SENJAKALA kekuasaan, publik berkesempatan melihat dan menilai kualitas kepemimpinan pemimpinnya. Publik menunggu se-

jauhmana warisan (*legacy*) yang ditinggalkan, mengkalkulasikannya dengan sejumlah kebijakann kontroversial di masa berkuasa. Warisan tentu saja akan ditinggalkan oleh siapapun pemimpin. Tetapi, tidak dapat dimungkiri, mereka juga meninggalkan masalah, kalau bukan beban, yang harus dijawab generasi selanjutnya.

Karena itulah, di senjakala kekuasaan, pemimpin harus fokus tugas dan pekerjaannya, membuat terbosan-terobosan kendati melawan arus, dan mereduksi diri menjadi pemimpin kecil, untuk membedakan dengan pemimpin besar. Pemimpin kecil berurusan hal-hal kecil, jauh dari kenegarawanan. Setiap pemimpin pernah membuat labirin sebagai dampak terobosan. Pemimpin besar selalu bisa keluar dari labirinnya dengan mudah. Pemimpin kecil sibuk mencari jalan keluar dari labirin yang semakin *ruwet*. Betapa banyak pelajaran yang sudah kita dapat dari hadir dan lengsernya kekuasaan para pemimpin. Semoga pemimpin kita sekarang mampu mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar kemanfaatannya kelak.●

Masalah Abadi Demokrasi Kita

KOMPAS, 3 FEBRUARI 2014

IMAGINATION IS THE POLITICS OF DREAMS; IMAGINATION TURNS EVERY WORD INTO A BOTTLE ROCKET ...

- SHERMAN ALEXIE, THE LONE RANGER AND TONTO FISTFIGHT IN HEAVEN

KEPUTUSAN MK bahwa pemilu serentak akan dilaksanakan pada 2019 disambut beragam. Satu pihak menyebutnya bijak. Pihak lain, inkonstitusional. Terlepas polemiknya, fenomena ini menunjukkan masih adanya masalah krusial dalam pemilu dan demokrasi. Sejak Reformasi 1998, aturan main politik berganti-ganti. Sistem multipartai ditandai mekanisme berpartai yang berubah-ubah, tidak dalam semangat memperkuat sistem presidensial.

Sistem pemilu pun bergerak evolutif dari proporsional tertutup menjadi terbuka murni berbasis dukungan suara terbanyak. Sistem Pemilu 2014 kontras dengan 1999. Pada 1999, nomor urut diperebutkan karena jaminan keterpilihan, tetapi pada 2014 pertimbangannya bergeser ke keuntungan psikologis pemilih.

KEPENTINGAN PARPOL

MEKANISME pilpres juga berubah cukup mendadak dan tak pasti. Berubah-ubahnya ketentuan ambang batas presidensial (*presidential threshold*) menegaskan ketidakpastian itu. Lagi-lagi, urusan demikian ditentukan para politisi Senayan yang mencerminkan kepentingan partai. Ketentuan ambang batas dapat dipahami dalam mekanisme demokrasi politik, tetapi besaran angka persentasenya seharusnya sudah jelas dan tidak berubah-ubah sejak awal.

Hal-hal semacam itu, termasuk perkembangan dan debat teknis pilpres apakah tetap dipertahankan melalui pemilihan langsung atau dikembalikan ke dalam ruangan (melalui MPR), menunjukkan ada masalah yang tak kunjung usai dalam demokrasi politik kita. Semua itu memang kesannya teknis semata, tetapi kepastian aturan main sangatlah mendasar dalam konsolidasi demokrasi. Menurut Adam Przeworski, demokrasi terkonsolidasi manakala hanya ada satu aturan main dan ketika tak seorang pun bisa membayangkan bertindak di luar lembaga-lembaga demokratis.

Dari logika Przeworski, setidaknya kita harus punya dua hal: aturan main yang pasti dan penguatan lembaga-lembaga demokratis. Sayangnya, yang masih kita jumpai bertahun-tahun pasca-Reformasi 1998, dua hal itu belum tuntas. Memang masalah-masalah yang berkenaan dengan demokrasi semacam itu tak akan pernah tuntas dan cenderung jadi masalah abadi. Tetapi, setidaknya kita bisa mengukur sejauh mana masalah-masalah itu berpotensi menjebak gerak laju dan efektivitas demokrasi itu sendiri bagi tujuan kemaslahatan yang lebih luas.

Perubahan aturan main dalam demokrasi politik kita tentu tidak dapat dilepaskan dari amandemen konstitusi yang berangkat

dari logika reformasi dengan konsekuensi mendekonstruksi tatanan dan mekanisme tradisi politik sebelumnya. Karena presiden dipilih langsung, tidak ada lagi pertanggungjawaban kepada MPR. GBHN tak dikenal lagi, kecuali visi-misi dan program calon presiden yang setelah terpilih diformalkan sebagai produk hukum.

Di sisi lain dimunculkan lembaga-lembaga baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti DPD dan MK. DPD memiliki posisi dan kewenangan politik yang tidak setara dengan DPR kendati mereka sama-sama dipilih melalui mekanisme pemilu. Hal semacam ini menimbulkan pertanyaan bernada mencari keadilan sistemik dalam lanskap kelembagaan demokrasi kita. Sementara MK memang dibutuhkan, tetapi sering kali keputusan-keputusannya dipandang bukan merupakan bagian dari solusi.

KETERBATASAN IMAJINASI

PERMASALAHAN lemahnya kelembagaan politik kita tak semata menggelayuti keberadaan partai-partai politik, juga DPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Partai politik dipandang sebagai hulu dari itu semua karena punya peran sangat strategis dalam memasok sumber daya kadernya ke semua lini lembaga-lembaga formal kenegaraan itu. Dalam demokrasi politik, memang semua pejabat politik memperolehnya dengan legitimasi pemilu. Dalam sistem politik kita, hanya dalam pemilihan kepala daerah saja peserta perseorangan dimungkinkan. Artinya, hampir semua jabatan politik akan ditempuh melalui jalur partai.

Sayangnya, partai yang diharapkan mampu menjadi penyaring kualifikatif kepemimpinan politik di hampir semua lini tak berfungsi optimal. Bahkan, partai-partai kita seperti tengah dibajak oleh para oligarki alias segelintir elite pemburu rente kekuasaan an sich. Drama-drama politik internal partai kerap sekadar seperti opera sabun yang rendah mutunya, dan ironisnya justru mempertontonkan pengebirian tradisi demokrasi. Demokrasi seolah-olah tidak berlaku di tubuh partai, kecuali kemauan para elitenya.

Politik minus kualifikasi itu yang kita sedihkan. Pokok soalnya

tidak semata-mata di partai politik, tetapi terutama pada alam pikir yang sesat dalam memaknai hakikat politik. Politik, ironisnya, banyak dimaknai sebagai profesi yang menjanjikan secara material. Akibatnya, banyak yang masuk ke sektor ini dengan tujuan memperbaiki nasib alih-alih memperbaiki bangsa. Untuk tujuan itu, pendekatan ideologis atau aktualisasi hal-hal visioner tergusur oleh pola-pola pragmatisme dan transaksional.

Akibatnya, orang mengurus partai sering untuk kepentingan jangka pendek. Partai tak dirawat institusinya, melainkan sekadar halte semipermanen tempat para elite menunggu bus kekuasaan. Setelah mereka menumpang bus kekuasaan, halte dibiarkan rapuh dan roboh. Imajinasi politik kita, barangkali belum mampu melampaui pemaknaan politik di seberang kelaziman politik sebagai kekuasaan *an sich*. Ini masalah serius. orang tak akan pernah berpikir membangun lembaga politik yang kuat, kecuali sekadar transportasi politik sementara. Jangan-jangan masalah abadi demokrasi kita terletak pada keterbatasan imajinasi demokrasi. Para elite sibuk membayangkan kekuasaan, bukan keadaban apalagi peradaban.●

Keterbatasan Politik Populis

KOMPAS, 9 APRIL 2014

KARENA KITA TELAH MENGALAMI DEMOKRASI, SIAPAPUN YANG DIPILIH RAKYAT, ITULAH PILIHAN KITA. MEMANG BISA SAJA ADA KECELAKAAN. BISA SAJA PILIHAN KITA ADALAH ORANG YANG LEMAH ATAU ORANG BUTA HURUF. TAPI ITU ABSAH. SETAN GUNDUL PUN, KALAU JADI PRESIDEN PILIHAN RAKYAT, APA MAU DIKATA.

- NURCHOLISH MADJID

HADIRNYA JOKOWI dalam konstelasi politik Indonesia mutakhir, terlepas pro-kontra menyertainya, menggambarkan bekerjanya ranah populisme politik. Gaya *blusukan* yang sesungguhnya lazim saja, di tangan Jokowi tampak lebih alamiah.

Jokowi, yang oleh Megawati Soekarnoputri belakangan ini disebut "si Kerempeng", nyaris dengan modal "keluguannya" justru mampu menjadi magnet politik yang kuat tak hanya di akar rumput, tetapi juga elite politik.

Tak hanya Jokowi, isu-isu politik para bakal capres dan partai-partai, umumnya juga populis. Mereka berjanji mengatasi pengangguran, kemiskinan, juga isu-isu praktis kerakyatan lain yang intinya, kalau partai menang, rakyat sejahtera. Isu-isu populis memang sederhana, kalau bukan menyederhanakan masalah, sering kurang masuk akal, hiperbolik, punya daya buai tinggi.

Dalam logika politik populer, di mana dukungan politik diperebutkan secara elektoral, pendekatan populis tak terhindarkan. Capres, partai, atau entitas politik apapun berlomba menempuh langkah populis untuk meraih simpati luas.

RUANG ALTERNATIF

POPULISME POLITIK memang berurusan dengan popularitas politik, kendatipun tinjauannya beragam, membentang dari konteks gaya komunikasi hingga ideologis. Raadt, Hollanders, dan Krouwel (2004) mencatat populisme, setidaknya secara wacana ideologis, menolak kemapanan dan politik yang monoton (*politics as usual*), kendatipun tak anti-demokrasi atau anti-politik. Politik populis membawa-bawa "rakyat" dan "anti kemapanan", menyambungkannya dengan kekuasaan.

Populisme, catat Francisco Panizza (2005) merupakan bagian dari lansekap politik modern yang akan selalu bertahan. Merujuk Laclau (2005) praktik populis muncul dari kegagalan lembaga-lembaga sosial dan politik, ketika meningkatnya tuntutan tidak disertai oleh meningkatnya ketidakmampuan sistem kelembagaan untuk menyerap mereka. Dari sini, kita bisa mencatat populisme hadir ketika orang relatif tidak percaya pada representasi kelembagaan formal yang seolah tidak mampu berbuat apa-apa.

Dalam kondisi ketika lembaga formal defisit kepercayaan, ka-

rena ciri-ciri umumnya birokratis dan korup, hadirnya para pejabat politik baru yang bergaya kepemimpinan alternatif, segera menjadi pusat perhatian. Di Indonesia, publik pernah memperbincangkan fenomena kepemimpinan Mbah Maridjan. Kendatipun jabatannya sekadar juru kunci Gunung Merapi, Maridjan muncul sebagai ekstrim lain alternatif gaya kepemimpinan formal SBY. Di sisi lain, kita juga mulai melihat ketika itu ulasan-ulasan media tentang para pejabat politik lokal yang menonjol alternatif kepemimpinannya. Masuk di ranah ini, belakangan antara lain, Jokowi.

Belum lekang dalam ingatan ketika Jokowi diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama. Dari sudut ekstrimitas gaya kepemipinan, kehadirannya menggusur Faisal Basri yang sebelumnya berposisi sebagai ekstrim lain dari gaya kepemimpinan Fauzi Bowo, sang *incumbent*. Nyatanya kemudian Jokowi-Basuki terpilih. Kini, dengan pola serupa, Jokowi masih berdiri di posisi ekstrim gaya kepemimpinan populis.

KETERBATASAN

KENDATIPUN POPULISME tak bertentangan dengan demokrasi dan lebih merupakan konsekuensi yang sering tak terhindarkan, ia memiliki sejumlah keterbatasan. *Pertama*, merujuk pada pendapat Nurcholish di atas, populisme berpotensi ke arah "kecelakaan politik". Bahwa bisa jadi yang dipilih yang sekadar populer, minim kompetensi. *Kedua*, populisme membesar ketika lembaga sosial dan politik bermasalah secara fungsional. Ketika sistem kelembagaan tak mampu mengantisipasi karisma, sosok yang berimprovisasi di pentas politik pun bisa melampaui kesisteman politik.

Ketiga, secara jangka pendek, orang terpuaskan dengan hadirnya sosok populis, tetapi risiko jangka menengah dan panjangnya terbuka. Politik praktis pasca-pemilu bisa jauh lebih rumit ketimbang bayangan semula. Tak ada "superhero" yang mampu bertahan dari perpecahan politik, manakala ia tak mumpuni dalam mengelola konflik. *Keempat*, mungkin juga pada praktiknya popu-

lisme sekadar memberikan penguatan "politik permukaan", yang tak berurusan dengan kedalaman makna. Dalam banyak kasus pemimpin populis justru sekadar bertahan dalam kekuasannya dengan membatasi kebebasan publik dan kebijakan yang tidak populer dalam demokrasi.

Kehadiran pemimpin populis perlu disertai kekuatan pengimbang. Di ranah internal, pendamping dan para pembantunya dituntut memiliki kemampuan mengatasi permasalahan yang hadir sebagai ekses populisme. Di Indonesia, pernah ada dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai kekuatan saling melengkapi. Merujuk Herberth Feith, Soekarno lebih bergaya *solidarity maker* dan Hatta administrator. Kendatipun dinamika politik memisahkan dwitunggal tersebut, tetap saja Soekarno-Hatta lazim dirujuk.

Pesan kuat pengalaman sejarah demikian, gaya kepemimpinan populis perlu dilengkapi kemampuan pengimbang merepons kelemahannya. Dalam konteks kepemimpinan nasional pun prinsip *cheks and balances* diperlukan dalam mengelola politik dan stabilitas demokrasi.●

Normalisasi Politik Indonesia

KOMPAS SIANG (ONLINE), 15 SEPTEMBER 2014

PENGALAMAN Pilpres 2014 sebagai kontestasi politik ekstraketat dan melibatkan MK dalam penyelesaian konfliknya, meninggalkan pelajaran berharga bagi demokrasi kita. Tak sekadar sistem demokrasi yang diuji sejarah, tetapi juga kedewasaan politik semua pihak. Tak ada konflik yang tak dapat diikhtiarkan penyelesaiannya. Dalam sistem politik kita, MK memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik elektoral. Keputusannya harus dihormati bersama. Setelah itu, kita dihadapkan pada upaya bersama untuk melakukan normalisasi politik.

Normalisasi politik merupakan hal yang lazim dilakukan pasca-kompetisi politik atau pemilu. Pemilu sebagai rezim kontestasi politik, membuka partisipasi publik luas dan kontestatif dengan konsekuensi konfliktual yang dinamis. Sistem politik yang membingkainya harus memberikan jalan keluar yang elegan dan sehat, agar residu konfliktual dapat dinormalkan kembali. Normalisasi politik bermakna penormalan kembali kehidupan politik, sekaligus perbaikan sistem politik agar lebih baik lagi ke depan.

Normalisasi merujuk Kuntowijoyo, identik rasionalisasi, obyektifikasi. Kuntowijoyo mengingatkan politik bisa membuat pelakunya berkacamata kuda (miopik), sekadar memikirkan masalah jangka pendek. Karenanya, golongan politisi harus rajin-rajin kita ingatkan agar jangan terperangkap lingkaran kepentingan jangka pendek, apalagi mengabaikan kemaslahatan bersama. Rasionalisasi bermakna demistifikasi politik.

Politik harus dibebaskan dari mitos-mitos yang membuat pelakunya miopik. Rasionalisasi juga obyektivikasi, di mana politik yang berorientasi kemaslahatan merupakan transformasi dari perbuatan rasional nilai (*wertrational*) ke perbuatan rasional, di mana orang lain pun dapat menikmati capaian-capaian politik, tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Kebenaran politik bukan monopoli penguasa atau pengimbang, tetapi bisa dilakukan siapa saja yang mampu menciptakan kemaslahatan bersama.

Maka penguasa atau siapapun pemegang pemerintahan baru, tidak akan menuai apresiasi politik manakala lemah dalam mengupayakan "kemaslahatan bersama". Sebaliknya, kelompok pengimbang juga harus efektif dalam fungsinya, sehingga prinsip *cheks and balances* atau kontrol dan keseimbangan terus aktual. Kelompok pengimbang harus tetap menjaga marwah atau kewibawaanya sedemikian rupa, sehingga politik berjalan dengan basis argumen yang jelas. Tanpa itu, maka jalannya pemerintahan atau pula kritik-kritik oposisi, menjadi tidak menarik, bahkan mungkin jauh dari persoalan nyata dan sesungguhnya yang dirasakan masyarakat.

Sinyalemen Kuntowijoyo, mengingatkan pula pada Herbert Mercuse. Dalam bukunya, *One Dimensional Man*, Marcuse menyitir pemikiran satu dimensi secara sistematis dipromosikan perekayasa politik dan pemasok informasinya. Wacana-wacananya dihuni oleh hipotesis yang divalidasi sendiri yang secara monopolistis terus-menerus, menjadi uraian definisi yang menghipnotis.

Corak politik totalitarian seperti ini juga disitir Goerge Orwell yang menyindir, "Semua masalah adalah masalah politik, dan politik itu sendiri adalah kebohongan, penggelapan, kebodohan, kebencian dan skizofrenia yang dilakukan secara massif."

Karenanya, mormalisasi kehidupan politik, membutuhkan peran elite menjauhkan dari cara berpikir satu dimensi, totaliter. Elite bertanggung jawab dalam proses pendidikan politik dengan cara-cara elegan. Rasionalisasi sering pula bermakna demassifikasi politik, penggunaan massa sebagai alat penekan politik tidak boleh diarahkan ke konflik kekerasan.

Elite bertanggung jawab pada kualitas politik, di mana hal itu tidak saja berkaitan dengan penumbuhan kesadaran politik, tetapi juga kemandirian dan inovasi, sehingga kekuatan-kekuatan politik mampu membangun terobosan-terobosan yang penting dalam demokrasi.

Terobosan paling penting politik, terciptanya konsensus-konsensus baru yang lebih maju. Dinamika politik selalu diwarnai konflik dan konsensus. Keberhasilan politik elite, sesungguhnya terletak bagaimana mereka mampu membangun konsensus-konsensus baru yang efektif. Untuk menuju ke sana, paradigma satu dimensi atau miopisme politik, perlu dibuang jauh-jauh. Pergerakan bangsa akan selalu ditentukan oleh konsensus-konsensus besar dalam politik. Inilah pekerjaan rumah penting pasca-Pilpres 2014.

Selanjutnya, secara sistem, kita mencatat bahwa penyelenggaraan pilpres langsung memang memiliki konsekuensi berbeda apabila dibandingkan dengan mekanisme pemilihan tertutup di lembaga perwakilan rakyat. Pilpres langsung melibatkan pembelahan dukungan yang diametral dalam masyarakat. Potensi konfliknya

massif, sehingga peran elite untuk menyatukannya kembali sangat penting. Sistem harus mengantisipasi agar potensi benturan di level masyarakat tidak mewujud. Sistem harus mengupayakan terwujudnya suatu manajemen konflik politik yang baik, sehingga pemilu tidak meninggalkan luka-luka massif.

Pada 2019 pemilu serentak akan diimplementasikan. Harapannya polarisasi politik tak setajam sekarang. Namun, bukan berarti perbaikan sistem usai, mengingat banyak hal menggelisahkan belum mampu dijawab. Sistem politik kita belum mampu menghilangkan praktik pragmatisme-transaksional, juga belum sepenuhnya meyakinkan semua pihak bahwa proses pemilu benar-benar transparan dan jujur.

Kecanggihan teknologi informasi, selain belum termanfaatkan optimal, juga ditengarai berpotensi memicu manipulasi. Kebutuhan berdemokrasi semakin kompleks, sementara sistemnya masih terbatas. Semua itu harus diperbaiki.

Kita bersyukur di tengah keterbatasan, para elite tak menganjurkan jalan kekerasan. Setajam apapun retorika pihak yang merasa dirugikan dalam pemilu, tetap menjadikan mekanisme konstitusional sebagai upaya penyelesaian. Ini penting. Di sisi laian, keberadaan kelompok pengimbang yang konsisten, tentu akan membuat politik kita menjadi energik dan dinamis. Seperti pertandingan badminton, indah dan bertenaga.●

Ke Arah Politik Makna

KOMPAS, 24 NOVEMBER 2014

APA yang dapat kita petik dari perkembangan politik kita sekarang? Banyak hal. Di ranah elite ada konflik berlanjut konsensus yang berdampak pada rakyat. Dari perspektif pembangunan politik, semakin terasa stabilitas politik ada di ranah elite.

Pengakhiran konflik di DPR terasa elitis karena memang wilayah mereka. Rakyat lazim berharap elitenya bijak menyelesaikan konfliknya dengan baik dan bisa lebih produktif.

Di ranah nonelite, reaksi antielite dan antipartai sering menggejolak, kendati selama ini sebatas kekecewaan verbal. Orang sekadar tak suka perilaku elite dan partai, tapi tak tampak bergerak konkret. Ranah *civil society* kita bahkan belum mampu mendorong tumbuhnya partai-partai politik yang kuat dalam kerangka konsolidasi demokrasi, justru karena merasa ia urusan masyarakat politik.

Sementara partai-partai yang seharusnya menjadi pilar demokrasi tak juga tampak berikhtiar memperkuat kelembagaannya. Partai kental oligarkinya. Para elite menjadikan lembaganya sebagai kartel politik yang lazim berkait dengan urusan bisnis.

Demokrasi sering berada pada simpang paradoks perilaku elitenya. Celakanya, masyarakat awam sering terjebak pada situasi yang membuat mereka pragmatis. Praktik demokrasi prosedural tak didukung sistem dan perilaku yang mencerminkannya.

Di sisi substansi, kita merasakan implementasi demokrasi adalah perju-angan yang semakin tak berkesudahan. Secara prosedural, memang sudah ada banyak perubahan dalam praktik demokrasi kita. Bahkan Indonesia lazim dikategorikan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi, apa makna semua itu?

KEPENTINGAN BANGSA

SUDAH selayaknya politik Indonesia mengarah ke politik makna. Istilah politik makna saya ambil dari Cliford Geerzt, *the politics of meaning*, dalam catatan penutup buku, *Culture and Politics in Indonesia* (1972). Geerzt mengajak kita untuk mampu menangkap makna dari ragam perjalanan politik Indonesia sejak 1945.

Dinamika politik boleh berlangsung tajam, tapi harus ada tepinya. Konsensus dan konflik lazim saja, tapi hendaknya meninggalkan makna. Makna yang dimaksud, catatan atau semacam kesimpulan obyektif terkait sejumlah peristiwa politik yang nyaris se-

lalu melibatkan elite. Makna bukan pembenaran atau dalih. Makna melibatkan aspek akademis dan filosofis.

Tak semua peristiwa politik dicatat punya makna yang sama dengan dalih para politisi yang terlibat atau terkait kepentingan dengannya. Makna selalu dikaitkan dengan konteks kepentingan bangsa, sementara pembenaran politik lebih ke konteks kelompok bersangkutan.

Politik makna, dengan demikian, mengandung kewajiban tanggung jawab semua pihak untuk mereproduksi aspek-aspek bagus pendidikan politik. Kesadaran akan tanggung jawab politik untuk kepentingan lebih besar atau kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang lebih luas harus terus dikondisikan di tengah kabut asap pragmatisme politik yang menutupinya. Pada akhirnya politik lekat sekali dengan konteks kebudayaan dan lebih dari itu peradaban.

BERPOLITIK UNTUK PECAH

APABILA melihat politik kita hingga dewasa ini, konteks konflik yang berujung perpecahan itulah yang menonjol. Kekuatan-kekuatan besar dalam sejarah tak luput dari perpecahan. Penyebabnya sering kali sekadar karena perbedaan kepentingan pragmatis antarelitenya. Pragmatisme cepat menenggelamkan ideal kepolitikan, padahal tidak ada imbangan pelembagaan politik yang memadai, sehingga berpolitik sepertinya sekadar untuk berpecah.

Tentu semua itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama, betapa politik kita rentan keterpecahan (divergensi) ketimbang konvergensi politik. Tradisi koalisi juga belum mengakar benar di perpolitikan kita. Hakikat koalisi itu penyederhanaan dalam kompetisi politik. Stabilitas presidensial multipartai jelas terkait dengan hal demikian. Idealnya hanya ada dua koalisi besar di parlemen. Itu terjadi sekarang, di mana teoretis bermakna positif. Pasalnya, sepuluh kekuatan politik diringkas saja menjadi dua.

Logika politik parlemen tentu tak mengabaikan aspek kompetisi. Pembagian kekuasaan, karenanya menjadi lazim. Ketika

ada konflik yang bertendensi sekadar pembagian jatah kekuasaan, pemecahannya sesungguhnya lebih mudah ketimbang konflik ideologis. Selalu ada jalan keluar dari konflik politik pragmatis karena rumusnya sudah jelas: negosiasi ulang.

Kita berharap konflik dan konsensus dalam politik kita tetap meninggalkan makna. Politik kita harus ke arah politik makna, bukan politik hampa. ●

XVI

MENANAK NASI INDONESIA

[2 0 1 5-2016]

MASYARAKAT EKONOMI TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI. DALAM WACANA KONSOLIDASI DEMOKRASI, MEREKA MEMBUTUHKAN IKLIM POLITIK DEMOKRATIS YANG STABIL, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEAMANAN YANG BAIK. MASYARAKAT EKONOMI MEMBUTUHKAN MASYARAKAT POLITIK HINGGA *CIVIL SOCIETY* YANG KUAT. MAKA, KETIKA KONFLIK TERJADI, KALAU BUKAN MARAK, DI RANAH ELITE POLITIK DAN ESKALASINYA MASIF, TENTU SEMUA ITU BERDAMPAK KE RANAH EKONOMI

- KEMEROSOTAN POLITIK

Kemerosotan Politik

KOMPAS, 11 MARET 2015

BELAKANGAN ini kita mudah menemukan contoh peristiwa dalam dinamika kehidupan bangsa yang mengarah kepada kemunduran atau kemerosotan politik (*political decay*). Konflik-konflik internal partai politik sebagai puncak ekses oligarki politik tentu juga merupakan gejala kemerosotan politik. Begitu pun konflik antarlembaga penegak hukum yang berekses disfungsi kelembagaan dan ketidakpastian hukum. Konflik antarelite dan antarlembaga tersebut tentu sangat memprihatinkan karena pemulihannya memerlukan jalan yang panjang dan tak mudah.

PEMBANGUNAN POLITIK

KEMEROSOTAN merupakan lawan dari pembangunan politik (*political development*), istilah atau konsepsi yang berkembang setelah Perang Dunia II. Tema pembangunan politik telah menjadi fokus perhatian para ilmuwan politik Amerika Serikat pada zamannya, mengalami perkembangan, kritik, bahkan antitesis dengan hadirnya teori dependensia yang marak pada 1970-an. Menengahi itu, sempat hadir pula teori sistem dunia. Kendati demikian, perkembangan itu tidak memengaruhi konteks hakikat pembangunan politik sebagai lawan dari kemerosotan politik.

Beberapa tema pokok dalam pembangunan politik adalah stabilitas politik dan tentu juga keamanan. Ini diperlukan untuk mendorong produktivitas pembangunan di semua bidang, termasuk terutama ekonomi. Memang, dalam konteks pembangunan ekonomi, fokus perhatian utamanya pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator penting untuk

mengetahui perkembangan ekonomi suatu bangsa. Memang, kita tahu bahwa terfokus pada aspek pertumbuhan saja tidak arif mengingat kesejahteraan suatu bangsa lebih ditentukan pada aspek pemerataan, bukan ketimpangan pembangunan.

Tentang perkembangan ekonomi, semakin terasa masyarakat ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Dalam wacana konsolidasi demokrasi, mereka membutuhkan iklim politik demokratis yang stabil, kepastian hukum, dan keamanan. Masyarakat ekonomi membutuhkan masyarakat politik hingga *civil society* yang kuat. Maka, ketika konflik terjadi, kalau bukan marak, di ranah elite politik dan eskalasinya masif, tentu semua itu berdampak ke ranah ekonomi.

Pembangunan politik juga menyinggung partisipasi politik yang pada masa kini berbeda dengan masa lalu. Sekarang partai-partai memiliki peran yang demikian strategis. Berpolitik kini lebih cair ketimbang di era ketika politik terfragmentasi secara ideologis (Orde Lama) atau ketika depolitisasi diterapkan (Orde Baru). Perilaku politik di zaman kita juga telah mengalami perkembangan yang berbeda, yakni tampak lebih pragmatis.

Tentu perilaku demikian tidak dapat dilepaskan dari sistem politik. Sistem demokrasi politik masa kini yang banyak diimplementasikan melalui pemilihan langsung, menandai era kontestasi politik yang pada akhirnya membentuk perilaku politiknya sendiri. Sistem politik juga memungkinkan pergeseran kekuatan-kekuatan politik, termasuk dalam konteks dominasi aktor-aktor politik.

Demokrasi liberal dalam formatnya sekarang ini, pada kenyataannya membuat elite pengusaha tampil dominan, ketimbang elite intelektual, militer, aktivis, dan teknokrat di masa lalu. Ini dapat dipahami mengingat sistem politik kita memberi peluang lebar bagi elite-elite yang didukung kekuatan modal besar untuk berkuasa.

PERAN PEMIMPIN

PILIHAN, peran, dan interaksi elite politik, terkhusus elite kekuasaan (*ruling elites*) selama ini diyakini memainkan peran yang cukup menentukan dinamika dan arah pembangunan politik. Bela-

kangan ini, terasa adanya pembelahan penting di ranah elite kekuasaan, yang justru bukan lagi dikaitkan dengan konteks ideologis atau teknokratis, tetapi elite partai politik dan nonpartai politik.

Presiden yang hadir dari kontestasi populer dituntut untuk pandai mengakomodasi berbagai jenis elite itu dalam satu titik keseimbangan. Ini tidak mudah, apalagi kalau ia terbebani kultur neopatrimonialisme dan pragmatisme politik. Membangun konsensus itulah yang penting bagi pemimpin politik manapun.

Rapuhnya jalan menuju konsensus merupakan potret buruk pembangunan politik. Apalagi, apabila saluran alternatif dari rapuhnya lembaga-lembaga politik tidak ditemukan. Hal ini bisa memicu kekacauan politik, bahkan dalam terminologi yang lebih ekstrem, revolusi. Revolusi merupakan hal yang lazim didiskusikan, menandai frustrasi sosial dan kebuntuan saluran politik karena pembusukan kelembagaan.

Di masa yang ditandai oleh menguatnya kultur hedonisme ini, tidak mudah bagi pemimpin menciptakan suatu, meminjam konsep teori pilihan rasional, struktur insentif yang mampu menjamin keseimbangan politik jangka panjang. Hal ini antara lain disebabkan bahwa insentif semakin dimaknai secara terbatas, sekadar sebagai uang dan kekuasaan. Karisma atau kewibawaan pemimpin susah untuk mewujud ketika populisme kepemimpinan tidak dapat mempertahankan diri dari otentisitas. Keharusan untuk melakukan politik akomodasi terbatas di kalangan elite pendukung multispektrum, sering kali bertentangan dengan kehendak populer massa pendukung. Inilah problem pokok pemimpin populis.

KOMPETISI KEPENTINGAN

PERILAKU elite memang pada akhirnya memengaruhi jalannya kelembagaan. Sistem memang sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana seharusnya lembaga-lembaga yang ada berperan sesuai dengan kewenangan. Namun, kompetisi kepentingan elite yang parsial dan jangka pendek membuat lembaga termanipulasi, kalau bukan terpenjara ke dalam konflik-konflik kepentingan elitenya.

Karena itu, dapat dipahami manakala yang terjadi kini adalah bukan saja kecenderungan deinstitusionalisasi atau lemahnya kelembagaan, melainkan juga terbajaknya lembaga oleh kepentingan para elitenya. Para elite membuat peran dan fungsi kelembagaan menjadi kabur, kalau bukan *lumpuh layu*.

Kalau demikian, mau tidak mau kita perlu membaca lagi wacana modernisasi politik yang menekankan penguatan kelembagaan sesuai dengan diferensiasi kewenangan masing-masing. Karena pilihan sistemnya demokrasi, maka kewenangan-kewenangan itu dilakukan dalam kerangka rasionalitas. Modernisasi ialah rasionalisasi. Sayangnya, dan inilah problem kita dewasa ini, lembaga-lembaga politik, birokrasi, dan hukum tampilkan dalam berbagai hal yang tidak rasional. Kita tengah mengalami krisis kemodernan dalam proses sosial politik. Tentu hal demikian dapat mempercepat proses kemerosotan, apabila tidak terjadi perubahan.

Kemerosotan politik berdampak pada, apa yang pernah disinggung Lee Kuan Yew, defisiensi demokrasi. Intinya, transisi ke arah konsolidasi demokrasi penuh dengan ancaman kegagalan, justru karena para elite tidak siap untuk melakukan proses-proses sosial dan politik secara efisien. Pemerintah mungkin tidak akan jatuh dengan mudah di dalam sistem yang aturan permakzulan presiden demikian ketat. Tetapi, kemerosotan politik ditandai oleh konflik-konflik semipermanen yang membelenggu perkembangan politik dan ekonomi nasional. Ini menandai fase stabilitas politik yang goyah dan juga ketidakpastian hukum yang langka.

Kita perlu mewaspadai gejala-gejala kemerosotan politik. Kendatipun barangkali masih jauh dari bayangan negara gagal (*failure state*), pekerjaan rumah untuk melakukan penataan kelembagaan oleh para elite yang menumpuk di masa kini, bagaimanapun, membutuhkan konsentrasi dan ikhtiar ke arah konsensus yang rasional dan elegan tanpa melawan kodrat agenda reformasi. Kewibawaan lembaga harus ditegakkan kembali justru dengan menyelesaikan masalah-masalah secara jernih dan tidak manipulatif.●

Menanak Nasi Indonesia

KOMPAS, 16 APRIL 2015

APAKAH kita bisa mempercepat kemajuan kondisi bangsa? Pertanyaan ini mengingatkan *Polemik Kebudayaan* pada kurun 1935-1939 antara Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dan yang lain. Polemik itu merupakan respons generasi pasca-Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 terhadap persoalan besar cita-cita nasional segala bidang. STA yang masih berusia 27 tahun ketika polemik merumuskan pandangannya secara jelas, betapapun kontroversial.

Pemicu polemik tulisan STA, "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru, Indonesia dan Pra-Indonesia", yang lantas ditanggapi Sanusi Pane dan Purbatjaraka pada Agustus-September 1935. Dari sini, polemik terus menggelinding hingga 1939, dengan tambahan penanggap lain, seperti Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M Amir, dan Ki Hadjar Dewantara. Tak seperti komentar instan dan singkat di masa media sosial zaman kita, semua pemikiran dalam polemik ditulis dengan kalimat-kalimat yang jelas, utuh, dan terbaca luas oleh publik pada zamannya.

Tulisan-tulisan STA menegaskan, sejarah Indonesia dimulai pada abad ke-20, "ketika lahir generasi baru yang dengan insaf hendak menempuh jalan baru bagi bangsa dan negerinya". Zaman baru tersebut berbeda dengan "zaman hingga penutup abad ke-19" sebagai zaman pra-Indonesia. STA merekonstruksi sejarah baru Indonesia, di mana zaman Indonesia bukan sambungan atau terusan masa lalu. Indonesia yang dicita-citakan oleh generasi baru, karena itu, bukan sambungan Mataram atau yang lain. Kebudayaan Indonesia harus dicari sesuai keperluan kemajuan masyarakat.

STA berpendapat, tali persatuan bangsa itu kepentingan ber-

sama. Sebuah bangsa tidak boleh statis, tetapi harus dinamis sehingga dapat "berlomba-lomba di lautan dunia yang luas". STA menegaskan, bangsa Indonesia harus menanak nasi karena itu harus menghidupkan api. Ini berbeda dengan bangsa Barat yang sudah menanak nasi, apinya sudah menyala-nyala. Bagi Barat, masalahnya ialah bagaimana menjaga agar nasinya jangan sampai hangus, maka mengurangi api. Kalau bangsa Indonesia justru memikirkan bagaimana mengurangi api, maka nasi Indonesia tidak akan masak-masak karena apinya saja tak hidup.

Api yang dimaksud STA ialah intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme, di mana tiga hal terakhir ini tidak selalu bermakna negatif. Semua itu berkembang di Barat. Karena itu, bagi STA, budaya Barat perlu dilihat karena tidak saja mampu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga filsafat, keagamaan, dan kesusastraan. Dalam konteks waktu itu, STA mengibaratkan Indonesia lemah seperti "pohon yang sudah mati, dahannya tiada berdaun, tiada berkembang, dan tidak berbuah". Kalaupun ada daun, kembang, dan buahnya, "itu sangatlah kecil dan merana sehingga boleh dikatakan tidak berarti di mata dunia". Karena itu, "jiwa Barat" harus diambil, dan kebalikannya, yakni "jiwa nrimo" alias pasrah semata-mata, harus ditolak.

Apakah dengan mengusulkan agar bangsa Indonesia mengambil "jiwa Barat" itu berarti STA sepakat dengan pembaratan atau westernisasi? Dalam sebuah wawancaranya pada 1976, STA mengatakan "tidak membicarakan tentang Barat", tetapi tentang "suatu mentalitas". STA mengaku bukan "pemuja Barat". Ia sepakat dengan Andre Malraux bahwa Barat sudah tidak mampu lagi menghasilkan suatu karya agung seperti Michelangelo di zaman Renaisans. STA memakai istilah "jiwa Barat" lebih merujuk pada "manusia berpikir, mengambil keputusan, dan memegang nasib di tangannya sendiri". Pendapat demikian merupakan perkembangan penting setelah sekian lama polemik kebudayaan. Ia melakukan obyektivikasi justru dengan menolak mengidentikkan mengambil "jiwa Barat" dengan pembaratan.

API INDONESIA

SEBAGAI refleksi untuk masa kita, apakah manusia Indonesia sudah "berpikir, mengambil keputusan, dan memegang nasib di tangan sendiri"? Pertanyaan itu dapat diringkas, dengan sedikit modifikasi pertanyaan Kishore Mahbubani, "*can't Asian think*"?; dapatkah orang Indonesia berpikir? Pertanyaan ini penting mengingat sesungguhnya ia bersifat abadi, tidak saja berlaku di masa penjajahan, juga lazim saja di masa kini mengingat merdeka belum tentu mandiri dalam hal kebebasan berpikir dan pengambilan keputusan yang terkait dengan penentuan nasib bangsa.

Maka, persoalan kita adalah bagaimana api Indonesia yang sudah menyala sejak kemerdekaan itu terkelola secara efektif sehingga penanakan nasi Indonesia berjalan tanpa kekurangan api. Api kita masih kecil nyalanya, belum seperti bangsa maju lain. Namun, yang jelas, menanak nasi Indonesia berarti menjaga apinya tetap menyala abadi, dan tentu ini lebih merupakan urusan dan ikhtiar jangka panjang. Kepemimpinan tentu aspek penting dalam menjaga nyala api Indonesia mengingat ada fungsi motivasi. Menjadi pemimpin bangsa yang besar seperti Indonesia tentu tak mudah. Nyala api tak berarti identik retorika pemimpin "*solidarity maker*", tetapi lebih terkait pada efektivitas dan efisiensi kebijakan yang sistemik.

Dari STA kita peroleh catatan penting. *Pertama*, terkait internalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Ini dasar dari pembentukan karakter bangsa. STA sangat menekankan faktor nilai, sebagaimana terbetik dalam karya monumentalnya *Values as Integrating Forces in Personality, Society, and Culture* (1966, 1974). Nilai-nilai Pancasila sudah sangat tepat bagi Indonesia sebagai bangsa yang religius dan majemuk. Selama nilai-nilai ini terjaga dan tidak memudar atau tergeser, maka roh Indonesia masih tetap ada.

Kedua, perlunya mengubah cara berpikir dan bersikap secara modern, tetapi terukur dalam kerangka kepentingan nasional. STA menekankan soal kepentingan nasional itu sedemikian rupa sehingga ego kelompok dan sektoral harus ditolak. Kita harus berpikir besar soal kebangsaan, bukan kelompok dan apalagi hanya sekadar

berpikir untuk kepentingan jangka pendek. Tentu saja itu semua bermula dari ranah personalitas atau mental perorangan yang terus bergerak ke ranah sosial kebangsaan.

Ketiga, perlunya ikhtiar melepas ketergantungan dan memantapkan budaya mandiri. Ini tidak sekadar terkait dengan kepemimpinan bangsa, juga bagi khalayak yang masih terpatri pada pola kepemimpinan patrimonialistik atau neo-patrimonial. Kita perlu model kepemimpinan dan kepengikutan yang otentik, dengan ciri tidak memangkas kemandirian, kreativitas, dan inovasi. Ujung dari semua ini: terbangun jalan kemandirian bangsa.

Keempat, perlunya penguatan sistem dan reformasi kelembagaan. Keduanya pekerjaan rumah sangat serius. Para elite yang punya tanggung jawab besar mewujudkan sistem kebangsaan di segala lini, sayangnya masih banyak yang – meminjam Kuntowijoyo – "berkaca mata kuda", terjebak pada masalah jangka pendek dan konflik tidak produktif. Proses reintelektualisasi perlu dilakukan agar para elite punya kesadaran dan kapasitas akademis yang baik sehingga diharapkan mampu membuat sistem yang baik dan efektif.

Kita perlu membentuk jiwa Indonesia sebagai jiwa yang mampu menyalakan api kemajuan itu. Meminjam retorika Bung Hatta, kita harus lebih cepat dan selamat.●

Dilema Perombakan Kabinet

KOMPAS, 20 JULI 2015

WACANA perombakan kabinet bergulir lagi setelah lebih dari satu semester pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menyimak ragam pemberitaan, rencananya mendesak. Mengapa selalu ada perombakan dalam kabinet koalisi presidensial? Perombakan sesungguhnya tak mencerminkan keberhasilan, tapi bentuk koreksi atas kurang progresifnya kabinet merespons tantangan.

Ada dua penjelasan mengapa perombakan selalu berulang.

Keduanya merupakan kutub yang berbeda. Kutub penjelasan pertama terkait dengan derajat kompetensi dan integritas anggota kabinet. Ini semata-mata penilaian kinerja. Asumsinya apabila derajat kompetensi dan integritas rendah, kualitas kinerja menteri juga rendah. Mereka tidak mampu menerjemahkan visi presiden ke dalam kinerjanya di kesempitan waktu sekaligus lemah integritas. Hal terakhir ini dapat dikaitkan dengan fokus mereka yang lebih tertuju ke kepentingan lain selain ke presiden.

Dalam hal ini, kabinet dilihat secara obyektif kinerjanya. Penilaian dilakukan ke setiap menteri apakah bisa bekerja dengan baik dan sinergis dengan presiden. Satu hal yang sering dilewatkan bila secara umum indikator penting di berbagai bidang — terutama ekonomi — *anjlok*, maka menterilah yang jadi sasaran, bukan presiden. Presiden sebagai pemimpin di atas semua menteri, seperti selalu tetap *can't do no wrong*. Karena itu, perombakan kabinet dikesankan sebagai semata-mata masalah menteri, bukan masalah presiden. Padahal, sesungguhnya presiden pun menyumbangkan andil karena memilih mereka.

Yang kedua, kutub konstelasi politik. Ini terkait semata-mata oleh keharusan presiden merespons perkembangan politik makro sebagai dampak dinamika partai politik. Kabinet presidensial punya karakter berbeda dengan kabinet parlementer. Koalisi presidensial jauh lebih cair ketimbang bercorak parlementer. Konsep dan praktik oposisi politiknya tak sejelas sistem parlementer. Dalam sistem kuasiparlementer atau semipresidensial, partai biasa menyatakan posisinya di luar pemerintahan, tetapi tidak dalam konteks oposisi. Dalam banyak kebijakan, mereka yang di luar itu tak jarang justru mendukung penuh pemerintah.

KABURNYA OPOSISI

DALAM praktik pemerintahan Presiden Jokowi dewasa ini, karakter koalisi presidensial itu semakin terpotret tanpa oposisi yang jelas. Memang pada mulanya partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) aktif berperan sebagai oposisi. Dalam perkembangan-

nya nyaris tak ada progresivitas fungsi oposisi lagi setelah konstelasi politik parlemen terbentuk. Secara jumlah, terutama psikologis, KMP berkuasa di parlemen tetapi tak otomatis menutup ruang dan peluang pemerintah bernegosiasi dan berkompromi.

Dalam berbagai aspek dinamika politik pemerintahan, KMP justru mendukung rencana pemerintah. Dalam kasus kehebohan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan dinamikanya, partai pendukung utama pemerintah (PDIP) justru banyak menunjukkan sikap mirip oposisi. Kasus di mana partai propemerintah yang bersikap layaknya oposisi semacam ini juga pernah kita jumpai dalam pemerintahan sebelum Jokowi. Anomali politik semacam ini tentu tak akan terjadi dalam dinamika politik sistem parlementer.

Kaburnya oposisi politik formal dalam sistem pemerintahan presidensial memberi peluang sekaligus tantangan bagi pengelola an pemerintahan. Yang mendasar, terkait konsistensi, dengan tak adanya oposisi yang jelas, ancaman instabilitas politik bisa muncul dari mana-mana. Presiden bisa banyak memperoleh ancaman dari dalam koalisinya sendiri. Pola konflik dan konsensus bisa sangat pragmatis, yakni dengan ukuran proporsi wakil partai di kabinet. Perubahan konstelasi dan skala ancaman justru bisa membesar dari dalam manakala perombakan kabinet terjadi.

Di sisi lain, publik menyimpan pertanyaan, mengapa partai di luar koalisi pemerintah selalu bisa diikutkan ke kabinet? Mengapa kabinet selalu jadi daya tarik? Salah satu versi jawabannya, mengemukanya kepentingan partai memperkuat infrastruktur dan jaringan kepolitikannya. Menteri partai berpeluang melakukan aktivitas ulang alik pusat-daerah yang *notabene* selaras konsolidasi dan investasi suara pada pemilu selanjutnya. Partai yang punya menteri berarti punya saluran pengaruh di pemerintahan. Implikasinya, partai punya peluang mendistribusikan kader di ranah kekuasaan.

DILEMA PRESIDEN

PRESIDEN akan selalu menghadapi dilema dalam menyeimbangkan dua kutub di atas. Satu sisi ia dihadapkan pada kuat lemah-

nya sumber daya manusia para menteri. Sisi lainnya, ia diharuskan mampu mengelola keseimbangan politik akibat begitu banyak partai. Ini dilema lazim dalam praktik kuasiparlementer atau semipresidensial. Dalam sistem demikian, presiden secara legal konstitusional sesungguhnya sangat kuat posisinya karena adanya ragam wewenang sekaligus ragam proteksi terhadap kekuasaannya. Karena sistem bersifat multipartai, presiden mudah jatuh pada sikap dan pilihan politik yang justru mencerminkan tidak percaya diri.

Akibatnya, presiden mudah jatuh ke dalam kompromi bagi-bagi kekuasaan dengan partai dan entitas pendukungnya secara kurang berkualitas. Partai tak selalu menyodorkan kadernya yang mumpuni kepada presiden dalam penyusunan atau perombakan kabinet dan pengisian jabatan strategis lainnya. Belajar dari pengalaman selama ini, partai sering menyodorkan kader yang bukan kelas wahid dalam kompetensi. Maka, wajar manakala kabinet tak meyakinkan performanya sebagai ideal *zaken kabinet* sejak awal.

Maka, ibarat memilih ban ketika menyusun kabinet, kini presiden seperti tukang tambal ban dalam perombakannya. Kalau demikian, orientasinya ialah fungsi. Apakah ban yang bocor kemudian ditambal sana-sini itu akan lebih kuat dan fungsional ketimbang ketika masih baru atau tidak, itulah masalahnya. Ini artinya, setiap pasca perombakan kabinet selalu menyeruak harapan fungsi kabinet akan lebih baik, kuat, dan tangkas menghadapi jalan bergelombang, penuh lubang, dan berduri. Maka, logikanya arah perombakan harusnya menuju ke jalan yang mendekati zaken kabinet.

Sebagai pemimpin yang paling bertanggung jawab, presiden pada praktiknya banyak dihadapkan pada pilihan gaya kepemimpinan situasional. Satu sisi ia harus tetap bisa bergaya transformasional justru di tengah tekanan politik yang menghendakinya bergayatransaksional. Pada saat ini akan sangat berbahaya manakala presiden bergaya autopilot atau gaya penunggang kuda yang melepaskan kedua tali kendalinya. Dalam gaya ini sesungguhnya pemimpin tak sepenuhnya membiarkan bawahan atau anak buahnya berjalan tanpa kontrol, tetapi karena ia merasa telah menetapkan

tujuan dan parameter, maka menyerahkan anak buahnya bertindak bebas, tanpa kontrol lebih lanjut.

Presiden Jokowi dihadapkan ragam anak buah yang tak bisa begitu saja dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan petunjuk. Kabinet akan efektif apabila mampu mengontrol, seagai jantung koordinasi yang produktif. Itu berarti ia harus memimpin kabinetnya sendiri.●

Mengapa Parpol Baru?

KOMPAS, 27 AGUSTUS 2015

FUTURE GENERATIONS ARE NOT GOING TO ASK US WHAT POLITICAL PARTY WERE YOU IN. THEY ARE GOING TO ASK WHAT DID YOU DO ABOUT IT, WHEN YOU KNEW THE GLACIERS WERE MELTING.

- MARTIN SHEEN

BELAKANGAN ini muncul beberapa partai politik baru, di antaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Damai dan Aman, serta disebut-sebut juga Partai Priboemi. Mengapa hasrat mendirikan parpol tetap menyala setelah satu setengah dekade Reformasi 1998? Bagaimana prospek sekaligus tantangan yang mereka hadapi?

Tentu bukan dalam konteks euforia politik ketika berbagai kalangan antusias mendirikan parpol baru saat ini. Ini lebih karena masih adanya peluang terbuka bagi masyarakat untuk mendirikan parpol sebagai bagian dari hak berpolitik. Memang, secara perundang-undangan persyaratannya diperketat, tetapi nyatanya tak menghalangi hasrat politik kolektif warga untuk memprakarsai hadirnya wadah organisasi politik.

Kita dapat belajar dari pengalaman orang mendirikan parpol tapi belum tentu berhasil. Apabila dikaitkan dengan konteks aturan ambang batas parlemen, bahkan banyak yang gagal. Dalam kasus tertentu, sebuah parpol baru hadir dan langsung masuk ke kategori

papan menengah (setelah Pemilu 2004), dan di pemilu berikutnya jadi pemenang pemilu. Ini kasus Partai Demokrat kendati dalam pemilu terakhir (2014) dukungan suaranya merosot signifikan.

Yang juga cukup fenomenal Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Begitu ikut pemilu (2014), ia langsung dapat kursi di parlemen. Pada Pemilu 2009, fenomena serupa dialami Partai Hanura dan Gerindra. Parpol-parpol ini menggebrak di ranah *catch-all parties*, parpol terbuka. Di ranah "politik Islam" ada fenomena PKS yang melejit sejak Pemilu 2004. Eksperimen sebelumnya melalui Partai Keadilan (PK) pun dilanjutkan PKS.

Merujuk pada nama-nama parpol baru di atas, segmentasi parpol terbuka telah memunculkan jumlah lebih banyak dibandingkan segmentasi "parpol Islam". Di ranah yang terakhir ini, Rhoma Irama sebagai ikon musik pop dangdut kontemporer yang dikenal melalui syair-syair lagu Islami mencoba melesatkan Partai Damai dan Aman (Idaman). Itu artinya, seandainya kelak mereka bisa ikut berlaga di Pemilu 2019 hanya akan membuat peta persaingan sangat ketat di segmentasi parpol terbuka.

Segmentasi ideologis memang bisa ditelaah lebih lanjut di ranah partai terbuka, tetapi tampaknya ia tak lebih penting ketimbang proyeksi dalam meraup dukungan publik luas. Dalam hal ini komentar Martin Sheen di atas mungkin ada benarnya: bahwa generasi ke depan akan lebih melihat pada apa yang dilakukan, bukan diwacanakan dan dilekatkan ideologi tertentu pada sebuah parpol.

SEBUAH ANTITESIS

PARPOL-PARPOL baru itu memang belum didaftarkan dan resmi sebagai peserta pemilu, tetapi setidaknya dari persiapan-persiapan awal mereka tampak ikhtiarnya dalam menunjukkan alternatif. Mereka tengah berada pada fase awal membedakan diri dengan yang lain, mengemas apa yang khas untuk ditawarkan ke publik. Yang menarik, mereka sama-sama berada di era sosial media yang ingar-bingar. Perlombaan sosialisasi parpol pun harus berhadapan dengan sejumlah isu lain sehingga memerlukan jurus-jurus baru

yang efektif diterima publik luas. Ini tidak mudah manakala pendekatannya sekadar berkutat lebih banyak di dunia maya.

Dalam sejarah parpol kita, tokoh sangat memainkan peran penting. Ia tak saja menjadi penanda (ikon) parpol itu, tetapi juga sumber karisma. Dalam kasus Partai Demokrat, Gerindra, Hanura, bahkan Nasdem, figur-figur utamanya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, Wiranto, dan Surya Paloh, tampak demikian penting. Mereka bisa menjadi magnet dalam pemilu.

Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya daya kritis dan rasionalitas masyarakat, parpol bergantung pada tokoh saja tidak cukup. Pengalaman Pemilu 2014 yang lalu setidaknya mengonfirmasi bahwa tidak ada parpol yang sangat kuat karena tokohnya. Adanya sepuluh parpol yang lolos ambang batas elektoral ke parlemen, dengan tidak adanya parpol yang meraih dukungan suara di atas 20 persen, sesungguhnya mencerminkan fenomena tersebut.

Hadirnya parpol baru, tak dapat dilepaskan antitesisnya terhadap yang sudah ada. Dewasa ini, parpol nyaris selalu jadi sorotan dikaitkan dengan dinamika kehidupan politik bangsa yang kerap tersandera. Parpol dituduh lebih banyak bersikap egoistis dan belum sepenuhnya kontributif bagi pemecahan masalah-masalah bangsa. Bahkan, kritik yang lebih ekstrem mengungkapkan bahwa parpol masih menjadi beban ketimbang solusi.

Inilah yang membuat fenomena antipartai menyeruak. Lazimlah kiranya sebagai tindak lanjut kekecewaan dan kelemahan parpol lama, muncul dua sikap yang berbeda. *Pertama*, reaksi emoh parpol. Ujungnya golput (*nonvoters*). Mereka tak akan berpartisipasi dalam pemilu dan emoh bersentuhan dengan apa-apa yang dilakukan parpol. *Kedua*, sikap yang mencoba memberi jawaban dengan memunculkan parpol baru. Harapannya, mereka akan bisa menutup kelemahan yang lama dengan energi dan harapan baru.

Dalam konteks yang terakhir parpol-parpol baru muncul. Ada spekulasi dan proyeksi atas keberadaan masing-masing. Hukum alam politiklah yang kelak menentukan, mana yang eksis mana

yang tumbang. Itu juga berlaku bagi parpol lama. Parpol yang keberatan konflik, tak mampu berinovasi dan menjawab ”kebutuhan” publik, sangat mungkin akan cepat tergilas jiwa zaman. Dalam konteks ini, parpol baru bisa jadi pengantar ke harapan baru, bisa jadi tidak. Ikhtiar mereka tetap perlu dihargai kendatipun kehadirannya harus segera diimbangi oleh peningkatan daya kritis masyarakat.●

Kembali ke Politik

KOMPAS, 23 SEPTEMBER 2015

BELAKANGAN ini, media massa ramai oleh berita membanjirnya pengungsi dari Suriah dan negara-negara yang dilanda krisis politik ke negara-negara Eropa. Mereka bergerak melalui laut dan darat. Yang meninggal dalam perjalanan cukup banyak, termasuk Aylan Kurdi, anak kecil yang tergeletak di pinggir pantai setelah tenggelam di Laut Mediterania. Mata dunia terbelalak dengan krisis kemanusiaan itu.

Negara-negara Eropa terbelah sikap, ada yang menerima secara terbuka ada yang tidak. Eropa menjadi pilihan karena mereka lebih terbuka ketimbang negara-negara kaya di Timur Tengah. Tentu ada faktor lain yang dapat menjelaskan fenomena ini. Negara-negara kaya Timur Tengah lebih memilih jalan yang pragmatis dengan tidak mau kerepotan menampung pengungsi. Ini menggambarkan wajah paradoks Timur Tengah.

Krisis politik telah memicu krisis kemanusiaan yang lebih luas. Dalam hal ini, tampaknya tidak ada jalan keluar kecuali dengan rumus kembali ke politik. Tidak ada negara tanpa politik. Politiklah yang menggerakkan negara. Ketika para pemimpin politik gagal mencapai konsensus dan jalan kekerasan yang mengemuka berlarut-larut, harus ada jalan politik untuk mengakhirinya.

Dalam hal ini, David Runciman dalam *Politics* (2014) memberi ulasan menarik. Profesor Ilmu Politik Cambridge University terse-

but mengulas kekontrasan kondisi dua negara: Denmark dan Suriah. Apabila Anda hidup di Suriah sekarang yang kondisinya sangat runyam, Anda terjebak pada kondisi seperti neraka: hidup penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekerasan, ketidakpastian, kelaparan, dan keputusasaan. Perang saudara telah meluluhlantakkan Suriah. Puluhan hingga ratusan ribu orang tewas dalam tragedi kemanusiaan yang memilukan di abad ke-21 ini. Banyak yang mengungsi ke berbagai negara.

Sebaliknya, Anda merupakan orang yang beruntung manakala hidup di Denmark. Negara ini dilukiskan Runciman sebagai versi lain dari "surga"; hidup nyaman, sejahtera, damai, tertib, dan beradab. Yang membedakan Suriah dan Denmark bukan kenyamanannya, bukan pula sumber daya alam dan kekayaan khazanah sejarahnya. Perbedaan Denmark dan Suriah ialah politiknya. Politik telah menolong Denmark seperti keadaannya sekarang. Politik pulalah yang menjadikan Suriah seperti sekarang.

POLITIK SEBAGAI KUNCI

BAGAIMANA penjelasannya? Mengapa politik menentukan? Runciman menjelaskan bahwa politiklah yang bertanggung jawab apakah suatu negara menjadi negara nyaman dan damai atau sebaliknya, berantakan dan penuh konflik. Tentu maksudnya ialah bagaimana inisiatif para politisi yang berada di balik kebijakan-kebijakan politik. Apakah mereka mampu menjadi pemimpin politik yang berkualitas dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan publik yang bagus atau sebaliknya, manipulatif.

Merekalah, para pemimpin politik, yang membuat Denmark dan Suriah menjadi yang sekarang. Ada beberapa catatan yang perlu kita camkan. *Pertama*, soal kekerasan; bahwa kontrol kekerasan ialah jantung dari politik. Politik ialah ikhtiar mencapai tujuan-tujuan baik, tanpa kekerasan. Dalam politik ada argumen, dialog, persetujuan, penolakan, titik temu atau konsensus dan sebagainya.

Politik itu jalan damai, perang jalan kekerasan yang terjadi manakala politik gagal. Hakikat politik mengendalikan kekerasan

dan negara merupakan kekuatan absah. Thomas Hobbes menyitir negara seperti *Leviathan*, yang suka menindas rakyatnya. Namun, catat Runciman, "politik (dunia) kita dewasa ini sudah jauh dari gambaran Hobbes", tetapi di sisi lain, "dunia Hobbes masih ada". Ia mengingatkan adanya politisi bertangan kotor (*dirty hands*).

Kedua, soal perkembangan teknologi. Ini menyangkut bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi perilaku politik di satu sisi dan bagaimana para politisi memanfaatkannya. *Ketiga*, soal keadilan. Bagaimana konstitusi menjamin keadilan bisa ditegakkan oleh semua. Pun bagaimana demokrasi mampu diaktualisasikan oleh para politisi sedemikian rupa.

Yang diuraikan Runciman jelas. Politik itu kebijakan, seperangkat aturan yang membentuk budaya politik. Kebijakan politik akan menggerakkan kepastian hukum dan perkembangan ekonomi. Ujungnya kesejahteraan rakyat. Inilah politik sebagai berkah. Politik pun bisa menjadi musibah, ketika para politisi gagal mengendalikan kekerasan, gagal membuat kebijakan yang baik dan benar, dan gagal menciptakan stabilitas, yang ujung-ujungnya ialah kekacauan.

POLITIK DAN KEMANUSIAAN

POLITIK yang baik memberi ruang lapang bagi kemanusiaan. Memang demikianlah tarikan dasarnya. Politik dan kebijakannya lahir dari filosofi dan basis nilai kemanusiaan. Pentinglah kiranya membuang jauh egoisme, politik anti kemanusiaan. Berbagai peristiwa besar dunia, setidaknya menandai dua perang besar pada abad yang lalu, yakni Perang Dunia I dan II, telah secara jelas meninggalkan pesan-pesan kemanusiaan universal itu.

Sayangnya, praktik politik lebih sering tak berpihak ke kemanusiaan. Mahatma Gandhi mengatakan, diamini juga Bung Karno, "*My nationalism is humanity*", bahwa batas-batas nasionalitas kita tak terbatas bagi kemanusiaan. Nasionalisme sebagai produk politik jelas terkandung di dalamnya kemanusiaan. Ini terkait konteks solidaritas kemanusiaan global sebagai tanggung jawab bersama. Kembali ke politik berarti kembali ke dasar kemanusiaan kita.●

Kekuasaan dan Godaan

KOMPAS, 30 NOVEMBER 2015

NEARLY ALL MEN CAN STAND ADVERSITY, BUT IF YOU WANT TO TEST A MAN'S CHARACTER, GIVE HIM POWER.
- ABRAHAM LINCOLN

KUTIPAN presiden legendaris Amerika Serikat di atas lazim dikemukakan di pembicaraan tentang kekuasaan dan godaan. Bahwa "semua orang tahan dengan kesengsaraan, tetapi apabila ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan". Lincoln menempatkan kekuasaan sebagai ujian, apakah pemegang kekuasaan berkarakter pemimpin sejati atau imitasi. Sudah banyak dalil kekuasaan. Yang paling terkenal, aksioma Lord Acton, "Kekuasaan cenderung diselewengkan, kekuasaan mutlak sudah pasti menyeleweng". Al Ghazali menyitir kekuasaan memabukkan, pemegangnya baru sadar ketika ia tidak lagi ada dalam genggaman.

KONFLIK KEPENTINGAN

FILSUF Immanuel Kant mengibaratkan bahwa dalam diri seorang politisi ada dua binatang: ular dan merpati (Thompson, 2001). Yang satu simbol kelicikan, yang satu lagi ketulusan. Godaan akan muncul setiap hari apabila seseorang punya jabatan politik atau kewenangan kekuasaan, apakah akan bertahan di posisi merpati atau membiarkan ular mencaploknya.

Politisi, seorang yang terpanggil berjuang di dunia politik untuk tujuan-tujuan kebaikan bersama – pandangan Aristotelian – memang lazim dihadapkan situasi dan pilihan dilematis. Dilema politisi biasanya dikaitkan, terutama konteks pengambilan keputusan. Pemimpin politik harus memutuskan, dengan begitu ia akan dinilai.

Yang juga paling sering diingatkan, terkait konflik kepentingan pemegang kekuasaan, pemimpin politik, pengambil kebijakan tak bisa mengelak dari prinsip-prinsip profesionalitas dan konstitusi demokratis. Politisi bisa datang dari mana saja, tetapi yang secara khusus banyak diingatkan ialah yang berlatar belakang pengusaha. Banyak ulasan yang menyinggung bahaya "dwifungsi penguasa-pengusaha". Tentu tidak hanya jenis "politisi pengusaha" yang rentan godaan konflik kepentingan, tetapi juga yang lain.

EMPAT DIMENSI KEKUASAAN

SEJAK Robert H Dahl menggulirkan definisi mengenai kekuasaan, wacana tentangnya berkembang. Dahl menjelaskan, A memiliki kekuasaan atas B apabila A dapat memengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tak dikehendaki B. Dalam *Concise Dictionary of Politics*, McLean dan McMillan (2003) memperjelas bahwa A punya pengaruh atas pilihan dan tindakan B, selain A memiliki kapasitas menggerakkan pilihan dan langkah B, sekaligus dalam mengesampingkan perlawanan B. Hubungan A dan B adalah bagian dari suatu struktur sosial dan cenderung terus berlangsung.

Kekuasaan versi Dahl ini dikategorikan sebagai pandangan satu dimensi kekuasaan (*one-dimensional view of power*). Ia memfokuskan pengamatannya pada tingkah laku aktor politik dalam proses pengambilan keputusan terhadap berbagai isu kunci, yang memunculkan konflik aktual antar-kepentingan subyektif yang sifatnya bisa diamati. Kepentingan dilihat sebagai pilihan-pilihan kebijakan yang diungkapkan melalui partisipasi politik sehingga konflik kepentingan identik dengan konflik preferensi kebijakan.

Pandangan dua dimensi kekuasaan (*two-dimensional view of power*) Bachrach dan Baratz, melihat kekuasaan tidak sekadar melibatkan para pengambil keputusan, tetapi yang bukan pengambil keputusan. Pandangan tiga dimensi kekuasaan (*three-dimensional power*) Lukes, melihat kekuasaan mungkin saja digunakan dalam situasi konflik potensial atau laten. Penggunaan kekuasaan adalah suatu fungsi dari kekuatan kolektif dan pengaturan sosial.

Selanjutnya, pandangan dimensi keempat kekuasaan (*four-dimensional view of power*), sebagaimana disampaikan Isaac dan Benton, melihat kekuasaan pada individu sebagai bagian dari produk lingkungan sosialnya. Karena itu, analisis kekuasaan dan kepentingan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial di mana aktor-aktor tersebut terlibat dan berpartisipasi. Kekuasaan dimiliki dan digunakan oleh masing-masing sebagai individu, tetapi oleh orang dalam kapasitasnya sebagai yang memiliki posisi dan peranan tertentu dalam masyarakatnya.

Pandangan-pandangan tersebut saling melengkapi. Kekuasaan itu, meminjam Daniel Dhakidae (2015), "Begitu nyata, sekaligus juga begitu misterius". Dimensi kekuasaan mengaitkannya dengan kebijakan dan tanggung jawab sosial. Apakah kekuasaan itu tampak atau misterius, kalau sudah menyangkut kebijakan, urusannya publik dirugikan atau tidak baik jangka pendek atau panjang.

AMANAT DAN DELIBERASI

MORALITAS kekuasaan terkait tanggung jawab sosial. Para pejabat politik hakikatnya pelayan rakyat. Pemimpin politik harus peka dan tidak perlu menuding pengkritiknya membela "rakyat yang mana". Lebih baik menyikapi kritik apapun secara bijak dan introspektif. Yang dikedepankan disiplin demokrasi deliberatif. Deliberasi (permusyawaratan) dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Argumentasi itu disampaikan Held (2007) karena adanya pertukaran informasi dan wawasan, meningkatkan kemampuan pemahaman masalah. Selain itu, ia memetakan kepentingan pribadi atau kelompok sekaligus berorientasi kepentingan bersama, dan mengganti "bahasa kepentingan" dengan "bahasa rasionalitas".

Ketika pemimpin politik meninggalkan "nalar publik" dan sibuk berselancar pada urusan menyerempet-nyerempet bahaya (*vivere pericoloso*) konflik kepentingan, maka ibarat tupai: sepandai-pandai ia melompat, suatu saat akan gagal juga. Dan, nasihat Lincoln pun bisa kita tambah, "Godaan datang setiap saat, maka wahai 'pemegang kekuasaan', waspadalah."●

Menolong Partai Politik

KOMPAS, 30 JANUARI 2016

RAMLAN Surbakti dalam tulisannya, "Parpol, Penggerak Demokrasi", (*Kompas*, 8/1) menjabarkan peran penting partai politik dalam demokrasi. Namun, merujuk pada pengalaman Indonesia, "tak ada parpol yang dikelola secara demokratis melainkan secara oligarki, bahkan personalistik." Disebutkan juga, sumber penerimaan utama parpol adalah kalangan elite internal sehingga kurang peduli kepada anggota.Selain itu, disiplin parpol sangat rendah. Singkat kata, parpol di Indonesia umumnya belum mampu berperan sebagai penggerak demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis.

Guru besar ilmu politik ini tidak mengada-ada. Hal ini sekaligus jadi peringatan bagi parpol membenahi diri ke arah ideal yang bermuara pada menggerakkan demokrasi yang berkualitas di negeri ini. Parpol dalam negara demokrasi bak tulang punggung penting, tidak saja dalam mewarnai demokrasi, tetapi juga dalam hal pembangunan politik. Parpol yang kuat dan fungsional tentu mendorong terwujudnya pembangunan, dan bukan pemerosotan politik. Kalau diperas, inti pembangunan politik ialah stabilitas yang demokratis dengan dampak kemaslahatannya.

Parpol-parpol kita mengalami banyak situasi yang membuatnya terjebak pada wajahnya yang paradoksal. Hampir semua fungsi yang dilekatkan kepadanya, apakah pendidikan dan sosialisasi, akomodasi dan agregasi, rekrutmen dan pengaderan anggota, atau lainnya, nilainya cenderung masih tekor. Meminjam Katz dan Mair (1993), tiga wajah partai: nilainya di ranah parlemen dan pemerintahan, akar rumput, dan pengelolaan internal lembaga pun belum

memuaskan. Seringkali parpol bukan bagian dari solusi, melainkan bagian dari kompleksitas masalah.

Oligarki lebih banyak menambah buram wajah parpol sebagai entitas "kepemilikan personal", jauh dari kepentingan publik. Agenda tersembunyi memenangi kepentingan para aktor oligarki, konsep yang oleh Jeffrey Winters diperbarui dengan memperkenalkan fenomena pertahanan kekayaan, kini lazim bersifat terbuka. Pertarungan internal antarelite parpol pun semakin bercorak pragmatis-transaksional, tak lagi mencerminkan konflik ideologis.

Liberalisasi politik yang tergilas corak pragmatis-transaksional itulah yang tergambar dalam wajah kebanyakan parpol kita. Parpol jadi wahana politik yang ironisnya "tanpa politisi". Kualifikasi internal parpol terdegradasi oleh semata-mata kekuasaan formal yang dikendalikan aktor oligarki yang aneh.

INSTITUSIONALISASI

PERSPEKTIF yang banyak menjadi pisau bedah terkait masalah parpol ialah institusionalisasi. Ia banyak menyinggung konteks internal parpol, bagaimana ia tumbuh sebagai lembaga yang kuat. Institusionalisasi merupakan proses menjadikan organisasi dan prosedurnya memperoleh nilai baku dan stabil. Huntington (2004) menyatakan pelembagaan politik dapat diukur dari tingkat adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensinya. Panebianco (1998) menekankan pentingnya otonomi dan kesisteman. Tingkat otonomi terkait sejauh mana organisasi tak bergantung pada kekuatan lingkungannya. Tingkat kesisteman adalah sejauh mana kesalingtergantungan antarsubsektor organisasi.

Randall dan Svasand (2002) menambahkan pendapat Kenneth H Janda tentang pentingnya partai yang tertanam dalam benak publik. Randall dan Svasand memperkenalkan konteks kesisteman, otonomi, nilai-nilai, dan kultur, citra yang otentik. Di atas itu semua, ada satu hal lagi yang tak kalah mendasarnya, dan ini penting sekali, yakni kepemimpinan. Kepemimpinan ialah ujian bagi para elite parpol, apakah mereka bisa memainkan diri sebagai politisi se-

jati, andal, ataukah medioker saja.

Dalam perspektif institusionalisasi diasumsikan parpol yang kuat kelembagaannya – dan tentu saja fungsional – akan berdampak positif pada peningkatan kualitas demokrasi. Dalam hal ini, parpol merupakan bagian dari elemen penting sistem politik secara keseluruhan. Ia terkait dengan, terutama, sistem kepartaian nasional dan sistem pemilu. Parpol pastilah dihadapkan pada realitas kompetisi; apabila ia kuat secara lembaga, pastilah akan terus eksis dalam sistem dan cuaca politik apa pun.

Bagaimana tingkat institusionalisasi parpol di Indonesia dewasa ini? Tampaknya rata-rata tingkat institusionalisasi mereka masih rendah. Nilai parpol yang terlanda konflik atau perpecahan internal akut tekor. Dalam kemandirian parpol, memang tidak dapat serta-merta jeroan parpol yang disalahkan, tetapi sistem kepartaian kita masih belum antisipatif dalam pendanaan. Ini masih jadi dilema: di satu sisi parpol gagal memobilisasi dana yang cukup dari dalam, tapi dana dari negara sangat terbatas. Akibatnya, pemenuhan pendanaan parpol oleh para elite tidaklah mudah dan berpotensi pada perilaku korupsi para kader di jabatan publik.

Lantas, bagaimana menolong parpol? Kita tahu parpol pilar penting dari masyarakat politik sebagaimana masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang kuat adalah prasyarat penting dalam konsolidasi demokrasi. Semua pihak perlu bertanggung jawab memperkuat parpol sebagai penggerak demokrasi. Dari sisi luar parpol, masyarakat sipil pun perlu menekan dan mendesak para elite parpol agar menjadi politisi yang benar, bukan memperkuat posisi sebagai oligarki yang membajak parpol sendiri.

Sesungguhnya yang paling penting adalah tekanan dari dalam, supaya parpol bergerak ke arah penguatan institusinya. Jadi, harus ada transformasi dari dalam yang hadir sebagai respons terhadap tekanan dari luar yang menghendaki agar parpol terlembaga secara demokratis. Ini bisa terjadi manakala pola pikir yang ada tak eksklusif. Para elite partai yang inklusif, sebaliknya, sadar bahwa yang dilakukan parpol tidak dapat dilepaskan dari publik. Parpol bukan

milik elitenya, melainkan milik publik. Pengelola parpol jangan melembagakan sikap menutup diri.

REGULASI

DARI sisi sistem, akhirnya diperlukan regulasi yang orientasinya penguatan institusi parpol. Sistem kepartaian dan pemilu dewasa ini tampak belum berorientasi ke sana. Sering parpol bak gelandangan di rumah sendiri dan mengalami disorientasi. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan berdasarkan suara terbanyak sekadar membuat parpol jadi kendaraan politik yang tak mampu memastikan para kader terbaiknya terpilih. Mereka kalah dengan yang, meminjam istilah Nurcholish Madjid, "gizinya" banyak.

Bila demikian, perkaderan seolah-olah tak berguna dan memicu alasan elite parpol enggan melakukan perkaderan yang baik dalam bingkai penguatan institusi. Parpol tak boleh manja dan berharap dimanja negara. Mereka harus lebih dulu mampu memperbaiki wajahnya, menunjukkan kepada publik perubahan signifikan dalam menggerakkan demokrasi dengan kian tingginya persentase identifikasi partai sehingga peningkatan dana oleh negara tidak menuai protes luas.●

Semangat Menolak Politik Uang

KOMPAS, 15 MARET 2016

WACANA menolak politik uang belakangan ini mengemuka setidaknya dalam draf revisi UU Pilkada yang diajukan Kemendagri, dan menjelang munaslub Partai Golkar. Yang pertama terkait ikhtiar menolak praktik politik uang dalam pilkada, melalui sanksi yang lebih tegas dan diharapkan berefek jera bagi pelakunya. Yang kedua, dikaitkan konteks mentradisikan pagelaran politik tertinggi partai yang bebas politik uang. Meskipun konteksnya berbeda, di atas kertas, setidaknya mengemuka semangat menolak

politik uang.

Soal politik uang, sudah menjadi semacam pengetahuan umum sejak era reformasi, ketika kran keterbukaan politik terjadi ditandai oleh kompetisi politik antarpartai, bahkan antarkandidat yang ketat, telah membuat ongkos politik demikian mahal. Hal tersebut dimungkinkan karena, para pelaku dan kompetitor dalam kontestasi pemilu, tidak saja terbebani pengeluaran keuangan yang absah, tetapi juga menghadapi tuntutan yang dilematis, menyebar politik uang. Lambat laun, politik uang menjadi instrumen jalan pintas yang mentradisi, dan sayangnya diamini oleh sebagian kalangan masyarakat. Maka, suburlah pola pragmatisme-transaksional.

Berbagai diskusi dilakukan menyorot fenomena politik uang sebagai sumber penyakit praktik kepolitikan kita. Secara normatif, semua menolak. Kendatipun, kalangan politisi diam-diam menyebut, mereka tak bisa mengelak. Kalau tidak ikut larut, maka mereka khawatir tak akan terpilih, apalagi ketika mencermati kompetitor lain gencar berpolitik uang. Dalam hal ini, sangatlah susah pepatah Jawa yang konon berasal dari Sunan Kalijaga dalam Serat Lor, "*anglaras ilining banyu, angeli nanging ora keli*" atau tetap selaras dengan kehendak masyarakat, ikut mengikuti arus yang ada, tetapi tidak ikut "tenggelam", diterapkan. Dalam banyak kasus gagalnya para caleg atau yang lain, justru karena mereka mencoba mempraktikkan nasihat itu. Kalaulah tak menenggelamkan diri dalam politik uang, nyatanya sulitlah terpilih.

Menjelang Pilpres 2004, Nurcholish Madjid pernah mengeluhkan praktik politik uang dengan sindiran istilah "gizi". Bahwa, sulitlah kandidat, ketika itu dalam konteks konvensi Partai Golkar, untuk terpilih, kalau hanya sekadar menyampaikan visi, karena realitas lapangan menuntut "gizi". Terlepas konteksnya, sudah menjadi rahasia umum pula politik uang pun telah mempola dalam munas, kongres, atau muktamar partai-partai. Suksesi kepemimpinan internal partai, meskipun susah dibuktikan secara hukum, tetapi seringkali sarat dengan bau politik uang.

Karenanya, dapat dipahami kalau antarcalon kandidat menjelang munaslub Partai Golkar, saling mengeluarkan jurus antipolitik uang, yang semoga saja tidak sekadar sebatas retorika. Bahkan, mereka tidak keberatan kalau munas melibatkan pihak aparat penegak hukum, yakni KPK dan kepolisian. Tentu saja pelibatan aparat penegak hukum dalam perhelatan suksesi kepemimpinan internal partai, akan sangat menarik dan diharapkan bisa menepis mewabahnya politik uang. Hal ini membutuhkan sikap yang proaktif dari kedua belah pihak, baik partai maupun aparat penegak hukumnya.

MERUSAK DEMOKRASI

POLITIK uang jelas merusak demokrasi dan identik dengan korupsi. Kompetisi yang jujur dan bersih ternodai. Jauh dari hal tersebut, politik uang menghambat kandidat-kandidat politik yang potensial, dan yang muncul sekadar mereka yang kebetulan beruang banyak. Penolakan terhadap politik uang, tentu tidak sebatas dalam semangat, tetapi memang harus ada aturan main yang ketat. Karenanya ikhtiar merevisi UU Pilkada yang menitikberatkan antisipasi praktik politik uang, bagaimanapun perlu diapresiasi. Namun, tetap kita lihat sejauhmana klausul yang ada, apakah masih membuka celah, atau menutupnya rapat-rapat.

Yang masih menjadi polemik soal sanksi pelaku politik uang yang harus menunggu proses hukum pidana yang berlangsung lama dan tidak menjamin adanya efek jera. Pemerintah perlu mempertimbangkan gagasan pemberian sanksi administratif, berupa penolakan pencalonan oleh KPU, setelah Bawaslu menemukan bukti yang cukup atas pelanggaran politik uang, tanpa harus melalui proses hukum pidana. Kalau ini dilakukan, maka Bawaslu akan fungsional dan efektif sebagai wasit pemilu yang berorientasi bebas politik uang. Tetapi, pemerintah tampaknya bertahan pada proses hukum pidana, di mana pembatalan calon terpilih bisa dilakukan, manakala secara pidana terbukti melanggar. Jadi, mekanismenya masih tetap sama dengan sebelumnya.

Terlepas dari polemik itu, kita jelas membutuhkan praktik

demokrasi yang sehat, maka lazim kalau politik uang harus ditolak beramai-ramai. Yang menjadi soal ialah bagaimana di level masyarakat? Diasumsikan, masyarakat akan menjauh dari pola pragmatisme-transaksional, manakala elite kandidat yang berlaga kompak menjauhi politik uang, antara lain karena adanya aturan hukum yang sangat ketat. Barangkali, gambaran ideal seperti ini sangat menyederhanakan masalah. Tetapi, elite bisa memulainya, masyarakat mengikuti.●

Parpol dan Kekuasaan

DOKUMENTASI PENULIS, 30 MEI 2016

ALL POLITICS IS IN SOME SENSES A MANIFESTATION OF POWER STRUGGLES
- **DANNY RYE** (2014)

APAKAH sejatinya parpol berdiri diniatkan untuk berkuasa, memerintah, atau menjadikan dirinya bagian dari pemerintahan? Jawabnya, tidak selalu demikian. Dengan kata lain, bisa ya bisa tidak. Robert Huckshorn (1984) misalnya, mengajukan definisi pragmatis bahwa parpol merupakan kelompok otonom dalam masyarakat yang bertujuan untuk bisa menjadi peserta dan memenangkan pemilu dan memegang kendali pemerintahan. Kata kuncinya, menang pemilu dan memerintah.

Namun, bagi John Kenneth White (2006) definisi demikian mengandung masalah. Kalau definisi pragmatis itu dikedepankan, bagaimana menjelaskan fenomena parpol-parpol ketiga (*third parties*) seperti Partai Pecinta Bir (*Beer-Lovers' Party*) di Polandia dan Partai Hijau (*Green Party*) di Amerika Serikat?

Partai Pecinta Bir di Polandia berkonotasi lelucon, kendatipun lantas menghadirkan platform serius nilai-nilai kebebasan berseri-

kat dan berekspresi, toleransi, dan standar hidup yang lebih baik. Adapun pada 1991 ia memperoleh kursi di Sejm, Majelis Rendah Parlemen Polandia, kenyataan demikian dipandang efek samping belaka. Asal-usul satir parpol ini menunjukkan ia tidak terlampau bertujuan menang pemilu. Dalam batas-batas tertentu, fenomena hampir sama mengemuka pada Partai Hijau di Amerika. Partai ini memiliki idealisme dan komitmen pelestarian lingkungan hidup, antikekerasan, keadilan sosial, dan pengorganisasian akar rumput. Seperti Partai Pecinta Bir, Partai Hijau hampir tidak memiliki harapan menang pemilu.

Kaitannya dengan kekuasaan, parpol bergerak membentuk modelnya. White mencatat dua model pentingnya: model efisien-rasional (*the rational-efficient model*) dan model tanggung jawab (*the responsible parties model*). Yang pertama juga dikenal model pilihan rasional. Asumsi pentingnya, "*every government seeks to maximize political support*". Model ini mendukung definisi pragmatis, parpol dan koalisi parpol hadir untuk memenangkan pemilu. Apabila menang, mereka berhak memperoleh insentif partisipasi.

Model kedua menekankan pentingnya kritik agar praktik kekuasaan tak menyimpang. Parpol punya tanggung jawab gagasan dan kontrol, agar kekuasaan tak melenceng. Sekilas, ia dipersiapkan sebagai kekuatan oposisi, namun tak semata-mata demikian. Ia tetap punya tujuan kekuasaan, tetapi tak harus di pemerintahan, kecuali pengaruhnya dalam isu tertentu diperhatikan siapapun. Jadi kekuatan pengaruh diutamakan. Tapi, biasanya kalangan pragmatis mencibir, bagaimana bisa berpengaruh kalau tidak berkuasa?

PERTARUNGAN KEKUASAAN

BAGI parpol, menggapai kemenangan pemilu di satu sisi dan tanggung jawab di sisi lain bak dua sisi satu mata uang. Tetapi, manakah yang perlu dinomorsatukan? Idealnya tentu tanggung jawab. Kalau yang dikedepankan tanggung jawab, parpol lebih tergerak mem-

perkuat demokrasi, bukan malah mengancam demokrasi. Tetapi, tetap saja yang tergiang ialah apa yang disitir Danny Rye dalam bukunya *Political Parties and The Concept of Power* di atas, "*All Politics is in some senses a manifestation of power struggles*". Konsekuensinya, arah dari politik tak mesti memperkuat demokrasi. Bahkan, tradisi parpol pun bisa tak mengindahkan aspek-aspek pokok demokrasi, kecuali sekadar tradisi oligarki.

Merujuk Rye, kontestasi internal parpol menemukan empat jenis kekuasaan: kekuasaan individual (*individualistic power*), kekuasaan strategis (*strategic power*), kekuasaan birokrasi (*bureaucratic power*), kekuasaan konstitutif (*constitutive power*) dan kekuasaan kedisiplinan (*disciplinary power*). Masing-masing memiliki karakteristik dan logikanya. Eksperimen politik individu di organisasi politik, karenanya tak sekadar mengandalkan jenis pertama, melainkan bisa tertolong efektivitas jenis-jenis lainnya.

Karenanya, sesungguhnya personalisasi politik parpol akan selalu dalam ujian. Pada praktiknya, demokrasi internal parpol mampu mengantarkan siapa saja untuk bisa menjadi ketua umum. Namun, masa depan parpol tak sekadar ditentukan oleh siapakah sosok tersebut, melainkan sejauhmana kepemimpinannya mampu mengelola jenis-jenis kekuasaan tersebut. Apakah birokrasi parpol berjalan? Bagaimana dengan pengelolaan terhadap kepentingan-kepentingan strategisnya? Apakah aturan main ditaati bersama? Apakah disiplin masih terjaga?

Lantas, bagaimana refleksinya dalam konteks eksternal, ketika parpol dihadapkan pada persaingan kekuasaan yang ketat? Tentu terletak dari sejauhmana dukungan publik, terutama dalam berbagai pemilu. Telah banyak ulasan dalam hal ini, tetapi intinya, bagaimana parpol tetap eksis dan berlanjut di tengah cuaca politik apapun. Dukungan dan pengaruh merupakan dua kata kunci penting. Kalaupun dukungan minim, tetapi bagaimana dengan pengaruh? Apakah ia masih bisa menjadi kekuatan referensional dalam

proses pengambilan kebijakan bagi mereka yang berkuasa dan tetap terhormat di kalangan masyarakat luas?

Dukungan mencerminkan adanya tanggapan balik (*feed back*) yang positif dari publik yang diungkapkan dalam dua bentuk dukungan, yakni dukungan elektoral dan non-elektoral. Yang kedua ini terkait dengan konteks demokrasi deliberatif, sejauhmana parpol mampu mendengar aspirasi publik pasca-elektoral. Terhadap hal ini, bisa saja parpol abai, menjauh dari aspirasi publik, tetapi ketika musim pemilu tiba parpol-parpol berlomba-lomba mendekat ke publik dalam aneka kampanye.

VARIABEL KEMANDIRIAN

VARIABEL dukungan penting dalam dimensi pengaruh. Ini akan menempatkan parpol apakah di pemerintahan atau sebagai oposisi alias kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. Parpol-parpol yang mandiri selalu siap untuk apakah menang atau kalah, dengan segala konsekuensinya. Apabila kalah, dalam arti tidak ikut memerintah, maka menjadi oposisi bukanlah kiamat. Kondisi ini justru memberi kesempatan untuk mencuri perhatian dari publik, sehingga parpol memperoleh perbaikan dalam tingkat dukungan. Dalam logika demokrasi *checks and balances*, menjadi oposisi identik dengan menguatnya dimensi pengaruh di luar pemerintahan.

Namun, dalam praktiknya tidak mudah bagi parpol yang memilih menjadi oposisi, manakala variabel kemandirian kelembagaan masih bermasalah. Ia hanya akan memberi peluang bagi para elite untuk bermanuver membalikkan layar politik parpol ke pihak yang berkuasa. Pertarungan kekuasaan internal terjadi, dan apabila elite oposisi tidak kuat, haluan layar politik parpol pun mudah berbelok. Konstelasi kekuasaan nasional pun berubah.

Fenomena demikian juga dapat diperkuat tidak sekadar dari perspektif kelembagaan, tetapi juga perilaku politik (*political behavior*). Penjelasannya seringkali lebih rumit, apalagi manakala pisau

bedahnya perspektif oligarki pertahanan kekayaan (*wealth defense*) yang dikembangkan Jeffrey Winters. Dalam perspektif tersebut, pertarungan kekuasaan dilakukan para elite oligarki apapun latar belakangnya, semata-mata untuk merobohkan dan mempertahankan apa yang dikonsepsikan sebagai "pertahanan kekayaan".

MENCAMBUK DIRI

APABILA pertarungan kekuasaan lantas menghasilkan kekuasaan individual atau kelompok, sekali lagi, pertaruhannya ada pada kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi penting, sejauhmana para elite parpol tidak sekadar hadir sebagai elite transaksional, tetapi sebagai pemimpin politik yang visioner, berkompeten dan transformatif. Kelembagaan yang kuat akan membatasi personalisasi, sebaliknya memperkuat presidensialisasi parpol. Merujuk Gianluca Passarelli (2015), personalisasi menitikberatkan pada sentralitas personal yang memainkan peran sebagai aktor politik individual, sementara presidensialisasi lebih ke konteks peran kekuasaan elite penentu parpol yang dibatasi oleh sistem.

Tokoh sentral parpol bisa sangat kuat pada suatu masa yang berpola kepemimpinan patronatif. Dalam jangka panjang, parpol bisa cepat sekali mengalami kemerosotan, apabila terbiasa terkelola tanpa kelembagaan politik yang kuat. Hal demikian perlu dicamkan sebagai bahan untuk mengkritisi tradisi kepemimpinan politik yang cenderung membuat elite utama parpol terlena dalam labirin kepentingan jangka pendek.

Sementara kalangan ilmuwan politik meresepkan parpol yang ideal ialah yang kuat kelembagaannya. Kalau kesistemannya jalan, maka organisasi terkelola secara modern dan demokratis di atas dasar nilai-nilai dan visi organisasi. Dalam konteks jenis kekuasaan di atas, kekuasaan birokrasi dan konstitutif efektif. Adapun kekuasaan kedisiplinan, sesungguhnya mencerminkan ikhtiar seluruh komponen mencambuk diri dalam disiplin tradisi parpol yang mo-

dern dan demokratis kelembagaannya.

Parpol-parpol yang kuat selalu teruji dalam kawah candradimuka politik yang penuh dengan jalan terjal, onak dan duri. Proseslah yang membesarkan atau mengecilkan parpol-parpol dalam suatu bentangan sejarah politik yang panjang. Kalau kelembagaan kuat dan tidak rapuh, mereka akan awet, dalam arti tidak tenggelam oleh dinamika politik yang mengarah pada pembusukannya.●

Menggali Etos Bangsa

KOMPAS, 14 JULI 2016

INDONESIA, tak terelakkan merupakan bangsa yang religius, setidaknya sebagaimana direkam dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Religiusitas itu sendiri berimpitan dengan etos spiritualitas masyarakatnya. Tapi, sejauhmana dimensi spiritualitas itu mampu memicu kemajuan, terkhusus bidang ekonomi? Pertanyaan ini menarik untuk kita perbincangkan kembali, di tengah-tengah realitas kehidupan bangsa dewasa ini.

Indonesia bangsa yang besar, tetapi kondisinya masih seperti raksasa tertidur. Kita masih berputar-putar di tengah labirin masalah kebangsaan yang kompleks dan nyaris belum beranjak signifikan ke arah negara maju. Kita juga memahami, bahkan mengamini berbagai retorika para pemimpin tentang perlunya percepatan pembangunan. Tapi, rupanya ia tak semudah pelaksanaan. Apakah memang bangsa ini ditakdirkan sebagai bangsa yang lemah etos kerjanya, betapapun "tinggi spiritualitasnya"?

Hubungan antara spiritualitas dan kemajuan mengemuka pada tesis Max Weber. Etika Protestanlah yang, dalam tesisnya itu, berperan penting dalam membangkitkan kapitalisme di Barat. Merujuk Weber, Robert N Bellah memotret kebangkitan Jepang dari perspektif peran penting spiritualitas religi Tokugawa. Bagaimana dengan Indonesia? Sejarawan Sartono Kartodirdjo pernah memberi

ulasan menarik tentang hal ini. Merujuk Serat *Wedatama* karya Mangkunegara IV, kita punya "*mesu budi*".

ASKETISME DAN WATAK YANG LEMAH

DALAM artikelnya "Etos Kerja dan Etos Bangsa" (*Kompas*, 4/3/1989) dan ""Mesu Budi" Berfungsi sebagai Etos yang Berpengaruh" (*Kompas*, 2 Oktober 1983), Sartono memaknai "mesu budi" sebagai etos yang mencerminkan asketisme intelektual, semacam disiplin mental yang mendasari segala usaha dan pekerjaan. Implementasi "mesu budi" justru terlihat tatkala dia menganalisa etos kerja masyarakat Jepang yang berkembang sejak Restorasi Meiji. Karena "mesu budi" merupakan suatu asketisme yang bukan eskapisme alias religiusitas yang diekspresikan dengan meninggalkan segala urusan keduniaan, maka ia justru berfungsi sebagai etos yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan bangsa.

Tetapi, lantas memang timbul pertanyaan bahwa kalau "mesu budi" itu semacam asketisme produktif yang dapat disejajarkan dengan "etos Protestan"-nya Weber atau "Religi Tokogawa"-nya Bellah, mengapa tidak ada semacam Restorasi Meiji di Jawa, lebih luas lagi Indonesia? Saya punya hipotesis bahwa masalahnya, Jawa punya pengalaman lain. Kultur feodal kerajaan-kerajaan di Jawa, pada praktiknya justru dipersubur oleh kolonialisme. Kaum penjajah punya politik yang memecah belah, sehingga dalam mengatasi perlawanan pun kaum penguasa pribumi saling diadu domba. Penjelasannya segera dapat dikaitkan dengan konteks munculnya mentalitas permisif akibat yang tak berdaya pada kaum kolonial.

Tetapi sangat mungkin ada hipotesis lain, bahkan yang berkebalikan dengan pendapat saya itu. Bagaimana dengan hal-ikhwal tradisi Samurai layaknya di Jepang, apakah juga ada di Jawa? Kalau ada seberapa signifikan? Juga, sejauhmana mentalitas produsen dan kewirausahaannya, apakah dipicu kesadaran religiusitas pula? Bagaimana dengan modernisasi, apakah ia timbul secara "mandiri" atau banyak menggantungkan diri pada pihak kolonial dan rezim kelanjutannya? Pengalaman kita di Jawa atau Indonesia, lain ki-

ranya dengan yang terjadi di Jepang dan Barat. Jepang, menurut Kishore Mahbubani dalam *Can't Asian Think* (1998) ialah bangsa Asia paling awal yang mampu mengadaptasi etos bangsa Barat.

Perbincangan etos kerja orang Indonesia, sesungguhnya sudah menjadi klasik. Sebelum kemerdekaan, ia menyeruak lewat *Polemik Kebudayaan* antara Sutan Takdir Alisjahbana dengan yang lain. Takdir memicu polemik dengan melontarkan pandangan yang tak jauh dari pesan kalau kita mau maju, tirulah etos bangsa Barat. Bagi Takdir, kita terlalu lemah menyalakan api, sehinga nasi yang kita tanak tak matang-matang. Sedang Barat, apinya menyala-nyala.

Pada masa Orde Baru, budayawan Mohtar Lubis dalam *Manusia Indonesia* (1978), menyinggung soal "watak yang lemah", sebagai salah satu karakter menonjol manusia Indonesia. Dikatakannya, "Manusia Indonesia kurang kuat dalam mempertahankan dan memperjuangkan keyakinan serta pendiriannya. Hal menjadikan manusia Indonesia cepat berubah prinsipnya, seiring dengan tekanan yang ia dapatkan dari luar dirinya." Uraian tersebut, otokritik yang betapapun menyesakkan, tak boleh kita abaikan.

KEMBALI KE PESISIRAN

ADA juga tesis yang mengatakan, kita sebagai bangsa, terjebak pada apa yang kerap diuraikan Nurcholish Madjid sebagai "mentalitas pedalaman", hal yang telah mengubah karakter bangsa yang konon pernah berorientasi "pesisiran". Mentalitas pedalaman mencerminkan suatu mental tertutup, *inward looking*, membatasi informasi, eksklusif, enggan berkompetisi, terlambat dalam mengenali perkembangan baru, lemah dalam kreativitas dan inovasi, merasa jaya di negeri sendiri yang diklaim *gemah ripah loh jinawi*.

Konon, kolonialismelah yang juga menyumbang kokohnya mental pedalaman itu. Indonesia yang berkarakter maritim, dijauhkan dari mental pesisiran. Berkebalikan dengan mental pedalaman, mental pesisiran mencerminkan keterbukaan, melek informasi, *outward looking*, responsif dalam berkompetisi, inklusif, kreatif dan inovatif. Ia lebih produktif, mengingat kalau tidak demikian, bangsa

ini akan tergantung terus pada kekuatan asing. Mental pesisiran memaksa kita untuk lebih objektif dalam melihat dan merespons perkembangan bangsa dari perspektif global.

Mental pesisiran itulah sesungguhnya yang perlu kita warisi. Indonesia, menurut Sutan Takdir Alisjahbana bukanlah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan di masa lalu, melainkan sebuah bangsa baru. Maka memang harus ada mental baru. Bangsa baru dengan mental baru. Mental baru itu bisa diambil dari manapun, termasuk dalam konteks Polemik Kebudayaan, dari bangsa Barat yang cenderung bermental pesisiran.

Kesadaran religius bangsa, sesungguhnya tak menutup diri dari ikhtiarnya untuk menggapai kemajuan. Dalam perkembangan gagasan Keislaman, misalnya, pada masa Polemik Kebudayaan tahun 1930-an, muncullah suatu kampanye asketisme produktif oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Melalui serangkaian artikelnya di majalah yang dikelolanya, HAMKA memperkenalkan perspektif "tasawuf modern". Dia berikhtiar menarik makna "tasawuf", penyikapan spiritualitas keagamaan, dari pandangan umum yang bersifat eskapistik menjadi asketisme produktif. Spirit keagamaan dijumpakannya dengan modernitas atau hal-ikhwal pentingnya kemajuan.

Jauh sebelum itu, KH Ahmad Dahlan telah merintis bagaimana spirit Keislaman mendorong kemajuan bangsa. Ia melakukannya melalui gerakan Muhammadiyah. Di sisi lain, gerakan Keislaman lainnya yakni Nahdlatul Ulama juga punya semangat kemandirian yang tinggi. Ia juga sadar akan etos untuk memajukan bangsa. Dua gerakan Islam arus utama ini penting untuk diperbincangkan, mengingat pengaruhnya yang signifikan dalam mewarnai pemahaman dan aktualisasi Keislaman di Indonesia hingga dewasa ini.

WIRAUSAHA DAN PERAN NEGARA

SEJAK beberapa dekade belakangan ini, kesadaran akan melemahnya etos kewirausahaan dirasakan semua pihak. Lumbung-lumbung produktivitas ekonomi masyarakat goyah karena kalahnya

persaingan. Kejayaan kampung batik Laweyan, Solo atau Pekajangan, Pekalongan, tampaknya tinggal kenangan saja. Persoalan-persoalan yang sifatnya struktural menggoyahkan etos berekonomi masyarakat, terutama dalam konteks "masyarakat santri".

Kita perlu berkaca pada perkembangan ekonomi Turki. Beberapa penelitian ekonomi Weberian menemukan contoh kasusnya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di jantung Anatolia. Misalnya, Kayseri, "kota santri" yang pesat perekonomiannya, dan lazim dikaitkan konteks *Islamic Protestantism* atau *Islamic Calvinism*. Dalam kasus Kayseri, spirit keagamaan Islam mampu memicu tumbuhnya wirausahawan kelas menengah secara signifikan. Produk-produk mereka berorientasi ekspor ke Eropa dan yang lain.

Di Turki, kebijakan liberalisasi ekonomi Turgut Ozal dekade 1980-an diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat Anatolia. Ikhtiar itu berhasil selaras mentalitas kesalehan ekonomi yang hasilnya bisa disaksikan sekarang. Di Korea, negara berpihak ke pengembangan industri kreatif. Ia tak akan seberhasil sekarang, manakala tak didukung etos kerja rakyatnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Dari mana etos bangsa kita gali? Jawabnya, dari banyak hal, termasuk spiritualitas keagamaan. Dulu, Bung Karno pernah menyitir tentang "api Islam", tampaknya yang dimaksud, bagaimana etos spiritualitas agama mampu dijadikan pendorong kemajuan. Tetapi, apakah dari sudut ini, belumlah muncul apinya, melainkan sekadar abunya? Apakah agama masih banyak didekati dari perspektif yang jauh dari apinya? Apakah elite agama tengah terjebak formalitas dan sibuk mengurus konflik yang seharusnya tidak perlu?

Kita perlu terus mengaca diri, justru untuk menggali kembali etos bangsa, etos baru yang kompatibel dengan zamannya. Kalau etos bangsa masih lemah dan ketinggalan zaman, bagaimana mau lari cepat?●

Tentang Kudeta di Zaman Kita

DOKUMENTASI PENULIS, 20 JULI 2016

BERITA percobaan kudeta yang gagal di Turki masih menghiasi media massa hingga kini. Peristiwa tersebut menyisakan banyak pertanyaan dari yang mendasar hingga yang bernada konspiratif. Turki memang langganan kudeta sepanjang sejarahnya. Juga Mesir dan Thailand. Maka, manakala kita bicara tentang kudeta-kudeta abad duapuluh satu, membandingkan pengalaman tiga negara tersebut menjadi relevan.

Saya akan ajak anda membaca buku otoritatif tentang kudeta. Ditulis Edward Lutwakk, buku terbitan pertama kali pada 1968 tersebut penting dibaca kembali. Dengan judul cukup menantang *Coup d'Etat, a Practical Handbook*, yang kemudian direvisi untuk terbit kembali pada 1979, buku ini membahas hakikat dan rupa-rupa kudeta. Tetapi, jelas-jelas kudeta itu berbeda dengan revolusi. Itu ditegaskan oleh Walter Laqueur pada kata pengantarnya.

Menurut Laqueur, fenomena kudeta seringkali tak terjelaskan sekadar dari perspektif pemahaman terhadap kondisi-kondisi objektif pemicunya. Berbeda dengan revolusi, "kudeta sangat sulit diprediksikan, bahkan sulit dibuat hipotesis dan konsep teratur: bagaimana kita bisa secara ilmiah membahas ambisi-ambisi politis beberapa orang yang menempati posisi-posisi strategis?" Pandangan tersebut dipahami dalam konteks sering mengemukanya peristiwa ketika bahkan penguasa militer dijatuhkan bukan oleh revolusi rakyat, tetapi oleh rekan-rekannya sendiri.

Kendatipun demikian, masih menurut Laqueur kudeta memi-

liki pola-pola tetap yang selalu terjadi, yakni "sama namun berbeda", sejak mulai konspirasi hingga terjadinya perebutan kekuasaan. Dalam konteks inilah, publik pembaca kudeta tak terlampau salah manakala suka dengan perspektif konspiratif. Bahwa hal-hal sekecil apapun dikait-kaitkan sedemikian rupa, sehingga ceritanya bisa menjadi terkesan sangat masuk akal.

Lutwakk sendiri mencatat dua hal penting untuk memahami kudeta. Pertama, untuk melaksanakannya harus ada prakondisi-prakondisi tertentu. Kedua, kalau gagal, maka upahnya jauh lebih berat "dari sekadar makan ikan kalengan", namun kalau berhasil imbalannya sangat menggembirakan. Kudeta melibatkan beberapa aspek dari berbagai metode yang lazim terjadi dalam revolusi, perang saudara, pronounciamiento, putsch, pembebasan, perang kemerdekaan, insurgensi atau yang lain.

Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, tetapi teknis kudeta lebih dekat pada konteks *pronounciamiento* dan *putsch*. *Pronounciamiento* merupakan versi kudeta militer Spanyol, Amerika Latin, juga Afrika, di mana perebutan kekuasaan digerakkan dan dipimpin oleh pimpinan angkatan darat atas nama keseluruhan korps perwira. Sedangkan *putsch*, dilakukan oleh satu faksi di angkatan darat, atau juga dijalankan oleh sipil yang memakai beberapa unit angkatan darat.

Lutwakk menegaskan bahwa kudeta terjadi dari infiltrasi ke dalam suatu segmen aparatus negara yang kecil tapi menentukan, yang kemudian digunakan untuk mengambilalih pemerintahan dari kendali unsur-unsur lainnya. Itulah catatan penting yang patut digarisbawahi untuk memahami kudeta.

ZAMAN KITA

MENGAPA masih ada kudeta di zaman kita? Bukankah kudeta, di alam politik mutakhir abad ini, dianggap merupakan cara-cara primitif untuk mengambilalih kekuasaan yang sah? Kalau perspektifnya demokrasi, maka lazim saja mengemuka pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Namun, harus diingat kekuasaan, sampai kapan

pun, bisa diraih secara sah atau ilegal. Kudeta sebagai cara meraih kekuasaan ilegal pun masih populer digambarkan dalam film-film fiksi ilmiah yang kisahnya di pusaran waktu abad-abad mendatang. Kudeta merupakan perkara sepanjang masa.

Belajar dari pengalaman Turki, Mesir dan Thailand, setidaknya tercatat dua model kudeta. Pertama, kudeta konvensional yang dilakukan secara manual. Pengkudeta turun ke jalan-jalan berikhtiar menguasai titik-titik strategis, seperti kantor-kantor pemerintahan, media massa, serta akses-akses penting di perkotaan. Mereka bergerak cepat dalam merup dukungan massa anti-pemerintah. Kalau ada perlawanan, biasanya terjadi baku tembak atau tindakan keras yang memicu timbulnya banyak korban jiwa. Para pengkudeta akan habis-habisan, karena pilihannya harus berhasil. Jika gagal, taruhannya sangat berat.

Kedua, kudeta halus. Ia dilakukan tanpa harus mempertontonkan tank di jalan-jalan, kecuali simbolik saja. Pengkudeta biasanya bukan sekadar sekelompok perwira yang nekat, tetapi segenap korps menyetujuinya. Di Turki, kudeta jenis mengemuka pada 1971 dan 1997 yang dikenal sebagai kudeta memorandum, untuk membedakan dengan kudeta konvensional 1960, 1980, dan 2016. Jenis kudeta ini berhasil dilakukan manakala secara politik, militer di atas angin. Di Turki, mereka mengandalikan politik secara tak langsung (*ruling but not governing*). Hal itu dilakukan melalui institusi superbodi Dewan Keamanan Nasional sejak pasca-kudeta 1960 hingga direduksinya lembaga ini pada 2003 setahun setelah AKP berkuasa, sebagai syarat aksesi Turki ke Uni Eropa.

Di Mesir, transisi ke arah demokrasi digagalkan militer pada 2013. Kudeta dilakukan secara keras dan banyak memakan korban. Kudetanya berhasil karena fragmentasi politik sipil sangat tajam, sehingga mengkondisikan ketidakkompakan dalam penolakannya. Ia beda dengan kasus Turki. Memang terdapat fragmentasi politik di Turki, tetapi sentimen anti-kudeta menyatukannya. Banyak yang tak puas dengan kebijakan Erdogan, tetapi mereka tetap kompak menolak kudeta.

Di Thailand, model kudeta terakhir, pada 2014, sesungguhnya konvensional semata. Para pelaku kudeta turun ke jalan dengan tank-tanknya memaksa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra turun dari kekuasaannya. Sebelumnya, pihak militer mengumumkan keadaan darurat menyusul krisis politik. Yang menarik, aksi tersebut nyaris menuai perlawanan rakyat. Sang jenderal pelaku kudeta pun segera dapat diterima raja. Kendatipun demikian, tradisi kudeta yang keras dan berdarah-darah juga sering terjadi di negeri gajah putih ini.

DEMOKRASI

KENDATI kudeta merupakan sangat tabu di alam demokrasi, tetapi dalam perspektif politik lebih luas, militer tetap merupakan bagian dari kekuatan-kekuatan politik suatu bangsa. Kajian ilmu politik modern yang memperkenalkan teori sistem. Ia mengandaikan proses dan dinamika politik yang terus-menerus. Lembaga-lembaga politik formal yang diisi oleh para politisi, terutama *elected politician*, memiliki posisi absah dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan politik. Tetapi prosesnya tak lepas dari peran kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) dan bahkan kelompok penekan (*pressure groups*). Dalam perspektif militer sebagai kekuatan politik itulah ia masuk ke ranah dua jenis kelompok ini.

Demokrasi kita tak memungkinkan lagi militer terlibat aktif dalam politik. Dwifungsi sudah dihapuskan, sehingga militer berkonsentrasi pada masalah pertahanan nasional dan atas seizin kepolisian, diperbantukan mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan. Kita sudah berada di rel yang benar dalam reformasi militer dalam bingkai kontrol demokrasi. Namun, belajar dari pengalaman negara lain, eksperimen demokrasi sipil tetap harus diperkuat. Jangan sampai ia dinilai gagal, sehingga mengundang pembenaran bagi militer mencoba mellakukan pengambilalihan kekuasaan. Semua pihak harus profesional dalam bekerja, dan komitmen terhadap demokrasi harus terus dipermantab.●

Mencari Gambaran Pemilu Serentak 2019

KOMPAS, 12 AGUSTUS 2016

PEMILU 2019 akan lain dari pemilu sebelumnya, justru karena keserentakannya. Pemilu serentak merupakan konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), 23 Januari 2014, yang mengabulkan permohonan *judicial review* Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pemilu legislatif sehingga bersifat tidak serentak. Putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut akan berlaku untuk Pemilu 2019.

Setiap terbuka kesempatan merevisi perundang-undangan bidang politik, apakah tentang partai politik, pemilu (pilkada, pileg, dan pilpres), atau penyelenggara pemilu, kotak pandora terbuka kembali. Ada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, ada ragam usulan baru yang variatif. Untuk mencapai kesepakatan baru, memerlukan proses politik yang seringkali berteletele, sehingga mengorbankan persiapan penyelenggaraan pemilu.

Ikhtiar mencari sistem pemilu yang cocok, selain isu-isu relevan lainnya, bagaimanapun tetaplah urgen dalam penyelenggaraan pemilu serentak ke depan. Meskipun demikian, hingga kini masih belum jelas bagaimana gambarannya. Apakah akan terjadi perubahan sistem pemilu? Apakah semua partai bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2019? Atau bagaimana?

Dari perspektif perekayasaan pemilu (*electoral engineering*), tuntutan perubahan perundang-undangan diharapkan menuju ke

arah peningkatan kualitas demokrasi elektoral. Terdapat prinsip-prinsip mendasar yang harus diseleraskan dengan konstitusi yang menegaskan perlunya penguatan sistem presidensial. Konsekuensinya, perlu penyederhanaan sistem kepartaian. Sistem pemilu juga harus menjamin kualitas partisipasi pemilih, mereduksi praktik korupsi, dan menghasilkan para politisi terpilih (*elected politician*) yang berkualitas. Di atas semua itu, perubahan sistem politik, harus mengarah pula pada penguatan integrasi bangsa.

SISTEM PEMILU

DALAM hal pemilu legislatif beberapa isu mengemuka. Salah satunya, sistem pemilu yang hingga kini sedikitnya mengemuka tiga pandangan. Pertama, yang menghendaki perubahan sistem proporsional terbuka ke sistem daftar. Hal ini dikemukakan oleh Ramlan Surbakti. Dalam artikelnya di *Kompas* (27 Mei 2016), "Korupsi dan Sistem Pemilu", Ramlan memaparkan kelemahan praktik sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka (*proportional representation with open list*).

Sistem tersebut memberi "insentif" kepada calon dan pemilih untuk melakukan transaksi jual-beli suara, langsung maupun tidak langsung. Sistem yang juga disebut Sistem Pemilu Proporsional yang Berpusat pada Kandidat (*PR with Candidate-Centred*) ini, berpijak bukan kompetisi antarparpol, melainkan antarcalon dari partai yang sama di dapil yang sama (*intra-party competition*). Ketatnya kompetisi justru membuka peluang korupsi, termasuk "membeli" suara pemilih. Ia juga memposisikan partai sekadar payung pencalonan, mereduksi ideologi menjadi pragmatisme. Ramlan mengusulkan sistem proporsional daftar partai (*list system*/sistem daftar). Partai mengajukan calon anggota legislatif yang dipilih oleh pengurus dan anggota parpol.

Kedua, pandangan ke arah sistem pemilu ke sistem campuran atau paralel. Pandangan yang diusulkan oleh LIPI ini dimaksudkan menutup kelemahan baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup. Sistem yang sudah diterapkan di Filipina, Australia,

dan Jepang ini menggabungkan sistem proporsional dan sistem distrik atau mayoritarianisme. Konsekuensinya akan ada sebagian daerah pemilihan (dapil) yang menggunakan sistem proporsional, yang lainnya lagi dengan sistem distrik. Yang menggunakan sistem proporsional, dapilnya besar, dengan jumlah caleg tiga sampai enam. Anggota legislatif ditetapkan oleh partai atas dasar nomor urut. Di sisi lain, terdapat dapil kecil, yang calegnya dipilih berdasarkan sistem distrik yang memperebutkan satu kursi di masing-masing dapil. Berdasarkan penelitian LIPI, diperkirakan 60 persen daerah menggunakan sistem proporsional, sisanya sistem distrik.

Ketiga, yang mengusulkan tetap dipertahankannya sistem proporsional terbuka. Ia diusulkan oleh Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengungkapkan sejumlah alasannya: (1) sistem tersebut baru digunakan dalam dua kali pemilu, yakni pemilu 2009 dan 2014, maka terlalu dini untuk mengatakan gagal; (2) masih banyak instrumen dan persyaratan sistem porprosional terbuka belum terpenuhi dan dilaksanakan secara konsisten; (3) pengalaman pemilu 2009 dan 2014, pemilih semakin familiar dengan sistem proporsional terbuka dan mulai terbiasa memilih calon serta membangun posisi tawar dengan calon (*Beritasatu.com*, 20Juli 2016).

Isu lainnya terkait ketentuan *Parliamentary Theshold* (PT). Ia dikaitkan dengan konteks penyederhanaan sistem kepartaian. Kecenderungan yang ada mengarah pada upaya untuk menaikkan prosentase ketentuan PT. Ada yang menghendaki ia dinaikkan tetapi tidak terlampau tinggi, yakni menjadi lima persen dari sebelumnya 3,5 persen. Tetapi ada juga yang memandang kenaikan prosentase ketentuan PT tersebut, tujuh persen, sebagaimana pernah diwacanakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (*Media Indonesia*, 26/7/2016).

KEIKUTSERTAAN PARPOL DAN KOALISI

KARENA bersifat serentak dalam arti pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan, apakah otomatis semua partai politik peserta

pemilu dapat mengajukan mengajukan capres dan cawapres? Sementara ini masih berkembang dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan tiap-tiap partai peserta pemilu bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, hal tersebut disebabkan karena, tidak ada lagi syarat ambang batas suara bagi parpol masuk parlemen (PT) dan ambang batas suara parpol mengusung presiden atau *Presidential Threshold* (Pres-T) (*Sindonews.com*, 26/3/2016).

Soal ketentuan Pres-T, banyak rpandangan ia sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada Pilpres 2019. Hal ini terutama, justru karena pemilu serentak tujuannya meniadakan ambang batas pencalonan presiden, karena keserempakan penyelenggaraan pilpres dan pileg. Memang putusan MK tidak menyebutkan penghapusan ketentuan Pres-T. Namun implikasinya otomatis merontokkan Pres-T. Menurut Irman Putra Sidin, apabila DPR dan pemerintah bersikukuh mencantumkan Pres-T, maka peluang bagi MK untuk membatalkannya cukup besar (*Suarapembaruan.com*, 25/1/2014).

Kendatipun demikian, terdapat juga pandangan yang menyebut bahwa ketentuan Pres-T dapat diterapkan pada Pilpres 2019. Pendapat ini antara lain disampaikan politisi PDIP Ahmad Basarah, bahwa DPR dan pemerintah masih berhak menentukan ketentuan ambang batas pengajuan capres dan cawapres (Pres-T). Dia beralasan putusan MK, hanya menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres. Dalam konsideran menimbangnya, putusan MK menyebutkan, mengenai Pres-T diserahkan kepada pembentuk perundang-undangan. Hal itu berarti syarat Pres-T pada pilpres 2019 masih dapat ditentukan lagi oleh DPR bersama pemerintah hasil pemilu 2014 (Suarapembaruan.com, 25/1/2014).

Makanisme koalisi merupakan isu krusial pada pemilu serentak 2019 kelak. Tak menutup kemungkinan, kendatipun misalnya semua partai peserta pemilu punya hak mengajukan capres dan cawapres, jumlah pasangan yang muncul banyak. Hal ini dikarenakan, mungkin saja pasangan calon terkuat akan diusung bersama-sama oleh banyak partai. Merujuk pengalaman, yang mendesak dan

mendasar diperlukan dalam kerangka demokrasi *checks and balances*, bagaimana koalisi terbentuk secara permanen. LIPI mengajukan konsep insentif koalisi di mana setiap partai yang melakukan kaolisi memperoleh sumbangan dana dengan kisaran yang diatur oleh pemerintah. Namun, partai yang melakukan koalisi setelah putaran pertama pilpres, tak memperoleh hak insentif yang berlaku.

EPILOG

MASIH banyak isu yang dapat dibahas dalam proses perubahan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pemilu serentak 2019, seperti masalah pendanaan hingga penyelesaian sengketa pemilu. Gambaran yang utuh belum kita dapatkan hingga kini, kecuali berbagai pandangan variatif yang berkembang dari berbagai pihak, yang bagaimanapun bermanfaat sebagai referensi penentu kebijakan. Dalam menggulirkan perundang-undangan baru, pemerintah dan DPR dituntut segera mewujudkan gambaran itu. Partai-partai politik tentu sangat berkepentingan agar aturan main baru menguntungkan mereka. Hal itu wajar semata. Namun, kepentingan yang lebih besar harus tetap diutamakan. Pemilu serentak, sekali lagi harus mengarah pada praktik demokrasi berkualitas dan memperkuat integrasi bangsa.●

Demokrasi sebagai Proses

KOMPAS, 12 NOVEMBER 2016

SECARA konstruktif Harian *Kompas* telah memberitakan aksi damai 4 November 2016 di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Selain menyajikan dimensi politiknya, terdapat laporan bertajuk "Aksi Simpatik, Menyampaikan Aspirasi sambil Bersih-bersih". Juga, "Unjuk Rasa di Daerah Berlangsung Damai, Warga Inginkan Persatuan dan Kedamaian Bangsa" (*Kompas*, 5/11/2016). Pemberitaan-pemberitaan demikian menepis sinisme bahwa media konvensional arus utama, terjebak pada sudut

pandang pemberitaan yang mampu memicu kembali keresahan-keresahan kolektif.

Apa pelajaran penting dari fenomena 4 November 2016? Kendati diwarnai insiden kekerasan yang sangat disayangkan, secara umumproses yang damai masih terjaga. Proses yang damai dalam politikmerupakan salah satu penopang penting demokrasi substansial. Manakala ia tak terwujud, demokrasi berada di ujung tanduk kegagalannya. Karena itulah komitmen semua pihak terhadapnya perlu terus ditanamkan. Koridor demokrasi pastilah menjunjung tinggi nilai-nilai substansial yang bersifat universal, sebagai titik temu semua pihak.

Aksi 4 November 2016, terlepas dari pro-kontra yang menyertai, bagaimanapun merupakan pertaruhan reputasi politik umat Islam di Indonesia. Tak terelakkan, Indonesia adalah negeri Muslim apabila merujuk realitasnya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ketika sistem politik yang demokratis diterapkan, rupa-rupa ekspresi politik dan kepentingan pluralitas kelompok Islam, akan selalu memperoleh sorotan dan penilaian. Karakter muslim demokrat akan menjadi indikator yang menentukan kualitas praktik demokrasidi Indonesia.

Demokrasi tentu bukan sekadar urusan umat Islam, tetapi seluruh komponen bangsa. Semuanya turut bertanggung jawab atas masa depan demokrasi dalam rangka kemaslahatan bersama. Sejarah modern kebangsaan kita telah secara jelas memilih suatu sistemdemokrasi. Terlepas pasang naik dan pasang surut praktiknya,demokrasi telah diikhtiarkan tegak dan berjalan nilai-nilainya sebagaitata cara yang beradab untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.

Para elite politik Islam tempo dulu mampu memberi contoh yang baik dalam berdemokrasi. Hingga masa demokrasi parlementer, setidaknya terdapat kekuatan-kekuatan politik mereka yang tercermin dari signifikannya perolehan suara di parlemen dan konstituante pada Pemilu 1955 Partai Masyumi dan Partai NU. Dua partai

tersebut terketegori empat besar, selain PNI dan PKI. Telah banyak kisah bagaimana interaksi dan kesantunan politik para elite masa itu. Pengelolaan konflik dan pembangunan konsensus terjadi secara elegan, kendatipun sistem parlementer telah membuat realitas kontestatif di parlemen begitu tajam.

CIVIL SOCIETY

PROSES politik yang demokratis meniscayakan keberadaan kelompok-kelompok kepentingan yang bisa mengerucut sebagai kekuatan penekan. Mereka tercermin dari ragam kelompok dalam masyarakat yang mencerminkan realitas *civil society*. Mereka punya aspirasi dan kepentingan yang dalam analisa sistem politik, dikategorikan sebagaimasukan (input) para elite penentu kebijakan. Hasil kebijakan,sebagai sustu proses yang seringkali begitu kompleksnya di ranah elite penentu, lantas menjadi umpan balik yang akan direspons lagi oleh publik (*civil society*).

Dalam konteks ini, aksi damai 4 November 2016, memberi pesan yang jelas, agar proses hukum terhadap dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, yang kebetulan juga merupakan salah satu kandidat Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, dilakukan secara adil tanpa intervensi politik pemerintah. Pesan demikian, sesungguhnya telah ditangkap oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sebelum aksi dilaksanakan. Karenanya, aksi yang ada sesungguhnya lebih me-rupakan unjuk eksistensial kelompok-kelompok yang ada bahwa mereka bisa menjadi kelompok penekan yang merupakan embrio dari kekuatan politik. Hal semacam itu sah-sah saja, sepanjang damai dan terdapat kerelaan proses hukum bagi para pelaku tindak kekerasan.

Semua pihak harus menghargai proses hukum, apapun hasilnya. Penegakan hukum pilar penting demokrasi. Kualitas konsolidasi demokrasi, sering dikaitkan dengan prakondisi yang baik atas adanya masyarakat politik yang dewasa dalam berdemokrasi. Selanjutnya juga, *civil society* yang mandiri dan kritis, masyarakat ekonomi yang mandiri dan objektif pula, dan penegakan hukum

dalam rangka kepastiannya. Di atas semua itu, yang paling mendasar adalah kepercayaan (*trust*) satu sama lain, antarelite, antarkelompok, maupun antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan para elite politik, pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam konteks inilah, demokrasi sebagai proses selalu diuji, justru sejauhmana trust terwujud dalam dialektika sistem politik.

Membangun *trust* dan kebersamaan sangat penting dalam dinamika kebangsaan. Muara dari proses dan dinamika demokrasi politik yang kontestatif di tanah air yang tak boleh dilupakan oleh semua elemen bangsa ialah integrasi bangsa. Masalah integrasi bangsa di zaman demokrasi elektoral dewasa ini, lebih ditentukan oleh para elite politik yang di belakang mereka adalah massa pendukungnya masing-masing. Kedewasaan dan capaian akan diukur oleh sejauhmana para elite politik mampu mengelola konflik dan lantas, membangun konsensus yang dapat diterima semua pihak, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Meminjam Francis Fukuyama, kita perlu high trust society dalam berdemokrasi. Peran elite politik dan nonpolitik, sangat penting dalam hal ini.

JALAN POLITIK INKLUSIF

PERASAAN marginal dalam politik bisa melanda semua kelompok dalam masyarakat, termasuk di lingkungan umat Islam di Indonesia. Hal itu mengemuka manakala representasi dan yang lebih penting lagi aspirasi mereka terabaikan. Dalam hal representasi politik, sesungguhnya demokrasi telah memberi jalan yang lazim, yakni melalui partai-partai politik.

Dalam hal ini, dalam tradisi politik Indonesia, yang mencerminkan aspek representasi politiknya adalah partai-partai politik Islam. Namun dalam hal aspirasi politik, ia bukan sekadar monopoli partai-partai tersebut, melainkan juga menjadi tanggung jawab pula partai-partai terbuka (*cacth-all*). Dalam hal yang terakhir itu, dewasa ini terasa bahwa aspirasi umat Islam pun telah menemukan salurannya, kendatipun barangkali ada perasaan umum bahwa aspirasinya direspons secara sambil lalu.

Memperbaiki representasi politik formal merupakan tantangan semua kelompok yang sadar kepentingan politik. Dalam konteks ini, partai-partai Islam mestinya tertantang mengambilalih isu-isu krusial yang berkembang, sehingga kelompok-kelompok kepentingan tak segera berubah menjadi kekuatan penekan. Namun, tampaknya partai-partai Islam pun berada dalam situasi dilematis. Mereka terbatasi sistem dan kepentingan pragmatis daya hidup jangka pendeknya. Tantangan mereka keluar dari labirin masalah klasik konfliktual dan pragmatisme, sehingga mampu menjadi saluran.

Memperbaiki dan memperlakukan umat Islam sebagai faktor penting dalam realitas aspirasional dan politik di Indonesia, merupakan pesan penting pasca-aksi damai 4 November 2016. Saatnya semua pihak menahan diri dan berefleksi, untuk kebaikan bersama dan masa depan bangsa.●

Mencari Model Pemilu Serentak

KOMPAS, 9 OKTOBER 2016

APA yang dapat diharapkan dari penyelenggaraan pemilu serentak, dalam pengertian pemilu legislatif dan presiden yang dibarengkan waktunya? Salah satu versi jawabannya untuk mencegah "pemerintahan yang terbelah" (*divided government*) yang lazim dipandang sebagai kelemahan sistem presidensial, ketika presiden dan parlemen dikontrol oleh kekuatan politik yang berbeda. Sistem presidensial yang berkombinasi dengan multipartai denganfragmentasi politik dan polarisasi ideologi yang tinggi, berpotensi kelumpuhan akibat kebuntuan (*immobilism* atau *deadlock*) eksekutif-legislatif. Ujungnya, instabilitas politik.

Pemilu nasional serentak atau pemilu konkuren (*concurrent election*) diharapkan mampu memunculkan efek konkurensi atau lazim disebut *coattail effect*, sehingga terhindar dari fenomena

"pemerintahan yang terbelah". Kendatipun sama-sama serentak, pemilu konkuren berbeda dengan pemilu serentak dengan pemilu sela, dan modelpemilu sinkronis (*syncronised election*).

Jenis pemilu konkuren dipahami karena *coattail effect* yang ditimbulkannya. Dibayangkan kandidat presiden atau sebaliknya partai akan saling "menarik kerah" para pencoblos, sehingga pilihan mereka relevan. Efek itu berasumsi tidak mungkin pemilih mencoblos pasangan capres yang diajukan koalisi partai politik tertentu, tetapi lantas memilih calon anggota legislatif dari partai di luar koalisi pengusung capres tersebut.

Jenis pemilu konkuren lazim diterapkan di Amerika Latin. Pemilu serentak Brazil 2014 misalnya, memilih pasangan calon presiden, anggota kongres nasional, gubernur, dan anggota parlemen lokal. Pilpres memberlakukan sistem dua putaran, manakala tak ada suara lebih 50 persen putaran pertama. Terdapat sebelas pasang pada putaran pertama. Pada putaran kedua pasangan Dilma Rousseff dan Michel Temer sebagai petahana, menang (51,6 persen), mengalahkan Aécio Neves dan Aloysio Nunes (48,4 persen).

Pemerintahan Rousseff-Temer kuat secara politik karena mendapatkan pula dukungan parlemen yang signifikan sebagai dampak *coattail effect*. Pada pemilu serentak 2010, Rousseff-Temer menang (56,05 persen). Koalisi Lulista yang terdiri dari sepuluh partai pengusungnya meraih kursi mayoritas di DPR (60,6 persen) dan Senat (61,7 persen). Pada 2014, koalisi sembilan partai pengusung Rousseff-Temer memperoleh 59,07 persen kursi DPR dan 65,43 persen kursi senat. Adapun lantas Rousseff, pada akhirnya dimakzulkan, lebih karena isu korupsi, ketimbang masalah kebijakan.

Sebagaimana Brazil, pemilu konkuren Bolivia juga menunjukkan bekerjanya *coattail effect*. Merujuk pemilu serentak 2014 misalnya, Evo Morales memenangkan pilpres, sekaligus memperoleh dukungan mayoritas kursi DPR dan Senat. Di Peru, pada pemilu serentak 2016, presiden terpilih Pedro Pablo Kuczynski juga memperoleh dukungan politik yang signifikan di parlemen.

Jenis kedua, terpraktikkan di Amerika Serikat. Di beberapa negara bagiannya, pemilu menggabungkan pilpres dan pemilu legislatif tingkat pusat. Pada waktu bersamaan juga pemilihan gubernur dan legislator negara bagian. Namun, di sana dikenal adanya pemilu sela di tengah-tengah masa jabatan presiden. Pemilu sela tentu tidak mengikutsertakan pilpres. Di beberapa negara bagian, pemilu sela menggabungkan pemilihan gubernur dan legislator negara bagian, selain pemilihan anggota legislatif pusat. Pemilu sela inilah yang memungkinkan *divided government* terjadi apabila dimenangkan partai yang tidak meme-rintah.

Karena berkembang sistem dwipartai, hanya dua kekuatan yang saling berhadapan, Partai Republik dan Partai Demokrat. Berkaca dari pengalaman masa kepresidenan Barrack Obama (Partai Demokrat) misalnya, "pemerintahan yang terbelah" berpuncak pada fenomena negara lumpuh (*shutdown*) karena parlemen menolak memberikan persetujuan atas rencana anggaran, khususnya penambahan utang baru, yang diajukan Obama pada Oktober 2013. Itu terjadi karena Kongres dikuasai Partai Republik.

Jenis ketiga, lebih cenderung mengakomodasi efisiensi penyelenggaraan pemilu, tanpa menjamin hadirnya *coattail effect*. Pemilu sinkronis diterapkan di Filipina. Pemilu serentak 2016 misalnya dilakukan untuk memilih para calon presiden, wakil presiden, anggota senator, anggota DPR jalur perseorangan, gubernur, wakil gubernur, anggota dewan provinsi, wali kota, wakil wali kota, dan konselor. Mereka dituangkan di permukaan pertama selembar kertas suara. Permukaan keduanya, sekadar memilih partai politik yang ditata berdasar nomor urut, untuk pemilihan anggota DPR.

Mengapa *caottail effect* tak muncul di Fili-pina? Kalau dicermati, capres dan cawapresnya ternyata tidak diajukan secara berpasangan. Karenanya dapat dipahami, manakala capres dan cawapres terpilih, bisa bukan dari partai pendukung yang sama, terlepas dari ada juga capres atau cawapres perseorang-an. Dalam kasus pemilu serentak 2016, Rodrigo Duterte maju sebagai capres didukung oleh Partai Demokratik Filipina (PDP-Laban). Yang menarik, walaupun

di DPR, PDP-Laban hanya mendapat kursi 1,0 persen dan punya kursi di Senat, Duterte memenangkan pilpres dengan dukungan suara 39,01 persen. Angka ini jauh di atas pemenang kedua Mer Roxas (Partai Liberal, LP), yakni 23,45 persen.*Coattail effect* akan terjadi, manakala yang menang Roxas, karena partainya pemenang pemilu legislatif (DPR), dengan jumlah kursi 38,7 persen.

NASIONAL DAN LOKAL

AGENDA seting politik elektoral ke depan tetap harus diarahkan agar jenis pemilu serentak yang mampu menghasilkan *coattail effect*, agar sistem presidensial kuat karena terhindar dari pemerintahan yang terbelah. Model Amerika Latin lebih mendekati tujuan *coattail effect*. Tetapi, tetap harus dicermati seksama, sebelum membuat simulasinya. Model Amerika Latin, keresentakannya tidak memisah pemilu nasional dengan lokal. Padahal, konteks penyelenggaraan pemilu serentak Indonesia, bukan dalam pengertian seperti itu. Pemilu nasional serentak, terpisah dengan pemilu lokal serentak, agar tercipta pula kongruensi pusat-daerah atau terhindar dari *unconnected government*.

Keserentakan pemilu nasional yang terpisah dari pemilu lokal diharapkan terdapat jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan. Selain itu, terbuka peluang besar terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional, serta semakin besarnya peluang elite politik lokal untuk bisa bersaing di ranah kontestasi politik nasional. LIPI mengajukan enam model pemilu serentak untuk konteks Indonesia. Pertama, model pemilu borongan atau pemilu serentak sekaligus satu kali dalam lima tahun untuk semua posisi publik di tingkat nasional dan lokal.

Kedua, model *clustered concurrent election*, di mana pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah), disusul pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). *Ketiga*, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu lokal (*concurrent election with mid-term elec-*

tion). *Keempat*, pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*).

Kelima, model *concurrent election with flexible concurrent local elections* di mana pemilu serentak nasional diikuti pemilu serentak provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi. *Keenam*, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden, kemudian setelah selang waktu tertentu diikuti dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi.

Dalam ulasan LIPI model pertama, kedua, dan ketiga, jika tujuan pemilu serentak hanya sekedar penghematan biaya, memang terjawab. Namun penyelenggaraannya semakin rumit. Konfigurasi politik menjadi tidak menentu, bahkan bisa jadi tidak muncul *political blocking* secara jelas, serta menyuburkan politik transaksional, karena kebutuhan dukungan elektoral pemenangan pemilu.

Sementara model ketiga, keempat, dan kelima diyakini membuat sistem pemilihan yang lebih sederhana. Dengan dilaksanakannya pemilu untuk anggota DPR dan pilpres secara bersamaan (konkuren), kecenderungannya hanya terdapat dua blok besar koalisi partai yang mencalonkan pasangan capres masing-masing. *Blocking politics* yang tercipta sebagai hasil pemilu serentak nasional, kemungkinan juga akan mewujud di daerah-daerah.

Jika kinerja presiden dan anggota legislatif hasil pemilu nasional dinilai baik, maka pemilih juga akan memilih pasangan kepala daerah dan caleg DPRD yang berasal dari partai-partai koalisi pemilu nasional. Dengan demikian kongruensi tidak hanya tercipta di ranah eksekutif-legislatif (mencegah *divided government*), melainkan juga pusat dan daerah (mencegah *unconnected government*).●

XVII

PERSATUAN INDONESIA DALAM UJIAN

[2017-2018]

DINAMIKA KEHIDUPAN BANGSA YANG SEJAK KEMERDEKAAN MENISCAYAKAN PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI YANG KONTESTATIF, LAZIMLAH DIAKHIRI OLEH IKHTIAR MEMPERTEGAS KEMBALI TITIK-TITIK TEMU KEBANGSAAN. KONSENSUS KEBANGSAAN TENTU LEBIH UTAMA KETIMBANG KONFLIK YANG TERUS TERPELIHARA. INDONESIA MERUPAKAN BANGSA YANG MAJEMUK. PRAKTIK DEMOKRASI POLITIK KONTESTATIF DI TENGAH MASYARAKAT MAJEMUK, BAGAIMANAPUN, SELALU BERHADAPAN DENGAN RISIKO MENAJAMNYA KONFLIK AKIBAT POLITISASI IDENTITAS.

- PERSATUAN INDONESIA DALAM UJIAN

TNI, Perang Proksi, dan Demokrasi

KOMPAS, 31 JANUARI 2017

TNI telah menggelar Rapimnas yang pembukaannya diawali arahan Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan itu, Presiden, antara lain menekankan agar jajaran TNI dan Polri bergerak cepat mengantisipasi berbagai perubahan yang kini terjadi secara masif akibat kecanggihan teknologi. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun menyinggung kesiapan TNI menghadapi tantangan global ke depan.

Gatot menggarisbawahi, kompetisi global berpotensi menjadi konspirasi global untuk memperebutkan sumber-sumber daya penting dari pangan hingga energi. Diingatkannya, jika kompetisi jadi konspirasi, hal tersebut merupakan ”ancaman luar biasa”. Menurut dia, kebijakan Presiden yang memanfaatkan kondisi geografis maritim Indonesia dengan membuat jalan tol laut bisa menjadi solusi.

Terdapat benang merah penting dari dua pernyataan tersebut. Kata-kata kuncinya adalah kompetisi dan antisipasi perubahan. Kompetisi terkait perkembangan global dan kebutuhan Indonesia untuk tidak saja eksis, tapi juga mampu mengelola segenap sumber daya di era perubahan yang serba cepat ini. Sementara antisipasi perubahan jelas memerlukan perhatian dan kinerja profesional semua entitas yang menggeluti bidangnya.

Terkait hal tersebut, dalam konteks TNI sebagai kekuatan pertahanan, apa yang sering disampaikan Gatot Nurmantyo terkait bahaya perang proksi relevan adanya. Panglima membedakan perang asimetris, hibrida, dan proksi. Perang asimetris terkait konteks perbedaan mencolok pihak-pihak berperang dari segi ”kekuatan mili-

ternya". Perang hibrida mengombinasikan perang asimetris dengan perang informasi. Sementara perang proksi pada hakikatnya konfrontasi dua kekuatan besar dengan memanfaatkan pemain-pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung.

Panglima TNI menggarisbawahi, melalui perang proksi, "tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan non state actors dari jauh". Melalui pengertian demikian, sudah tepat manakala panglima mengingatkan bahaya perang proksi. Indonesia, bagaimanapun, berpotensi dijadikan ajang perang proksi pihak luar.

Salah satu bentuk perang proksi yang seringkali diilustrasikan panglima, selain gerakan separatis, demonstrasi massa, dan peredaran narkoba, adalah bentrok antarkelompok. Sebagai pengamat politik, saya merasakan adanya gejala meningkatnya potensi bentrok antarkelompok dewasa ini. Hal tersebut terkait masalah politik dalam maknanya yang luas.

Perkembangan politik kita, di level parlemen dan pemerintahan, sesungguhnya sudah mencapai suatu titik keseimbangan (ekuilibrium). Tetapi, suhu politik masih bisa memanas justru karena secara anomali datang dari ranah konfliktual antaraktor nonnegara. Banyaknya aktor non-negara sebagai kelompok kepentingan, bahkan penekan, menaikkan potensi konflik eskalatif apabila tak terkelola elegan dan efektif. Mereka pun potensial dimanfaatkan sebagai aktor-aktor perang proksi.

DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN

DALAM KONTEKS ini, wajar manakala diingatkan agar jangan sampai Indonesia jadi seperti Timur Tengah, khususnya Suriah, sebagai ajang perang proksi. Gambarannya jelas: instabilitas dan kekacauan terus terjadi. Semua nyaris destruktif, dan rakyatlah yang paling menderita hidup dalam sebuah negara gagal yang tercabik-cabik perang.

TNI merupakan bagian integral dari manajemen kebangsaan

demokratis yang berbasis Pancasila. Di tengah suasana kebangsaan yang semakin ditandai oleh membesarnya potensi benturan antar-kelompok, diperlukan langkah elegan dan konvergensif (menyatu) ke arah titik temu dan penguatan konsensus kebangsaan, bukan penguatan dimensi divergensif (perpecahan) dan memperbanyak titik tengkar yang kontraproduktif.

Semua harus dikembalikan ke Pancasila sebagai titik temu, *common denominator* berbagai unsur bangsa. Dalam perspektif sosiologi politik, Pancasila mengandung dimensi konvergensi, bukan divergensi. Namun, merujuk pengalaman sejarah, Pancasila sering kali dijadikan tameng kekuatan-kekuatan politik untuk mengklaim pihaknya lebih Pancasilais, dan menjadikannya alat pukul politik. Kalau itu yang terjadi, praktik kekuasaan otoriterlah yang leluasa. Pancasila sebagai titik temu kebangsaan efektif manakala yang mengemuka adalah implementasi demokratis sila keempat (permusyawaratan atau deliberasi).

Pancasila hendaknya diposisikan sebagai ”ideologi terbuka”, bukan ideologi statis, tertutup, dan menolak gagasan-gagasan ba-ru sesuai semangat zaman. Semua hal dapat didialogkan dan dimu-syawarahkan secara elegan untuk mencari titik temu, konsensus kebangsaan dalam bingkai Pancasila. Demokrasi sila keempat menekankan musyawarah dalam semangat mencari dan dilandasi ”hikmat kebijaksanaan”. Semangatnya menuju titik temu, bukan titik tengkar.

Karena itu, diperlukan tenggang rasa, meninggalkan paradigma menang-kalah secara subyektif menurut kelompok masing-masing. Egoisme kelompok atau komunalisme harus ditepikan. Yang dikedepankan seharusnya obyektivikasi, yang mengutamakan kejujuran obyektif, bukan klaim yang apriori. Ragam ucapan, penyikapan, dan tindakan yang berkonsekuensi pada penajaman konflik dan suasana konfrontatif perlu diakhiri. Hal semacam ini penting guna menjauhkan Indonesia dari perang proksi, sebagaimana yang selalu diingatkan panglima.

MANAJEMEN KEBANGSAAN

NEGARA harus mampu hadir sebagai pengelola utama kebangsaan, karena ia memiliki segenap peranti memadai dan cara yang absah untuk melakukannya. Manajemen kebangsaan perlu peran negara, tetapi bukan dalam konteks menghegemoni segala hal tanpa menyisakan ruang bagi publik berpendapat secara bertanggung jawab. Negara harus menciptakan iklim kondusif bagi demokrasi, kendatipun — dalam pengertian Max Weber — negara adalah entitas absah pengguna kekerasan. Pendekatan represif tentu bukan pilihan dan sangat tak populer dalam demokrasi, kendati sering kali negara menghadapi situasi yang dilematis.

Di zaman mengecambahnya *hoax* atau kabar bohong dewasa ini, manajemen kebangsaan yang demokratis dan partisipatif tentu bukan tugas ringan. Namun, negara, dalam hal ini termasuk TNI, perlu mendorong suatu proses *tabayun* (cek-ricek) dan dialog mendalam di tengah cuitan-cuitan sepintas lalu, tergesa-gesa, dan serba permukaan. Ini semua perlu kesabaran, sikap inklusif, Imparsial, obyektif, dan etis semua pihak.

Panglima TNI telah memosisikan sebagai juru ingat melalui ceramah-ceramahnya tentang bahaya perang proksi agar bangsa ini tak mudah dipecah. Potensi perang proksi, terutama ditandai menajamnya konflik potensial antarkelompok di Indonesia yang majemuk, ini perlu ditangkal melalui implementasi demokrasi permusyawaratan Pancasila sebagai paradigma manajemen konflik kebangsaan. Saya rasa, hal ini selaras dengan semangat dan inti gagasan yang disampaikan panglima di banyak kesempatan.●

TNI dan Permasalahan Bangsa

MAJALAH TNI PATRIOT, EDISI KHUSUS, OKTOBER 2017

SEIRING kompleks dan dinamisnya perjalanan bangsa, TNI kini dan ke depan, juga senantiasa dihadapkan tantangan yang sama. Indonesia sebagai negara besar baik secara geografi kewilayahan maupun kemajemukan penduduknya, semakin dihadapkan pada kompetisi regional dan global yang kontestatif dan menuntut daya saing yang tinggi di berbagai bidang. Melalui pandangan helikopter strategis, kita awali tulisan ini dengan membaca perkembangan kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini, sebagai bagian integral dari berbagai kawasan penting dunia, sudah terasa kian bergemuruh. Perebutan pengaruh dan hegemoni kekuasaan semakin terasa, dengan melesatnya kekuatan militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Klaim wilayah dan konfliknya, masih menjadi salah satu ciri menonjol di kawasan ini. Dalam konteks ini, TNI kekuatan pertahanan nasional, berkepentingan untuk memahami perkembangan dan meningkatkan profesionalitasnya.

Fenomena lainnya ialah, tak dapat dilepaskan dari merebaknya terorisme internasional, demikian juga dengan kejahatan transnasional yang pada praktiknya banyak melibatkan aktor-aktor non-negara (*non-state actors*). Apa yang terjadi di Marawi, Filipina, misalnya merefleksikan terorisme sebagai fenomena trans-nasional, bukan masalah yang bisa dipandang sepele, mengingat pendekatan yang mereka lakukan sistematis dan juga mengedepankan pendekatan militer. Dalam konteks inilah, mengingat aksi-aksi militer dapat berkembang dalam sekala luas, maka dapat dipahami manakala pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme yang harus semakin

disistematisasi, semakin menjadi kebutuhan yang mendesak. Tidak cukup upaya pemberantasan terorisme semacam itu, hanya sebatas kepolisian. Namun, semuanya harus diletakkan pada konteks dan kebutuhan penanganannya. Intinya adalah, bagaimana pendekatan yang dilakukan semakin efektif.

TNI sebagai penjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga dihadakan kompleksitas Indonesia sebagai negara dan benua maritim terbesar. Dengan keterbatasan, TNI senantiasa dituntut untuk mampu bekerja secara profesional. TNI merupakan garda depan di daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia. TNI bagaimanapun merupakan kekuatan terdepan dalam menangkal serangan militer dari pihak luar. Namun demikian, sebagaimana amanat konstitusi dan perundang-undangan terkait, TNI juga memiliki beragam fungsi non-perang atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

STABILITAS DAN PERANG PROKSI

STABILITAS REGIONAL berdampak pada stabilitas nasional. Dari sinilah, perkembangan dan dinamika negara-negara ASEAN penting untuk selalu kita cermati. Dewasa ini, stabilitas regional ASEAN berjalan dengan baik. Namun, potensi destabilitas keamanan tidaklah dapat dikatakan hilang sama sekali. Gejolak dalam negeri suatu negara, bisa berdampak pada yang lain. Demokrasi dan stabilitas kawasan merupakan dua kata kunci yang diharapkan bisa berjalan bersama-sama. Tidak semua negara ASEAN memiliki derajat demokrasi yang sama dalam praktiknya. Bahkan dalam suatu negara tertentu, Myanmar misalnya, pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius terhadap suku Rohingya, masih menjadi sorotan utama, yang berdampak pada membanjirnya pengungsi. Hal sedemikian mampu mengurangi kualitas solidaritas dan kebersamaan negara-negara ASEAN.

Seiring dengan itu pula, dalam konteks isu-isu strategis lainnya dikaitkan dengan konteks masih dimungkinkan terjadi perang simetrik dengan dominasi keunggulan teknologi, di kawasan Asia

Timur dan Asia Pasifik. Tetapi, yang cenderung mengemuka ialah konteks perang asimetrik yang berkarakter serba tidak lazim, tidak terduga, dan tidak teratur atau juga dikenal sebagai perang proksi (*proxy war*). Karenanya, TNI di masa kini dan mendatang sangat berkepentingan untuk memahami karakter perang asimetrik, mengingat kondisi negara kepulauan sangat rawan terhadap infiltrasi, selain masyarakat kita yang ekstra-pluralistik, di tengah proses demokratisasi yang berlangsung dinamis, dan adanya pengaruh globalisasi yang multidimensional.

Di sisi lain, dalam konteks perang proksi itu, pihak lawan memanfaatkan kecenderungan krisis penghayatan empat konsensus dasar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di kalangan generasi muda, serta hal-hal yang mampu menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pengadudombaan masyarakat yang dewasa ini relatif telah menggunakan teknologi informasi canggih yang menandai ciri utama masyarakat digital baru (*the new digital age*), dilakukan dengan penyebaran berita-berita palsu atau hoaks. Sehingga, potensi konflik sosial semakin terbuka, manakala tidak ada jurus-jurus penangkal yang jitu. Dalam konteks inilah, TNI sudah selayaknya mampu menyelami karakter *the new digital age* tersebut, di mana semua orang bisa membuat berita atau isu, yang sangat mungkin mampu memicu konflik sosial.

Dalam konteks ini, dapat dipahamai manakala Presiden Joko Widodo pun berpesan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) TNI tahun 2017 antara lain berpesan agar jajaran TNI dan Polri bergerak cepat mengantisipasi berbagai perubahan yang kini terjadi secara masif akibat kecanggihan teknologi. Sementara itu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun menyinggung kesiapan TNI menghadapi tantangan global ke depan berupa kompetisi global yang berpotensi menjadi konspirasi global untuk memperebutkan sumber-sumber daya penting dari pangan hingga energi. Menurut panglima, apabila kompetisi menjadi konspirasi, hal tersebut merupakan "ancaman luar biasa", sehingga kebijakan Presiden Joko Widodo yang memanfaatkan kondisi geografis maritim Indonesia dengan membuat

jalan tol laut, bisa menjadi solusi.

Dalam konteks fenomena perang proksi, penjelasan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sangat gamblang. Panglima membedakan perang asimetris, hibrida, dan proksi. Perang asimetris terkait konteks perbedaan mencolok pihak-pihak berperang dari segi "kekuatan militernya". Perang hibrida mengkombinasikan perang asimetris dengan perang informasi. Sementara perang proksi pada hakikatnya merupakan konfrontasi dua kekuatan besar dengan memenfaatkan pemain-pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung. Panglima menggarisbawahi, melalui perang proksi "tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan, karena musuh mengendalikan non state actors dari jauh". Melalui pengertian demikian, sudah tepat manakala panglima mengingatkan bahaya perang proksi. Indonesia, bagaimanapun potensial dijadikan ajang perang proksi pihak luar. Karenanya, ketahanan nasional mutlak adanya.

Bentuk perang proksi yang sering diilustrasikan panglima, selain gerakan separatis, demonstrasi massa, dan peredaran narkoba, adalah bentrok antarkelompok. Sebagai pengamat politik saya merasakan adanya gejala meningkatnya potensi bentrok antarkelompok dewasa ini. Hal tersebut terkait dengan masalah politik dalam maknanya yang luas. Perkembangan politik kita, di level parlemen dan pemerintahan, sesungguhnya sudah mencapai suatu titik keseimbangan (*equilibrium*). Tetapi suhu politik masih bisa memanas, justru karena secara anomali datang dari ranah konfliktual antaraktor non-negara (*non state actors*).

Banyaknya aktor non-negara sebagai kelompok kepentingan bahkan penekan, menaikkan potensi konflik eskalatif, apabila tak terkelola elegan dan efektif. Mereka pun potensial dimanfaatkan sebagai aktor-aktor perang proksi. Dalam konteks ini, wajar manakala diingatkan agar, jangan sampai Indonesia menjadi seperti Timur Tengah, terkhusus kasus Suriah sebagai ajang perang proksi. Gambarannya sangat jelas, instabilitas dan kekacauan terus terjadi. Semuanya nyaris destruktif, rakyatlah yang paling menderita di se-

buah negara gagal (*failure state*) yang tercabik-cabik perang.

TNI DAN DEMOKRASI

INDONESIA adalah negara ekstra majemuk, selama ini kita bersyukur mampu mengelolanya dengan baik. Namun, potensi untuk konflik satu sama lain tetap harus diwaspadai, mengingat konsekuensi negara demokrasi ialah penyelenggaraan pemilu yang melibatkan rakyat sebagai pemilih secara langsung dalam pilkada, pileg dan pilpres. Dua tahun sebelum puncak pemilu serentak 2019, seyogyanya dimanfaatkan untuk mengantisipasi ekses-ekses praktik demokrasi elektoral. TNI sebagai bagian dari kekuatan yang berfungsi dalam menjaga keamanan bersama pihak kepolisian, yang juga lembaga yang secara konsisten harus menjaga asas netralitas politik, juga berkewajiban untuk menyukseskan seluruh proses demokrasi di tanah air.

Tak diragukan lagi, TNI merupakan penyokong penting proses-proses demokrasi di tanah air. Reformasi TNI, sebagai bagian integral dari reformasi sosial politik di Indonesia pasca-Orde Baru, telah mencatatkan banyak hal yang mengesankan. Karenanya, TNI harus tetap konsisten untuk menunjukkan ke masyarakat, baik dalam maupu luar negeri bahwa dalam kasus Indonesia, militer dan demokrasi senantiasa bisa bersinergi, dalam arti militer memperkuat demokrasi. Formula demokrasi harus diarahkan dan diperkuat untuk, selain persatuan dan kesatuan bangsa, juga menjauhkan Indonesia dari jebakan negara gagal (*failure state*).

Tentu hal sedemikian bukan semata kewajiban TNI, tetapi ikhtiar untuk menjaga kualitas demokrasi ialah tanggung jawab bersama. Para politisi sipil tidak boleh gagal dalam berdemokrasi. Stabilitas politik yang demokratis, itulah yang kita perlukan guna menjamin proses-proses kebijakan ekonomi nasional berjalan dengan baik. Kita perlu memastikan pembangunan ekonomi berjalan progresif, pertumbuhan yang tinggi, disertai pemerataan pembangunan yang signifikan. Kalau eksperimentasi politik sipil dalam bingkai demokrasi tidak efektif, bahkan tekor secara stabilitas poli-

tik, maka kondisi demikian harus dihindari. Tentu saja, kita harus menjauhkan bayangan bahwa militer akan mengambialih kekuasaan lewat jalan kudeta, ketika eksperimentasi politik sipil gagal. Konsentrasi kita adalah memastikan semua berjalan secara baik dan efektif, sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing.

Hari-hari indonesia kita dewasa ini juga merupakan hari-hari ujian bagi implementasi ideal hubungan sipil-militer dalam bingkai demokrasi. Dari sisi kelayakan hubungannya, TNI dituntut untuk senantiasa bisa empan papan, mampu menempatkan diri dalam bingkai paradigma demokratis. Namun dalam konteks yang tak kalah pentingnya, yakni hubungan yang harmonis dengan segenap elemen kekuatan bangsa, maka jelas bahwa TNI tak bisa menyendiri. TNI bukan entitas yang dipaksa diasingkan dari realitas sosial kemasyarakatan, demikian pula realitas kebangsaan kita yang kompleks. Tapi, TNI sebagai pilar utama pertahanan nasional wajib untuk paham semua yang terjadi dalam dinamika dan perkembangan bangsa, dan lantas mampu berperan dan bertindak secara pijak, dalam bingkai konstitusi.

Wawasan historis dan visi masa depan bangsa, juga mutlak harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI, dalam rangka penguatan profesionalitasnya. Dalam konteks inilah, perjalanan sejarah bangsa telah mengajarkan banyak hal yang penting dan menjadi hikmah semuanya, bahwa kalaupun dikatakan sebagai politik, maka politik TNI adalah politik kebangsaan. Praktiknya, TNI netral dari politik praktis, tetapi TNI mengamankan proses-proses politik yang demokratis dan konstitusional. TNI tidak boleh terjebak pada *jorjoran* kontestasi politik praktis yang dimainkan oleh partai-partai politik. Demikian juga, TNI tidak boleh terjebak pada, atau membiarkan dirinya berposisi sebagai, penjaga kekuasaan suatu rejim politik. Sebab, menjadi penjaga kekuasaan suatu rejim politik itu sendiri hakikatnya ialah ikut berpihak secara politik praktis. Hal demikian, apabila terjadi, jelas melanggar asas netralitas politik yang diamanatkan konstitusi.

TRUST DAN NASIONALISME

DALAM BINGKAI manajemen kebangsaan yang lebih luas sangat diperlukan kondisi saling mempercayai antar-semua elemen bangsa. Dengan kata lain, yang sangat kita perlukan ialah apa yang diistilahkan oleh Francis Fukuyama sebagai *high trust society*, bukan *low trust society*. Salah satu krusial yang masih dihadapi oleh TNI dewasa ini tak lepas dari masalah *trust* (kepercayaan publik). Misalnya, terkait dengan konteks netralitas TNI dalam politik, di mana masih terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa seolah-olah TNI masih belum berubah dan tidak netral dalam politik. Karena itulah, setiap pemilu sesungguhnya merupakan momentum TNI untuk menunjukkan netralitasnya dalam politik.

Di sisi lain, TNI juga diharapkan mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dalam bingkai tugas, peran dan kewenangannya dalam masyarakat (*civil society*). TNI tentu akan muda untuk bersosialisasi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, manakala civil society kuat dan fungsional. TNI, dalam konteks ini, berkesempatan untuk memompa motivasi seluruh elemen bangsa untuk senantiasa memperkuat jiwa patriotisme dan nasionalisme, dalam bingkai penguatan ketahanan nasional kita sebagai bangsa dan keutuhan NKRI. Kita ingat misalnya ujaran-ujaran Jenderal Sudirman dalam hal ini. Kita harus berikhtiar menjadi patriot dan pejuang bangsa. Dalam perspektif Sudirman, yang kita lawan ialah yang kita yakini sebagai yang tidak suci, yang jahat. Maka, bagaimana mungkin apabila diri kita tidak suci bisa mengalahkan mereka. Jenderal Sudirman mengatakan, "Hendaknya perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Dengan demikian, perjuangan lalu merupakan perjuangan antara jahat melawan suci."

Masalah persatuan dan kesatuan, bagi bangsa yang ekstra majemuk seperti Indonesia, tergolong merupakan masalah yang abadi. TNI melalui mekanisme OMSP tentulah berorientasi memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. TNI harus senantiasa menjadi alat pemersatu bangsa, melalui peran-peran proaktifnya dalam mensosialisasikan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Semua itu dilakukan dalam koridor konstitusi dan perundang-undangan. Selain itu, dalam konteks ini, TNI juga berurusan dengan masalah-masalah kemanusiaan, penjaga perdamaian dunia. Kontribusi Indonesia sebagai penjaga perdamaian dunia, bagaimanapun tak lepas dari peran TNI.

Momentum-momentum menjaga kepercayaan publik bagaimanapun harus diwujudkan. TNI dalam perspektif historisnya lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, pada era revolusi fisik. Dalam konteks inilah, TNI tentu tidak boleh mengingkari amanat hatinurani rakyat. TNI hakikatnya tentara atau prajurit pejuang yang senantiasa dituntut profesional di bidangnya. Dalam konteks prajurit pejuang, maka apa yang menjadi pijakan TNI jelas: Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dalam konteks menjaga *trust* dan kewibawaannya, harus selalu disadari bahwa TNI dan rakyat adalah kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Namun di era politik kontestatif dewasa ini, semua pihak harus tetap hati-hati dan tidak terjebak pada jebakan politisasi pihak-pihak yang tidak menginginkan keharmonisan TNI-rakyat terjadi.

Usia TNI yang setua usia bangsa ini, bahwa Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 sementara TNI lahir pada 5 Oktober 1945, sekali lagi dihadapkan tantangan bangsa yang tidak semakin ringan. Tantangan tersebut tentu akan dihadapi bersama-sama, tidak dilakukan oleh TNI atau yang lain sendirian. Karenanya TNI juga tidak boleh menutup diri, sebagai entitas yang super-eksklusif. Jatidiri TNI ialah inklusif, sebagai bagian dari, dan bertumbuh dengan rakyat, karenanya TNI harus senantiasa berada di hati rakyat, dan sebaliknya rakyat ada di hati TNI.●

Babak Baru Politik Turki

KOMPAS, 24 MEI 2017

KENDATIPUN tipis, kemenangan pendukung "ya" dalam referendum perubahan konstitusi Republik Turki tak terelakkan lagi. Dengan dukungan 51,4 persen suara menyatakan "ya" (*evet*), tetapi 48,6 persen memilih "tidak" (*hayir*), sistem pemerintahan Turki berubah dari parlementer ke presidensial. Pasca-referendum, terlepas dari polemik yang menyertai gagasannya selama ini, babak baru kepolitikan Turki telah dimulai.

Referendum kali ini sangat fenomenal dalam sejarah politik Turki modern. Sejak didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk pada 1923 hingga 17 April 2017, sistem pemerintahan negara bekas kekhalifahan Turki Usmani tersebut, parlementer. Kendatipun Turki pernah mengalami fase sistem partai tunggal pada masa formatifnya hingga 1946, disertai beberapa kali kudeta militer (1960, 1971, 1980, dan 1997), pemerintahannya bertahan pada sistem parlementer. Penerapan sistem parlementer di Turki, tak dapat dipisahkan dari pandangan Ataturk yang terinspirasi model Eropa. Termasuk, ketika ia memisahkan militer dari politik, terlepas dari perkembangannya yang membuat militer justru kekuatan politik yang penting dan menentukan (*ruling but not governing*).

Perpolitikan Turki itu bagaimanapun unik. Seiring penerapan ideologi sekuler yang berkonsekuensi pembubaran banyak partai politik sepanjang sejarahnya, dinamika politik parlementer sesungguhnya mencerminkan ekspresi kekuatan politik sipil. Studi-studi mengenai sejarah dan dinamika kepartaian di Turki, pada kenyataannya tidak memberi tempat pada partai politik yang "didukung militer". Partai-partai populer Turki dikelola para tokoh sipil. Pasca-kudeta 1980 misalnya partai yang "didukung militer", kalah jauh

dibanding Partai Tanah Air (*Anavatan Partisi*) pimpinan Turgut Ozal yang berlatar belakang teknokrat sipil.

Politik parlementer juga meninggalkan eksperimen atau tradisi politik unik, ketika partai Islam dan sekuler berkoalisi dalam pemerintahan, terutama pada dekade 1970-an. Terkait partai Islam, kendati dalam banyak kasus dibubarkan penguasa, keberadaannya tak terelakkan. Pada masa perang dingin, terdapat semacam pembenaran keberadaan mereka untuk mengimbangi kekuatan politik kiri. Kendati sempat menang dan membentuk pemerintahan koalisi pada 1996 (Partai *Refah*), pada pasca-kudeta 1997, prestasi elektoralnya turun drastis (Partai *Fuzilet*). Kecuali, inovasi politik baru yang dikembangkan para mantan aktivisnya dengan membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Partai yang mengklain berhaluan demokrat-konservatif ini, partai yang paling berhasil, dan bekuasa sejak pasca-Pemilu 2002.

Keberhasilan AKP, tak dapat dilepaskan dari sosok pentingnya, Recap Tayyip Erdogan. Mantan walokota Istanbul ini, sangat fenomenal dalam sejarah kepemimpinan Turki pasca-Ataturk. Keberhasilannya referendum kali ini, semakin memosisikan Erdogan dalam konteks tertentu, "lebih berpengaruh" ketimbang Ataturk. Kendati berada dalam ruang dan waktu yang berbeda, demikian dalam pemikiran, keduanya punya persamaan dikenal memiliki watak yang keras. Dengan klaim kepentingan nasional dan masa depan Turki, Erdogan tidak bergeming dinilai otoriter.

PASCA-REFERENDUM

PASCA-REFERENDUM, Turki memasuki praktik politik baru, meninggalkan tradisi kepolitikan sebelumnya. Banyak yang khawatir, sistem politik baru kali ini, akan identik dengan praktik kekuasaan otoritarian, mengingat presiden memiliki kekuasaan lebih besar ketimbang sebelumnya, dan diperkirakan akan nyaris tanpa kontrol yang efektif. Perubahan menuntut adaptasi-adaptasi politik baru terhadap realitas dan praktik politik pemerintahan yang "berpusat Erdogan". Ditilik dari kesempatan kepemimpinan, bagaimanapun

Erdogan tengah berada pada puncak kekuasaan yang "nyaris sempurna". Erdogan yang secara politik meningkat pesat kekuatan politiknya pasca-kudeta, pasca-referendum punya kesempatan sangat besar bertahan dalam posisi kepemimpinannya hingga 2029.

Masyarakat dunia masih akan melihat, bagaimana kepemimpinan Erdogan berikutnya, justru ketika pengaruh kekuasaannya semakin kokoh. Dalam konstelasi regional dan internasional, keputusan politik Turki yang ditentukan Erdogan tentu masih terkait erat dengan ragam keputusan sebelumnya. Turki di bawah Erdogan tampak ingin terus memosisikan diri sebagai penentu penting masa depan konstelasi politik regionalnya di tengah menyeruaknya konflik yang rumit saat ini. Karakter politik internasional Turki selama ini tergambar dari kebijakan dan sikap politik Erdogan yang tetap terus ingin berperan secara menonjol. Kartu politik Erdogan pun tampak semakin menguat pasca-referendum.

Yang perlu untuk dicermati pula, bagaimana perkembangan stabilitas politik pasca-referendum. Para pendukung "ya" yakin sistem presidensial lebih menjamin stabilitas politik. Sesungguhnya sistem parlementer dan praktiknya di Turki belakangan ini pun sudah cukup mampu menjamin stabilitas politik. Dengan penerapan ambang batas parlemen sepuluh persen, kenyataannya AKP terus berjaya sebagai kekuatan mayoritas di parlemen. Namun, dengan sistem presidensial, diasumsikan pemerintahan presidensial Erdogan akan semakin kebal dari "gangguan parlemen". Dari sisi itu, stabilitas akan terjaga.

Tetapi, masalahnya tidak sederhana ketika Turki menghadapi aneka ancaman kekerasan dari kelompok-kelompok radikal. Selain musuh tradisional pemberontak Kurdi (PKK), Turki juga berhadapan dengan kelompok Negara Islam untuk Suriah dan Irak (ISIS). Hingga kini, Turki memang belum sepenuhnya bersih dari tindakan terorisme, hal yang sangat mengancam industri pariwisatanya. Pekerjaan rumah penting pasca-referendum masih akan terkait dengan antisipasi fenomena tersebut. Kemampuan pemerintah mengatasinya, tentu semakin ditimpakan ke kebijakan-kebijakan

kepemimpinan politik Erdogan. Sejauhmana Erdogan mampu mengendalikan kekuatan militer dan keamanan pasca-kudeta dan pasca-referendum, merupakan kunci pentingnya.

Yang paling penting ialah masalah ekonomi. Bagaimanapun pemerintahan AKP telah tercatat memiliki kemampuan melejitkan perekonomian Turki, setidaknya pada dekade awal pemerintahannya. Apakah pasca-referendum yang memberi kesempatan lebih pada Erdogan, prestasi ekonomi tetap bisa dipertahankan atau sebaliknya? Yang optimis, tentu berkeyakinan Turki pasca-referendum semakin berjaya, kendati kondisi regionalnya awet bergejolak. Yang pesimis, dengan membaca data-data perekonomian mutakhir berpandangan, bahwa kesempatan kali ini berbeda dengan ketika AKP mula-mula berkuasa. Tantangan dewasa ini dan ke depan sudah sedemikian kompleks. Ekonomi Turki bisa terpuruk manakala tak terkelola secara benar.

Pada akhirnya dapat dicatat bahwa pasca-referendum merupakan kesempatan bagi Erdogan berkuasa dan membawa Turki berjalan ke sejarah masa depannya. Secara perbandingan politik, kelak akan tercatat apakah perubahan sistem pemerintahan merupakan solusi terbaik atau sebaliknya bagi Turki.●

Persatuan Indonesia dalam Ujian

KOMPAS, 24 MEI 2017

HARIAN KOMPAS (14/5/2017) merangkum sejumlah pendapat para tokoh nasional dalam merespons berbagai fenomena kebangsaan belakangan ini, dengan pesan utama agar "semua anak bangsa menahan diri". Caranya, terutama dengan "tidak lagi menggelar aksi massa", mengingat hal demikian rentan memicu kondisi yang justru semakin membelah bangsa. Elite pemerintahan, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh bangsa, dan tokoh pemuda hendaknya segera menghentikan sikap

saling berhadapan.

Rangkuman pendapat tersebut pada intinya mengisyaratkan bahwa persatuan Indonesia tengah menghadapi ujian berat di zaman kita. Kegelisahan terhadap ancaman disintegrasi bangsa, terkait berbagai kejadian belakangan ini, hendaknya dapat diambil pelajarannya oleh semua pihak. Potensi konflik sosial yang lebih luas sebagai dampak residu konflik politik nasional seusai Pilpres 2014, pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017, maupun setelah vonis terhadap Basuki Tjahaja Purnama tidak boleh dibiarkan lepas kendali.

Pengelolaan manajemen kebangsaan, memang terutama menjadi tanggung jawab negara, tetapi tentu saja juga seluruh komponen bangsa Indonesia yang plural ini. Menahan diri, mencari jalan keluar bersama- sama dalam semangat hikmat kebijaksanaan dan persatuan Indonesia, semakin urgen untuk diprioritaskan.

Dinamika kehidupan bangsa yang sejak kemerdekaan meniscayakan penerapan sistem demokrasi yang kontestatif, lazimlah diakhiri oleh ikhtiar mempertegas kembali titik-titik temu kebangsaan. Konsensus kebangsaan tentu lebih utama ketimbang konflik yang terus terpelihara. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Praktik demokrasi politik kontestatif di tengah masyarakat majemuk, bagaimanapun, selalu berhadapan dengan risiko menajamnya konflik akibat politisasi identitas.

Dalam kadar yang normal, kontestasi identitas lumrah apabila dikaitkan konteks hak warga negara untuk menjadi pemilih model sosiologis. Berbeda dengan model psikologis yang mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu dan model pilihan rasional atau ekonomi politik, pemilih model sosiologis ditentukan oleh karakter sosiologis pemilih, terutama kelas sosial, agama, maupun etnis, kedaerahan atau bahasa (Mujani, Liddle dan Ambardi, 2011).

POLITISASI IDENTITAS

SEJUMLAH analisis Pilkada DKI Jakarta 2017 menggarisbawahi semakin menguatnya fenomena politisasi identitas keagamaan pascatersebarnya pidato Basuki di Kepulauan Seribu. Munculnya aksi

212 dan sejenisnya telah berimplikasi politis bagi penguatan sentimen identitas keagamaan dalam kontestasi Pilkada DKI 2017, kendatipun fenomena demikian segera menuai respons – meminjam Manuel Castells (1997) – politik "identitas perlawanan" (*resistance identity*) dari para penentangnya.

Karena itu, labirin politisasi identitas semakin rumit sekarang. Kontestasi politik identitas, kenyataannya tidak segera mereda pasca-Pilkada DKI 2017, melainkan cenderung meningkat terutama setelah vonis terhadap Basuki yang memperoleh respons luas di berbagai daerah. Radikalisasi politik identitas yang bertendensi etnisitas bahkan telah merambah hingga ke daerah di luar Jakarta. Misalnya, ketika Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkunjung ke Sulawesi Utara menuai penolakan masif dan menegangkan di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Jor-joran massa memang tengah menggejala dewasa ini, dan sayangnya fenomena demikian mempertegas polarisasi politik yang berpotensi pada konflik sosial yang mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks inilah semua pihak harus belajar. Konflik yang muncul sebagai dampak politisasi identitas itu jauh lebih berbahaya ketimbang konflik-konflik politik pragmatis. Identitas keagamaan dan etnisitas merupakan jenis yang dampak politisasinya sangat fatal.

Huntington (2004) mencatat, sesungguhnya identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan (*be constructed*), di mana identitas ganda (*multiple identities*) dimungkinkan terjadi, mengingat identitas merupakan produk interaksi yang penonjolannya bersifat situasional. Politisasinya telah memancing penonjolan identitas secara konfrontatif dan polarisatif.

Snyder (1997) mencatat fenomena demikian sebagai konflik nasionalisme SARA (ethnic nationalism), merujuk mengemukanya solidaritas yang dibangkitkan oleh persamaan budaya, bahasa, agama, sejarah, dan sejenisnya. "Setiap gerakan yang menjauh dari demokrasi sipil dan mengarah ke demokrasi SARA," catat Snyder, "bakal merongrong perdamaian demokratis." Dalam konteks inilah,

penting digarisbawahi, sejauh mana politisasi identitas mampu "merongrong perdamaian demokratis".

IDENTITAS PROYEK

DALAM konteks kekuasaan dan identitas, Castells (1997) mencatat tiga jenis identitas, yakni identitas yang melegitimasi (*legitimizing identity*), identitas perlawanan (*resistance identity*), dan identitas proyek (*project identity*). Jenis identitas pertama dilakukan oleh institusi-institusi dominan untuk memperluas dan merasionalisasi dominasinya. Yang kedua, dibangkitkan oleh mereka yang berada dalam posisi yang dikecilkan atau distigmatisasi oleh logika dominasi. Yang ketiga terkait ikhtiar membangun identitas baru dengan mendefinisikan ulang banyak hal yang berdampak pada transformasi struktural.

Terlepas konteksnya ialah merespons globalisasi, konsep proyek identitas Castells tersebut bisa direfleksikan guna mengikhtiarkan suatu konsensus baru dalam kerangka menyegarkan kembali hakikat persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia harus diturunkan dari sebatas jargon sila ketiga Pancasila ke dalam ikhtiar proyek identitas kebangsaan yang tanpa henti.

Membangun identitas baru dalam keindonesiaan mutakhir bukan berarti meniadakan atau mengingkari identitas keindonesiaan para pendiri bangsa (*the founding fathers*), tetapi justru memberi pemaknaan baru dan kontekstual yang selaras dengan dinamika, tantangan, dan kebutuhan hakiki bangsa di zaman kita.

Rekonstruksinya harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Semuanya harus siap untuk saling belajar, tidak saja menghargai perbedaan dan toleransi, tetapi juga — di era kebebasan informasi ini — semua pihak agar mampu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa saling melukai. Tantangan bangsa Indonesia semakin kompleks. Bangsa ini semakin dituntut berlari cepat, bisa mandiri dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Persatuan Indonesia mutlak adanya.●

Pancasila Milik Bersama

DOKUMENTASI PENULIS, 9 JUNI 2017

SALAH SATU harapan pasca-hadirnya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), agar lembaga ini tak mengulangi kesalahan yang terjadi pada era sebelumnya. *Kompas* (9/6/17) antara lain mengutip pendapat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir agar Pancasila tidak dijadikan sebagai "alat politik yang disalahgunakan oleh resim atau siapapun".

Selaras hal tersebut, UKP-PIP diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penanaman nilai-nilai Pancasila kepada segenap warga bangsa, termasuk aparatur negara. Besarnya harapan terhadap eksistensi UKP-PIP setidaknya membuktikan adanya keprihatinan kolektif segenap elemen bangsa tentang berbagai masalah bangsa, akibat tidak terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila secara optimal. Karenanya nilai-nilai atau moral Pancasila perlu ditanamkan dan ditransformasikan kembali, tak sebatas jargon.

Beban kerja UKP-PIP cukup berat, mengingat lembaga ini tidak saja merumuskan substansi dan program, tetapi juga terkait dengan masalah kepercayaan publik (*trust*) dan bagaimana iklim kebersamaan mampu diciptakan. Lembaga ini hendaknya memaki jurus padi, merunduk, inklusif dan bukan mendongak, eksklusif. Paradigma demokrasi deliberatif atau permusyawaratan, sebagaimana sering dilontarkan oleh Yudi Latif, harus dikedepankan. Yang terlibat dalam UKP-PIP, bagaimanapun harus memposisikan dirinya sebagai fasilitator yang inklusif, terbuka, dan dialogis, selain jangan dikesankan sebagai kelompok "yang paling tahu tentang Pancasila".

Mereka harus mampu menggelorakan Pancasila sebagai milik

bersama segenap warga bangsa, bukan milik kelompok tertentu. Jangan sampai ada pihak-pihak yang justru merasa terkucil atau terpojok karena tidak ikut dalam jargon-jargon pro-Pancasila, sehingga seolah-olah menjadi pihak yang anti-Pancasila. Yang diperlukan justru, bagaimana semua elemen bangsa merasa memiliki Pancasila, sehingga timbul niat yang sama untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, bagi negara, yang dibutuhkan sekarang ialah merekonstruksi sistem ekonomi Pancasila dan yang terkait. Sehingga, dengan demikian tidak hanya konteks nilai-nilai, tetapi aktualisasi Pancasila juga bisa mewujud dalam suatu sistem.

IDEOLOGI TERBUKA

DALAM konteks inilah, komunikasi dan interaksi antara UKP-PIP dengan yang lain dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus komunikatif, persuasif, argumentatif, partisipatif, dan dialogis. Sehingga, Pancasila tidak ditampilkan sebagai doktrin ideologis yang mati, melinkan hidup, dinamis, selaras dengan paradigma Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hal ini penting, ketika kelak Pancasila didialogkan kembali di lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lebih luas.

Pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, antara lain pernah dilontarkan oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur). Dalam makalahnya berjudul, "Nilai-nilai Keindonesiaan Umum: Antisipasi terhadap Kecenderungan Konvergensi Nasional" yang disampaikan pada seminar sehari "Mencari Nilai-nilai Baru dalam Paham Kebangsaan" oleh Harian *Kompas* pada 1985, Cak Nur memulainya dengan sikap optimis dan rasa syukur terkait kondisi bangsa dan kecenderungan umum "pertumbuhan ke arah konvergensi nasional pada tataran sosial budaya".

Setelah menguraikan selintas nasionalisme dan nasionalitas, Cak Nur menggarisbawahi bahwa pada tingkat perkembangannya, bangsa Indonesia telah tumbuh secara mantap sebagai "nasion". Kendatipun demikian, Cak Nur tetap menekankan soal kecenderungan umum bangsa "ke arah suatu konvergensi nasional". Yang

dimaksud konvergensi nasional adalah "suatu hasil bentuk saling pengertian, mutual understanding, dan berakar dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima". Menurutnya, kencenderungan konvergensi nasional itu harus diarahkan kepada penguatan pandangan hidup yang kosmopolit, yaitu suatu tata pergaulan nasional, dalam arti lahiriah maupun maknawiyah, yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa.

Cak Nur menegaskan, jika disebutkan bahwa budaya Indonesia ialah rangkuman puncak berbagai budaya daerah, nilai keindonesiaan itu harus bersemangatkan kosmopolitanisme, bukan nativisme. Sebab, dalam kelanjutan wajarnya, nativisme akan hanya berakhir pada daerahisme, jika bukan sukuisme. Cak Nur begitu menekankan pentingnya "karakter kosmopolit" sebagai *common denominator* kelompok-kelompok anggota bangsa atau berbagai segmen nasional.

Dalam konteks itulah, Cak Nur memaparkan konteks Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai rumusan tentang cita-cita nasional yang tinggi, menurutnya, Pancasila tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selamanya. Karenanya, pelaksanaan nilai-nilai itu akan menyatu dengan proses, dan proses yang progresif (terus-menerus membuat kemajuan) hanya terjadi jika dijiwai oleh semangat keterbukaan. Selanjutnya, "Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu, baik masing-masingnya secara terpisah maupun keseluruhannya secara utuh, jelas sekali mempunyai dimensi yang bersifat universal. Karena keuniversalannya itu, Pancasila tidak mungkin diwujud-nyatakan dengan semangat nativistis atau atavistis. Ia menghendaki kesediaan yang cukup besar dari bangsa Indonesia untuk menimba dari pengalaman manusia sejagat".

PROAKTIF

CAK NUR juga mengingatkan, Pancasila bisa tak lepas sebagai "objek manipulasi", bahwa, "Pancasila bisa berfungsi tak lebih daripada suatu alat politik, suatu ideological weapon untuk kepentingan sesaat". Sedangkan, yang amat kita perlukan, "Pancasila yang

berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan". Cak Nur berharap semua pihak "lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila", yakni, "usaha mengetahui dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan "pengusutan" kepada keadaan sekarang." Di sini berarti, "dikehendakinya adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ke sanalah muara konvergensi nasional kita, nilai Keindonesiaan kita".

Menarik ketika Cak Nur mengusulkan agar semua pihak bisa "lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila", mengingat kalau hal itu terjadi maka, rasa kebersamaan dalam memiliki Pancasila atau Pancasila milik bersama akan mengemuka. Pancasila akan bergerak tak sebatas jargon yang justru menciptakan jarak antarelemen bangsa, tetapi ada interaksi, dialog, dan saling mengisi, siap menerima dan memberi. Itulah cerminan mentalitas inklusif dan kosmopolit, sebagai prasyarat penting silaturahim nasional dalam bingkai Pancasila guna memperkuat konvergensi nasional.●

Keterbatasan Regulasi Pemilu

KOMPAS, 22 JULI 2017

HARIAN KOMPAS (17/7) mengulas pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang kembali berlarut-larut, dan akhirnya baru disetujui menjadi UU pada Jumat (21/7) dini hari, molor empat bulan dari target yang sudah ditetapkan. Seperti yang pernah terjadi, pembuat UU kembali berkutat pada isu-isu elitis untuk mengamankan kepentingan elektoral jangka pendek. Apakah UU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan lebih ideal ketimbang aturan main sebelumnya? Belum tentu.

Ikhtiar mencari aturan main pemilu terbaik dalam sistem demokrasi segera dihadapkan pada sederet kalkulasi kepentingan para aktor yang terlibat proses penyusunan regulasinya. Hasil atau

resultantenya justru tak bisa dijamin sebagai yang paling sempurna atau ideal. Hal ini tampak selaras dengan komentar Edward Banfield, "*Any political system is an acccident. If the system works well on the whole it is a lucky accident*."

Perspektif tersebut menjelaskan mengapa proses pembahasan UU ini bertele-tele sehingga kontraproduktif bagi kesiapan penyelenggaraannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tak terelakkan mengarah ke "kecelakaan sistem". Terlepas, apakah kelak ia menguntungkan atau menyurutkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks inilah, kalau revisi regulasi pemilu dilakukan lagi, masalah dan hal sama pun bisa berulang lagi.

Sistem politik penyelenggaraan pemilu, keterbatasan atau ketidaksempurnaannya, lazim terletak pada dua hal. *Pertama*, setiap pilihan mengandung konsekuensi. Inilah yang oleh Banfield disebut "kecelakaan" kendati ia bisa menguntungkan atau sebaliknya. *Kedua*, kecen-derungan partai-partai yang tak merasa perlu mengambil langkah perubahan yang lebih maju, kecuali apabila dianggap memberi peluang kemenangan lebih besar. Regulasi pemilu pun sesungguhnya mencerminkan suatu kenyataan politik yang belum tentu mampu mencerminkan fenomena kecelakaan yang menguntungkan.

Kotak pandora Perubahan kembali regulasi kali ini berkonsekuensi terbukanya kotak pandora politik oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian tuntutan uji materi pada Januari 2014. MK merekomendasikan agar Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak; penyelenggaraan pemilu legislatif diserentakkan pilpres. Alasannya agar sistem pemerintahan presidensial menguat mengingat bekerjanya apa yang disebut *coattail effect*. Efek tersebut bermakna presiden terpilih otomatis didukung partai-partai pemenang pemilu legislatif sehingga presiden punya basis dukungan politik kuat di parlemen.

Dalam perbandingan sistem politik, beberapa negara di Amerika Latin dipandang merupakan contoh baiknya. Model Brasil, misalnya, menegaskan pemilu serentak membuahkan *coattail effect*.

Sementara model Filipina, kendati pemilunya serentak, tak menjamin terjadinya *coattail effect*. Di Filipina, pilpresnya agak aneh karena capres dan cawapres tidak diajukan secara berpasangan. Model AS lain lagi. Di sana pemilunya serentak, tetapi sebenarnya tidak semua serentak karena ada pemilu-pemilu negara bagian.

Hal-hal itu menunjukkan setiap pilihan sistem mengandung konsekuensi elektoral masing-masing. Belum komprehensif Salah satu isu krusial pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu adalah masalah ambang batas presidensial. Fraksi-fraksi politik di DPR terbelah pendapat. Mereka yang tergabung sebagai pendukung pemerintah condong mempertahankan prasyarat semula, di mana yang berhak mencalonkan pasangan kandidat dalam pilpres ialah partai politik dan atau gabungannya yang mampu memperoleh dukungan 20 persen kursi atau 25 persen suara pemilu legislatif secara nasional. Yang dipakai sebagai patokan ialah hasil Pemilu 2014.

Akan tetapi, hal demikian dipandang tak adil oleh yang lain. Pemilu serentak harus dimulai dari nol, di mana semua partai peserta pemilu berhak untuk mengajukan pasangan capres masing-masing. Perbedaan pendapat ini meruncing dan cenderung berteletele. Semua pilihan sama-sama punya argumentasinya. Kelompok pertama biasanya mengaitkannya dengan penguatan sistem presidensial, memastikan *coattail effect* terjadi.

Kelompok kedua mengedepankan harapan bahwa potensi kepemimpinan nasional yang beragam harus diakomodasi. Kata akhirnya kelak tetap pada keputusan MK. Dalam proses pembahasan RUU di DPR, MK menolak ikut campur. MK mempersilakan pembuat UU memutuskannya (*open legal policy*). Kelak kalau ada pihak yang mengajukan uji materi, MK harus memutuskan ketentuan mana yang harus dipakai. Apabila dikembalikan ke adagium Banfield, tentu apa pun ketentuannya, ia tetap mencerminkan suatu "kecelakaan sistem", dimensi spekulasinya tetap terbuka.

Tak hanya ambang batas presidensial, sejumlah ketentuan lain juga berimplikasi terhadap praktik pemilu serentak kelak. Karena mencakup tiga ranah penting, yakni penyelenggara pemilu, pemilu

legislatif, dan pemilihan presiden, maka beragam isu krusial bersifat implikatif. Kelembagaan penyelenggara pemilu tak kalah kompleks masalahnya. Juga pilihan sistem pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, rentang jumlah kursi per daerah pemilihan (*district magnitude*), dan yang lain.

Regulasi pemilu kali ini dipandang masih memiliki sejumlah keterbatasan, belum cukup komprehensif dalam konteks pemilu serentak. Karena itu, pasca-Pemilu 2019, regulasi pemilunya juga masih terbuka untuk berubah lagi.●

Merayakan Keindonesiaan

KOMPAS, 1 JULI 2017

MERAYAKAN LEBARAN berarti merayakan keindonesiaan. Peristiwa mudik kolosal dan tradisi silaturahim saling maaf-memaafkan antarwarga bangsa menandai kekhasan budaya Indonesia. Semua warga bangsa yang majemuk melebur ke dalam suka cita kemanusiaan yang bernuansa religius. Karenanya tak berlebihan, manakala apabila ciri manusia Indonesia Mochtar Lubis ditambah satu lagi, maka jelas bahwa kalau lebaran mereka mudik dan bersilaturahim. Itu adalah ciri positif mengingat memperkuat modal sosial kebangsaan.

Tidak semua negeri Muslim punya tradisi mudik. Kendatipun, tradisi tersebut mencerminkan fenomena urbanisasi dan sosial-ekonomi, tetapi yang tak boleh dilupakan, juga fenomena spiritual pula. Para pemudik dipicu oleh spirit sila-turahim, penghormatan yang tinggi pada orangtua, kerabat, dan sanak saudara. Lebaran memancarkan pula spirit kebangsaan dan dorongan ke para pemimpin agar adil, arif bijaksana, dan bekerja sungguh-sungguh bagi kesejahteraan rakyatnya. Hal itu antara lain tercermin pada syair Ismail Marzuki, “Selamat para pemimpin, rakyatnya hidup terjamin”.

PEREKAT DAN KEMAJUAN

INDONESIA merupakan bangsa yang religius. Islam masuk ke Indonesia, terutama dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Dalam perkembangannya penganut agama Islam berinteraksi dengan kultur kegamaan sebelum dan sesudahnya. Islam telah turut mewarnai dinamika kebangsaan, terutama dalam konteks kebudayaannya. Dalam konteks inilah, relevan kiranya, manakala organisasi *Nahdlatul Ulama* (NU) mengelaborasi esensi dan praktik Islam Nusantara. Bahwa keberadaan Islam di Nusantara merupakan unsur perekat kebangsaan yang penting sepanjang sejarahnya.

Di sisi lain, Islam juga merupakan sumber energi bangsa dalam menggapai kemajuan. Karenanya relevan pula, manakala organisasi Mushammadiyah menggemakan tema Islam berkemajuan. Eksistensi Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, tak terlepaskan dari *ijtihad* para ulama. Dalam perspektif Muhammadiyah, Pancasila merupakan *darul ahdi wa syahadah*, suatu konsensus nasional segenap elemen bangsa, di mana mereka saling mengisi untuk kemejuan bersama.

Keindonesiaan dan keislaman telah membentuk formula berbangsa. Karenanya, merupakan sesuatu yang ahistoris manakala Pancasila dipertentangkan dengan Islam. Di sisi lain, sudah tampak nyata dan tak terelakkan dalam sejarah bahwa selain sebagai perekat kebangsaan, melalui apa yang dikatakan Bung Karno sebagai "apinya Islam" diharapkan umat Islam Indonesia mampu mendorong percepatan dalam meraih kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, mendekatkan harapan dan kenyataan memerlukan ikhtiar kolektif yang komprehensif di tengah kompleksitas tantangan bangsa.

Salah satu tantangan krusial dewasa ini, selain kesenjangan sosial-ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia, terfokus pada fenomena pembajakan terhadap Islam untuk kepentingan politik melalui jalan kekerasan atau terorisme. Merebaknya pengatuh ideologi transnasional di satu sisi dan masih menghebatnya masalah-masalah sosial ekonomi menghadirkan radikalisme yang destruktif. Maka, ikhtiar deradikalisasi terhadap mereka yang terjebak pada

kelompok ekstrim radikal, perlu terus dilakukan melalui formula yang tepat dan komprehensif dengan menyentuh akarnya.

Islam merupakan agama damai, bukan agama teror. Al Quran sarat dengan pesan-pesan perdamaian dan kemanusiaan. Tidak saja, terkandung di kitab tersebut pemahaman terhadap realitas kemajemukan umat manusia (QS 49:53), tetapi juga pesan-pesan kemanusiaan paripurna, dan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan. Al Quran menegaskan, "Barangsiapa menyelamatkan satu jiwa (nyawa satu orang), maka ia seolah telah menyelamatkan jiwa (nyawa) semua orang." (QS. 5:32).

KOHESI DAN KRITIK SOSIAL

BANYAK REFLEKSI yang dihadirkan melalui momentum lebaran. Secara filosofis, ia dikaitkan dengan konteks makna Idul Fitri sebagai kembali ke kondisi alamiah (*state of nature*) manusia yang hanif, cenderung kepada kebenaran, kebaikan, dan kesucian. Dari sinilah, energi silaturahim itu terpancar. Maka, momentum lebaran sesungguhnya merupakan peristiwa yang penting bagi penguatan kohesi sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Silaturahim itu aktivitas kemanusiaan inklusif. Pelakunya mengedepankan mental terbuka, mau menerima dan ikhlas memberi. Lagi pula, momentum Idul Fitri juga disertai pesan-pesan yang kuat terkait ibadah sosial yang lebih luas dengan berbasis empati terhadap sesama. Melalui konsep dan praktik zakat, maka momentum lebaran juga merupakan suatu gerakan reflektif dalam bersedekah, sekaligus gerakan untuk menggerakkan potensi ekonomi yang memberdayakan, guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

Maka dari itu, momentum lebaran juga merupakan suatu kritik sosial. Ada banyak hal yang kontradiktif dalam hidup ini, yang pada hakikatnya merupakan refleksi dari dijauhinya kecenderungan keaslian manusia yang hanif. Hari raya yang dipopulerkan melalui kata lebaran, merupakan hari kemenangan, di mana manusia dihadirkan ke fase kupu-kupu yang indah. Disebut indah karena, naluri kemanusiaan dan kesesamaan diekspresikan sedemikian

rupa melalui mental inklusif dan lapang dada. Semua mengedepankan kedamaian, interaksi yang damai antarsesama. Semua itu sebagai puncak dari fase kepompong, fase menahan diri sebagai simbolisasi berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan.

Kritik sosial terkait dengan fase ulat yang terasa lebih banyak mendominasi perilaku kemanusiaan kita. Sebagai manusia yang seharusnya *hanif*, praktiknya justru suka berbuat kerusakan di muka bumi, hal yang pernah terlontar dari malaikat ketika Tuhan mencipta manusia. Banyak di antara kita yang tidak pandai menahan hawa nafsu dan keserakahan, sehingga sadar atau tidak masuk dalam perangkap labirin egoisme dan kebinatangan, apakah dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun yang lain. Maka, semakin jauhlah manusia dari sifat *hanif* itu. Idul Fitri mengingatkan hakikat kesejatian manusia. Ketika mereka saling bersilaturahim dan memaafkan, maka ibarat lembaran kertas putih yang kosong kembali.

Dalam semangat memperkuat kerekatan antarwarga bangsa dan obsesi meraih kemajuan bersama, momentum Idul Fitri menjadi penting tidak saja untuk merayakan keindonesiaan kita, tetapi juga titik pijak untuk menggapai kemandirian bangsa. Maka, mari kita rayakan keindonesiaan kita itu, sekaligus berpikir serius dan berikhtiar secara kolektif untuk mewujudkan cita-cita proklamasi.●

Kegaduhan dan Tertib Politik

KOMPAS, 14 OKTOBER 2017

PEMBERITAAN KOMPAS (4/10/17) menggarisbawahi bahwa kegaduhan yang mungkin muncul karena kontestasi menyambut Pemilu 2019 dan pilkada 2018 hanya akan menguras energi bangsa. Padahal, ada banyak persoalan yang kini lebih membutuhkan perhatian, seperti mengatasi kemiskinan dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan demikian mengingatkan kita pada isu-isu pokok pembangunan politik yang secara klasik telah berkembang pada pasca-Perang Dunia II. Berbagai sarjana ilmu sosial dan politik saat itu gencar merekomendasikan rumus-rumus baku untuk negara-negara berkembang agar sukses mengelola pembangunan. Intinya, pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan mempersyaratkan tertib politik (*political order*).

Sepanjang tertib politik berjalan, artinya stabilitas politik dan keamanan terkendali, akan ada jalan lempang bagi pembangunan ekonomi. Maka, rezim kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan harus pandai-pandai mengelola politik, agar tak jatuh ke kekecauan dan kemerosotan (*political decay*). Mengenang kembali buku klasik Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (1968), memang demikianlah pesan utamanya.

Orde Baru mengadaptasinya ke Trilogi Pembangunan yang menegaskan pentingnya stabilitas nasional yang dinamis, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kendatipun rasional, tetapi praktik pendekatan demikian juga telah memicu kritik. Misalnya dari para ilmuwan sosial dan politik yang mengembangkan teori dependensia. Teori tersebut mengingatkan konteks belum lepasnya cengkeraman kekuatan-kekuatan neokolonial dalam masalah-masalah pembangunan dunia ketiga. Negara-negara ketiga sebagai satelit negara-negara pusat. Pandangan-pandangan mereka selaras kritik-kritik tajam kebijakan neoliberal.

Pembangunan nasional yang terlalu bertumpu pada orientasi pertumbuhan ekonomi juga dikritik menyisakan masalah yang tidak sepele. Konsekuensi "*trickle down effect*" (menetes ke bawah) begitu pertumbuhan ekonomi melejit tinggi, praktiknya sukar terwujud. Kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi maupun antarwilayah ternyata terus mengangga di hari-hari pertumbuhan ekonomi tinggi Orde Baru. Belum lagi, manakala mengingat kembali pelajaran penting paradoks pembangunan yang dibimbing utang.

URGENSI TERTIB POLITIK

KENDATIPUN DEMIKIAN, bukan berarti rumus pentingnya stabilitas untuk memastikan pembangunan ekonomi telah usang. Justru di hari-hari demokrasi kita dewasa ini, tertib politik semakin dirasakan urgensinya. Pandangan neo-Huntingtonian ilmuwan politik David Runciman dalam Politics (2015) kembali mempertegas politik sebagai kata kunci. Apakah suatu negara bergerak menuju "surga" (*heaven*) atau "neraka" (*hell*), tergantung politik. Politik identik kemampuan pemegang mandat kekuasaan mengelola segenap potensi konflik dan mencegah kekerasan-kekerasan terjadi, guna menjamin stabilitas. Kegagalannya, hanyalah akan membuat negara terjungkal ke "neraka" negara gagal. Keberhasilannya mampu membuat negara manapun seperti Denmark atau negara-negara Skandinavia yang dipersonifikasi sebagai "surga".

Maka, stabilitas politik tetap kata kunci. Tidak saja pemerintah yang berkepentingan kepadanya, tetapi semua pihak, bahkan kalangan antipemerintah sekalipun. Di zaman kita, ikhtiar pencapaian kondisi politik yang stabil tentu tak boleh keluar dari pakem demokrasi. Rumus bakunya diarahkan untuk menemukan kondisi stabilitas politik yang demokratis. Otoriterisme kekuasaan atau negara ialah momok demokrasi. Cara-cara otoriter tentu akan menuai penolakan karena melawan kodrat demokrasi.

Namun, demokrasi seringkali cukup memberi kelonggaran bagi hadirnya kegaduhan politik yang bernuansa konfliktual kontraproduktif. Ruang demokrasi yang luas mudah dibajak kelompok-kelompok antidemokrasi. Dalam situasi seperti ini, muncul dilema yang tak mudah dihadapi oleh negara atau rezim kekuasaan yang terpilih secara demokratis. Pendekatan jalan pintas neo-otoriterisme tak boleh diambil, justru ketika kegaduhan bisa semakin memicu konflik politik ekstrim yang "mengganngu jalannya pembangunan".

Pendekatan demokratis dalam merawat stabilitas, itulah yang kita perlukan. Kita perlu mencari rumus baku yang pas untuk dite-

rapkan. Salah satunya, kepatuhan semua pihak pada aturan main dan etika berdemokrasi. Memahami dan menerapkan etika, tidak saja etika jabatan dan profesi, tetapi juga etika dalam berbangsa, semakin menjadi kebutuhan utama bagi praktik berdemokrasi. Ideal etika politik, pada praktiknya memang tidak mudah. Karenanya suatu kegaduhan politik justru seringkali terasa sebagai ekspresi para elite yang merasa tak punya tanggung jawab demokrasi.

KEGADUHAN DAN KONTESTASI

KEGADUHAN POLITIK belakangan ini perlu dicermati apakah fenomenanya sekadar dinamika politik yang lazim dalam negara demokrasi, ataukah gejala-gejala menuju kemerosotan politik. Terdapat dua jenis kegaduhan. Yang pertama kegaduhan antarelite kelembagaan strategis pemerintahan terkait isu-isu tertentu. Selanjutnya, kegaduhan yang semakin tak terelakkan mendekati puncak tahun politik kontestatif 2019. Fenomena pertama dapat diurai lagi, apakah kegaduhan semata-mata timbul dari lemahnya koordinasi dan krisis komunikasi antarelite kekuasaan, ataukah sudah merupakan bagian dari kontestasi politik. Kalau masalahnya yang pertama, maka munculnya kegaduhan merupakan momentum yang baik bagi pemerintah untuk membenahi diri.

Namun, manakala konteksnya sudah mengarah kontestasi politik, elite pemicu kegaduhan sudah merupakan para pelanggar etika jabatan, sekaligus etika politik. Merupakan hal yang lazim, manakala para elite yang memimpin kelembagaan yang berasas netralitas politik, apakah militer, kepolisian, ataupun birokrasi menjalankan tugasnya sesuai koridor. Konsekuensinya, mereka harus menjaga diri untuk tidak larut, apalagi secara vulgar, ke dalam labirin politik. Demokrasi memberi ruang tersendiri bagi elite manapun untuk berkontestasi, ketika mereka telah menjelma sebagai aktor-aktor politik formal. Karenanya, para pejabat lembaga-lembaga kenegaraan dan pemerintahan yang netral politik harus mampu menahan diri untuk tidak dikesankan memanfatkan posisi jabatan dan institusinya sebagai panggung pelejitan popularitas dan elektabilitas.

Semua pihak harus merasa punya tanggung jawab moral mewujudkan praktik demokrasi yang semakin berkualitas. Demokrasi memberi ruang para elite untuk muncul dan berkontestasi. Tetapi, jangan sampai para elite tidak memahami posisi dan etika berpolitik, sehingga kegaduhan yang terjadi menjadi kontraproduktif.●

Masalah Kepemimpinan Partai Politik

KOMPAS, 27 NOVEMBER 2017

PARTAI GOLKAR tengah mendapat sorotan luas di masyarakat. Sang ketua umum partai berlambang pohon beringin ini, Setya Novanto tengah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam statusnya sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E). Bak sinteron, media massa tak henti-hentinya menayangkan babak per babak. Berbagai pakar ramai mengulas.

Ujian Partai Golkar sungguh berat. Manakala masa depannya terletak pada persepsi publik, kecenderungannya negatif sebagai dampak logis personalisasi politik, hal yang sesungguhnya lazim terjadi di semua partai. Kalau ketua umum merosot sebagai tokoh antagonis, partai pun tertimpa hukum "*the speed of distrust*", bola salju ketidakpercayaan. Puncaknya penurunan elektabilitas.

Partai Golkar kini di titik krusial. Kendatipun Setya Novanto tetap bertahan sebagai ketua umum apabila sidang praperadilan meloloskannya kembali, dia sudah terlanjur terkena persepsi negatif yang nyaris sempurna oleh masyarakat. Pergantian kepemimpinan partai, dari titik ini, bisa menjadi jalan keluar yang tak terelakkan.

MILIK MASYARAKAT

KEPEMIMPINAN merupakan kunci penting, kalau bukan yang terpenting dalam organisasi politik manapun. Fortunato Musella

dalam bukunya *Political Leaders Beyond Party Politics* (Palgrave Macmillan, 2018) mengingatkan bahwa masalah personalisasi politik dalam partai, merupakan isu yang masih sangat relevan hingga dewasa ini. Yang sering mengemuka adalah fenomena oksimoron ketika partai berada pada kondisi partai perorangan (*personality party*) alias "partai kepemilikan" dan partai rasa perorangan (*personalized party*) alias partai terbuka tetapi bergantung pada sosok.

Fenomena demikian berkonsekuensi bahwa, tidak saja sekadar citra pemimpin politik yang harus baik di mata masyarakat, tetapi juga efektivitas kepemimpinannya dalam mengelola kelembagaan partai.Yang juga perlu digarisbawahi kembali dari Musella, pemimpin partai sesungguhnya bukan semata-mata pengelola internal organisasi politik yang dipimpinnya, tetapi kepemimpinannya jauh melampaui itu semua. Dia milik seluruh masyarakat. Maka, wajarlah kiranya manakala masyarakat turut memberin komentar dan penilaian terhadap apapun yang terjadi pada para pemimpin suatu partai politik.

Sekali lagi, partai itu aset masyarakat. Ketua umumnya pun "milik masyarakat". Masyarakat ingin partai-partai politik tumbuh sehat dan menjadi garda depan dalam mengelola masalah-masalah demokrasi. Mereka tidak ingin partai sekadar sebagai kelompok elite yang merujuk teori bandit Mancur Olson, bandit-bandit menetap dan bergerak. Karena partai punya tujuan mulia, maka para elitenya dituntut berjiwa mulia dan fungsional dalam politik dalam pengertian yang mengikhtiarkan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks Indonesia, perlu dipikirkan partai politik sebagai entitas yang sangat strategis dan menentukan banyak hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ditetapkan sebagai berbadan hukum publik. Konstitusi perlu menegaskan hal itu, selain konteks pentingnya partai dibiayai negara dan dapat dibubarkan apabila tidak mampu mengelola keuangannya secara profesional. Juga penegasan soal adanya jaminan proses demokrasi internal, selain kewenangannya dalam kandidasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada. Apabila konstitusi menegaskan hal-hal tersebut, maka problem

oksimoron di atas, bisa dikurangi atau diatasi.

INTEGRITAS

PELAJARAN penting dari kasus di atas, terlepas dari polemik yang menyertainya ialah betapa pentingnya integritas bagi para pemimpin politik. Integritas merupakan isu yang peka di zaman virtual ini. Ia bisa menggelinding liar di media sosial dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Para politisi memang selalu dihadapkan dilema, bahkan dirugikan, ketika isu integritas muncul dan diramaikan sosial media. Tetapi, para politisi juga bisa berselancar dalam ranah pasca-kebenaran (*post-truth*), di mana mereka berlomba merebut kebenaran persepsional, bukan kebenaran faktual, sebagaimana dalam kasus Donald Trump.

Dalam konteks kontestasi politik, sistem pemilu di Indonesia dewasa ini, yakni proporsional terbuka berbasis suara terbanyak, posisi dan sepak terjang tokoh demikian menentukan kebenaran persepsional itu. Karenanya, lazim saja manakala sosok-sosok penting dalam suatu partai disorot publik, apalagi dikaitkan dengan kasus korupsi, kewibawaan partai juga terkena imbasnya, anjlok.

PERKADERAN

BELAKANGAN ini sering mengemuka pendapat bahwa, untuk partai semacam Partai Golkar, karena sistemnya dianggap sangat baik, siapapun ketua umumnya, partai akan tetap jalan. Pandangan semacam ini harus dikritisi, mengingat sistem yang baik tanpa kepemimpinan politik yang efektif, tak menjamin kebesaran partai bertahan secara elektoral. Tentu syarat utama kepemimpinan efektif ialah kekuatan moral pemimpinnya. Kharismanya alamiah, bukan buatan, sehingga magnit politiknya lebih kuat dan orisinal.

Kepemimpinan yang efektif, kendati istilah ini lazim dalam organisasi bisnis, dalam konteksnya juga diperlukan oleh organisasi politik. Efektivitas kepemimpinan organisasi politik pada akhirnya akan diukur secara komparatif dan kontestatif. Secara komparatif, partainya bertahan dalam kelembagaan partai yang modern dan

kuat kesistemannya, lebih baik dan maju ketimbang kompetitornya. Sedangkan secara kontestatif terkait komenceran prestasi elektoralnya.

Kualitas para pemimpin dalam dunia politik akan selalu tertuju sejauhmana elite kepemimpinannya eksis dan berkiprah. Kualitas personal dan tanggungjawab akan terus dipantau masyarakat luas. Dari sinilah diharapkan para elite partai satu sama lain saling mengingatkan, agar integritas personal dan kelembagaan partai selalu dijaga dan dikedepankan.

Tidak mudah menemukan pemimpin ideal yang bukan bermental medioker ataupun pemburu rente kekuasaan belaka, tetapi partai punya tanggungjawab perkaderan. Yang tak muncul kepemimpinannya, seyogyanya tak dipaksakan memimpin. Ini penting bukan saja demi kebaikan partai, tetapi juga masyarakat.●

Masalah Pengaderan Politik Bangsa

KOMPAS, 30 DESMBER 2017

MEMBACA KEMBALI uraian ilmuwan politik Indonesia generasi pertama Deliar Noer, sampailah kita pada kalimat, "Pemunculan pemimpin hanya mungkin dengan adanya kebebasan". Kalimat itu muncul dibukunya, Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa (2001). Apa yang disinyalir doktor ilmu politik lulusan Universitas Cornell ini, tidaklah keliru dalam konteks demokrasi. Kita dapat membacanya dalam pengertian bahwa tantangan pemunculan pemimpin di alam ketidakbebasan berbeda dengan dalam suasana demokrasi.

Namun, justru ketika kita masuk ke era demokrasi, problem pengaderan pemimpin, tidaklah semulus bayangan semula. Iklim kebebasan telah direspons oleh munculnya berbagai partai politik. Hal yang lazim ini mengingatkan masa awal kemerdekaan. Ketika

itu partai-partai berkembang dalam corak ideologisnya yang khas. Pola pengaderannya pun bernuansa ideologis.

Deliar Noer mencatat mengemukanya pola kepemimpinan masa revolusi pasca-kemerdekaan, di mana calon-calon pemimpin harus melewati fase magang atau latihan. Dedikasi pada partai atau organisasi pun menguat. Para tokoh masa magang itu, berbeda dengan para seniornya yang telah ditempa ujian politik sebelum kemerdekaan. Pola magang bertujuan menguji kesetiaan sekaligus peningkatan kapasitas politik. Partai-partai berlomba menghadirkan kader unggulan dalam kontestasi maupun jabatan publik.

Namun, sejarah kepolitikan Indonesia yang begitu dinamis di era Demokrasi Parlementer berubah ke fase-fasenya yang relatif statis pada Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Peran sentral negara, kalau bukan elite kekuasaan, sangat mempengaruhi pola pengaderan politik di partai-partai dan masyarakat. Iklim ketidakbebasan tidak menjamin munculnya sosok pemimpin independen, kecuali yang serestu sentral elite kekuasaan. Pada masa Orde Baru pendekatan korporatis diterapkan. Pewadahtunggalan berbagai kegiatan dan profesi dilakukan agar mereka mudah dikontrol negara. Seleksi kepemimpinan nyaris selalu melalui campur tangan negara.

Kendatipun demikian, antitesisnya muncul dari ranah *civil society*. Ruang kebebasan yang sempit mampu memicu kepemimpinan perlawanan. Namun, mereka sekadar kelompok penekan yang marjinal. Negara terlalu kuat masa itu, kendati akhirnya *civil society* mampu mendorong perubahan politik ke era reformasi. Dampak sentralitas elite kekuasaan dan kuatnya negara Orde Baru yang mampu membentuk kultur pengaderan politik sesuai caranya, masih kuat di era kebebasan dewasa ini.

Apa yang kita jumpai sekarang masih diwarnai paradoks. Era kebebasan sudah terjadi, tetapi pengaderan tidak optimal. Apabila dibandingkan dengan pola kepemimpinan masa revolusi yang berpola magang, nyaris hal itu tidak begitu penting lagi kini. Para elite partai menganggap pengaderan penting, tetapi mereka lebih meyakini hukum pasar. Dalam konteks kontestasi, kader internal sering-

kali tidak dianggap penting, manakala terdapat tokoh luar atau dari partai lain yang direkomendasikan lembaga survei lebih tinggi elektabilitasnya.

Kalau dulu, dedikasi dan loyalitas itu penting dilakukan kader ke partai, lantas partai pun konsisten dalam memberikan insentif politik, pun tak takut kalah dalam kontestasi karena barisannya kuat, sekarang nyaris tidak penting lagi. Banyak kasus memberitahu publik bahwa aspek dedikasi dan loyalitas yang telah dipenuhi oleh kader partai, tidak memperoleh balasan yang sepadan dari elite kekuasaan partai yang berpola pikir pasar. Elite itu tidak siap kalah dalam kontestasi, lantas sengaja mendukung kader lain yang tidak terkait dengan aspek dedikasi dan loyalitas. Pola pikir pragmatis itulah yang dominan.

Ada masalah pokok yang diabaikan di sini, ketika ideologi atau setidaknya identitas politik partai tidak lagi dianggap penting. Kini telah terjadi desakralisasi partai dari alat perjuangan ideologis menjadi sekadar kendaraan politik untuk tujuan praktis kekuasaan. Kekuasaan hanya perlu diraih dan dibagi-bagi untuk memberlangsungkan pembangunan yang nyaris hanya bisa berjalan apabila struktur insentifnya kuat. Yang berkuasa harus pandai-pandai membuat struktur insentif, membagi-bagi ke seluruh pendukung agar stabilitas politik internal terjaga.

Tidak adanya tradisi oposisi politik yang kuat karena budaya dan sistem, juga turut berpengaruh pada pola pengaderan dewasa ini. Kekuatan-kekuatan politik di luar atau di dalam pemerintahan, rata-rata punya tradisi pengaderan yang sama. Jawaban cukup mudah untuk menjelaskannya, itu semua dampak sistem. Sistemlah yang membuat para elite politik tidak punya pilihan lain selain melakukan hal-hal yang klise dalam politik praktis. Karena ongkos dalam suatu praktik politik non-ideologis dewasa ini begitu mahal, mereka dituntut pandai-pandai beradaptasi.

Apakah gejala demikian menandai krisis pengaderan politik bangsa? Ataukah sekadar fenomena perbedaan pola pengaderan akibat tuntutan yang berbeda? Bahwa telah terjadi krisis pengader-

an partai mungkin cukup tepat, kendati bisa identik krisis pasokan pemimpin bangsa. Tetapi, harus diakui bahwa tuntutan kepartaian dewasa ini berbeda dengan masa lalu. Partai-partai di Indonesia sudah masuk fase ketiga, fase persaingan atau kontestasi pragmatisme kalkulatif, bukan lagi perjuangan ideologis (fase pertama) dan fase pembangunan yang berpusat negara.

Fase masa kini, punya peluang dan konsekuensinya. Karena bukan entitas yang dipandang sakral atau sangat ideologis, dan secara tuntutan harus mampu bersikap terbuka, partai berpeluang akomodatif bagi hadirnya kepemimpinan yang bersumber masyarakat. Sumber-sumber kepemimpinan masa kita bisa menjadi sangat luas, tak hanya penyedia magang di partai maupun organisasi nonpartai, tetapi juga individu-individu kreatif yang hadir dari tradisi era digital baru. Masalah pengaderan politik bangsa pun harus menjadi tanggung jawab bersama.●

Peluang Baru Partai Golkar

KOMPAS, 20 FEBRUARI 2018

KEPENGURUSAN BARU Partai Golkar telah terbentuk dan diumumkan oleh ketua umum Airlangga Hartarto, 22 Januari 2018. Sebagaimana diberitakan *Kompas* (23/1/2018), menurut Airlangga kepengurusan ini merupakan langkah untuk menjaga keseimbangan internal. Ciri utamanya mengakomodasi semua faksi. Kepengurusan juga ditandai dua menteri Kabinet Kerja yang dikategorikan sebagai jabatan formalitas. Melihat komposisinya, terasa kepengurusan kali ini cukup siap menggerakkan mesin partai menuju kontestasi pemilu serentak 2019.

Bagaimanapun, Golkar merupakan fenomena dalam dinamika dan perkembangan politik Indonesia mutakhir. Kecuali pada Pemi-

lu 2004, Golkar konsisten sebagai pemenang kedua pemilu legislatif. Partai ini punya daya lentur internal yang tinggi belakangan ini, dalam arti mampu melalui fase konfliktualnya yang dramatis. Dualisme kepengurusan pasca-pilpres 2014 mampu diakhiri melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada pertengahan 2016 yang memilih Setya Novanto sebagai ketua umum.

Ketika Setya terkena kasus hukum dan berurusan dengan KPK, langkah cepat munaslub pun dilakukan. Airlangga Hartarto terpilih secara mulus. Kepengurusan baru terbentuk, setelah sebelumnya Golkar telah menunjuk Bambang Soesatyo sebagai pengganti Setya dalam posisinya sebagai Ketua DPR. Karena stabilitas politik internal terbentuk kembali dalam tempo yang tidak terlalu lama, kini tinggal melajulah partai beringin menterjemahkan skenario masa depan politiknya.

Bagi partai bertipe *catch-all*, mewadahi beragam latar belakang keanggotaan dan faskional seperti Golkar, stabilitas internal sangat penting dan menentukan sejarah masa depannya. Kepemimpinan partai akan menentukan sejauhmana pengelolaan organisasi efektif, dengan tingkat soliditas yang tinggi. Golkar termasuk partai yang telah teruji dalam mengelola konflik dan relatif cepat dalam membangun konsensus internalnya. Partai ini, sekali lagi, memang tak luput dari ujian perpecahan internal, tetapi dapat diselesaikan secara elegan. Dalam konteks ini, Airlangga punya modal sejarah kepartaian yang cukup memberinya bekal memimpin.

Pengalaman penyelesaian konflik internal, bagaimanapun telah memberi pelajaran tak hanya bagi Golkar, tetapi juga bagi partai-partai lain, terutama yang tengah berkonflik. Kini, Golkar telah melampaui fase konfliktualnya. Airlangga pun memiliki kesempatan emas menggerakkan mesin partainya menuju kemenangan 2019.

GOLKAR UNTUK JOKOWI

BERBEDA dengan menjelang pilpres 2014, dimana ketua umum Aburizal Bakrie memproyeksikan diri sebagai kandidat presiden sejak dini, kali ini Golkar berada dalam bingkai skenario memenang-

kan kembali Jokowi pada pilpres 2019. Golkar merupakan partai politik pertama yang menyatakan dukungan itu, bahkan mendahului PDIP. Diakomodasinya dua menteri di kabinet pemerintahan, lagi pula karakter Golkar yang lebih suka berada di pemerintahan, menegaskan partai ini akan *all out* (*cancut tali wandha*).

Pemilu 2019 akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, mengingat ia merupakan jenis pemilu serentak (*concurrent election*). Pemilu legislatif diberlangsungkan dalam waktu yang bersamaan dengan pilpres. Mahkamah Konsitusi pun sudah memutuskan persyaratan ambang batas presidensial tetap diberlakukan. Dalam logika pemilu serentak, pemenang pilpres otomatis memperoleh dukungan mayoritas di parlemen sebagai dampak ikutan *coattail effect* atau *down-ballot effect* partai-parta pendukungnya. Efek itu mencegah fenomena pemerintahan yang terbelah (*divided government*), ketika presiden terpilih tekor dukungan parlemen.

Dalam logika seperti itu, Golkar punya peluang sekaligus kontribusi penting dalam pemenangan pemilu legislatif, sekaligus pemenangan Jokowi dalam pilpres 2019. Dari sisi persepsional, penegasan Golkar mendukung Jokowi yang tidak semata-mata ditunjukkan melalui jargon, tetapi terutama optimalisasi mesin politik, partai ini dapat terangkat daya tawarnya di kalangan pemilih yang merasakan keberhasilan pembangunan. Dari segmen ini, pemilih Golkar terdahulu tetap solid, bahkan terbuka peluang dukungan lebih luas. Pemilih pro-pemerintah akan merasa nyaman memilih Golkar, karena tegas-tegas partai ini bagian dari pemerintahan Jokowi.

PELUANG BARU

DALAM REL skenario partai pendukung pemerintah dan Jokowi pada 2019, posisi politik Golkar sudah sangat jelas. Konsekuensinya, ruang manuver Golkar pun meluas dan berkembang. Apabila soliditas terjaga, strategi dan pergerakan mesin partai efektif, bisa jadi pengalaman kemenangan pemilu legislatif 2004 semasa partai ini dipimpin legendaris politik Akbar Tandjung, terulang kembali.

Kekuatan penuh mesin partai menjadi andalan Golkar kali ini. Kontestasi pemilu 2019 memang masih begitu ketat. Sistem pemilu legislatif juga masih sama dengan sebelumnya. Kekuatan sosok-sosok calon anggota legislatif tetap menjadi kunci utama. Dari sisi sumberdaya manusia dan variasinya, Golkar tak kurang-kurang. Pemenangan personal akan terbantu oleh strategi pemenangan partai (*market orientation party*). Kalau partai secara umum solid dan efektif, kondisi demikian cukup menguntungkan.

Dari sisi kepemimpinan, Airlangga cocok memimpin Golkar, karena karakternya yang tenang dan tidak kontroversial. Dipertahankannya posisi Airlangga sebagai Menteri Perindustrian, bagaimanapun sangat menguntungkan posisi politik Golkar. Dengan begitu, Airlangga secara otomatis juga telah menjadi simbol pemerintah. Manajemen hubungan Golkar dan pemerintah, dalam hal ini Jokowi, tentu sangat penting dalam penentuan masa depan politik mereka sebagai suatu simbiosis mutualisma.

Kini Golkar siap melaju dengan memandang dirinya secara lebih optimis. Dari sisi kapasitas, rasa-rasanya, tidak akan mungkin Golkar merosot sebagai partai menengah, atau bahkan gurem. Dia justru punya peluang besar sebagai partai pemenang pemilu.●

Dinamika Kepartaian Kita

KOMPAS, 28 MARET 2018

BELUM LAMA ini Partai Bulan Bintang akhirnya ditetapkan juga sebagai peserta Pemilu 2019 setelah gugatannya ke Badan Pengawas Pemilu dikabulkan. Komisi Pemilihan Umum yang sebelumnya telah meloloskan 14 parpol nasional pun lantas menetapkannya.

Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa wajah baru yang menyembul dalam konstelasi kepartaian peserta pemilu kali ini. Mereka adalah Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Persatuan In-

donesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Lainnya, parpol-parpol lama yang punya kursi di DPR, ditambah PBB yang pada Pemilu 2014 gagal memenuhi ambang batas parlemen.

MENCOBA POPULIS

APA YANG bisa dicatat dari konstelasi baru kepartaian peserta pemilu kali ini? *Pertama*, jumlah parpol masih relatif besar. Empat belas parpol jelas menegaskan kembali bekerjanya sistem multipartai kompleks, bukan yang sederhana. Karenanya dapat dicatat, sistem politik Indonesia dewasa ini belum mampu mendesain efektif ke terbentuknya multipartai sederhana. Gairah berpartai yang tinggi mendapat ruang yang cukup dalam iklim demokratis.

Proses seleksi alamiah parpol-parpol akan diuji kembali lewat pemilu. Kelak, apakah tetap sepuluh parpol saja yang mampu melewati ambang batas parlemen empat persen suara sah pemilu nasional seperti Pemilu 2014? Sangat mungkin akan lebih rendah dari sembilan parpol, sehingga akan banyak yang berguguran. Kendati demikian, gambaran multipartai sederhana masih belum terbentuk.

Kedua, dari sisi tema yang diangkat, tampaknya semua parpol yang ada berlomba untuk selalu tampil populis. Populisme parpol-parpol lama antara lain tampak dari sikap dan kebijakan mereka di parlemen yang nyaris tidak mau berseberangan dengan isu-isu populer yang berkembang. Sementara parpol-parpol baru, setidaknya dilihat dari PSI yang elitenya proaktif banyak bicara, juga mencoba tampil populis dengan melontarkan kritik dan alternatif.

Pengertian populisme membentang dari cara atau mode berkomunikasi hingga ideologi, yang dikaitkan dengan klaim demi kepentingan rakyat. Lazim saja manakala semua parpol bicara sama, sebagai yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Parpol-parpol berupaya dikesankan sebagai kekuatan garda depan pengubah nasib rakyat. Mereka berebut memperoleh kepercayaan, atau lebih tepat, suara konstituen. Setiap pemilu mereka berebut tangga rakyat, untuk naik ke panggung kekuasaan formal, menjadi elite penentu kebijakan.

Ketiga, masalah tokoh dan kekuatan pengaruhnya. Dalam sejarah politik kepartaian di Indonesia, tidaklah mungkin ulasannya mengabaikan posisi strategis para tokohnya. Bahkan, setidaknya sejak Pemilu 2004 hingga dewasa ini, kontestasi antarparpol nyaris identik dengan kontestasi tokoh. Pemilu 2004 dijadikan pijakan karena saat itu mengemuka fenomena Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Parpol ini berlipat dukungan pada Pemilu 2009, betapapun lantas anjlok drastis pada 2014.

Konstelasi antarparpol 2019, juga akan nyaris identik dengan kontestasi antartokoh. Parpol-parpol lama sudah begitu kokoh dengan tokoh masing-masing. Tapi, bagaimana dengan parpol-parpol baru? Kecuali Tommy Soeharto (Partai Berkarya), dan Hary Tanoesoedibjo (Perindo) nyaris tidak ada tokoh yang muncul sebagai ikon parpol-parpol baru. Yang satu terkait ketokohan Soeharto semasa Orde Baru, satunya lagi karena punya grup media yang besar.

Di antara parpol baru yang gencar beritanya di media massa adalah PSI. Parpol yang gencar membidik segmen generasi muda ini, tentu akan berupaya keras membuktikan apakah eksperimennya dalam kontestasi politik 2019 berhasil ataukah gagal. Dulu pernah ada Partai Pemuda Indonesia dipimpin Hasanuddin Yusuf. Partai yang menetapkan segmennya kalangan pemuda ini pun gagal berkontestasi. Tentu PSI tak ingin punya pengalaman serupa.

Parpol-parpol baru lainnya, tentu juga akan terus bergerak mencari segmen, mempertegas ikon, di tengah ketatnya persaingan dan sempitnya waktu. Parpol-parpol lama tampak lebih berkonsentrasi mempertahankan, bahkan meningkatkan posisi elektoralnya.

Apakah strategi memunculkan tokoh, akan berhasil dilakukan oleh parpol-parpol yang terbatas popularitas stok tokoh-tokohnya? Masalah tokoh, baik parpol lama maupun baru banyak yang menyandarkan pada magnit politik Jokowi. Satu Jokowi akan dipakai sebagai ikon banyak parpol. Meskipun ada tokoh lain yang layak menjadi lawan tandingnya, terutama Prabowo Subianto, parpol-parpol pendukung Jokowi lebih berani tampil demonstratif. Mereka berharap efek petahana.

EKSPERIMEN BARU

KEEMPAT, eksperimen pemilu serentak pada demokrasi elektoral 2019 yang berbeda teknis penyelenggaraannya dibanding seluruh penyelenggaraan pemilu di Indonesia sepanjang sejarahnya sejak 1955, membuat banyak parpol cenderung berebut efek petahana itu. Maka, faktor Jokowi menjadi begitu penting. Mereka berhitung dan memperkirakan berapa besar prosentase "tambahan suara" sebagai dampak efek petahana (*coattail effect*). Hal tersebut tentu dikaitkan asumsi peluang kemenangan Jokowi sebagai capres 2019 masih tertinggi.

Semakin banyak parpol mendukung Jokowi, membuat peluang mereka mendapat dampak efek petahana yang tinggi tidak cukup mudah. Tetapi, tentu mereka tak sekadar berhitung di situ, melainkan juga dalam konteks "sharing" kekuasaan kelak. Manakala kini dipetakan banyak parpol mendukung Jokowi sebagai capres, wacana calon tunggal mengemuka. Apakah dimungkinkan calon tunggal hadir pada pilpres 2019? Tema inilah yang tengah marak belakangan ini. Kemungkinannya masih terus diuji. Antarparpol juga tengah saling uji reaksi.

Kelima, parpol-parpol dihadapkan pada gradasi pendekatan antara kecenderungan mengedepankan pandangan rasional-kritis hingga politisasi identitas yang seringkali tak terelakkan untuk meraup simpati bakal konstituen. Berbagai potensi jenis pemilih, apakah pemilih sosiologis (primordial), psikologis (identitas parpol) atau rasional (ekonomi), akan dihadapkan pada ragam pendekatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan parpol-parpol.

Pilihan semakin beragam pada pemilu serentak 2019. Kontestasi jelas semakin ketat, justru di tengah adanya segmen masyarakat yang jenuh dengan parpol. Parpol yang berbasis media massa pun, belum tentu lebih diyakini konstituen. Kampanye berulang-ulang dengan berbagai cara penyelipan berita, bisa jadi malah memicu titik jenuh, sehingga kontrapriduktif. Apalagi, manakala cara penyampaiannya terkesan memaksa dan berlebihan.

Pada masa kini, parpol-parpol bersaing di tengah fenomena jungkir balik pasca-kebenaran (*post-truth*). Mereka berebut kepercayaan, justru di tengah situasi yang susah untuk mendapatkannya. Persaingan politik tentu akan semakin bising. Penegak hukum dituntut semakin gencar menindak tegas mereka yang diduga menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Ketegasan semacam itu diperkirakan akan terus terjadi hingga puncak pemilu serentak, justru di tengah kritisisme masyarakat yang meningkat.●

Indeks

A
A Made Tony Supriatna, 115
A Year of Reckoning, 222
A.H. Nasution, 49, 82, 396
A.M. Ghalib, 163
Abdul Munir Mulkhan, 350
Abdul Rahman Saleh, 271
Abdurrahman Addhakil, 333
Abdurrahman Azzam, 25
Abdurrahman Wahid/Gus Dur, xxxv, xxxix, xli, 23, 24, 39, 44, 47, 57, 65, 66, 67, 69, 97, 106, 118, 144, 145, 153, 174, 188, 197, 220, 270, 287, 325, 331, 342, 523
Abraham Lincoln, 405, 438
ABRI, 2, 6, 9, 36, 112, 115, 206
Aburizal Bakrie, 148, 191, 280, 335, 338, 379, 516
Aceh, 8, 13, 14, 27, 51, 85, 122, 136, 137, 138, 204, 206, 214, 215, 216, 220, 236, 261, 305, 341
Adam Przeworski, 407
Adhiyaksa Dault, 183
Adinegoro, 425
Adolf Hitler, 232
Aécio Neves, 470
Agatha Christie, 366, 367
Agum Gumelar, 170
Agung Laksono, 191, 192, 278, 280
Agung Nurfajar, xlvii
Agus Widjojo, 117, 118
Agus Wirahadikusumah, 12, 82
Ahmad Basarah, 464
Ahmad S Moussali, 94
Ahmad Syafii Maarif, 145, 160
Ahmad Tohari, xxxix
Ahmadinejad, 277
Airlangga Hartarto, 515, 516, 517
Akbar Tandjung Institute, xlvii
Akbar Tandjung, xlvii, 80, 146, 148, 174, 188, 191, 193, 203, 252, 279, 296, 312, 379
Akira Kurosawa, vii, ix, xxii, xxiii, xxviii
AKP/*Adalet ve Kalkinma Partisi*, 286, 350, 371, 459, 490, 491, 492
Aksi 212, 494
Akutugawa/Ryunasuke Akutugawa, 333, 334, 335
Al Ghazali, 438
Al Gore, 317, 399, 401
Al Qaeda, 92, 93, 126
Ali Yafie, 128

Aljazair, 371
Aloysio Nunes, 471
Alzier Dianis Thabrani, 141
Amartya Sen, 169
Ambalat, 204, 206, 233
Ambon, 13, 23, 27, 51, 73, 109, 222
Amerika Latin, 90, 221, 306, 458, 470, 472, 500
Amerika Serikat, 92, 126, 167, 204, 206, 240, 275, 306, 335, 367, 385, 421, 438, 447, 471
Amidhan, 125
Amien Rais, 8, 109, 145, 167, 170, 242, 264, 352
Anatolia, 456
Anderson/Bennedict Anderson, 233, 234
Andi Djalal, 163
Andi Matalatta, 269
Andre Malraux, 426
Anna Sophanah, 403
Anne Phillips, 89, 90, 91
Annemarie Schimmel, 32
Anthony de Mello, xxvii, xxxviii
Arab Spring, xlv
Arbi Sanit, 229
Ariadne, 323
Aristoteles, 336
ASEAN, 282, 283, 284, 482
Asia Pasifik, 481, 483
Asian Muslim Action Network, 92
Asian values, 221
Athena, 323
Augusto Pinochet, 232
Ayib Bakar, xxxix
Aylan Kurdi, 435

B
Badan Konstituante, 397
Badjoeri Widagdo, 163
Baku Bae, 110
Bambang Soesatyo, 516
Bangkalan, 402
Bangkok, 239
Banglades, 263, 264, 265
Bank Century, 326, 327, 333, 338, 348
Bank Century, xxxiv, xli
Bank Grameen, 263
Bank Indonesia, 44
Banser Ansor, 57
Barbara J Nelson, 90
Bassam Tibi, 93
Basuki Tjahaja Purnama/Ahok, 383, 411, 467, 493
Badan Pengawas Pemilu, 518
Beer-Lovers' Party, 447
Begum Khaleda Zia, 264
Bella Azbug, 91
Benito Mussolini, 232
Bernard Crick, 245
Bernard Kent Sondakh, 113
Bhinneka Tunggal Ika, 321, 483
Bhumibol Adulyadej, 239
Bimantoro/S. Bimantoro, 75
Boediono, 266, 316, 324, 335, 336, 337
Boediono, xxxv, xli
Bomer Pasaribu, 60
Brazil, 470
Bryan Christy, xxiv
Buddha, 223
Budi Susilo SJ, 115

BUMN, 42, 269
Bureaucratic power, 449

C
Cambridge University, 435
Cancut Taliwondo, 338, 340
Capita Selekta, 397
Castells/Manuel Castells, 494, 495
Chaiwat Satha-Anand, 25
Chandra Setiawan, 125
Charles Kurzman, 94
Checks and balances, 52, 55, 76, 77, 78, 85, 142, 177, 186, 190, 192, 203, 210, 231, 252, 267, 290, 296, 351, 372, 388, 393, 450, 465
China, 167, 217, 221, 223
Cholid Ghozali, 163
Christhoporus Katon, 163
Cikeas,323, 324
Cile, 232
Civil Islam, 69, 71, 72
Civil Society, xlii, xlvi, 12, 13, 14, 40, 88, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 183, 185, 230, 250, 387, 388, 403, 416, 420, 422, 467, 487, 513
Cliford Geerzt, 416
Coattail effect, 469, 470, 471, 472, 500, 501, 517, 521
Concurrent election, 469, 472, 473, 517
Constitutive power, 449
CSIS, 206, 313
Cyberspace, 34

D
Daedalus, 323
Danarto, xxxix
Daniel Dhakidae, 271, 440
Daniel S. Lev, 67
Danny Rye, 447, 449
Dawam Rahardjo, 127
Dekrit Presiden, 82, 103, 397
Deliar Noer, 63, 512, 513
Demokrasi Oposisional, 176, 177, 179
Demokrasi Parlementer, 16, 17, 253, 254, 264, 318, 466, 513
Demokrasi Terpimpin, 71, 210, 317, 513
Denmark, 436, 507
Denny JA, 16
Denpasar, 187, 285
Developmentalism, 244
Di Bawah Bendera Revolusi, 397
Didik J. Rachbini, xxxvii
Dilma Rousseff, 470
Dimyati Hartono, 29
Din Syamsudin, 125
Disciplinary power, 449
Divided government, 469, 471, 473, 517
Djaja Suparman, 14
Djoko Santoso, 108, 109, 198, 199
Djoko Soetopo, 163
Djoko Suyanto, 198
Djusman Syafei Djamal, 269
Donald H McGannon, 294
Donald Trump, 511
DPR, xxxiv, xxxv, 15, 37, 48, 55, 68, 80, 82, 84, 85, 113, 116, 119, 140, 142, 148, 152, 163, 177, 178, 179, 180, 192, 197, 198, 206, 225, 231, 233, 242, 251, 266,

267, 273, 290, 291, 307, 320, 326, 327, 328, 333, 334, 335, 336, 339, 341, 342, 348, 352, 375, 388, 398, 402, 408, 416, 464, 465, 470, 471, 472, 473, 494, 501, 516, 519
DPRD 141, 143, 178, 179

E
Edy Prasetyono, 206
Eep Saefulloh Fatah, 147
Efek Rashomon, xxxiii
Effendi Gazali, 171
Eisenhower, 404
Eleanor Roosevelt, 377
Elected politician, 460
Emha Ainun Nadjib, xxxix, 354
Endang Rahayu Sedyaningsih, 323
Endriartono Sutarto, 110, 112, 113, 118, 121, 138, 154, 158, 197, 204
Erdoğan/Recep Tayyip Erdoğan, 350, 459, 490, 491, 492
Eropa, 61, 89, 93, 129, 223, 435, 456, 489
Eros Djarot, 29
Etika Protestan, 452
Evo Morales, 278, 470
Executive heavy, 230

F
Fachry Ali, xxxix
fadel Muhammad, 298
Fahmi Djamaris, 163
Fahri Hamzah, 285, 494
Faisal Basri, 411
Falun Gong, 34
Farchan Bulkin, 229
Fauzi Bowo, 383, 411
Ferry Tinggogoy, 163
Filipina, 306, 306, 403, 462, 471, 481, 501
Fordem/Forum Demokrasi, 58
Forkot/Forum Kota, 3
Fortunato Musella, 509
Four dimensional view of power, 440
Fraksi TNI/Polri, 104, 105, 117
Francisco Franco, 232
Francisco Panizza, 410
Franklin Delano Roosevelt, 150
Front Pembela Islam, 125
Fuad Amin, 402
Fuad Bawazier, 9
Fukuyama/Francis Fukuyama, 250, 468, 487

G
Gabriel José García Márquez, xli, 322
Gabrielle Giffords, 367
GAM/Gerakan Aceh Merdeka, 135, 136, 137, 214, 215
Gatot Nurmantyo, 477, 483, 484
Gatutkaca, 382
Gayus Tambunan, 358
GBHN, 397, 408
Gedung Putih, 404
Geertzian, 44
Gellner/Ernest Gellner, 233, 234
Geneva, 135, 136
George W Bush, 93
Gerindra, 299, 411, 433, 434
Gerindra, xxxiv
Ginandjar Kartasasmita, 191
GNP, 50

Goenawan Mohamad, xxxix
Golkar/Partai Golkar, xxxiv, xliii, 4, 17, 64, 134, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 157, 168, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 201, 203, 209, 210, 211, 225, 229, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 278, 279, 280, 287, 289, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 326, 335, 338, 339, 340, 342, 348, 349, 379, 380, 381, 444, 445, 446, 509, 511, 515, 516, 517, 518, 522
Gordon Brown, 318
Graito Usodo, 80
Green Party, 447
Gunung Merapi, xxxvi, 261, 356, 411

H
Habibie/B.J. Habibie, xv, xxxv, 8, 97, 153, 197, 220, 325
Haedar Nasir, 496
Hamid Awaluddin, 269
HAMKA, 455, 523
Hamzah Haz, 63, 66, 71, 123, 170
Hanura, xxxiv
Harold D Lasswell, xxiii, xxvi
Harold Dwight Laswell, 335
Haruki Murakami, xliv, 361
Haryanti Sutrisno, 402
Haryanto Taslam, 29
Hary Tanoesoedibjo, 520
Hasanuddin Yusuf, 520
Hassan Al Bana, 213
Hasyim Asy'ari, 70, 332
Hasyim Muzadi, 35, 64, 170, 173, 176
Hatta/Hatta Radjasa, xxxvi, 269
Hatta/Bung Hatta, 66, 246, 263, 322, 397, 412, 428
Hendarman Supandji, 269
Henry Ford, 391
Herbert Mercuse, 414
Herberth Feith, 210, 246, 412
Hidayat Nurwahid, 125, 314, 350
Hilmi Aminuddin, 285, 350
Himpunan Mahasiswa Pecinta Seni, xxxiii
Hindu, 221, 223
HMI/ Himpunan Mahasiswa Islam, xxvii, xxxi, xlv, xlvii, 150, 213
Hosni Mubarak, 370
Huntington/Samuel P Huntington, xliii, 49, 50, 139, 155, 160, 175, 182, 187, 221, 235, 254, 257, 371, 376, 396, 398, 442, 494, 506
Huntingtonian, 507

I
Ichsan Malik, 110
Ichsan Yasin Limpo, 402
ICW/*Indonesia Coruption Watch*, 76, 142
Idrus Marham, xxxiv, 326
Idul Fitri, 504, 505
Ignas Kleden, 162, 168, 238
Ikhwanul Muslimun, 213
Ilmu manejemen, xl
Ilmu politik, xxiv, xxvii
IMET/*International Military Education and Training*, 206
IMF, 325
Immanuel Kant, 397
Indira Gandhi, 330, 336

Individualistic power, 449
Indonesia, 2, 3, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 32, 37, 40, 41, 43, 44, 61, 62, 63, 65, 67, 70, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 100, 105, 115, 117, 120, 125, 126, 127, 128, 144, 154, 155, 156, 158, 160, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 175, 176, 177, 179, 180, 184, 187, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 224, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 246, 247, 252, 260, 261, 262, 265, 266, 271, 274, 277, 283, 284, 304, 305, 311, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 324, 342, 343, 344, 345, 353, 354, 355, 357, 359, 362, 371, 380, 381, 382, 386, 387, 388, 389, 392, 397, 405, 409, 411, 412, 416, 425, 426, 427, 428, 441, 452, 453, 454, 455, 456, 465, 466, 468, 469, 472, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 492, 493, 494, 495, 497, 502, 503, 504, 510, 511, 512, 513, 514
Indonesiawi, 333
Indra J Piliang, 243
Intra-party competition, 462
Ira Koesno, 170
Irak, 232, 491
Irian Jaya, 13, 51, 73, 332
Irianto MS Syafiuddin, 402
Irman Putra Sidin, 464
Islam berkemajuan, 503
Islamic Calvinism, 456
Islamic Protestantism, 456
Italia, 232
Ivan SJ Sarundajang, 402
Iwan Fals, 262

J
J Kristiadi, 183
Jampang dari Betawi, 382
Jean-Jaques Rousseau, 129
Jepang, viii, xi, xxviii, 167, 221, 222, 223, 337, 452, 453, 454, 463
Jeremy Rifkin, 237
Jerman, 167, 232, 322
John F. Kennedy, 344
John Gardner, 404
John Kenneth White, 447
John Lennon, 129
John Naisbitt, 32, 130
Jokowi/Joko Widodo, xxxv, xxxvi, xxxvii, xli, xlvi, 383, 409, 410, 411, 429, 430, 432, 516, 517, 518, 520, 521
Jong Celebes, 184
Jong Java, 184
Joseph Nye, 344
Joseph Stalin, 232
Jusuf Kalla, 42, 148, 170, 176, 190, 191, 201, 251, 255, 267, 278, 280, 298, 302, 309, 312
Juwono Sudarsono, 241
JW Marriott, 150

K
Kairo, 223
Kalimantan Barat, 73
Kamboja, 232
Karen Armstrong, 93
Karl Marx, 61
Kayseri, 456
Kazuo Miyagawa, xxviii

KBBI, xxxviii
Keane/John Keane, 367, 368
Keindonesiaan, 95, 332, 498, 499, 502, 503, 505
Kelompok Ciganjur, 37
Ken Plummer, xxxiii
Kepulauan Mentawai, 356
Kepulauan Seribu, 493
Kesepakatan Helsinki, 214
KH Ahmad Dahlan, 70, 351, 455
Khmer Merah, 232
Ki Hadjar Dewantara, 321, 425
KINO/Kelompok Induk Organisasi, 257
KKB/Komite Keamanan Bersama, 135
KKN/Korupsi, kolusi dan nepotisme, 76, 77, 114, 115, 116, 128, 153, 158, 219
Koalisi Kebangsaan, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 190, 191, 225, 252, 296, 312
Koalisi Merah Putih/KMP, 429, 430
Kodam Pattimura, 110
Kolombia, xli
Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, xxxvi, xxxvii
Komite Rakyat Indonesia, 3
Komunisme, 40, 41, 93
Konfusianisme, 223
Kongres Pemuda II, 184
Koopslihkam, 108, 109
Kopassus, 191
KPU/Komisi Pemilihan Umum, 3, 4, 170, 171, 172, 288, 314, 315, 319, 393, 446, 500, 518
KTP-E, 509
KUD/Koperasi Unit Desa, 284
Kuil Shinto, xxxiii
Kuntowijoyo, xxxix, 413, 414, 428
Kwee Thiam Tjing, 362

L
Labyrinth, 322, 323
Laclau/Ernesto Laclau, 410
Laksamana Sukardi, 42
Laut Mediterania, 435
Laweyan, 456
Lee Kuan Yew, 49, 76
Lembaga Survei Indonesia/LSI, 316
Leninisme, 40
Leroy Mccarty, 356
Leviathan, 232, 369, 437
Liga Awami, 264
LIPI, 313, 462, 463, 465, 472, 473
Lord Acton, xliv, 438
LP3ES, 313
Lukman Hakiem, 125
Luthfi Hasan Ishaaq, 350

M
M Amir, 425
M Anis Matta, 350
M Lukman Edi, 269
M Nadjib Azca, 7
Machiavelistik, 5
Machiko Kyō, xxxiii
Madilog, 397
Madiun, 72, 73, 74, 75, 76, 122
Madzab kritis, xviii
Mahabharata, 381
Mahatma Gandhi, 234, 437
Mahbub Djunaidi, xxxix

Mahbubani/Kishore Mahbubani, 221, 222, 224, 375, 427, 454
Mahkamah Agung, 99, 189
Mahkamah Konstitusi, xxxvi
Majelis Tertinggi Konghuchu Indonesia, 125
Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945, 210
Malaysia, 204, 233, 320, 321
Maluku, 95, 108, 109, 110, 122, 292
Manado, 125, 126, 494
Mancur Olson, 510
Mangkunegara IV, 453
Marianne Williamson, 271
Maridjan, xxxvi, 356, 357, 358, 411
Maridjanisme politik, xxxvi
Mario Puzo, 264
Mark E Warren, 250
Mark Slouka, 34
Martin Sheen, 432
Marxisme, 40, 61
Masayuki Mori, xxiv, xxxiii
Masochist, 291
Matori Abdul Djalil, 9, 10, 287
Maulana Jalaluddin Rumi, 32
Maulana Wahiduddin Khan, 26
Max Weber, 343, 452, 480
Media Indonesia, 463, 522
Megatrends 2000, 130
Megawati/Megawati Soekarnoputri, xxxv, xxxvi, xli, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31, 47, 63, 64, 65, 66, 67, 80, 83, 84, 96, 97, 98, 106, 113, 121, 153, 167, 170, 171, 173, 175, 176, 180, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 220, 252, 297, 302, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 340, 341, 342, 342, 343, 410
Mei Susilo, 125
Mekkah, 26, 261
Menpora, 183, 184, 185, 186, 187
Mer Roxas, 472
Mesir, 213, 223, 333, 370, 371, 372, 457, 459
Mesu budi, 453
Michael Parenti, 261
Michel Temer, 470
Michigan, xxiv
Mike Tyson, 317
Mikhul dhuwur mendhem jero, 405
Mikrobloging, xxxix
Minahasa, 402
Minotaur, 323
Mochtar Lubis, 224, 262, 355, 502
Mochtar Pabottingi, 188
Moeslim Abdurrahman, xxxix
Mohamad Sobary, xxxix, 44
Mohammad Makmun Ibnu Fuad, 402
Moskwa, 50
MPR, 6, 11, 35, 40, 47, 51, 57, 65, 66, 68, 82, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 117, 118, 119, 150, 331, 332, 350, 398, 407, 408
MPRS, 337
MuchaShim Q Arquisa, 92
Muchtar Beni Biki, 125
Muhammad Ali, 317, 373, 523
Muhammad Ibrahim, 125
Muhammad Qodari, 46
Muhammad Yunus, 263
Muhammadiyah, xlvii, 69, 70, 71, 72, 95, 96, 98, 125, 350, 351,

352, 455, 496, 503
Muhammmad Nuh, 269
Muhsin Ahmad Mattas, 125
MUI/Majelis Ulama Indonesia, 125
Mukhammad Ilham, xxxiii
Mustadh'afin, 352

N
Nabi Muhammad SAW, 25
NAD/*Nanggoe Aceh Darussalam*, 135
Nagorik Shakti, 264
Nahdlatul Ulama/NU, 57, 95, 331, 455, 503
Naisbitt/John Naisbitt, 32, 33, 130
Najma Chowdury, 90
Narkoba, 187
Nasakom, 11, 41, 66
Nasdem/Partai Nasional Demokrat, 433, 434, 463
Nasru Alam Aziz, 433
Nasrullah Marzuki, 279
National Geographic, xxiv
Natsir/M Natsir, 397
Nawal el Sadawi, 370
Nazi, 232
nDoroisme, 183
New Age, 130, 131
Nico Uskono, 125
Nila Juwita Anfasa Moeloek, 323
NKRI, 105, 159, 215, 234, 377, 482, 483, 487
Nur Mahmudi Ismail, 9
Nurcholish Madjid/Cak Nur, xlvi, 20, 58, 98, 127, 133, 134, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 159, 279, 282, 283, 360, 409, 411, 444, 445, 454, 497, 498, 499, 523

O
O'Donnel/Guellermo O'Donnel, 55
Obama/Barack Obama, 343, 344, 346, 367, 471
Objective civilian control, 139
Oetojo Oesman, 148
Omar Suleiman, 370
One Dimensional Man, 414
One-dimensional view of power, 439
Onghokham, xxxix
OPOVOV, 391
Orde Baru, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 20, 26, 35, 36, 37, 42, 46, 60, 62, 67, 73, 77, 81, 88, 97, 101, 114, 115, 122, 123, 126, 128, 142, 153, 157, 162, 168, 169, 183, 184, 185, 187, 188, 193, 206, 210, 211, 218, 220, 225, 244, 252, 283, 284, 287, 305, 317, 324, 342, 397, 398, 422, 454, 506, 513, 520
Orde Lama, 5, 20, 62, 153, 210, 211, 220, 422
Osama bin Laden, 92, 93

P
P4/Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 17
Pancasila, 11, 42, 101, 117, 185, 228, 236, 237, 238, 239, 284, 322, 398, 427, 452, 479, 480, 483, 495, 496, 497, 498, 499, 503
Pandeglang, 401
Panji Masyarakat, xxxix, 26
Panji Tengkorak, 382
Parakitri T Simbolon, 222

Parliamentary Theshold, 463
Parmusi, 125
Partai Amanat Nasional/PAN, xxxiv, 229
Partai Berkarya, 519, 520
Partai Bintang Reformasi/PBR, 163, 208
Partai Bulan Bintang/PBB, 208, 229, 464, 518
Partai Buruh Indonesia, 125
Partai Damai dan Aman, 432
Partai Demokrat, 168, 208, 225, 229, 253, 292, 293, 296, 298, 299, 302, 307, 308, 311, 340, 343, 348, 434, 471
Partai Garuda, 518
Partai Keadilan Sejahtera/PKS, xxxiv, xliii, 212, 229, 340, 348
Partai Keadilan, 9, 125, 229, 340
Partai Kebangkitan Bangsa/PKB, xxxiv, xliii, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 30, 163, 173, 208, 225, 286, 287, 288, 289, 342, 352
Partai Komunis Indonesia/PKI, 44, 66, 210, 332, 467
Partai Matahari Bangsa/PMB, 352
Partai Nasional Banglades, 264
Partai PDK, 163
Partai Pemuda Indonesia, 520
Partai Persatuan Indonesia/Perindo, 432, 519, 520
Partai Persatuan Pembangunan/PPP, xxxiv, 11, 63, 64, 65, 125, 176, 177, 208, 211, 225, 267, 348, 522
Partai Priboemi, 432
Partai Republik, 275, 471
Partai Republika Nusantara, 300
Partai Solidaritas Indonesia/PSI, 432
Party in central office, 289, 290
Party in public office, 289
Party on the ground, 289
Pasca- Orde Baru, 39, 74, 81, 134, 141, 142, 144, 152, 153, 157, 187, 188, 199, 211, 220, 225, 235, 252, 392, 485,
Pasca-Soeharto, 13
Patricia Aburdene, 130
PDIP/Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, xxxiv, xxxvi, xliii, 4, 28, 29, 30, 31, 44, 57, 63, 64, 67, 163, 191, 200, 201, 202, 203, 208, 211, 214, 225, 226, 229, 231, 285, 295, 296, 297, 299, 302, 307, 308, 309, 312, 313, 340, 341, 342, 343, 349, 411, 430, 464, 517
PDP-Laban, 471, 472
Pedro Pablo Kuczynski, 470
Pekajangan, 456
Pemilu 1955, 16, 17, 18, 44,
Pemilu 1999, 3, 4, 5, 8, 15, 16, 18, 28, 37, 44, 151, 152, 157, 188, 193, 212, 251, 315, 331
Pemilu 2004, 29, 31, 118, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 188, 225, 229, 241, 242, 251, 279, 290, 298, 305, 310, 348, 433, 520
Pemilu 2009, 148, 194, 276, 278, 285, 290, 293, 295, 299, 309, 314, 316, 318, 320, 341, 348, 433, 463, 519
Pemilu 2014, 320, 391, 392, 393, 407, 434, 464, 501
Pemilu Serentak 2019/Pemilu 2019, 461, 464, 465, 485, 515,

518
Pendawa Lima, 382
Perang Dunia II, 344, 421, 506
Peristiwa Tiananmen, 370
Perludem, 463
Peter Mair, 289
Pisowanan Ageng, 300
PNI/Partai Nasional Indonesia, 66, 71, 467
Pol Pot, 232
Polandia, 447, 448
Polda Metro Jaya, 231
Polemik Kebudayaan, xliv, 320, 321, 425, 426, 454, 455
Political decay, 421, 506
Political distrust, 249, 250
Political order, 506
Pondok Pesantren Langitan, 9
Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam, 35
Populisme, xlvi, 409, 410, 411, 412, 423, 519
Poros Tengah, 9, 10, 11, 64
Portugal/Portugis, 160, 223, 254, 371
Pos-behavioralis, xxviii
Post-truth, 511, 522
PR with Candidate-Centred, 462
Prabowo/Prabowo Subianto, xxxvi, 8, 191, 316, 317, 434, 521
Presidential Threshold/Pres-T, 384, 407, 464
Prijadi Praptosuhardjo, 47
Priyo Budi Santoso, 291
Puput Tantriana Sari, 402
Purbatjaraka, 221, 321, 425
Purnomo Basuki, 163
Puskapol UI, 313

Q
Qader Muheideen, 25
Quraisy, 26

R
RA Kosasih, 381
Raja Kami Sembiring Meliala, 80
Ramayana, 381
Ramlan Surbakti, 441, 462
Rashomon, xxii, xviii, xxxvii, 333
Ratu Atut Chosiyah, 401
Religi Tokugawa, 452
Renan/Ernest Renan, 233
Republik Rakyat China, 167
Resistance identity, 494
Restorasi Meiji, 223, 453
Richard Katz, 289
Richard Nixon, 276, 278
Ridwan Saidi, xxxix
Riri Riza, 218
Ritz Carlton, 348
Rizal Ramli, 47
Robert H Dahl, 439
Robert Huckshorn, 447
Robert N Bellah, 452
Robert W Hefner, 69
Rodrigo Duterte, 471
Romawi, 223
Rully Chairul Azwar, xlvii
Runciman/David Runciman, 435, 436, 437, 507
RUU TNI, 138, 139, 140, 180
Ryamizard Ryacudu, 112, 122, 157, 198
Rycko Menoza, 402

S
S Handoko, 231
S.E Finer, 68
Saddam Hussein, 232
Sahal Mahfudz, 16
Salahuddin Wahid, 170, 279, 523
Salim Said, xlvii, 2, 8
Sam Ratulangi, 494
Sampit, 73
Samson Rahman, 26
Sanusi Pane, 321, 425
SARA, 23, 173
Sartono Kartodirdjo, 452
Sejm, 448
Serat Lor, 445
Serat Wedatama, 453
Setgab Koalisi, xxxv
Setya Novanto, 509, 516
Sheikh Hasina, 264
Sherlock Holmes, 366, 367
Sherman Alexie, 406
Shin Corp, 240
Si Buta dari Gua Hantu, 382
Si Pitung, 382
Simón Bolívar, xli
Singapura, 167, 222, 240, 375
Sinyo Harry Sarundajang, 402
Sishankamrata, 181
Siswono Yudo Husodo, 170
Siti Hartati Murdaya, 125
SIUPP, 220
Sjachroedin ZP, 402
Sjahrir, 39, 397
Sjamsir Siregar, 241
Slamet Soebijanto, 198
Snyder/Jack Snyder, 494
Soe Hok Gie, 218, 219
Soedjatmoko, xxxvii
Soeharto/Pak Harto, x, xv, xxxv, 4, 6, 10, 42, 81, 88, 114, 127, 145, 153, 175, 198, 204, 218, 282, 283, 287, 317, 324, 325, 342, 520
Soeharto-sentris, 37
Soekarno/Bung Karno, 28, 30, 41, 42, 65, 66, 82, 210, 222, 246, 282, 283, 309, 317, 325, 337, 353, 397, 412, 437, 456, 503
Soetardjo Soerjoguritno, 242
Soetomo, 321, 425
Sofyan Djalil, 269
SOKSI, 251, 298
Solidarity maker, 65, 246, 412, 427
Solo, xxxvi, 44, 307, 308, 456
Sonthi Boonyaratglin, 253
Spanyol, 232, 458
Spirituality Yes, Religius Institution No, 33
Sri Asih, 381, 382
Sri Suryawidati, 402
St. Petersburg, 50
Stanley Lane Poole, 25
Steven A Cook, 370
Strategic power, 449
Suara Ibu Peduli, 90
Sugiharto, 269
Sukardi Rinakit, 173
Sulastomo, xlvii
Sulawesi Utara, 294
Sultan Hamengku Buwono IX, 357
Sultan Hamengku Buwono X, 191, 300, 301

Sumarsono, 163
Summit of World Muslim Leaders, 92
Sumpah Pemuda, 183, 184, 186, 187, 425
Sunan Kalijaga, 445
Surabaya, xxxiii
Suriah, 435, 436, 478, 484, 491
Surya Paloh, 148, 191, 280, 296, 434, 463
Susilo Bambang Yudhoyono/Yudhoyono/SBY, xxxv, xxxvi, xli, 167, 168, 173, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 190, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 209, 215, 216, 217, 218, 225, 226, 229, 230, 241, 256, 257, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 280, 291, 293, 296, 298, 299, 302, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 322, 323, 324, 324, 325, 326, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 349, 399, 402, 411
Sutan Takdir Alisjahbana/STA, xliv, 221, 237, 321, 425, 454, 455
Sutjipto Wirosardjono, xxxix
Syahril Sabirin, 44
Syahrul Yasin Limpo, 402
Syaifullah Yusuf, 269
Syamsu Djalal, 163
Syamsuddin Haris, 200
Syamsul Muarif, 251
Syncronised election, 470

T

T.B. Simatupang, 397
Takashi Shimura, xxxiii
Taksidermi, xxiv
Taman Ismail Marzuki, 224
Tan Malaka, 397
Tangerang Selatan, 401
Tap MPRS/XXV/1966, 40
Tari Pendet, 320, 322
Temasek, 240
Tempo, xxxix
Teten Masduki, 76
Thai Rak Thai, 239
Thailand, 25, 135, 239, 240, 241, 253, 254, 255, 343, 457, 459, 460
Thaksin/Thaksin Sinawatra, 239, 240, 241, 253, 254, 343
Thanongsak Tuvinun, 135
The American Dream, 237
The European Dream, 237
The Henry Dunant Centre, 135
The Independent, 264
Theo Syafei, 163
Theseus, 323
Third parties, 447
Thomas Hobbes, 232, 369, 437
Three-dimensional power, 439
Tifatul Sembiring, 213, 350
Tiga wajah partai, 251, 441
Timor Leste, 245, 247
Timor Timur, 14, 206, 325
Timur Tengah, 130, 371, 372, 435, 478, 484
Titi Anggraini, 463
Tjindarbumi, 425
TNI, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 66, 69, 73, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,

135, 136, 138, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 169, 180, 181, 182, 183, 197, 198, 199, 200, 204, 205, 206, 207, 230, 235, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Tommy Soeharto, 520
Toshiro Mifune, xxii, xxviii
Trickle down effect, 244, 376, 398, 506
Turgut Ozal, 456, 490
Turki, xliii, xlv, 286, 350, 370, 371, 456, 457, 459, 489, 490, 491, 492, 521, 523
Twitter, xxxix
Two-dimensional view of power, 439
Tyasno Sudarto, 35

U
UKP3R, 257
UKP-PIP, 496, 497
Umbulharjo, 356
Uni Eropa, 318, 371, 459
Uni Soviet, 90, 232
Universitas Cornell, 512
Universitas Gadjah Mada, xxiv, xxxix
Universitas Indonesia, xxiv, xxvii, xli, 271
Universitas Muhammadiyah Malang/UMM, xxiii, xxxvi, xliii
Universitas Nasional, viii, xxiv, xxvii, xxxix, xliii
Universitas Paramadina, 143
Usyamah Hisyam, 125
UUD 1945, xxxvi, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 117, 118, 139, 140, 169, 220, 237, 483

V
Virtual reality, 34
Vivere pericoloso, 393
VOC, 359

W
Wahid Hasyim, 332
Walubi, 125
Wanita Katolik Indonesia, 125
Wasior, 356
Widodo AS, 35, 38, 80, 81, 108, 197
Widya Kandi Susanti, 402
Winston Churchill, 160, 344, 368
Wiranto, 6, 8, 37, 81, 148, 167, 168, 170, 191, 197, 265, 279, 316, 317, 434
Wong cilik, 202, 203, 309
WTC, 92, 93

Y
Yenny Wahid, 288
Yogyakarta, xi, xxiv, xxxix , 28, 245, 248, 249, 261, 300, 350, 356, 357, 521, 522
Yomiuri Shimbun, 4
Yudi Latif, 496
Yuddy Chisnandi, 298
Yunani, xxviii, 55, 89, 323
Yunus Yosfiah, 163
Yusril Ihza Mahendra, 269, 464
Zainuddin MZ, 16
Zaman Kegelapan, 223
Zionis, 144●

DOKUMENTASI PENULIS

Tentang Penulis

MUHAMMAD ALFAN ALFIAN MAHYUDIN lahir di Klaten, 15 Februari 1973 sebagai anak tertua dari Bapak Muhtarul Buchori dan Ibu Marwanti. Ia menyelesaikan pendidikannya hingga program Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 2015 dengan disertasi mengenai militer dan politik di Turki yang telah dibukukan oleh *Penjuru Ilmu: Militer dan Politik di Turki* (2015 dan edisi baru, 2017). Ia pun dosen pada Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional serta dosen Pascasarjana (s-2) Ilmu Politik (menjadi Direktur Pascasarjana Ilmu Politik sejak 2015-kini) Fakultas Ilmu Sosial dam Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas), Jakarta.

Ia juga Direktur Riset dan Publikasi Akbar Tandjung Institute, Jakarta (sejak 2005-kini) [di lembaga ini, dia juga kepala Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa]; dan anggota Lembaga Pengkajian MPR (2014-2019). Ia banyak bergelut di organisasi. Ketika pelajar, ia anggota Pelajar islam Indonesia (PII). Kemudian ketika mahasiswa, aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga puncaknya sebagai Ketua Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Pengurus Besar HMI (LAPMI PB HMI). Setelah itu, aktif sebagai fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah (2005-2010 dan 2015-2020), dan Ketua Informasi dan Komunikasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), anggota Dewan Siyasah DPP Syarikat Islam. Dalam organisasi keilmuan, ia merupakan Pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) 2017-2019. Saat ini, ia juga bekerja sebagai Staf Khusus Menteri Sosial RI Dr. Idrus Marham (Mensos Idrus Marham dilantik Presiden Jokowi pada 17 Januari 2018).

Pendidikannya ditempuh di SMP Negeri 1 Polanharjo, Klaten (SMP ini ada di Desa Kauman); SMA 4 Surakarta; S-1 di Universitas Muhammadiyah Malang; S-2 di Universitas Nasional, Jakarta [pernah juga tercatat sebagai Mahasiswa S-2 MPKP UI dan S-2 Ilmu Politik UI, tetapi tidak sampai lulus, karena terbentur masalah biaya kuliah); dan S-3 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Pada 2000, bersama beberapa politisi muda Indonesia saat itu pernah diundang sebagai partisipan pada *The American Council of Young Political Leaders* (ACYPL) ke Amerika Serikat. Ia pernah menjadi *host* pada sebuah acara *talk show* di sebuah stasiun televisi swasta, menjadi narasumber seminar-seminar, mengisi latihan kepemimpinan di berbagai organisasi kemahasiswaan, hingga *workshop* kepemimpinan di partai-partai politik, pun memberi materi *wawasan politik untuk orang bisnis* (ekonom/eksekutif) di berbagai perusahaan swasta.

Pada 1998-2000 ia bekerja sebagai Tim Ahli Fraksi-Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) di DPR-RI. Selanjutnya pada 2003-2004 sebagai Tim Ahli Fraksi-Partai Golkar di DPR-RI, yang memperjumpakannya dengan para elite politik yang berperan penting dalam dinamika politik di indonesia pada masa transisi: Orde Baru ke Reformasi. Dalam dunia jurnalistik, ia pernah bekerja sebagai Wartawan Majalah *Properti Indonesia* (1996-1997) dan Dewan Redaksi Majalah *Amanah* (2000-2002).

Ia juga sering menulis artikel/opini di media massa, yang pada hakikatnya ia menulis secara otodidak. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di Harian *Kompas* (ia menulis artikel opini di harian ini pertama kali ketika masih mahasiswa s-1 di Universitas Muhammadiyah Malang pada 1994), *Seputar Indonesia*, *Koran Tempo*, *Republika*, *Kontan*, *Jawa Pos*, *The Jakarta Post*, *Media Indonesia*, *Suara Merdeka*, Majalah *Gatra*, Majalah *Sindo*, dan yang lain. Ia pernah aktif mengisi kolom di *antaranews.com* dan sejak 2000 hingga kini masih punya kolom tetap (*Pelita Hati*) setiap Jumat di Harian *Pelita*. Kolom ini cukup legendaris pada zamannya, ketika yang mengisi antara lain adalah Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid, selain juga yang lain [di mana saat ini yang menulis di rubrik ini adalah Sulastomo, KH Salahuddin Wahid, Amir Santoso, dan Nasaruddin Umar]. Ia juga punya kolom Jendela di *rilis.id* yang khusus mengulas buku-buku.

Ia juga mengelola Jurnal *Politika* (jurnal yang mengunggah tulisan-tulisan politik dan demokrasi) yang diterbitkan oleh *Akbar Tandjung Institute*. Pengalamannya menulis di berbagai media massa sejak mahasiswa, dituangkannya dalam buku *Bagaimana Saya Menulis, Pengalaman dan Tips Menulis Opini/Esai di Media Massa* (2015, 2016). Selain kontributor tulisan untuk beberapa buku, buku-buku karyanya yang diterbitkan *Penjuru Ilmu* selain buku ini:

Militer dan Politik di Turki (2015, 2018); *Istanbul, Geliat Kota Sejarah dan Turki Modern* (2015, 2018); *HAMKA dan Bahagia, Reaktualisasi Tasauf Modern untuk Zaman Kita* (2015); *Kitab Ketenteraman, Dari Khasanah Emha Ainun Nadjib* [ditulis dengan Wawan Susetya dan Aprinus Salam] (2015); *Bandit-bandit Segala Bidang, Esai-esai Politik dan Kebudayaan* (2016); dan *Rashomon dalam Politik Indonesia, Esai-esai Politik* (2018). Buku-buku lain karyanya, *Mahalnya Harga Demokrasi* (2002), *Menjadi Pemimpin Politik* (2009, 2010), *Kekuatan Pemimpin* (2012), *Demokrasi Pilihlah Aku* (2009, 2012), *Pemimpin yang Pelayan* (2010) dan Novel *Akulah, Beo!* (2012) dan *Manusia Beo* (2018), *HMI 1963-1966* (2013), *Bukan yang Terbesar, Memetik Hikmah Kisah Hidup Legenda Tinju Dunia Muhammad Ali* (2017), dan kumpulan cerpen Seorang Politisi yang *Mendadak Pergi di pagi Hari* (2017).

Dari Alfiasih, istrinya, penulis dikaruniai dua generasi penerus: M Alam Azizi dan Nur Izzah Ayuni. Penulis dapat dihubungi *via e-mail*: malfanalfian@gmail.com cc malfanalfianm@yahoo.com; *twitter* @alfanalfian; dan *Instagram* @malfanalfian; dan *Youtube*: M Alfan Alfian●

LENGKAPI KOLEKSI ANDA

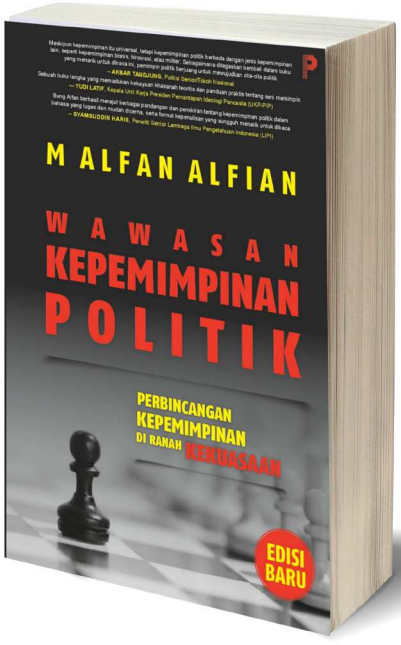

Buku ini wajib dikoleksi aktivis politik, terutama yang berkiprah di partai politik. Edisi kaver tebal 700 halaman ini komprehensif mengupas tema penting kepemimpinan politik

Tema militer dan politik selalu menarik. Diangkat dari disertasi penulisnya yang diperluas dengan mengambil kasus Turki, buku ini menjadi bacaan relevan di zaman kita

SEORANG
POLITISI
YANG MENDADAK
PERGI DI PAGI
HARI
KUMPULAN
CERPEN
M ALFAN ALFIAN

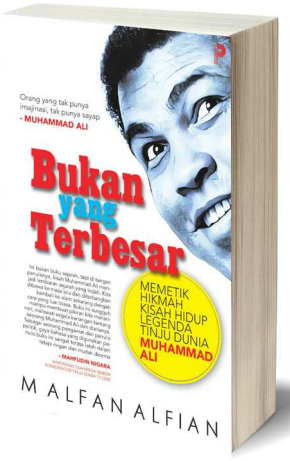
Orang yang tak punya
imajinasi, tak punya sayap
- MUHAMMAD ALI
Bukan
yang
Terbesar
MEMETIK
HIKMAH
KISAH HIDUP
LEGENDA
TINJU DUNIA
MUHAMMAD
ALI
M ALFAN ALFIAN

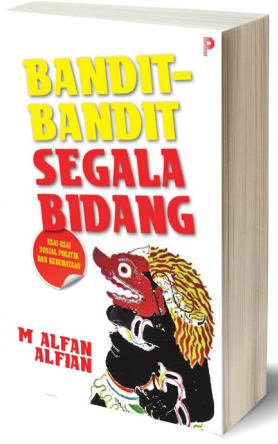
BANDIT-
BANDIT
SEGALA
BIDANG
M ALFAN
ALFIAN

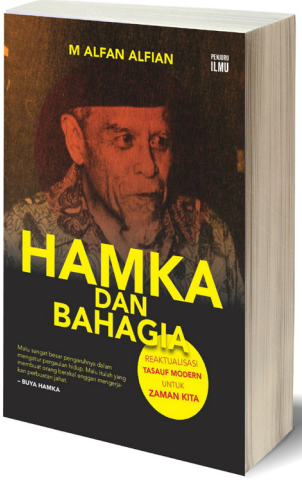
M ALFAN ALFIAN
PENERBIT
ILMU
HAMKA
DAN
BAHAGIA
REAKTUALISASI
TASAUF MODERN
UNTUK
ZAMAN KITA

Bagaimana
Saya
Menulis
M ALFAN ALFIAN

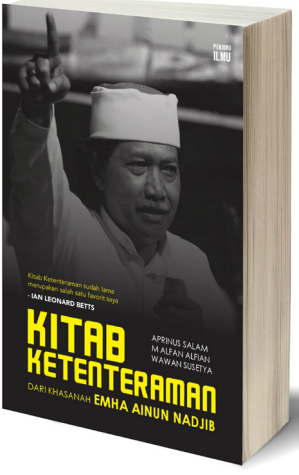
PENERBIT
ILMU
KITAB
KETENTERAMAN
APRINUS SALAM
M ALFAN ALFIAN
WAWAN SUSETYA
DARI KHASANAH EMHA AINUN NADJIB

Akbar Tandjung
Institute

BANYAK YANG berharap kebenaran yang terselip di hiruk-pikuk politik-kekuasaan tak melenceng jauh dari kebenaran sejati. Tapi pembenaran membuat kebenaran berversi banyak, bak *testimoni* para tokoh dalam cerpen Akutagawa Ryunosuke *Rashomon* yang dipopulerkan kembali melalui Film Akira Kurosawa (1950). Yang benar mendadak kabur. Yang salah, entahlah. Drama politik Indonesia seringkali seperti *Rashomon*. Buku ini mengulas tema sosial politik dan kebudayaan Indonesia sepanjang dua dekade sejak transisi pasca-1998. Melalui artikel-artikel di Harian *KOMPAS*, penulis berikhtiar, seringkali secara karikatural, memotret peradaban demokrasi dari sudut kepemimpinan, perilaku elite, kelembagaan dan budaya politik, berikut absurditasnya.●

Gagasan dan kritiknya segar dan inspiratif - **R. SITI ZUHRO**

Membaca Alfan Alfian, membaca sketsa politik Indonesia - **A. HELMY FAISHAL ZAINI**

Tajam dan seringkali mengejutkan - **AIMAN WITJAKSONO**

Memotret pasang surut usaha mencari keseimbangan politik - **NUR HIDAYAT SARDINI**

Memahami politik sebagai perjuangan kolektif keadaban publik berinteraksi dengan politik sebagai manifestasi pertarungan kuasa - **AIRLANGGA PRIBADI KUSMAN**

Referensi untuk melihat perjalanan politik Indonesia - **ARIF SATRIA**

Rekaman dinamika politik pasca-Reformasi - **A. IRMANPUTRA SIDIN**

Enak dibaca dari awal sampai akhir - **ANDI ACHDIAN**

Bagaikan menikmati "harta karun" yang tak ternilai - **HERNOWO HASIM**

Seolah membaca sebuah cerita roman yang mengasyikkan - **ENI SRI HARTATI**

DR. M ALFAN ALFIAN, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Direktur Riset dan Publikasi sekaligus Kepala Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa-Akbar Tandjung Institute dan Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS). Selain sering menulis artikel opini di media massa, dia menulis buku, antara lain *Wawasan Kepemimpinan Politik* dan *Militer dan Politik di Turki*.●

PENERBIT PENJURU ILMU
KHASANAH & PENCERAH

SOCIAL SCIENCE
ISBN 978-602-0967-04-2
9 786020 967042 >
Harga P. Jawa Rp.105.000,00